KOMUNIKASI POLITIK PADA KONFLIK INTERNAL PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI) ERA REZIM ORDE BARU (STUDI SEJARAH TENTANG PERISTIWA PENYERANGAN KANTOR DPP PDI PADA "27 JULI 1996")

POLITICAL COMMUNICATION IN THE INTERNAL CONFLICT OF INDONESIAN DEMOCRATIC PARTY (PDI) DURING THE ERA OF THE NEW ORDER REGIME (Historical Study of the Attack at the DPP PDI on 27th July 1996)

Oleh:

ARI SULISTYANTO
NPM :210130140024

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Komunikasi
Pada Universitas Padjadjaran
Dengan Wibawa Rektor Universitas Padjadjaran

Dipertahankan pada tanggal 2018
Di Universitas Padjadjaran

UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2018

KOMUNIKASI POLITIK PADA KONFLIK INTERNAL PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI) ERA REZIM ORDE BARU (STUDI SEJARAH TENTANG PERISTIWA PENYERANGAN KANTOR DPP PDI PADA "27 JULI 1996")

POLITICAL COMMUNICATION IN THE INTERNAL CONFLICT OF INDONESIAN DEMOCRATIC PARTY (PDI) DURING THE ERA OF THE NEW ORDER REGIME (Historical Study of the Attack at the DPP PDI on 27th July 1996)

Oleh

ARI SULISTYANTO
NPM :210130140024

DISERTASI
Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Komunikasi
Pada Universitas Padjadjaran
Dengan Wibawa Rektor Universitas Padjadjaran
Dipertahankan pada tanggal 9 Maret 2018
di Universitas Padjadjaran

Dr. Atwar Bajari, M.Si
Ketua Tim Promotor

Dr. Suwandi Sumartias, M. Si
Anggota Tim Promotor

Dr. Ari Junaedi, M. Si
Anggota Tim Promotor

Surat Pernyataan
(Program Doktor)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis disertasi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Padjadjaran maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat, atau dipublikasikan orang lain, kecuali dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademk berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi,

Bandung , 6 Januari 2018

Ari Sulistyanto

NPM 210130140024

DALIL-DALIL

1. Keterlibatan rezim Orde Baru dalam konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menyebabkan kekerasan politik.

2. Otoritas kharismatik menjadi modal penting dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

3. Komunikasi instrumental dalam bentuk untuk mendominasi akan menimbulkan resistensi.

4. Komunikasi yang menekankan pada pemahaman bersama akan menghindarkan pada berbagai dominasi.

5. Konsensus yang dibangun pada sistem politik yang hegemonik dan otoriter cenderung dilakukan dengan cara paksaan.

6. Solidaritas sosial bisa menjadi sarana untuk melakukan integrasi sosial.

7. Pendidikan politik yang menekankan pada rasionalisasi pemahaman akan membawa pada kedewasaan politik.

ABSTRACT

Ari Sulistyanto, NPM: 210130140024, Dissertation, 2018, Political Communication in the Internal Conflict of Indonesian Democratic Party (PDI) during the Era of the New Order Regime, Promoter Dr. Atwar Bajari, M.Si, Dr. Suwandi Sumartias, M. Si, Dr. Ari Junaedi, M. Si, Doctoral Program of Communication Sciences Padjadjaran University.

The research aims to reveal the reality of political communication in the internal conflict of Indonesian Democratic Party during the era of the new order regime. The political communication established intended to integrate the new order's political system. However, for PDI's members supporting Megawati, political communication was manifested through resistance or struggles with the political system of the new order regime. In addition, there were symbolical contestations in the internal conflict of PDI.

Employing qualitative method and historical approach, the research endeavors to disclose and interpret objectively the event considered. The data collection methods used is in-depth interviews, textual observation, and documentary analysis. The subjects of the research are the political actors who had involved with the PDI's internal conflict.

The result shows, firstly, that the history of Indonesia Democratic Party's internal conflict cannot be disentangled from the extreme dominant role of the new order regime. Since PDI was one of the subordinates of the political system in the new order regime, PDI's political movements apparently were impelled to adhere to and maintain the stability of the political system. Any deviation perceived which potentially could distort the order of the system was integrated quickly. Secondly, the integrations were manifested in the various forms, ranging from political violence, dividing and ruling strategy (devide et impera), to violent politics. Practically, political integration can be seen as dominating attempts, by having taken advantage of the high-context category of communication; and instrumental communication, meaning communication is merely an instrument to effectively accomplish the objectives planned. In this form of communication mentioned, labeling and persuasive communication were the main possible strategies utilized. Thirdly, in the struggle, PDI's members supporting Megawati internalized the value of social solidarity, turning out to be the normative instrument or habitus, to carry out social reproduction. From the perspective of coordinated action, social solidarity creates social integrity, while from the aspect of socialization, social solidarity emphasizes the identity by exhausting numerous forms of political communication, such as free speech stages, demonstrations, and publicities. In the political communication, those individuals were manifested in the low-context communication declared explicitly and directly. Low-context communication succeeded to be counter-culture against the high context communication exerted by the new order. Fourthly, symbolical contestations explain the behavior of the evil and the good. With this in mind, good behavior discovered friend working hand in hand with the heroism, namely the government of the new order. The good figure was represented by Pro-congress' PDI connoted with constitutional, legal, obedient, and politically legitimate party. By contrast, the evil figure was directed to Megawati's PDI considered as unconstitutional, illegal, cunning, and anarchist. Eventually, the good figure negotiated with the hero, which is ABRI, successfully yielding order and peace; and rescuing the country from anarchist movement conducted by PDI's member rooting for Megawati.

Keywords: political communication, internal conflict, integration, and struggle.

ABSTRAK

Ari Sulistyanto, NPM: 210130140024, Disertasi, 2018, Komunikasi Politik Pada Konflik Internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Era Rezim Orde Baru, Promotor Dr. Atwar Bajari, M.Si, Dr. Suwandi Sumartias, M. Si, Dr. Ari Junaedi, M. Si, Program Doktoral Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan realitas komunikasi politik dalam konflik internal politik Partai Demokrasi Indonesia era kekuasaan rezim Orde Baru. Komunikasi politik yang terbentuk, merupakan komunikasi politik untuk mengintegrasikan sistem kekuasaan politik rezim Orde Baru. Tetapi, bagi massa PDI pendukung Megawati, komunikasi politik dimanifestasikan dalam bentuk resistensi atau perlawanan terhadap sistem kekuasan rezim Orde Baru.

Melalui metode kualitatif dan pendekatan sejarah, penelitian berupaya mengungkapkan secara obyektif peristiwa tersebut dan mengintepretasikan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi teks dan analisis dokumen. Subyek penelitian adalah aktor-aktor yang terkait dengan konflik internal PDI.

Hasil penelitian menjelaskan, *pertama*, sejarah konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah rezim Orde Baru yang begitu dominan. . Ini karena PDI merupakan sub ordinasi dari sistem kekuasaan rezim Orde Baru. Oleh karenanya, dalam tindakan politiknya harus menyesuaikan dan ikut memelihara kestabilan sistem. Bentuk penyimpangan yang dianggap berpotensi untuk mengganggu keteraturan sistem secara cepat untuk diintegrasikan. *Kedua*, bentuk integrasi diwujudkan dalam bentuk, seperti politik kekerasan, politik pecah-belah-*divide et impera* dan kekerasan politik. Dalam prakteknya integrasi politik sebenarnya merupakan upaya untuk mendominasi, selalu menggunakan gaya komunikasi yang dapat dikategorikan konteks tinggi, dan merupakan bentuk komunikasi instrumental, yaitu komunikasi sekedar sarana dalam mencapai tujuan secara efektif. Dalam komunikasi instrumental, strategi komunikasi yang digunakan dengan menggunakan komunikasi persuasif, dan dengan cara *labeling*, *Ketiga*, dalam perlawanan massa PDI pendukung Megawati menginternalisasi nilai-nilai solidaritas sosial yang menjadi sarana normatif atau habitus untuk melakukan reproduksi sosial. Dari sisi kordinasi tindakan, solidaritas sosial menciptakan integrasi sosial. Sedang dari aspek sosialisasi, solidaritas menegaskan identitas dengan berbagai bentuk komunikasi politik, seperti aksi mimbar bebas, aksi jalanan dan aksi publisitas. Dalam komunikasi politik massa PDI pendukung Megawati di manifestasikan dalam budaya komunikasi konteks rendah yang secara ekplisit dinyatakan langsung. Bentuk komunikasi konteks rendah menjadi budaya tandingan terhadap bentuk komunikasi konteks tinggi yang dipraktekan Orde Baru.. *Keempat*, Dalam kontestasi simbolik, figur baik drepresentasikan oleh PDI Pro Kongres yang dikonotasikan sebagai konstitusional, legal, tertib dan mempunyai legitimasi politik. Sedangkan, figur yang jahat ditujukan pada kelompok PDI Megawati yang illegal, inkonstitusional, penuh muslihat, dan anarkhi. Figur baik akhirnya bernegosiasi dengan pahlawan, yaitu ABRI yang berhasil membuat ketertiban, kedamaian dan menyelamatkan negara dari tindakan anarkhi. Dalam kontestasi dalam pertarungan simbolik menjelaskan tentang perilaku yang jahat dengan yang baik. Perilaku yang baik menemukan kawan yang seiring dengan kepahlawanan, yaitu pemerintah Orde Baru. Kenyataanya dominasi yang dilakukan rezim Orde Baru tidak diinternalisasi dengan baik, justeru yang terjadi adanya perlawanan dari kelompok PDI Megawati dan kelompok masyarakat lain. Keadaan ini yang memaksa rezim Orde Baru untuk menggunakan cara kekerasan terhadap potensi yang mengancam stabilitas politik maupun status quo. Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan membubarkan kegiatan mimbar bebas dengan dalih pengambilalihan kantor DPP PDI yang masih dikuasai PDI Megawati.

Kata kunci : Komunikasi politik, konflik internal, integrasi dan perlawanan

KATA PENGANTAR

Bismilahiromnnirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas berkat dan karunialah penelitian dengan judul, "KOMUNIKASI POLITIK PADA KONFLIK INTERNAL PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI) ERA REZIM ORDE BARU (Studi Sejarah Tentang Peristiwa Penyerangan Kantor DPP PDI Pada "27 Juli 1996") ini mampu diselesaikan dalam bentuk naskah disertasi. Naskah disertasi ini merupakan salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar doktor pada bidang Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (FIKOM UNPAD)

Proses penelitian dan penulisan tidak akan mampu diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, terutama bimbingan dan arahan Tim Promotor yang telah memberikan masukan yang sangat substantif mulai dari judul, metode hingga teknik penulisannya. Begitu pula bantuan dari Tim Oponen Ahli yang telah memberikan masukan dan koreksiannya guna memperdalam dan mempertajam penulisan disertasi ini agar layak menjadi suatu karya ilmiah. Karena itu, dalam kesempatan ini pula dengan penuh penghormatan dan ketulusan hati penulis menghaturkan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Atwar Bajari, M. Si selaku Ketua Program Studi Doktoral Universitas Padjadjaran, sekaligus Ketua promotor di tengah-tengah kesibukanya masih meluangkan waktu untuk mencermati, menunjukan dan memberikan arahan, masukan serta saran perbaikan atas bebrbagai kesalahan substansif maupun kesalahan teknis dalam penulisan disertasi ini.
2. Dr. Suwandi Sumartias, M. Si., selaku anggota Tim Promotor yang selalau dengan tulus meluangkan waktunya dan perhatiannya dalam membimbing, mengarahkan maupun

mengkoreksi tulisan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.

3. Dr. Ari Junaedi, M. Si. sebagai anggota promotor dengan sabar menyediakan waktu, memberikan arahan dan memberikan masukan pada penulis serta kemudahan penulis untuk berdiskusi bahkan sejak disertasi ini masih berupa rancangan draft proposal penelitian.
4. Prof. Deddy Mulyana, MA, Ph.D., selaku Tim Oponen Ahli di tengah kesibukannya telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan koreksian, arahan, saran dan masukan untuk kesempurnaan penulisan disertasi ini.
5. Dr. Eni Maryani, M. Si., di tengah kesibukannya telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan koreksian, arahan, saran dan masukan untuk mempertajam penulisan disertasi ini.
6. Dr. Agus Rahmat, M. Pd. di tengah kesibukannya telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan koreksian, arahan, saran dan masukan untuk memperdalam kajian dalam penulisan disertasi ini.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Fikom Unpad), tempat penulis diperkenankan menempuh studi, terutama seluruh staf pendidik yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam setiap materi perkuliahan.
8. Para narasumber/informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai untuk mendapatkan data penelitian.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Mulyono (alm) dan Ibu Suharni (alm) yang telah membesarkan dan mendidik untuk tegar dalam menjalani kehidupan ini.
10. Kepada Rosmida, Raja, Kevin dan Putra dengan cinta dan kebersamaannya telah menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
11. Rekan mahasiswa doktoral angkatan 2014 yang saling membantu dan memberikan semangat.

Akhir kata, semoga dalam tulisan disertasi ini terdapat manfaat yang dapat digunakan untuk menambah sedikti pengetahuan seputar konflik internal PDI yang berujung pada peristiwa 27 Juli 1996, terutama menjadi refleksi untuk membangun kesadaran dalam komuniaksi yang pertisipasif dalam berpolitik. Semoga karya ini memberikan manfaat untuk kemajuan masyarakat. Terima kasih.

Jatinangor, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ……..... I

LEMBAR PENGESAHAN ……. II

LEMBAR PERNYATAAN ……. III

DALIL-DALIL…….. IV

ABSTRACT……. V

ABSTRAK…… VI

KATA PENGANTAR ……. VIII

DAFTAR ISI……. X

DAFTAR TABEL …… XIV

DAFTAR GAMBAR …… XV

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian……..... 1
1.1.1. Fokus Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian ……..... 13
1.1.1.1. Fokus Penelitian…….. ... 13
1.1.1.2. Pertanyaan Penelitian ……..... 14
1.1.2. Tujuan Dan Manfaat Penelitan……..... 14
1.1.2.1. Tujuan Penelitian …… 15
1.1.2.2. Manfaat Penelitian……. 16
1.2. Kajian Literatur……. 18
1.2.1. Landasan Teoritis .....…… 33
1.2.1.1. Teori Tindakan Komunikasi Habermas…… 37
1.2.1.2. Teori Praktik Sosial Bourdieu…… 48
1.2.2. Landasan Konseptual…… 55
1.2.2.1. Komunikasi Politik Dalam Prespektif Kritis…… 55
1.2.2.2. Konflik Dalam Perspektif Kritis…… 66
1.2.3. Kerangka Alur Pikir Penelitian…… 78
1.3. Metodologi…… 79
1.3.1. Metodologi Penelitian .....……. 70
1.3.2. Paradigma Penelitian……..... 81
1.3.3 Subyek Dan Obyek…..…… 84
1.3.4. Pendekatan Penelitian Sejarah..... 84
1.3.5. Pemilihan Sumber Data..... 87
1.3.6. Instrumen Penelitian……..... 88
1.3.7. Wawancara……. 88
1.3.8. Studi Dokumen…….. 94
1.3.9. Kriteria Keabsahan Penelitian…… 96
1.3.10.Analisa Data..…….. …. 96
1.3.11. Keterbatasan Penelitian …… 98

BAB II. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA DAN SEJARAH KONFLIK INTERNAL

2.1. Penyederhanaan Partai Politik Rezim Orde Baru……. 99
2.2. Konflik Dan Keterlibatan Rezim…… 107
2.3. Historitas Konflik Internal PDI ……. 113
2.4. Tragedi Seorang Aktor……...… 128
2.5. Pasca Kongres IV Medan…… 145
2.6. Menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) dan Megawati Sukarnoputri… 149
2.7. Kongres Luar Biasa (KLB) Di Surabaya……... 158
2.8. PDI Pasca Munas…… 172

BAB III. INTEGRASI POLITIK MODEL REZIM ORDE BARU

3.1. Pola Integrasi Rezim Orde Baru…… 182
3.2. Persiapan Penyelenggaraan Kongres IV Di Medan 1996……..... 184
3.3. Konsolidasi DPC Dan DPD PDI…… . 188
3.4. Penentuan Ketua Umum PDI……. 197
3.5. Pertemuan Politik Pasca Kongres IV PDI Medan…….. 205
3.6. Rencana Pengambilalihan Kantor DPP PDI……. 209
3.7. Garis Komando Penyerangan dan Pengerahan Massa……... 216
3.8. Kisah Penyerang Dari Kampung Kapuk…… 232
3.9. Pendanaan Pengambilalihan Kantor DPP PDI…….. 236
3.10. Akhir Drama Politik Rezim Orde Baru……. . 240

BAB IV. KONFLIK INTERNAL SEBAGAI ARENA PERLAWANAN TERHADAP REZIM ORDE BARU

4.1.Pembentukan Kesadaran Massa PDI Pendukung Megawati…… 247
4.1.1. Pemahaman Realitas Terhadap Rezim Orde Baru…… 248
4.1.2. Orientasi Kesadaran PDI Pendukung Megawati…… 257
4.2. Gotong Royong Sebagai Integrasi Sosial ……. 264
4.3. Komunikasi Politik Dalam Perlawanan Terhadap Rezim Orde Baru… 272
4.3.1.Panggung Demokrasi (Mimbar Bebas) Sebagai Media Perlawanan Terhadap Rezim Orde Baru……. 272

4.3.2. Aksi Di luar Panggung Demokrasi……..... 278
4.3.3. Aksi Publisitas: Penyebaran Selebaran Politik…… 284
4.4. Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)……. 299
4.5. Mempertahankan Keyakinan …… 303
4.5.1. Persiapan Dan Menghadapi Serangan ……. 303
4.5.2. Mempertahankan Kantor DPP PDI…….. 206
4.5.3. Kisah Sandra Fertasari Putri …… 310

BAB V. PERTARUNGAN SIMBOLIK DALAM KONFLIK INTERNAL PDI ERA REZIM ORDE BARU

5.1. Narasi Dalam Konflik Internal PDI ……. 318
5.2. Oposisi Biner Dalam Narasi Konflik Internal PDI …… 359
5.3. Habitus: Antara Kelompok Koperatif Dengan Non Koperatif …… 365
5.4. Modalitas: Antara Otoritas Legal Dengan Otoritas Kharismatik…….. 388
5.5. Dinamika Konflik Internal PDI……. 393

BAB VI. PEMBAHASAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM KONFLIK INTERNAL ERA REZIM ORDE BARU

6.1. Historitas Konflik Internal PDI Dan Keterlibatan Rezim Orde Baru.… 401
6.2. Stabilisasi Politik Rezim Orde Baru Dalam Konflik Internal PDI 408
6.2.1. Integrasi Politik Rezim Orde Baru……. 409
6.2.2. Komunikasi Budaya Konteks Tinggi Dalam Integrasi Politik Rezim Orde Baru…… 417
6.2.3. Komunikasi Instrumental Rezim Orde Baru Dalam Konflik Internal PDI…… 420
6.3. Komunikasi Politik PDI Megawati Dalam Perlawanan Terhadap Rezim Orde Baru …….. 427
6.2.1. Kesadaran Kritis……... 427
6.2.2. Solidaritas Sosial Sebagai Integrasi Sosial…….. 432

6.2.3. Komunikasi Politik Sebagai Bentuk Sosialisasi…….. 438
6.3.4. Budaya Komunikasi Konteks Rendah Dalam Perlawanan
Terhadap Rezim Orde Baru…… 441
6.3.5. Transformasi Dari Otoritas Kharismatik Menjadi Lembaga…… 443
6.3.6. Model Komunikasi Politik Massa PDI Pendukung Megawati…. 444
6.4. Pertarungan Simbolik Dalam Konflik Internal PDI…… 446
6.4.1. Model Komunikasi Politik Dalam Konflik Internal PDI……. 454
6.5. Refleksi dan Relevansi…….. 456
6.4. Implikasi Teoritis…….. 458
BAB VII. SIMPULAN DAN SARAN
7.1. Simpulan …… 465
7.2. Saran …….. . 469
7.2.1. Saran Teoritis…… 469
7.2.2. Saran Praktis……. 470
DAFTAR PUSTAKA…… 472
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I. Matrik Kajian Literatur…… 29
Tabel 2. Jenis-Jenis Tindakan…… 41
Tabel 3. Kompetensi Komunikasi…… 42
Tabel 4. Kronologi Konflik Internal PDI…… 124
Tabel 5. Narasi Dalam Konflik Internal PDI…… 357
Tabel 6. Tindakan (Habitus) Aktor……. 386
Tabel 7. Modal Aktor…….. 391
Tabel 8 Hubungan Antara Symbolic Power, Habitus dan Capital Power.. 449

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Doxa, Hetrodoxy, Orthodoxy……. 53

Gambar 2. Kerangka Pemikiran…… 78

Gambar 3. Akses Mendapatkan Informan……. 94

Gambar 4. Pengumuman Megawati Sebagai Ketua Umum PDI Pada KLB Surabaya 1993..... 165

Gambar 5 Perencanaan Dan Konsolidasi Kongres IV Di Medan…….. 204

Gambar 6 Penyerangan Kantor DPP PDI Pada Tanggal 27 Juli 1996…225

Gambar 7 Alur Komando Penyerangan kantor PDI…… 228

Gambar 8 Suasana Kantor DPP PDI pasca Penyerbuan…… 236

Gambar 9 Orientasi Kesadaran…… 264

Gambar 10 Megawati Berorasi Dalam Mimbar Bebas di Kantor DPP PDI…… 273

Gambar 11 Denah Halaman Kantor DPP PDI…… 274

Gambar 12 Selebaran I…… 286

Gambar 13 Selebaran II…… 288

Gambar 14 Selebaran III…… 290

Gambar 15 Selebaran IV…… 292

Gambar 16 Selebaran V…… 294

Gambar 17 Selebaran VI…… 296

Gambar 18 Selebaran VII…… 298

Gambar 19 Tema Aksi Publisitas…… 299

Gambar 20 Suasana Penyerangan Kantor DPP PDI…… 304

Gambar 21 Bentrok Di Depan Megaria Antara Masa PDI Dengan Aparat…… 309

Gambar 22 Pertarungan Simbolik Dalam Konflik Internal PDI…… . 322

Gambar 23 Pernyataan Pangab Jenderal Faisal Tanjung…… . 354

Gambar 24 Transformasi Metaforik Konflik Internal PDI 361

Gambar 25 Dinamika Politik Pra Kongres……. 398

Gambar 26 Dinamika Politik Pasca Kongres……. 399

Gambar 27 Historitas Konflik Internal PDI …….. 403

Gambar 28 Komunikasi Politik Dalam Konflik Internal PDI……. 407

Gambar 29 Model Strukturasi Rezim Orde Baru……... 425

Gambar 30 Model Komunikasi Dalam Stabilisasi Politik Rezim Orde Baru Dalam Konflik Internal PDI…… 426

Gambar 31 Orientasi Kesadaran…….. 429

Gambar 32 Model Komunikasi Politik PDI Megawati Dalam Perlawanan Pada Rezim Orde Baru……445

Gambar 33 Mitos Dalam Konflik Internal PDI…… 448

Gambar 34 Model Pertarungan Simbolik Dalam Konflik Internal PDI….. 453

Gambar 35 Model Komunikasi Politik dalam Konflik Internal PDI…….. 455

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada pagi hari pukul 06.45 tanggal 27 Juli 1996, terlihat 8 buah truck berwarna kuning yang membawa orang dengan menggunakan kaos berwarna merah yang diketahui sebagai PDI Pendukung Kongres Medan, kemudian terjadi lemparan batu antara kedua kelompok yang di dalam kantor DPP PDI dengan kelompok yang baru turun dari truck. Sementara massa pendukung Mega membalas lemparan itu dan terjadilah bentrok di depan Gedung DPP PDI, dan ini terus berlangsung sampai pukul 8.25 WIB.

Pada pukul 8.25 WIB lemparan batu antara kedua belah pihak tiba-tiba berhenti dan terjadi negoisasi antara anggota Satgas Megawati dan Kapolres dan Dandim. Saat itu komandan Satgas dipegang oleh Susilo Muslim, dan salah satu anggota Satgas PDI mencoba kontak dengan Megawati di kediaman dengan HP/Radio*Tracking* dan berhasil mendapatkan kontak dengan Megawati. Negoisasi gagal, akhirnya massa pendukung Soeryadi menerobos barikade anggota polisi dan masuk ke dalam terjadi lagi bentrok yang kedua yang lebih besar lagi. Pada serangan yang kedua, terlihat aparat keamanan yang mengganti bajunya dengan kaos merah PDI, dan langsung menyerbu masuk ke kantor DPP PDI. Akibat serangan yang kedua, massa pendukung Megawati terdesak dan mundur masuk ke kantor DPP PDI. Tidak beberapa lama kemudian kantor sudah dikuasai PDI Pro Kongres, dan massa pendukung PDI Megawati digiring keluar untuk diamankan. Pada saat itu pula, Buttu

Hutapea, Sekjen PDI Pro Kongres bersama DPP PDI Pro Kongres dan di sambut massa yang berkaos merah bertuliskan “Pendukung Kongres Medan”. Kemudian Buttu Hutapea diangkat ke atas, dan yang mengangkat Buttu Hutapea adalah Kol. Haryanto dengan mengenakan kaos merah membawa ke halaman Kantor DPP PDI. Di tempat itu pula ada Letkol Pol Abu Bakar, dan Lektol Rudi, Pabandya Intel Kodam yang juga berkaos merah.[1]

Di atas meja Buttu Hutapea berpidato, kemudian menyerahkan kunci pada Letkol Abu Bakar dan menyatakan kantor DPP PDI dalam posisi *status quo*. Tetapi di sisi lain, massa pendukung Megawati yang mendengar pengambilalihan mulai berdatangan ke Jl Diponegoro untuk merebut kembali kantor. Bentrok sering terjadi antara massa pendukung PDI Megawati dengan aparat keamanan yang mempertahankan kantor DPP PDI. Siang harinya, dengan jumlah aparat keamanan yang lebih besar membubarkan kerumunan massa yang terkonsentrasi di Jl. Diponegoro dan Megaria, pada saat itu juga terjadi aksi pembakaran Gedung yang ada di sekitar Jl. Diponegoro, Jl Salemba dan Jl Pramuka. Peristiwa itulah yang kemudian disebut dengan “peristiwa Sabtu kelabu” atau “atau peristiwa 27 Juli”.

Melacak terjadinya “peristiwa 27 Juli“ berawal dari adanya konflik antara PDI pendukung Megawati dengan PDI Pro Konggres. Kepengurusan DPP PDI Megawati yang merupakan hasil Munas 1993 dianggap tidak akomodatif dengan pemerintah. Ini terlihat dari konflik kepengurusan DPD

[1] BAP Direktorat Reserse Umum Polri

PDI Jawa Timur antara DPD PDI pimpinan Sutjipto dengan DPD PDI yang didukung Megawati dengan pimpinan Latief Pudjosakti yang belakangnya adalah aparatur pemerintah, yaitu Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur. Dalam perkembangannya, konflik bergeser seolah konflik antara Megawati dengan Basofi Sudirman.

Dampak dari konflik tersebut, kosongnya wakil PDI dalam Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I dan Panswaslak I, hanya DPD PDI Jawa Timur yang belum mengirimkan wakilnya di lembaga pemilihan umum tersebut. Kondisi ini dianggap bisa mencoreng kewibawaan pemerintah Orde Baru, karena ada satu daerah yang terancam tidak bisa menyelenggarakan pemilu. Padahal, penyelenggaraan pemilu tinggal beberapa bulan lagi. Demikian pula di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sesuai dengan amanat Munas belum terbentuk Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dan Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu). Di samping terjadi pengelompokan diantara fungsionaris DPP PDI. Ada kelompok fungsionaris yang berpihak pada Megawati dan kelompok yang berseberangan.

Berbagai persoalan tersebut kemudian adanya inisiatif dari beberapa DPC dan DPD PDI seluruh Indonesia mendorong untuk diselenggarakan kongres. Inisiatif itu juga didukung oleh beberapa fungsionaris DPP PDI, yang kemudian menamakan dengan “kelompok 16” yang dipimpin oleh Fatimah Achmad. Desakan itu terus bergulir, yang kemudian dilanjutkan dengan

pembentukan panitia kongres, dengan Ketua Panitia Fatimah Achmad dan Sekretaris Ismunandar.

Sikap pemerintah dengan adanya dorongan kongres tersebut adalah mendukung karena inisiatif dari berbagai perwakilan DPC dan DPD PDI itu sudah sesuai dengan konstitusi partai. Oleh karena itu tidak ada alasan, pemerintah tidak memberikan ijin dan membantu penyelenggaraan kongres. Akhirnya, kongres berlangsung pada tanggal 20-24 Juni 1996 di Medan, dan berhasil membentuk kepengurusan DPP PDI dengan Ketua Umum Soeryadi dan Buttu Hutapea sebagai Sekjen.

Reaksi Megawati adalah menentang terhadap penyelenggaraan kongres tersebut dan menuduh kongres tersebut merupakan rekayasa dari penguasa. Sikap Megawati mendapat dukungan luas, baik dari Jakarta maupun daerah dengan menggelar berbagai aksi, bahkan sampai pada pendudukan kantor DPC maupun DPD PDI. Di Jakarta massa pendukung Megawati mengelar aksi jalanan dan juga penguasaan terhadap kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro N0.58.

Pasca kongres IV Medan, penolakan terhadap kongres bukan semakin mereda. Aktvitas di depan kantor DPP PDI makin meningkat dengan adanya pendirian “mimbar bebas” oleh massa pendukung PDI Megawati. Di samping itu juga, mereka juga menggelar aksi jalanan. Boleh dikata, setiap hari sekitar jalan Diponegoro riuh dengan aksi mimbar bebas dan aksi jalanan yang digelar massa PDI pendukung Megawati.

Isu-isu yang digulirkan bukan lagi sekedar menghujat terhadap aktor-aktor PDI Pro kongres melainkan juga mulai mengkritisi pemerintah Orde Baru. Dengan demikian, aksi-aksi yang dilakukan juga merupakan bentuk perlawanan terhadap rezim yang berkuasa, sehingga konflik bergeser tidak lagi konflik internal antara PDI Pro Kongres dengan PDI pendukung Megawati, melainkan PDI pendukung Megawati dengan pemerintah Orde Baru.

Dukungan lain terhadap massa PDI pendukung Megawati datang dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kemudian membentuk suatu aliansi yang diberi nama Majelis Rakyat Indonesia (MARI). Mereka melakukan tuntutan terhadap pemerintah Orba dengan Caturtura (empat tuntutan rakyat). Dengan demikian aksi-aksi berkembang kian hari makin masif. Untuk mengendalikan agar tidak kehilangan legitimasi, aksi mimbar bebas harus dihentikan. Untuk itu dengan dalih pengambilalihan kantor DPP PDI, para pendukung PDI yang dibantu aparat keamanan melakukan penyerangan terhadap massa PDI pendukung Megawati. Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan peristiwa “27 Juli”.

Peristiwa tersebut, merupakan peristiwa masa lalu. Tetapi pada kondisi seakarang, peristiwa terssebut masih menyisakan persoalan, yaitu tuntutan dari para korban 27 Juli pada pemerintah untuk menuntaskan kasus tersebut. Hal ini terlihat dari setiap tanggal 27 Juli diadakan peringatan sekaligus juga tuntutan dari para korban untuk menuntaskan. Pemerintah sendiri, ketika awal

kampanye pada tahun 2014, presiden terpilih Jokowi berjanji untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Kendati demikian, peristiwa ini menarik karena konflik internal PDI 1996, boleh jadi berbeda dengan konflik sebelumnya. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda. *Pertama,* pada konflik-konflik sebelumnya, kelompok yang tersingkir biasanya akan tenggelam seiring dengan dinamika partai, tetapi dalam konflik ini justeru kelompok yang tersingkir berubah menjadi kekuatan oposisi yang mengancam posisi status *quo rezim*. *Kedua,* keterlibatan akar rumput yang makin meluas. *Ketiga,* ada keterlibatan pihak luar PDI yang memanfaatkan arena konflik untuk mendorong adanya perubahan politik.

Konflik internal PDI yang berpuncak pada peristiwa 27 Juli 1996, menjelaskan beberapa hal, *pertama*, adanya peran sentral dari rezim dalam konflik internal yang diposisikan sebagai upaya mengintegrasikan kekuasaan politik agar *political order* untuk mempertahankan *status quo* bisa terjaga. *Kedua,* adanya transisi kesadaran bahwa konflik internal dimaknai sebagai upaya membangun kesadaran dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru. *Ketiga,* konflik internal yang berlangsung di Partai Demokrasi Indonesia (PDI), adalah arena pertarungan bagi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik untuk memproduksi wacana dalam memperoleh legitimasi politik. Masing-masing aktor berusaha untuk menstruktur arena sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya.

Permasalahnya, integrasi sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan yang harusnya didasarkan pada kerelaan dan keterbukaan, kenyataanya ada kepentingan yang disembunyikan, bahkan integrasi bisa dilakukan dengan paksaan atau kekerasan. Konflik internal yang berlangsung di PDI merupakan persoalan legitimasi. Budaya "kebulatan tekad" yang selalu dipraktekan rezim Orde Baru membutuhkan seluruh komponen masyarakat untuk mendukung tanpa ada sedikitpun yang menentang. Potensi yang mengganggu atau menentang budaya "kebulatan tekad" tersebut bisa dianggap menciderai tradisi tersebut. Oleh karena itu potensi acaman yang menganggu akan dintegrasikan sedemikian rupa, sehingga tampak dipermukaan sebagai legitimasi yang alamiah.

Itu sebabnya, konflik internal partai politik terjadi karena adanya potensi dari kepemimpinan yang dianggap tidak akomodatif lagi dengan keinginan penguasa, yang dianggap menggangu legitimasi yang hendak dipaksakan penguasa. Dengan demikian, konflik internal partai politik menjadi arena suksesi untuk menyingkirkan tokoh atau figur yang menyimpang dan merangkul pemimpin yang bisa dikendalikan. Dalam arena suksesi kepemimpinan ini, kadangkala dilakukan di luar struktur "legal rasional" pemerintah dengan melibatkan agen-agen negara. Dengan demikian, konflik internal di permukaan kelihatan sebagai suatu yang alamiah karena perbedaan kepentingan para aktor. Tetapi, hal ini tentu berbeda dengan keadaan di dalam yang merupakan upaya dari rezim untuk mengintegrasikan atau

menstabilisasikan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan yang melibatkan agen-agen negara.

Oleh karena hal yang menarik dikaji dalam penelitian ini adalah mengungkap bagaimana komunikasi politik dalam integrasi politik yang dilakukan rezim Orde Baru dalam menstabilkan sistem kekuasaan dalam kaitanya dengan konflik internal PDI. Integrasi bisa dilakukan dengan cara simbolik dan non simbolik. Begitu pula, bentuk integrasi yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung akan berhadapan dengan resistensi atau perlawanan yang terstruktur dalam tindakan komunikasi, dan konflik menjadi arena pertarungan simbolik untuk memperebutkan legitimasi politik.

Ada banyak penelitian terkait dengan tema dan fokus penelitian ini, yang terbagi dalam tiga aspek. *Pertama,*sistem politik yang otoriter dan resistensi terhadap sistem tersebut. *Kedua,* konflik partai dan *ketiga,* berkaitan dengan konflik internal PDI dan kaitannya dengan peristiwa 27 Juli 1996.

Penelitian yang di lakukan oleh Linnea M. Beatty (2011), penelitian ini menggambarkan, Pemerintah diktator Burma mempertahankan kekuasaannya dengan dobel standar, yaitu dengan dengan cara kekerasan maupun non-kekerasan. Penelitian yang di lakukan Justyna Kajta(2015). Fokus penelitian ini pada gerakan nasionalis di Polandia, yaitu bagaimana mereka mengkonstruksi identitas dan tujuan gerakan nasionalis. Penelitian Yavuz Yildirim (2104). Fokus penelitian ini memfokuskan pada gerakan perlawanan yang di lakukan akar rumput yang berbeda dengan tipe gerakan sebelumn

perubahan sosial. Gezi Parki dapat dilihat sebagai langkah besar untuk membentuk suatu sistem politik baru Turki dari bawah-ke-atas. Studi ini memiliki kerangka pada semakin pentingnya politik terhadap peran konstitutif gerakan sosial. Dalam kasus Gezi Parki, orang-orang Turki telah menciptakan kerangka gerakan politik mereka sendiri.

Penelitian lain yang berkaitan dengan konflik internal PDI, seperti adanya unsur luar dalam peristiwa 27 Juli 1996, yaitu keterlibatan militer dalam peristiwa tersebut dan merupakan hasil politik konspirasi. (Ikrar Nusa Bakti, 1999, Stefan Eklöf, 1999, 2003, D. Yatman, 2001). Studi yang lain, menjelaskan tentang analisis pemberitaan, khususnya surat kabar tentang peristiwa tersebut. Kecenderungan pemihakan terhadap pemberitaan peristiwa tersebut, bahwa posisi media massa tidaklah netral, terdapat nilai-nilai tertentu yang diemban oleh media massa tersebut. (Ramon, 2009, Agus Trilaksana, 2015). Sedangkan tema yang berhubungan dengan pendekatan konflik, seperti konflik politik dalam pemilihan lokal di Malaysia.

Hanya sedikit riset yang membahas konflik internal partai politik sebagai bentuk integrasi rezim dan sebaliknya perlawanan atau resistensi terhadap rezim itu sendiri. Padahal dengan pemahaman terhadap integrasi maupun resistensi akan mampu menjelaskan narasi yang tersembunyi dibalik peristiwa tersebut. Peristiwa itu terjadi bukanlah sekedar karena hukum aksi-reaksi, melainkan diasumsikan adanya kronologi dari skenario dari rezim Orde Baru untuk melakukan *political order* agar posisi *status quo* terus berlangsung.

Melalui pendekatan kritis, penelitian ini berusaha mengungkap bentuk integrasi politik yang dilakukan rezim Orde Baru yang dimanifestasikan dalam kepentingan tersembunyi melalui pemroduksian wacana-wacana simbolik maupun non simbolik. Kenyataannya, integrasi yang dilakukan menimbulkan resistensi atau perlawanan yang berujung pada kekerasan politik.

Dalam perspektif teoritis, penelitian ini berusaha untuk memperluas kajian dari teori tindakan komunikasi Habermas. Dalam paradigma kritis, kekuasaan rezim Orde Baru merupakan representasi dari sistem telah mengkolonisasi kehidupan dunia*(lebenswelt)* sedemikian rupa. Sistem yang menggurita dalam kekuasaan politik Orde Baru, membebaskan imperatif sistem yang meruntuhkan kapasitas dunia kehidupan yang mereka instrumentasikan. Ia melihat kekerasan yang dihasilkan sistem membatasi dunia kehidupan *(lebenswelt)* dengan komunikasi. Dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan sistem telah mengganggu mekanisme reproduksi kultural dunia kehidupan. (Habermas:1975:155).

Dalam *lebenswelt*-dunia kehidupan representasi masyarakat yang direpresentasikan sebagai jaringan kerjasama yang diperantarai oleh komunikasi (Habermas:2007:202) Narasi besar yang hendak dikedepankan dalam masyarakat ini adalah tatanan masyarakat yang demokratis terbebas dari dominasi. Para pendukung Megawati dan aktivis lain adalah pengusung narasi besar. Tetapi dorongan untuk melakukan reproduksi kultural terhambat dengan kekerasan politik yang dilakukan oleh sistem politik Orde Baru.

Pada saat pembentukan teori tersebut, Habermas berpijak pada realitas tahap awal perkembangan masyarakat kapitalis (borjuasi) yang masih mengakomodir adanya kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Di samping itu, subyek atau pelaku dalam masyarakat yang digambarkan Habermas adalah masyarakat yang terdidik dan otonom, sehingga dunia kehidupan (*lebenswelt)* masih mempunyai ruang untuk melakukan reproduksi kultural. Tetapi, bagaimana apabila sistem yang berkembang adalah tatanan yang mendominasi, bahkan seperti yang digambarkan Herbert Marcuse adalah sistem yang mampu mengintegrasikan semua potensi oposisi. Oleh karenanya penelitian ini adalah menelaah perjuangan aktivitas kelompok politik yang termarginalkan oleh sistem yang represif untuk mengembangkan dunia kehidupan *(lebenswelt*). Dengan demikian, penelitian ini akan mendeskripsikan model tindakan komunikasi dalam sistem masyarakat yang represif.

Begitu pula dalam perspektif teori praktek sosial, Bourdieu (23:1975) menegaskan, "*symbolic power is the power to make things with words.* Hal tersebut menjelaskan bahwa aktor dalam menegaskan dominasi terhadap dunia sosial melalui bentuk komunikasi. *Symbolic power* bukanlah bentuk dominasi yang diterapkan melalui komunikasi, tetapi penerapan dominasi melalui komunikasi yang tidak diakui sebagai suatu yang legitimate. (dalam Thompson:99:2010) Artinya, komunikasi dengan kata-kata menempati posisi penting bagi aktor dalam menstruktur arena.

Dalam penjelasan tersebut, Bourdieu berpijak pada tatanan masyarakat yang terbuka, demokratis yang memberikan keleluasaan masing-masing aktor untuk berkompetisi membentuk arena. Keadaan ini, tentu berbeda dengan tatanan masyarakat yang hegemonik dan represif, yang mana dominasi arena masih dalam pengendalian aktor yang berkuasa maka ketika ada kekuatan oposisi dan mengacam dominasi aktor, adanya bentuk lain yang dilakukan dalam menstruktur arena, yaitu dengan kekerasan. Oleh karena itu kajian ini juga akan memperluas konsep *symbolic power* Bouredieu.

Penelitian ini penting sebagai refleksi kritis bagi para pemangku kekuasaan, para politisi, khususnya, dan masyarakat pada umumnya, bahwa struktur kekuasaan dominan dan represif melahirkan sub ordinasi yang terdominasi berakibat pada bentuk-bentuk resistensi dari berbagai elemen masyarakat, yang berujung pada ketidakstabilan sistem. Oleh kafrena itu, penataaan sistem yang mengaktualkan pada nilai-nilai kesetaraan dan kedaulatan, hendaknya menjadi pedoman dalam penataan masyarakat.

Melalui kajian terhadap konflik internal politik dalam era rezim Orba, penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan bahwa dengan realitas yang dominan dan represif masih ada ruang bagi aktivitas politik untuk mengembangkan kesadaran politik dalam upaya tranformasi maupun emansipasi. Pengembangan kebudayaan baru, bukanlah dominasi dari kelas yang berkuasa, melainkan bisa lahir dari kelompok atau individu yang termarginalkan.

.

1.1.1. Fokus Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian

1.1.1.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan mengungkapkan realitas komunikasi politik dalam konflik internal politik Partai Demokrasi Indonesia dalam era kekuasaan Orde Baru. Oleh karenanya dalam memahami realitas secara obyektif (level makro), latar belakang atau sejarah yang menyebabkan konflik, dominasi kekuasaan politik, wacana-wacana politik yang dikembangkan dalam konflik internal merupakan realitas empris yang berkaitan dengan pemahaman secara subyektif (level mikro) tentang makna, motivasi, dan solidaritas maupun identitas yang hendak dibentuk oleh pihak yang terdominasi (*marginal*) dengan struktur-struktur politik Komunikasi politik dalam konflik internal partai politik yang berlangsung bukan sekedar dimaknai sebagai konflik antara PDI pendukung Megawati melawan PDI Pro Kongres, melainkan konflik, di satu sisi sebagai bagian dari rezim untuk melakukan integrasi politik, baik dalam penggunaan wacana simbolik maupun non simbolik. Di sisi lain, adalah upaya perlawanan terhadap integrasi tersebut. Konflik internal adalah realitas luar yang terbentuk karena adanya kepentingan para aktor yang berada pada panggung belakang kekuasaan. Dengan demikian, yang nampak adalah kekuasaan merupakan realitas politik yang terbentuk dalam pola dan sistem kekuasaan dan kewenangan yang relatif stabil, tetapi di balik realitas stabil tersebut tersembunyi kekuatan yang bersifat laten ataupun manifes untuk

mendominasi, memanipulasi dan mengkomodifikasi dengan nilai-nilai tertentu.

Seiring dengan pendekatan kritis, yang bertujuan untuk mengkritik dan mengubah hubungan sosial dengan cara mengungkapkan sumber-sumber yang mendasari kontrol sosial, hubungan kekuasaan dan kesetaraan, dengan mengungkap mitos dan kebenaran yang tersembunyi akan membantu mereka yang termarginalkan.(Neuman:2013:124) Berangkat dari hal tersebut, penelitian mengasumsikan bahwa adanya variasi kepentingan ideologi yang termanifestasikan dalam tindakan politik para aktor yang terlibat konflik, dan konstruksi wacana dari aktor untuk melegitimasi tindakannya yang merupakan narasi besar terbentuknya konflik internal.

1.1.1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka dapat di rumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah konflik internal Partai Demokrasi Indonesia pada era Rezim Orde Baru (PDI)?
2. Bagaimana rezim Orde Baru dalam melakukan integrasi politik pada konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI)?
3. Bagaimana massa PDI pendukung Megawati dalam melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru pada konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ?

4. Bagaimana pertarungan simbolik dalam memperebutkan legitimasi politik pada konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

1.1.2. Tujuan Dan Manfaat Penelitan

1.1.2.1. Tujuan Penelitian

Tema utama dalam penelitian ini adalah konflik internal PDI dalam kekuasaaan pemerintah Orde Baru. Melalui pendekatan historis, di samping untuk mengkonstruksi kronologi peristiwa, penelitian ini juga mengkaji struktur yang menyebabkan terjadinya peristiwa.

Tujuan dari penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

- Deskripsi tentang sejarah konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada era Rezim Orde Baru.
- Mengkaji tentang integrasi politik yang dilakukan rezim Orde Baru dalam konflik internal PDI, yaitu integrasi dengan mengkonstruksi wacana menjelang kongres dan integrasi pasca kongres. Dengan demikian akan terbentuk model integrasi politik rezim Orde Baru.
- Mengkaji konflik internal PDI dimaknai oleh massa PDI pendukung bukan sekedar konflik dengan PDI Pro Kongres melainkan juga merupakan bentuk perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang direpresentesikan dalam bentuk komunikasi politik. Dengan demikian penelitian ini akan menawarkan suatu model tindakan komunikasi dalam struktur kekuasaan politik yang represif.

- Menganalisis pertarungan simbolik dalam konflik internal PDI. Dalam konteks yang akan dianalisis adalah mengenai habitus maupun modal yang yang dimiliki masing-masing aktor dan berpengaruh terhadap dinamika komunikasi politik dalam konflik internal PDI .

1.1.2.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

a. Teoritis

Penelitian ini akan mengkaji konflik internal PDI dengan kasus pada penyerangan kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996. Konflik dalam perspektif teori kritis adalah kontradiksi antara *lebenswelt*-dunia kehidupan dengan sistem. Representasi dari *lebenswelt* adalah PDI pendukung Megawati dengan aktivis politik lainya, sedangan representasi dari sistem adalah PDI Pro Kongres dan aparatur Orde Baru. Konflik internal PDI, dalam perspektif teori tindakan komunikasi Habermas adalah bentuk dari patologi yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat. Komodifikasi politik yang dilakukan rezim Orde Baru telah menyebabkan krisis atau patologis. Dunia kehidupan, bagi Habermas adalah hasil bentukan dari relasi para aktor yang hidup berdampingan dalam tradisi budaya yang sama melalui tindakan komunikasi. Mereka adalah aktor-aktor yang terbentuk secara interaktif melalui tindakan komunikasi untuk mengembangkan reproduksi budaya, dan merupakan sumber tindakan komunikasi.

Dalam perspektif teoritis, penelitian ini berusaha untuk memperluas kajian dari teori tindakan komunikasi Habermas. Dalam perspektif kritis, institusi PDI Pro Kongres dan aparatur rezim Orde Baru merupakan representasi dari sistem telah mengkolonisasi kehidupan dunia(*lebenswelt*) sedemikian rupa, yaitu PDI pendukung Megawati dan aktivis politik lain. Dalam *lebenswelt*-dunia kehidupan representasi masyarakat yang diwujudkan sebagai jaringan kerjasama yang diperantarai oleh komunikasi, dengan hubungan strategis dan keruntuhan yang terselip di dalamnya. (Habermas:2007:2002) Narasi besar yang hendak dikedepankan dalam masyarakat ini adalah tatanan masyarakat yang demokratis terbebas dari dominasi. PDI pendukung Megawati dan aktivis adalah pengusung narasi besar untuk melakukan tindakan komunikasi. Tetapi dorongan untuk melakukan narasi reproduksi kultural terhambat dengan "kekerasan politik" yang dilakukan oleh PDI Pro Kongres dan aparatur Orde Baru.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberi sumbangan teoritis terhadap bagaimana penerapan teori tindakan komunikasi pada kelompok yang terpinggirkan baik secara politik, ekonomi, maupun sosial dalam menegaskan identitas mereka.

b. Praktis

Melalui penelitian ini, di harapkan menjadi referensi untuk melakukan refleksi kritis bagi para pemangku kekuasaan, para politisi,

khususnya, dan masyarakat pada umumnya bahwa struktur kekuasaan hegemonik melahirkan sub ordinasi yang terdominasi berakibat pada bentuk-bentuk resistensi dari berbagai elemen masyarakat, yang berujung pada ketidakstabilan sistem. Oleh karenanya penataaan sistem yang mengaktualkan pada nilai-nilai kesetaraan dan kedaulatan, hendaknya menjadi pedoman dalam penataan masyarakat.

1.2. Kajian Literaur

Penelitian ini berusaha menggali tentang komunikasi politik dalam konflik internal dalam Partai Demokrasi Indonesia pada era rezim Orde Baru, dengan mengambil kasus pada penyerangan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Kasus ini menarik, karena konflik bukan sekedar dipahami sebagai kontradiksi kepentingan antar kelompok, melainkan konflik internal dimaknai sebagai momentum membangun kesadaran dalam melakukan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa yang kemudian mencapai puncaknya ketika lengsernya Presiden Suharto pada Mei tahun 1998.

Dalam penelitian ini, konflik internal PDI dilihat sebagai pertarungan antar aktor dengan berbagai kepentingan, baik aktor yang berada dalam kubu PDI pendukung Megawati maupun PDI Pro Kongres serta aktor yang merupakan aparatur rezim Orde Baru. Itu sebabnya penelitian ini difokuskan pada integrasi politik yang dilakukan rezim dan wacana-wacana yang dikembangkan para aktor yang terlibat untuk melegitimasi tindakan politiknya, serta arena konflik sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim.

Oleh karena itu dalam kajian pustaka dan literature akan di bahas terhadap penelitian yang mempunyai relevansi baik dari segi tema, teori ataupun metode. Dalam kajian literatur terbagi dalam tiga tema, yaitu konflik politik, keterkaitan teori, dan analisis pada pemberitaan media massa.

a. Penelitian terdahulu untuk disertasi yang di lakukan oleh Linnea M. Beatty (2011) disertasi pada George Washington University, dengan judul, "*Challenge and Survival: Political Resistance in Authoritarian Burma"*. Penelitian ini menggambarkan bahwa pemerintah diktator Burma mempertahankan kekuasaannya dengan dobel standar, yaitu dengan dengan cara kekerasan maupun non-kekerasan. Protes terhadap penguasa sering di lakukan sejak pengambil alihan oleh pemerintah militer pada tahun 1962. Protes besar-besaran terjadi di setiap dekade sejak pengambil-alihan militer pada tahun 1962, yang terbaru adalah protes para biksu pada bulan September 2007.

   Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana oposisi mempertahankan kemampuan mereka untuk menantang sebuah negara otoriter dalam waktu yang relatif lama? Kondisi otoriter mengharuskan bahwa gerakan oposisi menolak dengan memanfaatkan dua imperatif: menantang rezim dan memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Bentuk perlawanan di Burma meliputi perlawanan secara ofensif dan tantangan secara defensif untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

Dengan pendekatan studi kasus, pada aktivis politik di bawah rezim otoriter. Penelitian menyimpulkan Pemerintah otoriter di Burma mencoba untuk menghilangkan oposisi terhadap kekuasaannya dengan menggunakan politik represi dan kontrol sosial. Di sisi lain, oposisi, menantang pemerintah menggunakan strategi perlawanan dengan non-kekerasan maupun kekerasan. Bentuk perlawanan di wujudkan dalam resistensi setiap hari, tindakan institusional politik, protes dan persuasi, non-kooperasi, dan intervensi tanpa kekerasan. Sedangkan, perlawanan bersenjata tetap pilihan lain untuk menekan klaim terhadap negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup adalah penting dan menjadi kunci dari gerakan oposisi.

b. Penelitian yang di lakukan Justyna Kajta(2015*) Institute of Sociology, University of Wrocław,* dengan judul, *Biographical-narrative interviews in social movement research: A case of Polish nationalist movement.* Penelitian ini berfokus pada gerakan nasionalis di Polandia, yaitu bagaimana mereka mengkonstruksi identitas dan tujuan gerakan nasionalis. Dengan wawancara terhadap tiga organisis pemuda, yaitu *The All-Polish Youth, the National Radical Camp and the National Rebirth of Poland*, dan mengunakan *grounded theory* (Glaser & Strauss, 1967), serta koloberasi dengan partisipan mampu memahami persepsi/interpretasi partisipan terhadap realitas sosial politik yang berkembang dan keterlibatan mereka

terhadap gerakan nasionalis Polandia dan motif-matif mereka terhadap gerakan nasionalis..

c. Penelitian Yavuz YILDIRIM (2104) *Nigde University Turkey, The Differences of Gezi Parki Resistance in Turkish Social Movements,* Penelitian ini memfokuskan pada gerakan perlawanan yang di lakukan akar rumput yang berbeda dengan tipe gerakan sebelumn perubahan sosial. Gezi Parki dapat dilihat sebagai langkah besar untuk membentuk suatu sistem politik baru Turki dari bawah-ke-atas. Studi ini memiliki kerangka pada semakin pentingnya politik terhadap peran konstitutif gerakan sosial. Dalam kasus Gezi Parki, orang-orang Turki telah menciptakan kerangka gerakan politik mereka sendiri.

Sebagai kesimpulan, dapat dinyatakan bahwa perlawanan Gezi Parki merupakan peristiwa luar biasa dalam perjuangan sosial Turki. Ini melambangkan titik pergeseran dalam tradisi gerakan Turki. Pendekatan gerakan sosial harus lebih berorientasi kehidupan sehari-hari dan gerakan akar rumput menjadi perjuangan politik baru yang mempengaruhi politik kelembagaan dan perwakilan demokrasi.

d. Penelitian David Philip Thomas (2006), disertasi pada Queen's University Kingston, Ontario, Canada *Hegemonic Struggle In Post-Apartheid South Africa: The Role o f the South African Communist Party (S ACP)* 1994-2004. Penelitian ini menguji Partai Komunis Afrika Selatan (empat) dan perannya dalam sistem hegemonik neoliberalisme di pasca-apartheid Afrika

Selatan (1994- 2004). Berdasarkan dekade perjuangan dan kerja sama dengan Kongres Nasional Afrika (ANC) terhadap kekuasaan minoritas kulit putih, SACP dengan ideologi komunis yang menekankan pada kolektivitas tetap mempertahankan aliansi dengan ANC yang pro pasar pasca-apartheid. Mempertahankan kerjasama dengan ANC memunculkan kontradiksi-kontradiksi yang melemahkan partai. Dengan menggunakan pemahaman hegemoni neo-Gramscian, penelitian ini: (1) mengidentifikasi dan mengeksplorasi kompromi dan kontradiksi yang melekat dalam proyek politik pasca-apartheid SACP ini; (2) mengungkapkan cara yang mana kepemimpinan SACP mengelola dan/atau membungkam perdebatan kritis dalam Partai, terutama mengenai Komitmen Partai untuk ANC; dan (3) mengeksplorasi kompleks dan beragam hubungan antara SACP dan ANC sejak tahun 1994,. Melalui pendekatan sejarah dengan perspektif hegemoni Gramscian, penelitian ini menyimpulkan secara keseluruhan, dengan tetap tegas untuk bisa di hargai oleh ANC, SACP telah berkomitmen dan efektif beroperasi, dan bahkan melegitimasi, mengakomodasi kebijakan ANC pasca-apartheid yang pro pasar. Hal ini menyebabkan Partai tidak mampu melakukan kerja dalam rangka *counter-hegemonik* terhadap sistem neo-liberal di Afrika Selatan.

e. Penelitian yang di lakukan Khairiah Salwa Mokhtar, dan Nur Hairani Abd Rahman (2014), Universiti Sains Malaysia dengan judul, "*Political Conflict and Local Government Election".* Penelitian ini berfokus pada konflik

politik pada pemilihan pemerintah daerah dengan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana isu-isu terkait yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategorikan sebagai konflik yang melibatkan kekuatan asing ? Bagaimana konflik politik internal melibatkan masyarakat dan pemerintah-polisi? Bagaimana dampak dari konflik politik terhadap pemerintah? Berdasarkan penelitian tersebut di dapatkan hasil bahwa konteks konflik politik yang telah dibahas, ada beberapa poin penting untuk membuat yang signifikan dengan konteks politik diskusi di Malaysia. *Pertama,* perubahan kekuasaan merupakan penyebab mudah bagi konflik. *Kedua,* konflik secara langsung mempengaruhi perubahan keadaan sosial. *Ketiga,* konflik memiliki beberapa implikasi untuk pengembangan dan pertumbuhan nasional, terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Akhirnya, konflik politik telah menyebabkan perubahan dalam struktur politik, baik dengan cara yang besar atau kecil. Singkatnya, konflik politik di Malaysia dapat diilustrasikan dalam dua bentuk; konflik politik internal dan eksternal konflik politik antara Malaysia dengan negara-negara asing.

f. Penelitian yang dilakukan Kamarudin (2013), FISIP Universitas Indonesia, *Konflik Internal Partai Politik: Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa:* Kajian ini menunjukkan, pertama, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifat pragmatis terkait dengan perebutan posisi dalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanya berlaku ketika kalangan nahdliyin bergabung dengan komponen bangsa yang lain,

seperti ditunjukkan oleh studi Deliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi) dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP), namun studi ini menunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik di antara sesama fungsionaris partai yang dilahirkan oleh kalangan nahdliyin terjadi. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa konflik merupakan "salah satu tradisi NU" pada akhirnya perlu ditambah dengan penjelasan bahwa "konflik yang dipicu oleh masalah pragmatisme kekuasaan merupakan salah satu tradisi NU." Memang pemah ada konflik karena faktor ideologi, namun pragmatisme kekuasaan seringkah menjadi motif di balik perseteruan NU dengan pihak lain ataupun dengan sesama kalangan nahdliyin seperti terlihat pada kasus konflik internal PKB. Kedua, terjadi pergeseran nilai dalam hubungan kiai-santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron-klien ketika kalangan nahdliyin berkiprah di wilayah politik. Kasus konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadi unsur pembentuk budaya pesantren bisa berubah karena masalah pragmatisme kekuasaan.

g. Rogers Brubaker (2015), *Religious Dimensions of Political Conflict and Violence, American Sociological Association, Sage Publication*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan cara yang pandang yang berbeda di mana agama dapat menginformasikan konflik dan kekerasan politik. Agama dapat dijadikan media untuk mengatasi sikap oposisi secara khusus yang mempunyai karakter unik dan keras. Makalah ini menjelaskan suatu upaya

yang khas dari agama untuk mengatasi konflik. Pada saat yang sama, penelitian menunjukkan bahwa banyak konflik agama dasarnya mirip dengan konflik lain, seperti konfik politik, sumber daya ekonomi, pengakuan simbolis, atau reproduksi budaya.

h. Michael David Rossiter (2015), *The Colonization Of Educational Lifeworlds: Habermas And The Communicative Processes Of Teaching And Learning, University of Toronto,* Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep ganda Jurgen Habermas 'masyarakat baik sebagai sistem dan dunia kehidupan adalah alat konseptual yang efektif untuk menganalisis ketegangan antara mengajar dan belajar di kelas sekolah umum dan organisasi sistemik pendidikan umum. Tindakan komunikatif dapat dilihat sebagai titik orientasi untuk praktek pedagogis, dan ini memerlukan konseptualisasi kelas sebagai subjek dunia kehidupan pendidikan tekanan sistemik. Contoh pengujian standar sebagai mekanisme sistem kemudi dalam pendidikan publik AS dieksplorasi sebagai potensial "penjajahan" dari dunia kehidupan pendidikan.

Gagasan Habermas 'rasionalitas komunikatif, dan bagaimana hal ini dapat dipahami sebagai operasi dalam sistem pendidikan yang modern terutama dalam hal yang fungsi dalam proses pembelajaran yang Habermas identifikasi sebagai penting untuk pengembangan kemodernan. Dunia kehidupan pendidikan umum, kelas, beresiko menjadi penjajahan sistemik terutama melalui mekanisme akuntabilitas guru melibatkan pengujian

standar ekstensif terikat evaluasi guru dan gaji. Ini memiliki potensi untuk menghambat dunia kehidupan yang penting bagi prosedur komunikatif dalam kelas, dengan efek mendalam pada pendidikan demokrasi, dan pembangunan sosial dan intelektual anak.

i. Hélène Pfeil, (2013) *Understanding the Dynamics of Israeli-Palestinian Grassroots Dialogue Workshops: the Contribution of a Habermasian Approach, Springer Science+Business Media New York 2013*

Penelitian ini memberikan pemahaman teoritis dialog antar personal dalam kasus Israel-Palestina, dan penelitian ini juga berkontribusi terhadap lebih luas teoritis debat mengenai traksi kerangka Habermasian di ranah studi perdamaian dan konflik. Kesimpulan dari analisis ini telah dimulai dengan mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat sipil untuk menjamin kekokohan proses perdamaian. Meskipun inisiatif diplomatik untuk mendorong resolusi konflik melalui interaksi antara orang-ke-orang pada tingkat akar rumput tidak boleh dianggap remeh. Melalui karya Habermas telah menyediakan kerangka kerja konseptual baru untuk menganalisis inisiatif dialog akar rumput. Telah terbukti bahwa tindakan komunikatif berfungsi dengan baik untuk memahami format dan kekuatan transformatif berbasis dialog Israel-Palestina dalam lokakarya perdamaian sipil.

j. Eko Nurul Akbar dan Agus Trilaksana (2015), Pemberitaan Koran Tentang Peristiwa 27 Juli 1996, (Kompas Dan Suara Karya), *AVATARA*, e Jurnal Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.

Penelitian ini berdasarkan analisis terhadap pemberitaan peristiwa 27 Juli 1996 yang memfokuskan adanya perbedaan sudut pandang antara Kompas dengan Suara Karya dalam memberitakan peristiwa tersebut. Berdasarkan pada fokus tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pemberitaan koran Kompas dan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996 2) Mengapa ada perbedaan pemberitaan antara koran Kompas dan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996 3) Bagaimana dampak keberanian pemberitaan Kompas berbeda dengan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk dapat memperoleh hasil yang baik pada skripsi ini penulis melakukan penelusuran arsip berupa koran-koran terbitan Kompas dan Suara Karya pada tahun 1996, penelusuran buku-buku terkait kehidupan pers pada masa orde baru maupun peristiwa 27 Juli 1996, serta penelusuran jurnal-jurnal ilmiah, skripsi maupun majalah terkait pers dan seputar kerusuhan tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pertama ada perbedaan dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 antara Kompas dan Suara Karya, perbedaannya terletak pada pemberitaan Kongres Medan, mimbar bebas, pelaku peristiwa 27 Juli 1996, dan hukuman terhadap pelaku peristiwa 27 Juli 1996. Kedua faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 yakni pemilik media pers,

independensi serta kepentingan Kompas dan Suara Karya yang saling bertentangan, Kompas yang didirikan oleh Jacob Oetama dan PK. Ojong cenderung memiliki hubungan politik dengan Megawati Soekarnoputri yang berusaha melengserkan pemerintahan orde baru, berbeda dengan Suara Karya yang didirikan oleh tokoh-tokoh muda Partai Golkar cenderung memiliki hubungan politik dengan pemerintahan, tujuan utama pers ini untuk mempertahankan rezim orde baru yang otoriter. Ketiga perbedaan pemberitaan Kompas dengan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996 berdampak kepada oplah Kompas yang semakin meningkat secara signifikan, hal ini disebabkan pada peristiwa 27 Juli 1996, Kompas selalu memposisikan Megawati sebagai pihak yang teraniaya sehingga mudah untuk mendapat simpatik masyarakat, bertambahnya pembaca terhadap harian Kompas terkait peristiwa tersebut membuat pers ini mampu mendominasi pasar informasi pada saat itu dengan memperoleh oplah terbanyak diantara pers lainnya.

1.2.1 Landasan Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap komunikasi politik, khususnya pada konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Konflik yang dikenal dengan perseteruan antara PDI pendukung Megawati dengan PDI Pro kongres, dan konflik mencapai puncaknya ketika terjadi penyerangan yang dilakukan ke kantor DPP PDI yang dikuasai kubu Megawati pada 27 Juli 1996. Konflik internal menjadi menarik, karena berada dalam struktur politik yang hegemonik dan represif. Campur tangan penguasa menjadi hal yang determinan, karena peran partai politik tak ubahnya "pemanis" dalam praktek demokrasi semu yang dipraktekan penguasa, sehingga ketika terjadi perselisihan ataupun konflik tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga adanya keterlibatan aktor-aktor penguasa.

Teori dalam penelitian ini adalah sebatas kisi-kisi atau pemandu bagi peneliti untuk menangkap "obyek" yang hendak diteliti. Konflik internal dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia(PDI) adalah sebuah realitas yang kelihatan di permukaan adalah realitas yang terbentuk karena adanya kekuatan-kekuatan baik bersifat manifes maupun laten yang membentuknya. Keterlibatan aktor sebagai kekuatan pembentuk realitas berakibat pada "kekerasan politik", yaitu adanya penyerangan kantor DPP PDI. Fenomena tersebut memperlihatkan sebuah kekuasan yang dikelola secara tidak rasional. Diskursus legal yang harusnya diinstitusionalkan berdasarkan persetujuan

bersama, dipahami secara sepihak dengan logika kekuatan oleh penguasa rezim Orde Baru.

Dengan demikian wajah kekuasaan Orde Baru dalam kacamata Habermas merupakan perluasan dari integrasi sistem yang berhasil dalam "mengkolonialisasi dunia kehidupan ". Pendukung Megawati dan aktivis lain adalah representasi dari "dunia kehidupan" yang mencoba bergerak melampaui imperatif sistem yang dikembangkan Orde Baru. Kendati, "dunia kehidupan" berhasil diredam, kenyataan mampu membentuk kesadaran untuk melakukan transformasi dan emansipasi.

Konflik internal PDI yang berujung pada "kekerasan politik" dalam perspektif teori tindakan komunikasi Habermas adalah bentuk dari patologi yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat. Komodifikasi politik yang dilakukan rezim Orde Baru telah menyebabkan krisis atau patologis. Dalam teori tindakan komunikasi, Habermas membagi masyarakat dalam dua level, yaitu level "sistem" dan dan level *"lifeworld".* Dalam memahami sistem, Habermas (1987:117), menjelaskan, kalau dunia kehidupan merepresentasikan sudut pandang subyek yang bertindak dalam masyarakat, sistem melibatkan perspektif eksternal yang melihat masyarakat dari perspektf peneliti tentang seseorang yang tidak terlibat. Sedangkan, *lifeworld* dalam penjelasan Habermas(1987:126), adalah arena transedental tempat pembicara dan pendengar bertemu, tempat mereka secara timbal balik mengajukan klaim bahwa ucapan mereka sesuai dengan dunia tersebut, dan

tempat mereka dapat mengkritik dan memperkuat klaim validitas, menyatakan ketidaksetujuan mereka, dan mencapai kesepakatan. Dunia kehidupan, bagi Habermas adalah hasil bentukan dari relasi para aktor yang hidup berdampingan dalam tradisi budaya yang sama melalui tindakan komunikasi. Mereka adalah aktor-aktor yang terbentuk secara interaktif melalui tindakan komunikasi untuk mengembangkan reproduksi budaya, dan merupakan sumber tindakan komunikasi. Dunia kehidupan dalam reproduksi budaya berkembang secara evolusioner untuk mencapai integrasi sosial, dan juga mencapai integrasi sistem. Dengan perlahan secara evolusioner, sistem tumbuh melampaui dunia kehidupan, dan struktur-struktur dalam sistem tumbuh menjadi mandiri. Ketika sistem berada dalam kekuasaan, akhirnya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan dunia kehidupan. Sebuah sistem mencapai tatanan sosial lewat integrasi fungsional konsekuensi tindakan-tindakan individu anonim berdasarkan media abstrak (Ritzer & Smart:2015:411)

Konflik internal PDI, menjelaskan PDI Pro Kongres yang merupakan representasi kekuasaan rezim Orde Baru awalnya adalah *lifeworld* berkembang dengan logika sendiri hendak menjaga supremasi kekuasaan yang hegemoni. Subyektivitas yang dilandasi kepentingan ideologi menjadikan PDI Pro Kongres mengabaikan norma dan moralitas keadilan.

Dalam konflik internal diasumsikan adanya dominasi melalui wacana-wacana simbolik yang diproduksi oleh pihak yang terlibat konflik tanpa

disadari. Keberhasilan simbolik bisa terjadi apabila wacana simbolik mampu menstruktur realitas sosial seperti yang dikehendaki. Tetapi, , bisa juga nilai yang telah dikonstruksi sedemikian rupa tidak bisa dipahami dan diinternalisasi oleh aktor lain, dan bahkan aktor lain menaikan posisinya dengan mengkonstruksi wacana lain yang bisa bertentangan dengan sebelumnya, sehingga terjadi apa yang dimaksud dengan pertarungan simbolik. Kemampuan untuk melakukan dominasi tergantung habitus dan *capital power* yang dimiliki. Melalui perspektif teori praktek sosial Bourdieu dimaksudkan untuk melihat dominasi dengan wacana simbolik. Dengan perspektif teori tersebut, dapat dilihat adanya pertarungan simbolik pada konflik internal PDI. Di samping itu dapat diketahui *habitus* dan *capital power* masing pihak yang berkonflik.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana integrasi politik yang dilakukan rezim dalam konflik internal PDI ? Bagaimana konflik internal menjadi arena perlawanan terhadap rezim Orde Baru ? Bagaimana wacana simbolik dikonstruksi masing pihak yang berkonflik sehingga membentuk arena untuk merebutkan legitimasi politik ?

Masih sedikit riset yang membahas integrasi politik yang dilakukan rezim dan bentuk resistensi terhadap integrasi tersebut. Dengan pemahaman terhadap aktor yang terlibat konflik akan mampu menjelaskan narasi yang tersembunyi dibalik peristiwa tersebut.

1.2.1.1. Teori Tindakan Komunikasi Habermas

Habermas menganggap adanya “paradoks-paradoks modernitas” dalam dunia kehidupan, atau diistilahkan dengan kolonialisasi dunia kehidupan (Ritzer & Goodman:2008:609). Misalnya, ekonomi sebagai sistem yang mengatur produksi dan reproduksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berkembang untuk saling mendominasi. Dalam kenyataan, “konflik kelas”, seperti yang di inginkan Marx telah “terlembagakan” dan “dunia kerja” di bungkam melalui normalisasi peran-peran pekerjaaan dan peningkatan peran-peran konsumen. Begitu juga dalam wilayah politik telah “dijinakan” melalui netralisasi, kemungkinan-kemungkinan partisipasi politik yang demokratis para warganya semakin terpinggirkan. Kekuasaan yang seharusnya tempat untuk pengalokasian dan distribusi wewenang secara seimbang berubah dalam bentuk dominasi. Kekuasaan yang demikian menyebabkan irasionalitas kekuasaan.

Irasionalitas kekuasaan, dengan sendirinya akan melahirkan resistensi atau perlawanan sebagai upaya untuk merasionalkan kekuasaan. Habermas menjelaskan melalui tindakan komunikasi, bagaimana resistensi dilakukan untuk merasionalkan kekuasaan politik. Dalam tindakan komunikatif, pihak-pihak yang bicara beranggapan bahwa mereka memaknai hal yang sama dengan ekspresi tertentu, bahwa apa yang mereka katakan adalah bisa dipahami pendengar, bahwa proposisi mereka adalah benar, bahwa asing-masing bersikap tulus dan siap menjalankan kewajiban demi pencapaian konsensus, dan bahwa mereka datang untuk memahami satu sama lain melalui

proses dialog di mana mereka saling mendengarkan. (Crofword:2009:248). Oleh karenanya, dalam tindakan komunikasi para pihak yang terlibat memiliki "*lifeworld"* yang sama, yaitu berupa asumsi latar belakang yang sama, "suatu cakrawala berupa kepercayaaan bersama dan tidak di permasalahkan", dalam konteks solidaritas sosial. (Habermas:1996:22)

Hal ini, Habermas(1990:103) berpendapat, bahwa,

> … wacana praktis tergantung pada konten yang di bawakan ke mereka dari luar. Sama sekali tidak ada gunanya jika terlibat dalam wacana praktis tanpa ada cakrawala yang di berikan oleh *life world* dari suatu kelompok social tertentu dan tanpa konflik nyata dalam situasi konkret di mana para aktor mempertimbangkan sudah menjadi kewajiban mereka untuk mencapai cara-cara konsensus yang mengatur beberapa problem sosial kontrovesial

Atas dasar paradigma baru itu, Habermas ingin mempertahankan isi normatif yang terdapat dalam modernitas dan pencerahan kultural. Isi normatif modernitas adalah apa yang disebutnya rasionalisasi dunia-kehidupan dengan dasar rasio komunikatif. Dunia kehidupan terdiri dari kebudayaan, masyarakat dan kepribadian. Rasionalisasi dunia-kehidupan ini dimungkinkan lewat tindakan komunikatif. (Heitink:2010:136-137). Rasionalisasi akan menghasilkan tiga segi. *Pertama,* reproduksi kultural yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi baru yang muncul, tetap ada kelangsungan tradisi dan koherensi pengetahuan yang memadai untuk kebutuhan konsensus dalam praktek sehari-hari. *Kedua*, integrasi sosial yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi yang baru, koordinasi tindakan tetap terpelihara dengan sarana hubungan antarpribadi yang diatur secara legitim

dan kekonstanan identitas-identitas kelompok tetap ada. *Ketiga*, sosialisasi yang menjamin bahwa dalam siatuasi-situasi baru, perolehan kemampuan umum untuk bertindak bagi generasi mendatang tetap terjamin dan penyelarasan sejarah hidup individu dan bentuk kehidupan kolektif tetap terpelihara. (Hardiman: 2003:130) Ketiga segi ini memastikan bahwa situasi-situasi baru dapat dihubungkan dengan apa yang ada di dunia ini melalui tindakan komunikatif.

Dalam memahami bagaimana relasi aktor dengan dunia sosial. Habermas mengajukan empat model tindakan, yaitu tindakan teleologis, model tindakan normatif, model tindakan dramaturgis, dan model tindakan komunikasi. Model tindakan *teleologis* adalah keputusan untuk memilih satu diantara berbagai alternative tindakan, dengan tetap berpegang pada maksud mewujudkan tujuan, yang diarahkan oleh sejumlah maksud, dan didasarkan pada interpretasi atas situasi yang ada. Model tindakan *normatif* adalah anggota-anggota suatu kelompok yang mengorientasikan tindakannya kepada nilai-nilai bersama. Model tindakan *dramaturgis* adalah partisipasi dalam interaksi di mana aktor mengungkapkan citra tertentu dihadapan masyarakat. Model tindakan *komunikasi* adalah interaksi dari paling tidak dua orang subyek yang mampu berbicara dan bertindak yang membangun hubungan antar personal, masing-masing aktor berusaha mencapai pemahaman tentang situasi tindakan dan rencana bertindak untuk mengkordinasikan tindakan mereka melalui kesepakatan. (Habermas:2007:23) Ke-empat model tersebut

menempatkan fungsi sentral bahasa sebagai media relasi aktor. Dalam model *teleologis*, bahasa hanya menjadi alat aktor untuk mempengaruhi pihal lain dalam mencapai tujuan. Model *normative*, menjadikan bahasa sebagai media untuk mencapai konsensus. Model dramaturgi, fungsi bahasa adalah sebagai alat untuk media untuk presentasi diri atau membentuk citra. Dengan model tindakan komunikasi inilah, menempatkan bahasa sebagai media komunikasi bebas tekanan dimana pembicara dan pendengar, di luar konteks dunia kehidupan yang telah diinterpretasikan sebelumnya, secara simultan merujuk kepada hal-hal di dalam dunia obyektif, sosial dan subyektif.

Melalui model tindakan komunikasi, partisipasi dalam interaksi para aktor dapat memobilisasi potensi rasionalitas yang dilakukan secara ekspresif dengan tujuan mencapai pemahaman secara kooperatif. Oleh karenanya dibutuhkan klaim validitas dalam tuturanya, yaitu 1. Pernyataan yang di kemukakan benar, 2. Tindak wicara (*speech act*) benar berdasarkan konteks normative yang ada, 3. Maksud yang manifest dari pembicara sama dengan yang di ungkapkan. (Habermas:2007:130). Dengan demikian, para aktor berusaha mencapai konsensus dan mengukurnya berdasarkan kebenaran, ketepatan dan ketulusan, yakni berdasarkan "kesesuaian" dan "ketidaksesuaian" antara tindak wicara (*speech act)* dengan dunia para aktor mengkaitkan relasinya, yaitu dunia obyektif, dunia sosial, dan dunia subyektif.

Untuk menggambarkan jenis-jenis tindakan berdasarkan pada kepentinganya, dapat dilihat pada bagan berikut:

Tabel 2
Jenis-Jenis Tindakan

Orientasi Tindakan / Situasi Tindakan	Orientasi Pada Keberhasilan	Orientasi Pada Pencapaian Pemahaman
Non soial	Tindakan Instrumental	----------
Sosial	Tindakan Strategis	Tindakan Komunikasi

Sumber : (Habermas: 131:2006)

Dalam melakukan tindakan komunikasi, seseorang harus mempunyai kompetensi komunikasi. Secara singkat kompetensi komunikasi adalah kemampuan seorang pembicara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban validitas ucapan dalam tindakan komunikatif, yaitu *comprehensibility* (kelengkapan), *truth* (kebenaran), *normative rightness* (kebenaran normative), dan *truthfulness* (bisa di percaya). Lebih lanjut Habermas (dalam Crowford:2010:250) menyatakan,

> Dalam konteks tindakan komunikatif, kita bisa menyebut seseorang rasional tidak hanya jika ia mampu mengajukan suatu pernyataan dan ketika di kritik ia bisa membuktikan alasan dengan cara menunjukan bukti-bukti yang tepat, tetapi juga jika ia mengikuti norma yang mapan dan ketika di kritik mampu membenarkan tindakannya dengan cara menjelaskan situasi itu dalam cahaya harapan yang sah.

Dalam menjelaskan hubungan kompetensi komunikasi dengan isi ucapan dan argument, dapat di gambarkan berikut ini.

Tabel 3
Kompetensi Komunikasi

Klaim Validitas	Karateristik	Fungsi	Imbalan
Comprehesibility	Bahasa yang bisa di pahami	Berkomunikasi	
Truth	Isi proposisional yang bisa di verifikasi	Merepresentasikan fakta dengan akurat menggambarkan dunia	Penalaran
Normative Rightness	Normatif	Menetapkan legitimasi	Penalaran
Truthulness	Pengakuan	Menyampaikan kebenaran dengan tulus dan penuh niat baik	Tindakan konsisten

Sumber: Habermas:2008:213)

Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat revolusi dengan kekerasan, akan tetapi dengan memberikan argumentasi. (Hardiman:2003:xxii) Habermas lalu membedakan dua macam argumentasi: perbincangan atau diskursus *(discourse)* dan kritik. Dilakukan perbincangan jika mengandaikan kemungkinan untuk mencapai konsensus. Meskipun dimaksudkan untuk konsensus, komunikasi juga bisa terganggu, sehingga tak perlu mengandaikan konsensus. Dalam hal ini Habermas mengedepankan kritik.

Melalui tindakan komunikasi, Habermas ingin menegaskan bagaimana perubahan atau transformasi yang berlangsung dalam sistem sosial masyarakat itu berlaku. Berpijak pada teori sistemnya Talcot Parson, Habermas menyusun skenario transformasi sosial. Dalam pandangan Parson (Ritzer & Goodman:2008 :265), masyarakat mana pun terdiri dari serangkaian subsistem yang struktur dan signifikasi fungsionalnya tidak sama bagi masyarakat yang lebih luas, ketika masyarakat berevolusi, sub sistem baru mengalami diferensiasi. Tetapi hal itu tidak cukup, sub sistem tersebut harus lebih adaptif dibanding dari sub sistem sebelumnya.

Kata kuncinya terletak pada diferensiasi dan adaptasi, ketika persoalan berkembang, menjadi tugas dari sub sistem untuk melakukan diferensiasi struktural dan kemudian mengadaptasi persoalan tersebut, sehingga terjadi integrasi sistem. Dengan demikian perubahan dari sistem Parson ini adalah perubahan evolusioner atau "paradigma perubahan evolusioner", sehingga krisis sebagai titik balik atau kontradiksi untuk melakukan perubahan sosial, seperti yang diskenariokan Marx tidak berlaku dalam teori ini. Krisis bagi Parson adalah sebagai gangguan aksidental saja dari lingkungan.

Berbeda dengan Habermas, krisis sebagai sebagai fenomena obyektif sekaligus internal. Krisis terjadi ketika terjadi tuntutan-tuntutan obyektif untuk berkembang dan berubah, bahwa norma atau tatanan nilai yang lama tidak bisa memenuhi tuntutan obyektif tersebut, sedangkan tatanan nilai baru belum

ketemu, sehingga terjadi kekosongan tata nilai yang menjadi norma sistem tersebut.

Dalam mengatasi hal tersebut, Habermas menjelaskan dengan rasionalisasi tindakan komunikatif, yaitu dengan orientasi pemahaman timbal balik secara konsensual yang menghasilkan norma-norma dan institusi sosial (dunia kehidupan). Dalam penjelasan lebih lanjut, Habermas (dalam Hardiman:2003:146), sebuah sistem sosial seperti organisme akan bertahan menghadapai dunia luar dan dalam, kalau suatu dimensi ketiga berkembang, yaitu kemampuan mengendalikan sistem itu. Pengendalian sistem terhadap alam "luar" bisa di lakukan dengan tindakan instrumental, sedangkan terhadap alam "dalam" dengan tindakan komunikatif.

Paradigma komunikasi, bagi Habermas menjadi kunci bagaimana sistem sosial mengkonstruksi dirinya dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Kondisi sistem sosial ketika paradigma komunikasi ini di susun, Habermas berpijak pada sistem di mana merupakan tahapan dari kapitalisme lanjut atau konstitusional liberal. Dalam sistem tersebut, masih terbuka ruang-ruang komunikasi, seperti berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Artinya, adanya kebebasan individu menyampaikan kehendak atau kepentingan tanpa ada pembatasan. Hal ini terbukti dengan terbentuknya ruang publik yang bebas dalam melakukan publisitas sehingga terbentuk opini publik.

Kritik terhadap teori tindakan komunikasi, seperti yang di lontarkan Lyotard, proyek emansipasi yang menjadi subyek bagi teori tindakan komunikasi di anggap sebagai *"grand narrative"* atau "narasi besar" karena sudah terjebak pada bentuk-bentuk universalisme, seperti tampil dalam dialektikannya Hegel, emansipasi buruh (Marx), psikoanalisa (Freud). Penolakan Lyotard dilandaskan bahwa pengetahuan masyarakat modern dilihat sebagai metanarasi dalam bentuk "fondasionalisme" dan cenderung relativistik, irasional dan nihilistik Pemikiran ini yang kemudian melahirkan teori *postmodernisme.* Perbedaan teori sosial modern dengan posmodernisme, teori sosial berusaha membangun landasan universal, ahistoris, rasional bagi analisa kritik atas masyarakat. (dalam Ritzer & Goodman:2008:669) Lyotard lebih memilih berbagai "narasi kecil" dan "lokal" daripada metanarasi atau narasi besar modernitas.

Kritik lain, ketika sistem sosial dalam keadaan terhegemoni dan represif yang melarang terbentuknya ruang kritik bagi praktek kekuasaan. Bagaimana bentuk tindakan komunikasi yang dilakukan dalam mengkritisi kekuasaan dan membangun kesadaran kritis? Hal ini yang tidak pernah di singgung Habermas, bahwa masyarakat negara konstitusional liberal maupun negara kesejahteraan sosial sebagai dasar dalam analisis sosialnya adalah masyarakat yang masih menolerir tindakan untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat atas kebijakan-kebijakan kekuasaan.

Begitu juga dalam dunia politik, teori tindakan komunikasi kurang memadai dalam menjelaskan kompetisi yang berlangsung antar aktor dalam meraih kekuasaan. Hal ini seperti di jelaskan Martin Plot (2009) dalam kritiknya.

> *Habermas still does not see that, to achieve success in the competition for access to the "political system" in a democratic context, it is fundamental to reach understanding with the many, which means that political struggle has a built-in communicative dimension that Habermas persistently neglects, but that Arendt did not. This blindness is grave because, among other things, it clears the field for the political sphere to be normatively understood as a space of sheer instrumental action and manipulation, a view that the Arendtian model condemns.*

Teori tindakan komunikasi Habermas di anggap sebagai teori moral dalam tindakan berbicara dan bentuk dasar komunikasi manusia. Ketika di terapkan dalam sistem politik yang membutuhkan perjuangan politik untuk meraih kekuasaan, maka di butuhkan tindakan politik. Seperti, di jelaskan, bahwa *Arendt* menekankan bahwa tindakan adalah simbol utama karakter manusia, dan jaringan hubungan antar manusia ditopang oleh interaksi komunikatif (1953:178-179).

Dalam perspektif teoritis, penelitian ini berusaha untuk memperluas kajian dari teori tindakan komunikasi Habermas. Dalam perspektif kritis, institusi PDI Pro Kongres merupakan representasi dari sistem rezim Orde Baru telah mengkolonisasi kehidupan dunia *(lebenswelt*) sedemikian rupa, yaitu PDI Megawati. Dalam *lebenswelt*-dunia kehidupan representasi masyarakat yang diwujudkan sebagai jaringan kerjasama yang diperantarai oleh komunikasi,

dengan hubungan strategis dan keruntuhan yang terselip didalamnya. (Habermas:2007:2002:) Narasi besar yang hendak dikedepankan dalam masyarakat ini adalah tatanan masyarakat yang demokratis terbebas dari dominasi. Para aktivis pendukung Megawati adalah pengusung narasi besar untuk melakukan tindakan komunikasi. Tetapi dorongan untuk melakukan narasi reproduksi kultural terhambat dengan "kekerasan politik" yang dilakukan oleh PDI Pro Kongres dan aparatur rezim Orde Baru.

Pada saat pembentukan teori tersebut, Habermas berpijak pada realitas tahap awal perkembangan masyarakat kapitalis (borjuasi) yang masih mengakomodir adanya kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Di samping itu, subyek atau pelaku dalam masyarakat yang digambarkan Habermas adalah masyarakat yang terdidik dan otonom, sehingga dunia kehidupan (*lebenswelt)* masih mempunyai ruang untuk melakukan reproduksi kultural. Untuk itu penelitian ini dalam konteks mikro adalah menelaah perjuangan PDI Megawati dan aktivis lainnya untuk mengembangkan dunia kehidupan *(lebenswelt*). Melalui peran sosial media percepatan transformasi dapat dilakukan. Kondisi ini berbeda dengan thesis awal Habermas bahwa transisi perubahan dari *lifeworld* menuju integrasi sistem berjalan evolusioner. Kondisi Indonesia berbeda dengan kondisi masyarakat Eropa yang menjadi pijakan Habermas dalam mengkonstrusikan teorinya. Adanya aksi massa mendorong transisi perubahan bisa berlangsung cepat untuk negara berkembang, seperti Indonesia. Dengan demikian, tujuan

penelitian ini akan mendeskripsikan model tindakan komunikasi yang sesuai dengan karakter lokal masing-masing masyarakat.

1.2.1.2. Teori Praktik Sosial Bourdieu

Dalam memahami kerangka teoritik Bourdieu ada beberapa konsep kunci, yaitu habitus, modal, arena (*field), symbolic power*, dan *symbolic violence.* Inti dari dari pemikiran Bourdieu untuk menjembatani antara subyektivisme dan obyektivisme, terletak pada konsep habitus dan arena, dan hubungan antara keduanya.(dalam Ritzer & Goodmaan:2008:580)

Dalam mengkonstruksi kerangka teoritiknya, Bourdieu mendapatkan pengaruh dari tiga sistem pemikiran, yaitu fenomenologi, eksistensialisme, dan strukturalisme. Di samping itu juga pengaruh dari Marx, Weber, Durkheim memberi corak dalam analisis teoritiknya. Pengaruh Marx adalah pada semangat pembebasan dari dominasi kelas, sedangkan Weber dan Durkheim pada subyek atau aktor yang bertindak menurut batas atau aturan sosial tertentu, kesadaran tertentu dan yang telah ditanamkan oleh struktur dilingkungan sekitarnya.

Analisis Heidegger tentang *Sein und Zeit (Being and Time),* konsep tentang sejarah dan waktu, juga analisis fenomenologi Husserl membantu Bourdieu untuk mengkonstruksi ketajaman dalam menganalisa suatu "*ordinary experience of social"* atau pengalaman biasa atau sehari-hari. Dalam eksistensialisme Satre, Bourdieu mendapatkan pemahaman yang kuat tentang aktor sebagai kreator dunia sosialnya. Akan tetapi, Bourdieu merasa

bahwa Satre telah melangkah terlampau jauh dan tidak memberi banyak/keluasan kekuasaan bagi aktor dan dalam batas itu ia mengabaikan batasan struktural terhadap aktor itu. Ketertarikan pada aktor mengalihkan Bourdieu pada karya strukturalisme Levi-Strauss.

Ketertarikan pada strukturalis, seperti dinyatakannya sebagai "*as a blissful structuralist"*. Tetapi ketertarikan Bourdieu terhadap strukturalis tidak berlangsung lama. Ia menganggap strukturalis menganggungkan pada obyektivitasme bahwa tindakan seorang aktor akan ditentukan oleh struktur, dan mengabaikan proses konstruksi aktor dalam membentuk dunia sosial. Itu sebabnya, Bourdeiu menjelaskan, "niat saya adalah membawa kembali aktor di dunia nyata yang telah sirna ditangan Levi-Strauss dan strukturalis lainnya, khususnya Althauser. (dalam Ritzer & Goodman:2008:577)

Melalui *symbolic power* adalah kekuatan aktor dalam membentuk realitas dan memampankan dalam struktur yang kemudian diinternalisasi oleh aktor lain sebagai ketentuan normatif yang harus dipatuhi atau menjadi habitus. Untuk bisa melakukan *symbolic power* dibutuhkan kekuatan modal. Untuk jelasnya apa yang dimaksud dengan *symbolic power*, Bourdieu menjelaskan,

> *"Symbolic power is a power of constructing reality , and one which tends to establish a gnoseological order:the immediate meaning of the world (in particular of the social world) (*Bourdieu:1992:166)

Selanjutnya, bagaimana *symbolic power* itu bekerja, Bourdieu menjelaskan *symbolic power* bukanlah bentuk dominasi melalui komunikasi, tetapi dengan penetapan dominasi melalui komunikasi yang tidak diakui, tetapi

kemudian diakui sebagai sesuatu yang legitimate. (Thompson:2007:99) Bila diilustrasikan dalam suatu contoh tindakan. Misalnya, suatu organisasi partai politik mensyaratkan terhadap anggota yang baru masuk dengan berbagai kualifikasi yang sudah ditentukan. Bagi anggota baru yang masuk harus bisa memahami dan mengikuti kualifikasi yang sudah ditentukan oleh kebijakan partai politik. Kebijakan itu harus dilakukan tanpa sadar atau alami, baik pada pihak yang membuat kebijakan juga bagi anggota yang baru masuk , tetapi kemudian kebijakan itu akhirnya diakui atau disadari sebagai ketentuan yang normatif apabila anggota baru mau masuk dalam partai politik. Ketentuan normatif inilah yang disebut dengan habitus. Bourdieu menjelaskan habitus adalah total jumlah dari struktur-struktur sosial eksternal yang diinternalisasi oleh aktor-aktor sosial yang memungkinkan mereka berfungsi efektif. Hal ini dibentuk oleh pengalaman yang terpelajari secara sadar atau tidak sadar di satu pihak, dan dipihak lain oleh dampak kumulatif praktek-praktek. (Jakcson:2010:139)

Bourdieu (1989) juga menjelaskan *symbolic power* sebagai *the power to make groups,* kekuasaan untuk mempertahankan atau mengubah prinsip–prinsip objektif dari penyatuan atau pemisahan, asosiasi atau disosiasi, kekuasaan untuk mempertahankan atau mengubah berbagai klasifikasi, kekuasan mendeskripsikan individu, kelompok, atau institusi melalui kata–kata, serta kekuasaan untuk mendefinisikan situasi di mana interaksi berlangsung. Namun demikian, kemampuan konstitutif *symbolic power*

ditentukan oleh modal simbolik (*symbolic capital)* yang diperoleh seorang aktor dalam pertarungan simbolik sebelumnya, dan kesesuaian apa yang dinyatakannya dengan realita.

Ini menunjukan bahwa *symbolic power* adalah bentuk praktek kekuasaan yang canggih, tersembunyi untuk melakukan penyeragaman atau penguasaan yang disebut dengan "*structure as structured*" terhadap realitas sosial. Kemampuan aktor dalam melakukan praktek kekuasaan seperti itu tergantung dari dua (2) kondisi yang mendukung. *Pertama*. wacana performatif, Bourdieu menjelaskan efektifitas ucapan performatif tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu institusi yang mendefinisikan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, Institusi yang memberikan otoritas kepada penggunan bahasa untuk melahirkan suatu tindakan yang menampilkan ucapan. (Thompson:2007:84). Maksud dari Bourdieu sebenarnya menunjuk pada kompetensi komunikasi yang dimiliki aktor. Kompetensi ini menyangkut dengan *capital power* yang dimiliki.

Kedua, keberhasilan simbolis. Yang dimaksud dengan hal ini adalah nilai-nilai sosial yang mulai ditanamkan mulai dipahami dan melembaga dalam bentuk habitus yang telah disepakati bersama. Keadaan demikian menjadikan s*ymbolic power* telah bekerja. Tetapi, bisa juga nilai yang telah dikonstruksi sedemikian rupa tidak bisa dipahami dan diinternalisasi oleh aktor lain, dan bahkan aktor lain menaikan posisinya dengan mengkonstruksi

wacana lain yang bisa bertentangan dengan sebelumnya, sehingga terjadi apa yang dimaksud dengan pertarungan simbolik.

"Arena" pun tercipta sebagai akibat dari pertarungan simbolik tersebut. Arena adalah kerangka hubungan sosial antara posisi yang diduduki agen sosial. Bourdieu menunjuk arena sebagai yang para aktornya bersaing untuk mendapatkan berbagai bentuk sumber daya material maupun power simbolis, tujuannya sentralnya selalu pada memastikan "perbedaan" atau *distiction* yang akan menjamin status aktor sosial itu dan berfungsi sebagai sumber kekuasaan simbolis yang kemudian digunakan untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. (dalam Edkins & Williams:2010:142)

Berpijak pada konsep "arena" berarti adanya aktor-aktor yang saling berhadapan secara kontradiktif untuk memperebutkan kekuasaan simbolis. Berkaitan dengan hal tersebut Bourdieu mengulas apa yang disebut dengan semesta dari yang tak diperdebatkan (*universe of undiscussed/undisputed*), atau doxa, dan semesta diskursus (*universe of discourse/ argument*), yang terdiri dari *orthodoxy* dan *heterodoxy*. Doxa adalah,

> *Doxa is the relationship of immediate andherence that is established in practice between a habitus and the field to which it is attuned, the pre-verbal taking–for granted of the world that flows from practical sense. Enacted belief, installed by the childhood learning that treats the body as a living memory pad, an automaton that lesds the mind unconsciously along with it, and as a repository for the most precious values, is the form par excellence of the blind or symbolic thought (cogito caeca vel symbolica) which" (Bourdieu:1992:68)*

Doxa sama halnya wacana dominan yang menjadi konsensus yang dipatuhi masing-masing aktor. Konstruksi yang dilakukan aktor terhadap

suatu wacana berada dalam internalisasi aktor lain pada suatu arena dan sudah menjadi habitus tanpa disadari. Dalam "arena", yang juga *"field of struggle*" seseorang yang memiliki kapital yang sangat kuat cenderung mengambil strategi konservasi untuk melindungi bentuk *doxa* dimana struktur yang mapan tidak dipertanyakan. Mereka yang tidak ada kecukupan modal akan mengambil strategi subversi atau *heterodoxy* dengan membawa wacana baru yang bisa diperdebatkan, oleh karena itu *heterodoxy* bersifat kritis. *Heterodoxy* akan mengancam wacana dominan dan memaksa aktor yang dominan untuk bersikap defensif berusaha mempertahankan wacana tersebut atau *orthodoxy.*

Gambar 1
Doxa, Hetrodoxy, Orthodoxy
Sumber : Bourdieu (dalam Thompson:2007:87)

Capital power yang dimiliki aktor menentukan posisi dominan ketika berada dalam arena. Bourdieu menjelaskan *capital power* memiliki dimensi,

pertama, *capital* merupakan pertaruhan para peserta di arena yang senantiasa melakukan perjuangan. Kedua, konsep itu terdiri dari sumber-sumber yang dimobilisasi oleh para peserta yang sama dalam upaya mengejar tujuan, yaitu lebih banyak mengakumulasi dan memanfaatkannya untuk mendapatkan lebih banyak capital dan posisi dominan.(dalam Thompson:2007:144)

Ada berbagai macam kapital/modal, yaitu kapital ekonomi, simbolik, social dan budaya. Modal ekonomi adalah kepemilikan harta benda dan sumber keuangan, modal kultural adalah berbagai jenis pengetahuan yang legitim, modal social adalah hubungan social antar orang dan modal simbolik adalah harga diri dan prestise. (dalam Ritzer & Goodman:2008:583)

Berkaitan dengan konflik internal PDI, legitimasi kekuasaan politik menjadi arena bagi aktor yang terlibat dalam konflik untuk berebut posisi dominan dalam menstruktur dunia politik untuk diakui sebagai yang legitimate. Aktor-aktor yang yang terlibat adalah mereka yang disebut dengan massa PDI Megawati berhadapan dengan PDI Pro Kongres. Di sisi lain, ada aparatur Orde Baru bertindak sebagai pengendali legitimasi kekuasaan. Masing-masing aktor dengan *capital power* yang dimiliki berusaha untuk menegaskan posisi dominan atas yang lain dan membuat "*distinction"* melalui kata atau simbolik. Bourdieu (1975:23) menegaskan, "*symbolic power is the power to make things with words.*

Dalam kajian ini, teori praktek sosial Bourdieu sebagai penuntun dalam analisis terhadap pertarungan simbolik yang dilakukan para aktor yang terlibat

konflik, juga menjadi analisis terhadap habitus dan *capital power* yang dimililki para aktor. Tujuannya adalah untuk mengetahui dominasi aktor melalui *symbolic power* yang dimiliki dan *disctiction* sebagai garis demakarsi untuk menegaskan posisi dalam arena.

Seperti yang dijelaskan Bourdieu, *symbolic power* bekerja melalui kata-kata dengan tanpa dikenali/tanpa disadari. Tetapi dalam arena pertarungan bisa saja dalam kondisi dikenali/kesadaran. Untuk itu bagaimana tindakan aktor agar tetap bisa menegaskan posisi dominasi? Dengan demikian kajian ini juga akan memperluas pengertian *symbolic power* yang dikemukakan Bourdieu, khususnya mengenai kesadaran dan tindakan aktor yang dilakukan selanjutnya.

1.2.2. Landasan Konseptual

1.2.2.1. Komunikasi Politik Dalam Prespektif Kritis

Communication is the basis for all social and political activities (Fagen:1966:212). Penjelasan itu mendeskripsikan segala aktivitas sosial politik yang berlangsung menempatkan komunikasi sebagai subyek yang menghubungkan aktvitas tersebut. Melalui komunikasi berbagai aktivitas sosial maupun politik dimediasi. Obyek material komunikasi politik, seperti yang di kemukakan Sartori (dalam Rush dan Althoff:46:1971) adalah dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik dan dimensi politik dari fenomena komunikasi. Hal yang sama juga dikemukakan Nimmo (1999:9), banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai komunikasi. Penjelasan tersebut,

memberikan pemahaman bahwa setiap proses komunikasi yang dilakukan lembaga atau individu yang sifatnya formal ataupun informal yang berkaitan dengan kekuasaan dan berlangsung dalam suasana konflik atau konsensus.

Mc Nair(1999:4) mendefinisikan komunikasi politik sebagai, "*political communication as a relationship between various elements, namely political organizations, media, and the citizens.* Kendati tidak memasukan elemen hubungan interpersonal dalam komunikasi politik, tetapi Mc Nair menekankan pada diskusi politik yang dilakukan tempat-tempat umum, perjamuan makan, negoisasi yang dilakukan pemerintah secara tutup, dan penyajian informasi yang dilakukan jurnalis dari sumber yang terpercaya.

Setiap konsep dan teori bermula dari sejumlah anggapan dasar(asumsi) yang menjadi titik tolak berpikirnya. Deddy Mulyana (2014), dalam bukunya "Komunikasi Politik, Politik Komunikasi", menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam komunikasi politik, yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan alternatif atau subyektif.

Dalam pandangan obyektif, realitas sosial, khususnya komunikasi politik berlangsung satu arah dan stabil yang mempunyai pola urutan sebelumnya yang dapat ditemukan. (West & Turner:2009:12). Oleh karenanya, komunikasi politik didefinisikan sebagai suatu proses yang linear atau suatu sistem. Pendekatan linear berorientasi pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik. (Mulyana: 2014:4).

Sosiologi memberikan andil bagi perkembangan komunikasi politik dalam perspektif intepretatif-subyektif. Herbert Blumer menegaskan bahwa manusia sebetulnya bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang melekat pada sesuatu tersebut. Makna dan tindakan itu sesungguhnya saling mempengaruhi dan proses intepretatif yang terjadi di dalamnya melibatkan pertukaran makna, suatu transaksi di mana sebab dan akibat tidak dapat dibedakan. Berdasarkan asumsi tersebut, komunikasi politik dapat didefinisikan, pertukaran makna di antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan distribusi dan penglolaan kekuasaan. (Mulyana:2014:10)

Dalam paradigma kritis, berangkat dari prinsip-prinsip, *pertama*, mencoba memahami bahwa sistem yang berkembang sudah benar, struktur kekuatan dan keyakinan, atau ideologi yang mendominasi masyarakat dengan pandangan tertentu di mana minat-minat disajikan oleh struktur –struktur kekuatan tersebut. *Kedua,* upaya untuk membuka kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan untuk mempromosikan emansipasi atau transformasi sosial. *Ketiga,* menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori dan tindakan. Teori-teori tersebut bersifat normatif dan bertindak untuk mendapatkan atau mencapai perubahan dalam kondisi-kondisi yang mempengaruhi masyarakat. (Little John:2009:20)

Realitas komunikasi politik dalam dataran empiris terbentuk dalam pola dan sistem kekuasaan dan kewenangan yang relatif stabil, tetapi dibalik realitas stabil tersebut tersembunyi kekuatan yang bersifat laten ataupun

manifes untuk mendominasi, memanipulasi dan mengkomodifikasi dengan nilai-nilai tertentu. Untuk itu tujuan kritis untuk mengkritik dan mengubah hubungan sosial dengan cara mengungkapkan sumber-sumber yang mendasari kontrol sosial, hubungan kekuasaan dan kesetaraan, dengan mengungkap mitos dan kebenaran yang tersembunyi akan membantu mereka yang termarginalkan. (Neuman:2013:124)

Perspektif kritis tidak bisa dipisahkan dari pemikiran Marx sebagai landasannya. Marx menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah penindasan yang di akibatkan oleh sistem produksi ekonomi, karena jumlahnya terbatas sehingga terjadi penguasaan oleh kelas yang satu dengan kelas yang lain. Oleh karean itu perlu pengusaan produksi ekonomi oleh kelas buruh, dan didistribusikan secara adil. Peralihan pengusaan tersebut merupakan dasar adanya emansipasi manusia keluar dari penindasan.

Bagi pemikir Neo Marxis, atau yang dikenal dengan pemikir kritis, pengandaian Marx terhadap realitas sosial yang disempitkan dalam sistem produksi ekonomi di anggap terlalu deterministik, sehingga teori Marx kehilangan relevansi. Pemikir Neo Marxis, seperti Horkhemeir, Adorno, maupun Marcuse dalam perjalanan untuk menyegarkan jalan pikiran Marx ternyata juga mengalami jalan buntu. Seperti yang di lontarkan Herbert Marcuse, dalam karyanya, *One Dimensional Man pada* tahun 1960, menjelaskan, situasi masyarakat industri maju dilukiskan sebagai masyarakat yang berdimensi tunggal, dengan hilangnya dimensi kedua, negasi atau

perlawanan terhadap sistem masyarakat hanya mengadaptasi dominasi total teknokratisme. (dalam Hardiman:2003:xviii).

Kegagalan dari para pendahulu Mazhab Frankfurt, seperti yang dikatakan Habermas karena adanya pendangkalan terhadap pengertian praksis yang dipahami hanya sebagai kerja, seperti Marx memahami praksis sebagai "paradigma kerja", Marcuse menyebut sebagai "rasionalitas teknologi", "rasio instrumental (Horkheimer), "mitos" (Adorno dan Horkmheimer). Praksis adalah tindakan dasar manusia sebagai mahkluk sosial untuk melakukan produksi. Praksis, bagi Habermas tidak sekedar dipahami sebagai paradigma kerja, melainkan juga paradigma komunikasi. Sebab, praksis dilandasi oleh kesadaran rasional, tidak sekedar dipahami sebagai upaya untuk merealisir tujuan dengan kerja, melainkan juga interaksi subyektif dengan bahasa. (dalam Hardiman: 2003:xx) Kerja membuat manusia berdistansi dengan obyeknya, bahasa memungkinkan distansi dan persepsi langsung dengan obyek.

Kekuasaan politik, bagi Habermas (dalam Hardiman:2003:121) bukan sekedar legitimasi, melainkan juga harus rasional. Kekuasaan yang hanya mengandalkan legitimasi akan jatuh pada hal-hal yang irasional. Bentuk kekuasaan politik yang irasional, seperti pemaksaan kehendak, dominasi atau hegemoni, atau manipulasi. Dalam kekuasaan politik terdapat dimensi-dimensi kebijakan atau kehendak dari pemegang kekuasaan, agar kebijakan itu bisa diterima dan menguasai publik maka harus rasional.

Dalam kasus pengangkatan “Budi Gunawan (BG)” sebagai calon Kapolri, misalnya. Presiden Jokowi sebagai presiden seperti yang di atur dalam Undang-Undang, dengan persetujuan parlemen berhak untuk mencalonkan dan mengangkat Kapolri. Tetapi pada kenyataan, legitimasi Jokowi dan parlemen tidaklah cukup untuk mengangkat BG sebagai Kapolri, karena penolakan publik yang begitu kuat, karena di duga BG tersangkut masalah korupsi. Apabila sampai Presiden Jokowi tetap mengangkat BG sebagai Kapolri, maka kekuasaan yang dijalankan menjadi irasional.

Begitu pula, ketika rezim Orde Baru menjalankan kekuasaan, bisa dikatakan legitimasi, karena dalam setiap periode suksesi kepemimpinan dilakukan pemilihan umum sebagai bentuk mendapatkan legitimasi. Kekuasan itu, akhirya menjadi irasional, karena legitimasi yang didapatkan bukan bentuk kerelaan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, melainkan melalui aparatur negara melakukan pemaksaan, itimidasi maupun manipulasi sehingga kekuasaan menampakan wajah dominasi dan hegemoni atau irasional.

Oleh karena itu bagaimana kekuasaan itu bisa rasional, Habermas berpijak pada batasan rasionalisasinya Weber (dalam Ritzer & Goodman:2008:147), yaitu meluasnya wilayah-wilayah sosial yang diatur norma-norma pengambilan keputusan yang rasional dan tindakan-tindakan rasional. Pemahaman rasionalisasi kekuasaan seperti dalam bentuk instrumentalnya Weber, bagi Habermas banyak menimbulkan masalah, karena sebuah politik hanya semata-mata teknis justeru kehilangan fungsinya sebagai

pengarah kehidupan sosial yang pada dasarnya praktis dan intersubyektif. (dalam Hardiman:2003:120). Politik dalam wilayah instrumental, justeru menjadi alat dominasi bagi sistem kekuasaan yang menutup ruang "dunia kehidupan" untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis.

Oleh karena itu Habermas mengembangkan apa yang disebut dengan diskursus praktis. Konsep ini mengadaikan bahwa dalam masyarakat terdapat norma-norma rasional yang mengatur perilaku dan dipatuhi oleh para warga, serta harus dilegitimasikan dalam intersubyektif atau mencapai konsensus rasional atas norma-norma tersebut. (dalam Hardiman:46:2013) Melalui diskursus praktis problem-problem di sekitar masyarakat dipecahkan dengan secara kooperatif, sehingga tercapai konsensus semua peserta. Gagasan Habermas tentang diskursus praktis ini, sepertinya identik dengan model "musyawarah mufakat". Setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama, dan dilaksanakan bersama. Perbedaan pengambilan keputusan dalam musyawarah akan diselesaikan secara argumentatif oleh masing-masing peserta secara rasional, sampai terjadi pemahaman bersama. Model 'musyawarah mufakat" tidak mengenal oposisi, karena ketidakpuasan terhadap putusan tersebut, tetapi dengan kerelaan dan besar hati ikut mendukung putusan tersebut. Dalam musyawarah, setiap peserta mempunyai kedudukan sama dengan yang lain, dan secara bersama terhadap putusan tersebut. Inilah yang kemudian disebut Habermas sebagai praktek diskursus, yaitu

meradikalkan sebuah konsensus yang legitim harus disetujui dan dipatuhi oleh semua orang.

Oleh karenanya, setiap orang harus mempunyai hak dasar, hak yang dimiliki individu dalam masyarakat untuk menata kehidupan bersama secara legitim dengan hukum posistif. (dalam Hardiman:84:2013) Habermas menjelaskan tentang lima (5) hak dasar yang ia bagi dalam dua (2) kategori, *pertama*, kategori hak-hak dasar kebebasan, yang terdiri dari 1) hak untuk kebebasan bertindak yang dimiliki setiap orang tanpa diskriminasi, misalnya hak hidup, hak kebebasan. 2) hak yang berdsarkan keanggotaan sukarela seseorang dalam komunitas politis, dan 3) hak untuk perlindungan hukum bagi individu dan klaim hukum, seperti hak perlakukan sama dihadapan hokum. *Kedua*, yang merupakan hak ke-4) hak untuk berpartisipasi dalam proses formasi opini dan aspirasi secara demokratis, 5) hak untuk mendapatkan jaminan atas kondisi-kondisi hidup yang dipastikan secara sosial, teknis dan ekologis. Bagi Habermas hak-hak dasar tersebut harus diinstitusionalkan untuk berlangsungnya komunikasi politik yang bebas dominasi.

Oleh karenanya, Habermas mengajukan apa yang disebut dengan "pengilmiahan politik" atau "model pragmatis". Model digambarkan sebagai komunikasi timbal balik yang kritis di antara para ahli dan para politikus yang pada gilirannya para ahli memberikan nasihat atau masukan pada para pengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan. Interaksi yang kritis inilah yang di lihat sebagai bentuk dari rasionalisasi kekuasaan.

Melalui penekanan pada “interaksi kritis” , maka komunikasi politik dalam perspektif kritis dapat didefiniskan sebagai “interaksi kritis dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam penglolaan kekuasaan”. Pengertian kritis di sini adalah selalu mempertanyakan pendayagunaan kekuasaan yang dianggap menyimpang dari pandangan etika, moral atau norma yang diidealkan. Interaksi kritis berusaha untuk merasionalkan kekuasaan, yang di dalamnya muncul keinginan atau motivasi untuk melakukan transformasi atau perubahan sosial.

Dalam hal ini, Habermas menyinggung tentang kekuasaan administratif, yaitu sebuah kekuasaan yang mengandaikan cara-cara strategis dan profesional untuk merealisasikan tujuan-tujuan kolektif tertentu dengan instrument–instrumen organisatoris. (dalam Hardiman:2013:92) Kekuasaan politik seperti ini berakar pada tindakan strategis. Dalam kekuasaan administratif, merefleksikan diri sebagai kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Di sisi lain, Habermas menyebut kekuasaan komunikatif (dalam Hardiman:2013:96), sebagai berikut:

> Kekuasan komunikatif seperti itu hanya dapat terbentuk di dalam ruang-ruang publik yang tidak terdeformasi dan bertolak dari struktur-struktur intersubyektivitas yang utuh dari sebuah komunikasi yang tidak terdistorsi.

Penegasan Habermas ini mengisyaratkan komunikasi bebas dari dominasi. Para pihak dalam yang berperan serta adalah bertitik tolak kajian penelitian, khususnya pada komunikasi politik dalam perspektif kritis kecenderungan mengarah pada minat bahasa. Melalui bahasa dengan

perantaraan media massa menjadikannya sebagai alat dominasi terhadap kelompok pinggiran. Bahasa juga menjadi sebuah desakan kepentingan dalam ekspresi individu karena bahasa dari kelas dominan membuatnya sulit bagi kelompok kelas pinggiran untuk memahami keadaan mereka dan menemukan cara untuk mencapai emansispasi. (Little John & Foss:2009:70)

Oleh karenanya, arena kajian difokuskan pada wacana-wacana kritis, seperti penelitian Hamad (2005), Syaifudin (2014). yang mengkaji keberpihakan media dalam dalam pemberitaan terhadap suatu realitas. Media massa yang seharusnya bertindak dalam menyediakan ruang publik independen, obyektif dan bebas dari kepentingan, karena kepentingan politik maupun ekonomi dalam kenyataan menjadi instrumen untuk melakukan praktek komodifikasi melalui teks.

Kajian lain, seperti di lakukan Michael David Post, (2009) dengan judul *Representations of Meaning Within Textual Personas: An Analysis Of 2008 US Presidential Campaign Speeches.* Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis representasi aktor sosial dalam wacana politik. Untuk memahami bagaimana spesifik struktur wacana mempengaruhi proses mental yang berbeda atau memungkinkan pengembangan representasi sosial yang berbeda.

Penelitian Helena Markstedt,(*2007), The representation of women politicians. A case study of the websites and newspaper coverage of the women candidates in the Labour Party Deputy Leadership election.* Penelitian ini memfokuskan pada persamaan dan perbedaan antara teks situs dan liputan

koran dari dua calon perempuan, Hazel Blears dan Harriet Harman. Temuan menunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan antara teks situs dan artikel surat kabar dalam hal fokus, tetapi penyajian kandidat sebagai individu sering tidak menguntungkan media cetak.

Kajian komunikasi politik dalam perspektif kritis yang lain, di lakukan Abdul Halik (2014), "Komunikasi Politik Di Ruang Publik Gerakan Mahasiswa". Melalui pendekatan etnografi kritis, kajian itu menjelaskan, (I) Posisi gerakan mahasiswa dalam komunikasi politik melalui aksi demonstrasi berada dalam perebutan tiga kepentingan berbeda, yakni kepentingan politisi, media massa, dan gerakan mahasiswa sendiri. Politisi menggunakan gerakan mahasiswa untuk mengungkap respon dan kritik publik terhadap kebijakan publik. Media menggunakan gerakan mahasiswa sebagai komoditas yang laku dijual ke publik. Organisasi kemahasiswaan memanfaatkan gerakan mahasiswa sebagai bentuk komunikasi politik di ruang publik politis. (2) Aktivis mahasiswa memandang demonstrasi sebagai bentuk penyaluran aspirasi, ekspresi, dan kritik di ruang publik politis mengalami polarisasi, tidak didasarkan pada konsepsi ideologis yang kuat, kurang konsolidasi, kehilangan fokus, dan terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan pragrnatis sehingga mengalami disorientasi; (3) Tindakan kekerasan yang terjadi pada aksi demonstrasi mahasiswa disebabkan oleh sejumlah faktor, yakni: Kesenjangan sosial, politik, dan ekonomi; aktualisasi identitas kultural mahasiswa; konflik internal perguruan tinggi; kepentingan media massa; sikap dan respon

pemerintah yang mengecewakan; suasana lapangan dan tindakan pengamanan yang represif; dan pandangan aktivis dan pengorganisasian gerakan mahasiswa.

Berangkat dari asumsi bahwa kekuasaan politik yang hegemonik dan represif berpengaruh terhadap realitas komunikasi. Keadaan itu menjelaskan, bahwa di samping pengutamaan arus komunikasi berada pada subyektifitas penguasa, juga interaksi komunikasi kritis sesama anggota masyarakat dibatasi. Realitas demikian, pada ujungnya menghadapkan pada resistensi terhadap kekuasaan itu sendiri. Bentuk resistensi bisa bermacam-macam, mulai aksi terbuka dengan mengambil posisi yang diametral dengan kekuasaan, membangun kelompok-kelompok politik di luar kekuasaan atau dalam kekuasaan yang tujuannya adalah membangun kesadaran.

1.2.2.1. Konflik Dalam Perspektif Kritis

Untuk memahami teori konflik dalam perspektif kritis, adanya baiknya untuk menelaah konflik dalam persepektif positivis maupun konstruktivis. Dalam pemahaman positivis, konflik muncul dalam relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dengan sistem tidak mungkin terlibat dengan konflik. Seperti disebut Dahrendorf sebagai "*integrated into a common frame of reference"* Pemikiran konflik Dahrendorf merupakan kritik terhadap teori fungsional struktural Talcot Parson yang menekankan bahwa dalam memahami masyarakat sebagai sistem sosial terdapat struktur-struktur yang mempunyai fungsi dalam pemeliharaan

keberlangsungan sistem sosial tersebut. Para fungsional struktural melihat masyarakat sebagai unit yang statis atau sekedar kondisi ekuilibrium yang terus bergerak. Tetapi bagi Dahrendorf dan teoritisi konflik, (dalam Ritzer & Goodaman:2008:259), setiap masyarakat tunduk pada proses-proses perubahan yang merupakan hasil pertentangan dalam sistem sosial. Fungsional struktural melihat bahwa setiap eleman masyarakat menyumbang terhadap stabilitas, sedangkan teoritisi konflik melihat adanya aktor-aktoir masyarkat yang justeru berperan dalam lahirnya disintegrasi dan perubahan.

Dahrendorf (dalam Ritzer & Goodaman:2008:282) melihat masyarakat dalam dua wajah yaitu, konflik dan konsensus. Dalam konsensus, masyarakat dilihat sebagai bentuk integrasi dan mempunyai kohesi yang kuat diantara aktor. Sebaliknya, konflik menempatkan kepentingan dan koersif yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut. Artinya, melalui konflik yang merupakan relasi yang berlangsung di tengah masyarakat menjadi potensi untuk melakukan penyatuan dengan jalan konsensus. Sedangkan, relasi yang terbentuk berdasarkan hubungan kekuasaan. Ia mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat dari kemungkinan perlawanan itu menyerah”. (Dahrendorf:1959;166)

Berbeda dengan perspektif positivis, yang merupakan analisis sosiologi makro, perspektif konstruktivis lebih menekankan pada analisis mikro. Melalui interaksi simbolik menjadi pisau analisis dalam memahami konflik dalam

perspektif konstruktivis. Dalam tema sentral interaksi simbolik, meletakan individu sebagai mahkluk yang kreatif yang menciptakan bahasa yang teraktualisasi melalui tindakan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Tindakan-tindakan tersebut menjadi simbol yang dimaknai oleh diri sendiri dan ditujukan untuk lingkungan yang terdiri dari berbagai aktor yang berbeda yang juga memberi makna dalam bentuk respons tindakan. Konflik bisa terjadi karena simbol bisa dimaknai secara variatif oleh aktor dalam interaksi sosial. Makna negatif dalam bentuk kebencian bisa membentuk prasangka dan tindakan permusuhan antar aktor, seperti konflik antar etnis.

Pemikiran konflik dalam perspektif kritis dapat dilacak dari pemikiran Marx yang melihat masyarakat dalam kelas yang saling bertentangan, yaitu kelas borjuasi dengan kelas proletar karena disebabkan ketimpangan dalam distribusi ekonomi. Revisi dari pemikiran Marx ini, dilakukan oleh Horkhemeir, Adorno, dan Herbert Marcuse yang disebut dengan pemikiran kritis generasi pertama.

Habermas yang merupakan pewaris pemikiran kritis, melanjutkan kebuntuan pemikiran yang dilakukan pendahulunya. Dalam merekonstruksi tentang konflik, Habermas berpijak pada fungsional structuralnya Talcot Parson, interaksionalisme simbolik Herbert Mead, maupun tindakan sosial Max Weber. Habermas (1991:251) menjelaskan bahwa ia melakukan “kombinasi paradigma”, yaitu menciptakan perspektif agensi-struktur dengan mengintegrasikan gagasan-gagasan yang berasal dari teori tindakan dan teori

sistem. Oleh karena itu, ia melihat masyarakat ke dalam dua sisi, yaitu dunia kehidupan atau *lifeworld* dan sistem.

Dunia kehidupan atau *lifeworld* adalah merepresentasikan perspektif internal. Lebih lanjut Habermas (2007:202-203) menjelaskan

> Dari perspektif internal dunia-kehidupan, masyarakat direpresentasikan sebagai jaringan kerja sama yang diperantarai oleh komunikasi, dengan hubungan strategis dan keruntuhan yang terselip ke dalamnya. Ini tidak berarti bahwa apa yang terhapus dari pandangan ini adalah setiap situasi yang tak tentu, setiap konsekuensi yang tidak dikehendaki, setiap kordinasi yang gagal dan setiap konflik. Bagimanapun juga, yang merekatkan individu yang telah bersosialisasi satu sama lain dan yang melestarikan integrasi masyarakat adalah jaringan tindakan komunikatif yang mampu bertahan berkat tradisi kultural, dan bukannya mekanisme sistemik yang ada di luar jangkauan pengetahuan intiutif anggotanya.

Dunia kehidupan yang digagas Habermas adalah hasil bentukan dari relasi para aktor yang hidup berdampingan dalam tradisi budaya yang sama melalui tindakan komunikasi. Ketika memahami dunia kehidupan masyarakat seperti itu, maka harus menerima tiga fiksi, yaitu a) otonomi aktor, b) independensi, c) transparansi komunikasi.(Habermas: 2007:203). Ketiga hal tersebut bisa diterima apabila integrasi masyarakat di pahami dalam medium tindakan komunikasi. Hal ini mengadaikan bahwa tindakan yang berorientasi tujuan bukan sekedar pencapaian pemahaman melainkan juga hubungan secara fungsional yang tanpa disadari dalam cakrawala praktik kehidupan. Dalam menggambarkan situasi tersebut, Habermas mengambil contoh dalam masyarakat kapitalis, bahwa pasar adalah tempat medium penting bagaimana aktivitas yang tidak di kendalikan oleh norma-norma tetapi merupakan

aktivitas kerjasama. Seperti yang dikatakan Adam Smith, pasar sebagai interaksi yang bebas antara hukum permintaan dan penawaran. Kesimbangan hukum pasar bisa berlangsung karena adanya "*invisible hand"* yang mengatur hubungan tersebut. Pemahaman timbal balik terhadap hukum tersebut akan mengharmoniskan dunia kehidupan dengan tindakan komunikasi.

Lifeworld yang terbentuk, seperti yang digagas Habermas adalah mengacu pada pola-pola interpretif yang diteruskan secara budaya meliputi pembentukan identitas-identitas kelompok dan perkembangan kepribadian-kepribadian individu. Untuk itu *lifeworld* akan berfungsi nyata apabila melaksanakan tiga bentuk sistem reproduksi sosial. *Pertama*, reproduksi kebudayaan tempat para peserta mereproduksi dan memodifikasi simpanan pengetahuan yang sudah diinterpretasikan lebih dahulu yang dapat mereka gunakan untuk mencapai pengertian timbal balik. *Kedua*, integrasi sosial yang dapat dimanfaatkan para peserta untuk menglola interaksi–interaksi interpersonal dan mengatur keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial guna menciptakan kesetiakawanan kemasyarakatan. *Ketiga*, sosialisasi yang mereproduksi kompetensi-kompetensi yang menjadikan suatu subyek mampu berpartisipasi timbal balik dalam proses-proses komunikatif. Habermas menyebut kuumpulan kompetensi itu sebagai kepribadian.

Di sisi lain, Habermas (2007:208) melihat bahwa dari partisipan anggota dunia kehidupan, sosiologi yang berorientasi pada teori sistem seolah hanya melihat satu dari tiga komponen dunia kehidupan, yaitu sistem institusional, di

mana kebudayaan dan kepribadian hanya membentuk lingkungan pelengkap. Dengan kata lain, dunia kehidupan sebagai bagian dari sub sistem yang menentukan pola-pola sistem secara keseluruhan.

Bagaimanapun juga sistem berakar dalam dunia kehidupan, tetapi pada akhirnya ia akan melahirkan strukturnya sendiri. Struktur itu meliputi, sistem negara, ekonomi, politik maupun keluarga. Dengan perlahan secara evolusioner, sistem tumbuh melampaui dunia kehidupan, dan struktur-struktur dalam sistem tumbuh menjadi mandiri. Ketika sistem berada dalam kekuasaan, akhirnya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan dunia kehidupan. Sebuah sistem mencapai tatanan sosial lewat integrasi fungsional konsekuensi tindakan-tindakan individu anonim berdasarkan media abstrak (dalam Ritzer & Smart:2015:411)

Realitas untuk menggambarkan keadaan tersebut, misalnya, pada sistem politik. Awalnya politik dimaknai sebagai kehendak untuk membuat kebijakan maupun keputusan secara bersama, seperti yang digambarkan dalam masyarakat *polis* jaman Yunani Kuno. Sebuah kebijakan maupun keputusan diambil berdasarkan partisipasi dalam sebuah tindakan komunikatif para aktor. Masing-masing melakukan interaksi dan komunikasi untuk mencapai pemahaman yang berada dalam dunia kehidupan-*lifeworld*. Politik yang merupakan wilayah otonom hanyalah abstraksi dari berbagai relasi informal yang menyusun kekuasaan. Siapa yang berkuasa dan bagaimana suatu keputusan dibuat merupakan hasil konsensus. Tetapi, kepentingan individu

atau kelompok yang dominan, faktor psikologi akan kemasyuran dan kehendak untuk menguasai menjadikan politik yang awalnya sebuah dunia kehidupan yang harmonis lambat laun secara evolusioner terdifferensiasi dalam sistem politik yang tidak rasional. Kekuasaan politik berkembang dalam sebuah otoritarian.

Habermas menyebut fenomena ini sebagai "kekerasan yang dilakukan terhadap dunia kehidupan oleh sistem dengan cara-cara yang membatasi komunikasi, kekerasan ini pada gilirannya menimbulkan patologi di dalam sistem kehidupan". (Ritzer & Goodman:2008:594). Lebih lanjut dikatakan Habermas (2007:248)

> Berpindahnya koordinasi tindakan dari bahasa menuju media pengendali berarti terpisahnya interaksi dari konteks dunia kehidupan. Media seperti uang dan kekuasaan melekat pada ikatan empiris, dia mengkodekan sikap rasional-bertujuan terhadap sejumlah nilai yang dapat dihitung dan membuka kemungkinan untuk memberi pengaruh umum dan strategi pada keputusan partisipan lain sambil menerobos proses komunikasi yang berorientasi konsensus. Selama media-media tersebut tidak cuma menyederhanakan komunikasi linguistik, namun menggantinya dengan generalisasi simbolis terhadap imbalan dan hukuman, konteks dunia kehidupan yang selalu menjadi sandaran bagi proses pencapaian pemahaman pun akhirnya terdevaluasi karena lebih mengutamakan interaksi yang dikendalikan media;dunia kehidupan tidak lagi diperlukan untuk mengatur tindakan.

Yang dimaksud dengan Habermas tentang "media pengendali " adalah sistem. Rasionalisasi sistem secara perlahan menggerogoti rasionalisasi dunia kehidupan yang pada akhirnya dunia kehidupan mengalami tekniksasi. Meluasnya rasionalisasi sistem mengungguli rasionalitas dunia kehidupan

berakibat pada konflik karena dunia kehidupan dikolonialisasi-kuasai oleh sistem. Dengan demikian, pemahaman terhadap konflik yang dikembangkan mahzab kritis adalah adanya dominasi struktural di wilayah dunia kehidupan.

Lebih lanjut Habermas (2007:xii) menjelaskan tentang konflik,

> Dalam masyarakat Barat yang maju, konflik yang berkembang selama sepuluh sampai dua puluh tahun terakhir dalam banyak hal telah menyimpang dari pola konflik terlembaga menyangkut distribusi di Negara kesejahteraan sosial. Konflik-konflik tersebut tidak meletus pada wilayah-wilayah reproduksi material, tidak disalurkan melalui partai dan persekutuan, dan pula tidak terhapus oleh kompensasi yang sejalan dengan sistem. Namun konflik-konflik baru ini muncul di wilayah-wilayah reproduksi kultural, integrasi sosial dan sosialisasi, dilakukan dalam bentuk proses substitusional atau setidaknya ekstra parlementer, dan defisit yang mereka alami mencerminkan reifikasi wilayah-wilayah tindakan yang distrukturkan secara komunikatif, yang tidak dapat diperoleh melalui media uang dan kekuasaan. Ini terutama bukanlah soal perlindungan dan cara hidup. Singkat kata, konflik-konflik baru tidak meletus di sekitar masalah distribusi namun di sekitar persoalan tata bahasa bentuk kehidupan.

Dalam pendekatan konflik, Habermas ingin melampaui Marx, bahwa konflik terjadi tidak bukan masalah ekonomi, melainkan dalam bentuk lain seiring dengan perkembangan masyarakat. Menurutnya, konflik atau kontradiksi sosial terjadi hanya jika prinsip organisasi sebuah masyarakat mengharuskan para individu dan kelompok-kelompok terus menerus bertentangan satu sama lain dengan klaim-klaim dan intensi-intensi yang jangka panjang tidak bersesuaian satu sama yang lain.(dalam Hardiman: 2003:155)

Di sisi lain, komunikasi yang diciptakan dalam kondisi ini selalu dimuati oleh kepentingan dan menundukan, yang disebut dengan komunikasi

instrumental. Dalam istilah Habermas (dalam Ritzer & Smart: :2015:400-4001) membedakan antara “komunikasi strategis” dengan yang kedua “sebagai “tindakan komunikasi”. Dalam komunikasi strategis, tujuan tindakan sosial sudah ditentukan lebih dahulu dan seringkali tersembunyi. Maksudnya bukan untuk mencapai kesepakatan tentang tujuan-tujuan tindakan, tetapi hanya melaksanakan secara efektif rencana pembicara. Sebaliknya, tindakan komunikatif bertujuan mencapai pengertian yang inheren dalam percakapan manusia.(Habermas: 1984:287).

Dominasi komunikasi instrumental menyebabkan terganggunya reproduksi kultural. Hal ini seperti dijelaskan Habermas(192:1997),

> Hal ini terbukti manakala reproduksi kultural mengalami gangguan, yaitu ketika makna menghilang dan krisis legitimasi dan krisis orientasi yang terkait dengannya datang mengancam. Dalam kasus semacam itu, stok pengetahuan aktor tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan akan pemahaman timbal balik yang dituntut situasi-situasi baru. Validitas skema interpretatif yang selama ini diterima mengalami kegagalan, dan sumber “makna”semakin langka.

Habermas ingin menegaskan bahwa dominasi pada wilayah komunikasi instrumental atau sistem dengan sendirinya menyebabkan aktor yang berada pada wilayah kehidupan tidak mampu berinteraksi untuk mengembangkan kebudayaan. Padahal, komunikasi strategis yang bisa berkembang dalam sub sistem apabila ada keleluasaan tumbuh tanpa ada kepentingan pembatasan akan memberi sumbangan pada pengembangan kultural pada sistem. Melalui pertumbuhan reproduksi dalam wilayah dunia kehidupan–*lifeworld*, seperti skenario Habermas, sistem secara evolusioner bisa melampaui atau beradaptasi

dengan perkembangan zaman. Hal ini yang dimaksudkannya, bahwa perubahan masyarakat tidak harus berlangsung secara revolusioner, tetapi akan diawali dengan tumbuhnya reproduksi kultural yang secara interaktif dilakukan oleh aktor.

Permasalahannya, bagaimana kalau pertumbuhan dunia kehidupan-*lifeworld* dibatasi oleh imperatif sistem atau telah terjadi kolonialisasi sehingga sehingga dunia kehidupan gagal dalam melakukan integrasi sosial. Hal ini yang menjadi fokus dalam penelitan ini, rezim Orde Baru yang dipahami dalam perspektif sistem dengan segala aparatus yang dimiliki mengendalikan segala lini kehidupan, khususnya politik. Wilayah yang seharusnya merupakan tempat untuk berpartisipasi dan berinterakasi untuk reproduksi kultural mengalami stagnasi karena sistem politik yang dominan. Seperti yang dikatakannya, semakin jauh imperatif–imperatif sistemik melakukan penetrasi ke dalam ruang, semakin besar bahaya kehancuran terjadi. (Habermas :xliii:2007)

Komodifikasi politik yang dilakukan rezim Orde Baru yang bertahan lebih dari tiga dasarwarsa, kenyataan tidak relevan dengan keadaan zaman. Dunia kehidupan, dalam hal ini pendukung Megawati dan aktivis lain menuntut agar ruang kehidupan diinstrumenkan dalam tindakan komunikatif. Ketidaksesuian kepentingan sistem dengan dunia kehidupan inilah yang melahirkan konflik.

Perbedaan dengan Habermas, “basis material” yang dipergunakan Habermas adalah masyarakat kapitalis lanjut yang berlangsung di Eropa Barat. Dalam masyarakat tersebut, masih terbuka ruang bagi dunia sosial secara politik masih bebas tanpa hambatan dalam mengembangkan tindakan komunikasi untuk mereproduksi kultural. Hal ini berlainan dengan kondisi Indonesia pada era rezim Orde Baru yang dikenal dengan politik dominasi dan represif. Dengan fokus pada konflik internal PDI, sebenarnya ingin mengkaji bagaimana dunia kehidupan-*lifeworld* melakukan integrasi sosial sehingga berlangsung transformasi.

1.2.3. Kerangka Alur Pikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap komunikasi politik yang berlangsung dalam konflik internal PDI. Historiografi rezim Orde Baru menjelaskan bahwa konflik internal partai politik yang berlangsung pada era rezim Orde Baru, tentu tidak bisa dilepaskan dari sistem dan budaya yang dikembangkan rezim dengan kekuasaan yang hegemonik. Partai politik sebagai sub ordinasi dari sistem kekuasaan dalam aktivitasnya berada dalam penguasaan dan pengendalian rezim. Oleh karenanya, konflik internal yang berlangsung menjadi inheren dengan strategi rezim kekuasaan untuk menstabilkan sistem agar posisi *status quo* tetap terjaga.

Kenyataanya, konflik internal PDI sebagai sarana integrasi politik rezim Orde Baru berhadapan dengan resistensi atau perlawanan kelompok PDI Megawati. Melihat realitas tersebut, analisis teori yang relevan dalam melihat

realitas tersebut adalah teori tindakan komunikasi dari Habermas. Merujuk pada pemikiran kritis, integrasi atau stabilisasi politik yang dilakukan rerzim Orde Baru merupakan perluasan dari imperative sistem untuk "mengkolonisasi" dunia kehidupan yang direpresentasikan dalam kelompok PDI Megawati.

Dalam konflik internal PDI timbul dominasi yang dilakukan secara simbolik yang bertujuan untuk menstruktur realitas sosial. Kemampuan dalam menstruktur realitas sosial tergantung pada habitus dan *capital power* yang dimiliki. Upaya untuk menstruktur realitas melalui kuasa simbolik tidak selalu barhasil diinternalisasi dengan baik karena adanya perlawanan. Adanya perlawanan tersebut membentuk arena, sehingga terjadi pertarungan simbolik terhadap pihak yang terlibat konflik.

Teori yang relevan untuk melihat realitas tersebut adalah teori praktek sosial Bourdieu yang dimaksudkan untuk memahami pertarungan simbolik, dan menelusuri habitus maupun capital power yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat konflik.

Ringkasan secara keseluruhan proses dan cara kerja penelitian, baik yang dilakukan secara teoretis, seperti yang telah direncanakan, maupun cara kerja seperti ditemukan dan dilakukan di lapangan dapat dilihat di dalam model penelitian berikut ini.

Gambar 2
Kerangka Pemikiran
Sumber: Modifikasi Peneliti

Secara garis besar, penjelasan mengenai alur kerangka berpikir di atas dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Peristiwa konflik internal PDI, dengan munculnya PDI Pro Kongres berhadapan dengan PDI Megawati. PDI Pro Kongres merupakan kelompok yang didukung oleh rezim Orde Baru
2. Konflik internal PDI, kenyataannya adalah alat integrasi politik rezim Orde Baru terhadap potensi-potensi yang dianggap mengancam posisi *status quo* dari rezim. Tetapi, bagi PDI Megawati konflik internal bukan sekedar konflik dengan kelompok PDI Pro Kongres melainkan juga menjadi sarana perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang melakukan dominasi.
3. Konflik internal menjadi arena untuk merebutkan legitimasi politik yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk komunikasi politik masing-masing aktor yang terlibat konflik.
4. Manifestasi komunikasi politik masing-masing aktor akan menjelaskan model integrasi, dan model tindakan komunikasi, serta dinamika komunikasi politik dalam konflik internal PDI.

1.3. Metodologi

1.3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas ruang holistik. Untuk itu upaya mendalami dan menafsirkan realitas atau obyek yang diteliti merupakan hal yang penting dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap komunikasi politik dalam konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dengan kasus peristiwa penyerangan kantor DPP PDI yang terjadi pada 27 Juli 1996. Dalam konflik internal, diasumsikan adanya keterlibatan aktor-aktor dengan berbagai kepentingan ideologis, kemudian adanya wacana-wacana yang dikonstruksikan para aktor untuk melegitimasikan tindakannya. Itu sebabnya untuk memahami lebih mendalam hal tersebut, uraian tentang sentral kekuasaan Orde Baru dengan aparatur militernya, pihak-pihak yang terlibat konflik, seperti PDI pendukung Megawati dan PDI Pro Kongres, serta aktivis lain yang menggunakan peristiwa tersebut sebagai upaya untuk melakukan transformasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menekankan pada strategi pendekatan sejarah. Dalam hal ini yang terpenting adalah upaya intepretatif. Tuchman (dalam Denzin & Lincoln: 2009:410) menjelaskan, penelitian sosial yang memadai selalu menggunakan informasi-informasi historis dalam kerangka teoritis. Fenomena sosial apapun harus dipahami dalam konteks historisnya, untuk itu diperlukan sudut pandang, termasuk kerangka intepretasi yang mengandung “makna sejarah”. Oleh karena sebuah peristiwa harus diperhatikan, *pertama* sumber data (teks dan historis), *kedua*, sejarah sebagai perspektif tertentu, di mana teks dikaitkan dengan konteks sosial tertentu, *ketiga*, sejarah sebagai analisis, yakni cara bagaimana mengungkap konteks dan dibandingkan dengan fakta lainnya. (Kaligis:7:2014).

Dalam wawancara mendalam dengan partisipan, analisis dokumen baik berupa arsip, foto, transkrip rekaman audio maupun video, jurnal, buku-buku yang terkait tema penelitan menjadi “teks lapangan” untuk diinterpretasi. Dalam intepretasi data, hal yang yang perlu dipertimbangkan adalah sudut pandang peneliti dalam melihat sebuah realita disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini langkah *pertama*, menyusun tema-tema yang disesuaikan dengan tujuan dan maksud peneliti, dengan mempertimbangkan aspek sinkronik maupun diakronik dari fakta sejarah. *Kedua*, mengumpulkan data yang relevan, yaitu dengan mengadakan wawancara intensif dan mendalam dengan partisipan, wawancara dengan sumber yang terkait, pengumpulan data dokumen, baik berupa arsip, buku, jurnal, audio maupun video. Pengumpulan data yang beragam bisa menjadi saran untuk sarana triagulasi, dimana data yang diperoleh dari satu teknik pengumpulan data dicek dengan data lain yang diperoleh lewat cara lain. Misalnya, wawancara dengan partisipan penelitian bisa dicek dengan data yang diperoleh dari dokumen lain. Langkah *ketiga*, melakukan intepretasi terhadap realitas atau obyek yang diteliti.

1.3.2. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk dalam paradigma kritis. Paradigma ini bertujuan untuk pemberdaayaan. Kincheloe Mc Laren (dalam Neuman: 2011:124), menyatakan:

> Penelitian kritis paling bisa dipahami dalam konteks pemberdayaan individu. Penyelidikan yang mengaspirasi nama kritis harus di hubungkan dengan usaha untuk menghadapi ketidakadilan masyarakat tertentu atau lingkungan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi usaha transformatif yang tidak di permalukan dengan label politik dan tidak takut untuk menyempurnakan hubungan dengan kesadaran emansipasi.

Pada level ontologis, penelitian ini melihat bahwa realitas komunikasi politik dalam dataran empiris terbentuk dalam pola dan sistem kekuasaan dan kewenangan yang relatif stabil, tetapi dibalik realitas stabil tersebut tersembunyi konfigurasi berbagai motif dan kepentingan politik yang bertujuan untuk mendominasi, memanipulasi dan mengkomodifikasi dengan nilai-nilai tertentu. Akibatnya, konflik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fokus penelitian ini adalah realitas yang terbentuk karena adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda dari berbagai aktor politik. Di satu sisi, kepentingan untuk melakukan komodifikasi dan dominasi. Sedang di sisi lain, kepentingan untuk melakukan resistensi terhadap praktek tersebut.

Peneliti berpandangan bahwa konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berujung pada pada penyerangan kantor DPP PDI yang terjadi pada 27 Juli 1996 adalah peristiwa historis. Dalam memahami peristiwa historis, tidak sekedar penjelasan latar kronologi suatu peristiwa (*diakronik*), melainkan juga memahami struktur konflik (*sinkronik*) sebagai arena kepentingan para aktor, kondisi-kondisi sosial politik yang melatar-belakangi konflik, motif-motif ideologis para aktor maupun wacana-wacana yang

berkembang di sekitar konflik adalah rangkaian historis sebagai suatu “teks” yang diintepretasi.

Pada sisi epistemologis, paradigma kritis berpandangan bahwa antara pengamat dan obyek merupakan kesatuan subyektif, dan merupakan perpaduan interaksi keduanya. Dengan cara tersebut, peneliti harus mampu menjabarkan intepretasi makna terhadap realitas konflik internal dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada level methodologi, pendekatan *historis* selalu menggunakan informasi-informasi historis dalam kerangka teoritisnya bahwa fenomena sosial apapun harus dipahami dalam konteks historisnya yang disesuaikan dengan sudut pandang, termasuk kerangka interpretatif yang mengandung “makna” sejarah.(Tuchman dalam Denzin & Lincoln: 2009: 394) Oleh karenanya, fakta yang membentuk jalinan kronologis suatu peristiwa dan strukur yang membentuk peristiwa itu adalah teks untuk diinterpretasi yang bertujuan untuk mengungkap “gambar di bawah karpet” yang memperlihatkan dan menjelaskan konteks yang berlapis dari suatu peristiwa.

Sedangkan pada level aksiologis, sesuai dengan tema dari penelitian ini adalah memahami konflik internal partai politik. Konflik yang berlangsung karena keterlibatan kepentingan dari berbagai aktor. Dengan mengungkap kepentingan dan tindakan politik para aktor maka dapat menggugah kesadaran dan refleksi kritis agar berlangsung tranformasi, emansipasi dan pemberdayaan pada struktur sosial.

1.3.3. Subyek Dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini, di samping para aktor yang terlibat dalam konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dalam pendekatan historis, tulisan atau pandangan sejarawan sebagai rangkaian teks yang mengandung banyak makna dan mengungkapkan konteks produksinya. (Tuchman dalam Denzin & Lincoln:2009:407)

Dalam penelitian ini, subyek yang dipilih adalah aktor-aktor berdasarkan peranannya yang menonjol dalam konflik internal PDI, baik mereka yang merupakan pendukung PDI Pro Kongres, PDI pendukung Megawati dan aktivitas politik ataupun LSM/Ormas maupun aparatur yang berada dalam lingkaran konflik internal PDI.

Sedangkan, obyek penelitian adalah konflik internal PDI yang memfokuskan pada situasi yang melatar-belakangi konflik, adanya motif kepentingan para aktor, landasan ideologis para aktor maupun wacana-wacana yang dikembangkan para aktor untuk men*stigma*tisasi kelompok lain sebagai dasar pembenaran untuk melegitimasi tindakan mereka. Keseluruhan dari rangkaian peristiwa konflik maupun struktur yang membentuk konflik tersebut adalah peristiwa yang bermakna untuk diinterpretasi.

1.3.4. Pendekatan Penelitian Sejarah

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Menurut E.H. Carr (dalam Gall, Gall & Borg:2007:212) adalah suatu proses interaksi yang terus-menerus antara sejarawan dan fakta yang ada, yang merupakan dialog tidak

berujung antara masa lalu dan masa sekarang. Artinya sejarah adalah pengetahuan yang tepat terhadap apa yang telah terjadi. Menurut Nevins (1933), sejarah adalah deskrispsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran.[2] Penelitian dengan menggunakan metode sejarah adalah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber- sumber keterangan tersebut.

Hobsbawn (dalam Kuntowijoyo:42:2003), setiap penulisan sejarah sosial memerlukan sebuah model, yang sekalipun tidak sangat formal dan terperinci strukturnya, setidaknya-tidaknya sebagai sebuah kerangka akan tampak lingkaran pusat *(central nexus)* atau lingkaran hubungan dari permasalahan yang akan digarap. Konflik internal PDI, adalah peristiwa politik yang terbentuk dari rangkaian atau unit-unit yang saling berhubungan, seperti sebab-akibat terjadinya konflik, situasi politik baik dari pengaruh internal maupun eksternal, motif-motif kepentingan para aktor dan wacana-wacana yang dikomunikasikan para aktor adalah unit atau sub struktur yang membentuk peristiwa. Pemaparan dengan menguraikan suatu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dalam pendekatan sejarah menggunakan model sinkronis (Kuntowijoyo:2003:43). Tetapi kajian sejarah akan lebih lengkap apabila

[2] (https://fadlibae.wordpress.com/2012/01/30/penelitian-sejarah-historical-research/).diakses pada tanggal 12 Oktober 2016

tidak hanya model sinkronis, tetapi juga dilengkapi dengan model diakronis, yaitu menekankan pada kronologi peristiwa atau kejadian itu berlangsung.[3] Hubungan antara sinkronis dan diakronis, seperti dijelaskan Kuntowijoyo(:2003:45), sejarah bukannya susunan sinkronis dari kejadian, atau korelasi antara variabel yang merupakan urutan dari sebuah situasi, tetapi suatu urutan dinamis atau dialektis dengan waktu yang jelas. Itu sebabnya, dalam fokus kajian konflik internal PDI, di samping penjelasan tentang struktur yang membentuk suatu peristiwa, juga kronologi peristiwa merupakan bagian penting dalam kajian ini.

Konflik internal PDI yang puncaknya terjadi pada 27 Juli 1996 adalah peristiwa sejarah. Oleh karenanya dalam pemahaman secara *sinkronik*, yaitu konflik internal PDI adalah bagian dari suatu peristiwa yang diakibatkan oleh struktur peristiwa yang lain, seperti, motif-motif politik atau kepentingan para aktor, pertarungan ideologi para aktor, keterlibatan aparatur negara dalam konflik dan wacana yang dikembangkan para aktor merupakan jalinan pergerakan substruktur yang membentuk suatu peristiwa, yaitu konflik internal PDI. Di samping itu, pendekatan secara diakronis juga menjadi bagian dari penelitian ini, karena peneliti melihat bahwa peristiwa konflik internal PDI yang berlangsung merupakan suatu kronologi dari konflik-konflik internal

[3] Sinkronis adalah adalah model penulian sejarah yang melihat masyarakat digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari struktur dan bagiannya. Pendekatan structural dan fungsional menekankan dalam ilmu-ilmu sosial menyarankan pada model sinkronis yang melihat potret masyarakat dalam keadaan statis, dalam keadaan waktu nol. Sebuah model sinkronis lebih mengutamakan lukisan yang meluas dalam ruang dengan tidak memikirkan terlalu banyak mengenai dimensi waktunya. Sebaliknya model diakronis lebih mengutamakan memanjangnya lukisan yang berdimensi waktu, dengan sedikit saja luasan ruangan. Lihat Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Tiara Wacana, Yogyakarta,2003, hal.43.

sebelumnya, dan puncaknya pada tanggal 27 Juli 1996. Dalam pendekatan sejarah pemaparan pada konflik internal PDI baik secara sinkronik maupun diakronik merupakan “teks” untuk diintepretasi. (Tuchman dalam Denzin &Lincoln:2009:407).

1.3.5. Pemilihan Sumber Data

Menurut Tuchman (dalam Denzin & Lincoln:2009:410) dalam penelitian sejarah dibedakan antara data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang mempunyai sifat “kealamiahan” dan kompetensi terhadap fokus penelitian. Tuchman (dalam Denzin & Lincoln:412:2009) menggambarkan upaya menelaah data primer dalam penelitian sejarah bisa diibaratkan sebagai kerja detektif. Banyak faktor yang diperlukan, seperti logika intuisi, ketekunan, akal sehat untuk telaah data tersebut. Itu sebabnya dalam penelitian ini aktor-aktor yang terlibat dalam atau mereka yang aktor yang sifatnya partisan merupakan data primer. Bagi aktor (narasumber) yang sudah meninggal dunia, maka jejaknya dapat dilihat dalam bentuk biografi yang telah dibuat. Ataupun *testimoni* dari orang terdekat yang memahami terhadap fokus penelitian.

Data primer dalam penelitian ini untuk ruang lingkup rezim Orde Baru dan PDI Pro kongres dilakukan dengan wawancara narasumber yang merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam konflik internal PDI. Dalam mendapatkan validitas data, dilakukan kritik eksternal dengan berbagai dokumen pendukung, seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berita surat

kabar, dan dokumen pendukung yang relevan dengan tema penelitian. Sebaliknya juga dengan PDI pendukung Megawati.

Sedangkan data sekunder adalah data tambahan diperoleh dari literature atau referensi ilmiah, seperti jurnal, buku dan artikel, catatan lapangan, foto, hasil penelitian terdahulu yang mendukung tentang focus penelitian, serta kegiatan penelaahan berita-berita surat kabar dan majalah, baik yang tercetak maupun *on line* yang terkait dengan tema penelitian. Ke semuanya itu disebut sebagai "teks lapangan" yang mewujud dalam sebuah proses interpretif.

1.3.6. Instrumen Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, untuk itu dibutuhkan instrumen, maka yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrument).* Oleh karena itu, pada waktu pengumpulan data di lapangan, peneliti berusaha menjalin relasi dengan partisipan (aktor yang terlibat dalam konflik) secara intensif, dan mencari data pendukung yang berkaitan dengan kisah dan pengalaman serta peristiwa sosial yang berkaitan dengan partisipan.

1.3.7. Wawancara

Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk, tetapi yang umum dipakai dalam tradisi penelitian sejarah adalah wawancara terbuka (*open question)* di mana peneliti bisa bertanya kepada responden /informan tentang konflik internal PDI.

Data wawancara mendalam melengkapi data yang diperoleh melalui analisis dokumen, karena tidak semua data yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, dapat diperoleh melalui wawancara. Fokus wawancara terutama di pusatkan pada tema sentral dalam penelitian ini, yaitu konflik internal PDI. Dari tema sentral diturunkan menjadi sub pertanyaan yang juga menjadi tujuan penelitian ini.

Narasumber utama yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah Alex Widya Siregar, aktor intelektual peristiwa 27 Juli. Untuk mendukung validitas data terhadap informasi AWS sendiri terhadap situasi ataupun peristiwa, maka perlu wawancara dengan narasumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Narasumber tersebut adalah :

- Brigjen (Purn) TNI Samsiar, Paban I BIA (Badan Inteljen ABRI) sekarang Ketua PEPABRI Jawa Barat. (SM).

  Wawancara dilakukan untuk mengetahui perencanaan kongres PDI, konsolidasi DPD dan PDC PDI, sikap pemerintah Orde Baru terhadap Megawati, rencana pengambilalihan kantor DPP PDI, pelaksanaan pengambilalihan kantor DPP PDI.
- Audi Tambunan, Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) PDIP. (AT)

  Wawancara dilakukan untuk mengetahui rencana penyelenggaraan kongres Medan, interaksi dengan DPP Megawati, pandangan dan kegiatan di mimbar bebas di kantor DPP PDI.
- Waluyo Martosugito, mantan DPP Pleno PNI ASU.

Untuk mengetahui aktivitas PNI pada saat kongres PNI “Persatuan dan Perjuangan” pada tahun 1966.

- Harsoko Sudiro, mantan Pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia /Pemimpin Umum SKM Swadesi (HS)

  Data yang dibutuhkan tentang penyelenggaraan kongres PDI di Medan pada tahun1996 yang dilakukan PDI Pro Kongres, dan persiapan pengambilalihan kantor DPP PDI serta peristiwa penyerangan kantor DPP PDI.

- Manganar Pasaribu, mantan pengurus DPP Kesatuan Buruh Marhaenis

  Data yang dibutuhkan tentang aktivitas PNI.

- Amsar Dulmanan, aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Nadhatul Ulama (FKGMNU) (AM)

  Data yang dibutuhkan untuk memahami tentang pandangan terhadap rezim Orde Baru, motivasi bergabung dengan massa PDI pendukung Megawati, dan aktivitas di mimbar bebas dan aktivitas jalanan.

- Usmar Ismail, Aktivis mahasiswa, salah satu pendiri Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta (FKMSJ), sekarang Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Moestopo. (US)

  Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendangan tentang peristiwa 27 Juli, dan keterlibatan mahasiswa dalam aksi mimbar bebas.

- Bob R. Randilawe, Aktivis mahasiswa, aktif di Posko Pemuda dan Mahasiswa, sekarang aktif Unit Pelaksana Kerja Pancasila. (BR)

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan terhadap rezim Orde Baru, motivasi bergabung dengan massa PDI pendukung Megawati, aktivitas demonstrasi dan mimbar bebas.

- Karyono, Aktif pada Posko Pemuda dan Mahasiswa. (KR)

  Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan terhadap rezim Orde Baru, motivasi bergabung dengan massa PDI pendukung Megawati, aktivitas demonstrasi dan mimbar bebas.

- Yulianto, Presidum GMNI (YL)

  Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan terhadap rezim Orde Baru, motivasi bergabung dengan massa PDI pendukung Megawati, aktivitas demonstrasi dan mimbar bebas, serta pandangan dan keterlibatan mahasiswa dalam aksi mendukung Megawati..

- Pudjo Nugroho, aktif di Posko Pemuda dan Mahasiswa. (PN)

  Wawancara dilakukan untuk aktivitas mimbar bebas, motivasi bergabung dengan PDI Megawati, pandangan terhadap rezim Orde Baru.

- Sandra Fertasari, aktif di Posko Jakarta Pusat. (SP)

  Wawancara dilakukan untuk aktivitas mimbar bebas, motivasi bergabung dengan PDI Megawati, pandangan terhadap rezim Orde Baru, peristiwa penyerangan di kantor DPP PDI, dan pemenjaraan yang dilakukan rezim Orde Baru

- Ali Husien dan Kelompok 124.

Wawancara dilakukan untuk aktivitas mimbar bebas, motivasi bergabung dengan PDI Megawati, pandangan terhadap rezim Orde Baru, peristiwa penyerangan di kantor DPP PDI, dan pemenjaraan yang dilakukan rezim Orde Baru.

- Peter Kasenda, sejarawan

  Wawancara dilkukan untuk mengetahui pandangan peristiwa 27 Juli 1996 secara keseluruhan sebagai peristiwa sejarah dan pengaruhnya terhadap perubahan politik di Indonesia.

Pertimbangan dalam memilih narasumber atau informan tersebut adalah orang-orang yang ada kaitannya dengan aktivitas politik secara langsung terhadap kegiatan mimbar bebas dan peristiwa 27 Juli.

Langkah awal membangun akses narasumber adalah dengan melakukan wawancara yang intensif dengan narasumber utama, yaitu Alex Widya Siregar (AWS) yang merupakan aktor kunci dalam konflik internal PDI. Wawancara intensif dilakukan untuk mengungkap kronologi konflik internal, penyebab konflik, serta pelaku-pelaku yang terlibat, khususnya aktor-aktor dari PDI Pro Kongres dan aparatur rezim Orde Baru.

Melalui AWS, peneliti membangun akses dengan narasumber lain yaitu HS yang merupakan salah satu fungsionaris DPP PDI Pro Kongres. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dibutuhkan tentang penyelenggaraan kongres PDI di Medan pada tahun1996 yang dilakukan PDI

Pro Kongres, dan persiapan pengambilalihan kantor DPP PDI serta peristiwa penyerangan kantor DPP PDI.

Melalui AWS pula, peneliti membangun akses dengan Brigjen (Purn) SM yang merupakan representasi dari aparatur rezim Orde Baru. Wawancara dilakukan untuk mengetahui perencanaan kongres PDI, konsolidasi DPD dan PDC PDI, sikap pemerintah Orde Baru terhadap Megawati, rencana pengambilalihan kantor DPP PDI, pelaksanaan pengambilalihan kantor DPP PDI. Wawancara dilakukan dikantornya di Jl, Aceh Bandung yang merupakan kantor PEPABRI sekitar pertengahan Desember 2016.

Sedangkan, untuk kelompok PDI Megawati, peneliti membangun akses dengan Pudjo Nugroho (PN) yang merupakan aktivis mimbar bebas pada konflik internal PDI. Melalui PN, peneliti membangun dengan narasuber/informan lain yang berkaitan langsung dengan aktivitas mimbar bebas, seperti kelompok 124. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung, tetapi juga dilakukan via telepon untuk melengkapi data pada saat tatap muka.

Wawancara dengan aktivis mimbar bebas pada kelompok PDI Megawati untuk mendapatkan penjelasan tentang aktivitas mimbar bebas, pandangan politik dan motif mereka bergabung dengan PDI Megawati. Sedangkan, untuk mendapatkan data pendukung, peneliti melakukan wawancara secara insidentil dengan informan pada saat pertemuan informal di Jakarta.

Oleh karenanya dalam mendapatkan akses terhadap informan dapat diganbarkan sebagai berikut:

Gambar 3
Akses Mendapatkan Informan
Sumber: Modifikasi Peneliti

1.3.8. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini, studi dokumen menjadi penting untuk untuk menuntun peneliti mendapatkan gambaran secara utuh terhadap peristiwa masa

lalu itu terjadi. Dokumen primer dalam penelitian ini bersumber pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Koneksitas ABRI, Laporan Kongres PDI Medan Juni 1996, dan Laporan KOMNAS HAM tentang peristiwa 27 juli 1996. Perlu dikemukakan bahwa keaslian dokumen-dokumen itu tidak perlu diragukan. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan upaya kritik ekstern terhadap dokumen tersebut.

Sedangkan Majalah Tempo, Editor, dan Forum Keadilan, dan Surat Kabar yang peneliti gunakan adalah Kompas, Harian Angkatan Bersenjata, Harian Indonesia, Republik, Harian Merdeka menjadi rujukan peneliti untuk menyusun kronologi pada konflik internal PDI. Penggunaan Surat Kabar maupun Majalah dalam kasus tertentu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dibutuhkan kritik internal. Hal ini dilakukan karena pengaruh orientasi dan ideologi dari kedua media tersebut berbeda, sehingga dalam fakta yang sama bisa di beritakan dengan cara yang berbeda.

Dengan demikian penggunaan dokumen harus dimanfaatkan secara hati-hati. Adapun digunakannya dokumentasi sebagai sumber data tambahan, sekaligus juga sebagai pembanding terhadap informasi yang dikatakan oleh informan. Dokumentasi yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah pengambilan foto dan perekaman dengan menggunakan kamera foto, *handy cam* dan *tape recorder.*

1.3.9. Kriteria Keabsahan Penelitian

Keabsahan penelitian diperlukan untuk menunjukan bahwa apa yang di hasilkan dari penelitian ini merupakan gambaran dari kenyataan dan hasil dari interpretasi yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini di lakukan karena untuk mendukung kemampuan peneliti untuk menyoroti fenomena tersebut dengan cara yang sangat kontekstual untuk mengungkap ciri historis, prosesual dan interaksional dari pengalaman tersebut. Selain itu, penafsiran peneliti harus mencakup segala sesuatu yang dipelajari dari fenomena tersebut dan memasukan pemahaman terdahulu sekaligus selalu dalam keadaan belum lengkap dan belum selesai.

1.3.10. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data menggunakan abduksi untuk melakukan kritik eksplanator. (Neuman:2013:127) Abduksi adalah suatu proses pemahaman yang bersifat dialogis antara obyek yang dikaji dengan peneliti/penafsir. (dalam Hoed:2008:83) Sedangkan kritik eksplanatori adalah penjelasan yang secara bersamaan menjelaskan kondisi terjadinya peristiwa dan mengkritik kondisi (atau menunjukan perbedaan, mengungkapkan mitos atau mengidentifikasi kontradiksi. (Neuman:2003:128) Peneliti yang menggunakan abduksi memperlakukan dan mengevaluasi efektivitas kerangka majemuk serta mengkontekstualisasikan kembali secara kreatif atau menjelaskan ulang data maupun ide dalam prosesnya.

Dengan demikian, aspek penting dalam pendekatan ini adalah intepretasi, yaitu penjelasan struktur dan kronologi peristiwa yang dikaitkan dengan praktik kultural yang melahirkan istilah “representasi”, yaitu mengkaitkan interpretasi dengan analisis mitos dan praktik kultural. (Tuchman dalam Denzim & Lincoln:2013:407). Oleh karena dalam interpretasi kritis terdapat pokok-pokok yang perlu diperhatikan, (Mc Carthty:212:2013*), pertama*, penafsiran intepretasi harus dikaitkan dengan kritik ideologi, yaitu pemaknaan dengan memperhatikan kondisi empiris yang berkembang pada saat itu, seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik. *Kedua*, analisis sistem sosial, pemaknaan tidak sekedar pemaknaan secara obyektif *(structural*) tetapi juga dilakukan dengan secara subyektif *(post sruktural), ketiga*, harus digabungkan dengan filsafat sejarah penafsiran diorieintasikan pada masa depan dengan memperhatikan masa kini, dan masa lampau.

Melalui data yang ditemukan selama penelitian, maka diperluas dengan pengembangan tema-tema dengan melakukan langkah penafsiran. Kemudian, analisis tematis terhadap struktur sosial yang membentuk terjadinya konflik maupun mengkaitkan dengan kronologi peristiwa terjadinya konflik. Analisis dilanjutkan dengan menganalisis data-data dengan keluar dari tema tersebut atau analisis *poststruktural* untuk mengeksplorasi data sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti.

Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah analisis tematis terhadap konflik internal PDI. Kemudian, analisis dilanjutkan dengan

menganalisis data-data dengan keluar dari tema tersebut untuk mengeksplorasi data sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti.

1.3.11. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan sejarah. Ada keterbatasan yang menyangkut keterangan dari narasumber atau informan bisa terjadi bias atau *misinterpretas*i terhadap peristiwa tersebut. Begitu pula terhadap narasumber/informan ada yang tidak bersedia diwawancarai karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Oleh karena itu dalam validasi data, peneliti menekankan pada triangulasi sumber data, yaitu dengan melakukan verifikasi dengan dokumen-dokumen yang terkait, maupun melakukan penelusuran terhadap mass media (majalah atau surat kabar) yang memuat pernyataan narasumber/informan berkaitan dengan konflik internal PDI.

Dalam penelitian sejarah dalam menjaga validitas dalam melakukan analisis, perangkat kritik sumber yang berupa kritik intern maupun ekstern sangat diperlukan. Kritik ekstern berupa analisa dokumen bertujuan untuk memastikan keontektikan dan keaslian dokumen, pembuat dokumen, bahasa, bentuk dokumen dan sumbernya. Validitas dokumen mesti juga teruji melalui kritik intern untuk memastikan data-data dalam dokumen sesuai dengan kenyataan. (Kartodirdjo:2014:131)

BAB II
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA DAN SEJARAH KONFLIK INTERNAL

2.1. Penyederhanaan Partai Politik Rezim Orde Baru

Rabu, 10 Januari 1973 pada pukul 20.00 WIB, Jalan Salemba Raya No. 73, Jakarta Pusat, yang merupakan kantor DPP Partai Nasional Indonesia (DPP PNI) ramai dengan kedatangan para tamu yang merupakan pimpinan partai politik, seperti Mh. Isnaeni dan Abdul Madjid yang merupakan wakil dari unsur Partai Nasional Indonesia (PNI), S. Mubantoko dan John Pakan unsur dari Partai Murba, Achmad Sukarmadidjaja dan M. Sadrie wakil dari Ikatan Perintis Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Ben Mang Reng Say dan F.S. Wignjosoemarsono wakil dari Partai Katolik, dan A. Wenas dan Sabam Sirait dari Partai Kristen (Parkindo) mendeklarasikan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Mereka mewakili partainya masing-masing. Empat jam kemudian, tepatnya pukul 24.00 WIB, Mh. Isnaeni sebagai ketua I PNI sekaligus pelaksana tugas Ketua Umum PNI, di depan para wartawan mengatakan tentang penyederhanaan partai yang berbeda dengan Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). “Beda pangkal tolak dan manifestasinya”, tegasnya.(Harian Indonesia Raya, 12/1/1973) Fusi merupakan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menyederhanakan partai politik, dan kebijakan ini sulit ditolak.

Para pemimpin partai telah sepakat membubuhkan tanda tangan tanpa cap partai pada sebuah deklarasi. Mereka menyatakan bahwa kelima partai yang hadir berfusi dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penggabungan kelima partai politik atau yang dikenal dengan fusi merupakan kebijakan dari rezim Orde Baru untuk melakukan penyederhanaan kehidupan politik sebagai akibat dari trauma dari sistem politiknya sebelumnya. Kebijakan fusi juga diberlakukan pada partai politik yang berazaskan keagamaan-Islam. Yaitu, Nadhatul Ulama (NU), Perti, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Kelompok nasionalis terdiri dari PNI, Murba, dan IPKI, sedangkan untuk Parkindo dan Partindo tidak mau dikelompokan pada keagamaan, tetapi memilih pada kelompok nasionalis. PNI, seperti dikelompokan oleh Geertz ((Dhakidae:317:1995), tergolong sebagai partai kaum abangan. Aliran abangan ini terwakili dalam PNI yang memperlihatkan suatu sistem patron klien yang utuh dari priyayi dan birokrasi ke tingkat desa. Massa abangan yang tidak banyak patron klien sentris dan yang memiliki tradisi radikalisme petani pada akhirnya ditampung oleh PKI. Sebagai partai yang didirikan Sukarno dan kawan-kawan perjuangannya pada tangal 4 Juli 1972, PNI menganut paham Marhaenisme ajaran Sukarno sebagai azas utamanya. Menurut rumusan Sukarno sendiri, Marhaenisme adalah azas dan cara perjuangan *"tegelijk"* menuju kepada hilangnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Partai Murba, partai ini didirikan oleh Tan Malaka yang memproklamirkan sebagai partai proletar. Partai ini didirikan pada tanggal 3 Oktober 1948 sebagai

gabungan dari tiga partai yaitu Partai Rakyat, Partai Rakyat Djelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka. Secara longgar “proletariat” ini memberikan kesan bahwa partai ini memakai dasar kelas sebagai basis pembentukannya, walaupun Tan Malaka dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa “latar belakang sejarah dan karateristik Murba Indonesia berbeda dengan proletariat Barat. Perjuangan dan musuh Murba Indonesia berbeda dari proletariat Barat.

Parkindo, lahir pada tangal 10 November 1945, sebagai peleburan dari beberapa partai Kristen yang pada mulanya berdiri sendiri-sendiri di beberapa wilaya Indonesia. Partai-partai antara lain, Partai Kristen Indonesia (PARKI) yang didirikan oleh Melanthon Siregar di Medan–Sumatera Utara bulan September 1946, Partai Kristen Nasional (PKN) di jakarta, Partai Politik Masehi (PPM) di Pemantang Siantar, Persatuan Masehi Indonesia (PMI) yang didirikan oleh Ratulangi dan dua kelompok politik minoritas di jawa Tengah dan Timur, yaituPerserikatan Kaum Kristen dan Perserikatan Christen Djawi.

Partai Katolik, lahir pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama Partai katolik Republik Indonesia, sebagai kelanjutan dari Perkumpulan Politik Katolik Indonesia yang ada sebelum Perang Dunia kedua. (Dhakidae:317-319:1995)

Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) merupakan kelanjutan IPKI yang dibentuk sejak 20 Mei 1954. Para tokoh pemrakarsa di antaranya adalah Kolonel AH Nasution, Kol Gatot Subroto, Kol Aziz Saleh, dan lainnya. Di awal Orde Baru, IPKI sebenarnya lebih dekat hubungan

politiknya dengan Golkar. Namun, sewaktu terjadi fusi parpol tahun 1973, IPKI bergabung dengan PDI.

Langkah penyederhaaan sistem kepartaian oleh Orde Baru juga merupakan upaya untuk membangun sistem partai tunggal, yaitu menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik tunggal yang dominan. Ini terlihat ketika pada tanggal 5 September 1966, Jenderal Suharto mengeluarkan intruksi kepada keempat panglima angkatan bersenjata untuk memberikan fasilitas yang seluas-luasnya bagi perkembangan Golkar di pusat maupun di daerah. Alasannya karena Sekber Golkar selalu menempatkan diri sebagai saudara kandung ABRI serta pengawal dan pengaman revolusi Indonesia. (Dhakidae dalam Mahfud:2012:218)

Instrumen hukum yang diterapkan Orde Baru adalah berdasarkan pada Ketetapan MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan memerintahkan Pemerintahan Presiden Soeharto bersama DPR Gotong Royong segera menyusun undang-undang tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan menuju pada penyederhanaan. Dalam melaksanakan Ketetapan MPRS itu, maka dikeluarkanlah UU No.15/1969 tentang Pemilihan Umum. UU Pemilu ini hanya mengakui sepuluh partai politik termasuk Golkar sebagai peserta pemilu, yaitu, NU, PSII, Parmusi, Perti, Partai Katolik, PNI, IPKI, Partai Kristen Indonesia, dan Golongan Karya. Sedangkan Masyumi dan PSI yang sebelumnya dibekukan oleh Soekarno tidak ikut dalam pemilu pertama Orde Baru. (Suggono:1992:92) Kemudian pada

awal tahun 1970-an, menjelang pemilu 1971, Presiden Soeharto di hadapan para kontestan Pemilu, yaitu 9 partai politik dan Golkar menyatakan maksudnya bahwa pemerintah untuk mengelompokan partai-partai politik. Pengelompokan yang dimaksud adalah kelompok pertama, kelompok nasionalis, kelompok kedua adalah kelompok spiritual dan kelompok ketiga adalah Golongan Karya (Golkar)

Kendati pada pemilu pada tahun 1971, Golkar keluar sebagai pemenang pemilu dengan meraih suara terbanyak sebesar 62.28 persen atau menempatkan 236 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat dari 360 kursi yang diperebutkan.[4] Hal itu kenyataannya tidak memuaskan pemerintah Orde Baru untuk menempatkan Golkar sebagai kekuatan yang hegemonik. Kendati, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru, yaitu, *pertama*, dengan terlebih dahulu menyingkirkan kelompok radikal dalam partai (khususnya PNI dan Masyumi) yang bersikap oposisi terhadap pemerintah. *Kedua*, pemerintah berusaha memutuskan hubungan tradisional yang ada selama ini antara partai dengan basis massanya lewat seperangkat peraturan hukum yang diciptakan untuk itu. (Dhakidae: 1995:309) Misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/1969 atau yang dikenal dengan “Permen 12” yang mengharuskan pegawai negeri hanya memberikan loyalitas tunggal kepada negara dan tidak diperkenankan masuk dalam salah satu partai politik kecuali Golkar.

---

[4] dalam kpu.go.id diakses tanggal 12 September 2016

Langkah penyederhanaan partai dalam bentuk fusi merupakan alternatif yang efektif untuk mengendalikan kehidupan partai politik, dan menjaga Golkar sebagai kekuatan yang dominan. Di samping itu, partai baru yang terbentuk untuk tidak berkembang liar dan menjadi oposisi, pimpinan partai harus dapat dukungan dan restu pemerintah. Keadaan ini yang dikemudian hari sering menimbulkan konflik internal partai politik. Kadangkala, konflik partai justeru "dipelihara" dimanfaatkan pemerintah menyingkirkan pemimpin yang tidak sejalan atau sudah mulai kritis pada kebijakan pemerintah Orde Baru, atau sebaliknya menjadi ajang untuk melakukan rekrutmen terhadap pemimpin yang bisa mengakomodir kebijakan pemerintah.

Salah satu anggota fusi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah PNI. Sejak rezim Orde Baru berkuasa, partai ini banyak menderita akibat dari "keganasan" Orde Baru. Banyak dari pemimpin muda yang paling bersemangat dalam PNI progresif dijebloskan ke dalam penjara atau diteror untuk menerima kompromi dan menghentikan kegiatannya. (Rocamora:1991 :447) Seperti pengakuan Manganar Pasaribu, dikenal sebagai aktivis buruh-Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) ditangkap pada tahun 1969, dan baru keluar penjara pada tahun 1975, tanpa pernah tahu kesalahan dan tidak pernah diadili, tetapi ia menganggap rezim Orde Baru menilai aktivitasnya terlalu progresif.[5]

[5] Wawancara dengan Manganar Pasaribu, 23 Desember 2016

Berkaitan dengan fusi, Ketua Umum PNI Isnaeni awalnya berkeberatan dengan rencana pemerintah itu. MH. Isnaeni menjadi ketua PNI setelah menggantikan Hadisubeno hasil kongres PNI tahun 1971 yang telah meninggal. Hadirnya Mh. Isnaeni sebagai pengganti Hadisubeno oleh sementara pihak dianggap sebagai putusan terbaik. Kendati tidak sekarismatik Hadisubeno yang dikenal agitator dan ahli pidato. Mh. Isnaeni mempunyai kemampuan mengorganisir dan membuat konsep strategi yang tangguh. Ia juga dianggap bisa bekerjasama dengan pemerintah dan ABRI dan mempunyai toleransi. (Majalah Ekspres,17/5/1973).

Dalam sebuah rapat PNI dalam menghadapi rencana fusi, seperti yang diceritakan Alex Widya Siregar. Pada rapat MH. Isnaeni mengatakan, "Saya tidak mau fusi dan saya sudah kasih tahu tentang garis, yaitu *afal system* atau sistem gugur". Menurutnya, *afal system* sekarang yang tinggal hanya 10 partai, dalam pemilu partai-partai yang tidak dapat suara bergabung dengan partai yang mampu menempatkan wakilnya di DPR, jadinya bubarnya alami. Yang dapat suara dan menempatkan wakilnya hanya PNI. Jadi, PNI *lah* yang ada dan yang lain akan bergabung paling. Sedangkan, Soenawar Sukawati berpendapat bahwa tidak mungkin fusi terjadi dan menganggap merupakan bagian dari skenario Ali Moertopo-pejabat sekretaris pribadi (Sespri) Presiden. Ketidaksetujuan Isnaeni dan Sunawar Sukowati pada waktu itu, merupakan dalih keduanya agar peserta rapat yang lain untuk diam.[6] Sunawar Sukowati

[6] Wawancara dengan Alex Widya Siregar, 16 Januari 2017

merupakan Fungsionaris Ketua PNI sebelum fusi dan kemudian menjadi Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia (1973–1978), pernah menjadi Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia(1973–1978).

Kenyataanya, Isnaeni tidak bekerja ke arah itu, justeru pada tanggal 15 Januari 1973, PNI mengumumkan bergabung dengan fusi. Bagian dari deklarasi PNI, menyatakan, "Semua aktivis PNI, kecuali yang menyatakan menolak, ikut lebur dalam fusi". Kenyataannya tidak ada yang menolak. Sebenarnya, Isnaeni menginginkan yang terlebih dahulu mengumumkan fusi adalah PNI, dengan harapan kalau PNI lebih dulu yang lain pasti akan ikut.

Setelah pengumuman deklarasi fusi pada tanggal 10 Januari 1973, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Kebudayaan Nasional (DPP LKN) Bagin[7] sebagai Ketua dan Sekjen Alex Widya Siregar mengirim surat resmi kepada DPP PNI untuk mengadakan pertemuan partai. Akhirnya, melalui Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) diadakan rapat, setiap ormas yang merupakan sayap PNI diwakili 3 orang. Dalam rapat, MH. Isnaeni menegaskan, "Kita harus fusi". Sedangkan, Bagin menanggapi, bahwa fusi tidak masalah, tetapi garis jelas, kita harus kemana, dan sampai mana, dan yang tinggal itu dikemanakan? Dalam tanggapan yang lain, Alex Widya Siregar menyatakan, fusi suatu hal yang tidak terelakan, tapi satu hal yang harus disetujui bahwa saat ini kekuatan tidak ada dan dipaksa harus ikut Orde Baru dan itu harus dijelaskan bahwa sebagai taktis. Akhirnya, dalam rapat memutuskan

[7] Bagin, pada tahun 1963 menjadi sekjen Lembaga Kebudayaan Nasional, dan ketua LKN pada kongres PNI 1971

membentuk Badan Kridayana Nasional yang diketuai oleh Suryadi yang tugasnya menampung semua permasalahan yang ditinggal PNI termasuk aset-aset PNI.[8] Adanya fusi dengan sendirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno pada masa pergerakan nasional telah berakhir, dan melembur dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

2.2. Konflik dan Keterlibatan Rezim

Political order yang dijalankan pemerintah Orde Baru menjadikan konflik berwajah ganda. Di satu sisi, konflik merupakan sarana untuk melakukan rekruitmen terhadap pemimpin partai politik yang akomodatif dengan kebijakan Orde Baru. Di sisi lain, konflik menjadi upaya untuk menyingkirkan pemimpin politik yang berpotensi menjadi oposisi atau bersikap kritis. Oleh karenanya, dalam setiap konflik yang berlangsung di dalam partai politik, keterlibatan pemerintah menjadi tidak terelakan. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kendati dianggap sebagai "partai gurem" akan menjadi vital perannya ketika praktek "estalase politik" yang dijalankan pemerintah Orde Baru membutuhkan basis legitimasi.

Sejak berdirinya tahun 1973, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tidak pernah sepi dari konflik. Kaisiepo(321:1995) menjelaskan konflik dalam tiga tipe: *Pertama*, konflik di tingkat pimpinan partai (DPP). *Kedua*, konflik yang terjadi antar unsur dan *ketiga*, konflik antara pimpinan partai (DPP) dengan

[8] Hasil wawancara dengan Alex Widya Siregar , 23 Desember 2016

anggota-anggotanya (Fraksi) di DPR, sebagaimana yang tercermin dari adanya *recalling.*

Dalam catatan Manuel Kaisiepo,(1995:321) konflik-konflik internal yang terbesar justeru terjadi ditingkat pimpinan (DPP). Tetapi berbeda dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), konflik ditingkat pimpinan PDI ini bukan terjadi karena pertentangan antar unsur fusi, tetapi lebih banyak konflik dari satu unsur saja, yaitu PNI. Tetapi, PNI yang berfusi dengan PDI bukanlah PNI "Front Marhaenis" era Ali Sastromidjojo melainkan PNI "konservatif atau sayap kanan" yang dimotori oleh Hardi. Sebab lain, bahwa konflik PDI juga adanya keterlibatan rezim Orba untuk selalu melakukan pengendalian terhadap kehidupan partai politik.

Melacak konflik PDI, tidak terlepas dari PNI yang merupakan partai terbesar peserta fusi. Konflik yang sering terjadi sebenarnya merupakan pertikaian antar unsur fusi, melainkan konflik dalam satu unsur saja, yaitu PNI. (Kaisiepo: 1995:321). Penyebab konflik karena didorong oleh orientasi dan kepentingan pragmatis pimpinan. Sikap akomodatif dan kooptatif terhadap penguasa menjadikan pimpinan partai tidak perlu bertanggung jawab ke massa bawah, melainkan lebih menggantungkan diri dan kedekatan dengan penguasa, sehingga arena konflik sekedar saling berebut kursi antar unsur PNI sendiri. Berbeda dengan PNI pada era Ali Sastromidjojo dulu, konflik disebabkan karena adanya perbedaan ideologis antar faksi. Misalnya, perseteruan antara faksi PNI Front Marhaenis dengan faksi PNI Konservatif, dan mencapai

puncaknya ketika pada tanggal 4 Agustus 1965 atau yang dikenal dengan "pembersihan Agustus 1965", pimpinan PNI Front Marhaenis Ali-Surachman memecat Hardi Cs[9], kelompok PNI konservatif dari keanggotaan partai. Langkah pemecatan yang dilakukan DPP Ali-Surachman merupakan upaya pembersihan besar-besaran dalam sejarah PNI, yang merupakan puncak pertikaian antara kelompok PNI Front Marhenis dengan PNI Konservatif. Pada tanggal 6 Oktober 1965, lima hari sesudah pemberontakan G.30.S/PKI, tokoh-tokoh tersebut mendirikan DPP PNI baru jang kemudian terkenal dengan nama PNI Osa-Usep.[10] Di samping itu, para pemimpin muda dari PNI FM dijebloskan ke dalam penjara atau diteror atau mau menerima kompromi untuk menghentikan kegiatan. Keadaan tersebut membuka peluang bagi Hardi yang berkoalisi dengan militer untuk mendesak PNI FM untuk merehabilitasi dan melakukan kompromi. Pada tanggal 22 Maret 1966, DPP PNI Front Marhaenis menyatakan menimbang perlu untuk segera mempercepat tercapainya keutuhan kembali PNI Front Marhaenis, dan karena itu mencabut keputusan DPP PNI Front Marhaenis tanggal 4 Agustus 1965 tentang pemecatan sementara dari keanggotaan PNI, yaitu 1. Hardi, SH, 2. Hadisubeno Sastrowardoyo, 3. Moh, Isnaeni. Surat Keputusan itu ditanda tangani oleh Ketua DPP PNI Front Marhaenis, Ali Sastomidjojo dan Ketua III Moh. Isa serta diketahui oleh sesepuh PNI Mr. Sartono.(Kompas,23/3/1966)

---

[9] Pimpinan PNI yang dipecat, Hardi jabatan wakil ketua satu DPP, Osa Maliki ketua dua, Mh. Isnaeni, wakil sekjen, Hadisubeno anggota DPP pleno, Sabilal Rasyad DPP Pleno, Karim M. Durjat, DPP Pleno

[10] Departemen Pen. Prop., Dewan Pimpinan Pusat, Partai Nasional Indonesia [1965]

Kemudian untuk memantabkan langkah kompromi, DPP PNI ASU yang di wakili Ali , dan Sartono dan DPP Osa –Usep, sejak Rabu tanggal 16 Maret 1966 telah mengadakan tiga kali pertemuan atas prakarsa dan disaksikan Letjen Soeharto dengan maksud mengusahakan penyelesaian sengketa yang menyebabkan perpecahan dikalangan PNI FM. Pertemuan terakhir pada hari Kamis, 24 maret 1966 bertempat di Wisma Yani, Taman Suropati 10, Jakarta, telah tercapai persetujuan bahwa kedua belah pihak setuju mengadakan Kongres Luar Biasa pada akhir april 1966 dengan nama Kongres Persatuan dan Kesatuan berdasarkan Deklarasi Marhaenis dengan Ketua Panitia Iskaq. Selain itu kedua belah setuju untuk menghentikan permusuhan dan setuju menjalankan gerakan politik anti Gestapu dan anti Nekolim. Pernyataan itu di tanda tangani oleh Sartono, Ali, Osa, Usep. (Kompas, 26/3/1966)

Tekanan yang begitu hebat terhadap aktivis dan pimpinan PNI Front Marhaenis pasca G 30 S PKI dari kelompok militer menyebabkan PNI FM pimpinan Ali tidak berdaya. Hal ini menjadi kesempatan bagi Hardi Cs untuk meretrukturisasi pimpinan PNI menjelang konggres “Persatuan Dan Kesatuan” pada bulan April 1966 di Bandung. Dalam kongres “Persatuan dan Kesatuan” di Bandung pada 26 April 1966, yang dibuka oleh Waperdam a.i/Men Pangad Letjen Soeharto dalam sambutan pembukaan menyatakan, “PNI harus berani melakukan intropeksi terhadap dirinya sendiri, dan setiap pemimpin PNI FM harus berani melakukan kritik terhadap diri, harus mawas diri”.(Kompas,26/3 /1966)

Pernyataan itu sebenarnya diarahkan pada PNI progresif untuk mengikuti kemauan Orde Baru. Dalam dokumen yang dimiliki Kemal Asmara Hadi, kongres "Persatuan dan Kesatuan" berlangsung dalam suasana kacau, tidak mencerminkan suatu kongres partai. Sebagian besar yang hadir bukan anggota PNI. Sedangkan, peserta kongres dari PNI Ali Sastromidjojo disoraki, dihujat dan diusir keluar ruangan kongres. (Majalah Historia, 31/III/2016)

Seperti diceritakan Waluyo Martosugito, anggota DPP PNI Ali Sastromidjojo, bahwa pada saat kongres, ia bersama Ibu Supeni bertugas membuka acara sidang kongres pada pukul 10. 000 WIB, tiba-tiba ia harus meninggalkan ruang sidang karena mendapat informasi akan ditangkap.[11] Kongres "Persatuan dan Kesatuan" 1966 yang berlangsung di Bandung akhirnya melahirkan kepengurusan baru dengan Osa Maliki sebagai Ketua Umum dan Usep Ranawidjaja sebagai Sekjen.

PNI pasca 1965 merupakan partai yang sepenuhnya berada dalam pengendalian pemerintah, yaitu rezim Orde Baru, dan personil yang duduk dalam kepengurusan adalah berasal dari PNI "Sayap Kanan". Pada 20 Desember 1967, pemerintah berhasil memaksa untuk mengganti "Deklarasi Marhaenis" dengan "Yudya Pratidina Marhaenis" yaitu Marhaenisme adalah sosio nasionalisme-sosio demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dan mencabut gelar "Bapak Marhaenisme" terhadap Sukarno dengan tujuan untuk menghilangkan kultus para pengikut Sukarno.

---

[11] Wawancara dengan Waluyo Martosugito, pada 26 Oktober 2016

Osa Maliki pada 15 September 1969 meninggal dunia. Hal ini menyebabkan *kevakuman* terhadap kepemimpinan PNI. Oleh karena itu segera diadakan kongres ke-12, yang diselenggarakan pada 11-18 April tahun 1970 di Semarang, terdapat dua kubu yang bersaing untuk memperebutkan kursi Ketua Umum, kubu Hardi dengan kubu Hadisubeno. Kongres dimenangkan kubu Hadisubeno, sedangkan Hardi tidak disukai pemerintah karena ia tidak setuju dengan dwifungsi ABRI. Menurut sumber, Hadisubeno yang berada pada "sayap kanan" PNI", masih kerabat dari Jenderal Surono yang waktu itu menjadi Pangdam Diponegoro, Jawa Tengah. Harapan pemerintah bahwa Hadisubeno dapat "dijinakan" ternyata meleset. Semenjak menjadi ketua umum PNI, Hadisubeno yang kharismatik dan dikenal sebagai propagandis dan agitator ulung sering membuat telinga pemerintah Orde Baru merah.

Bagi PNI, terpilihnya Hadisubeno menjadi tonggak bersejarah untuk menemukan kembali identitas dan jatidiri. Begitu diangkat, ia langsung menggemparkan dengan menyebut lawan-lawan PNI tertentu sebagai "kaum sarungan", ia juga mengatakan ajaran Bung Karno tidak dilarang. "Kalau ajaran Bung Karno dilarang bubarkan saja PNI', tegasnya. Menjelang pemilihan umum 1971, saat suhu politik menghangat, dengan keberanianya ia mengatakan, "Kalau perlu saya perintahkan menyerang Kodim-Kodim yang melakukan praktek bertentangan dengan ketentuan yang ada". Yang terakhir ucapannya yang terkenal, "segerbong jenderal tidak ada artinya dibanding

Bung Karno”.(Majalah Ekspres,17/5/1971) Kepemimpinan Hadisubeno ternyata tidak berlangsung lama, ia meninggal pada 24 April 1971. Jabatan Ketua Umum tidak diganti sampai kongres berikutnya, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Mh. Isnaeni, hingga terjadi fusi.

2.3. Historitas Konflik Internal PDI

Konflik internal PDI dapat dibedakan dalam dua bagian, *pertama* konflik sebelum kongres III PDI, dan k*edua*, pasca kongres PDI ke III. Bagian pertama, konflik internal PDI masih didominasi konflik warisan unsur antar PNI. Ini karena pasca fusi, PNI merupakan unsur terbesar fusi dibanding dengan partai lain, seperti Partai Murba, Parkindo dan yang lainnya. Sedangkan, pada bagian *kedua,* konflik internal PDI lebih cair. Hal ini karena terpilihnya Suryadi sebagai Ketua Umum PDI pada Kongres III, mengakhiri dominasi unsur dari PNI dan keterkaitan ideologis dengan Bung Karno. Kendati, Suryadi mantan aktivis GMNI yang merupakan organisasi sayap PNI. Bagi pemerintah, Suryadi dianggap sebagai tokoh muda yang bebas dari pengaruh konflik masa lalu.

Konflik pertama pasca fusi terjadi pada tahun 1975. Kubu yang berkonflik adalah kubu Isnaeni-Sunawar Sukawati dengan kubu Sanusi Hardjadinata/Usep Ranawidjaya. Penyebab konflik disebabkan perbedaan persepsi tentang penyelenggaraan Kongres I. Kubu Isnaeni-Sunawar Sukawati tidak setuju kongres, karena dianggap terlalu cepat. Di sisi lain, konflik juga disebabkan karena yang berasal dari keinginan dari unsur PNI mendominasi

kepanityaan kongres sebagaimana di sepakati dalam Munas PDI pada 2-3 Februari 1974. Akibatnya, Isnaeni sebagai Ketua I dan Abdul Madjid sebagai Sekjen PDI ditarik dari jabatanya, dan kongres I PDI ditunda pelaksanaanya. Upaya untuk menyelesaikan konflik, ternyata partai belum menemukan mekanisme yang tepat, hingga tersebar kabar bahwa Presiden Soeharto menginginkan kubu Isnaeni-Sunawar disingkirkan dari kepemimpinan PDI. Ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik ketika melakukan audiensi dengan Ka Bakin, Yoga Sugama, 15 Januari 1974, Kaskopkamtib, Sudomo, 16 Februari 1974 dan Mendagri 27 Februari 1974, dan terkahir dengan Presiden Soeharto. Akhirnya, kubu Isnaeni–Sunawar digantikan dengan Sanusi Hardjadinata dan Usep Ranawidjaja. (Nusa Bhakti:1999:149)

Pada kongres I PDI, konflikpun terjadi antara kelompok Sanusi Hardjadinata-Usep Ranawidjaja sebagai Ketua Umum dan Ketua DPP dengan kelompok Achmad Sukarmadijaja dan Muhidin Nasution sebagai ketua DPP PDI. Ahmad Sukarmadijaja merupakan unsur dari IPKI, sedangkan Muhidin Nasution dari Partai Murba. Achmad maupun Muhidin sebagai Ketua DPP PDI merasa tidak puas dengan kepemimpinan Sanusi-Usep, terutama kebijakan terhadap DPD PDI Jakarta yang tidak menguntungkan eks unsurnya. Konflik terus berlanjut, ketika tidak terjadi kesatuan pendapat di DPP PDI dalam pencalonan Presiden dan pencalonan unsur PDI dalam kedudukan menjadi pimpinan di DPR/ MPR, ternyata tidak adanya kesatuan pendapat dalam DPP PDI tentang Wakil Ketua DPR/MPR. Kubu Achamd mencalonkan

Isnaeni, sedangkan kubu Sanusi mencalonkan Usep. Achmad yang dikenal dekat penguasa dan ABRI, merasa di atas angin dan berhasil mendudukan Isnaeni sebagai Wakil Ketua DPR/MPR. Sedangkan, Usep tersingkir karena dinilai anti "dwifungsi ABRI". Dalam kemelut ini peran Kaskarhankam sangat menentukan.(Marijan:1993:40).

Kemelut yang berlarut ini mencapai puncaknya, ketika pada akhir November 1977, Achmad Sukarmadidjaja mengambil prakarsa untuk melakukan *"reshufle"* dalam DPP PDI, dan membentuk DPP tandingan dengan mengangkat Mh Isnaeni dan Soenawar Soekawati masing-masing sebagai Ketua Umum dan Ketua DPP PDI untuk menggantikan Sanusi- Usep.

Reaksi dari Sanusi-Usep menganggap tidakan tersebut sebagai "inkonstitusional". Ada kesan bahwa pemerintah ikut campur tangan dalam konflik tersebut. Dalam pernyataan persnya Mh.Isnaeni membantah desas-desus bahwa Sudjono Humardani, Sespri Presiden, mempunyai andil dalam *"reshufle*" di PDI. Tetapi, ia mengakui sebelum *"reshufle*" memang banyak menemui berbagai pihak, misalnya dengan Pak Daryatmo, Pak Mintaredja, dan lain-lain.(Berita Buana,1/12/1977) Sedangkan, Usep Ranawidjaja menyatakan bahwa perpecahan harus segera diselesaikan dan penyelesaianya itu tergantung dari pemerintah yang harus *hands up* menyerahkan masalah itu sebagai soal intern PDI.

Setelah berlarut-larut, akhirnya pada tanggal 16 Januari 1978 tercapai kesepakatan antara dua DPP yang di perantarai oleh BAKIN (Badan Kordinasi

Intelejen Indonesia). Dalam pertemuan itu telah disusun dan disetujui DPP yang baru, dan perubahan komposisi hanya yang berasal dari PNI, dengan susunan sebagai berikut: Sanusi Hardjadinata (Ketua Umum), M.h. Isnaeni, Soenawar Soekawati, Harjanto, Usep Ranawidjaja dan Abdul Madjid, masing-masing sebagai ketua; M.S. Aberson dan Adipranoto, masing-masing Sekjen dan Wakil Sekjen; Notosukardjo sebagai bendahara. Wakil-wakil dari bekas unsur partai politik lainya tidak mengalami perubahan (Kaisiepo:1995:125) Di samping itu, kesepakatan lain, yaitu, 1) dibentuk satu DPP harian yang anggotanya terdiri atas kombinasi dua DPP (kembar) yang bertikai, 2) dibentuk DPP paripurna guna menampung anggota DPP yang tidak masuk dalam formasi DPP harian, 3) DPP baru dibebani tugas pokok menyelenggarakan kongres partai selambat-lambatnya akhir 1978.

Rujuk dengan susunan baru itu ternyata tidak berlangsung lama. Melalui Surat Keputusan Nomor 003/XI/1978 tanggal 24 November 1978, Mh. Isnaeni dan Sunawar Sukawati dibebaskan tugaskan dari kedudukan mereka sebagai ketua di DPP PDI. Sesudah dibebas tugaskan, giliran Mh. Isnaeni dan Soenawar Sukawati dengan mengatasnamakan mandataris DPP PDI melancarkan tidakan balasan dengan membebas tugaskan Sanusi Hardjadinata sebagai ketua umum PDI. Pangkal konflik kedua kubu ini bermula dari ketidaksepakatan dalam menyusun anggota panitia kongres. Berlarutnya konflik tersebut, sempat memunculkan reaksi dari kelompok anak muda yang mengatasnamakan “Forum Komunikasi & Studi Pemuda PDI”.

Forum yang diprakarsai oleh Alex Widya Siregar Cs ini mengeluarkan memorandum yang berisikan mendesak segera penyelesaian kemelut PDI. Memorandum itu juga berisikan bahwa apabila dalam waktu singkat peringatan dari Forum Pemuda tidak diindahkan maka dengan didorong rasa tanggung jawabnya yang tinggi terpaksa akan mengambil jalan sendiri. Untuk sementara waktu Forum Pemuda masih memberikan kesempatan kepada para anggota pimpinan PDI untuk menyelesaikan masalah, tetapi kalau dalam waktu singkat pimpinan tidak berhasil maka tindakan mengambil alih pimpinan bisa saja terjadi. "Apa yang terjadi sekarang bukan perpecahan, tetapi perebutan kepemimpinan dalam PDI", tegas Alex Widya Siregar. (Harian Terbit, 23/11/1979)

Berlarutnya konflik antar pimpinan PDI, mendorong angkatan muda PDI untuk mengambil alih Gedung DPP PDI di Jl. Diponegoro pada Sabtu pagi pada tanggal 15 Desember 1979, karena DPP dianggap sudah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai Dewan Pimpinan. Anggota PDI dari Angkatan Muda ini sekaligus juga telah membentuk Pelaksana Harian yang terdiri dari sembilan orang, diketuai AP Batubara. Sedangkan, Alex Widya Siregar, salah satu anggota kelompok sembilan pada pers menyatakan, menjelaskan sikap PDI dari Angkatan Muda pada hakekatnya mendukung sepenuhnya tentang proses pengambilalihan jangan sepihak saja. Artinya harus netral jangan memihak pada sementara golongan.(Harian Terbit, 15/12/1979 Menurut AP. Batubara pimpinan dari angkatan muda PDI juga membentuk Dewan

Sementara yang didukung dari DPD PDI yang di daerah, seperti DPD Jatim, BALI, Sumut, Yogyakarta, Kalsel, NTT, dan tanpa menyebut pimpinan daerah tersebut, kecuali menyebut nama Marsoesi dari Jawa Timur.(Kompas, 19/12/1979)

Setelah aksi pendudukan kantor DPP PDI, akhirnya pemerintah melalui Panglima Kopkamtib Laksmana Sudamo mengadakan pertemuan dengan DPP PDI. Pengurus DPP yang hadir dalam pertemuan itu terdiri dari Sanusi Hardjadinata, Sunawar Sukowati, Muhidin Nasution, John Pakan dan Ahmad Sukarmadijaya. Dalam pertemuan dicapai kata sepakat bahwa pada pertengahan Januari 1980 akan diumumkan pada seluruh anggota DPP PDI dan DPD PDI daerah untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah bersama guna membicarakan penyelesaian sengketa di dalam tubuh PDI. Pertemuan itu, dimaksudkan sebagai pendahuluan dan persiapan untuk kongres II PDI yang menurut rencana akan dilangsungkan di bulan April 1980.(Sinar Harapan, 20/12/1979) Sudomo pun akan berencana memanggil AP. Batubara ketua DPD PDI Jakarta yang juga pimpinan dari Forum Pemuda PDI yang masih menduduki kantor DPP

Di tengah konflik yang terus bergulir, Sanusi Hardjadinata tiba-tiba pada tanggal 16 Oktober 1980 mengundurkan diri. Konflik pun sedikit mereda. Tetapi menjelang kongres II PDI pada bulan Januari 1981, kemelut PDI kembali muncul pun terus berlanjut menjelang kongres II PDI. Ini berkaitan dengan keabsahan kongres. Kelompok Isnaeni dan Sunawar Sukowati

mendukung dilaksanakan kongres. Sedangkan kelompok Usep, Abdul Majid, Ny. D Walandaouw dan Zakaria Raib yang juga disebut sebagai “kelompok empat” menolak karena Kongres bertentangan dengan UU No.3/1975 AD/ART dan keputusan Partai. Menurutnya, Kongres harus didahului dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) dan Dewan Pertimbangan Partai (DPP), dan masih ada penyebutan unsur, padahal tentang unsur PDI sudah dihilangkan pada Kongres I. serta “kelompok empat” mempertanyakan keabsahan kongres karena utusan cabang tidak dipilih melalui mekanisme Konferensi Cabang. (Kaisiepo:1995:81)

Kendati “kelompok empat” mengajukan keberatan atas Kongres II PDI pada pemerintah. Akhirnya, “kelompok empat” tidak diikutsertakan dalan kongres, sehingga kongrespun tetap berlangsung dan dibuka oleh Presiden Soeharto. Melihat situasi tersebut, gerak cepat dilakukan “kelompok empat” dengan melakukan koalisi dengan kubu Sunawar Sukawati melalui serangkaian pertemuan dengan Pangkopkamtib Sudomo pada 16 Januari 1981, diperoleh kesepakatan untuk mencalonkan Sunawar Sukawati sebagai Ketua Umum dan memberi jatah bagi Hardjanto Sumodisastro, serta tidak mencalonkan Isnaeni. Dalam kongres komposisi pengisian personel pemimpin PDI adalah 5:3:3:3. Jabatan Ketua Umum dipegang daru unsur PNI, Sekjen jatah Parkindo, dan bendahara Partai Katolik.(Nusa Bhakti:1999:152) Akhirnya, kongres menghasilkan kepengurusan baru PDI, yaitu Soenawar Sukowati sebagai Ketua Umum dan Sabam Sirait sebagai Sekjen.

Pasca kongres II, konflik kembali berlangsung dengan tindakan "kelompok empat" yang membuat SK untuk memecat Sunawar Sukawati. Tetapi, sebelum rencana dilaksanakan, Sunawar Sukawati terlebih dahulu me-*recall* "kelompok empat" dari DPR. Di tengah konflik "kelompok empat" merasa mendapat angin setelah adanya pernyataan kontroversial dari Sunawar Sukawati tentang negara Indonesia sebagai negara sekuler. Pernyataan itu disampaikan ketika menanggapi pidato kenegaraan Presiden Soeharto di DPR pada tanggal 16 Agustus 1983 tentang negara sekuler. Menurut Hardjanto Sumodisastro, pernyataan dari Sunawar Sukawati bertentangan dengan UUD'45. Keadaan itulah yang kemudian dimanfaatkan kubu Hardjanto untuk memukul Soenawar dengan mendesak untuk segera diadakan kongres sebelum pemilu. Sedangkan kubu Soenawar menginginkan kongres sesudah pemilu, sebelum pemilu sebaiknya dilaksanakan Munas. Konflik terus berlangsung sampai Sunawar meninggal dunia. Kongres III kemudian terlaksana pada 15 - 17 April 1986, yang sebenarnya kongres tersebut mengalami *deadlock* dan akhirnya peserta kongres menyerahkan penyelesian ke pemerintah. Melalui Mendagri Soepardjo Rustam mengangkat Soeryadi sebagai Ketua Umum PDI dan Nico Daryanto sebagai Sekjen. Nama Nico Daryanto baru muncul setelah mendapat rekomendasi dari Frans Seda, unsur Partai Katolik yang dimintai pendapat oleh pemerintah tentang penyusunan pengurus PDI. Menurut pengakuan Nico, baru sepuluh hari sebelum kongres mengenal Suryadi. (Tempo, 10/5/1986)

Pada saat itu memang ada upaya untuk menyatukan kedua kubu tersebut, yang diinisiasi oleh Beny Moerdani. Menurut Alex Widya Siregar, pada waktu itu ia mendapatkan bantuan dana dari Beny Moerdani dan menyewa kamar di Hotel Marcopolo sebagai sekretariat untuk menyatukan kedua kubu tersebut. Pekerjaan itu belum selesai, tiba-tiba kongres diadakan dengan Ketua Umum terpilih Dr Soeryadi.[12]

Dipilihnya Suryadi sebagai Ketua Umum PDI dan Nico Daryanto sebagai Sekjen menandai putusnya mata rantai kepengurusan dengan generasi sebelumnya yang penuh dengan konflik. Pasca kongres ke III PDI merupakan era baru bagi kader-kader yang memimpin PDI karena sebagian besar adalah kaum muda yang dahulu menginginkan agar kelompok tua mengundurkan diri karena dianggap memicu konflik, dan juga sudah menjadi garis rezim Orde Baru yang menginginkan pengurus PDI bebas konflik kepentingan masa lalu.

Tetapi hal tersebut, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Pasca kongres, konflik pun terus bermuculan dibawah kepemimpinan Soeryadi. Hal ini dipicu oleh ketidaksukaaan dari tokoh-tokoh tua yang umumnya berasal dari unsur PNI menilai gaya kepemimpinan Suryadi terlalu dekat dengan pemerintah, seperti yang pernah diungkapkan Manai Sophian. Persoalan yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan “prinsip-prinsip musyawarah” belum sepenuhnya dijalankan oleh DPP PDI. (dalam Sukamto:1991:56)

[12] Hasil wawancara dengan Alex Widya Siregar , 23 Desember 2016

Hanya kurang lebih setengah tahun setelah kongres ke III PDI, muncul konflik. Yaitu, kasus “DPC tandingan” di Bandung. Konflik bermula dari tindakan DPP PDI yang mengangkat Dodo Gandamihardja sebagai Pejabat Sementara Ketua DPC PDI Kodya Bandung pada Agustus 1986. Sementara itu, Ketua DPC sebelumnya, Tarwia Sutendi belum diberhentikan dari jabatannya. Alasan DPP PDI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi partai DPC. Alasan itu tidak diterima Tarwia Sutendi, sehingga melayangkan protes ke DPP, dan hal tersebut tidak ditanggapi, dan justeru Tarwia dipecat dari keanggotaan Partai. Tarwia yang didukung oleh enam belas komisariat PDI, akhirnya menyatakan keluar dari PDI dan masuk ke Golkar yang diikuti 26.328 warga PDI Bandung. (Tempo, 29/11/1986)

Setelah Pemilu 1987, konflik kembali terjadi disebabkan karena “pembangkangan” yang dilakukan tiga anggota DPR dari Fraksi PDI. Ketiganya menolak SK DPP PDI No.059 Tahun 1986 yang membatasi keanggotaan DPR hanya 2 periode. Ketiga annggota DPR itu, Kemas Fachrudin, Ketua DPD Sumatera Selatan, F.C. Paloensuka Ketua DPD Kalimantan Barat, dan Achmad Subagio, tokoh PDI dari Jawa Tengah.

Terakhir, konflik pada kongres ke IV PDI di Medan tahun 1993. Konflik tersebut ditengarai sebagai upaya pemerintah rezim Orde Baru yang tidak menginginkan kembali Soeryadi sebagai Ketua Umum PDI. Akibat konflik tersebut, berdampak pada munculnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI hasil Munas. Kenyataanya, Megawati tidak disukai rezim Orde Baru sehingga

pada tahun 1996, muncul kelompok 16 yang dipimpin Fatimah Achmad untuk menyelenggarakan kongres. Konflik ini akhirnya, memunculkan dua kubu yang berseberangan, yaitu PDI Pro Kongres yang di dukung rezim Orde Baru dengan PDI Megawati. Perseteruan dua kubu tersebut kemudian melahirkan persitiwa yang terkenal, yaitu peristiwa "27 Juli 1996"

Konflik internal selalu mewarnai perjalanan PDI. Dalam melihat konflik yang berlangsung di PDI, *pertama,* konflik bukan konflik antar unsur di PDI, melainkan konflik yang berasal dari konflik warisan antar PNI. *Kedua,* selalu adanya keterlibatan pemerintah Orba dalam setiap konflik PDI. *Ketiga,* konflik biasanya kubu yang moderat (kooperatif) dengan pemerintah selalu menang dari kubu garis keras (non kooperatif).

Dari sejarah konflik internal PDI mulai dari kelahiran ketika terjadi fusi pada 1973, sampai pada puncak konflik internal PDI pada tahun 1996 yang dikenal dengan "peristiwa 27 Juli 1996" dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Dari tabel historitas tersebut dapat dijelaskan, *pertama,* konflik internal PDI tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan rezim Orde Baru. *Kedua,* konflik disebabkan kepentingan aktor PDI untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. *Ketiga,* adanya penggunaan kekerasan politik dalam konflik internal ketika pada puncak konflik pada 27 Juli 1996.

2.4. Tragedi Seorang Aktor

Waktu konggres PDI ke- III yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 15 April 1986, Suryadi bukanlah tokoh yang diunggulkan menjadi ketua, masih banyak takoh yang lain, seperti Achmad Subagyo, Hardjanto Sumodisastro, I.G.N Djaksa, Moh Isnaeni. Kongres yang menghabiskan dana Rp.216 juta, yang bertujuan mengakhiri konflik PDI, kenyataannya mengalami *deadlock*. Akhirnya, peserta kongres menyerahkan pembentukan struktur dan penyusunan personalia pada pemerintah, dan ini menjadi sejarah pertama kali partai politik meminta langsung campur tangan pihak luar untuk menyelesaikan masalah internal. Melalui Mendagri Soepardjo Rustam pada awal Mei 1986 mengumumkan susunan pengurus DPP PDI 1986-1991. Pengumuman itu mengagetkan karena tokoh-tokoh lama tidak ada dalam kepengurusan, dan Soeryadi sebagai anak bawang yang tidak diperhitungkan sama sekali justeru duduk sebagai Ketua Umum PDI, bahkan kepengurusan yang baru dibentuk pemerintah tidak menyertakan tokoh-tokoh PDI lama. Alasannya, pemerintah menginginkan kepengurusan baru DPP PDI adalah orang-orang yang bebas dari konflik masa lalu, orang yang bebas dari

PNI ASU, dan tidak Sukarnois. Berdasarkan kriteria inilah, Soeryadi menempati urutan teratas. (Halawa: 1993:7)

Beberapa hari menjelang kongres, Hardjanto Sumodisastro mengatakan bahwa Suryadi tidak memenuhi syarat sebagai ketua umum. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPD DKI Jakarta Ipik Asmasoebrata. Menurutnya, kalau Soeryadi terpilih, ini tidak lucu, sebab hal itu pasti hasil dorongan dari luar. Menurut sumber, hanya beberapa hari menjelang kongres Soeryadi baru mengurus kartu anggota PDI. (Tempo,19/4/1986) Hal ini juga dibenarkan oleh Alex Widya Siregar, bahwa sebenarnya dalam rapat fusi dengan unsur-unsur PNI, Soeryadi tidak setuju dengan rencana fusi, jadi semenjak fusi, sampai kongres 1986 Soeryadi tidak tercatat sebagai anggota PDI.[13]

Tetapi, pada pertemuan pada 2 Mei 1986, antara Pangab Jenderal L.B. Moerdani, Mensesneg Sudharmono dan Menseskab Moerdiono, Mendagri Soepardjo Rustam, atas saran Beny Moerdani memilih Suryadi sebagai Ketua DPP PDI dan Nico Daryatmo sebagai Sekjen.(Nusa Bhakti:153:1999) Penunjukan Soeryadi boleh jadi menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakhiri dominasi kelompok tua yang berasal dari PNI, seperti I.G.N. Yudha, Isnaeni, Achmad Subagyo, Hardjanto Sumodisastro. Yang sebelumnya, dibuat garis kebijakan oleh Mendagri Soepardjo Rustam bahwa yang bisa menjadi Ketua Umum tidak boleh dipegang oleh orang yang bukan

[13] Wawancara, 23 November 2016

PNI ASU dan berbau Sukarnois, dan satu-satunya tokoh muda dan bersih dari itu hanya Suryadi.(Wirodono:199-120:1999)

Kendati dalam asuhan pemerintah, bukan berarti mengikuti kemauan atau kebijakan pemerintah, di bawah kepemimpinan Soeryadi mencatat berbagai terobosan baru. Dimulai dengan menggandeng anak-anak Bung Karno, seperti Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra. Keberhasilan menyertakan anak-anak Bung Karno ternyata berdampak positif dalam perolehan suara dalam Pemilu 1992. PDI yang pada pemilu 1987 mendapat tambahan 16 kursi dari 24 kursi pada pemilu sebelumnya, dan pada pemilu 1992 perolehan suara PDI di DPR mendapat tambahan 16 kursi, sehingga menjadi 56 kursi. (Editor, 31/7/1993)

Riza M. Sihbudi (206:1993) mencatat ada beberapa "manuver politik" yang dilakukan PDI sebelum kampanye 1992. *Pertama*, adanya reklame PDI yang dimuat sejumlah media massa yang isinya antara lain mengajak para cendikiawan untuk bergabung dalam PDI. Reklame itu di buat oleh Badan Litbang PDI yang dipimpin Kwik Kian Gie ini nampaknya sebagai sarana rekrutmen politik PDI dalam menghadapi Pemilu. *Kedua,* dilontarkan isu soal "kabinet bayangan". Isu ini dilontarkan Kwik Kian Gie, tujuannya adalah para politis bisa menjadi partner eksekutif dengan kemampuan saling mengungguli. *Ketiga,* "keberanian" PDI melontarkan isu suksesi nasional. Keberanian lain, ketika Soeryadi dalam kampanye pada 12 Mei 1992 di Jakarta Barat, melontarkan isu tentang masa jabatan presiden dibatasi dua kali periode saja.

Menurutnya, “kalau bupati (yang rentang pemerintahan terbatas) saja dibatasi dua kali, kenapa presiden yang skup kekuasaannya amat besar, kenapa tidak”.(Editor, 23/5/1992)

Ditambahkan pula, Soeryadi juga melempar ide agar calon presiden dan wakil presiden, walau sudah calon tunggal harus lewat pemungutan suara, agar sesuai dengan UUD’45, yaitu dipilih dengan suara terbanyak. Suryadi menginginkan agar presiden dan wakil presiden dipilih secara tidak aklamasi di MPR.(Editor,31/7/1993) Tentu saja, isu kampanye tersebut mengagetkan di mata penguasa Orde Baru yang memang selalu menekankan budaya kebulatan tekad. Tetapi dimata pendukung dan masyarakat awam, isu yang dilontarkan PDI dianggap sebagai bentuk pembaharuan dalam sistem politik Orde Baru yang hegemonik.

Logika kerja, memang berbeda dengan logika kekuasaan. Di mata sebagian pendukungnya di PDI dan masyarakat awam, apa yang dilakukan Soeryadi merupakan terobosan baru, di tengah ketatnya politik Orde Baru. PDI bukan lagi dianggap partai *gurem*, di banding kedua OPP lainya (PPP dan Golkar), kampanye PDI yang dilakukan di DKI Jakarta bisa dikatakan paling meriah dan paling semarak.(Sihbudi:207:1992). Hampir pada setiap kampanye PDI, sejumlah media massa menjulukinya dengan ungkapan-ungkapan , seperti “Minggu Merah Di Jakarta”, “Jakarta Merah Membara”, Jakarta Jadi Metal (Merah Total), “Lautan Merah Di Senayan. Warna merah yang

memenuhi wilayah Jakarta dan salam “metalnya” menjadikan PDI partai yang mempunyai potensi masa depan.(Media Indonesia,25/5/1992)

Tetapi apa yang dilakukan Soeryadi, di mata kekuasaan adalah sesuatu yang menyimpang dari pakem politik kekuasaan Orde Baru. Oleh karena itu upaya menggoyang Soeryadi dilakukan. Upaya untuk “melengserkan”, sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1991. Sekelompak massa yang berjumlah sekitar 50 orang dengan menamakan “kelompok sembilan” mengklaim berasal dari sembilan propinsi mendatangi DPP PDI Jl. Diponegoro, Jakarta mengadakan demonstrasi di depan kantor dengan memasang spanduk dan poster yang bertuliskan, “Laksanakan Kongres IV PDI, selambat-lambatnya Juli 1991, “Soeryadi Memanipulasikan AD/ART”. Kemudian, sesuai dengan ketentuan AD/ART yang diputuskan antara lain Kongres IV diselenggarakan pada tahun 1991, itulah yang menjadi tuntutan dari “Kelompok Sembilan”. Pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 1991 sekelompok orang yang menamakan “Kelompok Sembilan” menuntut Soeryadi untuk segera menyelenggarakan Kongres IV. Menyebut “kelompok Sembilan”, karena mereka datang dari sembilan propinsi. Di samping itu juga mereka menuduh Soeryadi telah memanipulasi AD/ART. (Tempo, 15/6/1991)

Tuntutan mereka adalah selenggarakan kongres IV PDI selambat-lambatnya Juli 1991, mereka juga menuduh Soeryadi memanipulasikan AD/ART. Dalam AD/ART Bab XVIII pasal 29, tertulis “Konggres ke IV Partai Demokrasi Indonesia diselenggaakan dalam bulan April 1991”. Oleh

Soeryadi, pasal 29 dihapuskan, diganti dengan Bab XIX Pasal 30 sebagai aturan tambahan, Pasal 1. Penyelenggaraaan Kongres Partai Demokrasi Indonesia harus dilakukan setelah berlangsungnya Pemilihan Umum sebagai pesta Demokrasi, Pasal 2. Kongres ke IV Partai Demokrasi Indonesia diselenggarakan dalam bulan April 1993 sesudah sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat.[14] Tuntutan dari "kelompok sembilan" ini, kenyataanya tidak membuat Soeryadi goyah, kendati dilakukan berulang-ulang. Padahal Mendagri Rudini, pada waktu sudah memberi sinyal, "Kongres PDI dimungkinkan selama tak menggangu persiapan pemilu, dan pemerintah tak akan campur tangan". (Tempo,15/6/1991)

Upaya untuk mengakhiri kepemimpinan Soeryadi di PDI tetap dilakukan, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Hal ini dimulai dengan bersatunya tokoh-tokoh PDI yang tergabung dalam "kelompok 17" mendirikan DPP PDI Peralihan, bahkan juga mempersiapkan Panitia Lokal Kongres IV PDI yang dipimpin Achmad Subagyo. Di sisi lain, Achmad Subagyo baru saja diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Diangkatnya Achmad Subagyo, seolah memberi sinyal dari pemerintah merestui apa yang dilakukan "kelompok 17", karena penunjukan Achmad Subagyo bukan usulan dari Suryadi sebagai DPP PDI, tetapi penunjukan dilakukan pemerintah. Tanggapan pemerintah, atas penunjukan itu, melalui Mendagri Yogie S. Memed, menyatakan, Pemerintah hanya mengakui DPP

[14] Wawancara AWS, 23 November 2016

PDI yang resmi di bawah kepemimpinan Soeryadi-Nico Daryanto. Tetapi dalam akhir penjelasannya, Mendagri menegaskan, “Catat ini, jangan salah tulis. Saya ingin selalu ada persatuan dan kesatuan.” (Tempo,15/6/1991) Kendati secara normatif pemerintah rezim Orde Baru masih mendukung Soeryadi, tetapi dibalik layar upaya untuk menghentikan langkah Soeryadi tetap dilakukan.

Seiring dengan mendekatnya pelaksanaan kongres IV di Medan tahun 1993. Suara “panas” dari pejabat pemerintah maupun dari ABRI yang menyudutkan Soeryadi terus bermunculan. Pernyataan dari Pangdam Jaya, Mayjen AM Hendropriyono, “Pengadilan terhadap kasus Alex Asmasoebrata jalan terus, termasuk proses kesaksian Soeryadi”.(Editor,17/7/1993) Begitu pula, pesan dari Pangdam Diponegoro pada DPD PDI Jateng yang akan berangkat kongres di Medan. “Dalam memilih ketua umum nanti, saya mengharapkan utusan DPD PDI Jateng tidak salah pilih. Jangan memilih calon yang memiliki cacat hukum, “ tegasnya. (Editor,17/7/1993)

Tekanan yang bertubi-tubi yang mengarah ke Soeryadi menjelang kongres oleh sebagian pengamat menyatakan karena banyak dosa Soeryadi. Dosa ini dapat dikelompokan dalam 3 macam. (Editor,17/7/1993) Dosa pada organisasi, dosa terhadap pendukung dan dosa pada pemerintah. Dosa pada organisasi antara lain, kasus pemecatan terhadap “kelompok 17”. Dosa pada pemerintah karena menampilkan isu-isu yang tidak sejalan dengan kekuasaan. Puncaknya, ketika Rapim PDI yang diselenggarakan menjelang Sidang Umum

MPR 1993, PDI berani mencuri “start” dengan mencalonkan Jenderal Try Sutrisno sebagai Cawapres pendaping Pak Harto.

Kendati, mendapat banyak tekanan dari berbagai penjuru, tetapi tidak menyurutkan Soeryadi melangkah untuk maju dalam bursa pecalonan Ketua Umum PDI. Beredar nama kandidat ketua umum, seperti Aberson Marle SIhaloho, Tirto Sudiro, Ismunandar, dan Budi Hardjono mengganjal Soeryadi, tetapi ia cukup percaya diri, dengan modal konsolidasi yang solid di daerah, dan prestasi yang ditorehkan selama dua masa pemilu, suara PDI meningkat tajam. PDI bukanlah partai gurem seperti anggapan orang selama ini.

Akhirnya, Konggres ke IV diputuskan pada 21-25 Juli 1993 di Medan. Sebelumnya, terjadi tarik ulur tentang hari pelaksanan kongres. Semula, rencana kongres pada 15-21 April 1993, lalu berubah 27 Juli -2 Agustus 1993, terakhir dapat kepastian tanggal 21-25 Juli 1993, menyesuaikan dengan jadwal Presiden. (Editor,17/7/1993) Kehadiran Presiden Soeharto diacara pembukaan kongres penting bagi Soeryadi. Hal ini untuk memperlihatkan pada para pendukung maupun lawan politiknya, bahwa Soeryadi masih mendapat dukungan dari pemerintah. Pada acara pembukaan yang berlangsung di Aula Hotel Tiara tersebut, Presiden Soeharto memang hadir memberi sambutan.

Pendukungnya pun yakin, kendati sebelumnya, pemerintah mengeluarkan statemen yang mengarah ketidaksetujuan kalau Soeryadi menjadi ketua umum PDI, tetapi pernyataan Pangab Jendral Faisal Tanjung dalam sambutan pembukaan kongres yang berlangsung di Asrama Haji Pangkalan Mansyur,

Medan itu dianggap sebagai pelurusan terhadap pernyataan sebelumnya yang disampaikan setelah menghadap Presiden Soeharto pada Senin 19 Juli 1993 di Cendana. Ketika itu pernyataannya, “hendaknya pimpinan PDI jangan cacat hukum, masa ada pimpinan cacat”. Dalam sambutan pembukaan kongres, Pangab ABRI menegaskan, “Pemerintah dan ABRI tak akan campur tangan dalam kongres ini, dan kongres bebas memilih Ketua umum yang dikehendaki”.(Tempo,31/7/1993) Pernyataan itu, dengan gegap gempita disambut riuh peserta kongres yang memang sebagian pendukung Soeryadi.

Kegembiraan pendukung Soeryadi nampaknya tidak berlangsung lama. Usai Pangab Jenderal Faisal Tanjung memberikan sambutan, kemudian dilanjutkan Mendagri Yogie S. Memed. Tidak beberapa lama sekitar 1 jam Mendagri selesai memberikan sambutan, pintu depan Asrama Haji Pangkalan tempat berkongres digedor oleh massa berjumlah 300 orang yang dikomandani oleh Yacob Nuwawea salah satu fungsionaris DPP PDI Peralihan. Karena tidak mendapat sambutan dari dalam, tiba-tiba sebuah jip *hardtop* dan kijang tua menabrak pintu besi Asrama Haji, dan massa pun masuk ke ruang sidang. Fatimah Achmad yang memimpin sidang waktu itu langsung “menskors”.` Kelompok DPP Peralihan akhirnya menguasai ruang sidang selama tiga hari tanpa diusik oleh petugas.

Keberuntungan ternyata masih dipihak Soeryadi dan pendukungnya. Rencana Menhankam Jenderal Edi Sudrajat memberi kata sambutan mengharuskan ruang sidang harus steril. Letkol .Pol. Chairudin Ismail,

Kapoltabes Medan, menyerukan pada peserta di ruang sidang , “Demi hukum, saudara-saudara yang yang tidak memiliki tanda peserta kongres harap keluar, kongres ini resmi, ada izinnya”. Apalagi keesokan harinya, Pangdam Bukit Barisan Mayjen A. Pranowo bersama Kapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Soebandy dalam siaran persnya menyatakan, “aparat keamanan berpegang teguh pada azas legalitas, hanya mengakui kongres resmi PDI, dan tak mentolerir gangguan.(Tempo 31/7/1993) Pernyataan itu membuat pendukung kubu PDI Peralihan kecewa karena tidak masuk ke dalam arena sidang. Keadaan ini memberi kesempatan PDI pendukung Soeryadi melanjutkan sidang pleno dengan agenda pemandangan umum dan pertanggunganjawaban Soeryadi. Hampir semua peserta menerima pertanggunganjawaban dari Soeryadi. Melihat suasana sidang seperti itu, oleh Dimmy Haryanto, Waksekjen PDI mendaulat dan mengesahkan Soeryadi sebagai Ketua Umum dan Ketua Formatur membentuk kepengurusan DPP PDI.

Keesokan harinya, Jumat pagi kelompok PDI Peralihan menyerbu kembali ke ruang sidang. Ini merupakan penyerbuan kedua, pimpinan penyerbuan Yacob Nuawea menekan para Ketua DPD daerah untuk menanda tangani, bahwa kongres ini tidak sah, dan mendorong untuk menyerahkan melanjutkan kongres ke Mendagri. (Tempo, 31/7/1993) Ketua DPD Jatim Latief Pudjosakti menyambut baik usulan Yacob Nuwea, yang sebelumnya Ketua DPD DKI Jakarta Alex Asmasubrata lebih dulu menandatangi

kesepakatan, yang kemudian langkah tersebut diikuti oleh Ketua DPD yang lain.

Di sisi lain, hari sabtu, 24 Juli, Ketua Panitia Kongres Fatimah Achmad sudah berada di Jakarta menemui Dirjen Sospol Brigjen Sutoyo, dan menegaskan untuk mempersilahkan kongres jalan terus dan menyelesaikan kemelut secara intern. Penyerbuan kembali oleh kelompok DPP PDI Peralihan, membuat petugas keamanan membuat garis demarkasi, yaitu membelah ruang Aula Asrama haji tempat bersidang menjadi dua bagian, satu sisi bagian dalam tempat menginap ditempati kubu Soeryadi, sedang sisi lain tempat bersidang dikuasai kubu DPP Peralihan. Pada saat itu Alex Asmasoebrata terluka, ini karena Alex dan adiknya Fery Asmasubrata sebagai pemegang tanda peserta kongres berjalan lalu-lalang di garis demarkasi. Akibatnya fatal bagi keduanya, tanpa dikomando Satgas PDI Soeryadi menyerbu ke arah Alex dan Fery dan memukulinya berame-rame.

Isu kedatangan Wapres Try Sutrisno pada hari minggu untuk menutup kongres disambut gembira pendukung Suryadi. Kedatangan Wapres penting, ini akan menjadi kesempatan kedua bagi pendukung Soeryadi untuk men*sah*kan secara pleno keputusan kongres. Ditunggu beberapa lama, tiba-muncul pengumuman di TVRI Medan dalam bentuk *stop press.* Isinya: “Kunjungan Wapres RI ke Medan 25-26 Juli batal”. Pengumuman itu, sontak membuat pendukung Soeryadi galau, harapan untuk memanfaatkan kunjungan Wapres Try Sutrisno gagal total. Di tengah kegalauan itu, Nico Daryanto,

salah satu ketua panitia kongres menggelar konferensi pers dan mengumumkan, bahwa kongres telah ditutup dan sudah selesai. “Kendati jalannya persidangan awut-awutan, kongres berhasil menelurkan sejumlah keputusan tentang program organisasi, pandangan politik partai, penyempurnaan AD/ART”, jelasnya. Selanjutnya, “tetapi yang terpenting adalah terpilihnya Soeryadi sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998 secara aklamasi”. “Semua keputusan ini sah”, tegasnya.

Bagimana dengan keberadaan Soeryadi ? Menjelang akhir acara kongres, ada hembusan isu bahwa Soeryadi akan dibunuh. Isu tersebut membuat Soeryadi ketakutan, akhirnya memutuskan untuk segera kembali pulang ke Jakarta. Melalui jalan darat, Soeryadi dari Medan menuju Riau terus terbang ke Kuala Lumpur-Malaysia, baru dilanjutkan ke Jakarta.[15] Isu tersebut memang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang menghendaki agar Soeryadi tidak terpilih dalam rapat pleno konggres. Menurut AWS, “kalau Soeryadi sempat diumumkan pada pleno kongres, ini akan merepotkan”. “Untuk itu disebar isu Soeryadi akan dibunuh”, tegasnya.[16] Itu sebabnya, hanya melalui konferensi pers, Nico Daryanto mengumumkan Soeryadi Ketua Umum PDI terpilih.

Reaksi Jakarta atas selesainya kongres, terkesan mencemoh dan tidak mengakui hasil kongres tersebut. Seperti yang dikatakan Menko Polkam Soesilo Soedarman, “Soeryadi gagal memimpin, nyatanya masih ada

---

[15] Wawancara dengan AWS, 23 November 2016
[16] Wawancara dengan AWS, 23 November 2016

radikalisme di PDI, terpilihnya Soeryadi secara aklamasi itu tak wajar". Begitu juga, Pangdam Jaya. Mayjen TNI A.M. Hendropriyono, "merasa siap mengamankan kongres itu bila dilaksanakan di Jakarta". Ia menjamin bahwa kongres itu akan berjalan lancar. Sedangkan, Kassospol ABRI Letjen. Haryoto P.S. menegaskan, "figurnya sudah sulit diterima banyak pihak, tidak ada rekonsiliasi jika dia masih mimpin".(Tempo,7/8/1993) Belum lagi, DPD PDI yang awalnya pendukung Soeryadi dikongres berlompatan satu per satu berbalik arah tidak mengakui hasil kongres VI di Medan. Didahului DPD PDI Sumatera Selatan dan Jawa Barat, kemudian diikuti daerah lain. Yang tetap kukuh mendukung Soeryadi hanya beberapa DPD, seperti Jawa Tengah, Bali dan Sumatera Utara. Puncaknya, Sabtu 31 Juli 1993, Mendagri Yogie S. Memed di kantornya menggelar rapat yang dihadiri berbagai kelompok PDI yang bertikai, seperti Sukowaluyo (unsur DPP Soeryadi), Kwik Kian Gie, Aberson M. Silaho, Tarto Sudiro dan Nyonya Soenawar Soekawati (isteri almarhum Soenawar Soekawati-kelompok anti Soeryadi). Dalam pertemuan tersebut, bahwa untuk mengatasi kemelut PDI, maka membentuk *caretaker* untuk menjalankan fungsi DPP sehari-hari dan menyiapkan persiapan Kongres Luar Biasa (KLB).(Kompas, 1/8/1993)

Reaksi Soeryadi atas rencana tersebut, seperti disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Majalah Tempo, disela-sela kesibukan membereskan kantor DPP PDI yang sebentar lagi ia akan tinggalkan. Soeryadi menyatakan, "saya terlalu mencintai partai sehingga saya tidak akan melakukan langkah-

langkah yang dengan sadar sudah diperhitungkan akan membawa musibah". Lebih lanjut, dikatakan, "Anda tahu, saya terpilih dengan aklamasi dan demokratis". Artinya, pengangkatan saya cukup kuat. "Tapi saya tidak ingin menggunakan dokumen yang cukup kuat itu untuk merusak partai", tegasnya.(Tempo,11/9/1993) Soeryadi sadar sebagai aktor, perannya telah berakhir. Apapun yang dilakukan untuk mempertahankan putusan kongres IV Medan pasti akan berujung sia-sia. Yang ia hadapi bukanlah sekedar rekan-rekannya di partai, tetapi sebuah tembok kekuasaan yang besar, lebih besar dari partainya.

Erving Goffman (dalam Ritzer & Goodman:399:2008), menjelaskan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan dramatis yang serupa dengan yang ditampilkan di atas panggung. Mengikuti analogi teatrikal Goffman, dalam kehidupan politik*pun* sama sebagai suatu pertunjukan drama di atas panggung. Konsekuensinya, ada panggung depan maupun panggung belakang yang membentuk jalinan integratif. Panggung depan adalah sisi aktor untuk memperagakan perannya sesuai dengan kehendak skenario yang sudah diatur sedemikian rupa. Itu sebabnya, Goffman menyebut panggung depan cenderung terlembagakan, cenderung dipilih bukan diciptakan. Sedang, panggung belakang adalah sebagai tempat fakta yang tertekan di panggung depan, atau di berbagai tindakan informal dapat terlihat.

Sepak terjang PDi di bawah kepemimpinan Soeryadi memang sangat menggusarkan pihak istana (Soeharto). Soeryadi dianggap orang yang tidak

tahu balas budi. Tetapi pihak istana sudah paham, Soeryadi hanyalah aktor dan menjadi corong bagi sang dalang, yaitu Jenderal Beny Moerdani. Kedekatan Soeryadi dengan Beny Moerdani yang merupakan Menhankam/Pangab pada waktu itu, belum banyak masyarakat yang tahu. Menurut sumber jabatan Direktur Utama PT Aica Indonesia yang dipegangnya semasa menjadi fungsional MPR tahun 1970-an adalah karena kebaikan Benny Moerdani.[17] Tetapi dalam berbagai kesempatan, Soeryadi berusaha menyembunyikan hubungan tersebut. Dalam sesi wawancara dengan Majalah Tempo, ketika ditanyakan tentang kedekatan dengan Benny Moerdany, Soeryadi menjawab,

> "Saya jadi Ketua Umum PDI lewat keputusan Pemerintah. Orang yang ditugasi Presiden waktu adalah Pak Soepardjo Roestam sebagai Mendagri, Pak Benny Moerdani sebagai Pangab, lalu ada Pak Moerdiono sebagai Mensekab, dan Pak Sudharmono sebagai Menseneg. Jadi, sulit kalau saya membantah bahwa saya ini bukannya orangnya Pak Pardjo, Pak Benny, Pak Moer, atau Pak Dhar. Karena tangan-tangan beliau saya jadi Ketua Umum PDI. Sebagai ketua salah satu tugas saya adalah membangun hubungan baik dengan ABRI. Apalagi pada tahu 1986 di dalam PDI masih banyak yang mempersoalkan dwi-fungsi ABRI. Saya harus bekerja keras untuk menjelaskan dwifungsi ABRI kepada mereka. Nah, selama tujuh tahun itulah saya membina hubungan dengan Pangab, Menhankam dan Mendagri. Yang menjadi Pangab kan Pak Benny. Begitu Pak Benny diganti dengan Pak Try (kini Wapres), ya saya berhubungan dengan Pak Try. Dengan Pak Benny tetap berhubungan karena ia menjadi Menhankam. Kalau sudah ditanya berapa kali saya ke rumah Pak Benny, ya Cuma sekali, waktu Natal. Setelah Pak Benny tak jadi Menhankam, saya tak berhubungan lagi dengan dia. Jadi, saya berhubungan dengan Pak Benny karena fungsional".(Tempo, 11/11/1993)

[17] Wawancara dengan AWS, 23 November 2016

Jawaban Soeryadi, seolah hendak mengaburkan hubungan dekatnya dengan Jenderal Benny Moerdani. Hubungan dengan Jenderal Benny Moerdani hanyalah hubungan fungsional, yang tidak ada kaitan dengan garis politik yang dimainkan dengan mantan Menhankam/Pangab. Kendali terhadap Soeryadi, ketika dalam dalam kampanye 1992, PDI gencar melontarkan gagasan pembatasan isu presiden maupun pencalonan Jenderal Try Sutrisno sebagai calan wakil presiden. Gagasan itu, kemudian diperkuat pada Rapim PDI Di Kopo, Cisarua Bogor tahun 1992, secara tegas mencalonkan Tri Soetrisno mantan ajudan Soeharto yang pada waktu itu menjabat sebagai Pangab, sebagai wakil presiden untuk masa jabatan 1992-1997. Hal ini menimbulkan huru-hara yang berkepanjangan baik dari ABRI sendiri maupun oleh politisi-politisi di luar struktur. Pihak istana paham, bahwa putusan itu bukanlah murni dari PDI, melainkan titipan dari Jenderal Benny Moerdani.

Awalnya pencalonan Jenderal Try Sutrisno merupakan kesepakatan para Jenderal pada tahun 1988. (Said:195:2016). Letjen Harsudiono Hartas, pada saat itu sebagai Ketua Fraksi ABRI di MPR memperkuat hal itu, “Fraksi ABRI berniat mencalonkan Try Soetrisno sejak tahun 1988 yang baru beberapa jam diangkat sebagai Pangab, untuk menandingi Soedarmono, tetapi Try Soetrisno belum siap untuk jabatan itu”.(Tempo,23/2/1993) Tetapi, dua minggu menjelang sidang MPR Maret 1993, Letjen Harsudiono Hartas mengumumkan sikap fraksi ABRI tentang pencalonan Try Soetrisno sebagai calon wakil Presiden. Reaksi Soeryadi, atas pengumuman itu. “Kalau Golkar dan PPP

mencalonkan Pak Tri, kami bahagia, tapi ini datang dari Fraksi ABRI , terus terang, PDI lebih bahagia, lebih plong rasanya", tegasnya. (Tempo, 11/9/1993)

Operasi dari istana untuk menurunkan Soeryadi, sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1991. Tetapi hal itu tidak berhasil karena seluruh instrumen militer, seperti Cilangkap (MABES ABRI), Satgas Intel Kokam, Mabes TNI/AD serta jajarannya, BAIS, begitu juga Sospol Depdagri semuanya dibawah pengaruh Benny dan Try Soetrisno.[18] Naiknya Jenderal TNI Faisal Tanjung sebagai Panglima ABRI (Pangab), setidaknya mengubah konfigurasi kekuatan yang selama ini banyak di dominasi kelompok Benny Moerdani. Bukan rahasia umum lagi, isu yang beredar luas dikalangan ABRI, ketika di bawah Benny Moerdani, mereka yang santri tidak selalu mudah mendapatkan promosi. Kebijakan ini diketahui dengan baik dan dimanfaatkan secara seksama oleh Soeharto yang membersihkan ABRI dari pengaruh Moerdany.(Said:152:2016)

Inilah yang menjadi latar belakang dipromosikan Jenderal TNI Faisal Tanjung Dan Jenderal TNI Hartono menjadi KSAD. Naiknya dua perwira tinggi ABRI tersebut menyebabkan polarisasi kekuatan ditubuh ABRI makin terintegrasi dalam pengendalian penuh Soeharto. Kebijakan ini juga memudahkan Soeharto dalam menjinakan munculnya *sub ordinat* yang berusaha mengganggu kekuasaannya, seperti Soeryadi dengan PDInya.

[18] Wawancara AWS, 23 November 2016

Ketika, menjelang kongres IV dilakukan, Soeharto mengirim utusan yang merupakan iparnya, yaitu Kasad Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar untuk menemui Soeryadi. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Toba, Medan dan juga tempat Wismoyo menginap, memang tidak diketahui hasil dari pertemuan itu.[19] Di sisi lain juga, Jenderal Faisal Tanjung mengirim 2 kompi pasukan khusus (Kopasus) dari Jakarta. Pasukan ini yang kemudian menyertai dan dibelakang Yokob Nuwawea ketika menjebol dengan menabrakan mobil di pagar Asrama Haji tempat kongres. Untuk kedua kalinya, pasukan ini menyertai Yokob Nuawea menyerbu kembali Asrama Haji, sehingga menggagalkan rapat pleno yang akan memutuskan Soeryadi sebagai Ketua Umum PDI. Ini dikarenakan kalau sampai Soeryadi diputuskan melalui rapat pleno akan membuat pemerintah lebih repot.[20]

2.5. Pasca Kongres IV Medan

Reaksi minor pejabat Jakarta terhadap Kongres IV 1993 di Medan, membuat Soeryadi kehilangan daya. Memang ada upaya-upaya yang dilakukannya untuk kompromi, yaitu dengan tawaran menempatkan sejumlah penentangnya di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI. DPP lama hanya menyediakan 16 buah kursi, akan dimekarkan menjadi 33 kursi dalam format baru dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan dari penentangnya. Tawaran itu dianggap terlambat dan tidak menarik. Sudah bulat rupanya,

[19] Wawancara AWS, 11 November 2016
[20] Ibid,

pemerintah tidak menginginkan Soeryadi memimpin PDI. Sinyal tersebut disuarakan melalui Mendagri Yogie S. Memed, menyatakan tentang Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai jalan untuk mengatasi kemelut kongres ke IV di Medan.

Oleh karena itu gerak cepat *pun* dilakukan, melalui berbagai serangkaian pertemuan dengan tokoh-tokoh PDI yang dimotori Mendagri tersebut yang hendak digiring untuk membentuk DPP *caretaker* sebagai persiapan untuk melaksanakan kongres luar biasa (KLB). Proses pembentukan itu memang sempat membuat Mendagri tegang, sebab sudah beberapa pekan ditunggu belum ada kejelasan inisiatif dari tokoh PDI untuk melakukan rapat. Ia menginginkan agar pengurus PDI dari tingkat pusat sampai daerah ke meja perundingan menuju Kongres Luar Biasa(KLB). Namun sampai pertengahan Agustus 1993 belum ada sambutan.(Tempo,4/9/1993) Mendagri nampaknya tidak ingin mengulang peristiwa tujuh (7) tahun silam, persisnya pada kongres PDI III yang berlangsung di Taman Mini tahun 1996 silam. Kongres yang berujung krisis tersebut, akhirnya peserta kongres menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah, dalam hal ini Mendagri waktu itu Soepardjo Rustam. Melalui SK Mendagri inilah, menunjuk Soeryadi sebagai ketua umum PDI periode 1986-1991. Langkah ini tidak ditempuh untuk menghindari tudingan pemerintah terlalu intervensi terhadap permasalahan PDI, pemerintah hanyalah fasilitator terhadap pihak-pihak yang bertikai.

Akhirnya, kegundahan Mendagri terjawab, ketika Ketua DPD PDI Jawa Timur Latief Pudjosakti mengajukan diri sebagai tuan rumah daerah dari 27 propinsi pengurus PDI di Surabaya. Sasarannya adalah membentuk DPP *Caretake*r yang berfungsi sebagai pengurus sementara DPP PDI, yang bertugas untuk menyiapkan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB). Pengajuan dari Latief Pudjosakti ini tentu disambut gembira Mendagri yang membuatnya total untuk membantu dengan mengkordinasikan undangan ke daerah yang dilakukan Departemen Dalam Negeri ke Direktorat Sospol daerah yang nantinya diteruskan kepada pengurus PDI setempat, juga uang dan tiket untuk berangkat ke Surabaya sudah disediakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Kendati sebagai tuan rumah, rupanya Latief Pudjosakti tidak perlu repot membentuk panitia dan menyediakan akomodasi peserta yang datang dari berbagai daerah. Segala keperluan peserta sepenuhnya sudah di tanggung Pemerintah Daerah Jawa Timur, bahkan Staf Direktorat Sosial Politik (Sospol) Jawa Timur sibuk ikut menyeleksi peserta yang boleh hadir. Hal yang mengecewakan dialami oleh ketua PDI Kalimantan Selatan, Afwandi Mashoed yang tidak boleh masuk ke ruang pertemuan, karena dikenal sebagai pendukung setia Soeryadi. Tiket masuk ternyata sudah dipegang duluan oleh wakilnya, Anang Khairin Noer.(Tempo, 4/9/1993)

Dalam pertemuan tersebut, Latief sukses menggiring peserta untuk menyetujui adanya Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai kelanjutan dari

penyelesaian Kongres IV Medan yang dianggap gagal. Latief Pudjosakti pada saat kongres ke-empat di Medan, dikenal bermain di dua kaki, satu berada dibarisan pendukung Soeryadi, dan satunya berdiri dikelompok yang berseberangan dengan Soeryadi. Posisi itu menyebabnya Latief mudah menggalang dukungan, sehinga ia mendapat dukungan 186 cabang dari 303 cabang PDI seluruh Indonesia. Artinya hampir 60 persen, cabang-cabang menginginkan diadakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Kendati, ada beberapa utusan daerah yang kecewa dengan putusan itu, nampaknya Latief "lihai" meredam peserta rapat dengan dengan "uang hiburan" sebesar Rp. 1 juta per orang yang telah disiapkan oleh Alex Asmasoebrata. (Tempo,4/9/1993) Suasana yang sempat tegang, akhirnya mencair ketika Alex Asmasoebrata membagikan amplop kepada 60 peserta rapat. Dengan modal dukungan tersebut, akhirnya Latief Pudjosakti terpilih sebagai ketua formatur dari tujuh anggota formatur. Nama-nama formatur lain, seperti Budi Hardjono, Ismunandar, Markus Wauran, Anang Khairin Noer, Soetardjo Soeryoguritno, dan Kwik Kian Gie adalah nama-nama yang dikenal tidak mendukung Soeryadi. Di tempat lain, Soeryadi juga berusaha menggalang kekuatan yang dipusatkan di Hotel Weta Surabaya. Tetapi, upaya tersebut tidak mendapat dukungan.

Pertemuan itu memang seolah Latief Pudjosakti yang punya kerja, tetapi dibalik itu peran pemerintah (Mendagri) sangat besar. Hal ini terlihat dari kesibukan Latief yang mondar-mandir antara tempat Hotel peserta rapat

dengan Kantor Wilayah Koperasi, tidak jauh dari Hotel. Konon, di tempat itu, ada utusan dari Jakarta yang memonitor rapat. Setelah rapat berhasil memutuskan ketua dan anggota formatur, kemudian, nama formatur itu dibawa ke rumah dinas Walikota Surabaya Purnamo Kasidi dan sudah menunggu Mendagri Yogie. S Memed. (Tempo, 4/9/1993) Esoknya, seluruh peserta rapat bertemu dengan Yogie. S. Memed di Gedung Gurbernuran Grahadi, dan susunan pengurus *caretaker* pun di umumkan.

2.6. Menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Dan Megawati Sukarnoputri

Barangkali dibenak Sumakyo sudah jenuh dengan pertikaian yang kerap melanda partainya, PDI. Tiap kali ada konflik yang menghadapkan pada pilihan-pilihan politik yang sulit. Kendati ia hanya sebagai ketua cabang di Surakarta, tetapi ketika konflik melanda partainya, ia akan terimbas juga. Untuk itu menjadi kesempatan bagi mantan aktivis PNI itu menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang akan diselenggarakan pada 1-6 Desember 1993 di Surabaya, melontarkan gagasan untuk menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai kandidat Ketua Umum PDI, menggantikan Soeryadi. Usulan itu berangkat pemikiran sederhana, ia menginginkan figur Ketua yang bebas konflik kepentingan. Ia berpatokan pada peristiwa Kongres PDI 1986, Soepardjo Rustam atas nama pemerintah membentuk kepengurusan DPP PDI dengan Soeryadi sebagai ketua yang merupakan figur bebas konflik dari mantan aktivis PNI yang sebelumnya mendominasi kepengurusan PDI sejak fusi 1973. Pemikiran lain, Megawati Soekarnoptri yang merupakan anak

biologis Bung Karno akan membawa kesejukan bagi persatuan dan kesatuan PDI.

Lontaran Sumakyo ini, ibarat efek bola salju yang terus membesar. Sambutan dari berbagai daerah mendukung pecalonan Megawati terus bertambah. Awalnya, hanya 60 DPC PDI yang meminta Megawati sebagai *careteker*. Tetapi Megawati belum menjawab pencalonan itu. Melalui Sumakyo, Ketua DPC Solo, Djati Kusumo, anggota DPR, dan Manggara Siahaan yang terus melakukan kordinasi, sehingga ketika Megawati mengadakan acara ulang tahun yang ke 50 terdapat 100 fungsionaris dari 70 DPC PDI yang tersebar di seluruh Indonesia hadir dalam acara tersebut menyatakan mendukung pencalonan Megawati untuk maju dalam bursa ketua umum PDI dalam KLB Desember 1993. (Editor,25/9/ 1993) Jawaban Megawati atas pencalonan itu. “Permintaan saudara, serahkan saja kepada Kongres Luar Biasa, Saya tidak bersedia jadi ketua umum jika program hasil KLB tidak mengacu kepada kepentingan rakyat banyak. Kongres Luar Biasa tentu hasilnya juga Ketua yang luar biasa”, demikian jawaban Megawati. (Editor,25/9/1993)

Pencalonan Megawati dalam bursa ketua umum di Kongres Luar Biasa (KLB) mendapat tanggapan yang beragam dari tokoh lama PDI. Seperti, Marsoesi, tokoh kelompok 17, “Mbak Mega memang ada potensi pemersatu. Banyak teman-teman PDI simpati dan hormat kepadanya. Kalau dilihat dari situ ia memang berpotensi. Soal apakah dia mampu memimpin, organisasi

saya belum tahu dia memimpin organisasi. Jadi, sementara ini dilihat kharisma dari Bung Karno", jelasnya. Berbeda dengan rekannya, Isnaeni tokoh kawakan PDI, dengan terang-terangan meragukan kemampuan Megawati. (Editor,25 /9/1993)

Dari pihak keluarga pun, tampak sangat mendukung. Hartini, janda mendiang Bung Karno, menyatakan, "saya setuju, bukan hanya saya, tapi seluruh keluarga mendukungnya. Megawati cukup mampu memimpin PDI karena ia sudah dalam berkecimpung disitu". "Orangnya tidak emosional, berpikir panjang dan mengayomi', jelas Hartini. (Editor,25/9/1993) Begitu pula dengan adik-adik Megawati, seperti Guruh maupun Sukmawati yang awalnya menentang tiba-tiba luluh menyetujuinya. "Saya lihat , mbak Mega sudah siap mengemban tugas itu. Saya sendiri ikut mendukukung", tegas Sukmawati. Tetapi nada sejuk dukungan tidak datang pada Rachmawati. Adik Megawati ini secara tegas menyatakan Megawati melanggar konsensus keluarga. "Berpolitik tidak harus masuk ke satu partai. Kami menyesal, kenapa Mega dan Taufik melanggar konsensus keluarga," tegasnya. (Editor, 21/10/1993)

Rachmawati mengakui, sebelum Megawati masuk ke PDI, sudah datang tawaran pada dirinya. Ketika itu, dalam jamuan makan di sebuah restoran di Jakarta, salah satunya yang hadir, yaitu Panda Nababan mengajak untuk bergabung dengan Partai Politik, tetapi ia menolak. Alasannya, dalam sistem politik Orde Baru, dominasi kekuasaan demikian kuat, maka partai politik

akan menjadi ordinasi yang terdominasi dari kekuasaan. “Bagaimana menjadi kekuatan yang sehat, apabila tidak independen”. katanya. Dari isu yang berkembang, Rachmawati yang aktif sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) banyak dikelilingi orang mantan aktivis PNI “garis keras”, sehingga pandangan politiknya tidak segaris dengan kebijakan Orde Baru. Tetapi, Racmawati membantahnya, “Ngak benar saya dipengaruhi generasi tua. Ia menyinggung soal konsensus keluarga semata-mata karena melihat sistem politik yang sekarang pun tetap tak akan memberikan ruang gerak bagi ajaran Bung Karno, “ tegasnya. (Editor, 21/10/1993)

Menanggapi pecalonan Megawati, suara pemerintah ternyata tidak sama. Umumnya pejabat Jakarta bersuara netral, seperti Pangab Jenderal TNI Faisal Tanjung, menyatakan: “Pimpinan ABRI tak ikut campur soal pencalonan ketua umum PDI-termasuk dengan mencuatnya Megawati Soekarno, jika putri Bung Karno itu mencalonkan diri, juga tak akan dikenakan persyaratan khusus, seperti litsus”. Begitu pula dengan Kassospol, Letjen TNI Hariyoto P.S. menegaskan: “Tidak benar, Budi Hardjono diplotkan ABRI, yang punya kuasa memlih adalah cabang-cabang”. (Tempo,27/11/1993)

Adanya kekhawatiran dengan naiknya Megawati Soekarno, akan kembali membangkitkan “Soekarnoisme”. Hal ini bisa dipahami, masih banyak aktivis PDI yang berasal dari PNI yang merupakan pengikut Soekarno. Naiknya Megawati akan membangkitkan romatisme lama yang memang selalu dicegah oleh rezim Orde Baru. Tetapi tentang hal itu, ditepis oleh Waka Bais Mayjen

TNI Ari Sudewo, “kekhawatiran akan bangkitnya Soekarnoisme kan dari koran, tidak ada kaitannya dengan naiknya Megawati”.(Editor,30/11/1993) Pernyataan pejabat Jakarta, sungguh berlainan dengan para pejabat daerah. Gubernur Jawa Tengah Soewardi, dengan jelas menyatakan, “Saya tidak mau bilang Mega bagaimana. Tapi dulu ada istilah Marhaen, komunisme yang hendak diterapkan di Indonesia. Apa kamu suka?”(Tempo,27/11/1993) Lain lagi dengan pernyataan Pangdam Diponegoro, Letjen Soeyono , “Ia lebih cocok menjadi Ibu rumah tangga saja”.

Kondisi yang terjadi di atas, memang berbeda dengan kondisi di bawah. Sinyalemen untuk mengganjal Megawati nyata dilakukan. Di Jawa Timur, setidaknya ada 15 dari 37 cabang yang terang-terangan mendukung Megawati. Di Bali, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Cabang Denpasar, “enam dari 8 cabang PDi berada di belakang Megawati, Begitu juga, di Sulawesi Selatan, sebanyak 17 dari 23 cabang memihak Mega. Tapi belakangan 5 cabang menarik diri mendukung Megawati, setelah ada pengarahan dari Kantor Sospol daerah. Banyak cabang yang awalnya mendukung, tiba-tiba menarik dukungan atau membuat opini yang menyudutkan Megawati. Wakil Ketua DPD PDI Jawa Timur Djuwardi, misalnya. Setelah bertemu dan mendapat pengarahan dari Kepala Direktorat Sosial Politik Jawa Timur, menegaskan: “Kriteria baru bagi calon ketua umum 1993-1998, yakni harus orang yang “berjasa” menyelamatkan PDI sehabis babak belur di Kongres Medan yang gagal. Ia hendak mengisyaratkan bahwa Megawati tidak memenuhi kriteria itu”.

Pernyataan itu, di nilai titipan. Yang dimaksud Djuwardi tentu saja Budi Hardjono atau Latief Pudjosakti, orang yang dikenal memang kritis terhadap pemerintah, tetapi juga tokoh yang dekat dengan pemerintah.

Isu adanya tekanan para pejabat daerah terhadap cabang PDI daerah akhirnya menjadi terbuka, ketika Sumakyo ketua DPC PDI Solo yang dikenal sebagai inisiator pencalonan Megawati sebagai ketua umum. Berawal dari surat yang dikirimkan Sumakyo kepada kepada Pangdam Diponegoro Mayjen Soeyono dengan tembusan Mendagri, Panglima ABRI, dan Gubernur Jawa Tengah. (Tempo, 27/11/1993) Dalam surat itu, intinya Sumakyo, menyatakan bahwa tindakan mendukung Megawati adalah suatu "kekhilafan" untuk itu ia meminta maaf. Ia tidak tahu dan bingung harus mendukung pemimpin PDI yang mana. Untuk itu dalam suratnya, ia meminta petunjuk dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua DPC PDI. Surat yang dibuat pada 23 November 1993 itu, dimaknai sebagian pendukung Megawati sebagai bentuk pengkhianatan, tetapi ada yang membela Sumakyo, bahwa apa yang dilakukan adalah bentuk "protes" gaya Solo karena menghadapi tekanan dari pejabat Sospol daerah supaya menarik dukungan terhadap Megawati. Bahkan menjelang keberangkatan para utusan cabang menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, terlebih dahulu mendapat pembekalan ataupun pengarahan dari Gubernur /Pangdam, seperti yang dialami utusan DPC-DPC PDI Jawa Barat. Tetapi dalam penjelasannya, Assopol ABRI Kolonel Iskak, yang mewakili Pangdam Jawa Barat, menyangkal tekanan terhadap Megawati.

“Acara pembelan itu sebenarnya hanya dimaksudkan agar peserta KLB benar-benar menghayati makna persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai ketika pemilihan figure ada peserta dari Jawa Barat yang bilang, Pangdam di tempat saya meminta agar si A atau si B yang menjadi ketua umum”, tegasnya. (Editor,2/12/1993)

Cerita lain, tentang tekanan dari aparat pemerintah menimpa Ketua DPC PDI Jakarta Utara. Kepala Kantor Sospol Jakarta Utara “menodongnya” dengan menandatangani surat pernyataan yang berisi pencalonan Budi Hardjono. Begitu juga yang terjadi di Ponorogo, seorang Camat menyuruh aktivis PDI untuk membuat pernyataan ABH “Asal Budi Hardjono”. Pemerintah nampaknya bertekad bulat mengganjal Megawati. Selain tekanan yang dilakukan di bawah, kriteria ketua umum yang tidak melekat dalam diri Megawati juga digulirkan, seperti pernah menjadi fungsionaris sedikitnya 10 tahun, pernah “menyelamatkan” partai dari kemelut, kemudian kriteria lain yang bisa menghambat, yaitu pemilihan ketua umum dilakukan dengan sistem formatur. Hal ini dikemukakan oleh Suryadi Setiawan Kepala Kantor Sospol Jawa Timur, ketika memberikan pengarahan pada rapat kerja DPD PDI Jawa Timur menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel Montana, Malang. (Tempo, 4/12/1993)

DPD PDI Sumatera Utara pun tidak luput dari pengarahan dari penguasa setempat. Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar pada acara pelepasan 56 utusan DPD PDI yang akan berangkat ke Surabaya menghadiri KLB.

Dalam pengarahannya, “Pandai-pandailah Saudara-saudara dalam membaca zaman”. “Tanda zaman” ini dimaknai sebagai isyarat supaya tidak memilih Megawati di KLB nanti. Menanggapi kenyataan tersebut, pejabat daerah menjawab dengan normatif, seperti diungkapkan Pangdam Jawa Tengan Mayjen Soeyono, “Tidak ada tekanan pada PDI di Jawa Tengah”. (Tempo, 4/12/1993)

Ganjalan yang dilakukan aparat daerah terhadap pencalonan dirinya bukan tidak diketahui Megawati. Untuk menghindari kegamangan pendukungnya, tepat satu minggu menjelang Kongres Luar Biasa, Megawati meluncukan sebuah buku, *“Pokok Pikiran Megawati Sukarnoputri: Bendera Sudah Saya Kibarkan”.* Peluncuran itu hendak mengisyaratkan ketekadan Megawati untuk maju dalam bursa pencalonan Ketua Umum PDI. Acara peluncuran yang berlangsung di Madura Room Hotel Indonesia. Dalam buku tersebut, Megawati menjelaskan tentang demokrasi, hak azasi manusia, dwi fungsi ABRI dan pembangunan Indonesia. Buku itu memang masih berkesan deskriptif, belum menjelaskan tentang analisa dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Tetapi sebagai isyarat politik ketekadan Megawati maju dalam bursa ketua umum PDI cukup memadai. Selain di hadiri tokoh-tokoh politik dari petisi 50, Hoegeng, juga tokoh lain, seperti Isnaeni, Frans Seda dan juga para artis film Roy Marten dan Dedy Mizwar. Hal yang tampak *special* dalam acara tersebut adalah hadirnya Ria

Moerdani beserta suaminya, Ria merupakan anak perempuan dari Benny Moerdani.

Munculnya Megawati, ibarat *Qase* di tengah tandusnya politik Indonesia yang monolitik. Banyak harapan yang dibebankan dipundak Megawati untuk menembus jaring-jaring struktural yang didominasi rezim Orde Baru. Ia diharapkan dapat membawa angin perubahan, tidak hanya dikalangan internal PDI sendiri, melainkan juga dari kalangan yang selama itu "kritis" pada rejim Orde Baru. Warisan kharisma Bung Karno akan mencairkan kebekuan politik yang hegemonik. Dalam *polling* yang diselenggarakan Majalah Editor terhadap DPC PDI, Megawati merupakan kandidat terkuat untuk menjadi ketua umum PDI. Ia mendapatkan dukungan sebesar 67.1 %, dibandingkan dengan Budi Hardjono 16.5 %, Soetardjo Soeryoguritno sebesar 2.4 %, dan yang belum menyatakan sikap sebesar 14.0 %. (Editor,2/12/1993) Begitu juga, Megawati dipersepsikan sebagai pemersatu mencapai 47.5 %, sedangkan karena faktor kharismatik sebesar 19.7 %. Di sisi lain, polling dilakukan untuk melihat tekanan terhadap DPC-DPC. Hasilnya menunjukan 85.9 % responden mengaku tidak mengalami tekanan dan sisnya 14 .1 % mengaku mendapat tekanan dalam mengajukan kandidat. Ketika ditanyakan pihak-pihak yang melakukan tekanan, responden menyebutkan 60 % dari pemerintah, 20 % dari ABRI dan 20 % dari lawan politik. (Editor,2/12/1993) Tingginya tekanan dari pemerintah maupun ABRI memang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah tentang kepartaian dan dwi fungsi ABRI.

2.7. Kongres Luar Biasa (KLB) Di Surabaya

Akhirnya Kongres Luar Biasa (KLB) pun digelar pada tanggal 2 sampai 6 Desember 1993 di Gedung Juang 45, Surabaya. Kongres ini merupakan "hajatan" dari Mendagri ini merupakan upaya mengatasi kemelut PDI sebagai akibat dari kegagalan kongres IV PDI Juli 1993 di Medan. Mendagri Yogie S Memed, mengatakan, "KLB ini proyek saya, harapan saya KLB ini sukses". Aroma pemerintah intervensi pada hajatan ini sudah bergaung sebelumnya dengan cara yang bervariasi. Ada yang menggunakan jalur proposal. Utusan yang tidak mendukung calon yang direstui tak akan mendapat dana. Kemudian adanya sinyalemen hadirnya staf Disospol dari 27 propinsi yang datang ke Surabaya tujuannya adalah memonitor peserta KLB agar tidak memilih Megawati. (Editor,9/12/1993) Pemerintah nampaknya tidak mau kecolongan lagi, seperti kongres Medan. Kongres yang menelan dana Rp. 909 juta, harapan pemerintah berjalan mulus.

Dukungan "arus bawah" terhadap Megawati terus mengkristal. Akhirnya, arena kongres menjadi representasi pertarungan dua kutub kekuatan, di satu sisi Megawati yang merepresentasikan kelompok "arus bawah "yang menginginkan perubahan, di sisi lain, kelompok *status quo* yang memang didukung dan direstui pemerintah. Beradunya dua kekuatan ini, maka tak mengherankan apabila, jauh hari sebelum kongres, Sudomo, Mantan Pankomkamtib, mengatakan, "Kongres Luar Biasa (KLB) PDI akan ricuh. Ini *feeling* saya". Pernyataan Sudomo ini tentu bukanlah main-main. Ia adalah

orang dalam pusaran arus atas, yang tentu paham kondisi di sekelilingnya. Dari sisi pengamanan nampak luar biasa. Aparat yang diturunkan 1.200 personil. Menurut, Kapolda Jatim Mayjen (Pol) Drs. Emon Rivai, “selain pasukan Opsdahura(Operasi Pengendalian Huru Hara), juga diturunkan Tim Jihandak(Tim Penjinak Bahan Peledak). (Tempo, 9/12/1993) Bahkan, Pangdam V/Brawijaya Mayjen Haris Sudarno, mengakui pihaknya sudah siap dua bulan yang lalu saat diberi tahu caretaker DPP PDI.

Awalnya, peta kekuatan yang berkongres mengkrucut hanya dua kubu, yaitu kubu Megawati dengan kubu Budi Hardjono. Seiring dengan pola kepentingan, terjadi polarisasi kekuatan. Latif Pudjosakti yang awalnya sebagai ketua *caretaker* mempunyai keinginan untuk menjadi Ketua Umum PDI. Belum lagi Marsoesi dari kelompok 17 yang terang-terangan menghadang Megawati dengan ikut mendukung sistem pemilihan lewat formatur. Di balik dukungan itu, Marsoesi meminta jatah sepertiga dari kepengurusan mendatang. “Dari 21 DPP, cukup 7 orang pengurus saja’, katanya. Dari DPP Peralihan, Achmad Subagyo pun demikian, anggota DPA yang baru diangkat menunggu keberuntungan dalam kongres tersebut.

Dalam menghambat langkah Megawati masuk arena kongres, pada pendaftaran peserta Megawati nyaris tidak bisa masuk ruangan karena surat mandatnya belum ditandatangi Ketua DPD DKI Jakarta, Alex Asmasoebrata. Hal ini dikarenakan, Megawati yang sudah lama tinggal lima bulan di wilayah Jakarta Selatan, tetapi KTPnya tetap memakai KTP Jakarta Pusat. Dalam

sidang pun demikian, terjadi kericuhan karena panitia berusaha memanfaatkan tata cara pemilihan ketua yang di rumuskan sidang komisi organisasi. Yaitu dengan cara memindahkan orang-orang yang mendukung Budi Harjono ke komisi organisasi, sedang orang yang di komisi organisasi pendukung Megawati dipindah ke komisi lain. Bambang Sur dari Bojonegoro, misalnya, yang semula mendapat komisi organisasi, tiba-tiba diganti Heri Palupesi dari Kelompok 17, pimpinan Marsoesi. Demikian pula, orang Megawati yang lain, Suhaji dari Surabaya tiba-tiba dikirim ke tempat lain, dan tempatnya di ganti Hafiz temannya yang merupakan pendukung Budi Hardjono. Debat tentang tata cara pemilihan menjadi agenda krusial dalam KLB ini. Kelompok Budi Hardjono menghendaki agar pemilihan ketua dilakukan dengan cara menetapkan formatur. Yang memang telah dipesan oleh Mendagri pada saat pidato pembukaan. Dengan cara ini memang memungkinkan pihak luar untuk intervensi dan memenangkan kelompok Budi Hardjono. Sedangkan kubu Megawati menginginkan dengan cara pemilihan langsung atau *voting*. Cara ini dianggap paling menguntungkan bagi kemenangan Megawati, sebab cabang sebelumnya mendukung Budi Hardjono bisa berbelok arah ke Megawati. Suasana sidang pertama sangat tegang yang diwarnai dengan saling ejek, kecam dan tegang kedua pendukung, bahkan di luar sidang pun tak kalah ramai dengan di dalam sidang. Mereka mengadakan unjuk rasa untuk menunjukan rasaa simpati mendukung Megawati. Setiap Budi Hardjono tampil, peserta sidang pun serentak meneriakan koor “huu” dengan nada

mengejek. Tapi tidak dengan Megawati, selalu mendapatkan "*aplaus*" setiap kali tampil. Kata pendukung Budi Harjono dari Jawa Timur. "Kita tidak berani mengejek anak proklamator, takut kualat", katanya. (Tempo, 12/12/1993)

Pada sidang hari ketiga, 3 Desember 1993, sidang kembali ricuh karena pimpinan sidang tetap memaksakan sistem formatur. Menjelang sholat Jumat, sidang diskors. Kesempatan waktu tersebut dimanfaatkan Latief Pudjosakti untuk berkonsultasi dengan pejabat Dedapgri dan para DPD untuk memaksa DPC-DPC untuk mendukung Budhi Hardjono secara tertulis. Sidang pada hari berikutnya, 4 Desember 1993 suasana tetap sama, yaitu tetap ricuh, bahkan Latief Pudjosakti sempat menghilang berapa kali dalam acara sidang dan tetap memaksakan sistem formatur, sehingga sidang banyak penundaan. Akhirnya sidang mencapai kesepakatan bahwa tata cara pemilihan dibahas disidang komisi.

Pada saat kongres, di Jakarta Mendagri dipanggil Presiden Soeharto. Setelah bertemu Presiden, memberikan pernyataan bahwa pemerintah tidak keberatan bila Megawati menjadi Ketua PDI, dan pemilihan lewat pemungutan suara atau *voting* bukanlah masalah. Pernyataan yang masih berkesan normative ini, tapi gemanya di area kongres luar biasa. Dalam acara pemandangan umum, hampir semua utusan menyerukan agar pemilihan ketua dilakukan dengan cara pemilihan suara langsung dan mencalonkan Megawati sebagai ketua umum PDI. Dalam rapat pemandangan umum, Megawati

memang menjadi bintang, hampir 84 % utusan dari cabang-cabang mencalonklan putri kedua Bung Karno. Suasana seperti memang berbeda dengan 3 hari yang lalu, desakan untuk tidak memilih Megawati sangat kuat.

Sidang komisi yang jatuh hari Minggu, 5 Desember 1993 sengaja di tunda-tunda, bahkan ketika menjelang sidang akan dimulai pada malam hari mendadak listrik padam selama hampir 2 jam. Ketika sidang berlangsung dan materi mulai membahas tentang tata cara pemilihan untuk menentukan dengan cara formatur atau voting. Setelah mengalami jalan buntu, akhirnya disepakati tata cara pemilihan ketua dengan pemungutan suara. Pukul 23.00 WIB, Marsoesi keluar arena sidang. Tidak lama kemudian, datang seseorang dari kelompok Marsoesi menantang berkelahi semua peserta sidang yang menghendaki pemungutan suara. Kubu Marsoesi menghendaki KLB *deadlock* dan meminta 50 % komposisi DPP diisi kubu mereka. Pada pukul 23.50 WIB, listrik dipadamkan untuk memenangkan situasi, lima menit kemudian dinyalakan kembali, dan sidang akhirnya diskors pada pukul 01.00 dini hari tanpa hasil. Kalau sidang *deadlock* atau macet total, hal ini tidak mengkhawatirkan kubu Budi Hardjono dan Panitia Latief Pudjosakti, karena Kongres ini macet menjadi peluang mereka untuk meminta campur tangan pemerintah, seperti kejadian kongres sebelumnya. Kalau hal ini sampai terjadi, menjadi kemenangan bagi kubu Budi Hardjono.

Pada hari terakhir kongres, 6 Desember 1993, semua peserta KLB sudah hadir di ruang sidang sejak pukul 09.00 WIB, tapi tak seorang panitia pun

hadir di ruang sidang. Akhirnya, sekitar 27 DPD PDI mengultimatum panitia *caretaker* dengan memberi batas waktu sampai pukul 20.00 WIB, jika *caretake*r tidak bisa menyelesaikan masalah, DPC-DPC akan mengambil alih sidang KLB dan akan melaksanakan sidang paripurna. Keputusan lainnya, DPD menetapkan sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua formatur dengan anggota 27 DPD, termasuk Budi Hardjono. Pada pukul 19.30 WIB, seluruh DPD PDI dipanggil *caretaker* di Asrama Haji. Pertemuan berlangsung 30 menit dengan keputusan bahwa sidang yang direncanakan dimulai pukul 20.00 WIB ditunda sampai pukul 22.00 WIB.

Di luar arena kongres, sejumlah massa pendukung Megawati sudah menunggu hasil sidang akhir. Mereka menuntut agar sidang menetapkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI dan mengancam kalau hasil kongres tidak seperti yang mereka harapkan, maka akan menduduki ruang sidang. Di luar ruang sidang, tepatnya Posko pengamanan kongres, berlangsung rapat antara Alex Widya Siregar, Ketua Satgas Pengamanan, Achdari, Waka Bais dan Bimantoro, Kapolwiltabes Surabaya untuk mengatisipasi adanya kericuhan. Mereka menyimpulkan bahwa tuntutan mereka (massa di luar) apa yang diputuskan dalam sidang harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka, yaitu Megawati Ketua Umum PDI. Seperti yang dikatakan Alex Widya Siregar, “pada saat terakhir kongres, di luar memihak Megawati, apabila keputusan di dalam berbeda dengan keinginan yang berada di luar

maka yang di dalam bisa terbunuh". Tetapi kalau terpilih Megawati pasti pemerintah tidak merestui.[21]

Untuk itu antara Alex Widya Siregar, Achdari (Waka Bais) dan Bimantoro (Kapolwiltabes Surabaya) memutuskan untuk mengakhiri kongres tanpa adanya keributan, dengan cara mempermainkan waktu. "Ijin Kongres *kan* 4 hari dan batas waktunya jam 24.00 WIB. Jam 23.00 WIB kita tutup kongres karena ijin sudah melampaui batas, dengan demikian kongres tidak ada keputusan", kata Alex Widya Siregar. "Siapa yang pegang kunci gedung"? Tanya Bimantoro. "Saya yang pegang", jawab AWS. Baik Achdari maupun Bimantoro menyetujui usulan AWS[22]. Akhirnya, tepat pukul 23.00 WIB seluruh peserta Kongres Luar Biasa dievakuasi keluar ruang rapat, tidak beberapa lama kemudian mereka yang berada di luar dan merupakan pendukung Megawati masuk ruangan sidang yang telah kosong. Peristiwa inilah yang menandai bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) mengalami *deadlock*. Melihat situasi tersebut, menjelang detik-detik terakhir berakhirnya Kongres hari selasa (7/12) pukul 00.00 WIB, Megawati membuat langkah berani dengan menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI *de facto.*

---

[21] Wawancara AWS, 23 November 2016
[22] AWS pada saat itu yang memegang kunci

Gambar 4
Pengumuman Megawati Sebagai Ketua Umum PDI Pada KLB Surabaya 1993
Sumber : Koran Sulindo

Reaksi keras terhadap macetnya KLB PDI di Surabaya, datang dari Sri Bintang Pamungkas anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. “Kalau Menteri Yogie tidak bisa mengukuhkan Mega, sebaiknya mundur saja”, katanya. Menurutnya, Pemerintah sudah keterlaluan dalam campur tangan terhadap masalah internal PDI. Tanggapan Mendagri Yogie S. Memed terhadap kongres yang macet. “Sebagai pembina politik, seorang Menteri Dalam Negeri harus tahu masalahnya, melakukan pembinaan, ikut di dalamnya, tapi kami tak campur tangan, apalagi memaksakan kehendak,” katanya.(Tempo, 18/12/1993) Bagi Mendagri, *deadlocknya* KLB PDI memang di luar dugaan. Sejak awal ia mengklaim bahwa KLB PDI ini merupakan “proyeknya”, menghadapi kegagalan mengharuskan untuk menyusun strategi

baru. Oleh karena itu, ia akhirnya memanggil kelompok-kelompok yang terlibat dalam KLB PDI Surabaya. Kelompak pertama adalah DPP *caretaker* yang dipimpin Latif Pujoksaktie, dalam pernyataan setelah diterima di kantor Mendagri. "Karena kongres berakhir seperti itu, kami minta bantuan Menteri sebagai pembina politik untuk mengatasinya", katanya. (Tempo, 18/12/1993)

Sambil menunggu bertemu dengan Mendagri, Megawati langsung melakukan "silahturahmi politik". Tokoh pertama yang ia temuai tentu tokoh "sepuh" partai, yaitu penanda tangan deklarasi fusi 1973 (PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, IPKI) di rumah Isnaeni, mantan ketua PDI, yang awalnya meragukan Megawati memimpin PDI. Sikap *sesepuh* partai tegas, yakni mendukung Megawati yang secara riel didukung peserta kongres. Untuk itu mereka mendesak pemerintah mengakui Megawati untuk menjadi ketua umum PDI. "Terpilihnya Megawati adalah suatu fakta yang didukung oleh aspirasi dari bawah", kata Isnaeni di kediamannya pada Kamis, 16 Desember 1993. Selanjutnya, Megawati melanjutkan dengan "silahturahmi" dengan pejabat pemerintah dan pimpinan ABRI seperti dengan Ka Bakin, Letjen TNI Sudibyo, putri Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, berikutnya dengan Pangdam Jaya Mayjen A.M Hendropriyono, Direktur A Bais Brigjen Agum Gumelar, dan Kepala Sospol Letjen Hariyoto P.S.

"Silahturahmi politik" yang dijalankan Megawati nampaknya efektif dan membentuk opini, bahwa kepemimpinan Megawati di PDI adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Akhirnya, selesai menerima Megawati di kantornya,

Mendagri, menyatakan, “kemungkinan besar Megawati bisa menjadi Ketua Umum PDI”. Kalau memang Megawati diterima sebagai Ketua Umum, masalahnya forum seperti apa yang bisa mengesahkan kepemimpinannya. Oleh karenanya itu, Mendagri Yogie S. Memed menawarkan adanya musyawarah nasional (Munas) yang akan di hadiri pengurus partai dari 27 propinsi sebagai lembaga tertinggi partai yang masih utuh. Setiap utusan dua orang, satu ketua, satu sekretaris. “Munas ini mempunyai kewenangan seperti kongres”, kata Yogie S. Memed.

Kendati, pemerintah sudah memberi angin kepada Megawati, pesaing Megawati, seperti Budi Harjono masih belum menyerah. Masih ada kartu-kartu lain yang hendak dimainkan untuk menjegal Megawati. “Jangan buru-buru menganggap Megawati sudah menjadi ketua umum, Munas belum berlangsung, Mega harus membuktikannya,” kata Budi Hardjono. (Tempo, 25/12/1993) Keyakinan Budi Hardjono cukup beralasan, harapan akan dukungan penuh dari pemerintah bisa saja berpihak padanya. Pemerintah yang tidak akomodatif terhadap latar belakang ideologis Megawati sebagai anak Bung Karno, menjadi peluang bagi Budi Hardjono untuk menduduki Ketua Umum. Arena pertarungan PDI belum selesai, masih ada satu babak lagi yang harus dimainkan.

Munas yang sedianya diadakan 16 Desember 1993 di Wisma DPR Grya Sabha, Kopo Bogor, tiba-tiba karena pertimbangan teknis di undur 22 Desember 1993. Pengunduran itu menjadi kesempatan Budi Hardjono untuk

mempermainkan kartu baru. Munas yang format awalnya hanya melibatkan 27 DPD PDI. Masing-masing DPD memberi mandat pada satu orang ketua dan satu sekretaris sesuai arahan Mendagri, kenyataan berubah total. Undangan yang dibuat DPP PDI *caretake*r isinya pemberitahuan bahwa utusan Munas itu dua orang utusan per daerah. Satu untuk pengurus daerah dan satu lagi untuk tokoh potensial. Dengan undangan ini sudah ditebak arahnya, bahwa kelompok DPP PDI *caretaker* yang dimotori Latief Pudjosakti, Ismunandar dan Budi Hardjono hendak memainkan "kelompok 17" yang disebut sebagai tokoh potensial. Dengan cara seperti, kalaupun dalam Munas diadakan pemungutan suara, kelompok DPP PDI *caretaker* yang memenangkan. Bahkan, mereka mengundang utusan kongres sampai 125 peserta. Urusan membengkakan jumlah peserta Munas ditentang oleh 20 DPD PDI. Keadaan ini yang menjadi perdebatan dengan kubu Megawati, sehingga tawar-menawar pun dilakukan. Konstelasi menjelang Munas yang demikian, bisa jadi menjadi ricuh lagi.

Munas pun terselenggara pada 22 Desember 1993 di Hotel Garden, Kemang Jakarta Selatan. Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI, tepat pada pukul 20.40 WIB. Proses pemilihan yang hanya berlangsung lima menit di ikuti 52 fungsionaris dari 27 DPD PDI seluruh Indonesia menjadi babak akhir dari drama PDI setelah Kongres Medan yang gagal. Tetapi dibalik terpilihnya Megawati adanya peranan yang menonjol dari para petinggi ABRI, terutama Brigjen TNI Agum Gumelar, Direktur A Bais yang merangkap

sebagai Danjen Kopassus dan Mayjen TNI Hendropriyono, Pangdam Jaya. Mengenai peranan kedua petinggi ABRI ini, Yusuf Wanandi menjelaskan,

> Dalam ABRI waktu itu memang muncul dua kelompok. Satu yang bersimpati kepada Megawati, yang lainnya tidak ingin melihat putri Sukarno itu memimpin PDI. Termasuk yang bersimpati kepada Megawati adalah Brigjen TNI Agum Gumelar dan Mayjen TNI Abdulah Mahmud Hendropriyono, Benny Moerdani menyarankan kepada Agum dan Hendro agar melindungi Megawati. "Kita tidak boleh membiarkannya tersingkir. Saya tahu orang tua itu ingin terbebas dari Mega. Tapi itu tidak *fair* ", begitu konon kata Benny kepada dua jenderal yuniornya tersebut. (dalam Said:2016:136-137)

Begitu pula, menurut Jenderal Marinir Nono Sampono, (Said: 2016:137) pada waktu itu Benny amat mendukung Mega menjadi ketua PDI. "Kalau tidak sekarang, nanti dia terlalu tua untuk jadi presiden," kata Benny. Melalui perwira yuniornya ini Benny membantu memuluskan Megawati dalam Munas PDI. Sedang pengakuan Mayjen AM Hendropriyono (dalam Said:2016:136), sebagai Pangdam Jaya,

> Saat Munas (Musyawarah Nasional PDI, saya tidak pernah menerima perintah atau pesan apa pun langsung dari Jenderal Benny untuk menyukseskan Megawati, kecuali mungkin secara tidak langsung jika melalui orang-orangnya. Di Pos saya di Kodam Jaya, orang-orang tesebut adalah Letjen Ary Sudewo (Waka Bais ABRI) dan Letjen Haryoto P.S. (Kasospol ABRI). Namun anehnya, mereka berdua juga terlihat bingung ketika saya berpendirian keras, bahwa Munas PDI di daerah tanggung jawab saya harus berlangsung secara demokratis. Kedua senior saya itu setuju dengan kesimpulan saya bahwa kalau berlangsung demokratis, Megawati akan menang. Menurut saya mereka berdua adalah simpatisan Megawati. Tapi, saya tidak mendengar dari keduanya ada bisikan dari Benny Moerdani. Saya sendiri memang bersimpati kepada Megawati karena Bung Karno idola saya. Ketika jumpa pak Harto di Pangkalan Halim Perdanakusuma, saya katakan Munas PDI saya jamin aman jika pemilihan saya kawal sesuai aspirasi *floor* dan hampir pasti Megawati akan terpilih kembali sebagai Ketua Umum. Pak Harto tersenyum lalu berkata, "PDI itu

> partai kecil sehinga siapa pun yang menjadi Ketua Umum tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap stabilitas nasional".

Kendati, tanggapan Pak Harto menyiratkan akan kesetujuan Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kenyataannya Mayjen AM Hendropriyno "dibuang" ke Bandung sebagai Komandan Komando Pendidikan Dan Latihan (Kodiklat). Sedang Brigjen Agum Gumelar dialih tugaskan ke Medan sebagai Kepala Staf Kodam II/Bukit Barisan.

Penuturan Alex Widya Siregar,[23] pada saat itu menjadi Satgas Pengamanan Munas, oleh Yogie S. Memed, peserta ditempatkan di Hotel Indonesia oleh Brigjen Agum Gumelar, sambil menodongkan pistol ke arah peserta dan digiring untuk dipindahkan di Hotel Presiden, dan mengatakan pada peserta Munas, "Tangan saya ini sudah lama tidak *gebukin* orang, siapa yang tidak memilih Megawati akan berhadapan dengan saya". "Peserta Munas yang merupakan faksi-faksi dan kelompok potensial serta petugas pengamanan dari unsur inteljen disuruh keluar, bahkan Achdari sebagai Waka BAIS pun ikut keluar, dan digantikan pasukannya Agum", jelas Alex Widya Siregar. Sehingga Munas hanya diikuti dua pengurus partai daerah yang resmi. DPP PDI *Careteker* hanya diberi tugas untuk membuka rapat. Menurutnya, sebagai Direktur A BIA, Agum Gumelar memang harus bertanggung jawab dengan persoalan keamanan politik dalam negeri, maka dia tak ingin masalah PDI berlarut-larut karena akan menggangu pekerjaannya. Lagi pula saat itu ada semacam persaingan antara Departemen Dalam Negri dan BIA. "Maklumlah

[23] Wawancara AWS, 4 Desember 2016

semua orang berlomba mendekati Soeharto, dan akhirnya Megawati terpilih", katanya.

Kendati, Munas sudah di bawah pengendalian Brigjen Agum Gumelar. Latif Pudjosakti masih hendak memainkan strateginya. Munas yang dibuka pukul 14.15 oleh Sekjen Departemen Dalam Negeri Suryatna Subrata mewakili Menteri Dalam Negeri. Setelah usai memberikan sambutan Sekjen Depdagri itu keluar. Oleh Latief Pudjosakti sebagai pimpinan sidang lalu menskors pertemuan, dengan alasan ruang pertemuan akan dibersihkan. Kenyataannya Latief ingin memanfaatkan waktu untuk berkordinasi dengan kelompoknya menyiapkan manuver-manuver baru. Tetapi di tempat itu ada posko aparat yang dikomandani oleh Kol. Zacky Anwar Makarim, Asisten Intel Kodam Jaya, mengingatkan Latief sebagai ketua sidang. Akhirnya, masuk ke ruangan dan melanjutkan sidang.

Dalam sidang telah terjadi serah terima pimpinan sidang. Serah terima pimpinan sidang menandai berakhirnya tugas DPP caretaker pimpinan Latief Pudjosakti.(Tempo,1/1/1994) Oleh peserta Munas kesempatan ini di gunakan untuk menetapkan ketua sidang, yaitu Alex Asmasoebrata Ketua DPD PDI DKI Jakarta yang pada KLB Surabaya berbalik arah mendukung Megawati. Sidang kemudian diskors lagi. Suasana nampak tegang yang kemudian terjadi loby-loby politik, dan akhirnya sidang di buka lagi pukul 20.00 untuk mengesahkan hasil sidang komisi waktu KLB di Surabaya. Pukul 20.40, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998 sekaligus sebagai

ketua formatur. Pembentukan sembilan formatur berjalan alot. Kabarnya, berkat loby-loby yang dimediasi oleh para perwira ABRI, dan Megawati cukup akomodatif dalam melakukan kompromi-kompromi dalam pembentukan pengurus DPP PDI. (Tempo,1/1/1994)

Menurut Harsoko Sudiro, Kol. Zacky Makarim punya peran sentral dalam pembentukan pengurus itu.[24] Dalam pengumuman pengurus DPP PDI, Megawati menunjuk Alex Litay sebagai Sekjen, dan bendahara Laksmana Sukardi. Sedang pengurus lainnya, terdapat nama Ismunandar, Soetarjo Soeryoguritno (keduanya tokoh caretaker), Gary Mbatemoy (kelompok potensial), Kwik Kian Gie, dam Mangara Siahaan, baik sekjen dan bendahara masing-masing didampingi enam wakil.

2.8. PDI Pasca Munas

Langkah yang diambil Megawati menjadi hal yang tak biasa dalam pakem politik Orde Baru yang menggariskan kepatuhan bagi ordinat-ordinatnya. Boleh jadi, Megawati adalah simbol perlawanan terhadap kekuasaan hegemonik. Bagi pemerintah Orde Baru, macetnya KLB PDI merupakan ketidakmampuannya dalam mengakomadasi berbagai perkembangan dan tuntutan arus bawah.

Megawati dalam pidato politik dengan menyerukan kepada birokrasi dan ABRI untuk berdisiplin serta menjadi tauladan dalam kehidupan berkonstitusi jujur dan adil sebagaimana sumpah jabatan. Khusus kepada aparatur pusat dan

[24] Wawancara dengan Harsoko Sudiro 23 Februari 2016

daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan politik dalam negeri, PDI menuntut mereka untuk konsisten dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD'45.(Kompas,11/1/ 1996)

Pidato yang disampaikan pada HUT PDI Ke-23 di Ambon, bukan tanpa maksud. Pidato itu jelas "ditembakan" pada aparat pemerintah dan ABRI. Ini tak lain karena kekesalannya hampir satu setengah tahun permasalahan DPD PDI Jatim tak kunjung selesai. Bermula dari pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah (Konferda) yang berlangsung pertengahan 1994, masih menyisakan "bom" waktu" yang setiap saat bisa meledak dan bisa menghancurkan PDI sendiri. Dalam pemungutan suara untuk memilih ketua DPD, Sutjipto memperoleh 180 suara, sedang Latief Pudjosakti 153 suara. Tapi, karena ada kelebihan empat suara pemilihan, pemilihan suara itu dibatalkan. Pemilihan dilanjutkan melalui sistem formatur (dengan delapan anggota yang diketuai Ketua Umum PDI Megawati). Dalam rapat formatur, lima orang anggota mendukung Latief, sedangkan sisanya mendukung Sutjipto. Karena tidak mencapai mufakat, akhirnya rapat itu dinyatakan *deadlock* oleh ketua formatur. Tapi, saat Megawati mengumumkan hal itu kepada wartawan, ternyata lima orang anggota formatur pendukung Latief Pudjosakti mengambil "jalan pintas". Mereka sepihak menunjuk Latief sebagai ketua DPD berikut susunan pengurusnya, dan langsung melaporkan hasilnya kepada Kaditsospol Jatim.(Forum Keadilan, 11/3/1996)

Langkah tersebut jelas bertentangan dengan keputusan formatur, yang telah menetapkan masalah tersebut untuk dibawa ke tingkat pusat. Masalah menjadi berkepanjangan, DPP PDI yang diharapkan bisa memutuskan persoalan tersebut secara bijaksana, ternyata mengambil keputusan yang dinilai memihak pada salah satu kadidat. Melalui SK DPP PDI No.034/DPP/KPTS/VII/1994, Sutjipto ditetapkan sebagai ketua DPD PDI Jatim. Keputusan yang terkenal dengan SK 034 itu ditentang kubu pendukung Latief Pudjosakti, yang mengklaim didukung "32 DPC" dari 37 DPC yang ada di Jatim. Latief merasa dirinya sah menjadi Ketua DPD Jatim karena banyak didukung oleh banyak cabang. Keadaan ini juga menjadi alasan Basofi Sudirman, untuk tidak mengakui Sutjipto. "Ya bagaimana, kalau saya mengakui Tjipto, saya bisa digebukin cabang-cabang" tegas Gubernur Jawa Timur itu. (Forum Keadilan,12/2/1996)

Keadaan ini menjadikan pertentangan meluas, Megawati tetap bersikukuh bahwa SK No. 034 tetap sah sebagai sumber legitimasi Sujipto sebagai Ketua DPD PDI Jatim. Sedangkan Basofi Sudirman tidak mengakui kepemimpinan Sutjipto dan menganggap SK No. O34 sebagai biang keladi masalah PDI di Jawa Timur karena diputuskan secara sepihak oleh DPP PDI tanpa mekanisme musyawarah. (Forum Keadilan,12/2/1996) Masalah tidak diizinkanya pelantikan pengurus DPD PDI Jatim oleh DPP. Basofi Sudirman melihat karena adanya dualisme kepengurusan DPD PDI, antara kubu Sutjipto dengan kubu Latief Pudjosakti . "Kalau sekarang saya izinkan dilantik,

sementara secara intern persoalanya belum selesai, yang salah kan saya", katanya. (Forum Keadilan,12/2/1996)

Di mata pemerintah, pembentukan DPD PDI Jatim berdasarkan SK NO.034/1994 yang menunjuk Sutjipto merupakan hasil manipulasi DPP PDI atas keputusan Konferda DPD PDI Jatim di Malang setelah mereka gagal mengarahkan konferda untuk memilih Sutjipto. Hal ini berdasarkan fakta bahwa ada lima formatur yang memilih Latief dari tujuh formatur, dan memang hanya nama Latief yang muncul dalam Konferda itu. Tetapi Megawati bersama dua formatur pendukungan menginginkan orang lain, yaitu Sutjipto melalui SK No.034/1996. Menurut Afan Gaffar, "Ketua Umum PDI Megawati telah melibatkan diri terlalu berlebihan dalam Konferda". (Kompas,9/2/1996)

Sedangkan, pendapat lain yang dikemukakan Subagyo dari DPR Fraksi PDI, "Konferda memutuskan dibentuk formatur yang terdiri dari Ketua Umum DPP PDI didampingi tujuh koordinator wilayah. Kordinator sifatnya hanya pendamping saja, bukan menentukan segala-galanya". "Ketua Umum tidak bisa menerima keinginan formatur untuk menetapkan hal yang menyimpang dari aspirasi konferda, " tegasnya.

Terlepas dari pro dan kontra hasil Konferda DPD PDI Jatim, dari rekam jejak Latief yang dikenal dekat dengan pemerintah menjadi kekhawatiran Megawati bahwa Latief bisa dijadikan "kuda troya" oleh pemerintah untuk merongrong kepemimpinannya. Semenjak Megawati terpilih sebagi Ketua

Umum PDI hasil Munas 1993, goncangan yang merongrong kepemimpinananya tidak pernah berhenti. Setelah terbentuk kepengurusan DPP bukan berarti masalah selesai. Kelompok Yusuf Merukh yang tidak puas terhadap susunan DPP PDI, mulai melakukan "gerilya politik", mereka melakukan "*reshuffle"* secara sepihak dengan menamakan "DPP *Reshuffle*" dan mengangkat Yusuf Merukh sendiri sebagai ketua umum PDI. Pemerintah memang tidak mengakui DPP PDI *reshuffle* hasil bentukan Yusuf Merukh ini, tetapi berbagai kegiatan yang dilakukanyan juga tidak dilarang. Itu artinya, pihak pemerintah sengaja memberi angin, bahkan sekjen DPP PDI Alex Litaay sempat diculik oleh segerombolan orang yang tidak jelas identitasnya, dan memaksa untuk bergabung dengan DPP PDI *reshuffle*. Tetapi Alex tiba-tiba mucul dan tetap mendukung kepemimpinan Megawati. Gerakan politik Yusuf Merukh tidak berhenti hanya disitu. Ia juga menyebarkan isu ada sekitar 300 kader PDI yang tidak bersih lingkungan atau terindikasi PKI, diantara nama-nama yang disebut terdapat nama Taufik Kiemas, suami Megawati. (Forum Keadilan, 12/2/1996)

Manuver yang dilakukan Yusuf Merukh muaranya adalah penyelenggaraan KLB untuk menggulingkan Megawati lewat kongres. Untuk itu ia melakukan konsolidasi ke daerah dengan membentuk kepengurusan PDI tandingan. Upaya yang dilakukannya ternyata tidak banyak sambutan dan kalah populer dengan Megawati. Tapi seiring dengan waktu, gerakan politik Yusuf Merukh menghilang. Boleh jadi, Yusuf Merukh tidak sanggup lagi

melakukan itu karena kekuatan Megawati lebih besar. Atau, “sponsor” yang selama ini dibelakang Yusuf Merukh mempunyai strategi lain.

Penyelenggaraan pemilu 1997 kurang lebih tinggal satu tahun lagi, membiarkan Megawati melaju di jalan tol akan mengancam kewibawaan pemerintah yang memang gemar dengan budaya “kebulatan tekad”. Apalagi, di DPR sendiri, khususnya di fraksi PDI beredar formulir yang berjudul “Surat Pernyataan Pendapat dan Keinginan”. Isinya berupa tiga keinginan atau pendapat dari anggota atau simpatisan PDI. Pertama, agar DPP PDI mencalonkan Megawati menjadi presiden RI dalam Sidang Umum MPR 1998. Kedua, supaya PDI memperjuangkan sungguh-sungguh agar presiden dan wakil dipilih dengan suara terbanyak. Ketiga. agar calon presiden dan wakil presiden berkampanye menawarkan program pada waktu pemilu. (Forum Keadilan,12/2/1996)

Formulir yang diinisiasi oleh Aberson Marle Sihalaho, boleh jadi dianggap sebagai “candaan politik” menjelang pemilu. Tetapi bagi pemerintah, hal itu bukanlah “main-main”. Aberson M. Sihaloho anggota DPR dari Fraksi PDI dikenal dekat dengan Megawati, apalagi pada waktu KLB dan Munas adalah pendukung setia Megawati. Namun demikian, Megawati masih enggan mengkomentari pencalonan itu.(Forum Keadilan,12/2/1996)

Sedangkan, Mendagri Yogie S. Memed mengomentari langkah Aberson M. Sihalaho sebagai cara yang kurang baik bagi perkembangan demokrasi. “Pencalonan itu belum waktunya karena ada tahapan tersendiri”, tegasnya.

Bagi sebagian pengamat politik, seperti Cornelis Lay, menyatakan pencalonan itu merupakan langkah yang sia-sia untuk menantang Soeharto dan hanya menghabiskan energi. Sikap seperti itu juteru mengundang pemerintah untuk menghadang langkah Megawati, yang memang selama ini selalu dihadang. (Forum Keadilan,12/2/1996)

Bentuk penghadangan terhadap Megawati terlihat dalam permasalahan DPD PDI Jatim. Konflik yang berlangsung bukan lagi antara kubu Sutjipto dengan kubu Latief Pudjosakti, melainkan konflik antara Megawati dengan Basofi Sudirman sebagai penguasa daerah Jatim. Konflik yang berkepanjangan ini berimbas juga pada persiapan pembentukan dua kepanitiaan dalam Pemilu 1997, yaitu Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) dan Panitia Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Tingkat I (Panswaslak I). Dualisme kepengurusan DPD PDI Jatim sulit untuk menempatkan wakilnya dikepanitaan pemilu. Kendati, kubu Sutjipto sudah mengirimkan wakilnya sejak 29 November 1995, yaitu Marsudi Fandinegara untuk PPD I dan A Suwignyo, Noor Hoesein dan Herman Tampubolon untuk Panwaslak, tetapi tidak ditanggapi oleh Gubernur Jatim. Berbeda perlakukan dengan kubu Latif Pudjosakti, untuk mengisi nama-nama wakil di PPD I Jatim pemerintah telah mengirim formulir. Menanggapi hal tersebut, Basofi Sudirman, menegaskan, “Tjipto itu siapa *sih*”? Berlarut-larutnya konflik tersebut, akhirnya Mendagri menegaskan kemungkinan kosongnya unsur PDI Jatim dalam PPD I. “Jika batas waktu tanggal 22 Januari 1996 ini tidak selesai persoalan PDI Jatim, ya

mungkin akan dikosongkan", kata Mendagri. (Kompas,20/1/1996) Yang dikatakan Mendagri tersebut memang terjadi, pada hari Senin 22 Januari 1996, Gubernur Basofi Sudirman melantik Panitia Pemilihan Daerah I Jatim (PPD I) dan Panitia Pengawasan Pelaksanaan Pemilu I Jatim (Panwaslak), tanpa Kehadiran wakil dari PDI Jatim. Kendati Latief Pudjosakti hadir dalam acara pelantikan itu, tetapi kehadiranya bukan sebagai wakil PDI, melainkan sebagi Wakil DPRD I Jatim.

Bagi Megawati, persoalan DPD Jatim sebenarnya sudah selesai sejak lama, tergantung dari sikap pemerintah untuk bersikap arif dan bijaksana agar persoalan PDI Jatim itu tuntas dengan baik. "Kalau betul pemerintah tidak campur tangan terhadap masalah PDI Jatim, mestinya PDI dibiarkan untuk konsolidasi menghadapi pemilu", jelasnya. (Tempo,1/1/1994) Persoalan PDI Jatim seolah menjadi representasi konflik antara Megawati dengan pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jatim, Basofi Sudirman. Kondisi ini menjadi "bom waktu" yang bisa meledak setiap waktu. Bisa jadi juga menjadi alat "legitimasi" bagi pemerintah untuk menertibkan bagian "institusinya" yang tidak patuh.

Reaksi atas pelantikan tersebut, DPP PDI menilai kosongnya unsur PDI dalam Panitia Pemilihan Daerah I (PPD) Jatim menyebabkan badan atau institusi tersebut tidak absah untuk melaksanakan fungsinya, karena tidak terpenuhinya semua unsur seperti diharuskan peraturan perundangan. (Kompas,24/1/1996) Dalam Peraturan Pemerintah No.35 tahu 1985 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah terjadi perubahan, dan terakhir dengan PP No. 10 Tahun 1995 yang menyebutkan , “Anggota PPD I terdiri unsur pemerintah, Golkar, PDI, Partai Persatuan Pembangunan dan ABRI sebanyak-banyaknya 10 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I”. Merunut peraturan pemerintah tersebut, terpenuhinya semua unsur sebagai kesatuan adalah syarat mutlak sahnya pemilu. Tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka pemerintah akan dianggap cacat dalam melaksanakan pemilu.

Pernyataan keprihatinan juga datang dari kalangan wakil rakyat (DPR), bahwa kosongnya Panitia Pemilihan Darah (PPD) I Jatim dari unsur PDI sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. (Kompas, 24/1/1996) Ada beragam pendapat yang muncul berkaitan dengan persoalan dalam tersebut, seperti pernyataan dari F ABRI Theo Syafei, “Ini sangat memprihatinkan, *Masak* masalah seperti itu saja saja pemerintah tidak dapat menyelesaikan, sebagai pembina politik secara moral pemerintah harus mengintruksikan pada Pemda Jatim untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlalur-larut ini”. (Kompas, 24/1/1996)

Akhir dari babak pertarungan seiring dengan waktu mengalir begitu saja tanpa jelas kemana muara yang dituju. Masing-masing pihak tetap bertahan pada pendirian sendiri. Mendagri Yogie S Memed, ketika di tanya tentang

kelanjutan kekosongan wakil pemilu di Jatim, bahwa PDI sudah diberitahu dan segera akan dibentuk.(Kompas, 8/1/1996)

BAB III
INTEGRASI POLITIK MODEL REZIM ORDE BARU

3.1. Integrasi Rezim Orde Baru [1]

Fokus pada bab ini adalah bentuk integrasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Asumsi awal penelitian ini bahwa konflik internal PDI merupakan bentuk integrasi yang dilakukan rezim Orde Baru untuk mempertahankan *status quo.* Berangkat dari perspektif teoritis Habermas tentang tindakan komunikasi yang membagi level masyarakat menjadi level sistem dan dunia kehidupan. Integrasi merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan dalam level sistem.

Habermas (16:2004) menjelaskan, integrasi sistem adalah integrasi subsistem-subsistem melalui sarana pengendalian. Integrasi dilakukan melalui seperangkat norma yang merupakan dari kesepakatan bersama. Tetapi, masyarakat adalah tempat bertemunya berbagai kepentingan, maka dalam kasus tertentu norma atau tatanan sosial tidak bisa ditata melalui integrasi. Alternatif yang tersedia adalah penerapan secara koersif (memaksa) yang tujuannya adalah tidak lain untuk menyembunyikan konflik. Sebuah konsensus atau kesepakatan bersama bisa dicapai apabila konflik itu ditekan sedemikian rupa atau dibuat tidak terlihat. Dalam konteks integrasi sosial dicapai dengan cara tersebut, maka konsensus nilai bersifat ideologis.

---

[1] Pemaparan mengenai integrasi politik yang dilakukan rezim Orde Baru berdasarkan hasil wawancara dengan Alex Widya Siregar bersama dengan Brigjen (Purn) TNI Samsiar di Kantor Pepabri Jl. Aceh, Bandung, Jawa Barat, pukul 09.00 -13.00 WIB, tanggal 14 Desember 2016. Kemudian ditambah dengan dokumen pendukung, seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Berita Surat Kabar, Majalah, dan dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

Berdasarkan pengadaian teoritik Habermas, menjadi dasar untuk melihat bentuk integrasi yang dilakukan rezim Orde Baru dalam melakukan integrasi sistem. Di asumsikan, konflik internal PDI bukanlah konflik yang berlangsung antara sesama aktivis maupun pengurus PDI, melainkan adanya keterlibatan penguasa dalam melakukan integrasi sistem. Perbedaan kepentingan para aktor dan dominanya kepentingan rezim akan *status quo* terhadap kekuasaan menghadapkan pada "justifikasi ideologis" untuk menyembunyikan kepentingannya, sehingga arena konflik yang berlangsung bukan sekedar arena pertarungan antar aktor Partai Demokrasi Indonesia (PDI), melainkan juga alat dominasi elite pemerintah untuk mengintegrasikan kekuasaan agar tetap *legitimate*.

Dalam integrasi sistem yang dilakukan rezim Orde Baru, kadangkala dilakukan "diluar otoritas legal formal" yang dilakukan oleh agen-agen negara. Artinya, rezim Orde Baru menempuh cara di luar ketentuan normative untuk melakukan integrasi sistem. Fokus kajian pada bab ini adalah mengungkap bagaimana konflik internal PDI merupakan integrasi sistem dilakukan di luar otoritas legal. Oleh karena dalam mengungkap hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Alex Widya Siregar bersama dengan Brigjen (Purn) TNI Samsiar di Kantor Pepabri Jl. Aceh, Bandung, Jawa Barat, pukul 09.00 -13.00 WIB, tanggal 14 Desember 2016. Hasil wawancara kemudian dikonfirmasi dengan dokumen terkait, seperti Surat Kabar, kemudian ditambah dengan

dokumen pendukung, seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Majalah dan dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian dalam bab ini adalah merupakan rangkaian narasi bentuk integrasi politik yang dilakukan “di luar legal formal” oleh rezim Orde Baru dalam konflik internal PDI. Adapun rangkaian narasi terbagi dalam berbagai sub tema, mulai dari persiapaan penyelenggaraan kongres IV di Medan 1996, konsolidasi DPC dan DPD PDI, penentuan Ketua PDI, pertemuan politik Pasca Kongres IV PDI Medan, rencana pengambilalihan kantor DPP PDI, garis komando penyerangan dan pengerahan massa, kisah penyerang dari Kampung Kapuk, pendanaan pengambilalihan Kantor DPP PDI, akhir drama politik rezim Orde Baru. Masing-masing sub tema merupakan rangkaian kronologis dari upaya rezim Orde baru dalam melakukan integrasi politik dalam konflik internal PDI.

3.2. Persiapaan Penyelenggaraan Kongres IV Di Medan 1996.

Konflik internal PDI pertama kali mencuat pada masa kepemimpinan Megawati Sukarnoputri, ketika rombongan yang dipimpin oleh ketua DPD PDI Jawa Tengah Sumaryo pada tanggal 3 Juni 1996 menemui Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri (Dedapgri) Sutoyo NK dengan membawa berkas usulan dari berbagai DPD maupun DPC PDI untuk segera melaksanakan kongres PDI. Peristiwa tersebut, memang cukup mengagetkan Megawati. Upaya untuk mencegah rencana kongres kenyataan tidak terbendung lagi. Akhirnya, PDI pecah dalam dua kubu yang berseberangan, yaitu antara kubu

Megawati Sukarnoputri dengan kubu Pro Kongres yang menamakan "kelompok 16" yang dipimpin oleh Fatimah Achmad. Disebut "kelompok 16" karena merupakan kumpulan dari 16 fungsionaris Ketua DPP PDI.

Alasan segera dilaksanakan kongres karena di dalam AD/ART PDI dinyatakan bahwa Hasil Munas harus dipertanggungjawabkan di dalam kongres yang harus dilaksanakan 6 bulan dan selambat-lambatnya satu tahun setelah Munas, dan hal itu tidak dilaksanakan oleh Megawati selaku Ketua Umum hasil Munas 1993 di Jakarta. Demikian pula dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) yang merupakan amanat hasil Munas juga tidak pernah dibentuk.

Sementara itu, di tingkat DPD dan DPC se Indonesia timbul masalah yang tidak terselesaikan, seperti di Jawa Timur, terdapat dua kepengurusan pimpinan daerah, yaitu DPD pimpinan Sutjipto dengan DPD pimpinan Latief Pudjosakti. Pada saat pembentukan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I dan Panswaslak I, hanya DPD PDI Jawa Timur yang belum mengirimkan wakilnya di lembaga pemilihan umum tersebut. Padahal, penyelenggaraan pemilu tinggal beberapa bulan lagi. Demikian pula ditingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), telah terbentuk kelompok-kelompok yang berpihak pada Megawati dan kelompok yang berseberangan, dan kelompok yang berseberangan menganggap Megawati "otoriter". [2]

[2] Wawancara dengan AWS tanggal 24 Januari 2017

Apa yang terjadi di permukaan seperti yang dilakukan Ketua DPD Jawa Tengah tersebut merupakan hasil dari kerja politik yang jauh hari sebelumnya telah dilakukan. Dalam penuturannya, Alex Widya Siregar (AWS) menjelaskan permasalahan-permasalahan PDI di bawah pimpinan Megawati menimbulkan keresahan para pejabat tinggi Orde Baru. Ada upaya untuk mengadakan Kongres Luar Biasa pada Desember 1995, yang merupakan prakarsa Kassospol ABRI Letjen Ma'ruf dan berhasil membentuk panitia kongres yang ketua panitia dijabat oleh Ny. Clara Sitompul dan Sekjen Harsoko Sudiro, sampai pada bulan Mei 1996, panitia yang dibentuk tidak dapat menjalankan fungsinya karena susunan panitia bukan dari fungsionaris DPP PDI.

Akibatnya, Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung melihat bahwa persoalan PDI yang juga merupakan tanggung jawab politiknya seolah dikejar waktu untuk menyelesaikan. Apalagi pemilu yang digelar pada tahun 1997 sudah dekat. Padahal, sudah tiga (3) kali pergantian Kassospol Sospol yang ia khusus perintahkan untuk memberesi PDI, kenyataannya mengalami kegagalan. Atas saran dari kalangan terdekat, akhirnya Jenderal Faisal Tanjung memerintahkan staf khususnya, Zulkarnaen menghubungi AWS yang saat itu berada di Batam mengurusi usahanya.[3]

AWS sendiri dalam pengakuannya mengatakan, awalnya ia tidak tahu mengapa Jenderal Faisal Tanjung menghubunginya karena memang tidak

[3] Wawancara dengan AWS tanggal 14 Desember 2016

kenal sebelumnya. Belakangan ia mengetahui yang mereferensi dirinya adalah dr. Panagian Siregar yang merupakan kenalan baik. Awal Mei 1996, dikontak oleh Kolonel TNI Zulkifli, staf Jenderal Faisal Tanjung untuk datang menghadap di Jakarta.

Dalam percakapan telpon, Kolonel Zulkifli menyatakan, "diminta Faisal Tanjung itu datang menghadap" ? AWS balik bertanya, "saya tidak tahu, siapa itu Faisal Tanjung ? "Masak tidak tahu, Faisal Tanjung, "Pangab", jawab Zulkifli. Kemudian AWS balik bertanya, "kapan"? "Segera ! atau kita jemput", sahut Zulkifli. "Ok, saya datang" jawab AWS. [4]

Akhirnya, AWS datang ke Jakarta, dan bertemu Jenderal Faisal Tanjung. Dalam percakapannya, Pangab Jenderal Faisal Tanjung menanyakan pada AWS, "Saya dengar Pak Alex ini ahli PDI"? "Ya, tidaklah, tetapi kalau ada yang perlu tentang PDI, saya bisa bantu" jawab AWS. Kemudian Jenderal Faisal Tanjung menjelaskan bahwa, "ini sudah 3 Kepala Sospol diberhentikan Pak Harto, masalah PDI tidak pernah selesai". Dijawab AWS, "kenapa harus saya yang menyelesaikan" ? Langsung ditanggapi tegas oleh Jenderal Faisal Tanjung, "Mau tidak ! Jangan tanya kenapa-kenapa? Mau tidak , ini masalah sangat mendesak"! AWS balik bertanya. "Apa yang dikejar". Lantas Jenderal Faisal Tanjung menjelaskan, "Pemilu ! Kalau masalah PDI tidak selesai Pemilu tidak jadi. Hal ini menjadi reputasi jelek bagi pemerintah". Hal ini berkaitan dengan masalah wakil PPD I dan Panswaslak I Jawa Timur yang

[4] Zulkifli tahu AWS melalui Sadran Marbun, karena AWS pernah bicara dengan Sadran Marbun tentang PDI. AWS tahu hal tersebut dari Achdari (Waka BIA)

masih kosong akibat ada dua kepemimpinan DPD PDI Jawa Timur antara kubu Sutjipto dengan kubu Latief Pudjosakti.

Tidak beberapa lama kemudian AWS menjawab, “Baik, saya akan kerjakan”. Kemudian Jenderal Faisal Tanjung menawarkan, “lantas wewenang apa yang diperlukan” ? Dijawab AWS, “Yang penting Sospol mendukung (Kadit Sospol seluruh Indonesia yang pada waktu Konggres Medan mereka hadir. Permintaan AWS ditanggapi Jenderal Faisal Tanjung, “Ok, saya bisa perintahkan semua. Tetapi struktur di ABRI tidak bisa kita rubah”. Akhirnya AWS menyetujui, “tidak apa-apa yang terpenting bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, kalau misalnya siapa yang hadirkan ini, Sospol harus siap untuk hadirkan . Misalnya, di suatu tempat cabang Megawati kuat, Suryadi kuat, maka perlu orang ketiga untuk menyelesaikan. (Unsur Sospol dan Kodim)”

3.3. Konsolidasi DPC Dan DPD PDI

Kemudian, selesai bertemu dengan Pangab Faisal Tanjung, AWS menyusun sebuah makalah yang berisikan tentang “Penyelesaian Kemelut PDI”. Dalam makalah itu AWS menyarankan, *pertama,* penyelesaian kemelut PDI apakah melalui Munas atau kongres harus melalui AD/ART PDI. *Kedua*, penyelesian harus mengikutkan Soeryadi. *Ketiga*, Ketua Umum harus mereka yang berada di dalam susunan komposisi hasil Munas Jakarta 1993 atau mereka yang terpilih di dalam kongres IV di Medan tahun 1996. *Keempat*,

untuk melaksanakannya pemerintah harus mengadakan pendekatan pada tokoh senior PDI di luar pendukung Megawati.

Makalah tersebut, juga dibawa ke Markas BIA. Ketika bertemu dengan Ka BIA Mayjen Syamsir Siregar langsung merespon, karena setelah itu AWS diberi tugas untuk mengatur pertemuan dengan tokoh-tokoh PDI yang tidak mendukung Megawati untuk dipertemukan dengan Kassospol ABRI, Kepala BIA, Assospol Kassopol ABRI. Sementara itu di kantor BIA dibentuk Team untuk penggarapan DPC-DPD PDI seluruh Indonesia agar mengusulkan diadakan Kongres. Begitu juga dengan Kassospol ABRI Mayjen Syarwan Hamid setelah mempelajari makalah tersebut, ia menyetujui dengan memberi tambahan saran bahwa kongres dilaksanakan setelah 40 hari, dihitung dari AWS menyampaikan makalah tersebut. Batas waktu itu yang diberikan memang relevan dengan penyusunan Daftar Calon Sementara anggota DPR /MPR, yaitu tanggal 19 Juli 1996.

Pada tanggal 24 Mei 1996, team yang dibentuk BIA sudah mulai bekerja untuk menginventarisir DPC-DPC seluruh Indonesia. Dengan melakukan pemetaan terhadap kondisi DPC-DPC, untuk warna merah DPC yang sepenuhnya mendukung Megawati, untuk warna abu-abu DPC yang mendukung Drs. Soeryadi. Sedangkan untuk warna putih DPC yang ragu-ragu dan harus didorong dari dalam untuk menentukan sikap. Pelaksanaan inventarisasi ini dilaksanakan oleh aparat territorial se Indonesia dan atas perintah BIA dan Sospol ABRI. Untuk mendukung tugas tersebut AWS

sendiri, oleh Ka BIA mendapatkan ruangan di kantor BIA sebagai Markas Komando sementara. Di kantor BIA inilah AWS mulai bekerja dan dibantu oleh Paban I BIA, Kolonel Syamsiar. Dalam menghadapi perkerjaannya, AWS yakin bahwa persoalan PDI bisa diselesaikan dengan cepat. "Saya *over confidence*, saya bisa selesaikan pekerjaan itu sebulan, malah justeru kurang dari sebulan, tepatnya 16 hari untuk menggalang kekuatan melakukan persiapan Konggres. Harapannya, saya bisa kuasai PDI". katanya. Kolonel Syamsiar sendiri mengakui bahwa ia harus berhari-hari menginap di kantor BIA, melakukan kontak cabang PDI daerah maupun kantor Ditsospol maupun Kodim. "Kita memang kerja marathon, tapi hasilnya memuaskan karena kongres IV PDI bisa diselenggarakan pada Juni 1996 di Medan," katanya.[5]

Langkah awal yang dilakukan AWS adalah dengan mengkontak ketua DPD Jatim dan wakil DPRD Latief Pudjosakti. Dalam percakapaanya via telpon, AWS bertanya, "Pak Latief bisa saya ngomong? Kapan bisa datang ke Jakarta"? Oleh Latief Pudjosaktie dijawab, "kapan ? Oleh AWS dijawab balik, "ya, kapan saja, tetapi segera"! Latief Pudjosakti menyanggupinya datang ke Jakarta. "Ntar Sore", saya terbang ke Jakarta, tetapi carikan Hotel, saya yang bayar, kata Latief Pudjosakti.

Dalam pertemuannya, Latief Pudjosakti sepakat mendukung upaya pemerintah (Orba) dalam menyelesaikan kemelut yang melanda PDI. Dengan demikian, urusan Jawa Timur selesai. Kemudian AWS melanjutkan ke Jawa Tengah. Soemaryo yang waktu itu Ketua DPD PDI Jateng menyatakan dan

[5] Wawancara dengan Brigjen (Purn) Samsiar, 14 Desember 2016

mendukung langkah untuk Kongres. Berbeda dengan di Jawa Barat, karena AWS tidak tahu peta politik PDI Jabar, maka meminta bantuan Kolonel Syamsiar yang pernah menjadi pejabat militer di Bandung. Kolonel Syamsiar sendiri mengakui bahwa karena ia pernah menjadi pejabat militer di Bandung, karena tugasnya ia sering kontak dengan orang-orang PDI Jawa Barat. "Jadi ketika pak AWS meminta saya untuk menggarap Jawa Barat dalam waktu singkat saya langsung dapat jawaban dukungan," kata Kolonel Syamsiar.[6]

Begitu juga daerah lain di luar pulau Jawa. Mereka (PDI) yang masih *abu-abu* atau bukan pendukung Megawati menjadi bagian untuk *digarap*. "Bisa jadi suatu daerah atau cabang, misalnya, ketuanya pendukung Megawati, tetapi sekretarisnya tidak, ini yang kami "perdalam" untuk mendukung Kongres", jelas AWS. Praktis dalam waktu kurang dari satu bulan, tepatnya 16 hari, seluruh daerah sudah dikuasai untuk mendukung kongres. Ada kurang lebih 42 pengurus DPD PDI yang menyatakan untuk mendukung segera dilaksanakan kongres.

Menurut pengakuan dari Audi Tambunan, Ketua DPC PDI Jakarta Selatan, pada pertengahan bulan Mei, ia lupa tanggalnya di wilayah sekitar Cikini, Jakarta Pusat, diadakan rapat DPD DKI yang dipimpin oleh Ketua DPD PDI Jakarta Raya Lukman Mokoginta. Dalam rapat itu Lukman Mokoginta mengatakan, "Ini ada perintah dari bos besar (Suharto) untuk menyingkirkan Megawati melalui kongres, dan Anda harus ikut!" Ajakan

---

[6] Ibid,

tersebut oleh Audi Tambunan ditolak. Menurutnya, “Kebetulan keluarga saya sudah lama kenal dengan keluarga Sukarno, termasuk Ibu Megawati, jadi ada ikatan emosional”[7]. Penolakan itu tidak hanya DPC PDI Jakarta Selatan, tetapi juga DPC PDI Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, sehingga hanya 2 DPC PDI, yakni Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang ikut meneken untuk segera diadakan kongres.

Rencana kongres, Drs. Soeryadi sebagai Wakil Ketua DPR dari PDI awalnya tidak mengetahui. Ia baru tahu ketika mendengar Soetardjo Soeryoguritno, Ketua DPP PDI sering diajak AWS bertemu dengan Ka BIA Mayjen Syamsir Siregar pada tanggal 21 Mei 1996. Memang pada tanggal tersebut, AWS menginisiasi pertemuan antara Ka BIA Mayjen Syamsir Siregar, yang ditemani oleh Kolonel Rusli dan Kololonel Samsiar dengan Soetardjo Soeryoguritno, dr. Panagian Siregar dan AWS. Pertemuan itu dilakukan di sebuah kamar Hotel Pelita di Jl. Sahardjo, Tebet. Jakarta, yang semuanya ditanggung oleh BIA sendiri.

Sebelumnya, memang AWS sudah membawa Sutardjo ke Ka BIA. Pertemuan yang dibuka oleh Ka BIA Mayjen Syamsir Siregar itu, dimulai dengan pernyatan dari KA BIA Mayjen Syamsir Siregar, bahwa pemerintah melihat Megawati sudah menyimpang dan diperlukan pembenahan-pembenahan di dalam DPP. Kemudian, Ka BIA Mayjen Syamsir Siregar menanyakan kepada Sutardjo dan dr. Panagian Siregar tentang kesetujuan

---

[7] Audi Tambunan adalah Ketua DPC PDI Jakarta Selatan pada tahun 1996, dan kemudian menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dua periode, sekarang aktif di Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) PDI, Wawancara, pada 12 September 2007

mereka akan diadakan kongres. Atas pertanyaan dari Ka BIA tersebut ditanggapi positif oleh kedua fungsionaris DPP tersebut dan menyerahkan pada pembina politik dan ABRI untuk menindak lanjutinya.

Secara ringkas isi pembicaraan tersebut, seperti diceritakan AWS; KA BIA Syamsir Siregar meminta dukungan dengan mengatakan, “mau tidak mendukung kami ? (maksudnya konggres PDI). “Begini Pak Tardjo, ini PDI penting, tanpa PDI negeri ini bisa kacau”, kata Syamsir Siregar. Kemudian oleh Sutardjo Suryoguritno dijawab dengan logat Jawanya, “Opo, iyo” Sambil menyakinkan Sutardjo Suryoguritno, Mayjen Samsir Siregar mengatakan, “Iya ! Sekarang kami akan ajak Konggres, setuju ngak dengan pikiran pemerintah? Dengan menganggukan kepala Sutardjo Suryoguritno menjawab, “ya setuju ! Kalau perlu tahu, siapa yang Bapak pilih jadi Ketua PDI ? Oleh Mayjen Samsir Siregar segera dijawab, “coba Bapak sarankan sama saya, agar bisa kita menangkan. Lantas Sutardjo Suryoguritno mengatakan, “Ya, yang paling senior dong! (maksudnya Sutardjo sendiri). Kemudian percakapan di akhiri, dan Mayjen Syamsiar mengatakan bahwa rencana akan diadakan pertemuan lagi, “Okelah, 3 hari kemudian kita ketemu lagi,” katanya.

Pertemuan selesai, kemudian pulang menuju Kalibata, Kantor BIA. Pada saat itu Mayjen Syamsir Siregar menanyakan pada AWS, “Siapa rencana Ketua PDI? AWS berpikir bahwa hal tersebut bukan wewenangnya, kemudian menjawab, “saya tidak punya, tugas saya *kan* menenangkan dan memenangkan PDI? Mendengar jawaban tersebut Mayjen Samsir Siregar bertanya lagi,

“memang benar Tardjo yang paling senior”? “Ya nggaklah ! Tetapi tidak apa-apa kalau kita angkat jadi ketua Umum PDI”, jawab AWS.

Tiga hari kemudian bertemu diadakan pertemuan lagi. Yang hadir Mayjen Syamsir Siregar, Sudi Silalahi, Adityawarman, Waka BIA Achdari, Panagian Siregar dan Sutardjo Suryoguritno, bertempat di Langoon Hotel. (dekat Hilton). Mayjen Syamsir Siregar membuka pertemuan, dan langsung menanyakan, “siapa sudah dapat Ketua”? Sutardjo Suryoguritno langsung menyahut, “ya, saya tetap berpikir yang paling seniorlah”. Mayjen Syamsir Siregar langsung menegaskan, “Siapa”? Dengan tegas Sutardjo Suryoguritno menjawab, “Ya, saya”! Mendengar perkataan Sutardjo, langsung Panagian Siregar menyahut, “umur Pak Tardjo berapa ? Nggak bisa, saya yang paling senior, kalau masalah umur saya, saya sudah 2 kali di DPR, sekian tahun di DPD, dan di cabang”. “Pokoknya yang paling ada sekarang yang senior saya”, tegas dr. Panagian Siregar.

Baru dua kali pertemuan, akhirnya didengar Drs. Soeryadi, kemudian segera menghubungi AWS. Dalam percakapannya, Suryadi menyampaikan maksudnya, “Pak Alex, saya merasa penting sekali ngomong sama Pak Alex”! Oleh AWS kemudian dijawab, “Urusan apa”! “Urusan PDI” ? Atas pertanyaan balik seperti itu, Drs. Suryadi mengatakan, “Tidak”! “Saya sudah lama sekali tidak tahu masalah PDI ? Dalam pikiran AWS menduga kalau Suryadi sudah mendengar adanya rencana kongres, kemudian AWS balik bertanya, “terus, apanya penting”? Drs. Suryadi menjelaskan bahwa ia sudah mendengar ada

pertemuan antara Sutardjo Suryoguritno dengan Ka Bia Mayjen Syamsir Siregar. “Saya dengar persis bahwa Sutardjo jumpa Ka BIA, Ka BIA itu orang penting”.“Kapan saya bisa dipertemukan dengan Ka Bia”? Kata Drs.Suryadi meminta. Kemudian AWS menjawab, “Oh, kalau perkara itu gampang”, “Kapan kita bisa ketemu”? Yang kemudian dijawab oleh Suryadi, “Ok, nanti Sore !

Akhirnya, sorenya AWS bertemu Suryadi di rumah makan Padang dekat Polda DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, Suryadi menumpahkan kekesalannya dengan Sutardjo Soeryoguritno karena dianggap lawan. Dalam pertemuan itu, Suryadi mengatakan, “Tidak ada orang yang lebih goblok dari Tarjo, dia itu lurah, saya angkat menjadi Ketua Cabang, sekarang saya di lawan”. Pertemuan itu, AWS menyanggupi untuk mempertemukan Soeryadi dengan Ka BIA, Syamsir Siregar.

Akhirya malamnya, pada tanggal 26 Mei 1996 di Hotel Langoon dipertemukan dengan Syamsir Siregar ditambah dengan Direktur A BIA Brigjen Zacky Makarim dan Wa Ka BIA Mayjen Achdari. Dalam pertemuan, Drs. Soeryadi mengatakan sependapat dengan visi pemerintah untuk membenahi PDI, dan mengusulkan nama Fatimah Achmad dan Dimyati Hartono sebagai calon Ketua Umum dengan alasan mereka sudah cukup matang di Partai.

Kemudian pada tanggal 27 Mei 1996 di Hotel Langon, diadakan pertemuan antara KA BIA Syamsir Siregar dengan Fatimah Achmad, hadir

pula pejabat BIA yang lain, yaitu Kol. Rusli dan Kol Samsiar. Materi pembicaraan tetap sama bahwa perlu adanya pembenahan PDI. Kemudian ditambahkan oleh Fatimah Achmad, diprediksikan bahwa kalau ia menyampaikan rencana Kongres dalam rapat DPP paling sedikit 14 DPD dari 29 DPD akan mendukungnya. Jumlah itu masih kurang dibandingkan DPD yang mendukung Megawati. Untuk itu Fatimah Achmad menyarankan supaya Ismunandar dan Abdul Gani agar digalang secara pasti oleh ABRI guna mendukung urusan kongres. Oleh AWS, kedua orang tersebut dijamin mau mendukung kongres.

Besoknya, pada tangal 28 Mei 1996 digelar pada jam 19.00 WIB di Hotel Regent diadakan pertemuan antara Drs. Suryadi, Fatimah Achmad dengan Sospol dan BIA. Tetapi pada saat itu, Assospol Kassospol Mayjen Suwarno menolak pertemuan di tempat itu. Akhirnya, tempat dipindah di Langoon Hotel. Hadir pada pertemuan tersebut, Sospol ABRI Mayjen Syarwan Hamid, Mayjen Suwarno, Brigjen Zacky Makarim, Kol. Samsiar, dari PDI Fatimaha Achmad, Drs Suryadi, dan Lukman Mokoginta. Pada pertemuan itu, Fatimah tetap menegaskan mendukung apapun rencana yang akan dilakukan pemerintah, tetapi Drs. Soeryadi tetap menolak menjadi Ketua Umum. Di samping itu, Drs Soeryadi juga menyarankan untuk mempercepat terlaksananya rencana tersebut agar diadakan pertemuan DPD-DPD seluruh Indonesia yang menjadi pelaksana pertemuan adalah Lukman Mokoginta, Ketua DPD DKI Jakarta.

Hasil pertemuan tersebut, kemudian didiskusikan kembali oleh Mayjen Syarwan Hamid, Brigjen Zacky Makarim, Kolonel Rusli dan AWS. Dalam diskusi tersebut, AWS menyarankan bahwa kongres bisa terlaksana apabila diminta oleh ½ dari jumlah DPC ditambah satu. Di sisi lain, Mayjen Syarwan Hamid menyimpulkan bahwa pertemuan DPD tersebut bermanfaat untuk mendorong DPC-DPC membuat surat permintaan kongres.

Namun yang menjadi persoalan bagaimana mungkin bisa mengumpulkan DPD seluruh Indonesia melalui Lukman Mokoginta, ketua DPD DKI Jakarta. Untuk itu, jalan keluarnya adalah pertemuan bisa dilakukan kalau sifatnya informal. Pada saat itu juga, diputuskan hari H pertemuan informal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI seluruh Indonesia di Jakarta. Pelaksanaanya dikordinasi oleh Sospol ABRI, sedangkan BIA bertugas melalui seluruh jajaran territorial dan Intel untuk mendorong DPC membuat pernyataan tuntutan agar dilaksanakan kongres.

3.4. Penentuan Ketua Umum PDI

Konsolidasi terhadap cabang-cabang PDI dan DPD PDI pasti sudah berjalan. Tetapi, siapa yang harus menjadi Ketua Umum PDI menggantikan Megawati belum ada titik terang. Kandidat Ketua Umum, seperti Sutardjo Suryoguritno maupun dr. Panagian Siregar dinilai belum bisa menandingi popularitas Megawati. Ketika pertemuan di Langoon Hotel, Syarwan Hamid mengusulkan Drs. Suryadi untuk menjadi Ketua Umum PDI, tetapi Drs. Suryadi belum memberi jawaban akan kesediaannya. Penunjukan pada Drs.

Suryadi dinilai mampu untuk mengimbangi Megawati. Untuk itu pada tanggal 29 Mei 1996, Brigjen Zacky Makarim melalui AWS meminta kepastian Drs Soeryadi untuk menjadi ketua umum PDI. Oleh AWS dijawab bahwa ia menjamin Drs. Suryadi mau menjadi ketua umum PDI. Dalam memastikan hal tersebut, pada pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Holiday Inn, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Ka BIA, Brigjen Zacky Makarim Brigjen Slamet Kusbianto (Dansatgas Intel BIA), AWS dan Suryadi. Dalam pertemuan itu, Suryadi mau menjadi ketua umum dengan syarat,

a. Pak Harto menyetujui
b. Kursi PDI ditambah dari 56 menjadi 81. Maksudnya, kursi ABRI yang dikurangi dari 100 menjadi 75 kursi, sisanya merupakan tambahan dari kursi ABRI.

   Kedua syarat itu disetujui oleh Ka BIA .

Langkah berikutnya adalah pengkondisian menuju Kongres PDI. Yang dimulai dengan pemberian uang sebesar Rp.200 juta dari Sospol ABRI melalui Kolonel Sudi Silalahi (Spri Kasospol ABRI). Dalam upaya mengorganisir pertemuan tersebut disewa Apartemen Kuningan. Mulai tanggal 31 sampai dengan 2 Mei 1996, Lukman Mokoginta diberi tugas oleh Drs. Suryadi dan Letjen Syarwan Hamid untuk mengadakan pertemuan informal dengan DPD PDI seluruh Indonesia. Sementara, kegiatan itu berjalan, Dedapgri telah menerima masukan dari DPC-DPC se Indonesia kurang lebih 215 Cabang dari 312 cabang , dimana 215 cabang menuntut diadakan kongres.

Pada tanggal 3 Juni 1996, surat-surat dukungan dari 215 cabang oleh Depdagri disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI melalui Dra. Titi Yuliasih sebagai bahan rapat yang diselenggarakan DPP PDI tanggal 4 Juni 1996. Bersamaan itu pula, 42 pengurus DPD PDI tersebut yang dipimpin oleh Sumaryo ketua DPD PDI Jawa Tengah menghadap Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri (Depdadgri) Soetoyo NK dan menyerahkan 21 map yang berisi pernyataan tertulis keinginan 21 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 215 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI dari 305 DPC PDI agar PDI menyelenggarakan kongres. (Kompas/4/6/96) Kedatangan Sumaryo bersama dengan perwakilan pengurus DPD dan DPC PDI ke kantor Departemen Dalam Negeri (Dedapgri) menjadi awal konflik internal PDI menjadi terbuka. Yaitu, konflik antara mereka yang menjadi pendukung Megawati Soekarnoputri berhadapan dengan mereka bersama dengan Fatimah Achmad Cs.

Pada hari yang sama, tanggal 4 Juni 1996 pukul 20.00 WIB bertempat di Apartemen Kuningan, 16 orang pengurus DPP pimpinan Fatimah Achmad bertemu dengan Kasospol ABRI Letjen Syarwan Hamid. Dalam rapat itu pula, Dir A BIA Brigjen Zacky Makarim melaporkan hasil rapat DPP PDI yang berlangsung siang harinya di Jl. Diponegoro 58, dan ketika itu Letjen Syarwan Hamid langsung menganjurkan agar segera membentuk Panitia Kongres. Keesokan harinya, tanggal 5 Juni 1996 bertempat di Hotel Wisata, kelompok

16 yang dipimpin Fatimah Achmad membentuk susunan panitia kongres PDI ke IV.

Belakangan Sutardjo Soeryoguritno membelot dan memihak Megawati. Hal ini terlihat ketika pada hari Selasa, 4 Juni 1996 menanggapi keinginan Sumaryo dan kawan-kawan PDI, sebagai Ketua DPP PDI menyatakan bahwa DPP PDI menolak permintaan sebagian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menyelenggarakan kongres. DPP PDI juga menyatakan tidak akan menyelenggarakan kongres dalam waku dekat. Alasannya, selain usulan-usulan tersebut tidak memenuhi syarat konstitusi partai sehingga keabsahan tidak bisa dipertanggungjawabkan, pimpinan PDI juga sudah bertekad menyukseskan Pemilu 1997. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menjaga stabilitas partai maupun stabilitas nasional menghadapi tugas nasional, yaitu suksesnya Pemilu 1997. (Kompas/5/6/96)

Kelompok yang mendukung agar segera dilaksanakan kongres ini kemudian disebut sebagai kelompok “pendukung kongres” atau “kelompok 16”, yang beranggotakan fungsionaris Ketua DPP PDI yang dipimpin oleh Fatimah Ahmad, sedang fungsionaris lain yang tergabung dalam “kelompok 16” adalah Panagian Siregar, Mulyono Sutarmo, Slamet Mulyadi, Ismunandar, Abdulgani, Yahya Theo, Titi Juliasih Kardjono, Ratih Ratna Purnami, KH Abdul Choliq Murod, Untung Sutomo, Neneng Amalia, Oerip Sardjono, Andi Chaerul Muis dan Edy Djunaedi. Sebelumnya “kelompok 16” telah mengeluarkan “pernyataan politik dan kebulatan tekad” yang intinya

menyatakan kehendak untuk menyelenggarakan kongres dan menetapkan Fatimah Achmad sebagai ketua panitia penyelenggara kongres. (Kompas, 5/7/96)

Akhirnya, konflik internal PDI menjadi terbuka antara “kelompok 16” pimpinan Fatimah Achmad dengan Megawati Sukarnoputri yang didukung fungsionaris DPP PDI yang lain. Dalam tanggapannya atas prakarsa penyelenggaraan kongres tersebut, melalui Ketua DPP PDI Soetardjo Soeryoguritno menyatakan, menolak permintaan sebagian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menyelenggarakan kongres. Alasannya, selain usulan-usulan tersebut tidak memenuhi syarat konstitusi partai sehingga keabsahannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, pimpinan PDI juga sudah bertekad menyukseskan pemilu 1997. (Kompas,5/7/96)

Berkaitan dengan usulan dari DPD dan DPC tentang penyelenggaran kongres, setelah dicek usulan datang dari 16 DPD dan 141 DPC PDI, dan bukan 21 DPD dan 215 DPC PDI sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Sumaryo pada Dirjen Sospol Dedapgri, dan usulan itu tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Konstitusi Partai bahwa usulan itu dibuat bukan berdasarkan rapat cabang sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Menanggapi dukungan yang begitu meluas terhadap dirinya, Megawati menyatakan bahwa dukungan masyarakat kepada dirinya bukanlah hasil rekayasa, namun merupakan dukungan spontan yang diberikan. Ia menegaskan

apabila kongres yang dilakukan itu merupakan tindakan yang tidak konstitusional. Sebab ditentukan oleh pihak-pihak di luar partai. Keputusan itu tidak melalui prosedur yang benar, misalnya kelompok 16 mengelar rapat di luar kantor tanpa mengundang Ketua Umum dan Sekjen. Pengusulannya dari cabang-cabang juga dilakukan di luar rapat yang benar. Kongres tidak mungkin dilakukan secepat itu kalau bukan sebuah hasil dari rekayasa. Megawati memang tidak menyebut siapa di belakang penyelenggaraan kongres, tetapi adanya oknum-oknum kekuasaan yang berada dibalik penyelenggaraan kongres. (Kompas, 21/6/96)

Berkaitan dengan persoalan rekayasa konggres, Suwarno Adiwijoyo, menjelaskan, saat itu, itu memang semua inisiatif datang dari pemerintah jika ada kongres atau muktamar. Jadi, itu bukan suatu hal yang luar biasa. Tidak ada pelanggaran hukum karena semuanya sesuai dengan konstitusi. Kongres Medan tidak berkaitan dengan peristiwa 27 Juli. Selanjutnya, berkaitan dengan penyelenggaraan kongres PDI, mantan Assospol ABRI itu menjelaskan, sebenarnya alasan *pertama* adalah memenuhi keinginan kelompok yang tidak mengakui kepemimpinan Megawati. *Kedua,* kongres itu dilaksanakan secara legal, Dan, *ketiga*, Megawati tetap diprogram sebagai Ketua Umum. Tetapi, Megawati tidak datang, karena harus mengikuti asas legalitas partai, maka para tandingan seperti Yusuf Merukh yang mau mengadakan kongres luar biasa (KLB) tidak difasilitasi. (Forum Keadilan, 23/4/2000)

Begitu juga dengan Syarwan Hamid yang mengatakan dirinya tidak pernah merekayasa kongres PDI Medan yang menurunkan Megawati. Dalam penegasannya, “tetapi jika ada pihak-pihak yang ingin menuntutnya secara hukum, saya siap menghadapinya dipengadilan. Sebagai prajurit ABRI, saya siap mati. Apalagi hanya masuk penjara, jika memang terbukti bersalah”. (AB, 1/8/1998)

Pernyataan Syarwan Hamid, kemudian mendapat tantangan dari Dimyati Hartono, “Syarwan Hamid harus konsisten, harus mengingat ucapannya. Kalau nanti terbukti, tidak perlu sampai mati, masuk penjara saja sudah cukup”. (Merdeka, 2/8/1998). Tetapi, ketika namanya dikaitkan sebagai tersangka peristiwa 27 Juli, Syarwan Hamid mengakui bahwa ia hanya terlibat sampai penyelenggaraan kongres Medan. (Forum Keadilan, 23/8/2000)

Berkaitan dengan penyelenggaraan kongres PDI di Medan dalam melihat peran peran aparatur rezim Orde Baru, dapat dilihat dalam ganbar berikut :

Gambar 5
Perencanaan Dan Konsolidasi Kongres IV Di Medan
Sumber: Modifikasi penulis yang diolah dari berbagai sumber

Menurut penuturan AWS, kira-kira pada bulan Januari 1996, ia sudah mengajukan usulan konsep untuk menyelesaikan persoalan PDI. Memang pada waktu itu merupakan puncak kemelut DPD PDI Jawa Timur yang mengalami

dead lock akibat ada kepengurusan ganda DPD PDI antara DPD pimpinan Latief Pudjosakti dengan DPD PDI pimpinan Sutjipto, sehingga adanya kekosongan wakil PDI dua kepanitiaan dalam Pemilu 1997, yaitu Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) dan Panitia Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Tingkat I (Panswaslak I). Kenyataannya sampai batas waktu pada 22 Januari 1996 juga belum terbentuk, sehingga untuk wakil PDI di kepanityaan Pemilu 1997 kosong.

Konsep penyelesaian yang disusun AWS diajukan kepada Waka BIA Achdari tetapi tidak mendapat sambutan. Tetapi pada bulan Mei 1996, ia dipanggil oleh Pangab ABRI Jenderal Faisal Tanjung membicarakan dengan penyelesaian PDI, setelah itu ia berkordinasi dengan BIA untuk melakukan konsolidasi ke DPD maupun DPC PDI yang di daerah. Hasil dari konsolidasi muncul pernyataan dari berbagai DPC maupun DPD PDI untuk menyelenggarakan kongres. Selanjutnya muncul kelompok 16 pimpinan Fatimah Achmad yang menjadi pelaksana kongres ke V di Medan. Hasil kongres berhasil menyusun kepengurusan baru dengan Ketua Umum Soeryadi dan Sekjen Buttu Hutapea.

3.5. Pertemuan Politik Pasca Kongres IV PDI

Pada tanggal 25 Juni 1996, kira-kira pukul 21.00 WIB, di Hotel Regent diadakan jamuan makan malam sebagai ucapan selamat dari Kassospol ABRI atas keberhasilan Kongres PDI ke IV di Medan. Di tangga Hotel tampak Soegeng Saryadi yang merupakan pemilik Hotel menyambut para tamu dan

mempersilahkan para tamu menuju ruangan atas yang ditunjuknya. Dari para tamu undangan terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur ABRI, unsur Depdagri dan unsur PDI. [8]

Unsur ABRI, terdiri dari:

1. Kassospol Mayjen Syarwan Hamid.
2. As Intel Mabes ABRI Mayjen Yusuf Kartanegara.
3. Ka BIA Mayjen Syamsir Siregar.
4. Assospol Kassospol ABRI Mayjen Suwarno.
5. Kapuspen ABRI Brigjen Andi Amir Syarifudin.
6. Paban IV Sospol ABRI Kol Yahya.
7. Spri Kassospol ABRI Kol. Sudi Silalahi.
8. Ka Banbinkum ABRI

Unsur Depdagri

- Dirjen Sospol Depdagri Mayjen Sutoyo NK.

Unsur PDI

1. Drs. Soeryadi
2. Lois Nangoi
3. H. Kholid Murod
4. Alex Widya Siregar (AWS)

Di tengah suasana makan malam yang santai timbulah pembicaraan antara lain, yang dimulai oleh Drs. Soeryadi dan disambut oleh Kassospol

[8] BAP Pemeriksaan, AWS, Mabes Polri

ABRI Syarwan Hamid, dan kemudian berkembang topik bahasan tentang masalah kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro No. 58 Jakarta Pusat.

Di tengah percakapan makan malam, ada seorang tamu undangan yang menanyakan, “Kira-kira di mana kalian (PDI) berkantor?”. Dan ditanggapi oleh Drs. Soeryadi dengan pertanyaan juga, “Bukan masalah kantor saja yang dihadapi, tapi juga bagaimana menghadapi gugatan hukum PDI Megawati dan bagaimana menghadapi pemilu dan dari mana dananya” ? Pada saat kantor DPP PDI hasil Kongres IV di Medan, sementara berkantor di Jl. Denpasar, Jakarta Pusat

Berkaitan dengan pertanyaan dari Drs. Soeryadi timbulah diskusi sambil makan malam. Akhirnya, diskusi tidak menghasilkan jawaban atas permasalahan yang disampaikan, dan lebih kurang pukul 23.00 WIB malam peserta undangan pulang. Pada saat mau keluar ruangan sudah ada Soegeng Saryadi yang menyambut peserta rapat di depan pintu untuk menghantarkan pulang. Penyambutan itu wajar karena Soegeng Saryadi adalah tuan rumah yang merupakan Presiden Komisaris Hotel Regent.

Pada akhir Juni 1996, tepatnya tanggal 27, diadakan acara makan malam di Restoran “DAIDOMON” di Plaza Bank Bumi Daya bersama Banbinkum ABRI, peserta yang hadir ada dua (2) unsur, yaitu,

a. Unsur DPP PDI
   - Fatimah Ahmad
   - Alex Widya Siregar

- Djufri. SH
- Ratna Ratih Purnama
- Drs. Suparno
- Drs. Subagyo Umar

b. Unsur Banbinkum

Kol. Timur Manurung dan 5 orang dari Banbinkum, dan salah satunya berpangkat Kolonel yang mengaku mantan Bupati Kampar, Riau.[9]

Materi rapat adalah mengenai bagaimana menghadapi gugatan hukum PDI Megawati di pengadilan perihal keabsahan kongres dan pada waktu itu dibahas aspek-aspek yuridis terutama yang menyangkut AD dan ART PDI, dan kemudian melakukan inventarisasi Pasal-Pasal yang terdapat dalam AD/ART guna menemukan Pasal yang dapat menjawab gugatan di Pengadilan.

Untuk Tim Kuasa hukum dari DPP PDI Kongres IV Medan, di pimpin oleh Djufri, SH dalam rangka menghadapi gugatan PDI Megawati. Sedang urusan Hakim, di sepakati untuk melakukan pendekatan dan penggalangan kepada unsur Kehakiman dan untuk menangani masalah tersebut akan menjadi tanggung jawab Banbinkum ABRI.

Mengenai pertemuan tersebut, Ka BIA Syamsir Siregar mengakui bahwa ia hadir sebagai undangan Syarwan Hamid untuk makan malam, tetapi tidak

[9] Ibid,

terlibat dalam penyerangan 27 Juli. Keterlibatan sebatas pada penyelenggaraan Kongres IV PDI di Medan. Justeru ia sebagai korban, karena setelah peristiwa itu dicopot dari jabatan Ka BIA. Begitu juga Syarwan Hamid dan Suwarno mengakui adanya pertemuan itu, dan keterlibatanya sebatas penyelenggaraan Kongres Medan. (Forum Keadilan, 23/4/2000)

3.6. Rencana Pengambilalihan Kantor DPP PDI

Setelah acara makan malam di restoran "Daidomon", timbul ide AWS untuk menyusun konsep rencana pengambil alihan Kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro No.58. Konsep itu memang belum di sampaikan ke DPP PDI. Tetapi oleh AWS didiskusikan dengan Komandan Satgas Intel BIA Kolonel Marinir Rusli dan Wakil Komandan Satuan Kostr Intelijen BIA Letkol Dharsono. Konsep itu didiskusikan di kantor BIA Ragunan, Jakarta Timur. Konsep itu disusun, pada dasarnya bernuansa militer. Sedangkan data-data dilapangan oleh AWS peroleh dari informanya, Sdr. Antonio Ewal yang ia susupkan di kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro. 58 Jakarta Pusat. Isi konsep itu antara lain,

a. Personil PDI yang berjaga di kantor DPP PDI berjumlah 100 orang
b. Perlengkapan Samurai 32 buah.
c. Bom Molotov dalam jumlah yang besar.
d. Semprotan Gas yang dirakit dari alat penyemprot hama ada 5 (lima) unit.
e. Bensin dalam derijen yang berisi 3 liter, sebanyak 100 buah.

f. Susunan Komanda Satgas

Kordinator : Mangara Siahaan

Wakil : Gusti Kemas

Komandan : Agung Imam Sumanto

Wkl Komando : Antonio Ewal

Bendahara : Sri

- Adanya posko-posko seperti Posko Jawa Timur yang dipimpin mantan TNI Marinir Serma Soesilo Muslim.
- Penjagaan dalam bentuk 2 shift, yaitu ;
  - Pukul 07.00 s.d 19.00 WIB
  - Pukul 19.00 s.d 07.00 WIB

Berdasarkan analisa kekuatan lawan, AWS memperkirakan dengan 200 (dua ratus) orang cukup dapat menguasai gedung DPP PDI Jl. Diponegoro No.58, dan hari H ditentukan saat "Antonio Ewal" sebagai komandan shift dan direncanakan pada malam hari menjelang Subuh agar tidak terjadi titik singgung dengan massa lain yang dapat berakibat timbulnya bentrokan yang lebih besar dan pada waktu "Subuh" diperkirakan orang-orang yang berjaga di kantor DPP PDI sulit mendapat dukungan bantuan. Massa yang diharapkan untuk mendukung rencana ini berjumlah sekitar 200 orang yang merupakan pesilat dari Banten yang terbagi dalam ;

a. Komandan

b. Wakil Komandan

c. Tim Serbu I
d. Tim Serbu II
e. Tim Serbu III
f. Kekuatan 200 orang.
g. Peralatan, seperti Megaphone, gunting besar untuk menggunting kawat pagar.
h. Logistik dan cara-cara mensuplai.
i. Di bentuk regu pengaman untuk mencegah /menunggu bilamana timbul bantuan lawan, dan dalam di dalam regu pengaman termasuk tim kesehatan.

Dalam pemaparan pada saat diskusi dengan di kantor BIA Rawamangun, Jakarta Timur. Kolonel Rusli tidak sependapat dengan rencana pengambilalihan yang digagas AWS karena menganggap pola itu bergaya militer, dan justru Kolonel Rusli menginginkan PDI Soeryadi saja yang melaksanakan dan BIA sebagai factor pendukung. Pada saat diskusi timbul masalah, “Siapa yang akan melaksanakan konsep, dan dari mana sumber dana operasional,” tanya Kolonel Rusli. Di jawab oleh AWS, “majukan saja ke KA BIA, kita tunggu apa keputusan dari BIA”, kata AWS. Kemudian konsep di ajukan ke Ka BIA.

Beberapa waktu kemudian, tepatnya tanggal 16 Juli 1996 diadakan rapat di DPP PDI Soeryadi di rumah jabatan Drs. Soeryadi. Rapat itu merupakan rapat rutin. Rapat dihadiri beberapa fungsionaris DPP PDI, antara lain,

1. Drs. Soeryadi.
2. Dimmi Haryanto.
3. Fatimah Achmad
4. KH. Cholid Murod
5. Harsoko Sudiro
6. Romulus Sihombing
7. Dr. Panagian Siregar
8. Ratih Ratna Purnama
9. Neneng Amalia
10. Urip Sujud
11. H. Achmad Gani
12. Tuti MariatnoUntung Sutomo
13. Said Sucoro
14. Drs. Sudaryanto

Rapat dimulai dan dipimpin oleh Drs. Soeryadi sendiri. Dalam kata pembukaan oleh Drs. Soeryadi mengajukan beberapa masalah dalam rapat, antara lain, 1) Membahas surat-surat masuk, 2) Membahas laporan dari daerah-daerah, 3) Konsolidasi menghadapi Pemilu, 4) dan lain –lain yang timbul dalam rapat. Dalam masalah surat yang masuk tidak ditemukan masalah yang serius. Dalam rangka konsolidasi Pemilu, rapat menunjuk Sudaryanto untuk menyusun konsep program perjuangan PDI yang akan ditawarkan dalam kampanye pemilu 1997.

Pada saat membahas lain-lain, Drs. Soeryadi, menyatakan tentang gugatan PDI Megawati sudah masuk ke pengadilan dan masalah kantor yang masih dikuasai oleh PDI Megawati. Oleh Dr Panagian Siregar, pernyataan itu ditanggapi serius dan mengatakan, Kenapa kita hanya bereaksi menghadapi gugatan, dan masalah kantor, mengapa kita tidak pro aktif menggugat Megawati, dan kantor DPP PDI kita ambil saja", katanya. Kemudian di jawab oleh Drs. Soeryadi, "Kalau masalah gugatan kita tunggu dan masalah Kantor kita pikirkan kawan-kawan yang mampu memikirkan strateginya. Selesai menjelaskan itu, Urip Sujud mengajukan diri kesanggupannya untuk mengambil kantor DPP PDI, tetapi tawaran Urip Sujud tidak mendapat respon dari Drs. Soeryadi.

Kemudian, Dr Panagian Siregar, menyatakan, " Kenapa tidak militer saja yang melaksanakan, kenapa harus kita yang susah-susah, mereka yang telah memecah belah kita", tegasnya. Atas pertanyaan, Dr Panagian Siregar, maka Fatimah Achmad mengatakan, "Ya, untuk apa ada Pak Alex (AWS) di sini, kalau dia tidak bisa ambil kantor DPP". Oleh Drs. Soeryadi, di jawab, "Okelah saya setuju dan kita serahkan kepada pak Alex untuk mengambil alih kantor tersebut. Akhirnya, rapat memutuskan, 1. Penunjukan Sdr. Alex Widya Siregar (AWS) sebagai Kordinator pelaksanaan pengambilalihan Kantor DPP PDI dengan catatan tanpa bentrokan massa, 2. Menunjuk Sdr. Ismunandar, Ir Anwar Datuk, Ir Untung Sutomo untuk melakukan pendekatan pada kelompok Megawati langsung guna membicarakan Kantor.

Setelah mendapat mandat dari DPP dari DPP untuk melakukan pengambil alihan Kantor DPP PDI kegiatan, AWS pada tanggal 17 Juli 1996 mendatangi Kol. Marinir Rusli di kantor BIA di R untuk memberitahukan bahwa “DPP PDI telah memberikan mandat atau menunjuk AWS sebagai Pelaksana Pengambil Alihan Kantor DPP PDI, dan menanyakan bagaimana tanggapan KA BIA atas konsep yang pernah di susunnya. Kol. Marinir Rusli, menyatakan bahwa KA BIA menanggapi dingin konsep itu dan saat itu konsep berada di meja PABAN A1 Kol. Samsiar yang berkantor di Kalibata.

Di samping itu juga, Kol. Mar. Rusli juga menginformasikan yang masuk dengan klasifikasi A1, bahwa Lukman Mokoginta dan Sahala P Sinaga akan mengadakan demo ke harian Kompas dan ke DPR dengan kekuatan massa 5000 orang. AWS tahu akan kekuatan Lukman Mokoginta dan pemberi informasi itu adalah Peltu Tedy Tobing yang AWS tahu hubungan antara Peltu Tedy Tobing dengan Lukman Mokoginta dan Sahala P Sinaga sangat dekat, maka AWS anggap informasi itu benar. Tetapi dalam benak AWS, kalau demo itu benar terjadi maka akan menghambat rencana AWS yang telah disusunnya. Kemudian AWS minta kepada Kol. Rusli untuk mempertemukan dengan Lukman dan Sahala dengan maksud untuk membantalkan demo.

Pada tanggal 18 Juli 1996, tepatnya pukul 11.00 WIB, AWS bersama Jonathan Marpaung ke Kantor BIA di Ragunan, dan bertemu Kol. Rusli di ruang kerjanya, kemudian Kol Rusli menugaskan Peltu Tedy Tobing untuk menjemput Lukman Mokoginta dan Sahala P Sinaga. Tidak beberapa lamanya,

keduanya datang mulai mendiskusikan tentang pembatalan rencana demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR dan Kantor Harian Kompas. Tetapi, Sahala P. Sinaga menolak rencana itu, “Tindak mungkin dibatalkan karena persiapan sudah matang”. Kemudian oleh AWS, dijawab, “Tidak mungkin diberikan ijin untuk demonstrasi”. Sahala P. Sinaga tetap bersikeraas untuk melaksanakan demonstrasi. Akhirnya dicapai jalan keluar, bahwa keesokan harinya keduanya oleh AWS di ajak bertemu dengan Assospol Kassospol ABRI Mayjen Suwarno Adiwijoyo yang berkantor di Jl. Salemba Raya No. 14, dan hal itu di setujui oleh Sahala P. Sinaga. Setelah Sahala P. Sinaga meninggalkan ruangan, AWS bicara pada Kol. Mar. Rusli bahwa disetujui atau tidak disetujui oleh KA BIA maka rencana yang sudah saya susun akan saya laksanakan, kemudian juga disampaikan bahwa Jonathan Marpaung telah saya minta bantuan untuk mengkontak massa, dan agar rencana DPD PDI DKI untuk melakukan unjuk rasa dilaporkan kepada BIA. Dalam hal ini Kol. Mar. Rusli memberi catatan bahwa massa yang akan digunakan jangan beringas dan itu berasal dari PDI.

Keesokan harinya, tanggal 19 Juli 1996, kira-kira pukul 09.30 WIB, AWS, Sahala P. Sinaga dan Lukman Mokoginta bertemu di Jl. Salemba No. 14 untuk bertemu dengan Mayjen Suwarno Adiwijoyo. Ketika mereka mengutarakan untuk mengadakan demonstrasi ke Gedung DPR/MPR dan Kantor Harian Kompas, Mayjen Suwarno Adiwijoyo menyatakan, “Tidak bisa! Tidak bisa karena akan mengganggu stabilitas nasional”. Kemudian,

AWS menyerahkan sebuah map yang berisi tentang konsep pengambilalihan kantor DPP PDI di Jl Diponegoro No.58, sambil menyatakan, “Saya juga punya rencana untuk Jl. Diponegaro, tolong bapak baca rencana terlebih dahulu”. Setelah dibaca dan dipelajari, Mayjen Suwarno Adiwijoyo menyetujui, tetapi dengan catatan bahwa semua yang ikut mengambil alih harus orang PDI dan jumlahnya harus 3 kali lebih besar dari kekuatan lawan untuk menghindarkan bentrokan fisik yang terlalu lama. Pada saat dijelaskan AWS, akan membawa gorup BALADIKA dari SOKSI, Mayjen Suwarno Adiwijoyo melarang hal tersebut. “Kita menentang Megawati karena Mega mempergunakan orang lain (PRD dan lain-lain), kalau kita gunakan orang lain maka sama saja posisinya dengan dengan Megawati”, katanya.

3.7. Garis Komando Penyerangan dan Pengerahan Massa

Selesai pertemuan Assospol Kassospol Suwarno Adiwijoyo. AWS bersama Sahala Sinaga sepakat untuk mengadakan pertemuan membahas tentang pengerahan massa dan sepakat bertemu di Hotel Danau Sunter. Pertemuan itu diadakan pada tanggal 20 Juli 1996 pukul 20.30 WIB. Yang hadir adalah AWS bersama Jonathan Marpaung, Lukman Mokoginta, Kolonel Haryanto, dan H. Abdul Gani.

Pembicaraan dipimpin oleh Kolonel Haryanto yang langsung menyatakan, “Pak Alex... Saudara Lukman ini punya massa 5000 orang (lima ribu orang) yang tadinya diarahkan untuk demo ke DPR/MPR dan Kompas, dan menurut yang saya ketahui dari Pak Lukman Mokoginta, bahwa Pak Alex

tidak menyetujuinya". Atas pernyataan itu, AWS menjawab, " "Saya punya encana untuk mengambil alih Jl. Diponegoro, dan saya tidak ingin hal ini terganggu". Kemudian, Kolonel Haryanto menjawab, "kenapa tidak digabung saja?" Dijawab AWS, " Saya tidak yakin bahwa ada massa 5000 yang disiapkan Lukman". Atas jawaban AWS, Lukman Mokoginta memberi tanggapan, "Ini ada massa yang 5000 (lima ribu) dari Yayasan Attaubah dibawah pimpinan Seno Bella, kaos dan atribut lainnya sudah disiapkan, dan harga kaos Rp.600 (enam ribu) dan harus dibayar untuk 5000 (lima ribu)". Lukman juga menambahkan bahwa pengumpulan massa juga sudah mendapat restu dari Drs Soeryadi. AWS tetap tidak yakin Luman Mokoginta mampu mengumpulkan 5000 (lima ribu) orang. Kemudian Kol Haryanto, mengatakan, "Kenapa tidak dicek terlebih dahulu". AWS menyatakan setuju dan selanjutnya ditentukan tempat pengecekan oleh Kol Haryanto di Taman Kebun Raya Bogor pada keesokan harinya, dengan catatan semua biaya dalam rangka pengecekan AWS tidak akan keluarkan dan hal itu disanggupi oleh Luman Mokoginta.

Sedangkan Jonathan Marpaung mendapatkan tugas dari AWS untuk mengumpulkan massa untuk pengambilalihan kantor DPP PDI. Ia menerima uang Rp. 7 juta dari Sahala P. Sinaga. Kemudian Jonathan Marpaung berhasil mengumpulkan massa sebanyak 68 orang yang diperoleh dari Pasar Induk, atas perintah AWS, massa dibawa ke Gedung Artha Graha dan diterima oleh Kol. Harianto. Massa kemudian dibagi kaos dan ikat kepala merah. Atas

perintah Kol. Harianto massa dari Artha Graha digerakan ke Jl. Diponegoro untuk mengambil alih kantor DPP PDI. Ketika massa yang dikumpulkan dibawa ke Jl Diponegoro, ditempat itu ternyata sudah ada keributan dan melihat rambongan massa dari kelompok lain. (Kompas, 5/11/2003)

Pada tanggal 21 Juli 1996 (hari minggu) pukul 09.00 WIB, AWS bersama sopir sudah sampai di Taman Kebun Bogor, dan di sana sudah menunggu Kol Haryanto, Sahala P. Sinaga dan Jonathan Marpaung beserta massanya. Kemudian Sahala menunjuk ke arah rombangan yang jumlahnya kurang lebih 15 orang terdiri dari Ibu-Ibu dan anak. AWS tidak mau menjumpainya, akhirnya Kol Haryanto menyuruh Sahala. P. Sinaga mendatangkan Senno Bella. Setelah itu Sahala P. Sinaga melaporkan rombongan Senno Bella yang 5000 massa sedang dalam perjalananan. Untuk itu semua untuk sabar menunggu. Kemudian sambil menunggu, Sahala P. Sinaga meminta biaya untuk membayar kaos dan membayar biaya transpotasi serta orang yang sudah datang yang dibawa Senno Bella. Untuk transport sebanyak 5 (lima) buah Metromini dengan jumlah semua Rp. 16.000.000. Ketika mendengar permintaan dari Sahala P Sinaga, Kol Haryanto terus menimpali, “Orang *you* janjikan (Sinaga) belum datang, bagaimana *you* mau minta bayaran!”.

Pada saat itu juga, ada Malao dan massanya, dan kira-kira pukul 13.000 WIB Jonathan Marpaung datang membawa konsumsi yang segera dibagikan kepada massa yang dibawa sdr. Malao. Setelah makan siang, kegiatan tetap

dilanjutkan menungu kehadiran Senno Bella dengan massanya. Namun, menunggu sampai pukul 17.30 WIB massa tidak hadir, dan massa yang di bawa oleh Jonathan Marpaung dan Malao yang berjumlah 200 orang di bawa ke Cibubur (Bumi Perkemahan Cibubur).

Rencana, massa itu keesokan harinya akan dibawa ke Jl Diponegoro, tepatnya Kantor DPP PDI untuk melakukan pengambil alihan. Pada saat di Cibubur, Kol Haryanto juga datang dan menyatakan agar AWS tidak menggerakan massa dulu ke Jl. Diponegoro, sambil memperlihatkan denah bangunan DPP PDI dan menjelaskan letak senjata tajam, bom molotov dan drijen berisi bensin yang di simpan di kantor DPP PDI. Pukul 22.00 WIB, massa mulai berdatangan di Cibubur yang dipimpin oleh Edy Nainggolan sebanyak 60 orang, kemudian Yitno membawa sebanyak 25 orang dan kelompak massa yang tidak dikenal identitasnya.

Kira-kira pukul 24.00 WIB, Brigjen Zacky Makarim menelpon AWS, dan menanyakan situasi lapangan, dan di jawab oleh AWS, “situasi agak rumit. Kemudian juga ditanyakan, apakah masa dapat dikendalikan?” Oleh AWS dijawab, “Bisa dikendalikan!”. Kemudian oleh Zacky Makarim massa diperintahkan untuk dibubarkan dan disuruh pulang.[10]

AWS juga mendapat telpon dari Harsoko Sudiro[11] yang menginformasikan bahwa Jl Diponegoro ada 40 wartawan asing. Ketika ditanya di mana posisinya, Harsoko Sudiro menjawab bahwa ia bersama

[10] Penyerangan tanggal 23 Juli 1996 di batalkan , karena kedatangan Dubes AS, Pak Harto tidak mau ada kerusuhan
[11] Fungsionaris DPP PDI Soeryadi

dengan Kol Rusli berada di depan Gedung DPP PDI Jl. Diponegoro. Setelah mendapat informasi dari Harsoko Sudiro, akhirnya AWS membubarkan massa yang masih berkumpul di Cibubur. Sedangkan, kepada Jonathan Marpaung dan Malao, AWS perintahkan untuk bersipa-siap, bilamana dibutuhkan agar segera mengerahkan massa.

Keesokan harinya, tanggal 22 Juli 1996, pukul 09.00 WIB, AWS datang ke kantor BIA untuk menemui Brigjen Zacky Makarim, tetapi tidak ketemu hanya berjumpa dengan dengan Kol Samsiar yang menyatakan ada kesan dari Brigjen Zacky Makarim, kerja pengumpulan massa di Cibubur tidak serius, dan mengatkan ada pemberitahuan dari Fatimah Achmad bahwa akibat kegagalan itu uang banyak habis. Pada hari itu juga, AWS perlu mengklarifikasi pada Assospol Kassospo ABRI Mayjen Suwarno Adiwijoyo di kantornya, untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya di Cibubur. Oleh Suwarno Adiwijoyo, di jawab, “Sudah-sudah lain kali diatur saja dengan baik”. Ketika mau ke luar ruangan berjumpa dengan Sutoyo NK, Dirjen Sosppol Dedapgri, AWS diajak kembali ke ruangan Suwarno, sambil menyatakan, “Ada berita penting”. Selanjutnya Sutoyo NK, mengatakan, “Ada pesan Presiden kepada Mendagri, bahwa beliau (Presiden) hanya mau menerima DPP PDI jika kantor DPP di Jl. Diponegoro 58 sudah dibebaskan”. Di tengah pertemuan, ada telpon masuk dari kantor BIA, yaitu Brigjen Zacky Makarim, meminta agar AWS segera datang ke kantor BIA di Kalibata. Di kantor tersebut, AWS bertemu dengan Ka BIA dan Dir A BIA

Brigjen Zacky Makarim, kemudian Ka BIA menanyakan, “Apakah sanggup mengambil alih Gedung Diponegaro 58?” Dijawab AWS, “Sanggup!” “Oke!” jawab Ka BIA, selanjutnya mengatakan, “*You* atur orang-orang *you*, dan saya akan ke lokasi (Jl. Diponegoro). Dan Ka BIA meminta AWS kembali ke kantor BIA nanti pukul 21.00 WIB. Kemudian, AWS mengkontak rekan-rekanya Sdr Malao dan Jonathan Marpaung untuk menyiapkan massa yang berada di Cibubur.

Pada keesokan harinya, tanggal 23 Juli 1996, kira pukul 21.00 WIB, di kantor BIA Kalibata diadakan rapat kordinasi. Pada rapat itu hadir, Direktur “ A” BIA, Brigjen Zacky Makarim, As Intel Kodam Kolonel Haryanto, Asops Skogar, Kapolres Jakarta Pusat Letkol Pol. Abubakar dan Pabandia A Letkol Soediono. Rapat dipimpin oleh Brigjen Zacky Makarim, pada saat rapat, AWS diperkenalkan oleh Zacky Makarim sebagai pimpinan yang akan mengambil alih Gedung Diponegoro 58. Untuk memudahkan massa yang dibawa AWS, maka Brigjen Zacky Makarim memerintahkan Kapolres Jakarta Pusat untuk memblokir jalan-jalan tertentu yang telah ditentukan dalam peta. Untuk Kolonel Haryanto dan Asops Skogar diperintahkan untuk memberikan dukungan pengamanan kalau seadainya datang serangan balik. Sedangkan untuk Kapolres Jakarta Pusat, Kolonel Pol. Abubakar diperintahkan untuk mempergunakan seluruh kekuatan Brimob yang ada di Jakarta.

Pada tanggal 23 Juli 1996 pukul 22.00 WIB, di Cibubur sudah banyak berkumpul massa. Di samping itu terdapat unsur dari BIA dan Kodam.

Kolonel Samsiar, dan Letkol Soebhiono keduanya merupakan Paban I BIA, hadir pula dari unsur Kodam, yaitu Letkol Haryanto (As Intel Kodam) dan beberapa staf, dan Letkol Budi Permana (Kodam) dan dua orang stafnya sedang sibuk memasang "alat besi" di depan bemper Truck. Dari PDI terlihat; Lukman Mokoginta, Djeny Harso, Haermawati Taslim, dr. Mien Hendro, Sahala P. Sinaga, Romulus Sihombing, Harsoko Sudiro, H. Abdul Gani.

Pada saat itu juga ada pembicaran antara AWS dengan Sahala P. Sinaga. AWS menanyakan, "Siapa yang menyuruh massa ini datang?" Dijawab, " Ya ....urusan saya dengan *you* berbeda!". Kemudian, Lukman Mokoginta mengatakan, "Kenapa masalah Kantor tidak kita serahkan kepada ABRI, kenapa harus DPD (Dewan Pimpinan Daerah)PDI ?" Dijawab AWS, "Saya tidak ada urusan dengan DPD dan siapa yang meminta anda datang kemari?" Kemudian H. Abdul Gani menyahut, "Biar saja Lex.. Haryanto Kodam yang mengerjakan ini".

Kemudian AWS mengajak Sahala P . Sinaga menemui Kol. Haryanto, dan pada saat itu, Kol. Haryanto bertanya, "*You* mau bikin apa sih, bawa anak-anak dan perempuan kemari"? Di jawab AWS, "Tanya saja pada Sahala"! Tidak jauh dari Kol. Haryanto berdiri, terdapat Kol. Samsiar (BIA) bertanya pada AWS, " Ngapain As Intel (maksudnya Kol Haryanto) campur-campur"? Dijawab AWS, "Saya tidak ngerti". Lantas AWS berbalik bertanya pada Kol. Samsiar, "bagaimana pendapat Bung"? Kol. Samsiar jawab, "Jalan terus saja"! Maksudnya, agar AWS tetap menjalankan rencana dengan 200 massa yang

disiapkan. Tetapi ketika kontak dengan Brigjen Zacky Makarim melalui HP terhubung, belum sempat AWS menjelaskan situasi di lapangan, Brigjen Zacky Makarim, langsung perintahkan, “Sudah Lex... *Off* , bubarkan massa, dan besok bertemu di kantor BIA Kalibata”.

Akhirnya penyerangan yang akan dilakukan tanggal 23 Juli itu kemudian gagal, dan pembatalan itu menurut AWS karena sedang ada kunjungan dubes Amerika Serikat di Jakarta. Kalau di dilakukan pengambilalihan akan menimbulkan citra yang tidak baik di mata dunia internasional. Mengenai kegagalan penyerangan pada tanggal 23 Juli, terdapat kesimpangsiuran. Ada yang mengatakan karena ada yang membocorkan, yaitu Sena Bella yang melaporkan rencana itu ke pihak Megawati sehingga Direktur A BIA marah pada AWS.

Pada tanggal 24 Juli 1996, sekitar pukul 17.00 WIB, AWS sampai di kantor BIA Kalibata, dan bertemu dengan Brigjen Zacky Makarim. Dengan nada marah Brigjen Zacky Makarim, mengatakan “Ini martabat kamu, Lex, sekarang kau bisa buktikan tidak bahwa benar Bella pernah melaporkan kegiatan yang sedang dikerjakan kepada Megawati, karena pada tanggal 21 Juli 1996 pada waktu pertemuan di Cibubur”? Kemudian AWS balik bertanya, “Ini masalahnya apa” ? Selanjutnya AWS mengatakan, “ Persoalan tadi malam tidak ada hubungannya dengan Bella”. Kemudian, Brigjen Zacky Makarim, mengatakan, “Saya malam ini akan rapat di Kodam, dan Kodam menganggap *you* bohong”! “*You* bisa tidak menghadirkan orang yang

mengetahui Bella lapor pada Megawati”? Dijawab AWS, “Bisa”! Melalui telpon, pukul 21.00 WIB, Brigjen Zacky Makarim mengkontak AWS, dan menanyakan, “Bagaimana Lex... Sudah bisa *You* bawa orang itu”? Dijawab AWS, “Tidak bisa”! Sambil marah-marah Brigjen Zacky Makarim, mengatakan, Martabat kamu... Martabat BIA dipertaruhkan dengan laporan kamu”! AWS menjelaskan, bahwa , “tidak bisa menghadirkan orang yang memberi informasi perihal Bella kepada Megawati, karena pemberi informasi adalah orang yang hidup matinya bersama Megawati”. Selanjutnya, AWS diminta hadir di Kodam Jaya pada saat itu juga.

Di kantor Kodam, tepatnya di ruangan Kasdam Jaya, sudah menunggu Brigjen Soesilo Bambang Yudhoyono, Asisten Kodam Kol Haryanto, Kolonel Joko Santoso, Kapolres Jakarta Pusat Letkol Pol. Abubakar dan Brigjen Zacky Makarim. Kemudian, Brigjen Zacky Makarim bertanya, “Siapa sebenarnya yang lapor sama kamu, namanya, pekerjaannya dan mungkin tidak dibawa kemari sekarang juga .... ini martabat kamu... dan kamu dimana-mana mengatasnakaman BIA”? Dijawab AWS, “namanya Wakiman... *Ful timer* di sekretariat PDI dan hanya orang kecil... kalau dibawa kemari kan repot”. Kemudian Kasdam Jaya Brigjen Bambang Soesilo Yudhoyono, mengatakan, “Kalau kamu tidak mampu... Jangan menyalahkan orang lain, dan mulai saat ini *you* jangan campur tangan lagi“. Setelah itu, dalam rapat Brigjen Soesilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.(Tempo,1/8/2004)

Pada tanggal 26 Juli 1996, pukul 23.00 WIB, AWS menerima telpon dari Kol. Samsiar yang memerintahkan hadir di kantor BIA Kalibata. Di ruangan Kol Samsiar menjelaskan, bahwa tugasnya adalah memonitor dan mengatur fungsionaris DPP turut serta ke Jl. Diponegoro 58. Kemudian AWS menelpon Drs. Soeryadi untuk menanyakan apakah pengambilalihan jadi dilaksanakan. Dijawab Drs Soeryadi, bahwa pengambil alihan itu jadi dilaksanakan dan mengatakan bahwa ia sakit, dan menyarankan agar yang pergi Fatimah Achmad saja. Kemudian, AWS menyarankan Drs. Soeryadi untuk mengkontak Brigjen Zacky Makarim bahwa yang akan meggantikan dirinya adalah Fatimah Achmad karena ia sedang sakit.

Gambar 6
Penyerangan Kantor DPP PDI Pada Tanggal 27 Juli 1996
Sumber

Kemudian, Kol Samsiar berpikir, bahwa ini masalah berhantam tidak pantas perempuan yang hadir. Akhirnya Kol. Samsiar menelpon Buttu Hutapea untuk menerima penyerahan kantor DPP dan menelpon Fatimah Achmad untuk membatalkannya. Kol. Samsiar merasa tidak yakin Buttu Hutapea berani, maka langsung memerintahkan Letkol Leaonard dan Letkol Usamah datang ke Mess Pemda Sumatatera Utara di Jl. Jambu Jakarta Pusat dengan perintah untuk menjemput Buttu Hutapea untuk menerima penyerahan kantor DPP PDI. Selanjutnya AWS menghubungi Harsoko Sudiro dan Yahya Theo. Tetapi, Yahya Theo menjawab, “harus saya”? Akhirnya Harsoko Sudiro dan Yahya Theo sampai di kantor BIA pukul 02.00 WIB . Pukul 05.00 WIB, rombongan dari kantor BIA Kalibata berangkat yang rencana menuju kantor DPP PDI Jl Diponegoro 58 dengan mengendarai mobil Kijang milik Letkol Soebhiono.

Pada pukul 06.00 WIB, rombongan tiba di kantor Polsek Menteng , dan sudah menunggu Buttu Hutapea, Romulus dan Letkol Leonard dan Letkol Usyamah. Kemudian, dengan menggunakan mobil milik Romulus. Di kursi depan duduk Kapten Pol Dedi Tetra sebagai pengemudi, dan Kapten Pol Ir. Harianto, di kursi tengah Buttu Hutapea dan Yahya Theo, di kursi belakang AWS , Harsoko Sudiro dan Kol. Rusli. Mobil berjalan menyusuri Jl Surabaya, dan berhenti di perempatan antara Jl. Surabaya dan Jl. Diponegoro, tidak jauh dari kantor DPP PDI. Kemudian rombongan berjalan ke arah kantor DPP PDI, Buttu Hutapea langsung disambut oleh massa yang berkaos merah dengan

tulisan “pendukung PDI hasil Kongres Medan” yang diangkat ke atas. Yang mengangkat ke atas adalah Kol. Haryanto dan teman-temanya yang juga pakai kaos merah bersama-sama masuk ke halaman DPP PDI. Di tempat itu sudah ada Letkol Pol Abubakar, dan Letkol Rudi Pabandya Intel Kodam yang juga pakai kaos merah.

Gambar 7
Alur Komando Penyerangan Kantor PDI
Sumber : Konstruksi Yuridis Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas Tingkat Pusat

Dilihat dari alur komando penyerangan, yang paling bertanggung jawab tentu saja Presiden Soeharto. Tetapi dari beberapa keterangan pejabat militer yang terkait dengan hal itu menolak bahwa penyerangan kantor DPP PDI tersebut sebagai perintah Presiden Suharto. Bahkan Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung menyatakan tidak mengetahu peristiwa tersebut. Begitu juga dengan Kasum ABRI Letjen Soeyono, menyatakan tidak ikut dalam aksi tersebut. "Saya tidak pernah diajak bicara karena itu operasi sosial politik", katanya. Meski begitu, Soeyono melihat Sutiyoso seharusnya yang memikul tanggung jawab tragedy tersebut sebagai Panglima Kodam Jaya dan Panglima Komando Lapangan dan Operasi. (Tempo. 1/8/2004)

Kalau memahami alur rantai komando pengambilalihan kantor DPP PDI pada mata rantai paling bawah, seperti dalam gambar di atas. Jonathan Marpaung mengaku bahwa ia diminta oleh Alex Widya Siregar mengumpulkan massa untuk mengambilalih kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro. Massa dari pasar Induk Kramat Jati. kemudian dibawa ke Artha Graha dan diterima oleh Kol. Harianto. Begitu juga pengakuan Buyung, sehari-hari ia bekerja sebagai buruh di Pasar Induk Kramat Jati. Pada tanggal 26 Juli di panggil Jhoni Lubis untuk mengamankan acara dangdut oleh orang-orang yang berkumpul di tempat Parlaba-ekspedisi pasar Induk. Mereka dijanjikan uang makan dan rokok Rp.20.000 tiap orang. Setelah itu, Buyung bersama massa sebanyak tiga truck yang rencana akan dibawa ke Cibubur, tetapi mereka dibawa ke Gedung Artha Graha. Buyung sempat bertanya,

kenapa bisa dibawa ketempat itu. Mereka menginap semalam, dan paginya dibagi kaos dan ikat kepala dan pita berwarna merah putih dengan alasan untuk mengamankan pertunjukan dangdut. Tetapi, massa tidak dibawa ke pertunjukan itu, justeru di bawa ke Jl. Diponegaro. Sampai di sana sudah terjadi keributan dan kemudian disuruh turun dari truck. “Ternyata terjadi lempar melampar batu, hati kecil tidak terima, mau nonton dangdut ternyata perang”, kata Buyung. (Kompas, 27/7/2003)

Massa dari kelompok Cengkareng ditawari oleh Lettu Suharto untuk kerja di Sentul untuk pengamanan pembebasan tanah dengan gaji Rp.30.000/hari. Mereka diajak berkumpul pertama di Pulo Mas ternyata batal, kemudian berkumpul 20 orang dibawa ke Arta Graha. Mereka menginap semalam, dan paginya dibangunkan serta dibagi kaos dan ikat kepala berwarna merah oleh Lettu Suharto, kemudian diangkut dengan truck menuju Jl. Diponegoro, kantor DPP PDI. Lettu Suharto mendapat perintah dari Letkol. Budi Permana untuk mengumpulkan massa dari Cengkareng. Melalui Tanjung massa dikumpulkan di Pulo Mas, tetapi batal, kemudian kumpul massa yang kedua dan dibawa langsung ke Artha Graha. Sedagnkan Letkol Budi Permana mendapat perintah langsung dari Kol Harianto.

Kelompok massa Pasar Baru dihubungi oleh Letkol Budi Permana untuk kader di Rindam Jaya. Massa sekitar 100 orang untuk dibawa ke Rindam, ditengah jalan dibelokan ke Artha Graha. Kemudian dibagi kaos merah PDI

dan ikat kepala merah serta uang saku per orang Rp. 5.000. Selanjutnya dibawa ke Jl. Diponegoro untuk pengambilalihan kantor DPP PDI.

Kelompok Pemuda Pancasila diajak oleh Yan Rumbia untuk tugas pengamanan rumah, kemudian dibawa ke Artha Graha dibagikan kaos dan ikat kepala berwarna merah selanjutnya menuju Jl. Diponegoro kantor DPP PDI untuk pengambilalihan. Yan Rumbia mengakui membawa massa sebanyak 300 orang, 90 orang diataranya adalah massa Pemuda Pancasila (PP). Begitu juga dengan Kelompok Bus AJA dan Lanajaya mengangkut 128 personil Brigif berangkat dari Markas Brigif Kalisari dengan pakaian preman menuju Artha Graha.

Sementara itu, Yorrys Reweyai menyatakan bahwa pengerahan massa disekitar DPP PDI dilakukan atas perintah lisan aparat Komando Daerah Militer (Kodam Jaya). Namun, dia berargumentasi bahwa pengerahan massa itu disekitar DPP PDI yang terletak di Jl. Diponegoro 58, Jakarta, melainkan untuk mengamankan gedung sekolah, rumah Menetri Urusan Peranan Wanita saat itu- Mien Sugandhi, dan kedutaan Palestina.

Sebelum kasus 27 Jui 1996, Yoris diminta datang ke Kodam Jaya oleh Mayor Rudy (staf intel Kodam Jaya) untuk bertemu Kolonel Haryanto (Asisten Intel Kodam Jaya). Ketika itu, Haryanto memberitahukan kepada Yorrys bahwa aparat keamanan akan melakukan operasi pembubaran mimbar bebas di Jl. Diponegoro. Yorrys ditugasi menyiapkan 90 orang untuk

mengamankan tiga tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, sedagnkan mimbar bebas merupakan tugas aparat keamanan. (Kompas, 20/4/2000).

Sedangkan, Letkol Budi Purnama menerima perintah dari Kol. Inf. Harianto untuk mengumpulkan massa, kemudian menghubungi Lettu Suharto untuk mengerahkan massa dari Cengkareng, oleh H. Pratomo massa dikerahkan dari Johar Baru, kemudian dibawa ke Artha Graha selanjutnya menuju Diponegoro. Dalam kesaksiannya, Kol. Harianto mengakui memerintahkan Letkol Budi Purnama untuk mengumpulkan massa dan membawa ke Artha Graha.

3.8. Kisah Penyerang Dari Kampung Kapuk[12]

Kamis pagi, 25 Juli 1996, diperkampungan kumuh Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat muncul nama orang yang bernama Hartono dan Ragiman. Keduanya mendatangi Idang, salah seorang petugas keamanan kampung. Kepada Idang orang itu membutuhkan banyak orang untuk mengamankan 400 hektare tanah yang lagi dalam sengketa di Sentul, Bogor. Kalau ada yang mau, upahnya per malam Rp. 20 ribu. Bila siangnya, mau kerja, akan diberi imbalan Rp.70 ribu.

Tawaran itu sangat menggiurkan, akhirnya Idang mendatangi tetangganya dan menyodorkan tawaran itu. Kamis pagi itu juga, ada sekitar 50 orang menyediakan diri. Maklum, sebagian besar warga kampong itu buruh lepas yang selalu butuh pekerjaan. Selanjutnya, mereka disuruh berkumpul di

[12] Tulisan ini dikutip dari Tabloid Berita Mingguan ADIL edisi, 16-22 Oktober 1996 dengan berbagai modifikasi dari penulis

sebuah pasar, masih di Kelurahan Kapuk. Sekitar pukul 11.00 WIB siang, mereka digiring ke Cengkareng Kota. Ternyata di tempat itu sudah berkumpul 300-an orang. Saat terdengar azan Mahgrib mereka diangkut dengan tujuh kendaraan kecil, menuju arena balap sepeda, Pulomas, Jakarta Timur. Di tempat itu pula, mereka bergabung dengan 200 orang yang mengaku berasal dari Cibubur, Tanjung Priok, Kramatjati, Jelambar, Jembatan Besi dan Jembatan Tiga.

Di Pulo Mas hingga tengah malam tak kunjung komando. Apa yang mesti mereka kerjakan, karena tidak jelas. Mereka hanya duduk-duduk, saling bertanya asal masing-masing. "Sepertinya kami tidak diurus. Ya, akhirnya teman-teman banyak yang pulang" jelas Idang. Paginya jumat (26/7/1996), tinggal 30 orang yang tersisa. Masing-masing lantas diberi Rp.20 ribu untuk pulang termasuk Idang.

Jumat malam ada perintah lagi agar orang-orang yang tadinya ikut ke Pulomas berkumpul di Pasar. Idang dan puluhan temanya patuh. Sekitar pukul 22.00 WIB Jumat malam, dengan menggunakan delapan mobil kecil mereka diangkut ke Gedung Artha Graha, Jl. Jenderal Sudirman. Mereka dikumpulkan di *basement*, seperti di Pulomas, ditempat itu sudah berkumpul banyak orang. Menurut taksiran Idang sekitar 500-an orang,

Malam itu mereka dijamu makanan dan minuman secara berlebihan. Tetapi mereka tetap masih bertanya-tanya, kenapa sampai malam belum juga diberangkatkan ke lokasi tanah sengketa. Semua Cuma bisa menggerutu,

lantas tertidur. Sekitar pukul 04.00 WIB pagi tanggal 27 Juli 1996, mendadak semua dibangunkan. Disuruh berbaris, dan dibagi dalam delapan kelompok, dikawal oleh beberapa petugas yang tidak jelas kesatuan dan pangkatnya. “Saya heran, koq kami disuruh memakai kaos merah bertuliskan ”PDI Pendukung Kongres”, kata Yusuf. Begitu jam menunjuk angka 5.30 WIB pagi, terdengar perintah agar mereka naik ke tujuh truck dan satu bus. Konvoi segera melesat menembus pagi. “Kami semua bingung. Kalau mau jaga tanah saja masak mesti dikawal tentara, mana semua lampu merah diterjang lagi”, kata Yusuf.

Kendaraan yang membawanya akhirnya berhenti di Jl. Diponegoro. Jam menunjuk angka 06.00 WIB ketika itu. Segera mereka diperintahkan turun. Mereka disuruh berbaris dan berjalan mendekati kantor DPP PDI. Hingga sejauh itu, “Saya belum tahu apa yang mesti harus diperbuat. Wong perjanjiannya untuk menjaga tanah, kok! Ungkap Idang.

Ketika terdengar aba-aba, “Serbuuu”, perang batu pun antara barisan penyerbu dengan mereka yang ada di halaman kantor DPP terjadi. Dalam situasi tersebut salah rekan penyerbu bertanya pada seorang petugas. “Katanya disuruh menjaga tanah sengketa pak, koq dibawa kemari. Jawaban petugas sungguh mengecewakan. “Nglemparin batu kan kerja?” Kamu mau nuntut pemerintah, haa!”. Mendengar jawaban itu rekan Idang terdiam. Akhirnya, juga ikut melemparin batu pada orang yang di halaman kantor DPP PDI.

Pada saat itu, para penyerbu memang tidak ada pilihan. “Kami sebenarnya pengin lari saja. Tapi dibelakang kami jalan sudah tertutup barisan petugas lengkap dengan senjatanya. Semua serba salah. “Kalau diam di situ, pasti juga kena lempar batu. “Nasib bisa seperti Uju rekan mereka yang”, ujar Idang mengenang detik-detik penyerbuan itu. Mundur takut kena tembak, maju terus orang-orang yang di halaman kantor sudah siap mengacungkan tombak.

Akhirnya, banyak barisan penyerang roboh, diterjang batu. Termasuk Uju, penyerbu yang dikatakan tewas karena serangan jantung itu, mendadak roboh dan pingsan, setelah batu menerjang pungungnya. Situasi benar-benar menegangkan. “Semua yang berkaos merah mundur!” Terdengar suara menggema. Lantas barisan penyerbu yang berkaos merah mundur. Kemudian giliran pasukan yang berseragam hitam yang maju. “Pasukan itulah yang mendorong pagar kantor hinga roboh. Baru setelah itu pasukan yang berkaos merah diperintahkan menerobos masuk,’ ujar Sudjarwo.

Sekitar pukul 10.30 Wib ‘perang di Jl. Diponegoro “itu usai, begitu pasukan berkaos merah yang semula dihimpun di Artha Graha berhasil menguasai kantor. Pekik kemenangan terdengar, ketika Sekjen DPP PDI Kongres Medan Buttu Hutapea dipanggul dan kemudian berpidato. Tapi, dibalik pekik sorai kemenangan itu, ada rasa sedih dihati mereka. Sebagian mereka membawa Uju ke RS Ridwan Maureksa. Sebagian lagi mereka

pulang. Kaos merah yang mereka kenakan, mereka lepas terbakar bersama tumpukan spanduk.

"Kalau tahu mereka diajak berbuat seperti, dibayar sejuta pun mereka tidak mau", sesal Idang. Apalagi, dari mereka belum mendapat bayaran seperti yang dijanjikan. Mereka pantas menyesal. "Kami tidak kenal yang namanya Suryadi dan Buttu, tetapi kenapa kami disebut sebagai pendukung Suryadi,' katanya menyesal.

Gambar 8
Suasana Kantor DPP PDI pasca Penyerbuan
Sumber : Majalah Tempo

3.9. Pendanaan Pengambilalihan Kantor DPP PDI

Dalam pertemuan antara Pangab ABRI Jenderal Faisal Tanjung dengan Kelompok 16 pimpinan Fatimah Achmad pada tanggal 5 Juni 1996 di

Mabes ABRI dalam rangka Kongres, Pangab membantu dana sebesar Rp. 800 juta. Bantuan dana tersebut memang tidak pernah diberitakan oleh media massa. Tetapi, seperti diberitakan oleh harian Angkatan Bersenjata, edisi 6 Juni 1996, di Mabes ABRI Pangab ABRI dan Kassospol ABRI Mayjen Syarwan Hamid menerima rombongan panitia kongres pimpinan Fatimah Achmad. Dalam pernyataanya sehabis pertemuan itu, Fatimah Achmad menjelaskan, pemerintah akan memberi izin bagi penyelenggaraan kongres PDI seperti yang diminta panitia kongres, karena yang memintanya sudah mencapai jumlah mayoritas, dan itu sudah dengan sendirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sendiri. Sedangkan, Pangab sendiri dalam pernyataanya, bahwa soal PDI dan kongres kalau memang dkehendaki organisasi akan mem*back up*. (AB, 6/6/1996)

Masalah lain timbul ketika kantor DPP PDI masih dikuasai oleh massa pendukung Megawati, dan bagaimana dana untuk mengambilalih tersebut. Selepas pertemuan di Hotel Regent, AWS menyusun rencana pengambilalihan dan oleh Dir BIA Syamsir Siregar di bekali dana awal Rp. 300 juta. Untuk itu antara AWS, Mayjen Suwarno Adiwijoyo dan Kolonel Yahya membicarakan masalah dana. AWS berharap dana yang dibutuhkan untuk pengambialihan kantor DPP PDI bisa ditangulangi oleh Sospol ABRI. Tanggapan Mayjen Suwarno atas permintaan AWS, menyatakan, “Saya hanya akan menyetujui kalau yang membicarakan masalah dana ini adalah Drs Soeryadi dan Fatimah Achmad. Setelah mendapat penjelasan tersebut, akhirnya AWS menghubungi

Drs Soeryadi dan Fatimah Achmad, dan keesokan harinya pukul 13.00 WIB, AWS dan Drs Soeryadi berangkat dari Jl. Denpasar IV menuju kantor Mayjen Suwarno Adiwijoyo. Sedangkan Fatimah Achmad menyusul kemudian yang berangkat setelah rapat di kantor DPR. Di ruangan Mayjen Suwarno Adiwijoyo, menyatakan, "Ini ada rencana dari Pak AWS untuk pengambil alihan kantor DPP, apakah Pak Soeryadi mengetahui ?" Dijawab oleh Drs Soeryadi, "Ya saya mengetahuinya dan kita sudah memutuskan di dalam rapat DPP PDI di Jl. Denpasar IV, dan menurut Pak AWS biayanya dari Pak Warno (maksudnya dari MABES ABRI) Kemudian dijawab oleh Mayjen Suwarno, "Oke, kalau Pak Soeryadi tahu, saya akan bicarakan dengan Kassospol ABRI".

Setelah pertemuan di Hotel Danau Sunter, pada tanggal 20 Juli 1996, kira pukul 23.00 WIB, AWS dan Jonathan Marpaung menuju rumah Fatimah Achmad untuk mendapatkan dana dalam rangka untuk pertemuan dengan massa yang dikumpulkan di Kebon Raya Bogor. Saat tiba di rumah Fatimah Achmad, AWS mengatakan , "Saya perlu uang untuk biaya pengerahan massa sebesar Rp. 10 juta. Kemudian, Fatimah Achmad tanpa komentar apapun menyerahkan uang tersebut. Oleh AWS, uang diserahkan pada Jonathan Marpaung sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang diperuntukan untuk keperluan konsumsi, transport massa dan pembelian kaos merah dari Sahala P. Sinaga sebanyak 150 buah.

Setelah kembali dari Bogor, pada tanggal 22 Juli 1996, datang ke kantor BIA di Kalibata, dan bertemu dengan Kol. Samsiar, dan diberitahu bahwa

untuk mendukung dana operasional pengambil alihan kantor DPP PDI telah diturunkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan dana tersebut ada pada Fatimah Achmad. Pada hari itu juga, pada pukul 16.00 WIB, AWS menjumpai Fatimah Achmad di rumahnya di Kompleks DPR, yang sebelumnya Kolonel Samsiar sudah menelpon Fatimah Achmad dan memberitahu bahwa AWS akan datang untuk mengambil uang tersebut. Pada saat berjumpa dengan Fatimah Achmad, justeru ia mengatakan bahwa Rp. 50.000.000, bukan untuk pengambil alihan kantor DPP PDI, tetapi juteru untuk pembuatan pakaian Satgas PDI di seluruh Indonesia, dan menyatakan ada Rp. 10.000.000. Uang diterima AWS, dan kemudian dikembalikan lagi sebagai pelunasan hutang AWS pada waktu persiapan pengumpulan massa di Bogor. Uang dari Fatimah Achmad itu tidak cukup. Kemudian AWS kembali ke kantor BIA di Kalibata, dan bertemu dengan Kol. Samsiar untuk menghadap Brigjen Zacky Makarim, dan dijelaskan dana yang ada hanya Rp.10.000.000.

Kemudian AWS bersama Kol. Samsiar menghadap Brigjen Zacky Makarim dan menjelaskan tentang kekurangan dana. Brigjen Zacky Makarim menayakan pada pemegang kas ada berapa uang kas dan dijawab oleh pemegang uang kas hanya ada Rp. 20 juta. Uang itu kemudian dipegang oleh Kol. Samsiar dan diserahkan ke AWS. Selanjutnya uang itu digunakan membeli pita merah putih untuk 250 orang, dan pembelian peralatan, seperti Megaphone, gunting besar, uang makan massa, transport massa dan uang saku massa masing-masing sebesar Rp. 10 ribu.

Dari kesaksian yang disampaikan AWS mengenai dana, hampir semua pejabat militer yang dianggap terlibat dalam dalam kasus tersebut menolak kesaksian tersebut. Seperti yang yang dikatakan Mayjen (Purn) Suwarno Adiwijoyo yang waktu itu menjabat sebagai Assospol ABRI dalam wawancara pada majalah Ibukota Tajuk, mengatakan, "saya nggak kenal orang itu, Alex membuat skenario yang jika diikuti seperti runut dan logis, tetapi itu ngawur. Dana dari mana saya bisa mengeluarkan uang sebesar itu". (Majalah Tajuk, 25 Mei-7 Juni 2000)

3.10. Akhir Drama Politik Rezim Orde Baru

Ibarat sebuah panggung drama, realitas yang tersaji keterlibatan rezim Orde Baru dalam konflik internal PDI terbagi dalam dua panggung, yaitu panggung belakang dan pangung depan. Panggung belakang yang merupakan tempat skenario dibuat, para pemain menyiapkan diri untuk tampil dalam wilayah depan(Gofman,1959:114). Tetapi yang menarik dalam konflik internal PDI ini, panggung belakang juga merupakan tempat pertunjukan itu sendiri, seperti wilayah panggung depan[13] setiap aktor yang terlibat memainkan peran sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang membentuk jalinan cerita.

Pemaparan mengenai pola integrasi politik merupakan "realitas dalam" atau panggung belakang keterlibatan rezim Orde Baru dalam konflik internal PDI. Dalam integrasi dibagi dalam dua bagian, yaitu *pertama*, mengenai

[13] Untuk melihat wilayah panggung depan aparatur rezim Orde Baru dapat dilihat pada Bab V tentang "Pertarungan Simbolik Dalam Konflik Internal PDI".

perencanaaan kongres, dan *kedua*, tentang pengambilalihan kantor DPP PDI. Ketika dikonfimasi tentang keterlibatan dalam konflik internal PDI, umumnya aktor-aktor rezim Orde Baru mengakui keterlibatan mereka sebatas pada penyelenggaraan kongres PDI. Seperti dikatakan Syarwan Hamid, keterlibatannya hanya sampai Pada penyelenggaraan kongres PDI di Medan, dan itu karena mendapat masukan dari Mendagri Yogie S Memet bahwa kemelut PDI bisa diselesaikan hanya melalui kongres. (Kompas, 6/5/2000)

Sedangkan, untuk pengambilalihan yang berujung pada penyerangan di kantor DPP PDI merupakan wilayah abu-abu dan penuh misteri. Masing-masing aktor saling tuding dan mengelak terhadap peristiwa 27 Juli. Sutiyoso menjelaskan bahwa persitiwa 27 Juli merupakan bagian dari rangkaian permainan dan aksi politik penguasa pusat beserta komponen pendukungnya. Kemudian ia mempertanyakan, akan sangat tragis dan bertentangan dengan keadilan, jika resiko akibat aliran kebijakan politik elite penguasa (Pemerintah pusat dan komponen pendukungnya) semata-mata hanya menjadi tanggung jawab institusi dan orang per orang, pada pelaksana operasional pemerintah ditingkat bawah. (Kompas, 5/5/2000)

Ada yang mengkaitkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa 27 Juli adalah Presiden Soeharto. Hal itu disampaikan oleh Dimyati Hartono, perkembangan pemeriksaan perkara 27 Juli 1996 semakin mengkuatkan dugaan bahwa mantan Presiden Soeharto adalah *master mind* (tokoh intelektual) berbagai persoalan nasional, termasuk penyerbuan kantor

DPP PDI. (Kompas, 9/5/2000). Begitu juga dengan pernyataan dari Brigjen Zaky Makarim yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur A BIA, mengatakan, “menurut sepengetahuan saya, masalah ini merupakan kebijakan politik nasional saat itu, merupakan hasil keputusan dari Kongres PDI di Medan. Sikap pemerintah mendukung PDI Suryadi saat itu adalah legal. Adapun tindakan aparat untuk membantu memfungsikan kembali kantor DPP PDI dan menghentikan mimbar bebas adalah keputusan politik nasional (Rakor Polkam tanggal 25 Juli 1996). Sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan pekerjaan satuan-satuan pelaksana di tingkat bawah. [14] Pernyataan Zaky Makarim menyiratkan adanya pertanggunganjawaban kolektif. Di samping, ia menjelaskan bahwa seniornya di TNI harus menjelaskan secara tuntas pengambilalihan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, upaya ini diperlukan agar bawahannya tidak menjadi korban. Yang dimaksud dengan senior adalah mereka pimpinan TNI di luar intelejen yang membuat keputusan politik pemerintah saat itu. (Kompas, 1/5/2000).

Berbeda dengan kuasa hukum Sutiyoso, Indra Sahnun Lubis, SH berpendapat, orang yang harus bertanggung jawab dalam kasus penyerbuan kantor DPP PDI adalah mantan Presiden Soeharto dan mantan Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung. Soeharto tahu peristiwa itu, tidak melihat ada usaha dari Presiden untuk mencegah peristiwa itu. Presiden membiarkan kasus itu. (Kompas, 11 Mei 2000)

---

[14] BAP Pemeriksaan

Sebaliknya, Letjen (Purn) Soeyono menyatakan, bahwa pihak yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa adalah Pangdam Jaya Sutiyoso dan Syarwan Hamid. Dalam penjelasan lebih lanjut, mantan Kasum ABRI itu mengatakan, Sutiyoso harus bertanggung jawab atas peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI karena Panglima Kodam saat itu sebagai pemegang Komando Pelaksana Operasi, orang yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan seluruh DKI Jakarta. (Kompas, 10-11/5/2000)

Menanggapi pernyataan tersebut, Faisal Tanjung yang pada saat itu menjabat Panglima ABRI menyatakan, tidak pernah diperintah mantan Presiden Soeharto untuk melakukan pengambilalihan kantor DPP PDI. Selain itu, ia tidak pernah memberi perintah atau komando, satuan atau personel ABRI untuk melakukan penyerbuan. Bahkan, ia tidak pernah dilapori komando, staf atau personel ABRI tentang keturutsertaan pada pengambilalihan kantor DPP PDI. (Kompas, 27/ 5/2000)

Penegasan tentang ketidakterlibatan mantan Presiden Soeharto juga disampaikan oleh Hartono, mantan KSAD mengungkapkan bahwa pertemuan di rumah Soeharto tanggal 19 Juli 1996, tidak dibahas secara khusus soal rencana penyerbuan, tetapi Soeharto hanya minta agar mewaspadai terjadinya makar. (Kompas, 29/5/2000) Memang, pada tanggal 19 Juli di kediaman Presiden Soeharto Jl. Cendana No.8, Jakarta yang dihadiri semua petinggi ABRI, Jenderal Faisal Tanjung, KSAD Jenderal R. Hartono, Kasum Letjen Soeyono, Kassospol ABRI Mayjen Syarwan Hamid, Kapolri Jenderal Dibyo

Widodo, Pangkostrad Letjen Wiranto, Pangdam Jaya Mayjen Sutyoso, dan Kapolda Metro Jaya Mayjen Hamami Nata.

Menurut Kasum ABRI Letjen Soeyono, pertemuan itu membahas situasi setelah berlangsungnya kongres PDI di Medan yang disponsori pemerintah yang berakibat suhu politik Jakarat memanas dengan adanya mimbar bebas di kantor PDI yang digelar massa PDI pendukung Megawati. "Tetapi tidak ada perintah dari Pak Harto untuk melakukan pengambilalihan kantor PDI", katanya. Ia mengisyaratkan adanya inisiatif operasi yang diambil oleh sejumlah Jendral ABRI yang keliru menafsirkan petunjuk dari Cendana itu. (Tempo, 27/6/2000)

Saling tuduh dan lempar tanggung jawab mewarnai pemeriksaan para perwira ABRI dalam keterlibatan pada kasus pengambilalihan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Di satu pihak, ada kelompok yang mengkaitkan keterlibatan mantan Presiden Soeharto dalam kasus tersebut. Di pihak lain, menyatakan yang harus bertanggung jawab adalah Sutiyoso selaku penanggungjawab komando operasi terhadap keamanan Ibukota.

Silang sengketa dan saling lempar tanggung jawab diantara para perwira ABRI menyebabkan kasus 27 Juli tetap misterius. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PDI Suryadi bahwa DPP PDI hasil kongres di Medan sama sekali tidak terlibat penyerbuan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Baginya, kasus tersebut masih misterius. Yang berperan dalam penyerbuan itu adalah

aparat dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jakarta Raya yang dipimpin Sutiyoso. (Kompas, 6/5/2000).

Dalam penuturannya Alex Widya Siregar mengatakan, memang unsur ABRI terlibat, tetapi tidak semua tahu tentang operasi 27 Juli, hanya kalangan tertentu saja. Menurutnya, setelah ada rapat di Cendana, Sutiyoso datang ke rumahnya untuk meminta konsep pengambilalihan yang disusunnya. Setelah itu, rencana pengambilalihan secara intensif dilakukan.[15]

Mengurai siapa aktor-aktor yang terlibat dalam "kasus 27 Juli" memang sulit. Tetapi, akibat peristiwa tersebut, hasil penyelidikan Komnas HAM, sebanyak 5 orang korban meninggal dunia, 149 orang (baik sipil maupun aparat) luka-luka dan sebanyak 136 orang ditahan dan 23 orang masih hilang akibat peristiwa ini.[16]

Persidangan terhadap para tersangka kemudian dilakukan di Pengadilan Koneksitas yang dibentuk khusus untuk mengadili para tersangka peristiwa 27 Juli. Persidangan berlangsung sejak tanggal 23 Juni 2003 hingga 30 Desember 2003 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Ny. Hj. Rukmini, SH sebagai Hakim Ketua, Kol. TNI Soeharyono, SH dan H. Muhammad Daming S. Sanusi, SH, MA sebagai anggota.

Persidangan ini hanya mampu menggiring peristiwa 27 Juli sebagai peristiwa pidana biasa saja yaitu peristiwa pengrusakan secara bersama-sama terhadap kantor DPP PDI meski terbukti ada unsur keterlibatan aparat militer

---

[15] Wawancara dengan AWS, pada tgl 12 Desember 2016
[16] Laporan Komnas HAM tentang peristiwa 27 Juli 1996

dan intervensi pemerintah. Dalam proses persidangan di pengadilan ini, hakim hanya mampu membuktikan keterlibatan seorang buruh bernama Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan melemparkan batu ke Kantor PDI dan divonis selama 2 bulan 10 hari, sedangkan dua perwira militer yang diadili yaitu Kol CZI Budi Purnama (mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Letnan Satu (Inf) Suharto (mantan Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas.

Sejumlah nama lainnya yang menjadi tersangka namun tidak diproses hingga ke Pengadilan, yaitu : Letjen TNI Syarwan Hamid, Mayjen TNI Jacky Anwar Makarim, Brigjen TNI Syamsiar, Letjen TNI Sutiyoso, Mayjen Pol. Hamami Nata, Mayjen Pol. FX Sumardi, Brigjen Pol. Abubakar Nataprawira, Kolonel Inf. Harianto, Kolonel Inf. Tritamtomo, Serma Ratima, Letkol Julius.

BAB IV
KONFLIK INTERNAL SEBAGAI ARENA PERLAWANAN TERHADAP REZIM ORDE BARU

4.1. Pembentukan Kesadaran Massa PDI Pendukung Megawati

Bagian ini akan membahas komunikasi politik sebagai sarana perjuangan atas perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa konflik internal PDI tidak sekedar dipahami sebagai pertarungan antar aktor PDI, yaitu PDI pedukung Megawati dengan PDI Pro kongres, melainkan juga bentuk perjuangan perlawanan dari kelompok yang terpinggirkan terhadap rezim Orde Baru. Ini karena PDI pendukung Megawati yang sebenarnya berada pada posisi *legitimate* sebagai produk hasil Munas 1993 harus berhadapan dengan PDI Pro Kongres yang merupakan bentukan dari rezim Orba. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan kekuatan politik agar tetap terjamin kepentingan status quo.

Dalam perspektif tindakan komunikasi Habermas, PDI pendukung Megawati adalah *lifeworld-"*dunia kehidupan yang "terkolonialisasi" atau terdominasi oleh rezim Orde Baru. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa adanya tindakan komunikasi yang berlangsung pada kelompok PDI Megawati yang direpresentasikan sebagai dunia kehidupan. Dalam rasionalisasi dunia kehidupan menghasilkan tiga segi. *Pertama,* reproduksi kultural yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi baru yang muncul, tetap ada kelangsungan tradisi dan koherensi pengetahuan yang memadai untuk kebutuhan konsensus dalam praktek sehari-hari. *Kedua,* integrasi sosial yang

menjamin bahwa dalam situasi-situasi yang baru, koordinasi tindakan tetap terpelihara dengan sarana hubungan antarpribadi yang diatur secara legitim dan kekonstanan identitas-identitas kelompok tetap ada. *Ketiga*, sosialisasi yang menjamin bahwa dalam siatuasi-situasi baru, perolehan kemampuan umum untuk bertindak bagi generasi mendatang tetap terjamin dan penyelarasan sejarah hidup individu dan bentuk kehidupan kolektif tetap terpelihara. (Hardiman: 2003:130).

Berdasarkan pada rasionalisasi dunia kehidupan, menjadi pijakan dalam memahami kelompok PDI Megawati dalam melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Melalui konsep dunia kehidupan-*lifeworld*, fokus kajian bab ini akan dibahas mengenai PDI pendukung Megawati dalam melakukan reproduksi kultural, integrasi sosial dan sosialisasi yang membentuk tatanan yang legitim sebagai upaya perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Oleh karena itu, penjelasan mengenai bagaimana mereka mendefinisikan atau melakukan konstruksi terhadap realitas dalam membentuk kesadaran kritis, kemudian menjadikan gotong royong menjadi bagian integrasi sosial, serta sosialisasi yang dimanifestasikan dalam massa aksi sebagai komunikasi politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

4.1.1. Pemahaman Realitas Terhadap Rezim Orde Baru.

Syarat untuk terjadinya reproduksi sosial, seperti yang dikatakan Habermas adalah adanya “stock pengetahuan” yang sama, atau dalam

istilahnya Berger & Luchman adanya obyektivasi. Adanya pemahaman yang sama memungkinkan situasi percakapan ideal yang bisa menghasilkan gagasan-ide sebagai dasar dalam menentukan tindakan sosial, bahwa ide seseorang menempati posisi sentral dalam tindakan sosial karena semua kesatuan sosial yang kompleks (kebudayaan) merupakan hasil akumulasi tindakan sosial (Weber 1958). Oleh karena itu realitas politik yang merupakan hasil bentukan aktor-aktor kekuasaan Orde Baru menjadi upaya obyektivasi bagi PDI pendukung Megawati Sukarnoputri dalam mendefinisikan realitas.

Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa hampir tiga dasawarsa memberikan pemahaman yang berbeda-beda pada kelompok masyarakat. Bagi kelompok yang diuntungkan berpendapat bahwa rezim Orde Baru adalah sistem pemerintahan yang memberikan kemaslahatan sehingga perlu dijaga kestabilannya. Ini berbeda yang merasa terpinggirkan oleh sistem bahwa rezim tersebut serakah, korup, sering melakukan itimidasi terhadap kelompok yang dianggap sebagai penentang. PDI pendukung Megawati adalah kelompok yang merasa terpinggirkan oleh rezim. Untuk itu dengan adanya konflik internal PDI dimaknai sebagai upaya peminggiran terhadap pemimpin mereka. Keadaan ini membuka ruang kesadaran bagi pendukung dan simpatisan PDI Megawati, Dalam pernyataannya salah satu anggota kelompok FKK 124, AH menyatakan,

> Orientasi saya bahwa mengapa harus bergabung dengan Megawati, karena pada waktu itu perlu ada perubahan karena kalau tidak ada perubahan sama saja tidak ada kebebasan, kita melihat bahwa praktek politik Orde Baru penuh dengan intimidasi dan keserakahan. Rakyat

> tidak mempunyai ruang untuk menyatakan aspirasi dan mencari ruang keadilan. Hal itu menjadi dorongan untuk bergerak, saya dulu bukan PDI, saya sejak dulu sudah anti partai, bahwa presiden pada zaman Orde Baru itu bukan presiden, tetapi sama aja dengan kerajaan. [17]

Pendapat dari AH, tidak berbeda jauh dengan teman-temannya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga (FKK) 124. Forum ini dibentuk sebagai solidaritas "korban 27 Juli". Mereka adalah kelompok yang divonis pidana oleh rezim Orde baru karena mempertahankan kantor DPP PDI saat terjadi penyerangan pada 27 Juli 1996.

Umumnya mereka yang terlibat baik aktivis PDI pendukung Megawati maupun aktivis lain bahwa konflik internal yang melanda PDI merupakan hasil bentukan dari rekayasa pemerintah Orde Baru. Hal ini mempertegas keyakinan mereka pemerintah Orde Baru adalah bentuk kekuasaan yang hegemoni dan otoriter, seperti diungkapkan oleh aktivis Forum Komunikasi Gerakan Mahasiswa Nadhatul Ulama (FKGMNU), dan aktif dalam kegiatan mimbar bebas di kantor DPP PDI, AD menyatakan, , [18]

> Perlawanan politik atas rezim yang terstigmatisasi banget, teridentifikasi sebagai otoriter birokrasi, dimana Soeharto saat itu sangat sentral dari semua kepentingan politik. Itu yang aku lihat bagaimana gerakan 27 Juli, mereka yang dibilang naga merah. Saya punya pengalaman dengan

---

[17] Wawancara dengan AH (anggota kelompok 124). Awalnya ditangkap di Kantor DPP PDI Jl. Diponegoro dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya kemudian dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu. Di vonis 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan telah melanggar pasal 218 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Pada pukl 08.00 – 10.00 WIB di Jl. Diponegoro, kantor DPP PDI, ketika rombongan anggota PDI Soeryadi yang datang mengambil alih kantor DPP PDI Jl. Diponegor, No. 58, Jakarta Pusat, telah terjadi saling lempar batu antara terdakwa yang berada di dalam kantor DPP PDI tersebut dengan anggota –anggota PDI yang baru datang pada saat mereka masih berada di luar pagar. Terdakwa melakukan pelemparan ke arah orang-orang yang berada di luar pagar kantor DPP PDI, dengan menggunakan batu-batu yang mereka pungut di halaman kantor DPP PDI tersebut, antara lain mengenai 2 (dua) orang angota Polisi yang datang mengamankan kerusuhan tersebut, yaitu I Made Wiranata dan Edi Sularso. Lihat, Fahmi. F & Amirudin, *Mengadili Arus Bawah*, ElSAM, Jakarta, 1977.

[18] Wawancara dengan AD adalah aktivis prodemokrasi berasal dari Forum Komunikasi Gerakan Mahasiswa Nadhatul Ulama (FKGMNU) pada 23 Juli 2017

> naga hijau sebagai mobilitas perlawanan sosial terhadap rezim Soeharto dari komunitas kaum santri dan nadliyin--- terklasifikasi naga hijau adalah mobilisasi oposisi politik dikalangan santri. Sementara naga merah dihambat dari ruang kesadaran politik atau oposisi terhadap rezim yang datang dari kelompaok nasionalis .

Praktek politik yang *hegemonic* dan otoriter pada masa itu sudah menjadi *popular common sense* baik PDI Megawati dan aktivis pro demokrasi. Memang ada keinginan untuk melakukan perubahan. Tetapi, represitas rezim Orde Baru yang didukung oleh militer, keinginan perubahan yang disuarakan aktivis sebelumnya bagaikan riak-riak kecil yang justeru memperkuat kekuasaan rezim. Biasanya, represi yang dilakukan melalui dua cara, yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan secara hegemoni. Yang pertama digunakan secara nyata untuk mendapatkan kepatuhan masyarakat, baik melalui cara-cara penculikan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang tanpa proses hukum, maupun bentuk-bentuk penghilangan orang terhadap orang yang berani mengungkap secara kritis berbagai tindak kekerasan militer. Model kedua, dipergunakan baik terhadap kaum intelektual yang tidak loyal maupun yang bersikap sebagai oposisi terhadap kekuasaan rezim. (Nusa Bhakti:27-28:1999).

Mengenai ketidakpuasan terhadap pemeritah rezim Orde Baru sudah menjadi pendapat umum dikalangan aktivis mahasiswa. Bahkan bisa dikatakan sebagai *common enemy* bagi aktivis mahasiswa. Hal ini diungkapkan oleh US,

> “Bukan suatu hal yang baru kalau pada saat itu menyebut pemerintah Orde Baru sebagai rezim yang otoriter. Oleh karenanya kami membagun jaringan pers antar kampus yang dimaksudkan untuk mengkritisis dan membangun kesadaran. Konflik internal PDI dengan penggusuran

> Megawati menjadi media penyadaran. Kendati demikiaan, kasus Megawati yang berujung 27 Juli menjadi embrio lahirnya gerakan mahasiswa 1998"[19]

Itu sebabnya, konflik internal PDI yang meminggirkan Megawati dianggap "momentum" untuk melampiaskan ketidakpuasan terhadap rezim. Oleh karenanya, ketika pemerintah merestui 'kelompok 16" menyelenggarakan kongres PDI, gelombang dukungan terhadap Megawati dari berbagai pelosok penjuru Indonesia berdatangan.

Mengenai momentum ini, seperti yang disampaikan aktivis mahasiswa yang pada saat mimbar bebas, aktif di Posko Pemuda dan Mahasiswa,

> "Motivasi dengan teman-teman menjadikan itu sebagai momentum, di mana kami memandang Megawati sebagai simbol perlawanan Orde baru yang paling efektif untuk digunakan untuk menjatuhkan rezim Suharto pada saat itu. Nah, pada saat itu, sebelumnya sudah melakukan perlawanan terhadap Orde Baru sebelum peristiwa 96, bahkan sebelum tahun 93, kita kan melakukan konsolidasi sebelumnya, saya waktu itu aktif di GMNI melihat tindakan represif yang dilakukan rezim Orde Baru. Pada saat itu konsolidasi bukan sebatas lintas antar mahasiswa tetapi juga lintas dengan organisasi kemasyarakat yang lain. Pada saat itu kita berada pada kelompok Cipayung plus, sampai pada 98. Tahun 96, merupakan titik awal pergerakan untuk menumbangkan Orde Baru yang merupakan momentum akumulasi kekecewaan masyarakat . Jadi motivasi kita pada saat bergabung dalam kasus Megawati adalah ini momentum, untuk membangun gerakan yang lebih besar, memperluas eskalasi perlawanan dari berbagai elemen serta meluas ke seluruh daerah". [20]

Puncaknya, bersamaan dengan pembukaan kongres PDI di Medan pada tanggal 20 Juni 1996, massa PDI pendukung Megawati berbaur dengan aktivis

---

[19]Wawancara dengan US pada tamggal 20 Agustus. US adalah aktivis mahasiswa di Universitas Moestopa dan penggerak jaringan pers kampus dan salah satu pendiri Forum Komunikasi Seluruh Mahasiswa Jakarta (FKMSJ) yang berkontribusi pada gerakan reformasi tahun 1998.

[20] Wawancara dengan KY pada 8 Agustus 2017. KY adalah aktivis mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), aktif di Pos Pemuda dan Mahasiswa pada kegiatan Mimbar Bebas depan kantor DPP PDI. Di GMNI pada saat itu sebagai Kordinator Daerah DKI Jakarta.

pro demokrasi mengadakan aksi. Ribuan massa PDI yang datang dari sekitar Jabodetabek melakukan *Long March.* Massa berangkat dari Kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro menuju Taman Monas, melewati Jl. MH Thamrin, Jl. Imam Bondjol menuju kantor DPP PDI di Jl Diponegoro. Dalam aksi tersebut turut serta tokoh-tokoh PDI, seperti Manai Sophian, Yacob Nuwa Wea, Alexander Litay, Sukmawati dan anggota fraksi DPR RI pendukung Megawati. Aksi kemudian berkembang menjadi bentrokan antara massa pendukung Megawati dengan petugas keamanan.

Bentrokan itu bermula, ketika massa PDI pendukung Megawati berniat melakukan doa bersama di Taman Monas, tetapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, aparat akhirnya mengarahkan massa ke Jl. Merdeka Selatan dan kemudian ke Jl Merdeka Timur dan diblokir persis di depan Stasiun Gambir. Suasana tegang mulai berlangsung ketika massa PDI itu meminta agar jalan menuju ke kantor Depdagri dibuka. Para aparat keamanan sudah mencoba untuk persuasif agar massa PDI kembali dan tidak meneruskan langkahnya. Ada upaya juga dari Manai Sophian, Manggara Siahaan dan Alexander Litay juga berusaha membujuk massa PDI kembali ke kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro. Tetapi massa tetap memaksa membuka akses jalan ke Depdagri. Suasana tegang pun terjadi, akhirnya terjadi aksi saling dorong mendorong dan lemparan batu. Petugas keamanan sempat kewalahan dan mundur ke belakang, tak berapa lama kemudian mendapatkan bantuan dua panser dan satu kendaraan lapis baja untuk memukul balik massa. Pada saat

inilah banyak korban berjatuhan. Namun, bentrokan tidak berlangsung lama, aparat keamanan dengan cepat dapat mengusai keadaan dan memaksa massa PDI untuk kembali ke kantor DPP PDI. Akibat bentrokan tersebut, menurut Asisten Operasi Komando Garnisun Ibukota Kolonel Koesnadi dan Asisten Operasi Kodam Jaya Kolonel Ansyori Deas, menjelaskan sedikitnya 55 orang petugas keamanan luka-luka akibat bentrok dengan massa PDI. Sedangkan, dari pihak massa PDI, 14 orang mengalami luka parah, 10 orang mengalami luka ringan, dan 74 orang lainnya dilaporkan belum kembali ke regunya. (Kompas, 21/6/96)

Sebelumnya, bentuk penolakan terhadap pelaksanaan kongres PDI di Medan, tidak hanya di Jakarta, melainkan meluas diberbagai daerah dengan melakukan berbagai aksi, seperti yang dilakukan oleh DPD PDI Jawa Timur yang melakukan pawai keprihatinan sebagai pengganti rencana mereka yang akan melakukan *long march* dari Surabaya ke Jakarta, dukungan yang disampaikan baik melalui telpon maupun *faksimile*. Dukungan antara lain datang dari DPC-DPC Yogyakarta, DPD Sulawesi Selatan, seluruh DPC Riu. Bahkan, aksi dukungan dilakukan dengan menduduki kantor DPC atau DPD, seperti di Semarang, Jawa Tengah, kantor DPD PDI dikuasai oleh pendukung Megawati. Begitu juga di Lampung, kantor DPD PDI Lampung diduduki oleh massa PDI pendukung Megawati.

> "Dukungan itu spontan, kami juga heran begitu besar perhatian mereka terhadap PDI Megawati, kami tidak melakukan kontak dengan DPC lain. Mereka datang menyatakan simpati dan dukungan"[21]

[21] Wawancara dengan Audi Tambunan 12 September 2017

Konflik internal PDI, dan sikap pemerintah yang mendukung kelompok 16 serta meminggirkan Megawati mempertegas sikap masyarakat bahwa politik hegemoni yang dipraktekan rezim Orde Baru sudah mencapai titi jenuh. Masyarakat menginginkan perubahan, dan saluran yang tepat adalah pada diri Megawati Sukarnoputri. Sikap PDI Megawati yang terang-terangan melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan rezim dimaknai sebagai saluran untuk melakukan perubahan. Sebelumnya, gerakan-gerakan perubahan memang banyak dilakukan oleh aktivis prodemokrasi, tetapi represivitas Orde Baru, gerakan-gerakan prodemokrasi mati sebelum berkembang.

Dukungan terhadap Megawati bisa membesar, ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal tersebut, *pertama*, pemerintah rezim Orde Baru sudah berkurang legitimasinya, ini ditunjukan dengan berbagai aksi jalanan sebagai bentuk ungkapan ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintah selama ini. Ben Anderson mengatakan, "Pemerintah Orde Baru sudah *sowak*. "Tapi selama 25 tahun belakangan ini, adalah pemerintah yang paling kuat selama sejarah modern Indonesia. Pemerintah Orba itu kuat. Pemerintah Hindia Belanda juga kuat. Selain kuat, buasnya bukan main, melebihi pemerintah Hindia Belanda". (Suara Independen/2/7/96) *Kedua,* modal simbolis, yaitu kharisma Sukarno yang masih melekat pada pengikutnya dan menjadikan konflik internal menjadi momentum untuk perubahan.

Melihat Megawati bukanlah sosok yang sebelumnya dikenal sebagai ibu rumah tangga, melainkan telah melembaga dalam sosok nama besar ayahnya, Bung Karno. Peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke rezim Orde Baru, dipersepsi oleh para pendukung nasionalis Sukarno sebagai hasil konspirasi rezim Orde Baru dengan kroni-kroninya untuk menggulingkan Bung Karno. Apalagi, politik "desukarnoisasi" yang dijalankan Orde Baru membuat mereka semakin terpingirkan, baik yang ada di dalam sistem maupun yang di luar sistem kekuasaan Orde Baru.[22] Pengertian "di dalam" dan "di luar" sistem maksudanya mereka yang di luar sistem adalah kelompok nasionlis Sukarno yang tidak mau kompromi dengan rezim Orde Baru, sedangkan yang di dalam adalah mereka yang mau berkompromi dengan rezim Orde Baru. Kendati demikian, ketika melakukan kompromi, seperti pengalaman dialami oleh HS. Sebelum peristiwa 1965, ia adalah DPP Pleno PNI ASU, karena ia Ketua Umum GSNI. Tetapi, ketika bergabung dengan PDI dan berkali-kali menjadi juru kampanye nasional, namanya tidak pernah nongol dalam daftar calon legislatif. Ia menduga karena berasal dari unsur PNI ASU yang dikenal progresif. [23]

Oleh karenanya, ketika kesewenang-wenangan terhadap Megawati berlangsung, kelompok nasionalis Sukarno dengan sukarela bergabung dalam barisan pendukung PDI Megawati, dan menjadikan hal ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan politik.

---

[22] Wawancara dengan Manganar Pasaribu
[23] Wawancara dengan HS

4.1.2. Orientasi Kesadaran PDI Pendukung Megawati.

Weber (dalam Sztompka:273:2008) menjelaskan untuk memahami tindakan, tidak bisa dilepaskan dari motif-motif yang melatarbelakanginya. Untuk dalam membongkar motif dari tindakan seseorang bisa dilacak dari ide atau keyakinan yang dimilikinya. Melalui konsepsi Weber ini hendak menjelaskan sistem ide, keyakinan atau kaidah yang dimiliki oleh para pendukung PDI Megawati dalam melakukan perlawanan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau dibandingkan dengan aksi mimbar bebas yang lain yang biasanya cukup dilakukan sehari, tetapi mimbar bebas di kantor DPP PDI bertahan selama kurang lebih 40 hari, dan itupun berhenti karena ada penyerangan. Untuk memahami hal tersebut, maka arah kajian diletakan pada nilai atau keyakinan yang dikembangkan di mimbar bebas, dan hal tersebut terbentuk karena adanya pengaruh kesadaran yang dimiliki.

Berdasarkan pada data informan atas kesadaran yang dimiliki ketika mereka bergabung dalam mimbar bebas, maka berpijak pada pemikiran Schutz (dalam Kuswarno:167:2013) tentang *account* atau motif, yaitu in *order to motive*, yang merujuk pada masa datang dengan *because motive*, yang merujuk pada masa lalu, maka dalam pengkategorian tentang kesadaran dibedakan dengan kesadaran emosional dan kesadaran ideologis.

Pada lapisan kelompok kesadaran ideologis, konflik internal PDI merupakan arena atau momentum untuk memperluas gerakan perubahan, dan ada tatanan nilai tertentu yang sudah ada dan terbentuk yang hendak

diterapkan setelah perubahan. Kesadaran ideologis adalah bentuk kesadaran dalam melihat praktek politik Orde Baru dipersepsi tidak sesuai dengan kaidah atau nilai yang diyakininya. Biasanya, kelompok ini masih ada kaitan historis dengan Sukarno. Entah itu mantan aktivis PNI atau organisasi afiliasinya, dan dengan ataupun tanpa figur Megawati tetap melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Ini berbeda dengan mereka yang berada pada lapisan kesadaran emosional, lebih melihat sisi Megawati sebagai figure perubahan, tanpa melihat nilai seperti apa yang diterapkan setelah perubahan. Mereka datang ke mimbar bebas sebagai reaksi spontan atas peristiwa yang terjadi, dan menginginkan perubahan politik serta menempatkan Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Hal ini seperti diungkapkan oleh Sandra Pertasari, begitu mendengar konflik internal PDI yang meminggirkan Megawati, Sandra Fertasari meniatkan tekad untuk bergabung dengan pendukung Megawati. Ia adalah aktivis perempuan yang *full timer* di kantor DPP PDI selama mimbar bebas. Padahal, ia seorang wirausahawati dan isteri dari seorang perwira menengah polisi dan menjadi salah satu dari empat wanita yang ditahan dalam peristiwa penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.

> "Ya, bosan koq itu-itu melulu yang jadi presiden(Suharto), kita ingin perubahan, dan kebetulan ada figure Megawati yang waktu itu teraniaya oleh Orde Baru, makanya kita bersemangat bergabung dengan teman PDI Megawati" [24]

[24] Wawancara Sandra Fertasari pada 10 September 20017

Begitu juga AH bersama rekan-rekannya FKK 124 yang saat itu aktif di Posko Indonesia Timur dan bertindak sebagai Satgas PDI. Ia termasuk yang ditahan oleh aparat keamanan bersama 124 rekannya. Di vonis 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan telah melanggar pasal 218 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Ketertarikan untuk datang di kantor DPP PDI karena figure Megawati.

> "Saya melihat kondisi masyarakat banyak intimidasi, pengkerdilan dan tidak ada kebebasan pada waktu itu. Kami melihat ada salah satu figur dan figur perubahan adalah Megawati, makanya kami datang berbondong-bondong ke Diponegoro."[25]

Dari 11 informan yang diwawancarai, mengungkapkan alasan yang sama mengapa mereka bergabung dengan PDI Megawati. Mereka berpendapat perlu adanya perubahan politik, karena karena kekuasaan politik Orde Baru sudah dianggap terlalu lama, dan Megawati merupakan simbol dari perubahan itu.

Tetapi, mereka yang berada dalam lapisan kesadaran ideologis, konflik internal sebagai sarana untuk melakukan perubahan. Karyono, yang saat itu sebagai aktivis Kordinator Daerah (Korda) Gerakan Mahasiswa Nasionalis (GMNI) dan pada saat berlangsungnya mimbar bebas PDI aktif di Posko Pemuda Dan Mahasiswa, melihat bahwa konflik internal PDI yang melibatkan Megawati merupakan arena untuk memperluas gerakan perlawanan terhadap Orde Baru.

---

[25] Ibid,

> "Motivasi dengan teman-teman menjadikan itu sebagai momentum, di mana kami memandang Megawati sebagai simbol perlawanan Orde baru yang paling efektif untuk digunakan untuk menjatuhkan rezim Suharto pada saat itu. Nah, pada saat itu, sebelumnya sudah melakukan perlawanan terhadap Orde Baru sebelum peristiwa 96, bahkan sebelum tahun 93, kita kan melakukan konsolidasi sebelumnya, saya waktu itu aktif di GMNI melihat tindakan represif yang dilakukan rezim Orde Baru. Pada saat itu konsolidasi bukan sebatas lintas antar mahasiswa tetapi juga lintas dengan organisasi kemasyarakat yang lain. Pada saat itu kita berada pada kelompok Cipayung plus, sampai pada 98. Tahun 96, merupakan titik awal pergerakan untuk menumbangkan Orde Baru yang merupakan momentum akumulasi kekecewaan masyarakat . Jadi motivasi kita pada saat bergabung dalam kasus Megawati adalah ini momentum, untuk membangun gerakan yang lebih besar, memperluas eskalasi perlawanan dari berbagai elemen serta meluas ke seluruh daerah".[26]

Pada lapisan kesadaran ideologis, perlawanan terhadap rezim Orde Baru memang jauh sebelum ada konflik internal PDI. Pratek politik dominasi Orde Baru telah banyak meminggirkan partisipasi rakyat dan hanya menguntungkan segelintir elite kekuasaan membentuk kesadaran tatanan politik Orde Baru harus dirubah. Gerakan kesadaran dalam mengkritisi politik Orde Baru sudah sering mereka lakukan dengan membentuk forum kajian dan diskusi, baik di Jakarta maupun daerah lain. Seperti di akui oleh Pudjo Nugroho, pada saat kegiatan mimbar bebas berada di Posko Jakarta Timur, menjelaskan bahwa forum kajian atau diskusi yang dilakukan diberbagai tempat memberi kontribusi bagi meluasnya dukungan terhadap Megawati.

> "Kami sering melakukan kegiatan diskusi bersama-sama untuk selalu mengkritisi pemerintahan Orde baru, dan tentu arah kajian dikaitkan dengan pemikiran Sukarno, dan kegiatan ini tidak hanya di Tegalan, tetapi juga dilakukan di kantong-kantong nasionalis Sukarno lain"[27]

---

[26] Wawancara dengan Karyono, 8 Agustus 2017

[27] Wawancara PN, 10 Agustus 2017, PN aktif pada kegiatan mimbar bebas dan menempati di Posko Jakarta Timur

Begitu pula yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa nasionalis juga sering menggelar kegiatan diskusi. Tema kajiannya sama, tetapi lebih difokuskan pada pemikiran Sukarno sebagai pisau analisa dalam mengkritisi kebijakan Orde Baru.[28] Upaya lain yang dilakukan aktivis adalah dengan membentuk pers kampus. Bob Randilawe sebagai aktivis GMNI dan pada saat mimbar bebas aktif di Posko Pemuda dan Mahasiswa, menjelaskan,

> Kita bersama aktivis kampus lain membentuk pers kampus mahasiswa bersama Usmar Ismail (aktivis FKSMJ). Resolusinya, memberikan pemikiran-pemikiran kritis ke kampus-kampus yang ada di Jakarta , bahkan kita membentuk jaringan antar kota . Nah ! dari pemikiran-pemikiran yang tambah mengkristal, lalu timbul sikap kritis masyarakat supaya melakukan pembangkakangan.

Ditambahkan pula,

> "Keterlibatan di dalam mimbar bebas PDI, merupakan proses yang panjang , mimbar bebas boleh dibilang merupakan muara dimana syarat-syarat sudah mencukupi untuk mengadakan perlawanan, dimana perlawanan ada simbol, yaitu Megawati".

Pada lapisan kelompok kesadaran ideologis, konflik internal PDI merupakan arena untuk memperluas gerakan perubahan, dan ada tatanan nilai tertentu yang hendak diterapkan setelah perubahan. Keadaan inilah yang mempengaruhi dinamika kerja pada saat mimbar bebas berlangsung. Mimbar bebas yang dibuat di depan kantor DPP PDI, sebenarnya merupakan bentuk reaksi spontan dan untuk memperluas gerakan. Ekky sebagai aktivis mahasiswa nasionalis dan pada saat itu aktif di Posko Pemuda dan mahasiswa menjelaskan,

---

[28] Wawancara US pada 10 Agustus 2017

> "Peristiwa Gambir itu menambah spirit untuk melakukan konsolidasi politik. Massa itu harus ada —habis dipukul kemudian *kan* tidak mungkin duduk, diskusi di posko itu, tanpa ada gerakan politik. Ada kebiasaan teman-teman mahasiswa itu selalau membuat ruang-ruang kecil dengan memanfaatkan kevakuman. Berdirinya "pangung demokrasi" atau "mimbar bebas" karena ada kesepakatan dari hasil diskusi, ya mengalir, mengobrol lalu timbul untuk membuat panggung demokrasi, juga dimaksudkan sebagai bagian pendidikan politik para pendukung Megawati yang ada di sekitar kantor DPP PDI, makanya pada saat itu kami selalu membagi peran"

Melalui kegiatan mimbar bebas atau panggung demokrasi menjadi bagian untuk melakukan pendidikan politik. Bagi mereka yang berada dalam kesadaran emosional, mimbar bebas menjadi cakrawala pengetahuan politik, sehingga bisa mempertebal keyakinan dalam perjuangan. Seperti cerita Sandra Fertasari, kendati ia bertugas di dapur umum, setiap para fungsionaris DPP PDI berorasi di panggung demokrasi ia selalu mengikuti kegiatan tersebut. Baginya, mendengar orasi dari Megawati, Sukowaluyo, atau Sutardjo Suryoguritno membuat ia mampu memahami kenyataan politik yang berlangsung, walaupun awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga.[29]

Di lihat dari latar belakang, mereka yang berada dalam kesadaran ideologis masih ada keterkaitan dengan organisasi-organisasi yang pernah menjadi sayap Partai Nasional Indonesia (PNI), seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Siswa Nasional (GSNI), Persatuan Tani Nasional (PETANI), dan lain-lain. Sedang, massa pendukung yang berorientasi kesadaran emosional berasal dari berbagai elemen masyarakat

[29] Wawancara dengan Sandra Fertasari pada 10 September 20017

yang sudah jenuh dengan kekuasaan rezim Orde Baru. Mereka simpati pada Megawati dan menjadikan symbol perubahan

Namun demikian, perbedaan dalam orientasi kesadaran ketika dalam aktivitas mendukung Megawati baik dalam kegiatan mimbar bebas maupun aksi jalanan yang mereka lakukan tidak stratifikasi atau perbedaan dalam pembagian peran ataupun kerja. Yang terpenting adalah kemauan untuk berjuang bersama bahwa ada bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, dan hal itu yang harus dihadapi bersama. [30]

Untuk melihat lebih jelas orientasi kesadaran dapat dilihat dalam gambar berikut;

Gambar 9
Orientasi Kesadaran
Sumber : Modifikasi Penulis

4.2. Gotong Royong Sebagai Integrasi Sosial

[30] Wawancara dengan PN pada 10 September 20017

Istilah ideologi digunakan untuk menunjuk sistem ide, kepercayaan, ataupun sikap yang mendasari pandangan hidup suatu kelompok, kelas atau masyarakat. Dalam kaitanya dengan aktivitas massa pendukung PDI Megawati adanya nilai atau sikap yang dikembangkan dan mendasari interaksi mereka dalam melakukan perlawanan terhadap rezim. Dalam sub bab ini akan menelusuri massa PDI pendukung Megawati mengambangkan nilai-nilai gotong royong dalam aktivitas mereka, dan menempatkan gotong royong sebagai "situasi komunikasi ideal" dalam reproduksi sosial.

Dengan berdirinya mimbar bebas, konsekuensi kerja politik menjadi meluas. Untuk itu perlu adanya azas dalam mendinamisasi kerja dan memberi semangat-*"spirit"* perjuangan dalam perlawanan terhadap rezim. Azas ini merujuk pada nilai-nilai kebersamaan dalam bentuk tanggung jawab, pengabdian, maupun dalam pengambilan keputusan. AT menjelaskan,

> "Pada saat itu memang spontan, maksudnya untuk tetap mempertahankan kantor DPP PDI, tetapi dari hasil diskusi dengan teman-teman, maka dibikinlah "panggung demokrasi", dan kelanjutanya dengan semangat kebersamaan atau gotong royong dari semua PDI pendukung Megawati setiap problem bisa di atasi, termasuk logistik, kami tidak pernah kekurangan."[31]

Setiap hari aksi mimbar bebas yang dilakukan di depan kantar DPP PDI kelihatan rapi dalam kerja. Seperti di yang ditulis tabloid Ibukota, "naga-naganya memang ada panitia yang dengan militan mengorganisir perlawanan di segala lapisan masyarakat, paling tidak ada jadwal-jadwal aksi yang terencana rapi, ada piket untuk menjaga markas, ada penglolaan uang dari

[31] Wawancara dengan AT pada 10 Agustus 2017

donatur maupun sukarelawan. Tetapi, di samping, spontanitas dari masyarakat juga sangat besar untuk turut menyokong secara moral dan material, tercatat sudah berkarung-karung beras, sayur mayur, lauk pauk yang datang ke sekretariat DPP PDI, dan para wartawan dan simpatisan yang datang pun tak luput ditawari makan". (Suara Independen, 2/7/1996) Seperti diakui oleh AT

> "uang untuk membantu logistik, kami tidak masalah, banyak donatur yang menyumbang, dan kami juga membuka kotak dana di depan kantor DPP, hasilnya tiap hari dibuka ada puluhan juta rupiah jumlahnya" [32]

Tetapi ada suatu hal yang menarik menyangkut kotak dana, seperti yang diceritakan oleh Sandra Pertasari. Pada saat penyerangan, kondisi di kantor DPP PDI memang sedang dilanda kepanikan, bersamaan itu pula di dalam kantor sekretariat, Sandra mau menyelamatkan kontak dana yang belum dibuka. Biasanya, urusan membuka kotak dana adalah Gusti dari Posko Palembang yang juga bertindak sebagai bendahara di mimbar bebas. Tetapi, karena Sandra tidak membawa tas, maka uang puluhan juta dimasukan di ransel Ewal, wakil bendahara. Kemudian Ewal pergi dengan membawa ransel berisi uang. Waktu, ditanya Sandra, "Wal mau kemana?". Dijawab Ewal, "mau pergi ke situ sebentar". Kenyataannya Ewal terus menghilang. Ketika Sandra, digelandang ke Mapolda Jakarta bersama teman-teman yang lain , ia melihat Ewal sedang duduk sambil merokok, ketika berpapasan, Ewal melengos pura-pura tidak kenal. "Kurang ajar lu wal !", kata Sandra dalam

[32] Wawancara dengan AT pada 10 Agustus 2017

hati. Di ketahui, sebenarnya Ewal adalah seorang informan yang segaja disusupkan dan bekerja pada pihak PDI Suryadi.

Ada suasana yang berbeda yang mereka rasakan ketika berada di kantor DPP PDI dengan segala aktivitas, dan itu dijumpai ditempat lain. Salah satu anggota FKK 124 menjelaskan,

> "Selama kegiatan mimbar bebas kami merasakan suasana kebersamaan, tidak membedakan satu dengan yang lain. Dalam menjalankan aktivitas, dilakukan dengan kesadaran dan sesuai dengan peran masing-masing. [33]

Rasa kebersamaan itu bisa berlangsung karena mereka berangkat dari orientasi yang sama. Kendati, bisa saja muncul perbedaan dalam menjalankan aktivitas tetapi dengan adanya kebersamaan, perbedaan gotong royong

Semangat gotong-royong telah mendinamisir kerja politik dalam kegiatan mimbar bebas. Semua bentuk kegiatan selalu dibicarakan terlebih dahulu secara bersama. Begitu pula dalam pelaksanaan kerja atau kegiatan tidak ada pemaksaan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Perjuangan terhadap perubahan merupakan suatu pengabdian. Hal ini seperti diungkapkan SF,

> "Di situ kegotong royongannya kita sama-sama dalam perjuangan itu, dengan itu kita tidak melihat uang, misalnya mau ada pengerahan massa untuk aksi, mereka sudah siap tanpa ada pembayaran, mereka ikhlas batin jiwa raga untuk perubahan. Mereka siap siaga semua, mereka saling berangkulan untuk kerja sama, menggandeng tangan, jangan sampai Megawati itu diambil lagi-terlepas dari Megawati, kemenangan itu tidak boleh hilang dari Megawati lagi." [34]

---

[33] Wawancar dengan Sahrul.
[34] Wawancara dengan SF

Gotong-royong menjadi energi dalam membangun semangat perlawanan ditengah represitas politik Orde Baru. Mereka tidak mengharapkan pada bentuk imbalan yang sifatnya material, tetapi lebih pada membangun kebersamaan dalam melakukan perlawanan.

> "Gotong-royong, bukanlah hal baru bagi kawan-kawan aktivis nasionalis. Waktu awal pembentukan mimbar bebas, kegotong-royongan karakter kami dalam melakukan kerja politik, khususnya pada mimbar bebas. Kenyataannya, gotong royong sangat efektif dalam mengorginisir kerja perlawanan terhadap Orde Baru."[35]

Untuk itu perlu pengorganisasian dalam mendinamisir kerja politik agar aktivitas tidak mengarah pada bentuk-bentuk anarkhi. Kondisi ini tidak akan tercipta tanpa ada kesadaran para aktor massa PDI pendukung Megawati yang terlibat dan bersikap otonom. Seperti yang diungkapkan Ekky,

> Massa PDI Megawati yang berada di Jl Diponegoro sangat banyak dengan latar belakang yang beragam, tetapi kami dipersatukan oleh tujuan yang sama, yaitu ingin perubahan, dan tentu saja figur Megawati sebagai simbol. Kesadaran ini menjadi modal kami dalam melakukan aktivitas di mimbar bebas.[36]
> .

Kemandirian atau otonom tersebut penting karena mempengaruhi praktik aktor untuk membangun struktur. Kesadaran terbentuk kerena ada sesuatu yang tidak beres yang sedang berlangsung. Untuk itu harus ada tindakan untuk memperbaiki ketidakberesan tersebut. Realisasi dari tindakan itu adalah berbagai bentuk massa aksi yang direpresentasikan dalam beragam aktivitas. Mimbar bebas, aksi jalanan, rapat-rapat umum maupun aksi publistas dalam bentuk selebaran merupakan bagian aktivitas massa aksi.

---

[35] Wawancara dengan PJ
[36]Wawancara dengan Ekky

Institusi kedua dari gotong royong adalah adanya “interaksi”. Yaitu, suatu yang menghubungkan antara aktor melalui komunikasi. Dalam interaksi, secara simbolis orang mengkomunikasikan makna kepada orang lain yang terlibat. Orang lain menafsirkan simbol-simbol tersebut dan mengarahkan respon tindakan berdasarkan penafsiran mereka. (Mead dalam Ritzer &Goodman:396:2008) Gotong royong sebagai jaringan kolektivitas menempatkan interaksi dalam membentuk makna bagi tindakan mereka.

> Adanya kebersamaan di antara kami, maka tidak ada perasaan untuk diperintah atau memerintah. Ya namanya ….pengabdian. Jadi kita sama dan tahu peran masing-masing. [37]

Gotong royong tidak terbentuk apabila tidak ada interaksi diantara aktor-aktor yang sadar. Relasi komunikasi yang terbentuk bukan komunikasi strategis, yaitu yang mengandaikan pada suatu tindakan yang sudah ditentukan lebih dahulu dan seringkali tersembunyi. Orientasi yang dituju bukan pada kesepakatan atau pemahaman, melainkan hanya melaksanakan secara efektif rencana subyek terhadap pihak lain atau aktor lain. Berbeda, ketika gotong royong direlasikan dalam konteks tindakan komunikasi, orientasi ditujukan pada kesepahaman, saling pengertian. Dalam istilah Habermas, mencapai pengertian sama halnya dengan mencapai mufakat. Aktor-aktor yang terlibat bertindak otonom, semua menjadi subyek untuk mencapai pemahaman.

Ketiga, adanya “tujuan” merupakan upaya untuk merealisir kehendak. Gotong royong tidak bisa terbentuk apabila tidak ditentukan tujuan lebih dulu.

---

[37] Wawancara dengan Sandra Fertasari pada 10 September 2017

Tetapi dalam merumuskan tujuan bukan berdasarkan pada tindakan strategis, yaitu cara-cara yang efisien dan efektif mencapai tujuan, melainkan pada tindakan komunikasi yang berlandaskan pada musyawarah dan pemahaman bersama. Seperti yang dikatakan Bob R. Randilawe yang selalu menjadi kordinator lapangan dalam aksi jalanan, mengungkapkan,

> Saya pada waktu itu kordinator Posko Pemuda dan Mahasiswa. Jadi, penghubunglah, bagaimana agenda aksi kita diskusi-diskusikan, kita kompromikan dengan sikap DPP PDI Megawati, terus kita hasilkan aksi-aksi. Saya dulu memimpin aksi kain putih yang ditanda tangani sepanjang 3 kilometer. Pada saat itu saya yang menjadi Kordinator lapangan (Korlap).[38]

Dengan demikian, orientasi atau tujuan merupakan kehendak bersama. Dalam gotong royong, semua partisipan adalah subyek atas dirinya sendiri untuk menstruktur dan menginternalisasi dunia sosial sesuai dengan orientasi kesadaran partisipan. Yang menyatukan adalah adanya kesadaran bersama. Dalam istilah Habermas, gotong royong bisa jadi adalah nilai-nilai yang tumbuh dalam "*lifeworld*". Sebab, tilikan awal Habermas adalah masyarakat *polis* Yunani yang tumbuh dalam nilai-nilai kolektivitas.

Dengan demikian, bagi massa PDI pendukung Megawati, gotong royong dalam istilah Weber menjadi etos perlawanan yang menyemangati mereka untuk melakukan perubahan. Etos ini yang menyebabkan aktivitas mimbar bebas maupun aksi jalanan hingga bertahan begitu lama, kurang lebih 40 hari, dan berhenti karena ada penyerangan dari PDI Pro Kongres dan aparat keamanan rezim Orde Baru. Gotong royong, seperti yang dikatakan Bung

[38] Wawancara dengan Bob Randilawe pada 10 Agustus 2017

Karno dalam Pidato lahirnya Pancasila I Juni 1954 merupakan sari atau pencerminan nilai-nilai dalam Pancasila.

Semangat gotong royong tidak berhenti ketika melakukan mimbar bebas, dan ini terus berlanjut pasca peristiwa 27 juli 1996. Yakni, dengan pembentukan Posko gotong royong di setiap tempat. Pembentukan itu merupakan inisiatif PDI pendukung Megawati untuk menegaskan bahwa PDI merupakan partai rakyat. Pada tahun 1998, menjadi pemandangan biasa ketika disetiap tempat banyak didirikan posko gotong royong oleh warga PDI.

> "Pembentukan posko gotong royong sebagai bentuk artifisialnya sebenarnya hendak menyampaikan pesan bahwa gotong royong seharunys menjadi pilar utama dalam berpartai khususnya Partai demokrasi Indonesia-Perjuangan" [39]

Adanya posko gotong royong, setidaknya banyak memberi kontribusi pada PDI Megawati yang kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih suara mayoritas pada pemilihan umum 1999.

4.3. Komunikasi Politik Dalam Perlawanan Terhadap Rezim Orde Baru

4.3.1. Panggung Demokrasi (Mimbar Bebas) Sebagai Media Perlawanan Terhadap Rezim Orde Baru.

[39] Wawancara dengan EK

Setelah aksi demonstrasi di Gambir, mereka kembali ke kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro, dan banyak waktu untuk melakukan diskusi-diskusi. Mengharapkan keadilan dari pemerintah Orde Baru, tampak sia-sia karena bersamaan waktunya penyelenggaraan kongres PDI di Medan sedang dilaksanakan. Oleh karena tidak ada jalan lain alternatif yang tersisa, satu-satunya adalah penguasaan kantor DPP PDI. Mereka kemudian mendirikan mimbar bebas di halaman depan kantor DPP PDI. Di sekeliling mimbar bebas, didirikan Pos Komando (Posko) yang berasal dari DPC PDI Jakarta Raya maupun Posko perwakilan daerah, misalnya posko Indonesia Timur. Untuk menampung pemuda dan mahasiswa, maka dibentuk posko pemuda dan mahasiswa. Menurut Eky, aktivis dari posko Pemuda dan mahasiswa, mereka menyebut mimbar bebas tersebut dengan "panggung demokrasi". Dalam mimbar bebas tersebut, di isi dengan berbagai orasi dari fungsionaris DPP PDI pendukung Megawati ataupun aktivis lain yang prodemokrasi.[40]

Gambar 10
Megawati Berorasi Dalam
Mimbar Bebas di Kantor DPP

Di depan halaman kantor DPP PDI, dibangun "pangung demokrasi" sebagai tempat untuk melakukan orasi. Di sekeliling "panggung demokrasi"

[40] Wawancara dengan Ekky 27 Juli 2017

terdapat Posko (Pos komando) Satgas yang terbentuk dari berbagai wilayah. Posko tersebut adalah,

1. Posko Satgas Jakarta Selatan
2. Posko Satgas Jakarta Barat
3. Posko Satgas Jakarta Timur
4. Posko Satgas Jakarta Utara
5. Posko Satgas Jawa Tengah
6. Team khusus Satgas dibawah pimpinan Susilo Muslim dan dibawah dan dibawah perintah langsung oleh Suparlan (DPP PDI Megawati) dan Agung Imam Sumanto.
7. Posko Gabungan DPD Jawa Barat
8. Posko Gabungan Indonesia Timur (dibentuk Forum komunikasi Pemuda Indonesia Timur dengan ketua Baharudin)
9. Posko Gabungan Sumatera Utara.
10. Poska Pemuda dan Mahasiswa.[41]

[41] Laporan Antonius Ewal, Wa

Gambar : 11
Denah Halaman Kantor DPP PDI
Sumber : Modifakasi Penulis

Pembentukan mimbar bebas, sebenarnya merupakan refleksi dari kekecewaan terhadap pemerintah Orde Baru yang dinilai sewenang-wenang. Kebijakan yang lebih memihak pada penyelenggaraan kongres Medan menjadikan cerminan bagi mereka bahwa adanya arogansi kekuasaan yang dipraktekan pemerintah Orde Baru. Penguasaan kantor dan mimbar bebas adalah bentuk perlawanan terhadap arogansi tersebut.

> Peristiwa Gambir itu menambah spirit untuk melakukan konsolidasi. Massa itu harus ada *warming up*—habis dipukul kemudian duduk , diskusi . Ada kebiasaan teman-teman mahasiswa itu selalau membuat ruang-ruang kecil dengan memanfaatkan kevakuman. Berdirinya "pangung demokrasi" karena ada kesepakatan dari hasil diskusi --- Mereka yang tidak ada dilapangan, mereka suka berkumpul, kelompok yang sebenarnya di luar yang bawa tenda --- hasil diskusi--- maksudnya orang-orang yang disekitar DPP yang membela Megawati, makanya pada saat itu kami selalu membagi peran.[42]

[42] Waawancara dengan Ekky, 27 Juli 2017

Munculnya mimbar bebas tidak pernah direncanakan sebelumnya, terjadi spontan sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa. Melalui mimbar bebas ini menjadi arena untuk menumpahkan segala kekesalan maupun ketidakpuasaan yang sekian lama bisa diredam oleh kekuasaan represif penguasa. Mimbar bebas merupakan suatu fenomena yang anomali, karena aksi protes biasanya hanya dilakukan sekali dan itu hanya beberapa jam dalam sehari, seperti aksi demonstrasi atau aksi lainya yang dilakukan oleh aktivis prodemokrasi. Anomalitas terjadi, ketika mereka melakukan secara periodik dan bertahan lama.

> Pada saat itu sangat represif, kita untuk mengekpresikan politik dan lain-lain Itu kan .... peristiwa yang tidak diperkirakan muncul, itu kan bagi kita bisa menjadi momen, kalau disuruh untuk melakukan mobilisasi massa seperti itu tidak sanggup, apalagi menyuruh orang menginap berminggu-minggu, pasti tidak sanggup, itu fakta, artinya itu timbul dari seseorang Mega karena ada Sukarno, kalau kita bandingkan dengan Sri Bintang tidak mampu/ materinya tidak jelas.[43]

Faktor Megawati yang menyandang nama besar Sukarno sangat menentukan adanya mobilisasi massa yang besar. Sebelumnya, ada beberapa aktivis yang melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru, tetapi dukungan dan mobilisasi tidak sebesar pada Megawati. Penganiayaan terhadap Megawati sama halnya dengan penganiayaan terhadap Bung Karno. Selama pemerintahan Orde Baru, rezim ini memang tidak toleran dengan nama Sukarno. Munculnya Megawati berarti bangkitnya Sukarno. Pendukung Megawati adalah mereka anak muda yang masih ada kaitan historis dengan

---

[43] Ibid,

PNI yang mengalami pengalaman traumatasi dengan sikap Orde Baru pasca G.30.S. pada tahun 1965.

Dalam mimbar bebas tersebut tidak semua orang bisa berorasi. Ada pengaturan dan seleksi. Ini dilakukan untuk menghindari provokasi dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang berniat menunggangi gerakan.

> "Salah satu yang mengatur panggung (Suparlan)—kita mengusulkan pada teman-teman (Posko Pemuda Dan Mahasiswa). Posko yang non partai adalah kami, yang lain tidak ada, yang lain justeru dari daerah, seperti Jateng, Jatim, Kalimantan dan sebagainya, Indonesia bagian Timur." [44]

Pengaturan tersebut, memang bukan dimaksudkan untuk membatasi mereka yang ingin berpartisipasi. Dalam situasi saat itu, menurut Pudjo Nugroho, yang bertugas sebagai kordinator di Posko DPC PDI Jakarta Timur, mengatakan, "siapapun yang akan ikut dalam panggung demokrasi tidak akan di halangi, tetapi harus sesuai dengan agenda perjuangan kami".[45]

Mimbar bebas yang digelar pada halaman kantor DPP PDI di tengah sistem politik hegemoni yang dipraktekan pemerintah Orde Baru memang menyegarkan bagi para pendukung PDI Megawati maupun aktivis pro demokarsi untuk menyuarakan suara mereka yang selama ini terpinggirkan. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila tiap hari di sekitar kantor DPP PDI selalu penuh dengan para pengunjung untuk sekedar melihat ataupun mendengarkan orasi-orasi dari panggung demokrasi. Hal ini tentu tidak menyenangkan penguasa, bahkan tetangga dekat PDI, yaitu Partai Persatuan

---

[44] Ibid,
[45] Wawancara dengan Pudjo Nugroho, 28 Juli 2017

Pembangunan (PPP). Kantor sekretariat partai berlambang Kabah itu, memang berdampingan dengan kantor DPP PDI, merasa “panas dalam” akibat orasi dari panggung demokrasi dianggap melecehkan PPP. Pada saat orasi, pembicara mengeluarkan pernyataan, “bahwa PPP adalah Partai Pamong Praja, PPP adalah Partai Perempuan-Perempuan”. Sebelumnya, ada juga pembicara yang menyatakan, “PPP adalah Satgas Pemerintah karena berkaitan dengan sikap pimpinan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melarang anggotanya untuk tidak mau menandatangani pernyataan “keprihatinan I Juli”.

Akibat orasi panas tersebut, Wakil Sekjen DPP PPP H. Muhsin Bafadal memprotes keras mimbar bebas PDI karena beberapa pembicara melecehkan PPP. Selama ini pihaknya cukup bersabar dengan adanya mimbar bebas itu yang dirasa cukup mengganggu dalam kenyamanan bekerja. Hal ini karena sama-sama partai politik, sehingga bersikap toleran. Namun, kalau PPP dilecehkan ini yang membuat keberatan. “Kalau ABRI dan pemerintah disinggung-singgung kami tidak ambil pusing, tetapi kalau PPP yang dilecehkan, kami sulit menerimanya”, tegas H. Muhsin Bafadal. (Media Indonesia, 15/7/1996)

Permintaan maafpun segera disampaikan Wakil Sekjen DPP PDI Sukawaluyo melalui telpon. Kemudian, di panggung demokrasi Komandan Satgas DPP PDI Agung Sukirman meyampaikan permintaan maaf atas orasi yang berlangsung dan telah menyinggung Partai berlambang Kabah tersebut.

Rencananya, hari sabtu pada tangal 27 Juli 1996, akan hadir Gus Dur, tokoh NU dan Iwan Fals, seniman, akan tampil di acara pangung demokrasi. Tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena keburu ada penyerbuan dari PDI pendukung Suryadi dan aparat keamanan untuk mengambil alih kantor DPP PDI.[46]

4.4.2. Aksi Di luar Panggung Demokrasi.

Di samping kegiatan orasi yang dilakukan di "panggung demokrasi. Mereka juga melakukan kegiatan aksi di luar kantor DPP PDI. Tujuan dari aksi tersebut menurut Eky dari posko Pemuda dan Mahasiswa adalah untuk memperluas aksi dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat. Aksi-aksi di luar tersebut kebanyakan dilakukan karena tidak mendapatkan tempat di panggung demokrasi

> "Panggung demokrasikan sempit. Jadi, kalau ada keinginan mereka membuat aksi-aksi kesadaran dan memiliki dampak yang luas, maka mereka bikin di luar kantor DPP PDI. Seperti yang dilakukan mbak Sukmawati yang melakukan orasi di depan Megaria".

Mengenai agenda aksi, tentang isu dan bentuk aksi tiap hari memang selalu berubah, seperti yang dikatakan Bob Randilawe,

> "Saya pada waktu itu kordinator Posko Pemuda dan Mahasiswa. Jadi, penghubunglah, bagaimana agenda diskusi-diskusi, kita kompromikan dengan sikap DPP PDI Megawati, terus kita hasilkan aksi-aksi. Saya dulu memimpin aksi kain putih yang ditanda tangani sepanjang 3 kilometer. Pada saat itu saya yang menjadi Kordinator lapangan (Korlap)."[47]

---

[46] Wawancara dengan Eky 27, Juli 2017
[47] Wawancara dengan Bob Randilawe, 6 Agustus 2017

Aksi kain putih sepanjang 3 kilometer untuk ditandatangani diarak dari Tugu Proklamasi sampai depan Taman Ismail Marzuki. Di samping, dalam kain itu juga tertulis kalimat-kalimat yang bisa memerahkan penguasa, seperti "Faisal Tanjung, Yogie SM, Syarwan Hamid Trio Penjilat", atau "Suryadi Doyan Duiit", atau "Fatimah Cewek Matree".

Sebaiknya, untuk Megawati dengan sendirinya banyak pujian, seperti Megawati Kita selalu Bersama" atau "Mbak Mega Maju Terus", atau Megawati *For President*". Aksi itu dimaksudkan sebagai seruan pada penguasa bahwa perjuangan mereka bersih dan murni tanpa ada pihak-pihak yang menunggangi. Aksi yang diikuti oleh ratusan aktivis dan PDI pendukung Megawati memang membuat terganggu arus lalu lintas, dan tiap kali ada aksi memang demikian keadaannya. Selama kantor DPP PDI dalam penguasaan PDI pendukung Megawati, jalan-jalan di sekitar yang mengarah ke Jl. Diponegoro menjadi tempat untuk melakukan aksi, seperti Jl. Proklamasi, Salemba, Jl. Cikini depan Taman Ismail Marzuki dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) merupakan arena bagi para aktivis maupun PDI pendukung Megawati melakukan aksi.

Pada tanggal 18 Juli 1996, aksi kembali dilakukan. Selain masih membentangkan kain putih, juga diramaikan dengan aksi yang disebut "Aksi Damai Seribu Bunga". Para pendukung Megawati, baik warga PDI sendiri maupun dari luar PDI yang simpati pada Mega menyebar ke ruas-ruas jalan Diponegoro dan Salemba. Mereka membagikan bunga kepada masyarakat

yang lewat, termasuk pada aparat polisi. Aksi itu sebenarnya sebagai reaksi atas sinyalemen pemerintah Orde Baru, bahwa kegiatan mimbr bebas sudah disusupi oleh PKI.

> "Lalu, aksi 1000 bunga , bawa aksi bunga itu untuk merangkul kelas menengah. Sepanjang Jl. Diponegoro itu kita bagi bunga-bunga dari UI sampai RS Corolus. Kenapa bunga ? Supaya memberi warna sejuk "*flower revolution".* Aksi ini bukan aksi kelas, tetapi aksi kemanusiaan karena pada waktu itu sudah masuk isu, bahwa kelompok "setan gundul " sudah menunggangi mimbar bebas di Diponegoro. Suharto sudah keluarkan isu tersebut. Hal itu untuk menghapus stigma tersebut - dengan melakukan aksi damai, dan kita juga pikirin untuk bisa bikin aksi-aksi yang bisa memwakili semua golongan".

Aksi yang dilakukan di luar kantor DPP PDI, membuat penguasa gerah karena telah mengganggu ketertiban lalu lintas. Atas keadaan tersebut, Megawati Sukarnoputri sebagai ketua DPP PDI, menyatakan minta maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan terhadap kelancaran perjalanan dan kegiatan yang diakibatkan aksi massa PDI pendukung Megawati. Namun, DPP PDI pimpinan Megawati menyatakan keberatannya kalau pihknya dijadikan kambing hitam dari segala aksi protes itu. Semua pihak turut bertanggung jawab atas terjadinya aksi protes akhir-akhir ini, termasuk pemerintah yang memungkinkan Kongres PDI di Medan 20-22 Juni 1996 terlaksana. Di samping itu, PDI Megawati juga mengatakan bahwa kongres PDI di Medan tidak konstitusional, ilegal dan tidak sah, ia juga menyayangkan sikap pemerintah atas dukungan terhadap kongres itu dan mengakui hasil kongres, termasuk DPP PDI Suryadi. (Kompas 1/7/1996)

Aksi protes PDI pendukung Megawati pasca kongres di Medan, tidak hanya di Jakarta. Tetapi juga meluas di daerah, seperti yang dilakukan PDI pendukung Megawati di Semarang. Ribuan massa PDI yang menamakan Front Pendukung Megawati melakukan *long march* keliling kota. Mereka membawa spanduk besar berwarna merah dan poster dan pamflet yang berisikan tulisan mendukung Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Umum PDI dan menolak hasil kongres di Medan. Begitu pula yang terjadi di Bandung, PDI pendukung Megawati maupun aktivis mengadakan mimbar bebas dengan mengambil tempat di Lapangan Gasibu (depan kantor Gubernur) dan kampus Universitas Padjajaran yang meluas hingga Plaza Monumen Perjuangan Jabar. Beberapa orang ditangkap pihak keamanan setelah terlibat bentrok fisik. Di Medan, lima mahasiswa Universitas Katolik St. Thomas melakukan aksi mogok makan sebagai ungkapan protes terhadap pelaksanaan dan direstuinya kongres PDI di Medan. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi mogok makan sampai pemerintah menyatakan kongres Medan tidak sah. (Republika, 24/7/96).

Kenyataannya, kian hari dukungan dari berbagai daerah dengan melakukan aksi protes eskalasinya makin meningkat. Hal ini membuat gerah pemerintah Orde Baru, banyak pejabat Orde Baru mengungkapkan dengan nada kecaman terhadap aksi-aksi protes pendukung Megawati yang terus meluas. Misalnya dari Pangab ABRI Jenderal Faisal Tanjung, dalam pernyataannya mengingatkan kepada aparat keamanan akan melarang setiap kegiatan mimbar bebas yang digelar oleh Orsospol tertentu, jika hal tersebut

melanggar hukum yang berlaku dan mengganggu stabilitas keamanan.(AB, 25/7/96)

Reaksi ini terus berlanjut dari Pangab ABRI tersebut, mulai dari ancaman untuk membubarkan aksi mimbar bebas sampai pada indikasi upaya makar. Pernyataaan Pangab tersebut, didasarkan pada meningkatnya berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan di luar area mimbar bebas. Isu aksi sudah bukan lagi kontroversi kongres PDI, melainkan sudah meluas pada kritik praktek penyelenggaraan negara. Para peserta aksi pun tidak terbatas pada pedukung Megawati, tetapi sudah melibatkan berbagai aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Puncaknya, ketika pengurus DPP PDI hasil kongres Medan diterima Presiden Soeharto di Istana Negara. Rombongan pengurus terdiri dari Fatimah Achmad, Ismunandar, Sumario, Panagian Siregar, Yahya Theo, Buttu Hutapea, Harsoko Sudiro, Jupri dan Popo Sunandar Harun. Semula semua pengurus DPP PDI yang berjumlah 39 orang akan hadir di Istana Negara, karena keterbatasan tempat yang diterima hanya 11 orang dan dipimpin Ketua Umum Suryadi, Penerimaan Presiden memberi sinyal bahwa pemerintah hanya mengakui DPP PDI yang dipimpin oleh Suryadi. Hal yang menarik dari pertemuan tersebut adalah pernyataan dari Presiden Soeharto yang mengingatkan segenap jajaran PDI untuk mewaspadai adanya “setan gundul” yakni pihak-pihak atau kekuatan-kekuatan tertentu anti pemerintah yang melakukan pemboncengan atau menunggangi masalah yang terjadi di tubuh

PDI. Lebih lanjut, Presiden Soeharto mengatakan, “Kelompok-kelompok anti pemerintah itu telah mengelompokkan diri dalam sebuah aliansi bernama MARI, kekuatan ini telah mengkumandangkan “Catur Tura” yang terdiri dari empat tuntutan, yakni turunkan harga, berantas korupsi dan kolusi, tindak pemecah-belah bangsa serta cabut lima paket UU dibidang politik” (AB, 25/7/1996)

“Setan gundul” merupakan penyebutan khas Presiden Soeharto terhadap eksponen Partai Komunis Indonesia (PKI), seperti menganalogikan dengan persitiwa 1965, ada persamaan-persamaan terhadap proses yang terjadi dalam bentuk penggalangan massa. Persoalan PDI sudah “ditunggangi” dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok yang anti terhadap pemerintah rezim Orde.

4.3.3. Aksi Publisitas: Penyebaran Selebaran Politik

Aksi yang juga penting dalam kegiatan mimbar bebas dan aksi jalanan adalah aksi publisitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga mengatasnamakan pribadi, yaitu dengan penyebaran selebaran. Habermas (3:2012) menjelaskan subyek dari publisitas adalah publik sebagai pembawa opini publik sehingga fungsi sebagai penilai kritis inilah yang membuat ciri publik dalam memberikan pendapat menjadi bermakna. Begitu juga dengan Burke, hanya publisitas di dalam dan di luar parlemen saja yang dapat mengamankan kelangsungan perdebatan politik kritis beserta fungsi-

fungsinya, dengan mengubah dominasi dari masalah kemauan menjadi masalah rasio. (dalam Habermas:144:2012)

Mengikuti kedua pemikiran di atas, melalui aksi publisitas dimaksudkan sebagai bahan perdebatan kritis untuk membongkar praktek-praktek dominasi rezim. Pada kegiatan mimbar bebas di depan kantor DPP PDI, siapapun bebas untuk menyebarkan berbagai selebaran yang jelas isinnya adalah protes atas penyelenggaran Kongres PDI di Medan maupun menghujat pemerintah rezim Orde Baru.

> "Siapapun bisa menyebarkan selebaran, pihak penyelenggara mimbar bebas tidak bisa melarang hal tersebut. Bahkan bukan saja selebaran, tetapi juga gambar Bung Karno maupun Megawati dalam ukuran sedang maupun besar bertebaran di sekitar area mimbar bebas. [48]

Selebaran-selebaran dalam bentuk fotocopy yang terketik rapi maupun tulisan tangan seperti *grafiti* muncul begitu saja di sela-sela aktivitas mimbar bebas. Selebaran itu menambah maraknya aktivitas mimbar bebas dan merupakan bentuk komunikasi politik bentuk lain yang merupakan ungkapan kekesalan terhadap rezim yang bertahun-tahun terpendam. Bagi yang awam politik, selebaran itu bisa menjadi media pencerahan dan menambah keyakinan mereka untuk tetap berjuang. Hal ini seperti diakui oleh Sandra,

> "Selebaran itu selalu ada ketika aktivitas mimbar bebas. Ya kalau ada kita bagikan-bagikan aja pada siapa yang hadir disitu. Siapa yang bikin kita ngak tahu, tetapi kalau dilihat isinya, pasti yang bikin simpati dengan perjuangan kita. Sedikit banyak memberi pengetahuan kita tentang praktek rezim Orde Baru. Oh. selama ini rezim Suharto banyak hal yang disembunyikan".

---

[48]Wawancara dengan Pudjo Nugroho,

Melalui selebaran, bagi yang tidak puas dengan pemerintah rezim Orde Baru menjadi kesempatan untuk meluapkan segala kekecewaan yang selama itu mereka rasakan. Mereka bebas menumpahkan apa saja, tanpa rasa takut, dibaca atau tidak bukan masalah yang terpenting ekspresi kekecewaan yang mengendap selama ini bisa dikeluarkan.

Dalam sejarah, selebaran-selebaran menjadi menjadi media komunikasi yang efektif menyampaikan pesan. Misalnya, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang bermula dari upacara sederhana, bisa tersebar luas salah satunya karena peran selebaran, yang waktu itu kebetulan Adam Malik yang bekerja di kantor berita Jepang "Domei" mencetak pengumuman Proklamasi dan kemudian disebarluaskan. Alhasil proklamasi Indonesia akhirnya bisa tersebar luas.

Berikut ini bentuk selebaran yang beredar,

Sumber : Dokumen pribadi

Gambar 12
Selebaran I
Sumber : Dokumen pribadi

itik terhadap pemerintahan Orde Baru yang yang diidentikan dengan pemerintahan milter yang dipimpin oleh Jenderal Suharto sebagai pemerintahan yang korup dan berbagai praktek kekerasan yang dilakukan. Negara dianggap sebagai sarang korupsi, kolusi dan nepotisme, juga praktek kekerasan yang dilakukan negara, seperti yang berlangsung di Nipah, Jenggawah, dan Kedungombo merupakan dosa-dosa yang dilakukan negara di bawah pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru juga dituduh sebagai pelaku kudeta pemerintahan Sukarno, pembunuh Subeno, Jenderal Yani dan Sultan HB IX. Subeno yang dimaksud adalah Hadi Subeno yang merupakan Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (PNI). Tokoh karismatik PNI meninggal tahun 1971. Peristiwa yang dialami Presiden Sukarno tahun 1965 lalu, seperti berlaku juga pada penggusuran terhadap Megawati melalui Kongres Medan. Untuk itu akan mendukung Megawati sepenuhnya yang dimetaforakan dengan istilah sampai “kiamat”. Berdasarkan isi, diduga penyusun selebaran adalah orang nasionalis Sukarnois.

Dengan mengutip pernyataan Prof Sahetapy, “demontrasi adalah fenomena demokrasi”. Pengutipan itu dimaksudkan bahwa demonstrasi yang saat ini berlangsung merupakan hal yang wajar sebagai sebuah sistem yang demokratis. Pengutipan itu dimaksudkan sebagai pesan untuk solusi terhadap kondisi pemerintah rezim Orde Baru yang hegemonic.

KU B-UDAK R-EKAYASA I-NTIMI-DASI

DIPUBLIKASIKAN!

Harian Umum **Pelita** Independen

Kesatuan, Kedamaian dan Kebahagiaan Ummat

MBAH LIEM IMAM PURA DUKUNG MEGA.

Banteng Solo-Semarang juga Turun-

Atas Megawati

Kaum Muda NU Dukung Mega;

"Mereka membawa berbagai spanduk besar. Di antaranya bertuliskan: "Megakali, "Atau Tidak Sama Sekali", "Lebih baik Kehilangan 800 Kursi" ketimbang Kehilangan "Megawati dan Jutaan Massa PDI".

Mendagri:

Fatimah:

Pemerintah

Soerjadi:

ABRI—ELIT POLITIK

Omong Kosong

BAJINGAN POLITIK!

Presiden

Soeharto

Kudeta

Berdarah!

Bung Karno

GEMASSI

KINI SAATNYA COKRO MANGGI LINGAN!

1965

20.000.000.—

NYAWA MELAYANG

Gambar 13
Selebaran II
Sumber :Dokumen pribadi

Dengan menggunakan logo “Harian Pelita” selebaran banyak ditulis kalimat-kalimat yang provokatif yang mendeskreditkan ABRI sebagai suatu kepanjangan bahwa ABRI sebagai alat untuk mengitimidasi rakyat. Dalam selebaran itu juga menyampaikan pesan bahwa penggusuran Megawati merupakan konspirasi dari PDI pendukung Kongres, yaitu Suryadi dan Fatimah Achmad dengan aparatur pemerintah, seperti Mendagri, ABRI yang digambarkan sebagai penjahat politik. Kondisi tersebut mengingatkan tentang situasi 1965 yang menuduh Soeharto mengkudeta presiden Sukarno yang menelan banyak korban jiwa. Sekarang (saat itu 1996) saat untuk melakukan perubahan yang ditulis dengan istilah “cokromanggilingan”. Selebaran itu juga menjelaskan dukungan dari kelompok Islam, yaitu pemuda NU dan tokoh NU yang disebut dengan mbah Imampuro.

Dari berbagai tulisan tangan dalam selebaran di atas, dapat disampaikan makna bahwa penggusuran Megawati sebagai Ketua Umum PDI dengan adanya Kongres IV Medan merupakan upaya konspirasi yang dilakukan oleh ABRI dan pemerintah, dalam hal ini Mendagri sebagai pembina politik, dan Suryadi dan Fatimah sebagai pihak PDI. Akibat dari penggusuran itu munculnya dukungan terhadap Megawati, dan dukungan itu ditunjukan dari berbagai daerah dan kalangan. Rekayasa yang dilakukan ABRI, elite

pemerintah dan PDI Soeryadi merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia dari penjahat politik. Penggusuran Megawati ini merefleksikan seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Suharto pada tahun 1965 yang juga melengserkan Bung Karno dengan mengorbankan 20 juta jiwa sebagai tumbal politik. Untuk itu saatnya yang tepat untuk melakukan perubahan politik.

Gambar 14
Selebaran III
Sumber: Dokumen Pribadi

Selebaran di atas hendak menjelaskan analogi dari Supersemar yang diplesetkan untuk menghujat presiden Suharto sebagai penjahat perusak manusia yang rakus uang serta menyamakan presiden Suharto sebagai kepala batu, bukan kepala Negara. Begitu pula dalam menjalankan kekuasaanya Suharto adalah orang yang serakah dan sewenang-wenang atau otoriter. Sama halnya dengan ABRI yang sumpah Saptamarga harus di abdikan pada rakyat tapi berubah pengabdianya pada uang, seperti Edy Tansil yang korupsi trilyunan rupiah sebagai pejabat yang bejat menyengsarakan rakyat.

Makna yang bisa dijelaskan dari selebaran tersebut adalah ada dua aktor yang disoroti yaitu Suharto dan ABRI. Suharto mulai kariernya sebagai presiden bermodalkan sebuah surat sakti yang bernama Supersemar. Melalui surat itu menjadi legitimasi untuk menjalankan kekuasaaan yang dinilai sewenang-wenang dan berlebihan dalam menumpuk harta. Begitu juga ABRI yang mestinya berjuang demi mempertahankan sumpah Sapta Marga, ternyata perjuangannya hanya diperuntukan untuk mencari kekayaan dengan jalan melakukan korupsi. Yang dimetaforakan seperti Edy Tansil yang terkenal dengan mega korupsi sampai trilyunan rupiah.

Kenyataanya, dalam literature tentang politik militer di Indonesia, menjelaskan Suharto dalam menjalankan kekuasaan menempatkan ABRI bagi perisai kekuasaanya. Keadaan ini bertahan lebih dari tiga dekade, dan berakhir ketika reformasi lahir.

Pendukung Gerakan Tanda Tangan Darah Berlanjut

rang. Namun karena mendapat pengawalan ketat aparat, akhirnya urung untuk turun ke jalan. Padahal mereka sudah siap untuk terjun ke jalan-jalan protokol di Semarang, dengan menggunakan tujuh mobil terbuka dan ratusan kendaraan sepeda motor.

Karena tidak diizinkan turun ke jalan, mereka kemudian duduk lesehap di halaman stadion Diponegoro Semarang, dengan mengibar-kibarkan bendera merah bergambar kepala banteng.

Kuasai kantor

Arus bawah PDI Yogyakarta kemarin kembali menguasai kantor DPP PDI DIY Jalan

ga mulai berkumpul sekitar pukul 10.00 WIB. Tak banyak gerakan yang mereka lakukan selain menggerutu atas perlakuan warga PDI pro kongres Medan. Salah seorang Banra asal Jetis mengaku amat geram atas perlakuan pihak eksternal, yang berada di balik kekiaruhan partai banteng.

Sedangkan Sy Endang Soedjonoworo, salah satu Wakil Ketua DPD PDI DIY, di kantor DPD PDI DIY menyatakan keharanannya, kenapa warga PDI bisa mendadak menjadi kaya raya.

Ia menyindir para pendukung kongres, "Wah rupanya hebat ya PDI itu. Nggak perlu 'ngemis-

ran bertuliskan Makyo, menurut gal dunia", Minggu (23/6) kemarin. Diduga, lelayu tersebut dibuat oleh kalangan PDI arus bawah.

Dalam lelayu yang disebarkan ke pers itu disebutkan, Makyo dikabarkan telah meninggal Sabtu, 22 Juni 1996 pukul 03.30. "Karena itu bila semasa hidupnya, almarhum mempunyai banyak kesalahan, kami segenap keluarga mohon maaf," demikian bunyi lelayu berbahasa Jawa yang dikirim ke Harian *Berita* Minggu (23/6).

Diduga, Senin ini, massa PDI Solo kembali akan kembali membuat aksi mengecam Makyo, serta hasil kongres PDI di Medan.

G.OLONG
O.RANG
L.OBA.
K.HIANATI

Sumber : Dokumen pribadi

Selebaran di atas, lebih banyak menulis tentang kondisi partai politik,

Gambar 15

k Selebaran IV PDI, diawali dengan klipingan

Sumber : Dokumen Pribadi

b arah yang dilakukan pendukung

Megawati. Bagian lain menghujat aparat pemerintah yang terlibat dalam

penyelenggaraan Kongres IV Medan, dan Bosofi Sudirman yang juga mempunyai andil dalam konflik internal PDI, namanya dibuat plesetan. Begitu juga, dengan Suryadi dan Fatimah Achmad aktor utama penyelenggara Kongres Medan sebagai bunglon dan pelacur. Di sisi lain juga menyebut tokoh-tokoh yang dikenal sebagai oposisi terhadap pemerintah, seperti Ali Sadikin, Sumitro dan AH Nasution serta Sri Bintang Pamungkas sebagai pemimpin untuk perubahan. Golkar pun tidak lepas menjadi sorotan dengan mengatakan sebagai kumpulan orang serakah yang mengkhianati rakyat.

Selebaran itu bisa dimaknai bahwa adanya keinginan untuk melakukan perubahan politik. Rekayasa kongres Medan dan penggusuran Megawati menjadi menjadi bukti nyata bahwa kekuasaan politik telah digunakan sewenang-wenang. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk men*delegitimasi* kekuasaan rezim Orde Baru dengan mendukung perjuangan Megawati . Di samping itu dalam konteks perubahan politik itu menyodorkan pemimpin alternatif yang bisa mewadahi aspirasi mereka.

KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

Sebuah Kongres Tanpa Tujuan
Oleh Dr Riswandha Imawan

Pendukung Mega Pawai di Se

Semisal Bulik Megawati itu,bukan Putera Bung Karno,TRIO (Pemerintah-Abri-Elit Politik-sekaligus Presiden)tidak akan ambil posing terhadap PDI.Namun karena Bulik Mega,maka TRIO, tersebut sangat keberatan dan kepentingan.Mengapa?????????

Presiden Sukarno,dikhianati secara busuk dan licik,oleh pendongkolnya sekarang(baca penggantinya).Dengan isue2 Dewan Jendral Vs.Cakrabirawa(Pasukan Bung Karno),lantas Dewan Revolusi Vs.Dewan Jendral-Lantas PKI memberontak,yang terachir... PNI ASU.(Alisastromijoyo dan Ir.Surachman)yang sebenarnya,untuk MRETHELI kekuatan Bung Karno.Setelah bagai batang tanpa a

RAKYAT YG MENJADI HAKIM
NITA ADILI SEMUA DUNIA!
YG IKUT KONGRES MEDAN
MUSUHMU BUKAN MEGAWATI-SUKAR NO. TAPI : RAKYAT.
FATIMAH-YOGI.M

Gambar 16
Selebaran V
Sumber : Dokumen Pribadi

Dalam selebaran itu ada beberapa pesan utama yang hendak disampaikan. Yaitu, kongres PDI Medan, pengadilan rakyat, Megawati digusur sama halnya Suharto kudeta Sukarno, ABRI alat kekuasaan yang dikerdilkan, dan saatnya untuk perubahan. Oleh karena makna dalam selebaran itu menyampaikan suatu pesan bahwa untuk mengadili aktor-aktor yang terlibat dalam kongres Medan. Kongres itu dilakukan tanpa kepastian tujuan dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang diperlihatkan rezim penguasa dan oknum PDI.

Mereka yang terlibat dalam kongres Medan adalah musuh yang harus diadili. Menurutnya, rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi dengan menyebut “rakyat sebagai Hakim”.

Penyebab mengapa Megawati di gusur dari kepemimpinan PDI, karena ada keterkaitan dengan Bung Karno. Pengusuran Megawati, seperti peristiwa sejarah yang berulang yang menimpa Bung Karno dulu telah dikudeta oleh penggantinya sekarang, yaitu Suharto. Selama pemerintahan ABRI yang seharusnya membela rakyat justeru melindungi kekuasaan rezim Orba. Pemerintah Orde Baru selama 30 tahun dianggap banyak merugikan rakyat. Untuk itu mereka menginginkan perubahan, dan menempatkan Megawati sebagai pimpinan. Oleh karena segala upaya untuk menggusur Megawati dari pimpinan PDI, mereka siap untuk membela.

"Warga PDI Diadu Layaknya Banteng"

KUBURAN. 10. MILIARD UANG RAKYAT. KORUPSI - PRESIDEN BUNGKAR AEEE.

Dr Amien Rais Soal Kongres PDI:

Campur Tangan Ekstern

A-LAT.
B-UDAK.
R-EKAYASA.
I-NTERNAL

DIBYO WIDODO

sana Harian DPD PDI DIY, R Soeprapto, kepada KR, di kantor DPD PDI DIY.

Tim itu, kata R Soeprapto, juga memantapkan pembentukan kepengurusan yang baru. "Nama-nama calon yang duduk di kepengurusan sudah masuk," ujarnya.

Soeprapto juga memuji penyesalan salah seorang peserta Kongres Medan yang hadir di Kantor DPD PDI DIY. Peserta itu, kata R Soeprapto, yakni Y Sunardi yang menceritakan kronologi kongres. Y Sunardi, kata Soeprapto, kemudian menandatangani kertas segel yang berisi penolakan atas hasil Kongres PDI Medan dan tetap setia kepada Megawati.

"Tim Pelaksana Harian DPD PDI ini juga telah mengajukan daftar calon anggota DPR. Batas masuknya daftar terakhir 10 Juli 1996," katanya.

...an, akan berdampak situasi Pemilu 1997 mendatang.

Sementara itu, fungsionaris DPC PDI Kodya Semarang Mardyo menyatakan, aktivis PDI Kodya Semarang pro Mega tetap melakukan gugatan kepada fungsionaris yang dinilai telah mengatasnamakan DPC berangkat ke Kongres Medan. "Hanya saja tidak sekarang."

? UANG DANA REVOLUSI (12) TRILIUN DERUSAK

CHADIWIJAYA.

Gambar 17
Selebaran VI
Sumber : Dokumen Pribadi

dengan judul besar, “Warga PDI Diadu Layaknya Banteng”. Tulisan tersebut, hendak menyampaikan pesan bahwa kondisi PDi saat ini merupakan hasil dari rekayasa pemerintah. Nama Basofi Sudirman, mengindikasikan penulis selebaran itu tahu salah satu sebab munculnya kongres karena masalah PDI di Jawa Timur yang berlarut-larut. Permasalahan itu akhirnya berkembang, dan kemudian menjadi obyek rekayasa aparatur Orde Baru yang disebut sebagai sekumpulan kera untuk mengadakan kongres. Kutipan terhadap pernyataan Amin Rais merupakan penegasan terhadap praktek rekayasa tersebut.

Selebaran itu juga menyebut, bahwa Orde Baru adalah rezim yang korup yang merusak bangsa, dan menganggap ABRI sebagai alat kekuasaan yang diperalat rezim Orde Baru untuk melakukan rekayasa-rekayasa politik. Kata "ABRI" di plesetkan dengan "Alat Budak Rekayasa Internal". Padahal tugas utama adalah menjaga keamanan bukan sekedar alat dari suatu rezim.

Dalam hal ini ada beberapa aktor yang dikritisi dalam selebaran tersebut, yaitu Suharto, dan aparatur Orde Baru, seperti Syarwan Hamid, Faisal Tanjung, dan Mendagri. Sedangkan PDI Pro Kongres, aktornya adalah Suryadi dan Fatimah Ahmad yang dianggap mempunyai kontribusi besar terhadap penyelenggaraan kongres. Aktor-aktor yang merekayasa kongres di cap sebagai orang yang bermoral menyimpang.

PANCASILA AUUD.45
INTUK PEMERAH BI-
BIR MELULU. ABRI
SEKARANG DUKUNG:
PRESIDEN DAN ANAK!
NYA, KONGLONGNERAT
ELIT. POLITIK BAJING
AN. PEMUDA BANYAK
NGANGEUR-PETANI-
SAMBAT PUPUK MAHAL
PAJAK TINGGI. GABAH
DISAINGI BERAS KETAN
LUAR NEGERI-KINI:

Gambar 18
Selebaran VII
Sumber: Dokumen Pribadi

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 19
Tema Aksi Publisitas
Sumber : Olahan

4.4.3. Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Perlawanan Megawati terhadap rezim Orde Baru, telah menginspirasi berbagai kalangan. Dalam pandangan awam, tindakan Megawati dinilai sangat berani di tengah represitas politik yang dijakankan Orba. Sebelumnya, mereka yang berani bertindak kritis terhadap rezim Orba pasti akan mengalami pengalaman yang tidak mengenakan, bisa berupa intimidasi, pengisolasian ataupun peminggiran. Sikap te ABRI Korupsi gikuti keinginan rezim Orba mendorong berbagai eleman masyarakat untuk bertindak

Momentum Perubahan

serupa dan memberi dukungan. Salah satunya adalah Majelis Rakyat Indonesia (MARI). Wadah ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Ketuanya Ridwan Saidi, MARI dibentuk untuk menguatkan sektor sipil. (Suara Independen, II/7/96)

Dalam hal ini, pemerintah Orde Baru menyebut Majelis Rakyat Indonesia (MARI) yang merupakan aliansi dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Orkemas), LSM, dan kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Yang disebutnya juga sebagai aliansi "pelangi" atau "Nasakom" seperti pada zaman Sukarno. Alasannya, dalam aliansi tersebut terdapat unsur-unsur yang bergerakan karena kepentingan agama, juga ada yang berusaha berusaha mengembangkan paham kebangsaan atau nasionalisme, tetapi juga ada yang sama sekali tidak mengakui atau berpegangan pada Pancasila alias komunis.(AB, 27 /7/1996)

Tuduhan terhadap MARI yang dikatakan menungangi PDI Megawati, Ridwan Saidi, Ketua MARI mengatakan,

> Itu adalah usaha memisahkan PDI dengan kelompok rakyat yang selama ini tak berhasil dilakukan. Mereka ingin mengisolasi masalah PDI menjadi masalah intern saja. Mereka tak ingin ada *conection* antara masalah PDI dengan demokrasi.Tapi dalam soal ini, antara pimpinan PDI dan MARI ada *understanding*. Tak bisa dipecah belah. (Suara Independen, II/7/96)

Pembentukan MARI berlangsung pada tanggal 24 Juni melalui satu pertemuan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan LSM, tetapi deklarasi atau peresmiannya dilakukan pada 1 Juli 1996 bertempat di kantor Yayasan

Lembaga Bantuan hukum Indonesia (YLBHI). Dewan Pimpinan terdiri dari dua jenjang, masing-masing Dewan pengarah dan Dewan pelaksana, Susunan pengurus Majelis Rakyat Indonesia,

Dewan Pengarah : - Mukhtar Pakpahan (SBSI), Jopie Lasut (PUDI), Drs. Mulyana W. Kusuma (FLBHI), Bambang Widjayanto (YLBHI), Daulat Tobing (Laskar ARH),Supardan (Partisipasi Kristen), Rachmad Nasidik (Pijar Indonesia), Ir. Farid Rasyid (Masyumi Baru), Sunardi SH (GRM),Pius Lustrilanang (Aldera), Imam Samsudin (YSI), Sunarkhe (Persatuan Nasional Indonesia), Takdir (FKIMJ), Suroto (Forjun), Aries Nandarika (Fosjun),Leonardo (Perinia),Indah Dita Sari (PPBI), Budhiman Sudjatmiko (PRD), Budhi (STN), Desmond (LBH Nusantara), Andi Arief (SMID), Agustina (SPR), Ida Tuharea (APDI), H.J. Princen (LPHAM), Banbin Argapura (SRI), Herman (FKPR).

Dewan Pelaksana : - Ridwan Saidi dari Masyumi, (Ketua)Agustina dari Aldera, Drs Djatikusumo dari Persatuan Nasional Indonesia, Meilani dan Garda Sembiring (SMID), Rekson Silaban (SBSI), Sukmawati Sukarnoputri (GRM), Jimmy (FKGMNU), Mochtar Sindang (MPKR).

Pada rapat pertama, 24 juni 1996, dihadiri oleh lebih dari 50 orang yang terdiri dari wakil-wakil Ormas dan LSM Rapat dipimpin oleh Ridwan Saidi (Masyumi Baru) membahas langkah-langkah lanjutan dalam rangka menghadapi situasi politik di tanah air, terutama sebagai upaya mendukung Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI. Keputusan lain, bahwa ke-30 ormas dan LSM yang hadir bersepakat untuk membentuk aliansi dengan nama Majelis Rakyat Indonesia (MARI). Aliansi ini berkedudukan di Jakarta, tetapi bagi ormas atau LSM yang mempunyai cabang-cabang di daerah juga dapat membentuk MARI di daerah. Di samping itu juga rapat mengeluarkan resolusi empat pasal, yaitu 1. Turunkan harga, 2. Perbaiki dan tingkatkan taraf hidup dan perekonomian rakyat. 3. Basmi sumber kolusi dan korupsi, dan 4. Mencalonkan Megawati sebagai presiden RI untuk periode tahun 1998-2003.

Namun, pada rapat tanggal 26 Juni 1996 di tempat sama dan dipimpin oleh Ridwan Saidi, resolusi tersebut mengalami perubahan, terutama mengenai point ke 4 yang menyangkut pencalonan Megawati sebagai Presiden yang akan datang. Kelompok PUDI yang diwakili oleh Julius Usman menolak pencalonan Megawati, tetapi sebaliknya mencalonkan Ir. Bintang Pamungkas. Pencalonan itu, spontan langsung ditolak oleh Masyumi Baru dan Partisipasi Kristen Indonesia. Alasannya karena Ir. Sri Bintang pamungkas saat itu sedang dalam sorotan. Persatuan Nasional Indonesia juga meminta untuk tidak mencalonkan Megawati, sedangkan FPKR dan GRM mengajukan calon alternative Berar Fathia sebagai kandidat Presiden RI untuk tahun 1998-2003.

Kendati demikian, rapat tetap menyepakati untuk mempertahankan adanya resolusi empat pasal dari MARI, meski harus direvisi. Kemudian untuk menamai resolusi tersebut dengan 4 (catur) tuntutan (tura) menjadi Caturtura". Adapun hasil catur tura yang sudah direvisi tersebut adalah, 1. Pecat dan adili pengkhianat dan pemecah belah bangsa, 2. Cabut paket 5 UU politik, 3. Naikan gaji buruh, pegawai dan prajurit, 4.Turunkan harga, ganyang korupsi, kolusi dan monopoli.

4.5. Mempertahankan Keyakinan

4.5.1. Persiapan Dan Menghadapi Serangan

Isu tentang rencana pengambil alihan Kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro No. 58 Jakarta Pusat oleh kelompok DPP PDI Suryadi sudah didengar oleh DPP PDI pimpinan Megawati. Ini berkaitan dengan adanya pemberitahuan dari seorang Jenderal yang menelpon Megawati bahwa kantor DPP PDI akan diambilalih. Menghadapi hal tersebut, maka digelar rapat DPP PDI. Dalam rapat, Megawati tidak memyarankan untuk bertahan, tetapi sebagian besar anggota DPP PDI memutuskan untuk mempertahankan kantor tersebut.[49] Oleh karena itu perlu diadakan langkah-langkah persiapan menghadapi serangan tersebut, dengan dipimpin oleh Agung Imam Sumanto, anggota DPD PDI DKI Jakarta, Suparlan anggota DPP PDI Megawati, Gusti[50] dari Palembang, Manggara Siahaan anggota DPP PDI Megawati, memutuskan untuk membagi

[49] Wawancara dengan Audi Tambunan
[50] Gusti adalah adik kandung dari Taufik Kiemas

dan membentuk sistem Satgas yang lebih terorganisir yang didukung oleh ketersediaan Satgas di Posko Wilayah.

Gambar 20
Suasana Penyerangan Kantor DPP PDI
Sumber : Tempo

Persiapan lain yang dilakukan Agung Imam Sumanto adalah memperlengkapi anggota Satgas dengan tongkat dari rotan dengan diameter 1/4 inch dan panjang 1 meter, selain itu juga memesan kayu ukuran ¼ cm , panjang 5 cm dan 100 cm sebanyak 50 buah, dan juga besi dengan diameter ¼ inch sebanyak 30 buah untuk anggota team khusus yang ujungnya sedikit runcing serta membeli bensin sebanyak 100 liter di Pompa Bensin Benhil (Bendungan Hilir) yang rencana digunakan untuk membuat bom Molotov dalam menghadapi serangan 27 Juli 1996. Di samping itu, bensin

direncanakan akan digunakan oleh Suparlan dan Baharudin apabila tidak bisa dipertahankan kantor DPP PDI, maka akan digunakan untuk membakar gedung DPP PDI, dan ditambahin oleh Baharudin, “Kita sudah siap untuk bakar kedutaan Palestina dan dan kediaman Ibu Mien Sugandhi”. Kemudian, untuk melindungi kantor DPP PDI dan mencegah penyerang masuk, maka dibuat pagar duri di sekeliling kantor DPP PDI dan rencana akan dialiri listrik jika gedung diserbu, dan hal lain adalah menyewa Diesel jika listrik dipadamkan.

Isu tentang rencana pengambillihan kantor DPP PDI sudah berhembus santer di Jl. Diponegoro No.58. Konsentrasi massa pada tanggal 26 Juli didepan kantor DPP PDI mencapai ribuan, karena banyaknya orang sampai menutup Jl. Diponegoro, baik dari Satgas, PDI pendukung Megawati dan para pengunjung. Tetapi, waktu menjelang malam, massa yang terkonsentrasi berangsur berkurang, hingga pukul 24.00 WIB kantor DPP PDI hanya dijaga oleh Satgas dan berapa orang PDI pendukung Megawati. Pada malam harinya, salah seorang Satgas menerima berita via Pager dan telepon dari oknum Sospol DKI bernama Dharsono bahwa kantor DPP PDI akan diambil alih pada tanggal 27 Juli 1996 pagi.

Pada tengah malam, mobilitas anggota keamanan dari Mapolda Metro Jaya yang lalu lalang di depan kantor DPP PDI tampak terpantau para Satgas PDI Megawati dan dilaporkan pada Gusti (Posko Palembang), dan memang pada malam itu Gusti dan Agung Imam Sumanto tidak ada di lokasi kantor

DPP PDI sejak pukul 02.00 WIB tanggal 27 Juli 1996. Anggota Satgas PDI baru bisa kontak lagi dengan Gusti pada pukul 10.00 WIB di sekitar Pos Polisi (Pospol) depan Megaria daerah sekitar DPP PDI. Sedangkan, Agung Imam Sumanto baru bisa berhasil ditemui pada siang hari di kantor YLBHI.

4.5.2. Mempertahankan Kantor DPP PDI

Pada pagi hari pukul 06.45 tanggal 27 Juli 1996, terlihat 2 buah truck berwarna kuning yang membawa orang dengan menggunakan kaos berwarna merah yang diketahui sebagai PDI Suryadi, kemudian terjadi lemparan batu antara kedua kelompok yang di dalam kantor DPP PDI dengan kelompok yang baru turun dari truck. Sementara massa pendukung Mega mulai berdatangan dan terjadi bentrok di sekitar Gedung DPP PDI, dan ini terus berlangsung sampai pukul 8.25 WIB. Pada pagi itu salah seorang Satgas PDI Megawati salah seorang Satgas PDI sempat menghubungi salah seorang anggota polisi Polsek Menteng yang berjaga di Pospol Megaria, yaitu perwira intel bernama Iwan dan mengatakan bahwa DPP PDI diserang. Tetapi, anggota polisi tersebut mengatakan, bagaimana cara menghentikan mereka, karena petugas polisi pun juga kena lemparan batu dari dalam.

Pada pukul 8.25 WIB lemparan batu antara kedua belah pihak tiba-tiba berhenti dan terjadi negoisasi antara anggota Satgas Megawati dan Kapolres dan Dandim. Saat itu komandan Satgas dipegang oleh Susilo Muslim, dan salah satu anggota Satgas PDI mencoba kontak dengan Megawati di kediaman

dengan HP/RadioTracking dan berhasil mendapatkan kontak dengan Megawati dengan pembicaraan sebagai berikut,

a. Kapolres meminta untuk menyerahkan gedung dan menyatakan status quo.
b. Dijawab oleh Megawati boleh asal ada saksi dari wartawan dan juga harus ada wartawan dari Kompas (tetapi sampai detik terakhir wartawan dari kompas tidak ada). Sementara itu, Megawati juga minta dijelaskan yang dimaksud dengan status quo itu apa?
c. Dijawab, Gedung ini dikosongkan dan tidak ada yang boleh menempati sampai masalah antara dua kelompok yang bertikai selesai, akan tetapi salah satu anggota Satgas dari Jakarta Timur mengaku mendapat telepon dari Kebagusan kalau mendapat perintah dari Megawati untuk tetap bertahan dengan tidak akan menyerahkan Gedung DPP kepada Polisi dan tidak mau keluar dari dalam Gedung dan sampai Megawati datang tidak ada kompromi apapun. Tidak lama kemudian Aziz Buang datang dan mengambil alih negoisasi dengan Kapolres dan Dandim tetapi mengalami jalan buntu.
d. Dipihak lain, Megawati minta izin untuk datang kepada Kapolres, tetapi dilarang oleh Kapolres dengan alasan:

   1. Keselamatan di lokasi kejadian tidak bisa dijamin.

   2. Akan menimbulkan gejolak perlawanan yang lebih luas dan besar dari massa pendukung Megawati terhadap massa PDI Suryadi sehingga menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

Massa pendukung Soeryadi menerobos barikade anggota polisi dan masuk ke dalam terjadi lagi bentrok yang kedua yang lebih besar lagi. Massa pendukung PDI akhirnya mundur dan masuk dalam kantor. Sebelum masuk, menurut Sandra ia melihat ke arah Jl Surabaya, banyak tentara yang mengganti seragam mereka dengan kaos merah bertuliskan “Pro Kongres Medan”. Mereka langsung masuk ke kantor DPP PDI. Di dalam kantor tersebut banyak massa pendukung PDI yang berusaha bertahan, akibat dari serangan yang kedua ini banyak yang terluka parah dan menyerah.

Gambar 21
Bentrok Di Depan Megaria Antara Masa PDI Dengan Aparat
Sumber : Majalah Tempo

Komnas HAM dan pengurus DPP PDI Megawati masuk ke dalam Gedung sekitar jam 14.00 WIB untuk memastikan ada tidak pembataian massal di dalam. Dalam laporan Komnas HAM yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1996, menyimpulkan, peristiwa pengambilalihan gedung sekretariat DPD PDI di Jl. Diponegoro No.58, Jakarta Pusat, tanggal 27 Juli 1996 adalah tindakan yang disertai kekerasan oleh DPP PDI Kongres Medan dan kelompok pedukungnya yang dilakukan bersama-sama dengan aparat keamanan. Hal ini merupakan peristiwa lanjutan dari urutan kejadian-kejadian sebelumnya yang bertalian dengan penciptaan konflik terbuka dalam tubuh PDI di dalam mana pemerintah/aparatur telah melibatkan diri secara berlebihan dan berpihak serta diluar proporsi fungsinya sebagai pembina politik dan aparat keamanan.

Menurut keterangan kordinator pengacara TPDI RO.Tambunan mengatakan, sebelum tragedi 27 Juli terjadi. Ketua Umum PDI Megawati Sukarnoputri sebenarnya sudah mengetahuinya. Megawati sudah mendapatkan informasi tentang rencana penyerbuan 27 Juli itu dari seorang pansiunan Jenderal berbintang empat. (Kompas, 7/3/2000)

4.5.3.Kisah Sandra Fertasari Putri

Setiap kali mendengar lagu Indonesia Raya, air mata Sandra selalu meleleh. Ia kemudian teringat pada saat peristiwa 27 Juli 1996, sebuah peristiwa yang ia tidak pernah ia lupakan seumur hidup. Bersama teman-temanya ia mati-matian mempertahankan kantor DPP PDI dari serangan

musuh. Saat serangan pertama berhenti, dan terjadi negoisasi antara PDI pendukung Megawati dengan PDI Suryadi. Negoisasi kelihatan tidak mencapai titik temu, ia dan rekan-rekannya menyanyikan lagi Indonesia Raya, tanpa ia sadari pandanga matanya melihat ke luar di Jl. Surabaya terlihat 3 truck besar sedang menurunkan aparat keamanan, dan dengan cepat mengganti seragam mereka dengan kaos merah semua (kaos PDI). Dengan cepat pasukan Suryadi dan aparat keamanan menyerang kembali. Serangan kedua ini lebih besar dan dasyat. Tidak ada jalan lain bagi Sandra kecuali masuk ke dalam kantor DPP untuk menyelamatkan diri. Tidak berhenti di depan, pasukan penyerang terus masuk ke kantor DPP. “Kelihatannya mereka sudah minum obat, sambil memutar-mutar pedang mereka mengancurkan apa yang didepannya” kata Sandra. Ia pun tak luput dari tebasan pedang, beruntung dengan cepat meraih kursi untuk menangkisnya. Dua kali ia selamat dari tebasan. Ketiga kali hendak mengayunkan pedangnya, tiba-tiba rekan pasukan penyerang itu berteriak, “jangan itu isteri komandan”. Kali ini ia bisa selamat. Tapi ia berpikir, kalaupun mati, harus dekat dengan rekan-rekannya. Kemudian bergerak mau menuju mushola.

Pada serangan pertama, pukul 06.30 WIB, Sandra masih berada di dapur menyiapkan susu dan telur untuk keperluan sarapan Satgas PDI Jakarta Pusat, tiba-tiba terdengar terikan-teriakan dari dua kubu. Pada saat penyerangan pertama, sudah banyak jatuh korban terluka. Tiba-tiba aksi saling lempar batu berhenti, waktu itu sempat ada perintah dari luar , semua

yang ada di dalam semua harap keluar ke halaman kantor tersebut. Kami bertekad tidak mau keluar, kecuali Megawati yang perintahkan. “Maksudnya keluar dari gedung” jelas Sandra. Tetapi, mereka tetap memaksa kami keluar dari dari dalam gedung dan minta dikosongkan. Menurutnya, ternyata hal tersebut merupakan strategi mereka untuk mengetahui berapa orang kekuatan yang di dalam. “Jadi kita tertipu juga dengan aba-aba tersebut”, katanya. “Tapi kita tetap tidak keluar dari halaman itu, malah kita nyanyi Indonesia Raya”.

Akibat serangan kedua, banyak korban terus berjatuhan, banjir darah di mana-mana, terutama di dapur. Di samping itu banyak juga korban yang muntah-muntah dan pusing kepala akibat gas air mata. Ia bingung harus berbuat apa. Keadaan di dalam kantor DPP sangat gelap dan pengab. Korban yang sempat ditolong, diamankan di dapur untuk di obati dengan perlengkapan medis seadannya yang masih tersisa di DPP PDI. “Sebisanya saya obati mereka dengan obat-obatan seadanya Betadine, obat merah, rheumason yang tersedia di ruang poliklinik DPP PDI” , katanya dengan haru. Pada saat itu, ada tiga orang dalam pangkuannya kepalanya dalam keadaan terluka parah, kelihatan sudah mati. “Di tahanan, saat terbangun tengah malam ia sering terbayang dengan wajah tiga orang itu, namamu siapa, tanyanya dalam hati”, ceritannya dengan wajah sedih. “Barangkali mereka dari luar daerah”, jelasnya. Tetapi, ada juga yang selamat ia tolong dan kenal namanya, Dedi dan Sukarno. “Ada yang luka parah saya kenal namanya Fadli, saya ingat

sekali, dr. Djarot meminta saya merapatkan kulit kepala dalam keadaan darah mengucur, ceritanya. Di saat sedang menolong korban, aparat keamanan mondar mandir mengawasi. “Tapi ada juga mereka yang membantu menolong korban”, katanya. Ia tidak tahu berapa korban yang luka maupun yang meninggal. Yang dilihat semua korban yang luka berat dan meningga;l di masukin truck, ia tidak dibawa kemana. Pada saat itu memang banyak keluarga korban yang tidak melapor kehilangan anggotanya. “Mungkin takut kali ya”, tegasnya.

Di tengah kebingungan dan kepanikan habis menolong korban, bersama rekan-rekan dikumpulkan dan disuruh duduk seperti ayam pesakitan. Tiba-tiba terdengar aba-aba, untuk segera keluar ruangan. Di bawah todongan senjata oleh aparat keamanan, ia dan rekan-rekannya di suruh keluar menuju truck yang sudah disediakan. Di dalam truck yang penuh sesak dengan rekan-rekannya, ia tidak tahu mau dibawa kemana. Ia bertanya dalam hati, mengapa ia dan rekannya yang harus ditahan, bukanlah mereka yang menyerang lebih dahulu ? Mengapa ada aparat yang ikut menyerang? Di mana keadilan dinegeri ini ? Pertanyaan itu terus menggayuti selama perjalanan, dan ia tidak bisa jawab. Akhirnya ia tertidur sendiri.

Tidak berapa lama, kemudian ia bangun. Truck sudah sampai pada tujuan. Ia benar-benar kaget bukan kepalang, ketika seorang aparat keamanan memerintahkan turun. Kenyaataanya ia sudah sampai di instansi, yaitu Mapolda Jaya. Tapi ia tetap tenang, mencoba melupakan semua, anak maupun

suami. Ia akan hadapi sendirian. Di Mapolda, langsung dihadapkan pada pemeriksaan. Banyak tuduhan yang tidak mendasar dialamatkan padanya. Pemeriksa mengarahkan bahwa ia ditekan harus mengaku sebagai aktivis Gerwani salah satu unsur dari Partai Komunis Indonesia (PKI). "Ya jelas marah, saya tegaskan bukan Gerwani, saya PDI pendukung Megawati"! Pertanyaan lain, misalnya, Kenapa mbak melawan kami ? Kenapa kalian menolong teman-teman kalian? Kenapa menolong teman-teman yang sudah terluka parah ? Pertanyaan itu ia anggap tidak etis. Kita ini manusia biasa, kalau lihat orang lain terluka saja pasti kita akan menolong, hati kita tidak tega, apalagi itu teman-teman, tapi petugas itu bertanya terus dan berulang-ulang. Saya jawab, " jawaban saya ada di butir dua (2) Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil beradab". Tapi sungguh dibuat kaget oleh pemeriksa. " Oh, itu bukan jawaban yang benar di sini tidak ada Pancasila", kata petugas. Kemudian ia berpikir, ini instansi Polda dan mengatakan tidak ada Pancasila. Ia mulai geram, lantas bertanya dengan keras , "ini kepolisian lho pak, ini Polda koq ngak ada Pancasila ? Yang PKI ini sebenarnya siapa?

Ia memang sudah siap diperiksa pemeriksa. Kalau saya sudah diperiksa dengan pertanyaan itu, jangan sampai belok kiri, belok kanan, karena ia menyadari kalau tidak konsisten, maka akan dikembangkan lagi. Pemeriksan itu benar-benar bertubi-tubi. Pemeriksaan itu terlalu banyak, seperti obat nyamuk, kan hanya itu-itu aja pertanyaannya. Pemeriksaan dari siang sampai malam, nanti ada panggil lagi, ada berita baru, panggil lagi untuk diperiksa

sampai dari malam sampai pagi sampai kantuk-kantuk, kalau kantuk bisa rusuh, maka ia tidak mau ditawarin makan. “Kalau makan kan enak terus tidur, kopi aja sama rokok saya mau”, jelasnya. Ia sebenarnya menyadari, bahwa sejauh pemeriksaan yang dilakukan penyidik tujuannya agar ia mengakui sebagai PKI.

Pada suatu hari dibawa penyidik di suatu ruangan untuk diperiksa kembali. Kebetulan tempat ia duduk menghadap keluar. Dengan begitu ia bisa leluasa meluaskan pandangannya. Tanpa sengaja, melihat ke lapangan ada orang pakai baju belang-belang (kaos polisi). Dalam hatinya, berkata, “bukankah ini orang yang mengeluarkan parang dan diputar di kantor Diponegoro dan teriak bunuh PKI-PKI yang di dalam”. Kemudian langsung bertanya pada kepala penyidik, “itu orang yang pakai kaos belang-belang itu siapa”? Dijawab kepala penyidik “Yang mana”? Oh itu anggota kami”. Spontan ia langsung teriak, “ Ya orang itu yang bawa parang membunuhi kami, putar –putar parang”. Serentak para penyidik, bon-bon”. Awalnya, tidak tahu yang dimaksud bon itu apa, ternyata dimasukin sel lagi.

Di samping pemeriksaan yang bertubi-tubi oleh penyidik. Hal yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup dan sangat menghancurkan harga dirinya ketika terjadi pelecehan seksual. Saat itu dihadapan para penyidik, salah satu penyidik, seorang Polwan, namanya Charlote Tahuju memerintahkan untuk membuka pakaian yang dikenakan. Kondisi tertekan, lelah, ia tidak kuasa menolak perintah itu. Tanpa sehelai benangpun sambil menangis ia di suruh

berjalan mondar mondir di ruangan pemeriksaan. “Anehnya, tidak laki, tidak perempuan, mereka justeru tersenyum”. “Benar-benar hati ini hancur”, kenangnya. Karena kesal, ia teriak dan pelototin Polwan perempuan itu. “hai, bagaimana harga diri kamu sebagai perempuan harus telanjang seperti ini? Akhirnya, sudah 3 kali balik, disuruh pakai baju lagi. Waktu di depan sel dan mau masuk ke dalamnya, ia pukul Polwan itu. Kontan Polwan itu kaget, “ee.. kenapa kamu pukul saya ? Teriak Polwan itu. “Hei… kita selesaiakan urusan kita, kalau ini sudah selesai, kita tanding ke luar “, tantang Sandra. “Kamu copot itu baju dinas kamu”! “Kamu sadar ngak, kalau kamu perempuan”, tegasnya. Kalau ingat itu ia malu sekali, sampai di sel penjara menangis membayangkan telanjang itu. Adanya penyiksaan-penyiksaan itu, ia sampai keguguran dalam tahanan. “Ya saya terima itu menjadi pengalaman hidup”, katannya sedih.

Sandra berada dalam tahanan selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari dengan dakwaan telah melanggar pasal 218 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Begitu vonis hakim dibacakan ia pun bebas, karena masa tahanan sudah dijalani waktu penyidikan. Namun begitu, ia tidak menyesal. “Kita dukung Megawati, tumpah darah hati ini untuk Megawati, karena ingin perubahan”, katanya. Bergabung dengan PDI pendukung Megawati, menurutnya merupakan panggilan nurani sendiri, bukan cari uang. Penghidupannya sendiri terbilang mapan, di samping seorang wirausawati juga isteri Polisi. Suaminya waktu

itu Kapolsek Johor Baru, Jakarta. “Jadi ngak miskin-miskin amatlah”, jelasnya.

Membayangkan waktu mimbar bebas, ia benar-benar merasakan semangat perjuangan teman-teman, rasa kebersamaan, saling membantu membuat ia menyadari bagaimana arti hidup itu. Waktu itu ia bertugas di dapur umum. Makanan, minuman, kopi itu sumbangan berasal dari sumbangan donatur. Semua sama dalam perjuangan itu, dengan itu kita tidak melihat uang. Misalnya, mau ada pengerahan atau aksi mereka siap tanpa ada pembayaran. Mereka iklhas batin jiwa raga untuk perjuangan. Mereka saling berangkulan untuk kerja sama, menggandeng tangan jangan sampai Megawati itu diambil lagi, kemenangan itu tidak boleh hilang dari Megawati lagi. “Benar-benar kegotong-royongan itu ada dalam mimbar bebas”, jelasnya. Akhirnya, perjuangan teman-teman menghadapi karang yang keras karena ada penyerangaan itu. Tapi juga ia mengakui, karena peristiwa 27 Juli, mendapat penghargaan dari Amnesty International di Den Hag Belanda.

BAB V
PERTARUNGAN SIMBOLIK DALAM KONFLIK INTERNAL PDI ERA REZIM ORDE BARU

5.1. Narasi Dalam Konflik Internal PDI

Berkaitan dengan konflik internal yang berlangsung di Partai Demokrasi Indonesia (PDI adalah arena pertarungan bagi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik untuk memproduksi wacana dalam memperoleh legitimasi politik. Dalam konteks Bourdieu, (dalam Ritzer & Goodman:2008:583) arena adalah struktur yang menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi ini untuk berupaya, baik individu atau kolektif, mengamankan atau meningkatkan posisi mereka. Aktor yang mapan yang dibekali dengan habitus dan modal yang kuat cenderung menerapkan strategi untuk mempertahankan monopolinya dan menyingkirkan pesaingnya, dan melindungi *doxa*. Tetapi mereka yang tidak dibekali dengan habitus dan modal yang kuat akan menerapkan strategi subversi atau *heterodoxy*. Akibat dari *heterodoxy*, memaksa aktor yang berkuasa atau dominan untuk keluar dan memproduksi wacana defensif atau *orthodoxy*. (dalam Thompson:2007:86)

Legitimasi kekuasaan sebagai arena konflik politik menjelaskan bahwa masing-masing aktor selalu berhadapan secara kontradiktif. Oleh karena itu penjelasan mengenai praktek simbolik yang dimanifestasikan dalam bentuk bahasa ujaran akan menjelaskan dinamika konflik dalam pertarungan simbolik pada konflik internal PDI. Dengan demikian akan dapat dideskripsikan bahwa aktor politik yang memiliki kekuatan (modal) akan melakukan dominasi dan

manipulasi untuk mempertahankan *status quo*, di satu sisi. Di sisi lain, menjadi perjuangan bagi aktor politik yang terpingirkan untuk mendapatkan legitimasi.

Pengkajian terhadap pertarungan simbolik ini difokuskan pada ujaran yang dibatasi mulai dari awal munculnya wacana penyelenggaran kongres sampai pada pasca penyerangan kantor DPP PDI. Pembatasan itu dimaksudkan untuk menghindari bias dari fokus yang diteliti. Dari hasil pengamatan, rentang waktu mulai dari prolog sampai epilog, berlangsung antara bulan Juni sampai pertengahan agustus 1996.

Dalam memahami makna dalam pertarungan simbolik, ada dua tahapan yang dilakukan peneliti. *Pertama,* melakukan pemaknaan struktural, yaitu memperlakukan bahwa bahasa adalah tempat saluran pengkomunikasian informasi tentang keadaan mental utama atau perilaku atau fakta-fakta dunia sosial ini. (Jorgensen & Philips:18:2007). Sedangkan Little John, menyatakan teori struktural memperlakukan bahasa dan wacana sebagai suatu produk dan instrumen dari komunikator manusiawi, dengan menganalisis struktur wacana orang memahami makna-makna yang di sampaikan dan fungsi-fungsi yang dipenuhi bagi mahkluk manusia dengan berbicara.

Dalam pemahaman struktural, bahasa di artikan sebagai sistem yang ditentukan oleh realitas yang menjadi rujukannya, sehingga bersifat stabil dan tidak bisa di rubah. Dalam proses intrepretasi, setiap tanda bahasa memperoleh pemaknaan tergantung hubungan-hubungan internal dalam sistem tanda tersebut. Pemaknaan struktural dalam penelitian ini menggunakan struktur

oposisi biner Levi Straus. Menurutnya, relasi-relasi yang berada pada struktur dalam *(deep structure)* dapat diperas atau disederhanakan menjadi oposisi yang berpasangan *(binary opposition)*. Oposisi biner adalah aspek yang paling penting yang bisa menyingkap bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia memproduksi makna dan memahami realitas. (Culler: 1976:15) Levi-Strauss menggunakan gagasan Ferdinand de Saussure dan Sigmund Freud untuk menemukan makna dari suatu narasi. Makna itu bagi Levi-Strauss bisa ditemukan dari oposisi biner yang terdapat dalam suatu narasi. Oposisi biner adalah kunci di mana bisa memahami jalan pikiran, nalar atau logika dari pembuat suatu narasi. Menurutnya, struktur dari suatu narasi bisa dibagi dalam dua bagian, yaitu menyangkut struktur luar (*surface structure*) dan struktur dalam (*deep structure*). Struktur luar adalah relasi-relasi antar unsur yang bisa dibuat berdasarkan berdasarkan atas ciri-ciri luar atau ciri empiris dari relasi tersebut. Sementara struktur dalam adalah susunan tertentu yang dibangun berdasarkan atas struktur lahir yang telah berhasil dibuat, namun tidak selalu tampak pada sisi empiris dari fenomena yang dipelajari. Struktur dalam ini dapat disusun dengan menanalisa dan membandingkan dengan berbagai struktur luar yang berhasil ditemukan dan dibangun. Struktur dalam inilah yang biasa untuk memahami fenomena.

Kedua, melakukan interpretasi yang disebut post struktural yang menyatakan tanda lingusitik bersifat manasuka, artinya kategori dan kaidah linguistik tidak dapat diramalkan ataupun di simpulkan dari realitas-realita

ekstralinguistik (Leech:1993:37). Untuk itu makna yang kita berikan pada kata-kata tidak melekat pada kata-kata itu melainkan merupakan hasil konvesi tentang cara kita menghubungkan makna-makna dengan bunyi-bunyi tertentu (dalam Jorgensen dan Philips:16:2007). Berkaitan dengan penggunaan teori praktik sosial Bourdieu, dalam intepretasi dikaitkan dengan *habitus* maupun *capital power* masing-masing aktor. Pengintegrasian dalam intepretasi baik secara struktural maupun *post structural* akan mampu menjelaskan pertarungan simbolik dalam konflik internal PDI.

Mengikuti pengkategorian yang dilakukan Nimmo(1999:30) tentang komunikator politik, yaitu politisi, profesional dan aktivis, maka yang dimaksud dengan politisi adalah aparatur kekuasaan rezim Orde Baru yang terlibat dalam konflik internal PDI, yaitu lembaga negara, atau mereka yang memegang jabatan dalam pemerintahan Orde Baru. Profesional politik adalah mereka yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam mengintepretasi persoalan politik. Sedangkan, aktivis politik adalah partisan partai, aktivis PDI yang mendukung kongres maupun PDI pendukung Megawati.

Berikut gambar mengenai posisi masing-masing komunikator politik dalam konflik internal PDI.

Gambar 23
Pertarungan Simbolik Dalam Konflik Internal
PDI

Gambar di atas hendak menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik internal Partai Demokrasi Indonesia. Masing-masing aktor, terutama aparatur Orde Baru, PDI Pro Kongres dan PDI pendukung Megawati berada dalam arena pertarungan untuk memperebutkan legitimasi politik. Sedang, kelompok profesional adalah yang mendukung atau melemahkan kuasa simbolik *(Symbolic power)* para aktor atau menyarankan sebuah alternatif penyelesaian.

Bourdieu (166:1987) dalam *symbolic power* menjelaskan, *" symbolic power is a power of constructing reality, and one which tends to establish a gnoseologis order: the immediate meaning of the world (in particular of the social world*. Masing-masing aktor memiliki otoritas dalam melakukan konstruksi realitas dan berusaha untuk memapankan tatanan dianutnya melalui kata-kata di mana interaksi berlangsung. Kekuatan simbolik yang merupakan praktek bahasa tergantung dari habitus dan modal simbolik yang dimiliki aktor.

Berikut ini akan disajikan praktek bahasa yang juga merupakan pertarungan simbolik para aktor yang terlibat dalam konflik untuk menjustifikasi tindakan politiknya, dan merupakan dari "realitas luar" atau pangung luar dari rezim Orde Baru, di satu sisi. Di sisi lain, mendeskripsikan kronologi konflik internal, mulai dari desakan untuk melakukan kongres sampai dengan pasca penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Berikut narasi-narasi yang muncul dalam konflik internal PDI pada era rezim Orde Baru. Narasi disusun secara kronologi sesuai urutan peristiwa. Ada beberapa peristiwa yang penting, seperti dukungan penyelenggaraan kongres, legitimasi kongres, upaya rekonsiliasi, kongres PDI IV Medan, dukungan pada Megawati dan mimbar bebas, labelisasi, dan pasca penyerangan.

Berikut narasi dalam konflik internal PDI pada era rezim Orde Baru.

a. Dukungan Penyelenggaraan Kongres

Usul untuk mengadakan kongres datang dari 16 DPD dan 141 DPC PDI, dan bukan 21 DPD dan 215 DPC PDI sebagaimana yang disebutkan ketua DPD

PDI Jawa Tengah Sumaryo. Menurutnya, sesudah diteliti secara seksama, ternyata usulan 16 DPD dan 141 DPC PDI tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan Konstitusi Partai yang berlaku, dan usulan-usulan itu tersebut ternyata juga tidak dibuat berdasarkan rapat cabang sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pernyataan Sutardjo Soeryoguritno tersebut merupakan hasil rapat DPP PDI yang berlangsung pada hari Selasa, 4 Juni 1996 merupakan kelanjutan rapat DPP PDI sebelumnya. Keputusan yang diambil dalam rapat itu sah. Hal tersebut penting, karena pada hari yang sama Ketua DPP PDI Fatimah Achmad juga mengadakan rapat DPP PDI di Hotel Wisata Internasional, Jakarta. Sedangkan rapat DPP PDI Megawati, dipimpin ketua umum DPP PDI Megawati berlangsung di kantor DPP PDI Jl. Diponegoro, dihadiri antara lain Laksamana Sukardi, Suparlan, Manggara Siahaan, Syafei Aligumay, I Gusti Ngurah Sara, Haryanto Taslam dan Noviantika Nasution. Dalam rapat tersebut, memutuskan bahwa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga (AD/ART) yang sah dan berlaku adalah AD/ART 1994. Ini sesuai dengan keputusan Munas No. XII/ KPTS/ Munas PDI /XII/1993 tentang penyempurnaan AD/ART yang menugaskan DPP PDI masa bakti 1993-1988 untuk menyempurnakan naskah AD/ART Munas, yaitu rancangan AD/ART yang diajukan DPP PDI dalam Kongres IV PDI di Medan yang gagal dan Caretaker DPP PDI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya yang tidak tuntas-sebagai naskah Munas dengan mengadakan sinkronisasi pemikiran dan menyerap aspirasi yang

berkembang dalam KLB dan Munas. Keputusan itu juga memberi keputusan wewenang DPP PDI 1993-1998 untuk mengesahkan menjadi AD/ART. Menurut Soetardjo, AD/ART 1994 itu sah dengan adanya pengukuhan lewat rapat kerja nasional (Rakernas) PDI 20 Desember 1994. Saat itu 27 DPD menyatakan tetap konsisten dan konsekuen mendukung kepimpinan Megawati Soekarnoputri bersama jajaran DPP PDI masa bakti 1993-1998, hasil Munas 1993 yang merupakan kelanjutan dan penyelesaian akhir dari Kongres IV PDI di Medan dan KLB PDI di Surabaya. Dengan telah disahkannya AD/ART PDI 1994, maka sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Anggaran Dasar , maka AD/ART tahun 1996 tidak berlaku lagi.

Fatimah Achmad menyatakan, bahwa aspirasi DPD yang menghendaki Kongres PDI sah menurut konstitusi partai. Anggaran Dasar yang lama pasal 12 menyatakan jika kongres tidak bisa diselenggarakan bisa dilakukan dengan Munas. Namun setelah Munas dilaksanakan hasil keputusaannya harus dipertanggungjawabkan dalam kongres. Menurutnya, ada beberapa keputusan Munas belum dilaksanakan oleh DPP PDI, antara lain pembentukan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dan Dewan Pertimbangan Partai (Deperpu). Hal itu dikemukakan seusai memimpin rapat yang berlangsung di Hotel Wisata, Jakarta, dihadiri oleh 15 fungsionaris antara lain, Panagian Siregar, Mulyono Sutarmo, Slamet Mulyadi, Ismunandar, Abdulgani, Titi Juliasih , Yahya Theo, Ratih Ratna Purnami, KH. Abdul Cholig Murod, Untung Sutomo, Neneng Amalia Oerip Soerjono, Andi Chaerul Muis dan Edy Djunedi.(Kompas/5/6/96)

Sebelum pertemuan, mereka telah mempersiapkan pernyataan politik dan kebulatan tekad, bahkan dalam lampiran kebulatan tekad tercantum struktur komposisi dan personel panitia kongres dengan ketua panitia Panangian Siregar yang dibantu dengan 7 wakil ketua, dan Ismunandar sebagai sekretarisnya. Dalam pernyataan politik fungsionaris DPP PDI pimpinan Fatimah Achmad ini menyatakan kongres PDI akan diselenggarakan tahun 1996. "Kongres bukanlah dimaksudkan untuk menggulingkan Megawati, namun untuk memenuhi permintaan cabang-cabang," jelas Fatimah Achmad. "Mungkin yang jadi ketua tetap Mbak Mega, kongres bukanlah untuk menggulingkan Megawati", tegasnya. ((Kompas/6/6/96)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Soeryadi, bahwa kongres PDI tidak akan mempersoalkan jabatan Ketua Umum DPP PDI Megawati, agenda kongres adalah untuk membahas ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga (AD/ART), membentuk Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) dan Majelis Permusyawaratan Parati (MPP) serta amant-amant Munas lainya. Bentuk penegasan lain, baik Soeryadi maupun Fatimah Achmad menolak posisi Ketua Umum DPP PDI kalau ada yang mencalonkan. "Saya tidak bersedia dicalonkan, saya sudah lelah," kata Soeryadi. Di samping itu, Wakil Ketua MPR/DPR itu, mengatakan bahwa secara konstitusional aspirasi yang menghendaki DPP PDI agar menyelenggarakan kongres sah dan seharusnya dipedulikan oleh DPP PDI. Menurut mantan Ketua Umum PDI, untuk menyelenggarakan kongres sudah sesuai dengan AD/ART partai.

Sepengetahuannya, Megawati Sukarnoputri pernah mengatakan bahwa kongres itu akan dilaksanakan jika 50 persen plus satu dari cabang-cabang menghendakinya. (AB, 4/6/96)

Sementara itu dalam menanggapi rencana kongres yang akan diselenggarakan oleh kelompok ketua DPP PDI Fatimah Achmad, pemerintah nampak memberi"lampu hijau" terhadap rencana tersebut. Dirjen Sospol Soetoyo N.K bahwa dalam waktu dekat akan diadakan kongres PDI sesuai dengan usulan beberapa DPD dan DPC PDI yang dipimpin Sumaryo yang telah menemuinya. Jajaran ABRI melalui Pangab Jenderal TNI Faisal Tanjung, ABRI akan mendukung pelaksanaan kongres PDI jika hal itu sesuai konstitusi. Bahkan ABRI akan turun mengamankan kongres. Ia melihat bahwa selama ini memang kehidupan partai itu belum begitu baik berjalan, ada hal-hal yang dilupakan. Tanpa memerinci apa yang disebut "dilupakan", Pangab menegaskan bahwa sikap ABRI dikembalikan kepada konstitusi dan kalau konstitusi PDI mengatakan bahawa mereka harus melaksanakan kongres itu maka ABRI akan mendukungnya.[1] Begitupula dengan Kassospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid menyatakan, bahwa ABRI siap mengamankan kalau proses itu berjalan akan mengamankan secara maksimal. Di samping itu, Kassospol ABRI itu juga menyatakan bahwa Kongres PDI merupakan permintaan murni partai. Adanya permintaan dan tuntutan dari cabang-cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) untuk berkongres bukanlah merupakan suatu upaya rekayasa ABRI untuk

[1] Ibid,

memecah belah persatuan dan kesatuan partai berlambang banteng tersebut. Permintaan kongres itu adalah murni merupakan proses politik yang terjadi dalam tubuh PDI sendiri. Ia juga membantah adanya upaya dari pihak ketiga untuk mengadu domba PDI dengan ABRI dengan menyebarluaskan isu bahwa keberangkatan pengurus-penguru cabang PDI dari berbagai daerah ke Jakarta dibiayai oleh Dandim dan Kodim setempat. Kalaupun ada itu hanya sebatas sumbangan bukan dimaksudkan sebagai rekayasa dari rekayasa manajemen konflik ABRI.

Menanggapi keinginan dari DPD maupun DPC PDI, Sekjen DPP PDI Alex Litay mengatakan penyesalannya adanya pernyataan dari oknum DPP yang menyatakan perlu adanya kongres. Ia juga mengingatkan, bahwa Megawati Sukarnopuri merupakan Ketua Umum PDI yang sah hasil keputusan Munas. (Kompas,4/6/96) Sedangkan Ketua Umum PDI Megawati Sukarnoputri seolah tidak menghiraukan goncangan terhadap kepemimpinannya, menyerukan kepada pengurus DPC PDI di seluruh Indonesia terus melakukan tugasnya sehari-hari, termasuk melakukan penyaringan nama-nama calon legislatif (caleg) baik untuk tingkat daerah atau tingkat pusat. Ia juga menegaskan dalam rapat DPP PDI memutuskan untuk tidak melaksanakan kongres dalam waktu dekat. (Kompas, 10/6/96)

Dalam menghadapi penantangnya, Megawati tidaklah sendirian. Banyak dukungan mengalir baik melalui telpon maupun faksimili. Dukungan itu antara lain datang dari DPD maupun DPC PDI, antara lain DPC seluruh Yogyakarta,

DPC Timor Timur, DPD dan seluruh DPC Sulawesi Selatan, seluruh DPC PDI Riau, mayoritas pengurus DPD Sumatera Utara, dan kelima DPC PDI DKI Jakarta. Bahkan, di Lampung terjadi pendudukan kantor DPD oleh PDI pendukung Megawati.(Kompas, 10/6/96)

Kontroversi penyelenggaraan kongres terus berlangsung. Dalam pernyataan resminya, DPP PDI menolak sebagian permintaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menyelenggarakan kongres dalam waktu dekat ini. Alasannya, selain usulan itu tidak memenuhi syarat-syarat konstitusi partai sehingga keabsahannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, pimpinan PDI juga bertekad untuk menyukseskan Pemilu 1997. Pernyataan yang disampaikan salah satu fungsionari DPP PDI Soetarjdo Suryoguritno juga menyinggung bahwa usulan untuk menyelenggarakan kongres itu datang dari 16 DPD dan 141 DPC, dan bukan 21 DPD dan 215 DPC seperti yang disebutkan oleh ketua DPD PDI Jawa Tengah Sumaryo. Begitu juga setelah diteliti secara seksama ternyata usulan itu 16 DPD dan 141 DPC tersebut tidak memenuhi syarat Konstitusi Partai yang berlaku, yaitu tidak dibuat berdasarkan rapat cabang sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. ((Kompas,4/6/96)

Berbeda dengan apa yang disampaikan ketua DPD Nusa Tenggara Timur (NTT) Shimon Hayon, bahwa keinginan untuk menyelenggarakan kongres murni dari bawah. Seperti DPD PDI NTT yang memiliki 13 cabang sampai pada tahap mengusulkan kongres karena itu sesuai dengan AD/ART. Ia juga

melihat kongres merupakan sarana untuk memperbaiki sistem dan politik partai (AB, 7/6/96)

Kelompok yang mendukung agar segera dilaksanakan kongres ini kemudian disebut sebagai kelompok "pendukung kongres" atau "kelompok 16", yang beranggotakan fungsionaris Ketua DPP PDI yang dipimpin oleh Fatimah Ahmad, sedang fungsionaris lain yang tergabung dalam "kelompok 16" adalah Panagian Siregar, Mulyono Sutarmo, Slamet Mulyadi, Ismunandar, Abdulgani, Yahya Theo, Titi Juliasih Kardjono, Ratih Ratna Purnami, KH Abdul Choliq Murod, Untung Sutomo, Neneng Amalia, Oerip Sardjono, Andi Chaerul Muis dan Edy Djunaedi. Sebelumnya "kelompok 16" telah mengeluarkan "pernyataan politik dan kebulatan tekad" yang intinya menyatakan kehendak untuk menyelenggarakan kongres dan menetapkan Fatimah Achmad sebagai ketua panitia penyelenggara kongres.

Adanya tudingan bahwa konflik yang sedang berlangsung di tubuh PDI adalah merupakan rekayasa. Syarwan Hamid membantah bahwa konflik itu merupakan rekayasa. "Dalam politik sebenarnya rekayasa adalah hal yang sah-sah saja, asalkan sesuai dengan aturan. Mana ada dalam politik Cuma doa", tegasnya. (Kompas,10/6/96) Pernyataan dari Kassospol ABRI itu hendak menegaskan posisi ABRI sebagai dinamisator politik yang netral. Semua urusan politik yang menyangkut partai politik diserahkan pada wewenang Dedapgri sebagai pembina politik.

b. Legitimasi Konggres

Setiap konflik internal partai politik akan mencari legitimasi bagi syah atau tidaknya suatu keputusan. Legitimasi yang dipakai adalah konstitusi partai yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).. Pihak "kelompok 16" atau "pro kongres" yang dikomandani oleh Fatimah Achmad (Ketua DPP) berpegang pada AD/ART 1986. Dalam AD/ART 1986 pasal 12 menyatakan jika kongres tidak bisa diselenggarakan bisa dilakukan Munas, dan hasil Munas akan dipertanggungjawabkan dalam kongres.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar 1986 kewenangan kongres adalah mengesahkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga Partai, program kerja Partai, serta memilih DPP (aturan pada pasal 11). Mengenai materi kongres disebutkan pada pasal 24 butur 2 ART, "*Bahan yang dipersiapkan oleh DPP Partai untuk dibahas dalam Kongres Partai harus sudah diterima oleh DPC selambat-lambatnya dua minggu sebelum Kongres Partai"*. Pada pasal 12 ayat 4 AD/ART 1986 yang menyatakan ada atau tidak ada permintaan dari bawah DPP harus melaksanakan kongres. Sedangkan ketentuan pasal 12 ayat (1) AD 1986 merupakan produk kongres terdahulu yang mengatisipasi kondisi dan situasi rentan dalam tubuh partai. Kemudian pasal ini disempurnakan dalam Anggaran Dasar (AD) 1986 yang memberi penegasan tentang bobot Musyawarah Nasional (Munas, yakni dengan penambahan anak kalimat ,

"*Musyawarah Nasional Partai tersebut mempunyai kewenangan seperti kewenangan kongres*".

Menurut Sabam Sirait salah satu fungsionaris DPP PDI menyatakan, apabila latar belakang penyelenggaraan kongres didasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar (AD) tahun 1986 pasal 12 ayat (4) maka harus diperhatikan pula ketentuan pasal 29 ayat (1) AD tersebut. Hasil Munas PDI tahun 1993 memutuskan masa kepengurusan DPP PDI adalah tahun 1993-1998.(Kompas, 15/6/96)

Sedangkan pihak fungsionaris lain yang berjumlah 10 orang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri berpijak pada AD/ART 1994. Dengan mengacu pada pasal 12 Anggaran Dasar (AD) PDI 1986, DPP PDI produk Munas ditetapkan masa bakti 1993-1998 dan ditugasi untuk menyempurnakan naskah AD/ART Munas yang diajukan oleh *caretaker* dalam KLB Surabaya tahun 1993. Untuk melaksanakan amanat Munas itu DPP PDI mengeluarkan Keputusan No.002/DPP/KPTS/1/1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang pembentukan Tim Sinkronisasi Hasil-Hasil Munas PDI. Tim ini berjumlah tujuh orang, yakni H. Soetardjo Soeryoguritno, Fatimah Achmad, Yahya Theo, Drs. Kwik Kian Gie, Drs Subagyo, H. Edy Djunaedi, SH, dan Haryanto Taslam. Hasil dari Tim Sinkronisasi disahkan dalam rapat DPP PDI 29 Januari 1994. Dengan demikian sejak ditetapkan berlakunya AD/ART ini dengan SK DPP no. 012/ DPP/ KPTS/I/1994, maka AD/ART itu telah sah berlaku dan merupakan aturan yang mengikat segenap pimpinan, Kader, anggota Partai di

seluruh Indonesia. Empat dari Tim Sinkronisasi, yaitu Fatimah Achmad, Yahya Theo, Subagyo, Edy Djunaedi kemudian membentuk kelompok 16 yang berseberangan dengan Megawati Sukarnoputri.

Pada kenyataan tidak ada titik temu tentang aturan mana yang dipakai. Kelompok 16 tetap bersikukuh tetap menyelenggarakan kongres. Keputusan diselengarakan kongres akhirnya terjawab, ketika selaku pembina politik Mendagri Yogie S. Memed menyatakan pemerintah akan memberikan izin bagi penyelenggaraan kongres. Alasannya, permintaan kongres itu sudah mencapai kuorum. "Kalau melihat faktanya itu sudah mencapai lebih dari setengah", katanya. (AB, 6/6/96). Begitu juga pendapat dari Pangab Jenderal Faisal Tanjung, akan mendukung kongres apabila sesuai dengan konstitusi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kassopol ABRI Letjen Syarwan Hamid bahwa adanya permintaan dan tuntutan dari cabang dan 16 orang pimpinan DPD PDI untuk berkongres bukanlah rekayasa politik ABRI untuk memecah-belah persatuan dan kesatuan partai berlambang banteng tersebut. Permintaan kongres itu adalah murni merupakan proses politik yang terjadi dalam tubuh PDI sendiri. Kassospol itu juga menjelaskan tentang adanya rekayasa di dalam konflik internal PDI. "Tidak benar kalau ada desas-desus di luar bahwa seluruh scenario dan bibit perpecahan dalam tubuh PDI sengaja dibuat ABRI. ABRI tetap melihat PDI tetap sebagai asset bangsa untuk dilindungi. (Kompas, 10/6/96)

Dasar konstitusi yang tercantum dalam AD/ART dan dukungan yang dibuktikan dengan pernyataan dari DPD dan DPC PDI menjadi dasar

pertimbangan pemerintah untuk menyetujui diadakan kongres. Akhirnya, ketua panita kongres, Fatimah Achmad maupun Ismunandar sebagai sekretaris kongres pada kamis, 13 Juni 1993, “sudah dipastikan Kota Medan, Sumut, menjadi tempat kongres ke IV Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 20 hingga 24 Juni 1996”. Mendagri Yogie S Memed direncanakan akan membuka perhelatan akbar ini, sedangkan Pangab ABRI Jenderal Faisal Tanjung, menegaskan akan menghadiri kongres PDI, seperti yang diminta oleh panitia pelaksana kongres. Kehadirannya semata-mata karena pertimbangan bahwa permintaan pelaksanaan kongres sudah sesuai dengan konstitusi partai.

Sudah menjadi kelaziman era rezim Orde Baru, setiap perhelatan yang dilakukan organisasi politik atau organisasi masyarakat kehadiran penguasa entah untuk membuka ataupun memberi pengarahan menjadi penanda bahwa adanya dukungan dari penguasa. Rencana hadirnya, Mendagri maupun Jenderal Faisal Tanjung dalam kongres IV di Medan, sudah cukup memberi legitimasi pada kelompok 16 untuk menyelenggarakan kongres.

Kondisi demikian menjadikan kubu Megawati sebagai pihak yang terpinggirkan. Reaksi Megawati Sukarnoputri dengan tegas menolak kongres dan membebas tugaskan 16 fungsionaris DPP PDI yang merupakan Keputusan Ketua Umum DPP PDI dengan bernomor 01-KU/KPTS/VI/1996. Pertimbangan pembebasan tugas 16 fungsionaris DPP PDI tersebut antara lain mereka telah melanggar disiplin partai dengan tindakan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai serta melakukan kegiatan yang bertentangan dengan

ketentuan dan peraturan partai antara lain mengadakan rapat di luar sekretariat dan mengatasnamakan DPP PDI, membentuk dan melaksanakan Panitia Kongres PDI. Pertimbangan lain, tindakan kelompok 16 dianggap melakukan tindakan kudeta terhadap kepemimpinan partai yang sah dan legal konstitusional yang berakibat langsung timbulnya perpecahan dijajaran partai, serta menimbulkan kelompok-kelompok yang setuju atau tidak setuju sehingga mengganggu stabilitas partai yang pada gilirannya dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. (Kompas/20/6/96)

Atas pemecatan itu, kelompok 16 DPP PDI pimpinan Fatimah Achmad tidak terpengaruh atas pemecatan itu karena dinilai tidak ada alasan yang membenarkan dari aspek yuridis dan pemecatan itu hanya diputuskan oleh 11 orang fungsionaris DPP PDI sehingga dianggap tidak memenuhi kuorum. Fatimah Achmad juga menyinggung tentang penggunaan kode "KU"[2] dalam SK pemecatan itu tidak sah, sebab SK itu merujuk keputusan MPP No.17/1978, yaitu pada zaman Soenawar Sukowati dan diteruskan pada zaman Suryadi. "SK yang belum disahkan dalam kongres tak pernah digunakan oleh Pak Sur dan Pak Soenawar. Lantas kalau digunakan Mega, tentu tidak sah karena belum disahkan di kongres dan Megawati sendiri belum membentuk MPP", jelasnya.

[2] KU kepanjangan dari Ketua Umum

c. Upaya Rekonsiliasi

Menghadapi kemelut PDI yang berlarut-larut, Menko Polkam Soesilo Sudarman menyarankan agar para fungsionaris partai PDI melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Saran ini merupakan lanjutan dari pesan dari Presiden Soeharto untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Hal itu kemudian ditanggapi oleh fungsionaris DPP PDI Sutardjo Suryoguritno mengajak 16 fungsionaris DPP PDI untuk bermusyawarah dan kembali pada ketentuan konstitusi partai. "Kita tetap mendahulukan musyawarah, seperti disampaikan Presiden Soeharto. Kita tidak akan gegabah main pecat, menskors dan sebagainya. Tetapi kita meminta mereka untuk berpikir mengenai masalah ini dan kembali kepada garis kebijaksanaan partai yang sah, legal dan konstitusional, "katanya. (Kompas, 16/6/96).

Menanggapi ajakan dari Sutardjo Suryoguritno tersebut, Fatimah Achmad yang merupakan ketua dari kelompok 16 menyatakan menolak ajakan tersebut. "Kami tidak mungkin lagi melakukan musyawarah sebelum kongres. Tampaknya sudah sulit untuk bermsyawarah", kata Fatimah Achmad. Ketiadaan titik temu dalam hal bermusyawarah ini, mantan Mendagri Rudini menyarankan agar pemerintah mengambil inisiatif memprakarsai pertemuan keduanya. (Kompas,15/6/96) Begitu pula, Maswadi Rauf, pengamat politik UI menyatakan agar kedua belah pihak duduk dalam satu meja perundingan. Pemerintah harus ambil inisiatif mempertemukan mereka.(Kompas, 17/6/96)

Penolakan Fatimah Achmad menutup upaya rekonsiliasi dengan PDI kelompok Megawati. Fatimah Achmad dan kelompok 16 merasa di atas angin dengan adanya dukungan dan pemberian ijin dari pemerintah terhadap penyelenggaraan kongres PDI. Upaya rekonsiliasi dengan mengundang pemerintah sebagai fasilitator, sepertinya ingin mengulang kejadian 1986 silam. Pada saat itu kongres PDI mengalami "kebuntuan" dan tidak menghasilkan putusan apapun dan menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah membentuk kepengurusan. Akhirnya, Mendagri yang pada waktu itu dijabat oleh Soepardjo Rustam menyusun kepengurusan dengan Ketua Umum Suryadi.

d. Menjelang Kongres IV PDI

Kepastian berlangsungnya kongres akhirnya terjawab. Kongres dipastikan berlangsung di Medan pada tanggal 20-24 Juni 1996 dan kongres merupakan kongres ke IV yang merupakan pengulangan kongres PDI tahun 1993 yang mengalami kebuntuan. Sedangkan, Pangab ABRI Jenderal Faisal Tanjung dan Mendagri Yogie S. Memed di pastikan hadir memberi pengarahan dalam kongres tersebut. Menurut Pangab ABRI, permintaan untuk mengadakan kongres sudah disampaikan secara resmi kepada pemerintah, dan pemerintah menyetujuinya. (AB/14/6/96)

Menanggapi kepastian kongres, Sekjen PDI Alex Litay menegaskan seadainya kongres di Medan jadi dilaksanakan, kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998 di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri akan jalan terus. Sementara itu, Fatimah Achmad menyatakan, persiapan kongres di Medan

sudah rampung 100 persen, tinggal materi kongres yang perlu dibicarakan dan sudah ada 225 DPC dari seluruh Indonesia sudah datang. Jumlah itu cukup membuktikan bahwa peserta kongres telah memenuhi kuorum karena pesertanya mencapai dua pertiga dari seluruh cabang.(AB/19/6/96).

Berkaitan dengan pemberian ijin kongres, pihak PDI Megawati mengancam akan membawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menggugat mereka yang memberi izin kongres. Hal ini dikemukakan oleh fungsinaris DPP PDI, Sutardjo Suryogutitno, "kalau sampai nanti terjadi kongres DPP PDI akan mem-PTUN-kan mereka yang mengeluarkan izin tanpa lewat prosedur yang benar sesuai dengan juklak, yakni izin kongres yang harus ditandatangani oleh pimpinan organisasi tertinggi, Ketua Umum dan Sekjen PDI. Begitu juga pada masalah kop surat dan stempel resmi DPP PDI, wakil Sekjen PDI pendukung Megawati, Haryanto Taslam akan melaporkan ke polisi dua orang anggota DPP PDI karena telah melakukan pemalsuan untuk keperluan penyelenggaran kongres PDI. Kop surat dan stempel asli sejatinya masih di tangan Sekjen PDI, Alex Litay. (Kompas/15/6/96)

Menanggapi hal tersebut, Assospol Kassospol ABRI, Mayjen Suwarno Adiwijoyo menegaskan keinginan Megawati untuk mem-PTUN-kan pemberi ijin kongres PDI sebagai suatu tindakan yang tidak mendasar. Sebab, izin itu diberikan karena kongres tidak menyimpang dari konstitusi. Alasannya, banyak cabang-cabang yang menghendaki kongres, tidak ada alasan lain yang akan digunakan pemerintah untuk melarang, karena itu merupakan keinginan

mayoritas dan kongres adalah forum tertinggi yang dilakukan cabang sebagai pemegang kedaulatan partai. (AB/17/6/96)

Sementara itu, Komnas HAM melihat adanya intervensi pemerintah dalam mengatasi kemelut yang terjadi di PDI sudah terlalu jauh, hal itu antara lain terlihat dari gecarnya pemerintah mengkumandangkan argumentasi dari salah satu pihak yang bertikai di PDI. Begitu pula, Rudini mantan Mendagri, menilai kondisi kemandirian organisasi sosial politik sangat memprihatinkan. Ketergantungan dalam berbagai hal kepada pemerintah menunjukan bahwa orsospol tidak kuat dan mandiri menghadapi berbagai benturan politik.(Kompas/19/6/96).

Reaksi dukungan terhadap Megawati ditunjukan dengan mendatangi kantor Dedapgri di Jl. Merdeka Utara. Sekitar lima ratus warga PDI lengkap dengan seragam merah hitam menaiki puluhan kendaraan baik truck, bus metromini dan kendaraan roda dua untuk membacakan pernyataan sikap. Mereka menegaskan sikap dan kebulatan tekad tetap mendukung kepemimpinan DPP PDI periode 1993-1998 dibawah Ketua Umum Megawati Sukarnoputri dan Sekjen Alex Litay, dan menolak kongres PDI yang diprakarsai Fatimah Achmad yang dianggap bertentangan dengan mekanisme dan konstitusi partai yang berlaku. (Kompas/19/6/96) Dukungan lain, ribuan warga PDI yang datang dari Jakarta dan sekitarnya mengadakan *long march* untuk mendukung Megawati dan menolak kongres. Barisan massa sepanjang satu kilometer dengan tertib

berjalan kurang lebih lima kilometer dimulai dari Taman Monas melalui Jl. MH. Thamrin, Jl. Imam Bandjol dan berakhir di kantor DPP PDI Jl. Diponegoro.

Menjelang kongres berlangsung, DPD PDI Jawa Timur yang masih menyisakan konflik, menyatakan hadir pada kongres IV Medan, tetapi akan dipimpin oleh dua delegasi, yakni Sumirno (Wakil Ketua DPD PDI versi Sutjipto) dan Trimono (Sekretaris DPD PDI versi Latief Pudjosakti). Mereka disertai utusan dari 29 DPC PDI Jatim dari 37 cabang yang ada. Kendati mereka masih terpecah dua kubu, cabang-cabang ini bersatu mendatangi kongres meninggalkan Latief Pudjosakti dan Sutjipto. Oleh karenanya atas kebijakan panitia kongres maka ketua delegasi DPD PDI Jawa Timur diambil dari kedua kubu, karena masalah kepemimpinan DPD PDI Jawa Timur belum selesai. Sekretaris DPD PDI Jawa Timur Trimono mengatakan sudah bosan dengan konflik di tubuh PDI Jatim yang sudah berlangsung dua tahun, sehingga sangat gembira menyambut kongres PDI. (AB/19/6/96)

Sementara itu, mantan ketua umum PDI periode 1986-1993 menyatakan kesiapannya untuk memimpin PDI kembali. Sebelumnya, Suryadi enggan untuk tampil memimpin PDI, tetapi dengan banyaknya dukungan dari cabang-cabang yang terus mengalir membuatnya tidak bisa mengelak. Menurutnya, kalau ia terpilih menggantikan Megawati, pemerintah pasti akan mengakuinya. Tampilnya Suryadi untuk memimpin kembali kelihatan tanpa pesaing. Ini dibuktikan dengan banyaknya dukungan yang mengalir padanya, seperti dari Jateng, Jatim. Jabar dan Kaltim. Menurut Alex Widya Siregar, dipilihnya

Suryadi sebagai Ketua Umum PDI karena yang bisa mengimbangi popularitas Megawati hanya Suryadi. Kandidat lain, seperti Ismunandar, Budi Hardjono atau yang lain masih jauh bisa mengimbangi Megawati. Ia pribadi sebenarnya menginginkan Latief Pudjosakti karena Latief Pudjosakti tokoh muda PDI yang potensial.[3]

e. Kongres Medan

Kongres PDI ke IV yang berlangsung di Medan pada tanggal 20Juni 1996 resmi dibuka oleh Mendagri Yogie S. Memed dan dihadiri oleh Pangab ABRI Jenderal Faisal Tanjung. Dalam pengarahannya Jenderal Faisal Tanjung sambil menyidir kubu Megawati menyatakan, bahwa dalam perspektif politik Indonesia arah pembangunan kepartaian bukan di arahkan atas dasar basis dukungan massa yang besar, melainkan memperoleh dukungan kader yang berkualitas. (AB/21/6/96)

Pembukaan kongres juga di ikuti dengan laporan pertanggunganjawaban yang disampaikan oleh salah satu fungsionaris DPP PDI kelompok 16. Subagyo dalam pidatonya secara garis besar berisi keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan selama periode 1993 sampai 1996. Yang menarik dari pidato tersebut menyinggung daftar kesalahan Megawati. Misalnya dalam persoalan konflik PDI yang berkepanjangan karena Megawati terlalu berpegang teguh pada SK DPP No.43 yang menetapkan Sutjipto sebagai ketua DPD Jatim.

[3] Wawancara dengan AWs

Penyelesaian Jatim tidak pernah dibicarakan di DPP. Masalah itu hanya dirundingkan dengan beberapa fungsionaris saja meski anggota pimpinan DPP selalu meminta agar dibicarakan di tingkat DPP. Kesalahan lain, Megawati juga tidak mampu membentuk Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) dan Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu). Kemudian, masalah sikap politik PDI yang tercemar dan terkotaminasi tindakan manipulatif yang dilakukan oleh salah satu PDI yang juga anggota MPR/DPR fraksi PDI, Aberson M. Sihaloho yang menyinggung peran sosial politik ABRI.(Kompas/21/6/96) Pada saat rezim Orde Baru berkuasa menyinggung peran sosial politik ABRI adalah suatu yang haram. Setiap organisasi kemasyarakatan(ormas) maupun partai politik (parpol) harus mengakui dwifungsi ABRI sebagai kenyataan perjalanan politik pemerintah Orba.

Aberson. M Sihaloho dalam wawancara dengan sebuah majalah, mempersoalkan peran sospol ABRI. Menurutnya, dalam UUD'45 tida ada disebutkan ABRI memiliki peran sosial politik. Sikap politik PDI yang pertama menyebutkan bahwa semangat Orde Baru harus dipertahankan berdasarkan Pancasila dan UUD'45 secara murni dan konsekwen, yang berdaulat di negara ini adalah rakyat yang menjelma dan berserikat dalam organisasi politik. Kalau ABRI menjadi kekuatan sosial politik pasti kedaulatan rakyat tidak akan bisa tegak, hingga demokrasi akan berantakan. (Tiras/9/5/96) Pernyataan ini yang dituding sebagai sikap anti dwifungsi ABRI, dan kenyataannya memberikan

persepsi kepemimpinan PDI di bawah Megawati sudah menyimpang dari komitmen mendukung politik Orde Baru.

Akhirnya, Wakil Ketua DPR/MPR Drs. Suryadi secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1996-1998 dengan Sekjen Buttu Hutapea yang sebelumnya sekretaris DPD PDI Sumatera Utara. Tampilnya Suryadi sudah banyak diperhitungkan orang sebelum kongres berlangsung. Dalam acara pemandangan umum , 27 utusan dari DPD PDI mewakili cabang-cabang secara aklamasi menunjuk Suryadi untuk memimpin PDI. Di sisi lain dalam sidang komisi organisasi yang dipimpin oleh Ketua DPD PDI Jawa Tengah Sumario berhasil membentuk formatur untuk menyusun kepengurusan DPP PDI. Formatur terdiri dari Simon Hayon (Ketua DPD PDI NTT), Wilson Buyung (DPD Sulawesi Utara) Soemario (DPD Jateng), Lukman Mokoginta (DPD Jakarta), Buttu Hutapea (DPD Sumut), Masyadi (DPD Kalbar), Tony rahael (DPD Irja). Sedang ketua umum formatur terpilih Drs. Soeryadi. Setelah bersidang maka tim formatur mengumumkan susunan lengkap DPP PDI 1996-1998. Adapun susunan lengkapnya, Ketua Umum: Drs. Soeryadi, dengan ketua-ketua: Soemario, Fatimah Achmad, Ismunandar, Panagian Siregar, Slamet Mulyadi, Subagyo, KH. Cholid Murod, Yahya Theo, Abdulgani, Mulyono Sutarmo, Dimmy Haryanto, Lois Nangoi, Markus Wauran, Anwar Datuk, Djupri, SH, I Gusti Ngurah Sara, Budi Hardjono, Tiop Harun Sitompul, Taslim haki, Clara Sitompul, Harsoko Sudiro dan Said Sutjoro. Sedangkan Sekjen dan Wakil Sekjen antara lain, Buttu Hutapea, Wakil Sekjen, Ratna Ratih Purnami,

Andi Chairul Manggabarani, Titi Djuliasih, Romulus Sihombing, Sudaryanto, Tuti Maryatno dan dr. Syafei Aligumay. (AB/24/6/96)

Tanggapan Megawati terhadap kongres PDI IV di Medan dan terpilihnya Soeryadi, menyatakan bahwa dirinya masih Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998. Di samping itu, Megawati juga menegaskan bahwa kongres di Medan merupakan pelanggaran hukum dan ikonstitusional. Kongres tersebut merupakan tindakan yang tidak sah dan merupakan bentuk pemaksaan terhadap nilai-nilai demokrasi. (Kompas/21/6/96)

Pemerintah yang sejak semula sudah mendukung kelompok pro kongres, menyatakan bahwa pemerintah hanya mengakui DPP PDI hasil kongres Medan. Sebaliknya, pemerintah tidak mengakui lagi DPP PDI pimpinan Megawati hasil Munas di Jakarta 1993. Dalam hal ini Mendagri Yogie S. Memed menyatakan, pemerintah menilai DPP PDI hasil kongres ini yang sah dan tidak ada yang lain. Begitu juga dengan sikap ABRI yang disampaikan oleh Kassopol ABRI Syarwan Hamid, pemerintah mengangap sah segala keputusan kongres Medan begitu juga dengan personalia DPP yang dibentuk, dan untuk itu DPP PDI Megawati hasil Munas 1993 harus tunduk dan menerima keputusan kongres yang merupakan konstitusi tertinggi. (AB/24/6/96) Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, melalui Dirjen Sospol Sutoyo NK menyatakan, pemerintah tidak akan lagi melayani DPP PDI pimpinan Megawati Sukarnoputri, dan hanya mengakui DPP PDI hasil kongres Medan pimpinan Suryadi.

f. Dukungan Megawati Dan Mimbar Bebas

Bersamaan dengan pembukaan kongres PDI di Medan pada tanggal 20 Juni 1996, massa PDI pendukung Megawati berbaur dengan aktivis pro demokrasi mengadakan aksi. Ribuan massa PDI yang datang dari sekitar Jabodetabek melakukan *Long March.* Massa berangkat dari Kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro menuju Taman Monas, melewati Jl. MH Thamrin, Jl. Imam Bondjol menuju kantor DPP PDI di Jl Diponegoro. Dalam aksi tersebut turut serta tokoh-tokoh PDI, seperti Manai Sophian, Yacob Nuwa Wea, Alexander Litay, Sukmawati dan anggota fraksi DPR RI pendukung Megawati. Aksi kemudian berkembang menjadi bentrokan antara massa pendukung Megawati dengan petugas keamanan.

Bentrokan itu bermula, ketika massa PDI pendukung Megawati berniat melakukan doa bersama di Taman Monas, tetapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, aparat akhirnya mengarahkan massa ke Jl. Merdeka Selatan dan kemudian ke Jl Merdeka Timur dan diblokir persis di depan Stasiun Gambir. Suasana tegang mulai berlangsung ketika massa PDI itu meminta agar jalan menuju ke kantor Depdagri dibuka. Aparat keamanan sudah mencoba untuk persuasif agar massa PDI kembali dan tidak meneruskan langkahnya. Ada upaya juga dari Manai Sophian, Manggara Siahaan dan Alexander Litay juga berusaha membujuk massa PDI kembali ke kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro. Tetapi massa tetap memaksa membuka akses jalan ke Depdagri. Suasana tegang pun terjadi, akhirnya terjadi aksi saling dorong mendorong dan lemparan batu.

Petugas keamanan sempat kewalahan dan mundur ke belakang, tak berapa lama kemudian mendapatkan bantuan dua panser dan satu kendaraan lapis baja untuk memukul balik massa. Pada saat inilah banyak korban berjatuhan. Namun, bentrokan tidak berlangsung lama, aparat keamanan dengan cepat dapat mengusai keadaan dan memaksa massa PDI untuk kembali ke kantor DPP PDI. Akibat bentrokan tersebut, menurut Asisten Operasi Komando Garnisun Ibukota Kolonel Koesnadi dan Asisten Operasi Kodam Jaya Kolonel Ansyori Deas, menjelaskan sedikitnya 55 orang petugas keamanan luka-luka akibat bentrok dengan massa PDI. Sedangkan, dari pihak massa PDI, 14 orang mengalami luka parah, 10 orang mengalami luka ringan, dan 74 orang lainnya dilaporkan belum kembali ke regunya. (Kompas/21/6/96)

Sebelumnya, bentuk penolakan terhadap pelaksanaan kongres PDI di Medan, tidak hanya di Jakarta, melainkan meluas diberbagai daerah dengan melakukan berbagai aksi, seperti yang dilakukan oleh DPD PDI Jawa Timur yang melakukan pawai keprihatinan sebagai pengganti rencana mereka yang akan melakukan *long march* dari Surabaya ke Jakarta, dukungan yang disampaikan baik melalui telpon maupun *faksimile*. Dukungan antara lain datang dari DPC-DPC Yogyakarta, DPD Sulawesi Selatan, seluruh DPC Riu. Bahkan, aksi dukungan dilakukan dengan menduduki kantor DPC atau DPD, seperti di Semarang, Jawa Tengah, kantor DPD PDI dikuasai oleh pendukung Megawati. Begitu juga di Lampung, kantor DPD PDI Lampung diduduki oleh massa PDI pendukung Megawati. (Kompas/22/6/96)

Setelah “insiden Gambir” dicapai suatu kesepakatan dengan Pangdam Jaya Mayjen Sutyoso dengan PDI pendukung Megawati bahwa tidak ada larangan bagi anggota PDI untuk datang ke kantor DPP PDI. Bagi PDI pendukung Megawati, hal ini menjadi kesempatan untuk menggelar “mimbar bebas”. Aksi mimbar digelar mulai pukul 14.00 WIB sampai 17.20 WIB, bertempat di halaman depan kantor DPP PDI.

Di samping, mengadakan mimbar bebas di depan kantor DPP PDI, para pendukung Megawati juga melakukan kegiatan aksi di luar. Misalnya, ratusan massa yang memakai seragam merah hitam dan atribut PDI lengkap dengan spanduk dan gambar-gambar Megawati mendatangi Gedung DPR/MPR untuk bertemu dengan Ketua MPR/DPR Wahono menyampaikan aspirasi, yakni menolak kongres PDI Medan. Tetapi, niatan untuk menyampaikan aspirasi tidak berhasil karena tidak diterima pimpinan MPR/DPR. Akhirnya, massa berkumpul di loby Gedung DPR dan menggelar mimbar bebas serta menyanyikan lagu-lagu PDI dengan pendukung Megawati. Selain yel-yel tetap mendukung DPP PDI Megawati. Mereka juga meneriakan slogan-slogan anti Suryadi dan Fatimah Achmad cs. (Kompas/29/6/96)

Akibat aksi jalanan yang terus bergulir, Bakorstanada Jaya Mayjen Sutiyoso menegaskan, aksi massa jalanan yang saat ini telah menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan tidak akan dibiarkan berlarut-larut, karena gejala itu dapat mengganggu kehidupam di Ibukota. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh Gubernur DKI Jakarta Suryadi Soedirdja menyatakan aksi

massa yang turun sepekan ini telah mengganggu mobilitas masyarakat dan kegiatan sehari-hari warga Jakarta. "Kalau bisa secepatnya kita akhiri situasi tak menentu ini, karena tidak menguntungkan siapapun", katanya. (Kompas/29/6/96)

Tanggapan DPP PDI Megawati Sukarnoputri atas keluhan tersebut, meminta maaf atas gangguan terhadap kelancaran perjalanan yang diakibatkan oleh aksi-aksi massa PDI pendukung Megawati. Namun, mereka menyatakan keberatan kalau pihaknya yang dijadikan kambing hitam dari segala aksi protes akhir-akhir ini, termasuk pemerintah yang memungkinkan kongres di Medan 20-24 Juni 1996 bisa terlaksana. (Kompas/1/6/96)

Pasca kongres Medan dan "insiden Gambir", aktivitas di kantor DPP PDI yang masih dikuasai PDI pendukung Megawati tidak makin surut, justeru makin ramai. Adanya mimbar bebas yang digelar di depan kantor DPP PDI menarik warga untuk datang, tidak hanya warga Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga berbagai daerah datang menyatakan dukungannya. Di samping itu, di sela-sela aktivitas mimbar bebas, digelar pula aksi-aksi jalanan yang dikordinir oleh aktivis yang berada di posko pemuda dan mahasiswa.

Kendati banyak suara sumbang dari pejabat pemerintah tentang mimbar bebas dan aksi-aksi jalanan yang digelar, ternyata tidak menyurutkan massa pendukung Megawati menurunkan akivitas mereka. Dalam beberapa pekan pasca kongres Medan, aktivitas mereka terus meningkat. Orasi-orasi yang ditampilkan tidak lagi sekedar menghujat kepengurusan PDI Suryadi,

melainkan mulai mencaci maki dan mendiskreditkan pejabat pemerintah dan ABRI. Keadaan tersebut mengundang kekawatiran dari kalangan anggota DPR, seperti Achmad Moestahid Astari dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP) mengatakan kalau tidak ada tindakan tegas dari aparat pemerintah aksi mimbar bebas itu bisa membesar. “Percayalah, kalau gerakan mereka dibiarkan akan menjadi bola salju yang tidak menguntungkan”, jelasnya.(Republika/24/7/96) Namun begitu, budayawan Emha Ainun Najib tidak yakin kegiatan mimbar bebas itu bisa melahirkan *people power.* “Kecil kemungkinan aksi warga PDI pendukung Megawati akan berkembang menjadi gerakan sangat besar semacam *people power* di Filipina”, katanya.(Republika/24/7/96).

Beberapa pekan pasca kongres PDI Medan, aktivitas di kantor DPP PDI tidaklah makin mereda. Kegiatan mimbar bebas tetap berlangsung dan makin meriah dengan kedatangan Megawati Sukarnoputri yang berpidato di atas mimbar bebas. Didampingi fungsionaris lain, seperti Sutardjo Suryoguritno, Manggara Siahaan, di atas mimbar Megawati menerima dukungan dari warga PDI yang di daerah maupun pemuda dan mahasiswa. Di luar kantor DPP PDI, aktivitas aksi jalanan sering digelar, seperti ratusan mahasiswa yang datang dari berbagai perguruan tinggi serta pemuda menggelar aksi di lokasi Monumen Proklamasi. Kompas/5/7/96)

Referendum

Menghadapi tudingan bahwa kepemimpinan DPP PDI hasil Kongres IV Medan karena mengandalkan legitimasi pemerintah dan tidak berdasarkan arus

bawah. Drs. Suryadi menyatakan tudingan itu tidak berdasar, pihaknya tetap mengandalkan legitimasi dan dukungan dari cabang dan daerah. “Kami sudah memutuskan dalam waktu dekat akan berkunjung ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan keputusan kongres maupun konsolidasi organisasi”, katanya. Ia juga menyatakan usulan referendum yang diwacanakan oleh pihak luar dan PDI Megawati baik dalam mekanisme organisasi maupun dalam AD/ART tidak diatur. (Kompas/3/7/96)

Wacana referendum ini memang pernah disuarakan oleh mantan Mendagri Rudini yang mengatakan, baik Megawati Sukarnoputri dan Suryadi harus dapat membuktikan diri bahwa mereka masing-masing yang memang diinginkan dan diterima oleh rakyat menjadi ketua umum DPP PDI yang sesungguhnya. Untuk menentukan siapa sebenarnya yang mendapat pengakuan rakyat, bisa dilakukan referendum. Begitu pula fungsionaris DPP PDI Megawati, Soetardjo Suryoguritno menyatakan dengan mengadakan referendum bisa diketahui siapa sebenarnya yang diinginkan rakyat untuk memimpin PDI. (Kompas/2/7/96)

Wacana referendum ini memang sempat menghangat dalam mensikapi hasil Kongres IV Medan. Dukungan yang luar biasa dari massa arus bawah terhadap Megawati Sukarnoputri. Langkah referendum bisa jadi menjadi jalan untuk mengembalikan kembali posisi Megawati Sukarnoputri sebagai ketua umum PDI. Upaya referendum ini pun ternyata telah dilakukan di daerah. Misalnya, referendum yang dilakukan DPC PDI Semarang. Tetapi hal tersebut memang sekedar wacana, Pangab ABRI Jenderal Faisal Tanjung dengan tegas

mengatakan dalam AD/ART Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tidak dikenal adanya refendum. “Tapi kalau DPP PDI menghendaki referendum terserah DPP”. “Tapi kami kira di dalam AD/ART tidak ada tentang referendum, kalau di AD/ART tidak ada, ya tidak ada referendum”, tegasnya. (Kompas/3/7/96)

Kendati sudah terpilih sebagai Ketua Umum PDI dan terbentuk kepengurusan DPP PDI periode 1996-1998, dan dukungan dari Mendagri dan Pangab begitu bulat. Misalnya, pernyataan dari Mendagri, pemerintah hanya mengakui satu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI. Setelah Munas PDI di Jakarta hanya mengakui DPP PDI pimpinan Megawati Sukarnoputri, dan setelah kongres ke IV PDI pemerintah hanya mengakui kepemimpinan PDI Suryadi.(AB/3/7/96). Tetapi bagi Suryadi, hal tersebut belum membuat ia nyaman, kalau belum diterima Presiden Soeharto sebagai pemilik tertinggi legitimasi politik. Apalagi isyarat yang disampaikan Mensesneg Moerdiono sangat jelas bahwa Presiden Soeharto meminta PDI melakukan konsolidasi. Sedang yang dimaksud dengan konsolidasi adalah adanya kesatuan dalam PDI. “Pemimpin organisasi tentunya bisa menyatukan seluruh organisasinya”, kata Mensesneg itu. (Kompas/5/7/96) Menangapi hal itu, Sekjen PDI hasil kongres Medan Buttu Hutapea mengatakan pihaknya sudah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap kubu Megawati melalui serangkaian dialog, tetapi upaya itu belum menghasilkan seperti apa yang diharapkan. (Kompas/6/7/96)

Sementara itu, PDI Megawati atas penyelengaraan kongres PDI IV Medan melalui Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengajukan gugatan

perdata ke Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan itu ditujukan ke Mendagri dan Panglima ABRI didasarkan atas keterlibatan secara langsung atau tidak langsung dalam mempersiapkan, merekayasa serta membiayai kongres. Berkaitan dengan semua itu, pemggugat menyatakan panitia dan pimpinan kongres PDI di Medan tidak sah, sehingga DPP yang dibentukpun juga tidak sah. Atas gugatan yang dilakukan PDI Megawati, melalui Kasum ABRI Letjen Soeyono mengatakan gugatan itu bisa berarti gugatan terhadap Negara. Sebab, ABRI hanya menjalankan tugas. (Kompas/10/7/96)

g. Labeling "Setan Gundul"

Reaksi keras atas pelarangan aktivitas mimbar bebas terus bergulir yang diungkapkan oleh petinggi ABRI maupun parlemen. Pangab Jenderal Faisal Tanjung menilai mimbar bebas telah mengganggu ketertiban masyarakat, tidak memiliki etika da nada tanda-tanda ke arah makar. (Republika/23/7/96) Begitu juga, Pangdam Jaya Sutiyoso akan membubarkan mimbar bebas apapun resikonya sebab telah mengarah pada makar.(Bisnis Indonesia/26/7/96) Upaya persuasif untuk membubarkan mimbar bebas yang dilakukan para pejabat Negara makin hari keras. Sinyalemen aktivitas mimbar bebas telah ditunggangi oleh pihak ketiga, bahkan seperti yang diungkapkan Pangab, Jenderal Faisal Tanjung mengatakan manuver politik yang dilakukan sebagian kelompok masyarakat menunjukan gejala seperti yang dilakukan gerakan kiri. (AB/19/7/96) Apalagi setelah Suryadi diterima oleh Presiden Soeharto pada tanggal 25 Juli 1996. Dalam pertemuan itu Presiden Soeharto segenap jajaran

PDI untuk mewaspadai adanya “setan gundul”, yakni pihak-pihak tertentu yang anti pemerintah yang melakukan pemboncengan atau menunggangi masalah yang terjadi di PDI.

Bantahan terhadap sinyalemen makar, seperti dikatakan Megawati agar pemerintah tidak melihat mimbar mengarah ke upaya makar karena memang mimbar bebas bukan dimaksudkan untuk itu. Apalagi kegiatan mimbar bebas dilakukan secara terbuka.(Kompas/23/7/96)

Pasca Penyerangan 27 Juli 996

Pasca penyerangan kantor DPP PDI pada tangal 27 Juli, reaksi dari aparat pemerintah*pun* seragam. Pemerintah berusaha untuk mencari kambing hitam dibalik peristiwa tersebut. Sebelum insiden penyerangan terjadi, sinyalemen adanya pihak-pihak luar warga PDI pendukung Megawati yang ikut dalam kegiatan mimbar bebas dan aksi jalanan sudah sering dilontarkan. Seperti pernyataan Pangab yang menyebut adanya pihak ketiga manfaatkan kegiatan aksi unjuk rasa, dan menuduh kegiatan mimbar bebas sudah mengarah pada makar. Puncaknya ketika menjelang peristiwa penyerangan kecaman-kecaman keras untuk membubarkan kegiatan mimbar bebas terus bergulir. Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Hamami Nata meginstruksikan kepada jajaran DPP PDI Megawati untuk membubarkan mimbar bebas. (Kompas/24/7/96) Begitu juga, dengan Pangdam Jaya Mayjen Sutiyoso sehari sebelum peristiwa penyerangan menyatakan akan menghentikan aksi politik tersebut. (Kompas/26/7/96)

Begitu aksi penyerangan selesai, sasaran tembak sebagai biang keladi kerusuhan diarahkan pada pihak ketiga. Hal ini seperti disampaikan Pangab Jenderal Faisal Tanjung dalam siaran pers yang di Mabes ABRI. Berikut kutipan pernyataan tersebut.

PERNYATAAN
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA

1. Kemelut yang menyangkut PDI telah ditunggangi oleh oknum-oknum /golongan / kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan-tindakan anarkhi. Kegiatan tersebut telah menjurus kepada kebringasan massa yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta hasil pembangunan.
2. Setiap tindakan yang bersifat beringas, merusak, menggangu ketertiban umum dan ketentraman menghambat kelancaran roda perekonomian serta segala sesuatu yang melanggar hukum niscaya akan akan menimbulkan kerugian dan korban di kalangan masyarakat. Untuk itu aparat keamanan melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Diserukan kepada segenap warga PDI untuk menjauhkan diri dari tingkah laku yang memungkinkan pemboncengan oleh oknum/golongan/kelompok yang nyata-nyata telah mengganggu ketertiban umum dan stabilitas nasional.
4. Dihimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tidak terpancing oleh segala bentuk hasutan, bujukan ataupun ajakan yang dilakukan oleh oknum-oknum. /golongan/kelompok yang tidak bertanggung jawab.
5. Kepada seluruh jajaran ABRI di manapun berada dan bertugas saya perintahkan agar meningkatkan kewaspadaan mengutamakan persatuan dan kesatuan memelihara kemanunggalan ABRI rakyat serta bertindak tegas terhadap setiap pelangaran hokum dan penganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Panglima Angkatan Bersenjata

Faisal Tanjung
Jenderal TNI

Gambar 23
Pernyataan Pangab Jnederal Faisal Tanjung
Sumber : Harian Angkatan Bersenajata,
29/7/1996

Menarik untuk dikaji pernyataan Pangab Jenderal Faisal Tanjung dalam bentuk release pasca penyerangan. Pernyataan Pangab itu mengarahkan bahwa kemelut yang melanda PDI telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan anarkhi. Yang dimaksud dengan kelompok itu adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD). Kendati, banyak pihak yang meragukan klaim dari pemerintah, merupakan dalih untuk mencari kambing hitam. Tetapi, pemerintah melalui Kassospol ABRI Letjen Syarwan Hamid membatah hal tersebut, dan menegaskan PRD adalah dalang dari kerusuhan itu dan berniat untuk menggulingkan pemerintah. (Kompas/30/7/96)

Dampak dari kerusuhan tersebut, aparat keamanan telah menahan sebanyak 171 orang. Mereka akan diajukan ke pengadilan karena mengganggu Kamtibmas, seperti pembakaran dan pelemparan batu. Dari yang ditangkap, 25 orang merupakan pendukung Suryadi dan sisanya pendukung Megawati yang berasal dari berbagai daerah.(AB/29/7/96)

Menanggapi insiden penyerangan kantor DPP PDI, Megawati Sukarnoputri menilai cara pengambilalihan kantor tersebut sebagai suatu yang tragis. “Saya sangat sedih. Saya tidak menghendaki tragedy ini karena karena kejadian tersebut sangat kejam”, tegasnya. (Terbit/29/7/96) Sementara itu, Drs. Suryadi Ketua Umum PDI hasil kongres IV Medan mengatakan aksi destruktif dan cenderung makar di Jl. Diponegoro dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemelut PDI, tetapi ada pihak lain yang menunggangi. Mengenai aksi kekerasan ketika pengambilalihan kantor PDI, pihaknya beralasan karena sudah berulang

kali mengadakan negoisasi tetapi tidak diberikan, sehingga terpaksa menggunakan kekuatan fisik yang mendapat dukungan dari aparat keamanan. Dukungan dari aparat keamanan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya banyak korban. (Terbit/29/7/96)

Sementara itu langkah yang diambil oleh pejabat militer terhadap insiden "27 Juli" mendapat dukungan yang luas karena berhasil dalam mengatasi aksi kerusuhan dan tindakan pengerusakan serta heboh bangkitnya "komunisme gaya baru' Partai Demkratik Indonesia (PRD) seperti sinyalemen pemerintah. Dukungan dari Golkar, Parpol maupun Ormas yang kebanyakan dari ormas Islam, seperti Ikatan Cendikiawan MuslimIndonesia (ICMI), Himpunan mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Pemuda Tarbiyah dan Angkatan Muda Islam Indonesia cukup seragam: mengecam dengan keras dan medukung upaya pemerintah dan ABRI yang menindak tegas pelakunya. (Forum keadilan/26/8/96) Bahkan salah seorang Ketua DPP Golkar Abdul Gafur menyebut perlunya aparat keamanan untuk mengusut Megawati Sukarnoputri sebagai penanggung jawab mimbar bebas pemicu aksi brutal tersebut.

Dari narasi tentang konflik internal PDI dimulai dengan usulan dari DPC dan DPD PDI seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan kongres yang merupakan pangkal konflik internal, penyelenggaraan kongres, mimbar bebas, dan aksi penyerangan kantor DPP PDI merupakan rangkaian cerita yang

membentuk narasi. Ikhtisar dari narasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Narasi Dalam Konflik Internal PDI

Narasi	Aparat Pemerintah Orde Baru	PDI Pro Kongres	PDI Pendukung Megawati	Profesional
Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Kongres	Kongres PDI merupakan permintaan murni partai.	Dukungan 21 DPD dan 215 DPC PDI menghendaki kongres.	16 DPD dan 141 DPC PDI tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan Konstitusi Partai dan tidak dibuat berdasarkan rapat cabang.	
Legitimasi Kongres	Pemerintah akan memberikan izin bagi penyelenggaraan kongres.	Dalam AD/ART 1986 pasal 12 menyatakan jika kongres tidak bisa diselenggarakan bisa dilakukan Munas, dan hasil Munas akan dipertanggungjawabkan dalam kongres.	Ketentuan pasal 29 ayat (1) AD tersebut. Hasil Munas PDI tahun 1993 memutuskan masa kepengurusan DPP PDI adalah tahun 1993-1998.	
Upaya Rekonsiliasi	Para fungsionaris partai PDI sebaiknya melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada.	Tidak mungkin lagi melakukan musyawarah sebelum kongres.	Mengajak 16 fungsionaris DPP PDI untuk bermusyawarah dan kembali pada ketentuan konstitusi partai.	Pemerintah mengambil inisiatif memprakarsai pertemuan keduanya.
Menjelang Kongres IV PDI	Permintaan untuk mengadakan kongres sudah disampaikan secara resmi kepada pemerintah, dan pemerintah menyetujuinya.	Persiapan kongres di Medan sudah rampung 100 persen, tinggal materi kongres yang perlu dibicarakan dan sudah ada 225 DPC dari seluruh Indonesia sudah datang	PDI Megawati mengancam akan membawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menggugat mereka yang memberi izin kongres.	Kondisi kemandirian organisasi sosial politik sangat memprihatinkan.

Narasi	Aparat Pemerintah Orde Baru	PDI Pro Kongres	PDI Pendukung Megawati	Profesional
Kongres Medan	Pemerintah tidak akan lagi melayani DPP PDI pimpinan Megawati Sukarnoputri, dan hanya mengakui DPP PDI hasil kongres Medan pimpinan Suryadi.	Drs. Suryadi secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1996-1998 dengan Sekjen Buttu Hutapea.	Kongres tersebut merupakan tindakan yang tidak sah dan merupakan bentuk pemaksaan terhadap nilai-nilai demokrasi.	
Dukungan Megawati Dan Mimbar Bebas	Aksi massa yang turun sepekan ini telah mengganggu mobilitas masyarakat dan kegiatan sehari-hari warga Jakarta.		Ribuan massa PDI yang datang dari sekitar Jabodetabek melakukan Long March.	Tidak yakin kegiatan mimbar bebas itu bisa melahirkan people power.
Referendum	AD/ART Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tidak dikenal adanya refendum.	Usulan referendum yang diwacanakan oleh pihak luar dan PDI Megawati tidak diatur baik dalam mekanisme organisasi maupun dalam AD/ART.	Dengan mengadakan referendum bisa diketahui siapa sebenarnya yang diinginkan rakyat untuk memimpin PDI.	Megawati Sukarnoputri dan Suryadi harus dapat membuktikan memang diinginkan. Untuk pengakuan rakyat, bisa dilakukan referendum.
Tindakan Makar Dan Setan Gundul	Mimbar bebas telah mengganggu ketertiban masyarakat, tidak memiliki etika ada tanda-tanda ke arah makar.	Jajaran PDI untuk mewaspadai adanya “setan gundul”, yakni pihak-pihak tertentu yang anti pemerintah yang melakukan pemboncengan di PDI.	Mimbar bebas bukan dimaksudkan untuk makar. Apalagi kegiatan mimbar bebas dilakukan secara terbuka.	

Pasca Penyerangan pada 27 Juli 1996	Kemelut yang menyangkut PDI telah ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan-tindakan anarkhi.	Aksi kekerasan ketika pengambilalihan kantor PDI, pihaknya beralasan karena sudah berulang kali mengadakan negoisasi tetapi tidak diberikan, sehingga terpaksa menggunakan kekuatan fisik yang mendapat dukungan dari aparat keamanan.		Mengusut Megawati Sukarnoputri sebagai penanggung jawab mimbar bebas pemicu aksi brutal tersebut.

Dalam melakukan analisis oposisi biner, hal terpenting dari miteme dalam narasi dan relasi di antara miteme-miteme tersebut, yang berupa kalimat, pernyataan yang penting dan mempunyai makna secara utuh. Dari miteme tersebut disusun secara sintagmatik dan paradigmatik. Tabel di atas merupakan miteme-miteme yang ditemukan dalam narasi.

6.2. Oposisi Biner Dalam Narasi Konflik Internal PDI

Berdasarkan pada miteme-miteme yang telah disusun pada narasi di atas, maka disusun sintagmatik dan paradigmatiknya. Dari analisis atas oposisi biner pada konflik internal PDI ini masalah utama sebagai oposisi biner adalah antara masalah legitimasi dan tidak legitimasi. Kedudukan partai politik pada era rezim Orde Baru merupakan sub ordinat dari kekuasaan. Suksesi kepemimpinan partai politik sangat ditentukan oleh penguasa. Dengan demikian menjaga hubungan baik dengan penguasa bagi pemimpin partai politik ataupun elite kepentingan sangat dibutuhkan guna menjaga legitimasi ataupun mencari legitimasi.

Krisis legitimasi PDI di bawah kepemimpinan Megawati diawali ketika adanya desakan dari berbagai DPC maupun DPD PDI seluruh Indonesia mendesak untuk diselenggarakan kongres. Desakan kongres tersebut, tidak konstitusional, karena masa kepengurusannya yang merupakan produk Munas 1993 akan mengakhiri masa kepengurusannya pada tahun 1998. Akibatnya, kekuatan PDI terbelah, yaitu konflik antara kelompok PDI Megawati dengan " kelompok 16" pimpinan Fatimah Achmad yang menginginkan segera diadakan kongres. Di pihak lain, pemerintah Orde Baru lebih mengakomodir "kelompok 16" karena desakan kongres sudah sesuai dengan konstitusi partai dan berlangsung secara alamiah. Berbeda dengan kelompok PDI Megawati, desakan kongres akibat campur tangan penguasa dan rekayasa.

Kongres, akhirnya berlangsung di Medan pada bulan pertengahan Juni 1996 dengan terbentuknya kepengurusan baru, yaitu Soeryadi sebagai Ketua Umum dan Sekjen Buttu Hutape. Kepengurusan baru DPP PDI, kemudian mengalami transformasi metaforik, yaitu antara legal dan illegal. Kelompok PDI pro kongres merupakan kepengurusan yang legal, sebaliknya dengan PDI Megawati berada pada kepengurusan yang illegal.

Posisi yang demikian menjadikan kelompok PDI Megawati melakukan penguasaan kantor dan mendirikan mimbar bebas, yang terus berlanjut dengan aksi-aksi yang lain, seperti aksi demonstrasi dan aksi publisitas. Aksi-aksi tersebut dimata penguasa dianggap sudah meresahkan dan sudah disusupi oleh pihak ketiga untuk melakukan makar terhadap pemerintah yang sah. Untuk

menghentikan aksi tersebut, kelompok yang menamakan PDI pro kongres mengadakan penyerangan terhadap kantor DPP PDI yang kemudian berujung pada kerusuhan.

Dari narasi yang tersusun dalam konflik internal terjadi tranfomasi metaforik dari hal yang abstrak, yaitu antara pahlawan (baik) dengan (penjahat), yang legitimate dan tidak legitimate menuju pada hal yang kongkret, dan menempatkan pemerintah rezim Orde Baru tampil sebagai pahlawan yang mampu mengatasi tindakan anarkhi.

Baik	:	Buruk	ABSTRAK
Pahlawan	:	Penjahat	↓
Legitimasi	:	Tidak Legitimasi	↓
Konstitusional	:	Inkonstitusional	
Legal	:	Ilegal	
Persetujuan	:	Penolakan	
Pertanggungjawaban	:	Pengingkaran	Transformasi
Perundingan	:	Pertikaian	Metaforik
Rekonsiliasi	:	Pemisahan	↓
Kepatuhan	:	Pelanggaran	
Putusan banyak orang	:	Putusan sepihak	
Makar	:	Muslihat	↓
Tertib	:	Kacau	
Damai	:	Anarkhi	
PDI Pro Kongres, Rezim Orde Baru	:	PDI Megawati	
			KONKRET

Gambar 24
Transformasi Metaforik Konflik Internal PDI

Dalam gambar di atas, menunjukan struktur terbagi dalam tiga kelompok nilai. *Kelompok pertama,* mulai dari hal yang abstrak dari suatu nilai yang universal tentang kebudayaan, antara yang "baik" dengan yang "jahat". *Kelompok kedua* menuju pada nilai yang spesifik mengenai wujud kongret tentang hukum, bahwa yang baik ditunjukan dengan adanya legitimasi, konstitusional, legal dan kepatuhan yang beroposisi dengan yang buruk yang ditunjukan sebagai hal yang tidak legitimate, inkonstitusional, ilegal dan pengingkaran. *Kelompok ketiga,* nilai-nilai konkret dari unsur aktual narasi tersebut. Yang "baik" digambarkan sebagai kubu yang tertib, damai dan kemudian bernegoisasi dengan kepahlawanan yang menyelamatkan situasi dari kekacauan dan tindak anarkhi. Figur kepahlawanan ini disimbolisasikan dengan militer.

Hal yang menarik dari proses pemaknaan oposisi biner adalah upaya untuk mempertahankan sosok mitos kepahlawanan. Bagi Levi Straus, sebuah mitos merupakan transformasi lokal atas struktur dalam konsep oposisi biner yang penting bagi kebudayaan tempat beredarnya mitos tersebut. Mitos yang amat kuat dan signifikan berfungsi sebagai penurun kecemasan yang dengan cara ini mitos berhadapan dengan kontradiksi yang melekat pada setiap struktur oposisi biner, dan meski mitos tidak bisa memecahkan, mitos tetap memberikan cara hidup yang imajinatif bersamannya dan menyesuaikannya sehingga tidak menjadi terlalu disruptif dan tidak melahirkan banyak kecemasan kultural. (dalam Fiske:2004:170)

Dalam konflik internal PDI ini muncul sosok mitos kepahlawanan yang mampu menyelamatkan negeri dari kekacauan untuk menuju pada ketertiban dan kedamaian. Figur baik dalam mitos ini adalah PDI Pro Kongres yang dikonotasikan sebagai konstitusional, legal, tertib dan mempunayi legitimasi politik. Sedangkan, figur yang jahat dalam mitos ini kelompok PDI Megawati yang illegal, inkonstitusional, penuh muslihat, dan anarkhi. Figur baik akhirnya bernegosiasi dengan pahlawan, yaitu ABRI yang berhasil membuat ketertiban, kedamaian dan menyelamatkan negara dari tindakan anarkhi. Mitos ini menjelaskan tentang perilaku yang jahat dengan yang baik. Perilaku yang baik menemukan kawan yang seiring dengan kepahlawanan.

Konflik internal PDI diawali dengan persoalan legitimasi dan tidak legitimasi, kemudian membentuk transformasi metaforik yang lebih abstrak, yaitu tentang hal yang baik yang ditransposisikan dengan hal yang buruk. Hal yang "baik" adalah PDI Pro Kongres. Mereka yang "baik" ditransformasikan ke dalam makna yang lebih konkret bahwa PDI Pro Kongres adalah konstitusional, legal dan berorietasi pada kedamaian. Misalnya, pada saat menjelang kongres, narasi mengenai legitimasi kongres. PDI Pro Kongres mengkonstruksi wacana bahwa kongres merupakan inisiatif dari arus bawah dan sesuai dengan AD/ART Partai. Hal ini ditunjukan dengan banyaknya dukungan dari berbagai DPC dan DPD PDI yang menginginkan kongres.

Berbeda dengan kelompok PDI Megawati yang ditransformasikan dalam makna yang beroposisi sebagai yang "tidak legitimate", "illegal" dan melakukan

kegiatan “makar” selalu selalu membuat “anarkhi”. Dalam konteks konflik internal PDI ini, muncul pahlawan, yaitu rezim Orde Baru yang mampu mengendalikan situasi. Di pihak lain, kelompok Megawati ditransformasikan dalam bentuk oposisi sebagai figur yang jahat yang selalu membuat situasi “anarkhi” atau kekacauan sebagai akibat dari konflik tersebut.

Figur jahat ini diperkuat dengan politik *labeling* yang dilakukan rezim Orde Baru. Hal ini akibat dari aktivitas mimbar bebas maupun aksi jalanan terus bergulir yang dianggap sudah mengganggu ketertiban umum. *Labeling* adalah penerapan kata-kata ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan. (Nimmo:108:1999) Di Jerman Nazi, misalnya, golongan elite berkuasa sebagai kebijakan memberi label golongan Yahudi dengan “parasite”, “binatang penganggu” dan “baksil” dan dengan demikian menempatkan mereka bukan manusia, melainkan sebagai hama untuk dibasmi. Sinyalemen aktivitas mimbar bebas telah ditunggangi oleh pihak ketiga, bahkan seperti yang diungkapkan Pangab, Jenderal Faisal Tanjung mengatakan manuver politik yang dilakukan sebagian kelompok masyarakat menunjukan gejala seperti yang dilakukan gerakan kiri. (AB/19/7/96) Apalagi setelah Suryadi diterima oleh Presiden Soeharto pada tanggal 25 Juli 1996. Dalam pertemuan itu Presiden Soeharto segenap jajaran PDI untuk mewaspadai adanya “setan gundul”, yakni pihak-pihak tertentu yang anti pemerintah yang melakukan pemboncengan atau menunggangi masalah yang terjadi di PDI.

Politik *labeling* merupakan “garis demakarsi” yang dibuat bertujuan untuk memisahkan mereka yang patuh dan mereka yang melawan. Dengan stigmatisasi bahwa mimbar bebas sudah ditunggangi oleh gerakan kiri, dan mengarah ke makar merupakan upaya melakukan penggalangan opini dengan memanfaatkan trauma massa lalu tentang gerakan komunis yang pernah melakukan pembrontakan dan bertindak kejam serta melakukan anarkhi.

5.3. Habitus: Antara Kelompok Kopertif Dengan Non Koperatif

Karateristik habitus dapat ditelusuri, *pertama*, habitus menjiwai tindakan kolektif aktor-aktor sosial maupun individual. Aktor-aktor yang memiliki posisi sama dalam bidang tertentu cenderung mengembangkan disposisi serupa dan dengan demikian melakukan praktik-praktik yang serupa pula. *Kedua,* habitus memainkan peran sentral dalam keawetan hierarki sebagai suatu hal yamg alami, sah dan tidak terhindarkan. Habitus juga menentukan apa yang mungkin dan apa yang tak mungkin dalam aliran sehari-hari kehidupan sosial. (dalam Edkins & Williams:141:2010)

Mengikuti karateristik dari habitus tersebut, menjadi landasan dalam memahami habitus para aktor yang terlibat konflik. Pada saat konflik, penentu dari budaya adalah rezim Orde Baru, dengan demikian karakter maupun perilaku merupakan hasil dari mesin aksi budaya rezim Orba. Marx mengatakan, “kebudayaan suatu massa milik dari kelas yang berkuasa”. Disposisi kognisi maupun perilaku ditentukan oleh rezim berkuasa. Untuk itu pelacakan terhadap

budaya politik rezim Orba penting untuk menjadi pembuka dalam memahami habitus aktor yang lain.

Memahami habitus politik rezim Orde Baru memang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan *political order* yang yang dijalankan. *Politcal order* menunjuk pada keteraturan praktek politik yang berjalan berkesinambungan. Hal ini tidak lain upaya untuk mengamanankan kebijakan Orde Baru yang disebut dengan Trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu dalam mendukung stabilitas politik, pemerintah Orde Baru melakukan langkah, *pertama,* dibentuknya struktur politik bayangan dengan struktur Angkatan Darat(AD) sejajar dengan birokrasi sipil, *kedua,* pengkerdilan partai politik sebagai sub ordinat yang bisa dikendalikan, *ketiga*, dalam aras masyarakat sipil diterapkan kebijakan "massa mengambang".(Nusa Bhakti:29:2001)

Dikalangan para ahli telah banyak upaya teoritisi untuk menjelaskan realitas politik Orde Baru yang begitu dominan dalam proses politik, seperti yang dilakukan Emmerson yang menggunakan pendekatan kultural. Emmerson(dalam Mahfud:221:2014) berasumsi bahwa birokrasi di Indonesia telah memperlihatkan tradisi dan budaya politik Jawa yang berkarakter patrimonial di mana jabatan dan seluruh susunan birokrasi didasarkan pada hubungan personal *patron-client.* Dalam karakter patrimonial, pemegang kekuasaan dan segala kekuasaanya dilihat sebagai satu kesatuan. Kegiatan politik dianggap ada pada pemegang kekuasaan, sedangkan struktur politik

menggantung dalam bentuk jaringan vertikal yang bersaing untuk memperoleh perlindungan pribadi pemegang kekuasaan.

Pendekatan teoritis lain dikemukakan oleh Dwight Y. King(dalam Mahfud MD:222:2014) dengan menggunakan model otoriter birokratis. Dalam rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui cara sederhana, cepat, tidak bertele-tele, efisien dan tidak memungkinkan adanya proses *bargaining* yang lama, ia cukup mendekatkan diri semata-mata pada "teknokratik-birokratik" dengan alasan mempertimbangkan efisiensi. Dalam mengejar ketertinggalan elite politik menyakini bahwa stabilitas merupakan kuncinya. Rezim ini didukung oleh kelompok-kelompok yang paling dapat mendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu militer, teknokrat sipil dan pemilik modal. (Mas'oed:24:1986) Dwight Y. King menilai bahwa dalam rezim kewenangan tertinggi terletak pada militer sebagai lembaga yang mengadopsi pendekatan teknokratik birokratik dalam pembuatan kebijaksanaan yang konsultatif dan konseptual di kalangan penguasa serta peranan dari struktur birokratik yang lebih besar.

Begitu dominannya peranan militer, salah satu tokoh kunci peristiwa 27 Juli 1996, Alex Widya Siregar mengatakan, "Kitab suci telah turun di Mabes ABRI". Pernyataan itu sebenarnya hendak menyatakan kekuasaan yang tidak terbatas yang dimiliki kelompok elite ini. Di samping itu, dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain, mereka adalah kelompok yang awalnya mempunyai *previlege* untuk melindungi kepentingan kelas elite, akhirnya berkembang luas mengendalikan jalur politik, birokrasi, ekonomi dan sosial.

Peran militer akhirnya berubah menjadi bagaimana mempertahankan keamanan dan stabilitas politik agar *status quo* semakin terjaga. (Nusa Bhakti:33:1999)

Argumen yang selalu dibangun terhadap keterlibatan ABRI dalam kegiatan non-militer. Menurut Hasnan Habib yang ditambahkan oleh Mahfud MD (dalam Mahfud :202:2016) mengemukakan alasan seperti, *pertama*, ABRI (bersama rakyat) tidak saja menyelamatkan revolusi dan perang kemerdekaan, tetapi telah mempelopori dan memberi impetus bagi terjadinya proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, keterlibatan ABRI dalam politik sebenarnya adalah hak sejarah. *Kedua*, ketika G 30 S PKI meletus, tak ada satu kekuatan politik manapun yang mampu mengatasi kecuali ABRI, sehingga keterlibatan ABRI dalam bidang politik menjadi kebutuhan karena sipil ternyata tidak mampu membangun pemerintahan yang stabil dan menyelamatkan negara dari berbagai ancaman. *Ketiga*, keterlibatan ABRI di luar fungsi tempur telah memberikan manfaat yang nyata bagai kehidupan masyarkat. Dwifungsi ABRI pasca G30S/PKI telah memulihkan keamanan dan membawa stabilitas yang memungkinkan negara menyelenggarakan pembangunan nasional dengan hasil yang mengesankan. Depolitisasi atas partai-partai telah berhasil membangun stabilitas nasional yang memungkinkan pemerintah melakukan kebijaksanaan ekonomi yang dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat banyak. *Ke-empat*, pratek ketatanegaraan yang membuka peluang bagi ABRI untuk melakukan dwifungsi sejak zaman revolusi, zaman demokrasi liberal sampai zaman orde baru menunjukan konvensi ketatanegaraan telah menerima konsep dwifungsi

ABRI. Dengan demikian, dwifungsi ABRI memiliki landasan konstitusional, sebab menurut UUD 1945 konstitusi itu bukan hanya tertulis dalam UUD, melainkan juga berupa konvensi-konvensi atau praktik ketatanegaraan yang tidak tertulis, seperti tertuang dalam Penjelasan UUD 1945. *Kelima,* ketentuan tertulis UUD 1945 juga memungkinkan diterimanya dwifungsi ABRI.

Argumen-argumen itu menjadi landasan ideologis ABRI untuk terlibat dalam urusan non militer. Oleh karenanya pada periode 1966 sampai pada 1970-an, bagi Jenderal Suharto dan kelompok militer merupakan fase pembentukan ideologis. Yaitu, merumuskan tatanan nilai yang tepat, guna melegitimimasi kekuasaan untuk berperan aktif dalam bidang non militer. Fase terbentuknya ideologi , menurut catatan David Jenkins (1-6:2010) berevolusi dalam berbagai fase. Tahap *pertama,* berlangsung dalam periode revolusi fisik (1945-1949) yang tidak menghasilkan suatu doktrin militer bersama. Tetapi dalam hal ini telah dibangun persepsi bahwa Tentara Nasional (TNI) dibangun oleh rakyat Indonesia , bukan oleh para pemimpin politik dikalangan sipil. *Kedua, (1949-1957)* adanya rasionalisasi dan modernisasi tentara dari masa revolusi yang jumlahnya terlalu besar, lamban dan tidak terintegrasi. Tahap *ketiga*, keadaan darurat yang ditetapkan pemerintah memberi legitimasi bagi militer untuk masuk dalam bidang non –militer dan munculnya doktrin dwifungsi ABRI yang digagas AH. Nasution. Tahap *keempat*, para pemimpin militer memperluas dan mempertahankan kedudukan mereka dalam sektor nonmiliter.

Sementara itu, doktrin “jalan tengah tentara” terus dikembangkan Brigjen Suwarto, Komandan Seskoad di Bandung. Pada tahap kelima (1966-1967), merupakan fase awal pokok-pokok doktrin militer dibangun, kemudian ada yang tetap dipertahankan dan ada yang diubah.

Kemudian melalui hasil seminar Angkatan Darat II yang diselenggarakan di Bandung pada Agustus 1966. Dalam seminar itu menyatakan, bahwa TNI bukan saja punya hak dan kewajiban mengemban tugas serta tanggung jawab di luar bidang militer, tetapi juga memperkuat dan memperlua kegiatan-kegiatan tersebut. Seluruh harapan dalam mendambakan kesejahteraan tertuju pada TNI pada umumnya dan AD pada khususnya. Oleh Karena itu tidak ada pilihan lain bagi AD kecuali memenuhi harapan rakyat tersebut. Untuk itulah diperlukan pembentukan pemerintahan yang kuat, progresif dan bertanggung jawab. (dalam Jenkins:5:2010).

Sebenarnya, seminar Angkatan Darat (AD) II ini merupakan koreksi total terhadap seminar Angkatan Darat I yang dinilai masih kental dengan warna Sukarno. Seminar AD I yang diselengggarakan Jenderal Ahmad Yani pada bulan April 1965 berhasil menyusun doktrin militer yang dikenal dengan “Tri Ubaya Cakti” atau “tiga janji suci”. Tepat 15 (lima belas) bulan kemudian, doktrin militer itu diperbaiki dengan menyelenggarakan Seminar AD ke-II, dan menegaskan tentang doktrin “dwi fungsi ABRI”, bahwa angkatan bersenjata mengemban dua tugas sebagai “kekuatan militer” dan sebagai “kekuatan sosial politik”. Sebagai “kekuatan sosial politik, tugas tentara meliputi bidang

ideologi, politik, sosial ekonomi, budaya dan agama. (dalam Jenkins:4:2014). Doktrin ini sebelumnya pernah diperkenalkan Jenderal AH. Nasution pada 11 November 1958 dalam acara wisuda Akademi Militer di Magelang. Dalam pidato tanpa teks, AH Nasution menyatakan,

> "Kedudukan TNI tidak sama dengan militer dinegara-negara Barat yang semata-mata "sebagai alat pemerintah". Dalam kenyataannya banyak negar Amerika Latin yang kaum militernya memonopoli kekuasaan politik. Sedang TNI merupakan salah kekuatan perjuangan rakyat yang setara dan bahu membahu dengan kekuatan rakyat yang lainnya, misalnya partai-partai politik. (dalam Jenkin:2:2010)

Dalam historiografi, awal dominasi militer ketika pasca G 30 S PKI pada tahun 1965. Peristiwa itu menyebabkan krisis politik nasional dan secara perlahan mengakhiri kekuasaan Presiden Sukarno. Prosesi peralihan kekuasaan itu ditandai dengan ditolaknya pidato pertanggunganjawaban presiden pada Sidang Istimewa MPRS 1967. Presiden Sukarno kehilangan kekuasaan setelah MPRS mencabut mandatnya dengan TAP MPRS NO. XXXIII/MPRS/1967, yang sekaligus mendudukan Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian melalui TAP MPRS No. XLIII/MPRS/1968 Soeharto diangkat menjadi presiden definitif. Pengangkatan itu, mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional, antara Presiden Sukarno dengan Jenderal Suharto.

Sebelum Sidang Istimewa MPRS, Jenderal Suharto telah melakukan pembersihan di lembaga tersebut. Hal ini seperti dikatakan dalam memoarnya,

> "sementara itu anggota-anggota DPR GR yang terdiri dari PKI atau ormasnya sudah diganti dengan tokoh-tokoh baru, dengan tokoh-tokoh yang mendukung Orde Baru, dan Jenderal AH. Nasution yang duduk dalam kabinet sudah dicalonkan menjadi ketua MPRS". (Suharto:1989:175)

Kenyataannya, pembersihan itu bukan hanya PKI dan ormas-ormasnya, melainkan juga dari NU, seperti Idham Chalid, dari Perti seperti KH. Sirajuddin Abbas, dari Partindo, dan tentu dari kelompok PNI ASU, seperti Ali Sastromidjoyo, Subamia, Sartono, sehingga baik MPRS- DPR-GR bersih dari wakil-wakil rakyat yang pro Sukarno. Setelah upaya pembersihan, Ahmad Syaikhu ketua DPR–GR (setelah pembersihan) melalui suratnya tertanggal 9 Februari 1967 mendesak MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengadili Presiden Sukarno.

Salim Haji Said (10:2016) menjelaskan bahwa setelah "membereskan" Sukarno, Soeharto menempuh tiga cara untuk membangun dan mempertahankan kekuasaannya. *Pertama*, menyingkirkan semua perwira berorientasi kiri dan Sukarnois. *Kedua*, mempromosikan para jenderal yang dianggapnya tidak punya potensi menggunakan tentara melawan sang Presiden. *Ketiga*, para pendukung yang berjasa bagi kemenangan politik Soeharto, tetapi tidak menonjol dalam masyarakat, atau dianggap mempunyai agenda sendiri, dengan segera disingkirkan dari posisi-posisi berpengaruh.

Modal yuridis Jenderal Suharto adalah "Supersemar" (Surat Perintah Sebelas Maret). Surat yang ditanda-tangani Presiden Sukarno merupakan perintah pengamanan situasi nasional terhadap krisis politik pasca G 30 S PKI 1965. Melalui rapat DPR-GR pada bulan Juni 1966 mengeluarkan sebuah memorandum yang memuat Supersemar sebagai dasar hukum bagi lahirnya pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Suharto. Apalagi secara khusus

dalam Sidang Umum telah dikeluarkan pula ketetapan MPRS No. IX /MPR/1966 yang menguatkan Supersemar sebagai landasan berpijak bagi beroperasinya pemerintah Orde Baru. Dengan diterimanya memorandum ini, maka kedudukan Suharto sebagai tokoh utama dalam pemerintahan semakin kuat. (Mahfud MD:213: 2012)

Menanggapi putusan tersebut, Presiden Sukarno dalam pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1966, menjelaskan tentang kedudukan Supersemar, bahwa surat tersebut merupakan perintah pengamanan terhadap jalannya pemerintahan, bukan perintah penyerahan kekuasaan. Pidato tersebut:

> "Surat perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejarah waktu membuat mereka bertampik sorai kesenangan. Dikiranya SP II Maret adalah suatu penyerahan pemerintah! Dikiranya SP 11 Maret itu satu "*tranfer of outhority".* Padahal tidak ! SP maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintah : Pengamana jalannya pemerintahan , -demikian kataku pada waktu melantik Kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal- Djenderal Suharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Djenderal Suharto akan hal itu. Perintah pengamanan, bukan penyerahan pemerintah ! *Bukan transfer of authority !* (Sukarno:702:2015)

Kendati sudah ditegaskan Presiden Sukarno, kenyataannya bagi Jenderal Suharto dimaknai lain. Supersemar merupakan landasan yuridis untuk melakukan tindakan politik yang berujung pada "pelengseran" Presiden Sukarno melalui sidang istimewa MPRS pada 1968, dan mengangkat Jenderal Suharto sebagai Presiden.

Memulai pemerintahan Orde Baru, Jenderal Suharto dalam tindakan politik dinilai masih dalam langgam libertarian(Mahfud:207:2012). Ini

dikarenakan sebagai pemegang mandat pemerintahan baru, belum menemukan format politik untuk menggeser format politik lama era Presiden Sukarno. Di sisi lain, militer yang menjadi pendukung utamanya belum menemukan kata sepakat tentang tatanan baru seperti apa yang hendak diterapkan. Ini terlihat adanya perdebatan dikalangan internal mereka. Yakni ketika pasca Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1968 mulai muncul pergeseran pemikiran: adanya dua kelompok, yaitu (1) kelompok yang pro stabilitas, dan (2) kelompok yang koreksi total(Nusa Bhakti:103:1999). Mengenai hal ini Jenderal AH. Nasution menyatakan:

> "Setelah selesai Sidang Istimewa MPRS 1967, mulai terasa ada pergeseran dalam nuansa perjuangan Orde Baru. Ada dua kelompok yang tumbuh dalam Orde Baru dan mulai di persimpangan jalan, pertama, adalah kelompok yang berstrategi stabilisasi/keamanan demi rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Kedua, kelompok koreksi total atas konskuen dengan "pengorbanan"disegala bidang (politik, sosial, ekonomi, kultural) seperti rumusan Seminar Angkatan Darat (AD) 1966 tentang pengertian Orde Baru. Mulailah aliensi ABRI-teknokrat. (dalam Sumarsono:1997 :143)

Kelompok yang pro stabilitas, berpendapat bahwa tanpa adanya stabilitas/ keamanan, maka negara yang baru mewarisi krisis ekonomi dan politik tidak mungkin membangun.(Nusa Bhakti:105:1999) Sedang kelompok baru yang terdiri atas mahasiswa-intelektual, dan para politisi yang beroirientasi pada pembangunan ekonomi sebagai prioritasnya. Kelompok pembaharu ini lebih dekat dengan Panglima Divisi Siliwangi Jenderal HR. Dharsono yang dikenal dekat kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan berperan penting dalam

penggagas konsep “dwi partai” di Bandung. (Said:32:2016) Persimpangan jalan ini akhirnya dimenangkan oleh kelompok yang berstrategi stabilitas/keamanan.

Kelompok pro stabilitas yang dimotori oleh Ali Moertopo ini, nampak lebih rasional dan mencerminkan tindakan yang sesuai dengan keadaan. Kendati, sudah dilakukan pembersihan terhadap kekuatan pendukung Sukarno, tetapi sisa-sisa pendukungnya dari kelompok ideologi Marhaenis-nasionalis masih kuat yang tersebar di seluruh Indonesia, belum lagi kelompok Islam. Mengikuti jalan pikiran kelompok yang menginginkan pembaharuan atau koreksi total dalam sistem politik yang digagas HR. Dharsono bukan tanpa masalah, dan pasti akan mendapat tantangan dari kedua kekuatan politik tersebut. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi pendukung Orde Baru yang sedang berusaha untuk mendapatkan legitimasi politik. Ali Moertopo berpendapat bahwa tanpa adanya stabilitas /keamanan, maka negara yang baru mewarisi krisis ekonomi dan politik tidak dapat membangun.(dalam Nusa Bhakti:105:1999)

Dalam catatan Crouch (dalam Mahfud:202:2016), sebenarnya sejak awal tahun 1950-an sudah banyak perwira angkatan darat yang menginginkan sistem parlementer yang dianut UUDS 1950 diganti dengan sistem lain yang lebih memberi peluang bagi militer untuk memainkan peranannya yang lebih menentukan dalam kehidupan politik. Ini terbukti dengan adanya peristiwa “17 Oktober 1952 “ sejumlah tentara yang mengarahkan moncong meriam ke istana presiden. Dalam kesimpulan Feith (dalam Sundhausen: 126:1986) terhadap

peristiwa tersebut menyatakan" walaupun terdapat bukti-bukti yang saling bertentangan, dapat dianggap sudah pasti ", bahwa Nasution sejak berapa lama, telah menyusun rencana-rencana bagi suatu kudeta militer, yang akan dilaksanakan dengan jalan mengerahkan Divisi Siliwangi. Rencananya adalah untuk meletakan kekuasaan yang lebih besar di tangan Presiden dan dalam waktu bersamaan membuatnya untuk tergantung kepada dukungan tentara".

Peristiwa itu, bermula dari ketidaksukaan perwira militer ulah para politisi sipil yang selalu campur tangan terhadap urusan militer. Puncaknya, ketika pada tanggal 16 Oktober 1952, mosi Manai Sophian disetujui parlemen. Mosi itu menghendaki diadakannya "reformasi dan reaorgansasi dalam pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata" dan pembentukan sebuah komisi parlemen untuk menyelidiki penyelewengan-penyelewengan administratif dan keuangan di dalam Kementrian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Keesokan harinya, tanggal 17 Oktober sejumlah perwira militer dan didukung oleh massa rakyat sekitar 30.00 orang bergerak menduduki gedung parlemen lalu berdemonstrasi dihadapan istana presiden menuntut dibubarkannya parlemen dan diselenggarakannya pemilihan umum. (Sundhaussen:1986 :117)

Menanggapi hal itu, Presiden Sukarno dalam pidato peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1953 menjelaskan kedudukan militer:

> "Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh suatu politik. Angakatan perang adalah alat kekausaan negara, alat senjata, alat –alat,-sekali lagi alat ! Alat ini harus tetap tajam, tetap ampuh, tetap sakti, tidak tergantung dari tangan yang

> memegangnya , asal tangan itu ialah tangannya negara”---karena itu harus tegas-tegasd dipersalahkan seseorang dalam angkatan perang kalau ia ikut-ikut politik, karena ikut-ikut politik *uit aard de zaak* mendatangkan keretakan didalam Angakatan Perang – karena manakala ada keretakan sedikitpun dalam Angkatan Perang segala sesuatu harus diusahakan untuk mengembalikan keutuhan dalam Angkatan Perang. (Sukarno:209:2015)

Dalam perkembangannya, apa yang dicetuskan oleh AH Nasution tentang dwifungsi ABRI menjadi dasar legitimasi militer untuk terlibat dalam urusan non –militer. Kendati, AH Nasution yang melontarkan gagasan dwi fungsi ABRI, selang beberapa tahun kemudian setelah sekian lama melihat rezim Orde Baru berkuasa, dengan penyesalannya, mengatakan:

> “Sebenarnya saya menyesal atas istilah dwifungsi yang mula-mula saya pakai dalam rapat di Porong. Karena bukan fungsinya yang penting, tetapi kesanggupannya selaku kekuatan rakyat/tentara pejuang yang idiil serta strukturil berakar dalam rakyat sebagai landasan selaku kekuatan militer, dan sebagai landasan untuk kesanggupan tugas-tugas nonmiliter, jika diperlukan. (AH. Nasution:24:)

Keprihatinan AH. Nasution yang didasarkan pada pengamatannya terhadap praktek dwifungsi ABRI yang menyimpang dari landasan idiel ketika dicetuskan. Dwifungsi ABRI sekedar alat bagi Soeharto dan kroni militernya yang dekat pada pusat kekuasaan untuk melegitimasi kekuasaan seolah-olah demokratis dan mempertahankan *status quo.* Kaitannya dengan hal ini, keluhan dari mantan petinggi ABRI, yaitu mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen TNI Purn) Harsudiono Hartas yang mengatakan, “Siapa yang merusak ABRI?” Dengan dijawab sendiri Jenderal itu menunjuk nama “Soeharto”. (Said:21:2016)

Dalam perjalanan pelaksanaan dwifungsi ABRI, pada tahun 1977 Abdulkadir Besar melakukan perumusan kembali konsep dwifungsi ABRI. Dalam konsep itu menjelaskan bahwa “dwifungsi ABRI tidaklah menciptakan sistem baru tetapi semata-mata merupakan pengakuan terhadap tindakan sah para anggota militer untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 bagi seluruh warga negara. Di negara yang didasarkan pada prinsip kekeluargaaan, masuknya seseorang ke dalam dinas militer tidaklah mengubah statusnya sebagai warganegara. Oleh karena itu prinsip yang disebut sebagai “supremasi sipil “dan ‘hubungan sipil-militer”tidaklah dikenal dan tidak sah. (dalam Jenkins:79:2010)

Di samping landasan ideal, langkah “justifikasi” lain dilakukan dengan merujuk pada ketentuan konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam konstitusi tersebut, menyebut adanya “golongan” dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Semua golongan dalam masyarakat berhak turut serta melaksanakan azas kedaulatan rakyat dan untuk itu militer pun dapat menjadi kekuatan sosial dan politik. Dalam tulisan AH. Nasution(11:1976) pada saat sidang istimewa MPRS 1967, Badan Pekerja MPRS pun sependapat, bahwa berdasarkan UUD 1945 sistem ketatanegaraan Indonesia menganut pembagian kekuasaan yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sesuai dengan falsafah Pancasila yang daripadanya dapat dibina kerja sama dalam menyelenggarakan pemerintah.

Pada ketentuan pasal 2 UUD 1945 yang menyebutkan adanya “golongan“ dalam keanggotaan MPR dapat pula mencakup ABRI sebagai “golongan” begitu juga penegasan Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966, mengenai istilah “penggolongan yang terdapat dalam masyarakat” harus diartikan mencakup ABRI. Alasan ini tidak lain karena pada saat Dewan Konstituante bersidang untuk merumuskan Undang-Undang Dasar mengalami kebuntuan, yang akhirnya mengharuskan Presiden Sukarno memberlakukan Dekrit Presiden pada tahun 1959, dan ABRI sebagai salah satu golongan ikut dalam mendukung untuk kembali ke UUD 1945. Menurut Mohtar Mas’ed (1995:35), ABRI sangat mendukung pemberlakuan UUD 1945, karena UUD 1945 dapat memberikan legitimasi bagi ABRI untuk berkiprah di bidang politik. Di samping tercantum dalam pasal 2 UUD 1945, pada pasal 27 sangat jelas membuka kemungkinan bagi setiap warga negara, termsuk anggota-angota ABRI, untuk aktif dalam kegiatan politik sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. (Mahfud:204:2016)

Dominasi militer mencapai bentuk paripurna ketika membentuk jajaran birokrasi sipil pararel dengan rantai komando militer.(Jefkins: :2010:59) Untuk kasus di Indonesia, militer sebagai kepentingan kelas yang mencoba untuk mengusai politik, yang kemudian melakukan pembaharuan dan intervensi di segala bidang (Nusa Bhakti:39:1999)

Pemaparan di atas tentang kekuasan Orde Baru setidaknya bisa menjelaskan *habitus* yang dimilikinya. Pada tensi politik yang cenderung lunak

untuk menggugah kepatuhan warga, rezim Orde Baru yang halus dan manipulatif dengan mengkonstruksi berbagai *popular cammon sense* yang bisa diterima, seperti "harus sesuai dengan konstitusi", "musyawarah mufakat" dan lain-lain. Tetapi ketika tensi politik cenderung keras dan kuat karena sudah dianggap mengganggu stabilitas, tidak segan-segan membangun "*labelling"* agar mendapatkan pembenaran dalam melakukan tindakan politik. Oleh karenanya, historiografi politik Orde Baru tidak terlepas dari "politik kekerasan", dan sebaliknya "kekerasan politik". Politik kekerasan adalah ideologi kekerasan yang dibangun oleh suatu rezim untuk melegitimasi tindakan-tindakan rezim tersebut dalam menjalankan kekuasaannya. Ini mencakup segala mekanisme, proses dan teknik kekerasan yang dilakukan secara kolektif dan terstruktur. Sedangkan kekerasan politik adalah tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok rezim untuk memperoleh, mendukung, dan mempertahankan kekuasaannya. (Nusa Bhakti:27:2001)

Pada awal munculnya konflik internal PDI, peran dan posisi rezim Orde Baru berada pada tensi yang lunak. Pernyataan yang disampaikan aparatur pemerintah, seperti "penyelengaraan kongres murni keinginan partai", "musyawarah untuk dua kubu yang bertikai" dan "pemerintah mendukung kongres karena konstitusi" adalah pernyataan yang manipulatif dan ideologis yang menunjukan posisi yang netral karena kedudukan sebagai pembina politik. Konflik internal PDI diperlihatkan sebagai proses alamiah yang memang muncul karena ada persoalan internal. Bahkan, ketika ada wacana yang bergulir

untuk mengadakan “referendum” sebagai upaya jalan tengah untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di PDI, yaitu PDI pimpinan Suryadi yang merupakan hasil kongres Medan dengan PDI Megawati Sukarnoputri, dengan tegas Jenderal Faisal Tanjung langsung menyatakan bahwa referendum tidak ada dalam AD/ART. Pernyataan Pangab itu menjadi matra terakhir untuk menghentikan polemik seputar referendum. Kalau wacana tersebut bergulir dan menjadi alternatif penyelesaian konflik internal PDI, dikawatirkan Megawati yang akan menjadi pemenang.

Tetapi, ketika konflik internal bergeser sebagai upaya untuk me-*delegitimasi* pemerintah Orde Baru, karena dukungan pada PDI Megawati yang makin meluas tidak hanya pada warga PDI, tetapi juga di luar warga PDI, yaitu organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemerintah Orba mulai merasa kewibawaan mulai terancam. Akhirnya, tensi politik menjadi keras dan kuat, maka pernyataan-pernyataan, seperti “mimbar bebas sudah ditunggangi”, “aksi-aksi jalanan sudah mengarah ke makar” atau “waspadai setan gundul” menjadi wacana untuk menyudutkan pada pihak-pihak oposisi yang mengganggu eksistensinya.

Dalam upaya mencegah agar gerakan oposisi tidak meluas dan membesar, sesuai dengan ciri khas pemerintah otoriter birokratis dengan tindakan yang sederhana, cepat dan efisien langkah yang ditempuh dengan melakukan “politik kekerasan”. “Peristiwa 27 Juli 1996” yang dikenal sebagai peristiwa penyerangan kantor DPP PDI untuk mengambil alih kantor yang dilakukan

pendukung PDI Suryadi. Pengambilalihan itu juga melibatkan aparatur Orde Baru, bahkan ada peranan yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan aparatur Orde Baru dibanding pendukung PDI Suryadi.

Pasca "peristiwa 27 Juli", kondisi politik berada penuh pada pengendalian pemerintah. Banyaknya dukungan terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah mempertebal keyakinannya untuk kembali mengkonstruksi sebuah *"common enemy"* yang membangkitkan kebencian masyarakat. Misalnya, mimbar bebas sudah mengarah ke makar, aksi ditunggangi gerakan kiri dan adanya bahaya komunisme gaya baru menjadi strategi *labeling* untuk meminggirkan piha-pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru. *Labeling* adalah penerapan kata-kata ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan. (Nimmo:108:1999) Di Jerman Nazi, misalnya, golongan elite berkuasa sebagai kebijakan memberi label golongan Yahudi dengan "parasite", "binatang penganggu" dan "baksil" dan dengan demikian menempatkan mereka bukan manusia, melainkan sebagai hama untuk dibasmi.

Bentuk "politik kekerasan" atau sebaliknya "kekerasan politik" menjadi disposisi kongnitif maupun mental pemerintah Orde Baru dalam menentukan aksi sosial terhadap kondisi obyektif yang berlangsung atau menjadi *habitus* dalam mempertahankan legitimasi politiknya. Penerapan salah satu atau keduanya sekaligus tergantung dengan situasi sosial politik yang berkembang. Bentuk-bentuk oposisi memang tidak dikehendaki karena akan dianggap

menghambat pembangunan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik serta menimbulkan disintrgrasi nasional.

Oleh karena itu, peran partai politik hanyalah sekedar sub ordinat dari rezim atau bagian dari marginalisasi struktur politik, bahkan boleh dikatakan tidak memperoleh tempat terhormat, atau sekedar penghias dalam tatanan demokrasi ala Orde Baru. Akibatnya partai politik hanya menjadi kendaraan politik bagi aktor yang merepresentasikan diri sebagai bagian dari Negara, sehingga konflik-konflik internal partai politik merupakan representasi pertarungan antar aktor mendapatkan legitimasi kepemimpinan dari pemerintah. Sebaliknya, bagi pemerintah sarana konflik internal partai menjadi seleksi kepemimpinan untuk memilih dan menentukan figur-figur pimpinan partai yang dianggap kooperatif dan akomodatif serta menjadi arena untuk menyingkirkan figur-figur yang dianggap kritis dan berpotensi mengancam legitimasi kekuasaan pemerintah. Tidak dengan hal itu, pola rekayasa dan manajemen konflik pun diterapkan sebagai upaya agar partai politik kecuali Golkar semakin lemah. Bermula dari kebijakan untuk melakukan penyederhanaan Parpol dari 10 partai menjadi 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penyederhanaan itu merupakan upaya untuk mengkebiri partai politik, selain Golkar. Selain kebijakan deparpolisasi, juga depolitisasi, yaitu masyarakat dijauhkan dari politik yang melahirkan massa mengambang.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan korban dari kebijakan *deparpolisasi* Orde Baru. Sejak kelahirannya pada saat fusi, partai ini tidak lepas dari konflik kepentingan dari elite partai. Konflik di tubuh PDI lebih banyak di dominasi dari unsur yang sama, yaitu dari Partai Nasional Indonesia (PNI) itu sendiri, dibanding antar unsur PDI.

Pada hakekatnya, konflik di dalam tubuh PDI, khususnya yang melibatkan elite-elite dari PNI mengandung dua dimensi, yaitu "dimensi konflik warisan" dan "dimensi kepentingan". Pada dimensi pertama (konflik warisan) terdapat dua kubu yang saling berhadapan, yaitu kubu garis keras (radikal) dan kubu moderat. (Sukamto, Wuryandari & Sihbudi:55:1991) Dalam konflik kubu moderat selalu memenangkan konflik. Misalnya, konflik antara kubu Isaneni-Sunawar (kubu moderat) dengan Sanusi-Usep (kubu garis keras). Akhirnya konflik itu dimenangkan oleh kubu moderat, yaitu kubu Isnaeni-Sunawar. Kekalahan Sanusi-Usep, konon kabarnya karena Usep yang dikenal sebagai tokoh PNI kawakan ini tidak setuju dengan Dwifungsi ABRI.

Faksionalisasi (kubu) yang terjadi dalam tubuh PDI sebelumnya, menjadi kerangka referensi untuk memetakan faksionalisasi dalam konflik internal PDI antara PDI pro kongres dengan PDI Megawati. Kubu PDI pro kongres merupakan kelompok kepentingan yang akomodatif terhadap pemerintah Orde Baru, bahkan kemunculannya merupakan inisiasi dari rezim. Oleh karena itu dalam menyebut kubu pro kongres ini disebut dengan "kelompok kooperatif. Sedangkan kubu PDI Megawati Sukarnoputri dengan "kelompok non

kooperatif”. Penamaan itu juga mencerminkan *habitus* masing-masing kubu. Selama konflik berlangsung, antara kubu pro kongres dengan pemerintah Orba merupakan dua hal yang berbeda tetapi mempunyai kepentingan yang sama. Berbeda kubu PDI Megawati yang merupakan kelompok non koperatif untuk selalu tidak sejalan dengan resolusi-resolusi yang ditawarkan pihak koperatif dan pemerintah.

Melalui tindakan sosialnya Weber menjadi pijakan dalam memahami habitus masing-masing aktor. Weber (dalam Ritzer & Goodman:137:2008) menjelaskan empat tindakan dasar. Yaitu, *pertama,* rasionalitas sarana-bertujuan: tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku obyek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain; harapan-harapan ini digunakan sebagai “syarat” atau “sarana” untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. *Kedua,* rasionalitas nilai: tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya. *Ketiga,* tindakan afektual: tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor. *Keempat,* tindakan tradisional: tindakan yang sudah lazim dilakukan oleh aktor.

Berdasarkan tipologi tindakan dari Weber ini, maka dapat dideskripsikan habitus sebagai berikut:

Tabel 6
Tindakan (Habitus) Aktor

Tipe Tindakan (Habitus)	PDI Pro Kongres	PDI Megawati	Rezim Orde Baru
Rasionalitas sarana-bertujuan	Kongres sebelum Pemilu	Kongres sesudah Pemilu	Penyelesaian sesuai Konstitusi Partai.
Rasionalitas nilai	Kongres menjadi alternative penyelesaian kemelut PDI.	Jalur Hukum.	Menyesuaikan dengan AD/ART Partai.
Tindakan afektual	Aspirasi dari bawah.	Hasil rekayasa.	Aspirasi murni dari partai.
Tindakan tradisional	Kooperatif.	Non Kooperatif.	Politik kekerasan/Kekerasan politik.

Sumber: Olahan penulis

Dalam persoalan konflik internal PDI, kongres menjadi orientasi meraih legitimasi. Masing aktor dengan mempunyai argumen bahwa pihaknya adalah pemilik sah untuk menyelenggarakan kongres. Kelompok PDI Megawati bukan tidak setuju dengan kongres, melainkan bahwa kongres itu dilaksanakan setelah pemilu 1997. Ini karena merupakan amanat Munas yang berlangsung pada tahun 1993, kepengurusan PDI Megawati akan berakhir pada tahun 1998. Tetapi, pihak kelompok 16 berpendapat bahwa adanya desakan dari berbagai DPC dan DPD PDI seluruh Indonesia menjadi dasar legitimasi untuk segera menyelenggarakan kongres. Rezim Orde Baru sendiri melihat bahwa desakan penyelenggaraan kongres sudah sesuai dengan konstitusi partai.

Dari kesadaran kelompok PDI Pro Kongres menilai permasalahan yang melanda PDI, cara yang terbaik adalah dengan dilaksanakan kongres sebagai forum tertinggi partai. Tetapi, pandangan hal tersebut berbeda dengan PDI kelompok Megawati bahwa kongres sebagai bentuk ketidakbenaran yang melanggar konstitusi partai. Oleh karena itu dalam mengembalikan ketidakbenaran dan kesewenang-wenangan dilakukan dengan jalur hukum. Oleh karena itu, ketika kongres terlaksana, kelompok Megawati melakukan gugatan terhadap penyelenggaraan tersebut. Dalam perkembangannya, gugatan tersebut tidak berhasil, dan akhirnya pasca reformasi kelompok PDI Megawati mendeklarasikan partai, dengan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Tindakan afektual merupakan aktivitas kognitif (berfikir) manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi yang dialaminya. PDI Pro Kongres melihat adanya dukungan dari bawah yang menginginkan segera dilakukan kongres. Berbeda dengan kelompok PDI Megawati yang melihat desakan kongres PDI merupakan rekayasa yang dilakukan rezim Orde Baru. Pemerintah Orde Baru melihat bahwa kemelut yang berlangsung sesuai dengan konstitusi partai karena adanya desakan dari bawah, yaitu DPC dan DPD PDI.

Yang paling menonjol dari tindakan aktor adalah sikap yang non kooperatif yang dilakukan PDI Megawati. Sikap ini dimulai ketika permasalahan DPD Jawa Timur yang tidak kunjung usai karena perbedaan antara DPP PDI dengan Gubernur Jawa Timur tentang Ketua DPD PDI. Dalam

hal ini, Megawati tidak ingin terjebak dalam citra “kerangkeng besinya” Weber, yaitu tidak mengikuti struktur yang telah digariskan oleh pemerintah Orde Baru. Sikap ini yang mendorong pemerintah Orba untuk mengusur Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI melalui kongres.

5.4. Modalitas: Antara Otoritas Legal Dengan Otoritas Kharismatik

Dalam pandangan Bourdieu masyarakat sebagai suatu konsep yang terstratifikasi dalam bentuk kelas. Subyek atau aktor menempati ruang sosial bukan karena keanggotaan, melainkan karena kepemilikan modal. Melalui modal menjadi kekuatan dari aktor untuk memproduksi kekuasaan atau mereproduksi ketidaksetaraan, sehingga timbul stratifikasi dalam masyarakat. Posisi aktor tergantung modal yang dikuasai. Bourdieu (dalam Ritzer & Goodman:583:2008) mendefinisikan empat jenis modal, yaitu ekonomi, kultural, sosial dan simbolis. Modal ekonomi merujuk pada kekuatan uang. Modal kultural adalah berbagai jenis pengetahuan yang legitim. Modal sosial adalah hubungan antar orang yang bernilai. Modal simbolis tumbuh dari harga diri dan prestise.

Pada saat tampil di mimbar bebas 5 Juli 1996, Megawati Sukarnoputri mengatakan,

> “Saudara-saudara ketahui, Partai Demokrasi Indonesia bukanlah suatu wadah yang bisa mengumpulkan dana dengan mudah. Segala sesuatunya yang ada pada warga PDI adalah sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan”. Sampai saat ini sumbangan terus mengalir dari warga PDI, simpatisan dan masyarakat umum. Kemudian dilanjutkan, “Tidak mudah untuk mengumpulkan saudara-saudara seperti hari ini. Kalau tidak ada kesamaan nurani, tidak ada kesamaan semangat, tidak ada

> kesamaan harapan dan tidak ada kesamaan harga diri, saya rasa tidak mungkin setiap hari di sini". (Kompas/6/7/96)

Kutipan pidato tersebut memperlihatkan beberapa aspek modal yang dimiliki PDI Megawati. Aspek kapital menjelaskan bahwa selama penyelenggaraan mimbar bebas selama mimbar bebas di dapatkan dari sumbangan yang sifatnya sukarela. Dalam keterangan beberapa narasumber yang diwawancarai, dana operasional untuk kegiatan mimbar bebas didapatkan dari donatur. Selama aksi mimbar bebas berlangsung, memang disediakan kotak amal, dan tiap hari dibuka dan jumlahnya puluhan juta.[4]

Aspek lain, seperti dukungan massa. Ketika Megawati Sukrnoputri pidato di mimbar bebas Jl. Imam Bondjol yang searah dengan Jl. Diponegoro ditutup. Hal ini membuktikan bahwa dukungan dan harapan terhadap Megawati untuk membawa perubahan politik cukup besar. Sebelumnya, banyak tokoh oposisi yang melakukan aksi-aksi untuk perubahan, tetapi dukungan tidak sebesar yang diberikan pada Megawati. Hal ini karena kharisma nama di belakang Megawati, yaitu Sukarno. Nama Sukarno memang menjadi magnet tersendiri dan aksi di Jl. Diponegoro kian hari makin membesar, karena sebenarnya, masih banyak aktivis nasionalis yang tersebar di mana-mana yang menjadi pendukung utama Megawati, kemudian baru muncul barisan dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). [5]

---

[4] Wawancara dengan Audi Tambunan
[5] Wawancara dengan Pudjo Nugroho

Weber (144:2008) menjelaskan tentang otoritas kharismatik, bahwa ketika seorang pemimpin dipisahkan dari orang biasa dan diperlakukan seolah-olah ia memiliki kekuatan atau kualitas supranatural, supra manusia, atau sekurang-kurangnya kekuatan yang tidak lazim yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Megawati dengan warisan kharisma dari Sukarno menjadi modal yang berharga dalam menjaga eksistensi ketika otoritas legal dimiliki hilang karena adanya kongres ke IV Medan. Pasca Kongres Medan menjadi pertaruhan Megawati dengan otoritas kharismatik melawan otoritas legal yang dimiliki oleh PDI Suryadi.

Dalam menelusuri modalitas yang dimiliki PDI Pro kongres sebenarnya lebih banyak mengandalkan dukungan dari institusi atau aparatur rezim Orde Baru yang merupakan hubungan antara *patron-client*. Persoalan perolehan dana pada kelompok pro kongres ini bukan suatu rahasia lagi bahwa dukungan dari rezim sangat besar. Pada tingkat pusat, relasi hubungan pendanaan ditanggung pada institusi pusat, misalnya dengan Sospol ABRI, Dedapgri, atau BIA. Tetapi, di daerah, maka yang bertanggung jawab adalah aparatur di bawahnya, seperti Kodim, Ditsospol yang ada didaerah. Bukan rahasia umum lagi, bahwa mereka yang di daerah akomodasi pemberangkatan ditanggung sepenuhnya oleh aparatur rezim Orde Baru. Seperti yang diceritakan oleh Harsoko Sudiro, Ketua DPP PDI Suryadi, ketika berangkat ke Medan rombongan yang didaerah diangkut dengan pesawat Hercules. Begitu juga keterangan dari Alex Widya Siregar, menerima dana sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk

biaya pengambilalihan kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro dengan perincian Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) dari Fatimah Achmad dan Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dari Kol. Samsiar (Paban I BIA), uang tersebut digunakan untuk transpotasi, membeli kaos seragam PDI dan Megaphone yang digunakan Jhonatan Marpaung.[6] Berdasarkan keterangan tersebut memberikan penjelasan mengenai relasi modal kapital antara DPP PDI pro kongres dengan rezim Orde Baru.

Dari berbagai kajian terhadap aspek modalitas yang dimiliki masing-masing actor, dapat dilihat di gambar table berikut;

Tabel 7
Modal Aktor

Modal	PDI Pro Kongres	PDI Megawati Sukarnoputri	Rezim Orde Baru
Kapital	Negara	Gotong royong	Negara
Kultural	Dukungan dari rezim	Dukungan dari massa	Pemegang legitimasi
Sosial	Interaksi dengan rezim	Interaksi dengan massa pendukung	Interaksi dengan semua institusi pemerintah
Simbolis	Otoritas Legal	Otoritas Kharismatik	Otoritas Legal

Sumber: Olahan penulis

Dari tabel tentang modalitas dapat dijelaskan beberapa hal, *pertama*, pada aspek kapital ekonomi adanya perbedaan yang kontras antara PDI Pro Kongres dengan PDI kelompok Megawati maupun pemerintah Orde Baru. PDI

[6] Hasil wawancara dengan AWS

Pro Kongres dan pemerintah Orde Baru dalam kapital ekonomi bergantung pada negara. Sedangkan kelompok pendukung PDI Megawati lebih mengandalkan pada kegotongroyongan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kotak dana yang disediakan di arena mimbar bebas depan kantor DPP PDI yang sanggup membiayai operasional selama kegiatan aksi massa PDI.

Kedua, dalam aspek dukungan atau modal kultural, PDI Pro Kongres menekankan dan bergantung dari dukungan rezim Orde Baru. Hal ini berbeda dengan kelompok PDI Megawati yang mendapat dukungan dari massa. Keadaan ini berdampak pada interaksi yang dilakukan. PDI Pro Kongres mengorientasikan interaksi pada rezim Orde Baru, sedangkan kelompok PDI Megawati lebih mengandalkan pada massa. *Ketiga,* aspek yang penting dari modalitas yang dimiliki masing-masing aktor, yaitu modal simbolis. PDI Pro Kongres

Hal yang menarik dari aspek modalitas ini adalah pengaruhnya terhadap arena. Seperti yang dijelaskan Bourdieu (dalam Thompson:144:2009) modal berfungsi, *pertama,* merupakan pertaruhan para aktor dalam arena pertarungan yang senantiasa melakukan perjuangan. Kedua, modal merupakan sumber-sumber yang dimobilisasi oleh para aktor untuk mengejar tujuan, yaitu memastikan perbedaan yang menjamin status aktor yang akan menjamin status aktor tersebut dan berfungsi sebagai sumber kekuasaan simbolis. Otoritas legal yang diperoleh kelompok PDI pro kongres secara simbolis menjelaskan bahwa mereka adalah PDI yang syah secara konstitusional karena memang hasil dari

kongres. Tetapi, kekuasaan simbolik *(power symbolic)* yang berupa otoritas kharismatik yang dimiliki Megawati Sukarnoputri menjadi pengganggu dan mengacam otoritas legal dari PDI pro kongres.

5.5. Dinamika Konflik Internal PDI

Merujuk pada konsep "arena" dalam konflik internal PDI merupakan tempat pertarungan untuk memperebutkan legitimasi politik. Tetapi, dalam perkembangan berikutnya "arena" dalam perspektif rezim Orde Baru adalah tempat untuk mengintegrasikan kekuasaan politik, sekaligus juga sebagai sebagai upaya untuk menstrukturisasi kembali kekuasaan politik. Berbeda dengan kelompok PDI pendukung Megawati, "arena" adalah tempat untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Dalam sejarahnya konflik internal PDI tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, dan biasanya konflik dimenangkan oleh kubu kooperatif(moderat) atas kubu non kooperatif (garis keras). Ini karena kubu kooperatif dianggap bisa menjadi perpanjangan tangan rezim untuk menjaga kedudukan *status quo,* dan praktek seperti itu sudah menjadi habitus rezim Orba. Setiap konflik partai justeru menjadi tempat untuk menyaring calon pemimpin partai yang bisa diakomodir dan meminggirkan calon pemimpin partai yang dianggap kritis dan berpotensi menganggu kedudukan rezim.

Dalam pandangan Bourdieu, konflik internal PDI hakekatnya merupakan pertarungan simbolik, kontestasi antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy*. Dalam pertarungan simbolik itu ada *doxa* yang menaunginya. Sebenarnya, doxa

merupakan hasil konsensus dari pertarungan antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy*, sehingga *doxa* menjadi pemegang dan penentu kebudayaan sebagai suatu yang obyektif, diterima seperti apa adanya oleh aktor, mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi dominan terbukti dengan sendirinya serta lebih disukai secara universal. Tetapi dalam konteks ini, rezim Orba adalah pemilik dari *doxa* itu sendiri. Melalui habitus dan modal yang dimiliki melakukan kuasa simbolik yang bisa dikonversi menjadi kekerasan simbolic (*symbolic violence*) untuk mengintegrasikan kekuasaan politik.

Dengan demikian, apapun hasil dari pertarungan simbolik, rezim Orba tetap menjadi pengendali agar tetap berada dalam posisi *status quo*. Dalam konteks konflik internal PDI, pernyataan-pernyataan simbolik rezim Orba seperti yang dikatakan Bourdieu sebagai *structure as well as structured*, yaitu menegaskan aturan main yang sesuai dengan ketentuan normatif. Ini terlihat ketika pada saat pra kongres, misalnya, lebih menekankan norma-norma yang universal, seperti "keinginan kongres sudah sesuai dengan aturan konstitusi", "keinginan kongres tidak melanggar AD/ART, kemudian "menyarankan rekonsiliasi dengan musyawarah mufakat". Pernyataan yang menstrukur tersebut menjadi justifikasi untuk melakukan konversi simbolik dengan pernyataan bahwa kongres merupakan upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PDI, dan kemudian memberikan ijin penyelenggaraan kongres. Melalui praktik simbolik yang dilakukan, keinginan dari pemerintah rezim Orde

Baru bahwa “kongres” adalah *as structured* dalam penyelesaian konflik internal PDI.

Ini berarti persepsi pemerintah terhadap arena *(field)*, bahwa konflik PDI merupakan persoalan internal PDI sendiri, dan kepentingan pemerintah adalah sebagai penengah. Namun, dalam perkembangan berikutnya, persepsi terhadap arena konflik pun berbeda, ketika pasca kongres melihat adanya arus dukungan terhadap Megawati semakin membesar dan melibatkan massa di luar PDI, maka persepsi terhadap arena pun juga berubah, yaitu aksi protes yang dilakukan pendukung Megawati sudah ditunggangi dan berkembang ke arah makar.

Pada masa awal konflik, kelompok PDI Pro Kongres sebenarnya berada pada posisi *heterodoxy*, yaitu melakukan antagonisme terhadap kepemimpinan Megawati Sukarnoputri. *Heterodoxy* adalah srategi subversi untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok yang dominan.(Thompson:2007:87) Sedangkan, kepengurusan Megawati yang merupakan hasil Munas PDI 1993 sebenarnya berada dalam sub ordinat dari rezim Orde Baru sehingga berada dalam posisi *orthodoxy*. Yaitu, strategi konservatif untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi, dalam prosesnya Megawati berubah posisi yang semula berada dalam wilayah *orthodoxy* menjadi *heterodoxy*. Hal ini bisa dijelaskan, ketika mendengar ada prakarsa kongres yang dilakukan DPD dan DPC PDI. Megawati dengan jajaran pengurus DPP PDI menggelar rapat dan menunjuk Soetardjo Suryoguritno sebagai ketua panitia kongres pada tanggal 3 Juni 1996.

Seperti yang dikatakan Megawati dalam wawancara dengan majalah Forum Keadilan,

> "Iya. Memang dalam suatu proses pembicaraan, saya menunjuk Pak Sutardjo sebagai Ketua Panitia sekiranya dalam diskusi dan perkembangan yang ada dalam diskusi itu harus memutuskan adanya kongres" Ditambahkan pula." Keputusan dalam rapat tangal 4 Juni itu kan merupakan kelanjutan dari rapat yang ditunda tanggal 3. Dan itu benar-benar diputuskan melalui mekanisme rapat. Seadainya mereka tidak setuju dengan keputusan yang saya ambil, apakah kami akan terus-menerus melakukan rapat dan rapat. Ya dalam rapat kami melakukan cara-cara prokol bambu begitu, kapan bisa berhenti?"
> (Forum Keadilan,1/7/1996)

Sedangkan Fatimah Achmad yang merupakan ketua "kelompok 16", mengatakan,

> Memang pada rapat DPP pada tanggal 3 Juni Megawati menyetujui adanya kongres. Dia bilang, kalau mau kongres ya kongres. Tapi, dia yang menentukan ketua panitianya. Dia bilang, "Saya tidak mau kucing dalam karung". Dan Mega menunjuk Pak Sutardjo. Sementara kami bilang, soal panitia mari kita musyawarahkan, bagaimana bentuk kepanitiannya, baru kita tetapkan orang-orangnya. Nah, Mega bilang, " kalau itu maunya ngak usah kongres, dan besok akan akan dibicarakan lagi, namun belum tentu kongres". (Forum Keadilan/1/7/96)

Sikap penolakan terhadap kongres inilah yang mengubah dari *orthodoxy* menjadi *heterodoxy* dan mengkonversi menjadi sikap non-kooperatif terhadap rezim Orba. Kondisi demikian menyebabkan PDI Megawati mempersepsi arena bahwa kongres merupakan hasil rekayasa dari rezim sehingga berbagai upaya simbolik yang dilakukan PDI Pro Kongres ditanggapi dengan penuh perlawanan. Misalnya, dengan menyatakan masa kepengurusan DPP yang dipimpinnya berlaku sampai 1998, mengancam akan membawa ke Pengadilan

Tata Usaha Negara (PTUN), dan menggugat mereka yang memberi izin kongres, sampai tidak mengakui kepengurusan DPP PDI hasil kongres.

Sedang, PDI Pro Kongres mempersepsi arena bahwa selama kepemimpinan PDI Megawati banyak meninggalkan permasalahan, dan hal ini dibuktikan dari keinginan dari DPD dan DPC untuk segera melaksanakan kongres. Kendati, banyak perlawanan yang datang dari pihak PDI Megawati, kenyataan persiapan kongres tetap berjalan terus. Akhirnya, kongres bisa terlaksana dan terpilih Drs. Suryadi sebagai ketua yang baru PDI periode 1996-1998.

Hal ini yang membedakan konflik internal pada tahun 1996 dengan konflik-konflik sebelumnya adalah pada saat penyelenggaraan kongres selesai dengan terpilihnya kepengurusan baru, maka konflik pun selesai. Ada pihak yang dipingirkan, dan ada yang dimenangkan. Biasanya yang terpinggirkan akan dengan sendirinya tenggelam seiring dengan dinamika politik yang lebih mengakomodasi pemenang. Tetapi, setelah perhelatan kongres IV Medan selesai, tensi politik justeru tambah memanas, dukungan terhadap Megawati bukanlah tambah menyurut, kian hari tambah besar dan meluas. Setiap hari di depan kantor DPP PDI digelar mimbar bebas dan di jalan sekitar Jl, Diponegoro sering digelar aksi-aksi demonstrasi tidak saja mengutuk PDI hasil kongres, tetapi juga mencaci maki pemerintah.

Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal tersebut, *pertama*, pemerintah rezim Orde Baru sudah berkurang legitimasinya, ini ditunjukan

dengan berbagai aksi jalanan sebagai bentuk ungkapan ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintah selama ini. Ben Anderson mengatakan, “Pemerintah Orde Baru sudah *sowak*. ”Tapi selama 25 tahun belakangan ini, adalah pemerintah yang paling kuat selama sejarah modern Indonesia. Pemerintah Orba itu kuat. Pemerintah Hindia Belanda juga kuat. Selain kuat, buasnya bukan main, melebihi pemerintah Hindia Belanda”. (Suara Independen/2/7/96) *Kedua*, modal simbolis, yaitu kharisma Sukarno yang masih melekat pada pengikutnya dan menjadikan konflik internal menjadi momentum untuk perubahan.

Berikut penjelasan visual terhadap dinamika konflik internal PDI:

Gambar 25
Dinamika Politik Pra Kongres
Sumber : Modifikasi Penulis

Adanya usulan kongres dari kelompok 16 atau PDI Pro Kongres merupakan bentuk dari *heterodoxy*, yaitu bentuk antagonisme terhadap PDI Megawati sebagai pemegang legitimasi politik. Oleh karena itu PDI Megawati berada dalam strategi

orthodoxy yang berusaha untuk mempertahankan legitimasi. Sedang pemerintah Orde Baru sendiri penentu dan pemberi legitimasi, yaitu berada dalam situasi *doxa.* Ini karena dalam pemerintahan tersebut, partai politik merupakan sub ordinat dari sistem kekuasaan, sehingga segala kebijakan dan arah partai politik ditentukan oleh sistem kekuasaan rezim. Tetapi, strategi *heterodoxy* PDI Megawati tidak bertahan lama. Adanya kongres PDI di Medan yang dipelopori kelompok 16 mengubah polarisasi, kongres PDI Medan yang menghasilkan kepengurusan DPP PDI dengan Ketua Umum Soeryadi, sehingga pada pasca kongres, posisi PDI Megawati berubah dari *orthodoxy* menjadi *heterodoxy.* Ini dapat dilihat dalam gambar berikut;

Gambar 26
Dinamika Politik Pasca Kongres
Sumber : Modifikasi Penulis

Hilangnya modal otoritas legal yang dimiliki Megawati akibat kongres IV Medan, tidak serta merta menghilangkan modal yang lain. Modal simbolik, yaitu

otoritas kharismatik yang kemudian dikonversikan dengan modal sosial dan kapital mengubah peta konflik internal PDI yang semula antara PDI Megawati berhadapan dengan PDI Pro Kongres, berubah menjadi konflik antara PDI Pendukung Megawati yang berupaya untuk *mendeligitimasi* kekuasaan rezim Orde Baru. Sedangkan posisi dari PDI pro Kongres, baik habitus maupun modal sudah menginternalisasi pada kekuasaan rezim Orde Baru dan berada pada posisi *orthodoxy*.

BAB VI
PEMBAHASAN
KOMUNIKASI POLITIK DALAM KONFLIK INTERNAL ERA REZIM ORDE BARU

6.1. Historitas Konflik Internal PDI Dan Keterlibatan Rezim Orde Baru

Memahami internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berlangsung pada awal pembentukan pada 1973 sampai tahun 1993 dimaksudkan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai "derajat keajegan" konflik yang berlangsung dipartai yang bersimbolkan kepala banteng tersebut. Di samping itu juga, karena PDI merupakan *sub institusional* dari rezim Orde Baru, maka apakah merupakan "korban" dari proses institusionalisasi, seperti yang dikatakan Huntington (2006:23), pelembagaan atau institusionalisasi partai adalah suatu proses pengorganisasian dan prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu. Hal ini dikarenakan, pada era rezim otoriter Orde Baru, seperti dikatakan Syamsudin Haris, konflik internal yang dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) umumnya dipicu oleh campur tangan negara dalam seleksi kepemimpinan parpol. Rezim Soeharto biasanya mendukung tokoh-tokoh tertentu sebagai calon ketua umum partai, dan sebaliknya menghambat munculnya figur-figur yang dianggap kritis terhadap Orde Baru. Selain itu, rezim Soeharto juga berkepentingan untuk "memelihara" konflik internal parpol agar di satu pihak PPP dan PDI dapat "dikuasai", dan di pihak lain supaya Golkar, yang notabene menolak disebut

sebagai parpol, selalu memenangkan pemilu-pemilu manipulatif Orde Baru secara mayoritas mutlak.[1]

Semenjak fusi tahun1973, konflik PDI kenyataanya bukan karena konflik antar unsur dalam tubuh PDI, melainkan konflik warisan antar faksi PNI yang merupakan unsur terbesar dalam tubuh PDI. Konflik pun bukan disebabkan oleh perbedaan persepsi ideologi. Berbeda dengan PNI dulu.

Sedangkan konflik pasca fusi, disebabkan karena kepentingan kekuasaan antar kelompok faksional PNI. Dalam setiap konflik, faksi garis keras selalu tersingkir. Sebaliknya kubu moderat selalu keluar sebagai pemenang. (Sukamto, Wuryandari & Sihbudi:1991:55) Kemenangan faksi moderat tidak terlepas dari keterlibatan rezim Orde Baru untuk menyelaraskan pimpinan partai dari kebijakan rezim dan menjauhkan dari unsur-unsur Sukarno.

Historitas konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sejak fusi 1973 sampai pada Musyawarah Nasional (Munas) PDI yang melahirkan kepemimpinan Megawati Sukarnoputri, dapat diringkas dalam tabel berikut ini.

[1] https://syamsuddinharis.wordpress.com/2014/12/29/mengelola-konflik-partai-politik/, di akses pada tanggal 21 Desember 2017, pukul 23.00 WIB

Ada beberapa hal yang bisa dijelaskan berkaitan dengan konflik internal PDI. *Pertama,* konflik internal yang berlangsung di PDI lebih didominasi konflik internal yang berasal dari unsur PNI sendiri, sedangkan pertikaian antar unsur PDI jarang terjadi. *Kedua,* konflik internal selalu melibatkan pemerintah rezim Orde Baru dalam menyelesaikan konflik dan memberi legitimasi bagi kepengurusan PDI yang baru. *Ketiga,* dalam setiap konflik, yang dimenangkan adalah kelompok yang dianggap kooperatif dengan rezim Orde Baru. Misalnya, ketika pada tahun 1978 konflik antara kubu Sanusi Hardjadinata/Usep Ranawidjaja sebagai Ketua Umum PDI dengan kubu Soenawar Sukawati/Isnaeni. Pertikaian dimenangkan kubu Soenawar Sukawati/Isnaeni, karena Usep Ranawidjaya dianggap anti "dwifungsi ABRI. *Keempat,* munculnya Soeryadi sebagai pimpinan PDI mengubah konflik yang sebelumnya didominasi konflik warisan yang berasal dari unsur PNI, berubah menjadi konflik atas ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Soeryadi. Misalnya, Soeryadi dianggap terlalu dekat dengan pemerintah, tidak menggunakan azas musyawarah dan pernyataan-pernyataan yang dianggap kontroversial. Dalam pernyataan ulang tahun PDI ke 16 pda 10 Januari 1989 di Yogyakarta, Soeryadi melontarkan, "merahnya PDI sama dengan merahnya Pancasila". Pernyataan itu dianggap berkonotasi komunis. Begitu juga dengan konsep "wong cilik" dianggap akan menggalakan pertentangan kelas dan mirip dengan ajaran komunis. (Sukamto:1995:63) Namun begitu, hal tersebut tidak menggoyahkan Soeryadi untuk tetap memimpin PDI, sampai ketika pemerintah rezim Orde

Baru melihat Soeryadi sudah tidak sejalan dengan garis kebijakan rezim sehingga pada kongres ke IV PDI pada tahun 1993 di Medan, Soeryadi tergusur dari pimpinan PDI.

Konflik internal PDI yang merupakan konflik warisan dari unsur terbesar fusi, yaitu PNI. Faksi-faksi yang diistilahkan dengan faksi "garis keras" atau "non koperatif" dengan faksi "kompromis" atau "koperatif. Dalam konflik, faksi yang kooperatif terhadap rezim Orde Baru selalu tampil sebagai pemenang. Hal ini tidak lain, kebijakan *political ordering* yang dijalankan rezim Orde Baru dalam menjaga kepentingan *status quo.* Konflik internal PDI bagi rezim Orde Baru merupakan *input* untuk menjalankan proses integrasi politik terhadap sub ordinatnya, sehingga komunikasi politik yang terjalin dalam konteks ini berlangsung linear antara elite rezim Orde Baru dengan elite PDI yang didukungnya.

Memahami konflik internal PDI yang terjadi sejak fusi tahun 1973, sulit untuk dikatakan sebagai konflik yang digambarkan Dahrendorf (1959) bahwa konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. (dalam Susan:2009:55) Kenyataannya PDI sebagai organisasi politik tidak tumbuh dengan sistem yang mandiri. Dalam konteks sistem kekuasaan rezim Orba, PDI merupakan sub ordinasi dari sistem kekuasaan rezim Orde Baru. Oleh karenanya, dalam tindakan politiknya harus menyesuaikan dan ikut memelihara kestabilan sistem. Bentuk penyimpangan

yang diangap berpotensi untuk mengganggu keteraturan sistem secara cepat untuk diintegrasikan. Bagi Talcot Parson, kestabilan sistem merupakan bentuk keteraturan yang menegaskan sub ordinat mendapatkan sepaket nilai melalui sosialisasi yang mendorong untuk menyesuaikan dengan sistem norma sosial yang sudah ada. (dalam Habermas:2004:6).

Tetapi, seperti yang dikemukakan Dahrendorf, relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Esensi kekuasaan seperti yang dimaksud Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. (dalam Wallace & Worf:1995:145) Dengan demikian, konflik kepentingan menjadi fakta yang tidak terhindarkan bagi mereka yang memiliki kekuasaan dengan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah *"lasting source of friction".* Konflik kepentingan untuk memperebutkan otoritas kekuasaan menjadi motif utama aktor-aktor PDI. Sementara itu, basis legitimasi kekuasaan berada ditangan rezim Orde Baru. Dengan demikian, ketika konflik internal berlangsung, bukan menjadi tempat aktor meraih dukungan dari bawah, melainkan arena untuk mendapatkan posisi kekuasaan dari rezim Orde Baru.

Oleh karena dalam interaksi komunikasi berlangsung linear antara mereka yang merebutkan legitimasi kekuasaan dengan penguasa rezim orde Baru. Dengan demikian realitas sosial yang terbentuk berlangsung dalam realitas yang obyektif, sehingga komunikasi berlangsung satu arah dan stabil yang

mempunyai pola urutan sebelumnya yang dapat di temukan. (West & Turner:2009:12). Oleh karenanya, komunikasi politik di definisikan sebagai suatu proses yang linear atau suatu sistem. Pendekatan linear berorientasi pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik. (Mulyana: 2014:4).

Dalam menjelaskan komunikasi politik pada konflik internal PDI dapat dijelaskan dalam gambar berikut;

Gambar 28
Komunikasi Politik Dalam Konflik Internal PDI
Sumber : Modifikasi Peneliti

Dari gambar di atas menjelaskan, *pertama,* rezim Orde Baru adalah pengendali dari sistem kekuasaan, sedangkan PDI merupakan sub ordinat yang menopang kekuasaan. *Kedua,* ketika terjadi konflik internal partai politik dalam hal ini PDI, merupakan *input* bagi rezim Orde Baru untuk mengendalikan dan

menyelesaikan konflik internal. *Input* juga dimaksudkan sebagai suksesi untuk mencari kepemimpinan partai politik yang kooperatif dengan rezim, dan menyingkirkan terhadap mereka yang dianggap tidak bisa kooperatif dengan rezim. *Ketiga,* persetujuan dan pengakuan terhadap legitimasi kepemimpinan partai politik, dalam hal ini PDI.

6.2. Stabilisasi Politik Rezim Orde Baru Dalam Konflik Internal PDI

Kajian yang dilakukan oleh Linnea M. Beatty *et all* (2011), menggambarkan, Pemerintah diktator Burma mempertahankan kekuasaannya dengan dobel standar, yaitu dengan dengan cara kekerasan maupun non-kekerasan. Kajian ini juga menjelaskan bagaimana oposisi mempertahankan kemampuan mereka untuk menantang sebuah negara otoriter lebih waktu yang lama. Kondisi otoriter mengharuskan bahwa gerakan oposisi menolak dengan memanfaatkan dua imperatif: menantang rezim dan memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Bentuk perlawanan di Burma meliputi perlawanan secara ofensif dan tantangan secara defensif untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

Dalam kasus konflik internal PDI, di permukaan memang kelihatan konflik internal antara kelompok PDI Pro Kongres dengan PDI Megawati. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa konflik internal berlangsung tidak secara alamiah yang disebabkan karena perbedaan kepentingan aktor PDI, melainkan karena adanya campur tangan dari rezim Orba yang menginisiasi adanya “kelompok 16” sebagai embrio dari PDI Pro Kongres. Penelusuran terhadap

sejarah konflik PDI semenjak fusi tahun 1973, konflik internal PDI tidak bisa dilepaskan keterlibatan rezim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan upaya rezim untuk menjalankan politik *status quo*, sehingga kalau ditarik lebih dalam lagi sebenarnya merupakan pola integrasi atau stabilisasi politik yang dilakukan rezim Orde Baru. PDI Pro Kongres adalah bentukan dari rezim Orba, sehingga karateristik dari orientasi politik sudah merupakan internalisasi dari rezim. Dengan demikian dalam konflik internal PDI sebenarnya dimaknai dalam posisi yang diametral antara kelompok PDI Megawati dengan rezim Orde Baru.

6.2.1. Integrasi Politik Rezim Orde Baru

Kasus pada konflik internal PDI yang berlangsung pada tahun 1996, setidaknya menjadi contoh kasus yang mencerminkan pola integrasi yang selama ini dilakukan rezim Orde Baru terhadap berbagai potensi yang dianggap mengganggu stablilitas politik secara keseluruhan. Konflik internal PDI memperlihatkan sebuah representasi pola integrasi politik yang dijalankan rezim Orde Baru selama berkuasa.

Pertama, yang disebut dengan politik kekerasan, yaitu subyektifitas untuk menafsirkan ketentuan normatif sistem politik sesuai dengan selera dan kepentingan penguasa.(Ikra Nusa Bhakti:2001:23) Dalam prakteknya, politik kekerasan diwujudkan dalam segala bentuk proses politik yang dilakukan rezim yang terpublikasi tujuannya untuk mengembangkan *popular common sense* agar tetap mendominasi. Ini berkaitan dengan politik kekerasan dalam memproduksi

wacana-wacana dominasi, bahwa ketentuan-ketentuan normatif dipahami secara subyektif agar dapat diterima oleh publik. Dalam istilah Habermas sebagai bentuk "justifikasi ideologis" untuk mencapai consensus politik.

Dalam konflik internal PDI, terlihat adanya dukungan terhadap kelompok PDI Pro Kongres dengan pernyataannya, bahwa "desakan kongres sudah sesuai dengan konstitusi partai". Begitu pula, ketika pasca kongres dengan terbentuknya kepengurusan DPP PDI yang baru, dan menganggap kepengurusan kelompok PDI Megawati sebagai suatu yang illegal maupun inskonstitusional.

Kedua, dengan menerapkan strategi politik *divide et impera,* politik pecah belah. Dalam kehidupan partai politik, rezim Orde Baru selalu mendukung terhadap pimpinan partai politik yang dianggap akomodatif terhadap kepentingan rezim. Potensi-potensi yang mengancam akan segera dintegrasikan sedemikian rupa secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya, konflik internal partai menjadi sarana rekrutmen tokoh atau pemimpin partai politik yang mendukung kebijakan Orde Baru, dan menyingkirkan mereka yang berpotensi mengancam kedudukan *status quo* rezim.

Dalam kasus konflik internal PDI antara kelompok PDI Pro Kongres dengan kelompok Megawati, dari hasil penelitian menjelaskan adanya keterlibatan rezim Orde Baru yang dikategorikan sebagai bentuk dari strategi politik "pecah belah". Hal ini dapat dilihat dari mulai perencanaan, penggalangan DPC dan DPD PDI seluruh Indonesia. Kesemuanya itu dilakukan

oleh jaringan birokrasi dan militer Orde Baru untuk mendesak segera diadakan kongres. Alasan segera dilaksanakan kongres karena di dalam AD/ART PDI dinyatakan bahwa Hasil Munas harus dipertanggungjawabkan di dalam kongres yang harus dilaksanakan 6 bulan dan selambat-lambatnya satu tahun setelah Munas, dan hal itu tidak dilaksanakan oleh Megawati selaku Ketua Umum hasil Munas 1993 di Jakarta. Demikian pula dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) yang merupakan amanat hasil Munas juga tidak pernah dibentuk.

Alasan lain adalah adanya di tingkat DPD dan DPC se Indonesia timbul masalah yang tidak terselesaikan, seperti di Jawa Timur, terdapat dua kepengurusan pimpinan daerah, yaitu DPD pimpinan Sutjipto dengan DPD pimpinan Latief Pudjosakti. Pada saat pembentukan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I dan Panswaslak I, hanya DPD PDI Jawa Timur yang belum mengirimkan wakilnya di lembaga pemilihan umum tersebut. Padahal, penyelenggaraan pemilu tinggal beberapa bulan lagi. Keadaan ini yang menggelisahkan pemerintah Orde Baru. Ketiadaan wakil dalam kepanityaan Pemilihan Umum akan mengurangi legitimasi dari pemilu itu sendiri.

Demikian pula ditingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), telah terbentuk kelompok-kelompok yang berpihak pada Megawati dan kelompok yang berseberangan, dan kelompok ini menganggap Megawati “otoriter”. Faksionalisasi dalam tubuh kepengurusan DPP PDI di bawah pimpinan Megawati memudahkan pihak luar untuk melakukan intervensi. Kenyataannya,

sisa-sisa pendukung Soeryadi masih banyak tersebar di daerah, sehingga ketika ada penggalangan untuk melakukan kongres maka begitu cepat dilakukan.

Konflik internal PDI 1996, boleh jadi berbeda dengan konflik sebelumnya. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda. *Pertama,* pada konflik-konflik sebelumnya, kelompok yang tersingkir biasanya akan tenggelam seiring dengan dinamika partai, tetapi dalam konflik ini justeru kelompok yang tersingkir berubah menjadi kekuatan oposisi yang mengancam posisi *status quo* rezim. *Kedua,* keterlibatan akar rumput yang makin meluas. *Ketiga,* ada keterlibatan pihak luar PDI yang memanfaatkan arena konflik untuk mendorong adanya perubahan politik.

Keterlibatan pun terus berlanjut ketika pasca kongres PDI. Pola integrasi yang sudah ditata sedemikian rupa tidak berjalan sesuai yang dikehendaki. Massa PDI pendukung Megawati mengadakan perlawanan dengan tetap menguasai kantor DPP PDI dan melakukan massa aksi dengan mengelar mimbar bebas maupun aksi jalanan. Aktivitas itu di mata rezim sangat mengganggu, isu-isu yang dilontarkan pihak massa PDI pendukung Megawati sudah bukan lagi memprotes tentang penyelenggaraan kongres, melainkan juga mengkritik rezim Orba, dan dukungan terhadap keberadaan massa pendukung PDI Megawati tambah meluas.

Oleh karena itu, timbul gagasan untuk mengambil alih kantor DPP PDI. PDI Pro kongres bersama aparatur rezim Orba menyusun rencana untuk melakukan pengambilalihan sekaligus juga menghentikan aktivitas mimbar

bebas. Proses pengambilalihan inilah yang menyulut kerusuhan di Jakarta yang dikenal “peristiwa 27 Juli”. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan rezim Orba dalam mengintegrasikan kekuasaan politik.

Dengan demikian, peran agen negara begitu besar terhadap terjadinya konflik internal. Dari berbagai pernyataan agen negara atau pejabat yang berwenang pada saat itu, mengakui bahwa mereka terlibat sebatas dalam perencanaan dan penyelenggaran kongres IV PDI di Medan. Sedangkan, untuk peristiwa penyerangan kantor DPP PDI, yang dikenal dengan peristiwa “27 Juli”, mereka membantah terlibat dalam peristiwa tersebut. Saling tuduh dan lempar tanggung jawab sempat mewarnai dalam pemeriksaan yang dilakukan Tim Koneksitas ABRI. Tetapi, berdasarkan pemeriksaan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), menyimpulkan bahwa adanya keterlibatan aparat keamanan dalam peristiwa tersebut.

Ketika dilakukan persidangan terhadap para aktor-aktor yang diduga terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996, dan di dilakukan di Pengadilan Koneksitas yang dibentuk khusus untuk mengadili para tersangka peristiwa 27 Juli. Persidangan berlangsung sejak tanggal 23 Juni 2003 hingga 30 Desember 2003 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan ini hanya mampu menggiring peristiwa 27 Juli sebagai peristiwa pidana biasa saja yaitu peristiwa pengrusakan secara bersama-sama terhadap kantor DPP PDI meski terbukti ada unsur keterlibatan aparat militer dan intervensi pemerintah.

Dalam proses persidangan di pengadilan, hakim hanya mampu membuktikan keterlibatan seorang buruh bernama Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan melemparkan batu ke Kantor PDI dan divonis selama 2 bulan 10 hari, sedangkan dua perwira militer yang diadili yaitu Kol CZI Budi Purnama (mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Letnan Satu (Inf) Suharto (mantan Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas. Sejumlah nama lainnya yang menjadi tersangka namun tidak diproses hingga ke Pengadilan.

Ketiga, yang disebut dengan "kekerasan politik" adalah segala bentuk proses politik rezim yang tujuannya untuk mendominasi dan dilakukan dengan cara kekerasan. Praktek politik semacam itu, dalam pandangan Jenkins (2010:21), sebagai praktek di luar "legal rasional". Artinya, adanya praktek politik yang diambil bukan berdasarkan pada ketentuan normatif yang dilakukan oleh agen-agen negara dengan cara tersembunyi. Ini berkaitan dengan justifikasi ideologis yang dilakukan negara untuk diterapkan yang belum tentu diterima begitu saja oleh publik. Oleh karenanya, perlu adanya daya pemaksa, yaitu dengan cara kekerasan. Model semacam ini, kekerasan politik yang digunakan mempunyai alasan pembenar, termasuk di dalamnya adalah cara-cara pengerahan kekuatan, atau kekerasan politik yang peluangnya sangat besar dilakukan oleh agen-agen negara.(Nusa Bhakti1999:39)

Penjelasan secara teoritik tentang praktek politik rezim Orde Baru yang berlangsung dalam "kekerasan politik" seperti yang dikatakan William Liddle

(1992) jarang ditemukan. Namun demikian, karaktersistik yang khas dari rezim Orde Baru adalah cara represif yang digunakan dalam mengendalikan terhadap potensi gerakan sosial dan demokrasi yang mulai tumbuh ke permukaaan. Bentuk represif, ujungnya menghadirkan kekerasan politik untuk mengamankan politik *status quo.*

Hartogs dan Artzt mengidentifikasi tiga model kekerasan, yaitu pertama, tipe kekerasan yang terorginisasi *(organized violence)* yang menunjukan suatu pola *(pattern)* dan suatu kesengajaan *(deliberate). Kedua,* kekerasan spotanitas yang dipengaruhi oleh eksploitasi situasi poltik internal dan eksternal. Kekerasan spotanitas biasanya berbentuk reaktif, *compensatory, gratuitous*. Reaksi merupakan akibat langsung dari kondisi-kondisi frustasi, sementara *compensatory* merupakan bentuk frustasi lanjutan yang mengakibatkan kekerasan. Sedangkan *gratuitous* merupakan agresi yang dilakukan sekelompok sebagai dampak dari ketidakmampuan menangkal perasaan ketakutan terhadap kekuatan yang lebih besar. *Ketiga*, merupakan tipologi penyimpangan yang diakibatkan oleh kondisi fisik maupun mental yang sakit. (dalam Grundy & Weinstein:1974:2-3)

Kekerasan dalam tipologi pertama adalah suatu tindak kriminal dan tipe kekerasan politik. Tindak kriminal semacam biasanya dilakukan oleh suatu organisasi yang oleh Hartogs (1974) disebut *social bandits* atau bandit-bandit sosial, gangster, premanisme. Sementara itu, kekerasan politik seringkali berkaitan dengan agen-agen pihak yang berkuasa. Penggunaan kekerasan politik

seringkali dilihat dalam konteks “legitimasi ideologis” yang dilakukan dengan dua cara, *pertama,* aturan-aturan normatif suatu sistem politik dipahami sebagai suatu yang “salah”. *Kedua*, dengan kondisi semacam itu, kekerasan politik yang digunakan mempunyai alasan pembenar, termasuk di dalamnya penggunaan cara-cara kekerasan.(Nusa Bhakti: 1999:33) Penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, memperlihatkan keterlibatan rezim dengan agen-agen negara dalam peristiwa penyerangan itu yang dimaksudkan untuk meredam aktivitas PDI pendukung Megawati agar tidak makin meluas.

Dengan demikian, dalam kasus konflik internal PDI, pola integrasi diwujudkan dalam bentuk politik kekerasan, politik pecah-*belah-divide et impera* dan kekerasan politik merupakan representasi dari pola umum yang dilakukan rezim Orde Baru dalam melakukan integrasi politik. Khusus yang terakhir tentang kekerasan politik menjadi yang pertama dalam sejarah kekuasaan politik rezim Orde Baru terlibat langsung dalam konflik internal partai politik yang melibatkan agen-agen negara.

Habermas (16:2004) dalam batasan teoritis tentang integrasi sistem adalah integrasi subsistem-subsistem melalui sarana pengendalian. Integrasi dilakukan melalui seperangkat norma yang merupakan dari kesepakatan bersama. Tetapi, masyarakat adalah tempat bertemunya berbagai kepentingan, maka dalam kasus tertentu norma atau tatanan sosial tidak bisa ditata melalui integrasi. Alternatif yang tersedia adalah penerapan secara koersif (memaksa) yang tujuannya adalah tidak lain untuk menyembunyikan konflik. Sebuah konsensus atau kesepakatan

bersama bisa dicapai apabila konflik itu ditekan sedemikian rupa atau dibuat tidak terlihat. Dalam konteks integrasi sosial dicapai dengan cara tersebut, maka konsensus nilai bersifat ideologis.

Dalam batasan integrasi yang dikemukakan Habermas, *pertama*, integrasi dilakukan dengan konsensus. *Kedua*, dengan cara memaksa dengan penafsiran subyektif terhadap ketentuan normative. Integrasi seperti ini merupakan bentuk manipulasi dengan berbagai *popular common sense* yang bertujuan untuk mendominasi. Pada kasus konflik internal PDI, integrasi dilakukan dengan cara melakukan rekayasa sebagai dalih untuk menyingkirkan pemimpin partai yang tidak akamodatif dengan penguasa. Dukungan massa dan otoritas kharismatik yang dimiliki Megawati, konflik bukan sekedar konflik internal PDI antar aktivis PDI melainkan menjadi konflik terbuka antara rezim Orde Baru dengan massa PDI pendukung Megawati. Keadaan demikian memaksa rezim Orde Baru dalam melakukan integrasi politik dengan melakukan kekerasan nyata yang melibatkan agen-agen negara agar aktivitas politik massa PDI pendukung Megawati semakin meluas.

6.2.2. Komunikasi Budaya Konteks Tinggi Dalam Integrasi Politik Rezim Orde Baru

Merujuk pada Stuart Hall mengelompokkan budaya sebagai konteks tinggi dan konteks rendah. Dalam budaya konteks tinggi, komunikasi difokuskan lebih kepada bagaimana pesan tersebut disampaikan daripada apa yang dikatakan serta waspada terhadap isyarat nonverbal. Sedangkan komunikasi konteks

rendah merupakan komunikasi yang mana jumlah informasi lebih besar dari yang disampaikan. Atau, dalam komunikasi konteks rendah, pesan verbal mengandung banyak informasi dan hanya sedikit yang tertanam dalam konteks atau peserta (Samovar & Porter:2010:257).

Hasil data penelitian menjelaskan, kaitanya dengan komunikasi konteks tinggi dapat dilihat dari tindakan politik yang dilakukan rezim Orde Baru dengan melibatkan agen-agen negara melakukan konsolidasi terhadap DPC maupun DPD PDI untuk mendorong untuk segera diadakan kongres. Ketidaksetujuan terhadap kepemimpinan Megawati tidak dinyatakan secara langsung secara verbal, melainkan melalui agen-agen negara dengan melakukan rekayasa mendorong dilaksanakan kongres. Realitas tersebut sebagai tindakan di luar "legal formal" dari ketentuan normatif.

Begitu juga dalam pernyataan simbolik yang dinyatakan secara verbal, seperti pernyataan para aparatur Orde Baru yang menyatakan dukungan secara tidak langsung terhadap kelompok PDI Pro Kongres, seperti "Keinginan kongres PDI sudah sesuai konstitusi partai", "Kongres merupakan aspirasi dari bawah" adalah contoh komunikasi konteks tinggi yang secara implisit mendukung PDI Pro Kongres tetapi tidak dinyatakan secara langsung.

Ketika pasca kongres, kegiatan aksi mimbar bebas maupun aksi jalanan yang dilakukan kelompok PDI Megawati makin membesar, pernyataan dari aparatur rezim Orde Baru tidak bergeser pada bentuk komunikasi konteks tinggi secara implisit menyatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan kelompok PDI

Megawati sudah ditunggangi oleh pihak ketiga sehingga mengarah ke tindakan makar, dan ditunggangi gerakan komunis.

Pengungkapan secara implisit terhadap pemimpin ataupun tokoh yang berpotensi mengancam keberadaan *status quo* rezim sudah menjadi kelaziman dalam kekuasaan rezim Orde Baru. Ungkapan, seperti, "yang tidak konstitusional akan saya gebuk", atau ketidakhadiran pejabat pemerintah terhadap suatu penyelenggaraan suatu kegiatan bisa dimaknai ketidaksetujuan pemerintah terhadap kegiatan tersebut. Bisa juga, penerimaan terhadap tokoh atau pemimpin partai menandai adanya persetujuan dari pemerintah. Misalnya, ketika pasca kongres PDI IV Medan, penerimaan Presiden Soeharto di Istana Negara terhadap Soeryadi dan pengurus PDI lain menandai adanya pengangkuan terhadap kepengurusan PDI tersebut.

Budaya komunikasi konteks tinggi untuk mendominasi ini sejalan dengan pemikiran Habermas (1994) tentang integrasi sistem, bahwa integrasi bisa dilakukan dengan cara konsensus, tetapi bisa juga dengan cara paksaan. Kadangkala dalam upaya pemaksaan ini digunakan cara yang manipulatif yang menyembunyikan maksud yang sebenarnya dan menjadi ideologis. Konteks inilah, rezim Orde Baru dalam melakukan integrasi sistem yang sebenarnya untuk mendominasi selalu menggunakan gaya komunikasi yang dapat dikategorikan konteks tinggi.

6.2.3. Komunikasi Instrumental Rezim Orde Baru Dalam Konflik Internal PDI

Memahami konflik internal PDI, tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya politik rezim Orde Baru, seperti yang dikemukakan Emmerson (dalam Mahfud:2014:221) bahwa birokrasi di Indonesia telah memperlihatkan tradisi dan budaya politik Jawa yang berkarakter patrimonial di mana jabatan dan seluruh susunan birokrasi didasarkan pada hubungan personal *patron-client.* Dalam karakter patrimonial, pemegang kekuasaan dan segala kekuasaanya dilihat sebagai satu kesatuan. Kegiatan politik dianggap ada pada pemegang kekuasaan, sedangkan struktur politik menggantung dalam bentuk jaringan vertikal yang bersaing untuk memperoleh perlindungan pribadi pemegang kekuasaan. Begitu juga, Benedict R.O.G. Anderson (1982:1-69) menjelaskan budaya politik rezim Orde Baru cocok dengan model Weber tentang negara patrimonial. Menurut model ini pemerintah pusat pada dasarnya merupakan perluasan rumah tangga penguasa beserta pembantunya.

Ditinjau dari rasionalitas kekuasaan, Dwight Y. King menjelaskan bahwa pemerintah rezim Orde Baru termasuk dalam kategori otoriter birokratis. Dalam rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui cara sederhana, cepat, tidak bertele-tele, efisien dan tidak memungkinkan adanya proses *bargaining* yang lama, cukup mendekatkan diri semata-mata pada “teknokratik-birokratik” dengan alasan mempertimbangkan efisiensi. Ia juga menilai dalam rezim seperti ini, kewenangan tertinggi terletak pada militer sebagai lembaga yang mengadopsi pendekatan teknokratik- birokratik dalam pembuatan kebijaksanaan yang

konsultatif dan konseptual di kalangan penguasa serta peranan dari struktur birokratik yang lebih besar. (dalam Mahfud MD:2014:222)

Gambaran kekuasaan seperti yang dijelaskan Dwight Y. King merupakan kekuasaan modern yang bertumpu pada kekuatan rasionalitas teknik belaka. Kekuasaan semacam itu mengacu pada perhitungan yang masuk akal untuk mencapai sasaran-sasaran berdasarkan pilihan-pilihan yang rasional dan dengan sarana-sarana yang efisien.

Kritik terhadap kekuasaan tersebut, seperti yang dikemukakan Herbert Marcuse, masyarakat industri modern dengan sistem kekuasaan tersebut adalah masyarakat yang tidak sehat karena masyarakat tersebut adalah masyarakat berdimensi satu. Segala segi kehidupan hanya diarahkan kepada satu tujuan saja dengan menciptakan satu bentuk kontrol baru (*new forms of control*) yang bersembunyi di balik kenyamanan, kelembutan, kerasionalan, dan kebebasan. Bentuk kontrol baru tersebut bertujuan untuk melanggengkan satu sistem *status quo* dengan menciptakan penindasan yang terselubung yang disebut Marcuse dengan istilah *repressive tolerance.* (Marcuse:1969:95-137)

Dalam mendefinisikan masyarakat tersebut, Marcuse menyebut dengan "rasio teknologis", Horkheimer dengan "rasio instrumental". Sedangkan, Habermas mengikuti jejak pendahulunya dengan memfokuskan pada suatu tindakan manusia, yang disebut sebagai "tindakan instrumental. Dalam tindakan ini hanya bisa dilakukan terhadap kenyataan non-sosial.(dalam Hardiman:2003

:78) Berkaitan dengan rezim Orde Baru sebagai sistem kekuasaan, maka dalam memperlakukan sub ordinatnya, yaitu partai politik (PDI) sama halnya dengan benda yang bisa dipindah, diganti atau dipertukarkan. Konflik internal partai politik, seperti yang terjadi di PDI merupakan bentuk komodifikasi politik untuk tetap mempertahankan keseimbangan sistem dan *status quo* kekuasaan.

Budaya politik tersebut tentu berpengaruh terhadap praktek komunikasi politik. Realitas tersebut, komunikasi berlangsung secara linear, dari atas ke bawah, dan menjadikan perangkat yang di bawah hanya sekedar obyek dari pada subyek komunikasi serta berorientasi pada kestabilan sistem politk. Begitu juga, komunikasi jauh sebagai sarana pertukaran makna di antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan distribusi dan penglolaan kekuasaan. (Mulyana:2014:10-11) Padahal dalam pendayagunaan dan penglolaan kekuasaan politik, komunikasi merupakan sarana untuk mendapatkan persetujuan dan solidaritas secara bersama-sama secara rasional, atau yang disebut Habermas sebagai deliberatif kolektif. (dalam Hardiman:2013:96) Kekuasaan politik sama halnya dengan legitimasi, yaitu adanya persetujuan bersama terhadap subyek-subyek yang terlibat dalam pengambilan keputusan, Tetapi, bagi Habermas legitimasi tidaklah cukup, politik harus rasional, yakni membangun masyarakat atas dasar hubungan antarpribadi yang merdeka dan memulihkan kedudukan manusia sebagai subyek-subyek yang menglola sejarahnya. (dalam Hardiman:2003:122).

Dalam konteks komunikasi politik, rezim Orba dalam subyektivitas politiknya memahami kekuasaan sebagai suatu yang teratur, stabil dan

berpedoman pada norma-norma yang telah ditetapkan. Kekerasan politik yang dipraktekan rezim Orde Baru sebagai alternatif penyelesaian konflik internal merupakan bentuk instrumental dalam melakukan integrasi. Yang terpenting dalam tindakan instrumental adalah bagaimana mencapai tujuan secara efektif, komunikasi sekedar sarana dalam mencapai tujuan tersebut.

Tindakan instrumental yang dilakukan rezim Orde Baru dalam konflik internal, *pertama* dengan komunikasi persuasif. Dan Nimmo (1993:34) menyebutkan bahwa persuasif adalah komunikasi yang bertujuan atau berkepentingan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para aparatur rezim Orde baru yang menyatakan, bahwa "kongres sudah sesuai dengan konstitusi". Ketika, aksi mimbar dan aksi jalanan makin marak yang dilakukan massa PDI pendukung Megawati, muncul pernyataan untuk menghentikan kegiatan tersebut karena dianggap sudah mengganggu ketertiban.

Kedua, cara *labeling* adalah penerapan kata-kata ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan. (Nimmo:108:1999). Yakni dengan menyebut massa PDI pendukung Megawati dengan aktivitas mengarah pada tindakan makar, dan menyebut telah ditunggangi gerakan komunis. Melalui strategi persuasi dan *labeling* merupakan komunikasi strategis atau instrumental yang menyertakan tindakan sosial sudah ditentukan lebih dahulu, dan pihak lain diperlakukan sebagai obyek. Bagi Habermas, situasi komunikasi tersebut sebagai siuasi patologis dalam masyarakat.

Dalam hal ini Arendt (2003) menyebutnya sebagai bentuk komunikasi ekspresif yang merupakan perjuangan para aktor untuk mencapai kejayaaan dan pengakuan. (dalam d'Enteves:18:2003) Dengan demikian komunikasi politik yang dilakukan adalah komunikasi politik yang bersifat linear, publik dianggap sebagai obyek untuk diarahkan dan dimanipulasi (monolog) alih-alih menganggap mereka sebagai mitra. (Mulyana:2014:9)

Apabila di kaitkan dengan dualitas struktur Giddens, kebijakan Orde Baru dalam konflik internal PDI merupakan bentuk agen untuk menstruktur dunia sosial. *Pertama,* dengan signifikasi, melalui komunikasi dengan melakukan bentuk-bentuk persuasi untuk menghentikan kegiatan mimbar bebas. *Kedua,* struktur penguasaan atau dominasi yang menyebut aktivitas mimbar bebas sebagai gerakan makar. *Ketiga*, struktur pembenaran atau *legitimasi*, yaitu aktivitas mimbar bebas sudah di susupi oleh gerakan kiri atau komunis, karena alasan itu maka pemerintah rezim Orba melakukan penyerangan kantor dengan dalih pengambilalihan yang dilakukan oleh PDI Pro Kongres yang didukung oleh aparat keamanan pemerintah Orde Baru.

Gambar 29
Model Strukturasi Rezim Orde Baru
Sumber: Giddens dan modifikasi penulis

Dengan demikian, konflik internal PDI merupakan integrasi politik yang dilakukan rezim Orde Baru dalam mempertahankan *status quo.* Dalam kaitan integrasi dengan komunikasi politik yang dilakukan adalah upaya untuk melakukan dominasi sehingga bentuk komunikasi politik yang dilakukan dalam budaya komunikasi konteks tinggi. Hal ini sudah menjadi kelaziman dalam praktek kekuasaan rezim Orde Baru. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Castell Lindell, untuk melihat realitas politik di Indonesia seperti halnya melihat samudera lautan, bahwa riak-riak yang berlangsung di permukaan tidak sama dengan riak yang terjadi di dalam.

Untuk memahami model komunikasi politik yang dilakukan rezim Orde baru dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 30
Model Komunikasi Dalam Stabilisasi Politik
Rezim Orde Baru Dalam Konflik Internal PDI
Sumber : Olahan penulis

Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan, *pertama*, rezim Orde Baru dalam menerapkan kebijakan politik menerapkan kekerasan maupun kekerasan politik untuk mengintegrasikan berbagai potensi ancaman yang bisa menggangu posisi *status quo* rezim. Kebijakan ini memang sudah menjadi habitus rezim Orde

Baru bahwa dalam setiap konflik internal partai politik adanya keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung. Kendati demikian, dalam sejarah kekuasaan politik rezim Orde Baru, hanya dalam PDI keterlibatan tersebut dilakukan dengan penggunaan kekerasan nyata.

Kedua, kebijakan politik dalam konflik internal PDI tersebut kemudian direalisasikan dalam pola integrasi, yaitu dengan politik kekerasan, politik *devide et impera*, dan politik kekerasan. Ketiganya, merupakan kesatuan yang sinergis sehingga terbentuk integrasi politik seperti yang diinginkan rezim.

Ketiga, hasil dari bentuk pelaksanaan tersebut adalah adanya stabilisasi politik yang diinginkan rezim Orde Baru.

6.3. Komunikasi Politik PDI Megawati Dalam Perlawanan Terhadap Rezim Orde Baru

6.3.1. Kesadaran Kritis

Berkaitan dengan kajian tentang perlawanan terhadap sebuah rezim pemerintahan. Penelitian yang dilakukan Linnea M. Beatty (2011) menunjukan gerakan oposisi di Burma menggunakan strategi perlawanan dengan non-kekerasan maupun kekerasan. Begitu juga penelitian Yavuz Yildirim (2104) perlawanan Gezi Parki merupakan peristiwa luar biasa dalam perjuangan sosial Turki. Ini melambangkan titik pergeseran dalam tradisi gerakan Turki. Pendekatan gerakan sosial harus lebih berorientasi kehidupan sehari-hari dan gerakan akar rumput menjadi perjuangan politik baru yang mempengaruhi politik kelembagaan dan perwakilan demokrasi. Beberapa kajian juga

memperlihatkan bahwa sistem kekuasaan politik yang hegemonik dan otoriter selalu mendapatkan resistensi dalam berbagai bentuk. Dalam kasus Gezi Parki, orang-orang Turki telah menciptakan kerangka gerakan politik mereka sendiri. Kesimpulannya, dapat dinyatakan bahwa perlawanan Gezi Parki merupakan peristiwa luar biasa dalam perjuangan sosial Turki.

Ditinjau dalam konsep rasionalisasi dunia kehidupan, konflik internal yang dipahami sebagai perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang dilakukan kelompok PDI Megawati. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam mendefinisikan atau mengkonstruksi tatanan politik yang dipraktekan rezim Orde Baru, mereka berpendapat, rezim Orde Baru adalah rezim otoriter dan hegemonik. Oleh karena itu membentuk kesadaran mereka perlu adanya perubahan politik yang lebih demokratis.

Dalam konteks kesadaran, berpijak pada pemikiran Schutz (dalam Kuswarno:2013:167) tentang *account* atau motif, yaitu in *order to motive*, yang merujuk pada masa datang dengan *because motive*, yang merujuk pada masa lalu, maka dalam pengkategorian tentang kesadaran dibedakan dengan kesadaran emosional dan kesadaran ideologis.

Pada lapisan kelompok kesadaran ideologis, konflik internal PDI merupakan arena atau momentum untuk memperluas gerakan perubahan, dan ada tatanan nilai tertentu yang sudah ada dan terbentuk yang hendak diterapkan setelah perubahan. Kesadaran ideologis adalah bentuk kesadaran dalam melihat praktek politik Orde Baru dipersepsi tidak sesuai dengan kaidah atau nilai yang

diyakininya. Biasanya, kelompok ini masih ada kaitan historis dengan Sukarno. Entah itu mantan aktivis PNI atau organisasi afiliasinya, dan dengan ataupun tanpa figur Megawati tetap melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Ini berbeda dengan mereka yang berada pada lapisan kesadaran emosional, lebih melihat sisi Megawati sebagai figure perubahan, tanpa melihat nilai seperti apa yang diterapkan setelah perubahan. Mereka datang ke mimbar bebas sebagai reaksi spontan atas peristiwa yang terjadi, dan menginginkan perubahan politik serta menempatkan Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Untuk melihat lebih jelas orientasi kesadaran dapat dilihat dalam gambar berikut;

Gambar 31
Orientasi Kesadaran
Sumber : Modifikasi Penulis

Giddens (5-7:84) menjelaskan dimensi-dimensi kesadaran bagi seorang agen, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis

(*pratical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*), "Motivasi tak sadar" menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Misalnya, bekerja tiap hari bukan dilandasi untuk mencari uang, tetapi merupakan aktivitas rutin yang harus dijalani.

Lain lagi dengan "kesadaran diskursif" mengacu pada kapasitas untuk merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan manusia. Misalnya, mengapa harus memakai seragam ketika bekerja? Karena untuk menghidari atasan. Mengapa harus berbisnis diluar aktivitas kerja sehari-hari? Karena ingin mendapatkan tambahan penghasilan lebih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

"Kesadaran praktis" menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak bisa selalu diurai. Giddens menyebutnya sebagai suatu tindakan yang diterima begitu saja oleh aktor, tanpa mampu mengekpresikan apa yang mereka lakukan lewat kata-kata.(dalam Ritzer & Goodman:570:2008) Misalnya, ketika mengemudikan mobil, dan berbelok harus menyalakan *sign* lebih dulu untuk memberitahu kendaraan yang dibelakang. Mengapa harus diam ketika masuk tempat ibadah. Bentuk kesadaran praktis seperti itu dalam fenomenologi merupakan gugus pengetahuan yang sudah diandaikan. Kesadaran praktik ini merupakan bentuk untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial lambat laun menjadi struktur, dan struktur tersebut akan mengekang serta menuntun tindakan.

Melihat dari motif massa PDI pendukung Megawati, bahwa mereka bergabung karena adanya kesadaran untuk melakukan perubahan. Kesadaran ini ternyata tidak diam, tetapi diwujudkan dalam suatu tindakan. Ketika praktek kesewenang-wenangan rezim, massa pendukung PDI Megawati melakukan tindakan politik dengan melakukan aksi jalanan dan penguasaan kantor DPP PDI. Kenyataan tindakan tidak berhenti dengan aksi jalanan, melainkan dilanjutkan dengan penguasaan kantor DPP PDI. Hadirnya "mimbar bebas" di depan kantor DPP PDI merupakan akibat dari adanya kesadaran untuk melakukan kerja politik dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Kesadaran merupakan menjadi ruang untuk melakukan tindakan. Massa PDI pendukung Megawati, ketika memutuskan untuk bergabung dalam aktivitas di kantor DPP PDI dilakukan dengan sadar. Ada sesuatu harapan yang dikehendaki dengan tindakan itu, yaitu adanya perubahan politik. Yang mereka nilai sangat dominan dan hegemonik.

Dalam aktivitas politiknya, memang tidak perbedaan peran dan tanggung jawab berdasarkan pada level kesadaran. Tetapi, dalam persoalan kesadaran kelompok PDI Megawati telah tumbuh apa yang disebut dengan kesadaran kritis. Yaitu, kesadaran yang selalu mempertanyakan adanya *"dominant ideology"* dan mengarahkan tindakannya sebagai arena perjuangan untuk melakukan transformasi sosial. Lukacs (1967) menyebut kesadaran kritis sebagai gejala reifikasi, yaitu suatu obyektivitas yang palsu sejauh berhubungan dengan pengetahuan, dan perubahan bentuk secara keseluruhan menembus

kehidupan dan kesadaran yang melebihi bentuk yang lain. Aspek ini mempunyai akibat secara radikal untuk mengubah segalanya yang manusiawi, mengalir, berproses dan terhubung dengan obyek-obyek yang diputuskan dan diasingkan. Sedangkan, Edward Said (2004), menyebut kesadaran kritis sebagai suatu yang *worldly* disertakan pada diri, tanggap sensistif terhadap budaya yang unggul.

Budaya dominan yang sepenuhnya dikembangkan rezim Orde Baru dengan tafsir dan subyektivitas untuk mempertahankan *status quo* ditanggapi berbeda kelompok PDI Megawati dengan melakukan perlawanan. Kendati kesadaran kritis yang dikembangkan belum menuju pada perubahan atau transformasi sosial. Tetapi tindakan politik yang dilakukan kelompok PDI Megawati mendorong pada kelompok masyarakat lain untuk melakukan tindakan serupa. Boleh dikatakan, konflik internal PDI yang berujung pada "peristiwa 27 Juli 1996" membuka kesadaran kritis untuk melakukan resistensi terhadap rezim Orde Baru, dan berakumulasi mencapai puncaknya ketika tahun 1998 terjadi pergantian kekuasaan dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi.

6.3.2. Solidaritas Sosial Sebagai Integrasi Sosial

Dalam pandangan Habermas (2004:16) integrasi sosial bisa terwujud melalui saluran intensional, ia mesti berbentuk integrasi norma yang meliputi sistem nilai yang dianut bersama. Akan tetapi, karena nilai juga tidak bisa dipaksakan pada agen, maka ia harus diwujudkan melalui konsensus. Menggaris bawahi pandangan Habermas, *pertama*, ada seperangkat nilai-nilai

yang dikembangkan untuk menuju integrasi sosial. *Kedua*, nilai-nilai tersebut harus diwujudkan melalui persetujuan bersama.

Berkaitan dengan aktivitas politik yang dilakukan kelompok PDI Megawati, dari hasil penelitian menjelaskan mereka menginternalisasi nilai-nilai gotong royong atau solidaritas sosial dalam aktivitas perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Solidaritas sosial yang juga merupakan sistem nilai dalam istilah Weber menjadi etos perlawanan yang menyemangati mereka untuk melakukan perubahan. Etos ini yang menyebabkan aktivitas mimbar bebas maupun aksi jalanan hingga bertahan begitu lama, kurang lebih 40 hari, dan berhenti karena ada penyerangan dari PDI Pro Kongres dan aparat keamanan rezim Orde Baru.

Solidaritas sosial, seperti yang dinyatakan Durkheim(dalam Soedijati:1995;12) adalah perasaan saling percaya dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau mereka saling percaya maka akan menjadi satu/menjadi persahabatan, menjadi saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan sesamanya.

Ada beberapa faktor yang membentuk solidaritas sosial dikalangan massa PDI pendukung Megawati. *Pertama,* akumulasi ketidakpuasan dari sebagian masyarakat terhadap rezim Orde Baru. *Kedua,* kharisma Megawati yang merupakan warisan dari Bung Karno mampu membentuk solidaritas dalam melakukan perlawanan terhadap rezim. Solidaritas ini pun terus berkembang

dengan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari organisasi masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Solidaritas sosial inilah menjadi sistem nilai dan media yang melandasi segenap interaksi dalam melakukan integrasi sosial terbentuk bersandarkan pada kriteria institusional. Dalam konsep solidaritas sosial, Durkheim tidak menjelaskan kriteria tentang solidaritas sosial, tetapi hanya membedakan antara solidaritas organis dan solidaritas mekanis. Berdasarkan hasil penelitian solidaritas sosial yang terbentuk dikalangan massa PDI pendukung Megawati menjelaskan kriteria institusional dari solidaritas sosial. *Pertama*, solidaritas sosial mensyaratkan adanya kesadaran para partisipan. Untuk bisa membangun solidaritas sosial, para subyek atau aktor yang terlibat harus mempunyai kesadaran praktis.

Kedua, solidaritas sosial memerlukan komunikasi, aktor-aktor yang terlibat saling berinteraksi untuk mencapai kesepahaman dalam tindakan. Artinya, adanya musyawarah untuk mufakat. Habermas menyebutnya sebagai "demokrasi *deliberatif* ", yaitu legitimasi suatu keputusan yang dihasilkan melalui perdebatan argumentatif yang bersifat sementara dan terbuka untuk revisi. Musyawarah menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya solidaritas sosial . Di dalam musyawarah dikumpulkan semua pengalaman, pikiran dan pendapat yang terbaik, dirundingkan adatnya, dibagi-bagi haknya, dibagi-bagi wajibnya, dan sesudahnya terdapat kata sepakat bulat-suara, barulah solidaritas sosial itu diselenggarakan. (Tumakaka: 214:1996)

Ketiga, hasil dari musyawarah adalah kesepakatan atau konsensus untuk melakukan tindakan. Konsensus penting karena akan membentuk struktur, norma yang mengarahkan pada suatu tindakan. Subyek atau individu yang terlibat dalam solidaritas sosial dengan adanya konsensus akan memahami tentang peran dan tugas yang akan dijalankan. Merujuk pada solidaritas organis Emile Durkheim, konsensus merupakan awal dari pembagian kerja dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kendati dalam solidaritas organis Durkheim menafikan adanya kesadaran kolektif yang tidak begitu mengikat, kurang *rigid* dan isinya adalah kepentingan individu yang lebih tinggi dari pedoman moral.(dalam Ritzer & Goodman:2008:92). Solidaritas sosial justeru menyandarkan pada kesadaran kolektif yang kuat, kepentingan bersama dan didasarkan pada moralitas yang tinggi karena tumbuh dalam suasana yang *magisch religious*. Yaitu, kepercayaan dan keyakinan akan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.(Tumakaka:1996:211)

Ke-empat, dengan adanya konsensus berakibat pada subyek-subyek yang terlibat dalam solidaritas sosial untuk melakukan tindakan sosial. Menurut Weber, tidak semua tindakan manusia disebut tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Jadi tindakan sosial merupakan perilaku manusia yang mempunyai makna subyektif bagi perilakunya. (dalam Sunarto:1993:14-15). Sedangkan Hannah Arendt menjelaskan tindakan bahwa manusia harus berada dalam *vita activa*

tertinggi, yaitu kerja, karya dan tindakan. Kerja merupakan kondisi yang yang terikat dalam hidup manusia. Artinya, selama manusia itu ada melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan reproduksi biologis agar bertahan dalam kehidupan, agar eksistensinya dan keberadaannya diakui maka manusia melakukan tindakan. Melalui tindakan manusia dapat memperlihatkan identitas dan menegaskan realitas dunia. (dalam d'Enteves: 2003:111)

Berkaitan dengan solidaritas sosial, tindakan masing-masing individu pada massa PDI pendukung Megawati merupakan bentuk perealisasian diri untuk melakukan aktivitas yang bermakna bagi pihak lain. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pada peran dan tanggung jawabnya. Akumulasi dari tindakan sosial individu membentuk tindakan kolektif.

Kelima, melalui tindakan kolektif membentuk gerakan sosial *(social movement)* untuk melakukan perubahan politik. Dengan gerakan sosial inilah solidaritas sosial menuntun pada pergerakan dinamis untuk perubahan. Gerakan sosial, seperti yang didefinisikan Eyerman & Jamison merupakan tindakan kolektif yang kurang lebih terorganisir, bertujuan perubahan sosial atau lebih tepatnya kelompok individu yang secara bersama bertujuan mengungkapkan perasaan tidak puas secara kolektif di depan umum dan mengubah basis sosial dan politik yang dirasakan tak memuaskan itu. (dalam Sztompka:2008:326)

Melalui lima (5) institusional dalam solidaritas sosial, yaitu kesadaran, interaksi/komunikasi, konsensus, tindakan sosial dan tindakan kolektif merupakan kerangka intitusional terbentuknya solidaritas sosial. Dari sisi

kordinasi tindakan, solidaritas sosial menciptakan integrasi sosial dan membentuk solidaritas. Integrasi sosial merupakan sistem yang di dalamnya subyek-subyek berbicara dan bertindak dan terhubung secara sosial yang terstruktur secara simbolik (Habermas:2004:96) Hal ini ini berbeda dengan integrasi sistem yang menempatkan masing-masing sub ordinatnya terhubung secara normatif dengan tujuan terpeliharanya stabilitas sistem. Interaksi dan komunikasi menjadi penting dalam solidaritas sosial , karena melalui keduanya lahir kesepakatan-kesepakatan yang secara simbolis menandai tindakan yang legitimate bagi masing-masing partisipan. Yang sebelumnya didahului oleh kesadaran, atau dalam istilah Habermas (2008) mempunyai "stock pengetahuan" yang sama. Hal ini yang terlihat dalam aktivitas massa pendukung Megawati di kantor DPP PDI, bahwa melalui kesepakatan selalu berinteraksi dan berbagi peran untuk melakukan tindakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berangkat dari tindakan individu, akhirnya berkembang dalam tindakan kolektif yang merupakan bentuk dari *social movement* atau gerakan sosial. Aktivitas politik massa PDI pendukung Megawati merupakan bentuk pembaharuan kultural di tengah sistem politik yang hegemonik. Resistensi atau perlawanan yang dilakukan setidaknya menjadi magnet bagi aktivis gerakan lain untuk bersama melakukan perubahan politik yang serupa.

Dalam konteks gerakan politik menghadapkan pada adanya perubahan politik. Sedangkan, orientasi perubahan sendiri bisa berlangsung dalam dua bentuk. *Pertama*, perubahan yang hanya mengubah aspek tertentu kehidupan

masyarakat tanpa menyentuh inti struktur institusinya, yang di sebut dengan reformasi atau perubahan yang berlangsung secara evolusioner. Sedangkan, perubahan yang menuntut semua aspek yang menyentuh inti struktur institusi kehidupan masyarakat di sebut perubahan cepat dan mendasar atau revolusi. Berkaitan dengan gerakan politik dalam aspek orientasi perubahan lebih menekankan pada perubahan yang cepat dan mendasar.

6.3.3. Komunikasi Politik Sebagai Bentuk Sosialisasi

Dalam "dunia kehidupan", aspek sosialisasi berfungsi sebagai tindakan untuk membentuk identitas. Ini berbeda dengan tradisi konstruktivis, bahwa sosialisasi sebagai tindakan komunikasi yang direpresentasikan sebagai permainan peran, definisi peran dan semacamnya. Kebudayaan dan masyarakat hanya dipandang sebagai media proses pembentukan diri yang dijalani aktor sepanjang hidupnya. (Habermas:2008:192).

Berkaitan dengan kelompok PDI Megawati sebagai "dunia kehidupan", dilihat dari aspek sosialisasi berfungsi sebagai pembentukan identitas yang direpresentasikan dalam aktivitas komunikasi politik. Dari hasil penelitian, mimbar bebas atau yang disebut dengan "panggung demokrasi" menjadi media untuk menegaskan identitas kelompok PDI Megawati untuk tidak tunduk pada ketentuan normative yang ditentukan oleh penguasa. Melalui mimbar bebas juga menjadi media untuk melakukan pendidikan politik agar tumbuh kesadaran kritis.

Mimbar bebas merupakan suatu fenomena yang anomali, karena aksi protes biasanya hanya dilakukan sekali dan itu hanya beberapa jam dalam sehari, seperti aksi demonstrasi atau aksi lainya yang dilakukan oleh aktivis prodemokrasi. Anomalitas terjadi, ketika mereka melakukan secara periodik dan bertahan lama. Faktor Megawati yang menyandang nama besar Sukarno sangat menentukan adanya mobilisasi massa yang besar. Sebelumnya, ada beberapa aktivis yang melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru, tetapi dukungan dan mobilisasi tidak sebesar pada Megawati. Penganiayaan terhadap Megawati sama halnya dengan penganiayaan terhadap Bung Karno.

Model gerakan sosial dengan melakukan aksi mimbar bebas dengan berbagai bentuk kegiatan, dikemudian menjadi hari *role model* bagi gerakan sosial lain dalam menuntut perubahan kebijakan. Penelitian yang dilakukan Achmad Jamil[2] dalam kasus sengketa antara KPK vs Polri. Gerakan sosial yang dilakukan oleh para aktivis anti korupsi berhasil memaksa Polri untuk menyerahkan kasus korupsi simulator SIM untuk diserahkan pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Yang sebelumnya, ratusan aktivis penggiat korupsi berdatangan ke kantor KPK dan membentuk pagar betis untuk melindungi KPK.

Aksi lain yang dilakukan kelompok PDI Megawati adalah dengan menggelar aksi jalanan. Aksi jalanan/demonstrasi sebagai upaya protes penyelenggaraan kongres IV PDI di Medan juga protes terhadap sikap

---

[2] Achmad Jamil, 2013, *Gerakan Sosial Dalam Perpektif Framing*, (Studi Pembentukan, Proses dan Pertarungan Framing Pada Gerakan Sosial Sengketa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dengan Polri Tahun 2009 dan 2012), Disertasi pada Fisip UI Departemen Ilmu Komunikasi.

pemerintah rezim Orde Baru yang mendukung dan memfasilitasi kongres. Begitu juga, ketika ada tundingan bahwa gerakan mereka sudah diindikasikan makar dan anarkhi serta ditunggangi gerakan komunis. Mereka melakukan *counter* dengan aksi jalanan dengan membagi bunga sebagai pesan bahwa aksi mereka merupakan gerakan damai. Di samping itu, disela aksi mimbar bebas dan aksi jalanan, terdapat aksi lain yaitu aksi publisitas.

Dalam rancangan awal penelitian ini, diasumsikan tindakan komunikasi akan melengkapi dunia kehidupan yang direpresentasikan oleh kelompok PDI Megawati. Dari sisi reproduksi kultural mampu mengembangkan pengetahuan dan kesadaran kritis, dalam kordinasi mampu mengembangkan solidaritas sosial sebagai tatanan ide maupun berfungsi dalam melakukan integrasi sosial, dan menegaskan identitas dengan berbagai aksi politik. Tetapi, kenyataannya, tindakan komunikasi belum melekat dalam dunia kehidupan kelompok PDI Megawati. Hal ini karena adanya kepentingan-kepentingan yang sudah ditentukan lebih dahulu, dan seringkali tersembunyi. Komunikasi menjadi media untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, bukan sarana untuk mencapai pemahaman. Dengan kata lain, bentuk komunikasi yang berlangsung pada kelompok PDI Megawati masih pada tataran “komunikasi strategis” dari pada “tindakan komunikasi”.

6.3.4. Budaya Komunikasi Konteks Rendah Dalam Perlawanan Terhadap Rezim Orde Baru

Stuart Hall menyatakan bahwa budaya komunikasi konteks rendah adalah bentuk komunikasi yang disampaikan secara eksplisit dan berbicara langsung kepada intinya serta tidak menimbulkan ambigu/makna ganda (Martin & Nakayama, 2003:204). Merujuk dari pendapat Hall, gaya komunikasi politik yang dilakukan massa pendukung PDI Megawati berada budaya komunikasi konteks rendah. Ini bisa dirunut dari berbagai pernyataan verbal yang dilakukan melalui berbagai aksi mimbar bebas, aksi jalanan dan aksi publisitas.

Dalam berbagai pidato di mimbar bebas, pernyataan dilakukan dengan langsung mengkritik perilaku politik elite PDI Pro Kongres maupun pemerintah rezim Orde Baru. Para elite PDI Pro Kongres digambarkan sebagai alat dari rezim Orde Baru yang mau diadu domba, sedangkan rezim Orde Baru digambarkan sebagai pemerintah yang otoriter, korup dan menyengsarakan rakyat.

Dari aksi publisitas dengan selebaran yang beredar, terdapat tema-tema yang mendominasi dari isi selebaran tersebut. *Pertama,* pemerintahan Orde Baru merupakan hasil kudeta terhadap pemerintah Sukarno, dan menyebut sebagai kepala negara yang korup dan kepala batu. *Kedua,* Kongres PDI di Medan merupakan hasil dari konsipirasi para aparatur Orde Baru, dengan PDI Pro kongres. *Ketiga,* Penggusuran Megawati sama halnya dengan kudeta yang dilakukan Jenderal Suharto terhadap presiden Sukarno, *Keempat,* ABRI yang

korup. *Kelima*, adanya reaksi dalam berbagai aksi di seputaran kantor DPP PDI dan tempat lain menjadi momentum untuk perubahan.

Selebaran-selebaran yang ditulis dan disusun secara sederhana merupakan opini yang muncul dari refleksi terhadap realitas yang dihadapi. Kalau Thomas Hobbes menyebutnya sebagai "suara hati". Selama hampir tiga dekade pemerintahan rezim Orba telah membentuk kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas yang diuntungkan dengan sistem dengan kelas yang dipinggirkan. Keberanian PDI pendukung Megawati untuk melawan *mainstream* yang sudah menjadi pakem rezim Orba menjadi inspirasi dan motivasi kalangan akar rumput yang selama ini terpinggirkan menemukan saluran untuk melakukan perubahan.

Begitu juga dengan spanduk-spanduk yang di pajang di area mimbar bebas maupun aksi jalanan, hampir sama seperti yang ditulis dalam selebaran. Dengan demikian, bentuk selebaran maupun spanduk yang merupakan bentuk komunikasi politik khas kelompok pingiran dalam batas-batas di manifestasikan dalam budaya komunikasi konteks rendah yang secara ekplisit dinyatakan langsung. Hal ini bisa dipahami, komunikasi politik yang direpresentasikan dalam bentuk resistensi memang harus disampaikan dalam gaya lugas, langsung bisa dipahami. Bentuk komunikasi konteks rendah menjadi budaya tandingan terhadap bentuk komunikasi konteks tinggi yang dipraktekan Orde Baru, dalam istilah Habermas cenderung manipulative dan ideologis. Gaya komunikasi politik konteks rendah tersebut dalam batas tertentu memang tidak bisa langsung

membuat perubahan. Tetapi opini mereka mencerminkan praktek-praktek kekuasaan yang berlangsung dalam rezim Orde Baru.

6.3.5. Transformasi Dari Otoritas Kharismatik Menjadi Lembaga.

Pasca berlangsung kongres IV di Medan pada tahun 1996, dengan terpilihnya kepengurusan DPP PDI baru, yaitu Ketua Umum Soeryadi dan Sekjen Buttu Hutapea secara otoritas legal kedudukan Megawati sebagai Ketua umum hasil Munas 1993 berakhir. Tetapi, ada hal yang menarik, bahwa basis legitimasi yang berupa dukungan massa yang besar dan modal kharismatik yang dimiliki Megawati menjadi modal untuk melakukan transformasi menjadi pemimpin informal. Hal ini dengan munculnya istilah “ProMeg”, PDI Pro Megawati.

Pada titik inilah figur Megawati telah bertransformasi menjadi lembaga. Lembaga, seperti dikemukakan Wiese dan Becker (1932:23) adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan kelompok yang berfungsi memelihara hubungan tersebut sesuai minat dan kepentingan individu dan kelompok. Kendati secara legitimasi politik formal atau otoritas legal sudah hilang, massa PDI pendukung Megawati tetap berinteraksi dan membangun jaringan, sehingga ketika awal reformasi Megawati bersama pendukungnya membentuk partai politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Proses terbentuknya lembaga ini memang tidak terencana. Pengaruh dari akumulasi krisis kepercayaaan terhadap pemerintah Orde Baru dan otoritas kharismatik serta proses peminggiran terhadap Megawati mendorong untuk

menjadi simbol perubahan. Dalam perspektif aktor individual ataupun kolektif tentang peran orang besar dalam perubahan sosial ada beberapa pandangan yang menjelaskan hal tersebut. *Pertama,* pandangan determinsme, mengasumsikan bahwa semua kejadian sejarah adalah pengaruh tindakan individu, dan sejarah adalah respon atau upaya individu yang paling lunak. *Kedua,* determinisme sosial bahwa perjalanan sejarah telah ditakdirkan, digerakan oleh kekuatan abadi dan disekat dari pengaruh manusia individual. *Ketiga,* pandangan evolusioner adaptif yang digagas oleh Robert Merton (1973), berangkat dari asumsi bahwa peluang untuk menempatkan peran kausal orang besar dan kondisi sosial dalam posisi saling berinteraksi.

Pandangan evolusioner adaptif setidaknya bisa menjelaskan proses pelembagaan dalam diri Megawati dan massa pendukungnya. Otoritas kharismatik yang dimiliki, diikuti dengan akumulasi ketidakpuasan terhadap sistem kekuasaan rezim Orde menjadi factor penentu untuk mengarahkan Megawati sebagai symbol perubahan.

6.3.6. Model Komunikasi Politik Massa PDI Pendukung Megawati

Dalam konsepsi “dunia kehidupan” Habermas, dunia kehidupan berfungsi sebagai reproduksi kultural, dari sisi kordinasi bertindak sebagai tempat integrasi sosial, dan sosialisasi sebagai media untuk menegaskan identitas.

Dengan demikian dari rangkaian aktivitas politik yang dilakukan massa pendukung Megawati yang merupakan aktivitas komunikasi politik dapat digambarkan dengan model sebagai berikut:

Gambar 32
Model Komunikasi Politik PDI Megawati Dalam Perlawanan Pada Rezim Orde Baru
Sumber : Modifikasi penulis

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, massa pedukung PDI Megawati mengembangkan solidaritas sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Adanya kriteria institusional dalam solidaritas sosial, yaitu kesadaran, interaksi, konsensus, tindakan individu dan tindakan kolektif. *Kedua*, melalui solidaritas ini menjadi modal sosial untuk melakukan komunikasi politik yang diwujudkan dalam bentuk aksi mimbar bebas, aksi jalanan dan aksi publisitas. *Ketiga*, tujuan dari komunikasi politik adalah untuk mendapatkan atau memperjuangkan legitimimasi.

6.3. Pertarungan Simbolik Dalam Konflik Internal PDI

Dalam konflik internal PDI, pada hakekatnya juga merupakan upaya rezim Orde Baru untuk melakukan dominasi. Bourdieu menjelaskan *symbolic power* bukanlah bentuk dominasi melalui komunikasi, tetapi dengan penetapan dominasi melalui komunikasi yang tidak diakui, tetapi kemudian diakui sebagai sesuatu yang legitimate.(dalam Thompson:2007:99). Kemudian ia juga menjelaskan *symbolic power* sebagai *the power to make groups*, kekuasaan untuk mempertahankan atau mengubah prinsip–prinsip objektif dari penyatuan atau pemisahan, asosiasi atau disosiasi, kekuasaan untuk mempertahankan atau mengubah berbagai klasifikasi, kekuasan mendeskripsikan individu, kelompok, atau institusi melalui kata–kata, serta kekuasaan untuk mendefinisikan situasi di mana interaksi berlangsung.

Dalam konflik internal PDI, konflik menjadi arena untuk melakukan dominasi yang dilakukan tanpa disadari. Melalui pemaknaan struktural, yang

menarik dari proses pemaknaan oposisi biner adalah upaya untuk mempertahankan sosok mitos kepahlawanan. Bagi Levi Straus, sebuah mitos merupakan transformasi lokal atas struktur dalam konsep oposisi biner yang penting bagi kebudayaan tempat beredarnya mitos tersebut. Mitos yang amat kuat dan signifikan berfungsi sebagai penurun kecemasan yang dengan cara ini mitos berhadapan dengan kontradiksi yang melekat pada setiap struktur oposisi biner, dan meski mitos tidak bisa memecahkan, mitos tetap memberikan cara hidup yang imajinatif bersamannya dan menyesuaikannya sehingga tidak menjadi terlalu disruptif dan tidak melahirkan banyak kecemasan kultural. (dalam Fiske:2004:170)

Sosok mitos kepahlawanan digambarkan sebagai sosok yang mampu menyelamatkan negeri dari kekacauan untuk menuju pada ketertiban dan kedamaian. Figur baik dalam mitos ini adalah PDI Pro Kongres yang dikonotasikan sebagai konstitusional, legal, tertib dan mempunyai legitimasi politik. Sedangkan, figur yang jahat dalam mitos ini kelompok PDI Megawati yang illegal, inkonstitusional, penuh muslihat, dan anarkhi. Figur baik akhirnya bernegosiasi dengan pahlawan, yaitu ABRI yang berhasil membuat ketertiban, kedamaian dan menyelamatkan negara dari tindakan anarkhi. Mitos ini menjelaskan tentang perilaku yang jahat dengan yang baik. Perilaku yang baik menemukan kawan yang seiring dengan kepahlawanan.

Terbentuknya mitos dalam oposisi biner pada konflik internal PDI dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar : 33
Mitos Dalam Konflik Internal PDI
Sumber : Modifikasi peneliti

Hal yang "baik" adalah PDI Pro Kongres. Mereka yang "baik" ditransformasikan ke dalam makna yang lebih konkret bahwa PDI Pro Kongres adalah konstitusional, legal dan berorietasi pada kedamaian. Misalnya, pada saat menjelang kongres, narasi mengenai legitimasi kongres. PDI Pro Kongres mengkonstruksi wacana bahwa kongres merupakan inisiatif dari arus bawah dan sesuai dengan AD/ART Partai. Hal ini ditunjukan dengan banyaknya dukungan dari berbagai DPC dan DPD PDI yang menginginkan kongres.

Berbeda dengan kelompok PDI Megawati yang ditransformasikan dalam makna yang beroposisi sebagai yang "tidak legitimate", "illegal" dan melakukan kegiatan "makar" selalu membuat "anarkhi". Makna ini kemudian ditransformasikan dalam bentuk oposisi sebagai figur yang jahat yang selalu

membuat situasi “anarkhi” atau kekacauan sebagai akibat dari konflik tersebut. Figur jahat ini diperkuat dengan politik *labeling* yang dilakukan rezim Orde Baru. Hal ini akibat dari aktivitas mimbar bebas maupun aksi jalanan terus bergulir yang dianggap sudah mengganggu ketertiban umum. *Labeling* adalah penerapan kata-kata ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan. (Nimmo:108:1999) Politik *labeling* merupakan “garis demakarsi” atau *“distinction”* dalam istilah Bourdieu merujuk pada usaha kelompok individu dalam ruang sosial masing-masing untuk mengembangkan kekhasan budaya yang menandai mereka keluar dari satu sama lain. Dengan stigmatisasi bahwa mimbar bebas sudah ditunggangi oleh gerakan kiri, dan mengarah ke makar merupakan upaya melakukan penggalangan opini dengan memanfaatkan trauma massa lalu tentang gerakan komunis yang pernah melakukan pembrontakan dan bertindak kejam serta melakukan anarkhi. Pernyataan ini sebenarnya hendak menegaskan mitos kepahlawanan yang diperankan ABRI sebagai penyelamat negeri dari kekecauan. Sedangkan, kelompok PDI Megawati menganggap penyelenggaraan kongres adalah bentuk rekayasa dari pemerintahan yang represif dan hegemonik.

Kemampuan dominasi dengan *symbolic power* sebagai upaya untuk “*structure as structured*” tergantung dengan *habitus* dan *capital power* yang dimiliki. Hubungan antara symbolic power, *habitus* dan *capital power* dapat dijelaskan dalam table dibawah ini:

Tabel 8
Hubungan Antara *Symbolic Power*, *Habitus* dan *Capital Power*

	Wacana Simbolik	Transformasi Metaforik	*Habitus*	*Capital Power*
Rezim Orde Baru	Pembina politik/penjaga stabilitas	Pahlawan	Stabilitas politik/*status quo*	Otoritas legal
PDI Pro Kongres	Konstitusional	Figur baik	*Dependen* pada Rezim Orde Baru	Otoritas legal
PDI Megawati	Inkonstitusional	Figur jahat	*Dissident* pada Rezim Orde Baru	Otoritas kharismatik

Sumber: Modifikasi Peneliti

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, *pertama* rezim Orde Baru dalam pemroduksian simbolik menegaskan sebagai pembina politik yang berorientasi pada terjaganya stabilitas politik. Ini karena *capital power* dalam bentuk otoritas legal yang dimiliki. Tetapi, ketika ada figure jahat yang akan mengancam stabilitas, rezim Orde Baru melakukan transformasi sebagai pahlawan untuk menyelamatkan dari tindak kejahatan. *Symbolic power* yang dilakukan rezim Orde Baru dalam perspektif Bourdieu adalah dari wacana performatif, Bourdieu menjelaskan efektifitas ucapan performatif tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu institusi yang mendefinisikan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, Institusi yang memberikan otoritas kepada penggunan bahasa untuk melahirkan suatu tindakan yang menampilkan ucapan. (Thompson:2007:84). Maksud dari Bourdieu sebenarnya menunjuk pada kompetensi komunikasi yang dimiliki aktor. Kompetensi ini menyangkut dengan *capital power* yang dimiliki.

Kedua, setelah wacana performatif adalah keberhasilan simbolis. Yang dimaksud dengan hal ini adalah nilai-nilai sosial yang mulai ditanamkan mulai

dipahami dan melembaga dalam bentuk habitus yang telah disepakati bersama. Keadaan demikian menjadikan s*ymbolic power* telah bekerja atau telah menjadi *doxa*. Tetapi, bisa juga nilai yang telah dikonstruksi sedemikian rupa tidak bisa dipahami dan diinternalisasi oleh aktor lain, dan bahkan aktor lain menaikan posisinya dengan mengkonstruksi wacana lain yang bisa bertentangan dengan sebelumnya, mengambil strategi subversi atau *heterodoxy* dengan membawa wacana baru yang bisa diperdebatkan, oleh karena itu *heterodoxy* bersifat kritis. *Heterodoxy* akan mengancam wacana dominan dan memaksa aktor yang dominan untuk bersikap defensif berusaha mempertahankan wacana tersebut atau *orthodoxy*. Keadaan demikian terjadi apa yang dimaksud dengan pertarungan simbolik.

Kepengurusan Megawati yang merupakan hasil Munas PDI 1993 sebenarnya berada dalam sub ordinat dari rezim Orde Baru sehingga berada dalam posisi *orthodoxy*. Yaitu, strategi konservatif untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi, dalam prosesnya Megawati berubah posisi yang semula berada dalam wilayah *orthodoxy* menjadi *heterodoxy*. Hal ini berkaitan dengan sikap Megawati yang menolak kongres.

Kenyataanya dominasi yang dilakukan rezim Orde Baru tidak diinternalisasi dengan baik, justeru yang terjadi adanya perlawanan dari kelompok PDI Megawati dan kelompok masyarakat lain. Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal tersebut, *pertama*, timbulnya krisis kepercayaan atau

krisis legitimasi dari masyarakat terhadap rezim Orde Baru, karena praktek-pratek politik dijalankan sebelumnya. *Kedua,* akibat dari krisis legitimasi, kelompok PDI Megawati dan kelompok masyarakat lain menemukan figure untuk melakukan perubahan. Otoritas kharismatik yang dimiliki Megawati menghambat wacana performatif yang hendak dipaksakan rezim Orde Baru. Keadaan ini yang memaksa rezim Orde Baru untuk menggunakan cara kekerasan terhadap potensi yang mengancam stabilitas politik maupun *status quo.* Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan membubarkan kegiatan mimbar bebas dengan dalih pengambilalihan kantor DPP PDI yang masih dikuasai PDI Megawati. Kasus penyerangan kantor, yang kemudian terus berlanjut dengan aksi kerusuhan dan pembakaran yang berlangsung disekitar Jakarta berdampak pada tensi politik menjadi tenang seperti yang diharapkan rezim. Aksi-aksi demonstrasi yang selalu mewarnai jalanan di Jakarta tidak tampak lagi yang kemudian juga diikuti dengan penangkapan-penangkapan yang diduga menjadi dalang kerusuhan tersebut, dan menyebut PRD dan organisasi sayapnya yang mirip Partai Komunis Indonesia sebagai dalang dibalik kerusuhan tersebut. Dalam "kekerasan politik" tersebut, dalam batas-batas tertentu, rezim Orba berhasil mengambil tindakan dan mengendalikan terhadap potensi gangguan yang mengancam eksistensi rezim. Dengan kata lain, integrasi politik telah berhasil dilakukan. Tindakan tersebut menjadi anomali bagi rezim Orde Baru dalam menyelesaikan konflik internal partai politik.

Gambar 34
Model Pertarungan Simbolik Dalam Konflik Internal PDI
Sumber : Modifikasi Penulis

Berdasarkan gambar model pertarungan simbolik pada konflik internal PDI dapat dijelaskan, *pertama,* orientasi politik Orde Baru adalah stabilisasi politik untuk tetap mempertahankan *status quo.* Oleh karena itu, dalam konflik internal PDI, rezim Orde Baru berusaha untuk melakukan dominasi dengan kuasa simbolik yang di miliki. Dengan *capital power* yang berupa otoritas legal berusaha untuk men*deligitimasi* kepemimpinan PDI di bawah Megawati. *Kedua,* otoritas kharismatik yang dimiliki menjadi *capital power* untuk

melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Situasi ini menempatkan posisi yang non koopertif terhadap pemerintah Orde Baru. *Ketiga*, PDI Pro Kongres merupakan bentukan dari rezim Orde Baru, maka baik habitus dan *capital power* mengikuti selera daripada rezim Orde Baru. *Keempat*, kuasa simbolik, dengan cara persuasi dan labeling kenyataan mengalami kegagaalan, dukungan pada Megawati makin membesar. Oleh karena itu jalan untuk menghentikan dukungan pada Megawati dengan jalam kekerasan, yaitu melakukan penyerangan pada kantor DPP PDI yang dianggap sebagai sentral dari gerakan menantang rezim.

6.4.1. Model Komunikasi Politik Dalam Konflik Internal PDI

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan, mulai dari historitas konflik internal PDI, integrasi politik rezim Orde Baru, komunikasi politik perlawanan massa PDI Megawati dan pertarungan simbolik dalam konflik internal PDI, maka dapat digambarkan dalam model komunikasi poltik sebagai berikut :

Gambar 35
Model Komunikasi Politik dalam Konflik Internal PDI
Sumber : Modifikasi Penulis

Model komunikasi politik dalam konflik internal PDI menjelaskan, *pertama*, penyebab konflik internal PDI karena masalah legitimasi politik. Sebelumnya, Megawati merupakan Ketua Umum PDI hasil Munas PDI tahun 1993. Keberlangsungan kepemimpinan Megawati dipersepsi rezim Orde Baru bisa mengancam kebijakan *political order* yang dijalankan. Oleh karena itu agar terjadi integrasi politik seperti yang diinginkan, maka dimunculkan PDI Pro Kongres yang mengancam legitimasi politik Megawati, dan kongres pun

berlangsung di Medan yang menghasilkan kepengurusan baru PDI yang merupakan sub ordinat dari rezim Orde Baru.

Kedua, konflik internal PDI berkembang dan dipahami massa PDI pendukung Megawati sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Melalui nilai-nilai solidaritas sosial menjadi tatanan bagi massa PDI pendukung Megawati untuk mereproduksi berbagai aktivitas komunikasi poltik, yaitu dengan melakukan aksi mimbar bebas, aksi jalanan maupun aksi publisitas.

Ketiga, berbeda dengan rezim Orde Baru, konflik internal merupakan sarana integrasi politik yang diwujudkan dalam bentuk tampilan realitas luar/panggung depan maupun realitas dalam/panggung belakang. Dalam tampilan realitas luar/panggung depan, rezim Orde Baru melakukan dengan mengkonstruksi wacana simbolik dengan cara yang membujuk atau persuasif. Tetapi, ketika aktivitas perlawanan yang dilakukan massa PDI pendukung Megawati makin meningkat, maka wacana simbolik yang dilakukan dengan strategi *labeling*. Sedang, realitas dalam/panggung belakang dilakukan dengan perencanaan kongres maupun pengambilalihan kantor dengan cara kekerasan.

6.4. Refleksi dan Relevansi

Dalam konflik internal PDI pada era rezim Orde Baru, persoalan yang mengemuka dan menonjol adalah masalah legitimasi. Di tinjau dari mekanisme bagaimana legitimasi itu bisa terbentuk ada dua hal yang bisa dilakukan. *Pertama*, dilakukan dengan kesepakatan bersama atau konsensus terhadap keputusan yang diambil. *Kedua*, melalui cara paksaan agar semua pihak mengikuti keputusan

tersebut. Mekanisme ini tentu membutuhkan kekuatan dan daya manipulasi yang cukup agar bisa dipatuhi semua pihak.

Pada mekanisme yang *pertama*, legitimasi politik menjadi rasional karena berdasarkan pada hubungan antar subyek-subyek yang merdeka. Tetapi akan menjadi masalah apabila legitimisi dilakukan dengan cara paksaan atau cara manipulatif. Konflik pun menjadi suatu yang tidak terelakan karena perbedaan kepentingan.

Dalam sistem politik rezim Orde Baru, partai politik merupakan ordinat dari sistem kekuasaan tersebut sehingga orientasi tergantung dari *political order* rezim. Konflik yang berlangsung dalam internal partai tidak lebih dari upaya dari rezim kekuasaan untuk stabilisasi politik dan menjaga posisi *status quo*. Keadaan ini tentu akan memperkuat legitimasi kekuasannya. Berbanding terbalik dengan partai politik, konflik internal menjadi ajang perebutan legitimasi pada penguasa.

Konflik internal PDI pada tahun 1996, merupakan kasus yang sedikit berbeda dengan konflik internal partai lain. Biasanya pemimpin partai yang tersingkir akan tengelam dengan sendirinya. Tetapi dalam konflik internal ini justeru melakukan perlawanan. Otoritas kharismatik yang dimiliki Megawati mampu mengintergasikan perlawanan, sehingga konflik bukan sekedar antara PDI Megawati dengan PDI Pro Kongres melainkan juga menjadi perlawanan PDI Megawati terhadap rezim Orde Baru.

Tujuan awal penelitian ini adalah mengungkap komunikasi politik dalam konflik internal PDI yang berlangsung tahun 1996. Hasil penelitian menjelaskan bahwa komunikasi yang berlangsung dalam sistem kekuasaan rezim Orde Baru

adalah komunikasi instrumental. Yaitu, tindakan sosial yang sudah ditentukan dan seringkali tersembunyi.(Ritzer & Smart:2015:400) Dalam prateknya, komunikasi yang dilakukan upaya untuk meminggirkan kelompok PDI Megawati dengan strategi *labeling.* Begitu juga, dengan PDI Megawati, dalam asumsi awal bahwa PDI Megawati disebut sebagai "dunia kehidupan" dan melekat tindakan komunikasi di dalamnya. Kenyataanya, komunikasi politik yang dilakukan cenderung mengkedepankan pada komunikasi instrumental. Padahal solidaritas sosial yang dikembangkan massa PDI pendukung Megawati seharusnya menjadi modal sosial dalam mengembangkan tindakan komunikasi. Tetapi karena orientasi kepentingan politik, komunikasi yang seharusnya sebagai sarana untuk mencapai pemahaman dan pengertian bersama, justeru menjadi alat dan sarana yang efektif untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu, di masa sekarang dengan sistem politik yang lebih demokratis selayaknya menekankan pada rasionalisasi komunikasi dengan tindakan komunikasi yang berorientasi pada pemahaman dan menghindari pengaruh akal budi instrumental. Dalam tindakan komunikasi, subyek-subyek yang terlibat dan berintraksi adalah subyek yang bebas dari dominasi dan manipulasi. Dengan demikian, mampu mendorong terjadinya emansipasi dan transformasi, karena keputusan yang dihasilkan legitimate bagi semua pihak.

6.5. Implikasi Teoritis

Dalam perspektif teoritis, penelitian ini berusaha untuk memperluas kajian dari teori tindakan komunikasi Habermas. Dalam perspektif kritis, rezim Orde Baru merupakan representasi dari sistem telah mengkolonisasi kehidupan

dunia*(lifeworld)* sedemikian rupa, yaitu PDI pendukung Megawati. Dalam *lifeworld*-dunia kehidupan representasi masyarakat yang diwujudkan sebagai jaringan kerjasama yang diperantarai oleh komunikasi, dengan hubungan strategis dan keruntuhan yang terselip didalamnya. (Habermas:2002:p.207) Narasi besar yang hendak dikedepankan oleh PDI pedukung Megawati adalah legitimasi politik dalam bentuk otoritas legal, di satu sisi. Di sisi lain, adalah tatanan masyarakat yang demokratis terbebas dari dominasi. PDI pendukung Megawati adalah pengusung narasi besar untuk melakukan tindakan komunikasi. Tetapi dorongan untuk melakukan narasi tersebut terhambat dengan "kekerasan politik" yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.

Pada saat pembentukan teori tersebut, Habermas berpijak pada realitas tahap awal perkembangan masyarakat kapitalis (borjuasi) yang masih mengakomodir adanya kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Di samping itu, subyek atau pelaku dalam masyarakat yang digambarkan Habermas adalah masyarakat yang otonom, sehingga dunia kehidupan (*lebenswelt*) masih mempunyai ruang untuk melakukan reproduksi kultural melalui ruang publik yang tersedia bebas tanpa ada tekanan politik.

Kondisi Indonesia berbeda dengan kondisi masyarakat Eropa yang menjadi pijakan Habermas dalam mengkonstrusikan teorinya. Dalam kasus ini, pemerintahan Orde Baru direpresentasikan sebagai pemerintahan yang hegemoni yang mampu mengarahkan struktur dengan berbagai perangkat wewenang dan berbagai bentuk kebijakan pada orang lain di luar wewenang

struktur tersebut. Kondisi ini merupakan bentuk dominasi. Dalam habitus rezim Orde Baru, dominasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk panggung depan dan panggung belakang. Habermas (2008) dengan berpijak pada Goffman menyebut sebagai tindakan dramaturgis. Dalam panggung depan, bentuk komunikasi yang berlangsung dalam dominasi adalah tindakan instrumental atau komunikasi strategis. Tindakan ini berorientasi pada keberhasilan pada tujuan yang hendak dicapai, tidak peduli apakah para partisipan-warga *(lebenswelt*) yang berada dalam hukum atau suprastruktur hukum menerimanya atau tidak. Yang terpenting dalam tindakan komunikasi seperti ini adalah secara efisien bisa mencapai tujuan. Aktor-aktor yang berada dilingkungan rezim Orde Baru lebih berorientasi pada sejaumana melihat realitas sebagai seperangkat berlakunya norma-norma yang harus dipatuhi, kendati tidak legitimate bagi semua pihak. Praktek semacam ini disebut sebagai integrasi sistem melalui ideologi. Inilah yang disebut Bourdieu sebagai kuasa simbolik (*symbolic power*) untuk menstruktur dunia sosial yang berujung pada kekerasan simbolik *(symbolic violience)* yang secara sadar atau tidak mengikuti dunia sosial yang telah distruktur oleh rezim Orba.

Dalam batasan tertentu, bentuk komunikasi strategis ini bisa berjalan efektif. Tetapi, juga bisa menimbulkan resistensi apabila dilakukan di luar batas rasionalitas. Menurut Habermas (16:2004), alternatif yang tersedia adalah penerapan secara koersif (paksaan) yang tujuannya tidak lain untuk tetap menyembunyikan konflik. Yang dimaksud dengan praktek koersif adalah

adanya “justifikasi ideologis” yang terus menerus dilakukan. Sistem tindakan yang terintegrasi secara padu itu tentu saja membutuhkan justifikasi ideologis untuk menyembunyikan distribusi asimetris berbagai kesempatan untuk memenuhi kebutuhan secara legitimate. (Habermas:2004:17)

Dalam kasus konflik internal PDI, “justifikasi ideologis” yang dilakukan rezim Orba ternyata tidak berjalan efektif. Aksi-aksi protes terus dilakukan PDI pendukung Megawati, dan aksi tersebut makin hari terus membesar dengan datangnya dukungan di luar massa PDI yang juga menuntut adanya perubahan politik. Dalam hal ini, yang tidak pernah disinggung oleh Habermas adalah adanya “kekerasan nyata” atau “kekerasan politik” dalam menyelesaikan konflik dengan oposisi yang tidak sejalan dengan kebijakan rezim Orba.

Begitu juga dalam tindakan komunikasi, Habermas dalam menjelaskan kriteria institusionalnya sebagai rasionalitas untuk menghindari pengaruh akal budi instrumental dan menyediakan definisi komunikasi nonpatologis yang digunakan untuk mendiagnosis krisis sosial manakah yang bisa dinyatakan patologis (Ritzer & Smart:401:2015) Atau yang disebut sebagai “situasi percakapaan ideal” yang bebas dari dominasi. Dalam konteks ini, Habermas menekankan pada komunikasi normal. Oleh karena itu, Habermas meletakan komunikasi normal itu pada institusi yang bernama *“lifeworld”*, dilihat dari sudut pandang subyek merupakan tempat para aktor untuk mendapatkan konsensus dan menjadi sarana untuk mengintegrasikan konflik dari tindakan para aktor (subyek) serta menjadi sarana untuk reproduksi sosial.

Tetapi dalam hal ini, *"lifeworld"* dalam pandangan Habermaas sendiri adanya keterbatasan-keterbatasan, yaitu *"lifeworld"* yang merupakan bagian dari masyarakat tidak dapat ditematisasikan sebagai suatu obyek studi sosiologi, walaupun unsur-unsurnya dapat. (Ritzer & Smart:410:2015) Begitu juga, *"lifeworld"* mencirikan sebagai suatu yang "gelap" yang berada di "punggung", bersifat prapredikatif, prakategorial, transendental, prareflektif atau singkatnya "gelap". (dalam Hardiman:207:2013)

Kebuntuan Habermas dalam merumuskan kerangka institusional *"lifeworld"* bisa dipahami. *Pertama*, Habermas dalam merumuskan konsep *"lifeworld"* berpijak pada konteks masyarakat *gesselscaft*, yaitu kelompok sosial yang anggota-anggotanya berhubungan atas dasar kepentingan. Masyarakat Eropa yang menjadi tilikan Habermas adalah masyarakat kapitalis yang lebih mengedepankan pada kepentingan individual. Sedangkan, *lifeworld* sebenarnya lebih mengarah pada konteks masyarakat *gemeinschaft*, kelompok sosial yang berhubungan secara erat dan lebih mengutamakan pada hubungan kolektivitas. *Kedua*, dimensi rasionalitas yang ditekankan dalam interaksi bisa saja terjebak dalam dominasi, karena logika yang berlangsung dalam rasionalitas masih memperhitungkan kalkulasi untung-rugi, sehingga "situasi komunikasi ideal" yang diharapkan masih ada motif-motif kepentingan yang tersembunyi untuk mendominasi. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab, mengapa Habermas kesulitan dalam merumuskan *"lifeworld*" secara utuh.

Berkaitan dengan penelitian ini, solidaritas sosial yang diinternalisasi sebagai sistem nilai dan *praxis* massa PDI pendukung Megawati mengisi celah kosong yang ditinggalkan Habermas dalam konsepsinya tentang *"lifeworld".* Dalam konteks sosiologis, solidaritas sosial berdiri dalam *gemeinschaft* yang kokoh karena karakter dasar masyarakat Indonesia yang kolektif, sehingga fungsi integrasi sosial sudah ada di dalamnya. Pada sisi komunikasi normal, solidaritas sosial menyediakan musyawarah *(deliberative*) sebagai sarana untuk menentukan tindakan. Kemudian hal yang penting dari kesemuanya itu bahwa solidaritas sosial harus hidup dalam suasana *magic religious*, yaitu kepercayaan dan keyakinan akan adanya kekuatan dan kekuasaan yang gaib yang tidak terlihat dan tidak teraba oleh manusia biasa, sebagai asal mula dan yang melindungi, memelihara, mengakhiri segala sesuatu yang nampak dan yang hidup di dunia ini. (Tumakaka:1996:211).

Signifilkasi teoritis, Bourdieu menjelaskan, "*symbolic power is the power to make things with words.* (1975:23) Pernyataan itu memberikan pengertian bahwa dominasi yang dilakukan aktor rezim Orde Baru melalui ucapan atau kata-kata. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep *symbolic power* Bourdieu dalam konteks konflik internal PDI mengalami perluasan. Wacanan dominan yang hendak diinternalisasikan aktor Orde Baru kenyataanya mendapatkan resistensi dari massa PDI pendukung Megawati. Instrumen bahasa sebagai daya untuk menstruktur realitas tidak sanggup menetapkan *doxa/*konsensus seperti yang dikehendaki rezim Orde Baru. Alternatif lain, dan sudah menjadi habitus

dari rezim Orde Baru, yaitu dengan melakukan kekerasan nyata, atau kekerasan politik. Yaitu dengan pengerahan kekuatan yang dilakukan alat negara.

Dalam konsep *symbolic power* atau *symbolic violience*, Bourdieu hanya menjelaskan bahwa bahasa dalam bentuk kata-kata yang mempunyai daya untuk menstruktur/konstruksi realitas sosial. Hal tersebut bisa dipahami, ketika merumuskan konsep tersebut Bourdieu berpijak pada konteks sosial masyarakat yang relatif terbuka dan menyediakan kompetisi para aktor secara bebas. Keadaan ini tentu berbeda ketika rezim Orde Baru berkuasa, realitas sosial masyarakat yang terbentuk adalah realitas yang hegemonik dan represif, sehingga *doxa*/konsensus yang hendak dicapai bukanlah hasil dari pertarungan yang terbuka, melainkan tetap berada dalam pengendalian rezim. Hal ini karena modalitas yang dimiliki sebagai rezim yang berkuasa.

BAB VII
SIMPULAN DAN SARAN

7.1. Simpulan

Berdasarkan data dan fenomena yang telah disajikan dan dianalisi tentang komunikasi politik dalam konflik internal Partai Demokrasi Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sejarah konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah rezim Orde Baru yang begitu dominan. Ini karena PDI merupakan sub ordinasi dari sistem kekuasaan rezim Orde Baru. Oleh karenanya, dalam tindakan politiknya harus menyesuaikan dan ikut memelihara kestabilan sistem. Bentuk penyimpangan yang dianggap berpotensi untuk mengganggu keteraturan sistem secara cepat untuk diintegrasikan. Konflik internal PDI biasanya terbagi dalam berbagai faksi, yang disebut istilah dengan faksi "garis keras" atau "non koperatif" dengan faksi "kompromis" atau "kooperatif. Dalam konflik internal, faksi yang kooperatif terhadap rezim Orde Baru selalu tampil sebagai pemenang. Hal ini tidak lain, kebijakan *political ordering* yang dijalankan rezim Orde Baru dalam menjaga kepentingan *status quo*. Konflik kepentingan untuk memperebutkan otoritas kekuasaan menjadi motif utama aktor-aktor PDI. Sementara itu, basis legitimasi kekuasaan berada ditangan rezim Orde Baru.

Dengan demikian, ketika konflik internal berlangsung, bukan menjadi tempat aktor meraih dukungan dari bawah, melainkan arena untuk mendapatkan posisi kekuasaan dari rezim Orde Baru.

2. Dalam kasus konflik internal PDI, bentuk integrasi diwujudkan dalam bentuk, seperti politik kekerasan, politik pecah-belah-divide et impera dan kekerasan politik yang merupakan representasi dari pola umum yang dilakukan rezim Orde Baru. Khusus yang terakhir tentang kekerasan politik menjadi yang pertama dalam sejarah kekuasaan politik rezim Orde Baru terlibat langsung dalam konflik internal partai politik yang melibatkan agen-agen negara. Dalam prakteknya integrasi politik sebenarnya merupakan upaya untuk mendominasi yang selalu menggunakan gaya komunikasi yang dapat dikategorikan dalam konteks tinggi. Begitu juga, integrasi politik merupakan bentuk komunikasi instrumental. Yang terpenting dalam komunikasi instrumental adalah bagaimana mencapai tujuan secara efektif, komunikasi sekedar sarana dalam mencapai tujuan tersebut. Rezim Orde Baru dalam tindakan instrumental pada konflik internal PDI, *pertama* dengan komunikasi persuasif. Yaitu, komunikasi yang bertujuan atau berkepentingan. *Kedua*, cara *labeling*, Yakni dengan menyebut massa PDI pendukung Megawati dengan aktivitas mengarah pada tindakan makar, dan menyebut telah ditunggangi gerakan komunis. Melalui strategi persuasi dan labeling merupakan komunikasi strategis atau

instrumental yang menyertakan tindakan sosial sudah ditentukan lebih dahulu, dan pihak lain diperlakukan sebagai obyek.

3. Konflik internal PDI bukan sekedar konflik antara massa PDI pendukung Megawati dengan PDI Pro Kongres, melainkan juga konflik menjadi arena perlawanan massa PDI pendukung Megawati dengan rezim Orde Baru. Ini karena dalam persepsi massa PDI Megawati bahwa PDI Pro Kongres sekedar alat bentukan rezim Orba dalam upaya meminggirkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Oleh karena itu dalam melakukan perlawanan yang dimanifestasikan dalam tindakan komunikasi dengan berbagai bentuk massa aksi, seperti aktivitas mimbar bebas yang digelar dikantor DPP PDI, aksi jalanan atau demonstrasi, maupun melakukan aksi-aksi publisitas dengan menyebarkan berbagai bentuk selebaran. Hal yang menarik dalam perlawanan adalah massa PDI pendukung Megawati menginternalisasi nilai-nilai solidaritas sosial yang menjadi sarana normatif atau habitus untuk melakukan reproduksi sosial. yaitu kesadaran, interaksi/komunikasi, konsensus, tindakan sosial dan tindakan kolektif. Dari sisi kordinasi tindakan, solidaritas sosial menciptakan integrasi sosial. Sedang dari aspek sosialisasi, solidaritas menegaskan identitas dengan berbagai bentuk komunikasi politik, seperti aksi mimbar bebas, aksi jalanan dan aksi publisitas. Dalam komunikasi politik massa PDI pendukung Megawati di manifestasikan dalam budaya komunikasi konteks rendah yang secara ekplisit dinyatakan langsung. Hal ini bisa

dipahami, komunikasi politik yang direpresentasikan dalam bentuk resistensi memang harus disampaikan dalam gaya lugas, langsung bisa dipahami. Bentuk komunikasi konteks rendah menjadi budaya tandingan terhadap bentuk komunikasi konteks tinggi yang dipraktekan Orde Baru.

4. Konflik internal PDI juga merupakan pertarungan simbolik, kontestasi kontradiktif antara PDI Megawati, di satu sisi, dengan pihak PDI Pro Kongres dan rezim Orde Baru di sisi lain. Melalui habitus dan modal yang dimiliki masing-masing aktor mengkonstruksi realitas sesuai dengan kepentingannya. Rezim Orde Baru dan PDI Pro Kongres dengan segala *capital power* yang dimiliki mampu mengendalikan dan mendominasi wacana-wacana yang berkembang selama konflik. Dalam kontestasi simbolik, figur baik drepresentasikan oleh PDI Pro Kongres yang dikonotasikan sebagai konstitusional, legal, tertib dan mempunyai legitimasi politik. Sedangkan, figur yang jahat ditujukan pada kelompok PDI Megawati yang illegal, inkonstitusional, penuh muslihat, dan anarkhi. Figur baik akhirnya bernegosiasi dengan pahlawan, yaitu ABRI yang berhasil membuat ketertiban, kedamaian dan menyelamatkan negara dari tindakan anarkhi. Dalam kontestasi dalam pertarungan simbolik menjelaskan tentang perilaku yang jahat dengan yang baik. Perilaku yang baik menemukan kawan yang seiring dengan kepahlawanan, yaitu pemerintah Orde Baru. Kenyataanya dominasi yang dilakukan rezim Orde Baru tidak diinternalisasi dengan baik,

justeru yang terjadi adanya perlawanan dari kelompok PDI Megawati dan kelompok masyarakat lain. Keadaan ini yang memaksa rezim Orde Baru untuk menggunakan cara kekerasan terhadap potensi yang mengancam stabilitas politik maupun *status quo.* Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan membubarkan kegiatan mimbar bebas dengan dalih pengambilalihan kantor DPP PDI yang masih dikuasai PDI Megawati.

7.2. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas, peneliti mengajukan pokok-pokok saran yang dibagi menjadi saran teoritik /akademik dan saran praktis.

7.2.1. Saran Teoritik

Ranah penelitian ini berada dalam konteks komunikasi politik, sedangkan *setting* penelitian pada konflik internal partai politik masa pemerintahan rezim Orde Baru. Melalui pendekatan kritis dan dengan strategi pendekatan sejarah. Penelitian berhasil mengungkap bahwa konflik internal yang berlangsung di Partai Demokrasi Indonesa pada era rezim Orde Baru bukan sekedar konflik internal partai politik, antara PDI Megawati dengan PDI Pro Kongres, melainkan upaya manajemen konflik yang dilakukan rezim Orde Baru untuk melakukan integrasi politik agar tetap berada dalam dominasi dan menjaga kepentingan *status quo*. Tetapi, bagi kelompok PDI Megawati konflik sebagai sarana mempertahankan legitimasi dan juga perlawanan terhadap rezim.

Dalam konteks metodologis, penelitian ini juga belum banyak dilakukan. Biasanya penelitian yang berbasiskan pada sejarah lebih menekankan pada aspek diakronik, yaitu suatu deskripsi tentang kronologi dari suatu peristiwa sejarah. Penelitian ini melihat sejarah sebagai realitas sosial yang dianalisis dengan teori-teori yang relevan dengan fokus kajian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada teori dalam paradigma kritis.

Dengan keterbatasan kemampuan dan jangkauan peneliti terhadap obyek penelitian dalam komunikasi politik, tentu saja akan lebih menarik apabila ada peneliti lain yang mengkaji konflik internal partai dalam sistem politik yang terbuka dan demokratis, dengan pendekatan penelitian lain, misalnya pendekatan etnografi untuk mengkaji kelompok-kelompok faksional dalam Partai Demokrasi Indonesia.

7.2.2. Saran Praktis

Pertama, massa PDI pendukung Megawati setelah reformasi bertransformasi menjadi sebuah partai baru, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai yang dikenal dengan partai wong cilik ini, untuk lebih menginternalisasi nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan internal partai. Sebab, nilai ini yang sebenarnya, sudah teruji ketika berhadapan dengan rezim Orde Baru. Sekarang, apabila nilai-nilai gotong royong itu mampu diinternalisasikan secara menyeluruh dalam kader PDIP, dan bukan sekedar

slogan akan merupakan *counter ideology* terhadap politik transaksional yang sekarang begitu marak.

Kedua, pendekatan komunikasi sosial terhadap penyelesaian konflik partai akan lebih beradab dari pada dengan cara kekerasan. Kasus “27 Juli” bisa dijadikan refleksi bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian konflik ternyata tidak memberikan dampak yang saling menguntungkan pada kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Buku

Anderson, R.O.G. Benedict, 1982, *The Idea of Power in Javanese Culture*, dalam Claire Holt, dkk(ed) *Culture and Politics In Indonesia*, Ithaca, Cornel University Press,

Arendt, Hannah, 1958, *The Human Condition*, The University of Chicago Press.

----------, 1965, *On Revolution*, New York, Viking Press.

Bahar, Ahmad 1996, *Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993–1996*, Yogyakarta: Pena Cendekia.

Berger,Peter L & Thomas Luchmman, 1967, *The Social Construction Of Reality*, NY: A Double Day Anchor Book,

Bourdie, Pierre and Loic J. D. Wacquant, 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology.* Chicago: The University of Chichago Press.

Bourdieu, Pierre, 1989. "*Social Space and Symbolic Power". Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1 (Spring), 14-25.

Bourdieu, Pierre, 1977. *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University Press.

Budiman, Arief, (1982), *Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan*, dalam Prisma, No 7 Tahun 1982

----------, (1991), *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Kora Selatan*, Jakarta, Penerbit Yayasan Padi dan Kapas

Budiarjo, Miriam, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Budiarjo, Miriam, (peny),1998, *Partisipasi Dan Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Bulkin, Farchan (peng.), 1985, *Analisa Kekuatan Politik Indonesia*, Jakarta, LP3ES.

Creswell, 2010, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terjemahan Ahmad Fawaid, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.

Culler, Jonathan, 1976, *Structuralist Peotics: Structuralism, Linguisticand the Study of Literacture*, New York: Cornel University Perss, The Binnary Opposition as a Fundamental Operation of The Human Mind Basic to The

Denzim, Norman K & Lincoln, Yvonna S, (2009) *Handbook of Qualitative Research*, Dariyanto dkk (terj.), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Deutsch, Morton, Peter T. Coleman, Eric C. Marcus, 2016, *Handbook Resolusi Konflik*, Bandung, Penerbit PT. Nusa Media.

Dominic, Joseph R, 2009, *The Dynamic of Mass Communication*, 10thedition. New York: McGraw Hill.

Edkins, Jenny & Vaughan Williams, Nick (2009), *Teori-Teori Kritis*, Yogyakarta, Penerbit Baca.

Fachmi, Fahim & Amirudin, 1977, *Mengadili Arus Bawah*, Jakarta, Penerbit Lembaga Studi dan Advoksi Masyarakat (ELSAM).

Fiske, John, 1990, *Cultural And Comunication*, Yogyakarta, Penerbit Jalasutera.

Galtung, John, 2003, *Studi Perdamian Dan Konflik Pemangunan Dan peradaban*, Surabaya, Eureka.

Giddens, Anthony, 2014, *The Constitution of Society*, Yogyakarta, Penerbit Pedati.

Goffman, Erving, 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York:Doubleday.

Griffin, Em, 2011, *A First Look At Communication Theory*, Edisi ke -8, New York: Mc Graw Hill.

Grundy, W. Kenneth & Michael A. Weinstein, 1974, *The ideological of Violence*, Columbus, Ohio: A Bell & Howell Compony.

Habermas, Jurgen, 2012 *Ruang Publik : Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Yogyakarta, Penerbit Kreasi Wacana.

----------, 2006, *Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat, Buku ke satu* , Yogyakarta, Kreasi Wacana.

----------, 2006, *Rasio Dan Rasionalisasi Masyaraka, Buku ke kedua* , Yogyakarta, Kreasi Wacana.

----------,1980, *Toward A Rational Society: Student Protest Science and Politics,* Heinemann Educational Books Ltd 22 Bedword Square, London WC 1B 3HH

----------, 2004, *Krisis Legitimasi*, Yogyakarta, Penerbit Qalam.

----------, 1998, *On The Pragmatics of Commuication*, Massachusetts, The MIT Pres, Cambridge.

Haji Said, Salim, (2016), *Menyaksikan 30 Tahun: Pemerintahan Otoriter Soeharto,* Jakarta, Penerbit Mizan.

Hill, David T, 2011, *Pers Dimasa Orde Baru, Jakarta* , Yayasan Obor Indonesia.

Halawa, Ohiao, 1993, *Membangun Citra Partai: Profil Drs Soeryadi* , Jakarta, Penerbiat Nias.

Hasibuan, Hadely (ed.) (1996) *Megawati Soekarnoputri: Hentikan Menangis* Jakarta: Liga Pro Adi/Alfinesco and Jasa Karya.

Hardiman, F. Budi, 2003, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, &Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas,* Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

----------, 2003, *Melampaui Modernitas dan Positivisme,* Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

----------, 2013, *Demokrasi Deliberatif,* Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

----------*, 2000, Kritik Ideologi,* Yogyakarta, Penerbit Kanisius

----------, 2003, *Heidegger dan Mistik Keseharian,,* Jakarta, Penerbit Kepustkaan Populer Gramedia.

Haryatmoko, 2016, *Critical Discourse Analysis:Landasan Teori Metodologi dan Penerapannya,* Jakarta, Penerbit, PT. Rajagrafindo Persada

Hoed, Benny H. 2008, *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya,* Jakarta, Penerbit Komunitas Bambu.

Imawan, Riswandha,1997, *Membedah Politik Orde Baru, Catatan Dari Kaki Merapi,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jatman, D. (ed.) (2001). *Membongkar misteri sabtu kelabu 27 Juli 1996.* Semarang: Tim Lubuk Raya

Jenkins, David,2015, *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba*, Depok, Komunitas Bambu.

Jorgensen, Marianne W & Louise J. Philips, 2007, *Analisis Wacana: Teori & Praktek,* Yogyakarta, Penerbit Pelajar.

Kaisiepo, Manuel (1982) '*The Dilemma of the Partai Demokrasi Indonesia: A Struggle for Identity'*, Prisma. The Indonesian Indicator, no. 25,

.Kartodirdjo, Sartono, (2015), *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta, Penerbit Komunitas Bambu

Kauppi, Niilo, 2003. "*Bourdieu's Political Sociology and the Politics of European Integration".* Theory and Society, Vol. 32, No. 5/6, 775–789

Kuswarno, Engkus, 2013, *Fenomenologi, Metode Penelitian Komunikasi*, Widya Padjajaran, Bandung

Leopold Von Wiese dan Howard Becker(1932) *Systematic Sociology,*. New York:John R. Wiley and Sons.

Lukacs, Georg, (1967), *Theory, Culture, and Politic*, Transaction Inc, New Jersey

Luwarso, Lukas (ed.), 1997, *Peristiwa 27 Juli*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen and Institut Studi Arus Informasi (ISAI)

Littlejohn, Stephen W. 1999. *Theories of Comunication Studies*, California: Wadworth Publishing Company,

----------, 2009, *Theories of Comunication Studies ed:9,* Jakarta, Penerbit Salemba Humanika,

Littlejohn, Stephen W, Karen A. Foss, 2009, *Encyclopedia of Communication Theory,* Thousand Oaks, California, Sage Publication, Inc.

Mahfud MD, Moch, 2014, *Politik Hukum di Indonesia,* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

Maryani, Eni, (2011) *Media Dan Perubahan Sosial*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya

Martin, Judith N. dan Thomas K. Nakayama. (2008). *Experiencing Intercultural Communication (3rded*.). New York:McGraw-Hill.

Mc Nair, Brian, (2004) *An Inntroduction To Political al Communication,* New York, Routledge

Mc Vey, Ruth T,(1982) "*The Beamtenstaat in Indonesia"* dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin (eds) *Interpreting Indonesian Politic:Thirteen Contribution to Debates, Cornell Modern Indonesia Project*, Cornell University, Ithaca

McIntyre, Angus, 1997, *In Search of Megawati Soekarnoputri*, Working Papers, no. 103, Clayton, Vic.: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University

Miles, Matthew B & A. Michael Huberman, 2007 *Analisa Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia,

Miller, Katherine, 2005, *Communication Theories, Perspectives, Processes, and Contexts Second Edition*, New York, McGraw Hill International
.

Mulyana, Deddy, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit Rosdakarya

----------, 2014, *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi*, Bandung Penerbit Remaja Rosdakarya

Mulyana, Deddy & Solatun, 2008, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung, Penerbit Rosdakarya,

Moleong, J. Lexy, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung , Penerbit Rosda

Nimmo, Dann, 2003, *Komunikasi Politik*, Bandung, Penerbit Rodakarya

Nusa Bhakti, Ikra, 1999, *Tentara Mendamba Mitra*, Jakarta, Penerbit Mizan Pustaka

----------, 2001, *Militer Dan Kekerasan Orde Baru*, Jakarta, Penerbit Mizan Pustaka

Paul Wolff, Robert Barrington Moore, Jr., and Herbert Marcuse, 1969, *A Critique of Pure Tolerance*, Boston: Beacon Press.. 95-137.

Paserin d'Enteves, Maurizo, 1994, *Filsafat Politik Hannah Arendt,* Yogyakarta, Penerbit Qalam.

Patton, Michael Quin, 2006, *Metode Evaluasi Kualitatif,* Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar

Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif,* Yogyakarta, Penerbit LKIS,

Pour, Julius,1993, *Benny Moerdani: Profile of a Soldier Statesman*, Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman

Priyono, B. Herry, 2003, *Anthony Giddens, Suatu Pengantar*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia

Ritzer, George, Douglas J. Goodman, 2008 *Teori Sosiologi,* Yogyakarta, Penerbit Kreasi Wacana

Ritzer, George, Barry Smart (ed),2015, *Handbook Teori Sosiologi,* Bandung Yogyakarta, Penerbit Nusa Media

Ritzer, George, (2005), *Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta, Juxtapose dan Kreasi Wacana

Samah, Kristin (ed,), 2016, *Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat*, Jakarta, PT GramediaPustakaUtama

Samovar, A, Larry, Porter, E R, Mc Danile, R Edwin, 2010, *Komunikasi Lintas Budaya,* Terjemahan Indri Margareta, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika

Salim, Agus, 2006, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Jakarta, Penerbit Tiara Wacana,

Said, Edward, 2004, *Humanism, and Democratic Criticism*, Columbia, University Press,

Siswantoro, Agus, 2004, *Membongkar Kudatuli Menggugat Megawati*; Jakarta : Gerakan Pemuda 27 Juli 1996,

Soekarnoputri, Megawati.1993, *Bendera Sudah Saya Kibarkan! Pokok-pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Surbakti, Ramlan, (2010) *Memahami Ilmu Politik* , Jakarta: Penerbit Gramedia.

Stryker, Sheldon, 2001. *Traditional Symbolic Interaction, Role Theory, and Structural Symbolic Interaction: The Road To Identity Theory*. Dalam Turner, H Jonathan (Editor) , " *Handbook Of Sociological Theory.*

Stryker , S, Owen, J.,White, W. Robert, 2000, *Self, Identity and Social Movement*, Minnesota, Penerbit University Of Minnsota.

Syam, W. Nina (2010) *Filsafat Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, Bandung, Simbiosa Rekatama

Sztompka, Piotr, 2008, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenanda Media Group, Jakarta,

Thompson, John B, 2007, *Analisis Ideologi:Kritik Wacana Ideologi –Ideologi Dunia,* Yogyakarta, Penerbit Ircisod,

Tumakaka, JK, 1996, *Membangun Sistem Masyarakat Pancasila*, Jakarta, Yayasan Piranti Ilmu

Wallace & Wolf, 1995, *Reading In Contemprary Sociological Theory from Modernity to Post Modernity*, New Jersey, Prentice Hall.

Wanandi, Jusuf , 2014, *Menyibak Tabir Orde Baru Memoar Politik*, Jakarta, Kompas

Media Online

Conroe, Andrew Marc, **(2012**) *Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia,* Melalui deepblue.lib.umich.edu/.../browse?...Conroe%2C

Hearman, Vannessa, (2009) *The Uses Of Memoirs And Oral History Works In Researching The 1965–1966 Political Violence In Indonesia,* Melalui ijaps.usm.my/wp-content/.../Vannessa_Memoir

Rosenbaum Lomn P. and Judith Kossy (2008) *Indonesia's Political Prisoners* /worldview.carnegiecouncil.org/.../v19_i010_a01.

Stryker, Sheldon and Burke, J Peter, (200) T*he Past, Present, and Future of an Identity Theory*, Social Psychology Quarterly 2000, Vol. 63, No.4,284-297 melaui http/www.jstor.org

Stryker, Sheldon,(2001) *Symbolic Interactionist Theories of Identity*, melalui www.sagepub.com/upm-data/50436_ch

Spivak, C, Gayatri, (2008), Can The Sub Altern, Melalui www.mcgill.ca/ files/.../Can_the_subaltern_speak

Tim Peneliti Undip (2004), *Dari kumpulan Yang Terbuang : Peristiwa G 30 S Dan Dampaknya Menurut Perspektif Ex Tahanan Politik PKI DI Yogyakarta,* Melalui eprints.undip.ac.id/21649/1/625-ki-ft-05

Clarke , Simon (2011), *Culture and Identity*, Melalui http/www.sagepub.ereferance.com/view.hdbk-culturalanalysis/

https://fadlibae.wordpress.com/2012/01/30/*penelitian-sejarah-historical-research/*).diakses pada tanggal 12 Oktober 2016

dalam *kpu.go.id* diakses tanggal 12 September 2016

Surat Kabar dan Majalah

Harian Kompas, edisi Juni 1966, edisi Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus 1996

Harian Angkatan Bersenjata, edisi Mei, Juni, Juli, Agustus 1996

Harian Terbit, edisi Maret, April 1977, Juni, Juli, Agustus 1996

Harian Republika, edisi Juni, Juli 1996

Harian Media Indonesia, edisi juli 1996

Harian Merdeka, edisi Juli 1996

Majalah Mingguan Tempo, edisi Juni, Juli, Oktober, November, Desember 1993,

Majalah Mingguan Editor, edisi Juni, Juli, Oktober, November, Desember 1993,

Majalah Mingguan Forum Keadilan, edisi bulan Agustus, September , Oktober, November, Desember 1993

Majalah Mingguan Tajuk Juni 2000

Majalah Mingguan Ekpres , 17 Mei 1971

Majalah Histori, Juni 2016

Sumber Dokumen lain

Hasil-Hasil Keputusan Kongres IV Medan tanggal 20 s/d 22 Juni 1996

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kriminal Khusus (Krimsus) Mabes Polri

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Alex Widya Siregar

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Zacky Makarim

Pedoman Wawancara

Wawancara untuk Aparatur Rezim Orde Baru	1. Bagaimana persepsi Orde Baru melihat PDI Megawat ? 2. Bagaimana bentuk dukungan Orde Baru PDI Suryadi ? 3. Bagaimana tanggapan Bapak apparatus rezim Orde Baru terlibat dalam peristiwa 27 Juli ? 4. Dalam memantabkan kekuasaan selalu melahirkan berbagai aturan /norma , seperti adanya dwi fungsi ABRI, UU Politik yang melahirkan fusi dan lain-lain, Bagaimana pendapat bapak melihat hal tersebut ? 5. Dalam era Orde Baru, Pancasila dan UUD'45 menjadi ideologi pembenaran dalam melakukan tindakan politik, Bagimana pendapat Bapak tentang hal itu ? 6. Dalam Orde baru, militer (ABRI) dianggap sebagai elite yang istimewa (berkuasa) sehingga berada dalam setiap posisi pada struktur kekuasan , birokrasi ataupun perusahaan (komisaris) , Bagimana pendapat Bapak dalam melihat itu ?
Wawancara pada PDI Suryadi	7. Bagaimana pendapat tentang PDI Megawati ? 8. Bagaimana upaya untuk mengeliminr pendukung Megawati ? 9. Orde baru dalam mengatasi kelompok, atau suara yang berseberangan dengan pemerintah selalu melakukan pendekatan dengan 2 model, model persuasif dan model kekerasan , Bagaimana pendapat Bapak dalam melihat hal tersebut ? 10. Konflik selalau ada dalam masyarakat, seperti konflik internal partai (PDI) , bagaimana pendapat bapak dalam menyelesaikan konflik tersebut ? 11. Posisi politik bapak dikenal berada pada kelompok ASU, dan Megawati juga bisa dipersepsikan sebagai ASU , tetapi pada Orde baru Bapak berada di pihak Suryadi, bagaimana pendapat bapak tentang hal ini ? 12. Militer (Orde baru) berpihak pda Suryadi , tetapi bapak berpihak pada Suryadi, Bagaimana orientasi politik bapak pada saat itu ? 13. Ada kewaspadaan tertentu dari pihak Orde baru terhadap latar belakang Bapak sebagai orang ASU, bagaimana tindakan politik yang Bapak lakukan pda saat itu ? 14. Bagaimana Bapak menghilangkan stigma bahwa bapak berasal dari ASU ?
Wawancara dengan PDI Megawati	15. Orde baru dalam mempertahankan kekuasan selalu melahirkan berbagai istilah utuk mengabsahkan (legitimasi) kekuasaan dengan istilah, seperti stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, azas konstitusi dan lain-lain, di satu sisi. Di sisi, lain dengan pendekatan "pemberian jabatan kekuasaan" pada seseorang, bagaimana pendapat anda ?

Reproduksi Kultural	16. Bagaimana pendapat anda tentang kekuasaan Orde baru ? 17. Apa yang menjadi alasan utama anda melakukan perlawanan? 18. Mengapa anda melihat Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru ? 19. Apa yang menjadi harapan Anda ketika Megawati berhasil dalam membawa perubahan politik Orde Baru?
Integrasi sosial	20. Bagaimana upaya anda dalam membangun komitmen perjuangan dalam melakukan perubahan ? 21. Bagaimana mengatasi perbedaan pandangan/tindakan yang tidak sesuai dengan komitmen awal ? 22. Apa yang dilakukan ketika menemuai rekan/menyimpang komitmen awal dari perjuangan ? 23. Apakah ada sangsi yang diterapkan terhadap hal tersebut ? 24. Bagaimana sikap anda kawan aktivis yang mengalami kesulitan karena probadi atau dalam hambatan perjuangan ?
Identitas /Kepribadian	25. Bagimana sikap anda nmelihat aktivis lain diluar kelompok pendukung mMegawati, tetapi mempunyai oirentasi perjuangan yang sama ? 26. Apakah Anda selalu berbagi informasi dengan aktivis lain baik secara formal dan informal ? 27. Media apa yang tepat dalam berbagi informasi tersebut ? 28. Bagaimana cara anda untuk menegaskan diri sebagai pendukung Megawati ?

Transkrip Wawancara

Nama : Alex Widya Siregar
Tempat : Di rumah
Waktu : Januari 2016 Agustus 2017

Wawancara tanggal B-1 tanggal 14-1-2016

T- Mengapa dalam konggres Medan 1996 , Sekjen jatuh /ditunjuk Buttu Hutapea ?

J- Pada saat itu masjih ada suatu konvensi yang berada dalam tubuh PDI bahwa Ketua jabat oleh unsur PNI, sedangkan Sekjen bisa Partai Katolik /Parkindo , merupakan kesepakatn awal yang atau konvensi, yang tertulis.

T. Buttu di tulis sebagai komandan penyerangan ?

J. Sebenarnya tidak, tetapi rapat PDI tanggal 6 Juli 1996, AWS sudah punya rencana yang di majukan ke DPP, bahwa ini sudah waktunya untuk menghabisi Suharto, tetapi dalam laporan pemeriksaan ke Polisi ini tidak mungkin disampaikan-, kalau dikemukakan itu merupakan delik makar.

T- AWS pernah bilang tetang analisis yang di sampaikan ke Achdari (Waka Bais), kira-kira analisi situasi seperti apa ?

J. Kalau analisa – penyerangan itu disampaikan sebelum Konggres, AWS majukan ke Achdari, jawaban dari Achdari- , Wah agak repot ini (menurut AWS Achdari sudah terpengaruh TK. Aws datang kedua kalinya, dan diterima oleh Sadran Marbun –seorang Kolonel , staf dari Achdari, jawaban dari Sadran Marbun tidak mau diskusi lebih lanjut dengan AWS, dengan mengatakan, " Pak Alex ini masalah rahasia negara. Lantas AWS berpikir bahwa mereka tidak mau dengan saya (AWS).

T. Konsep seperti apa ?

J. Suatu arahan untuk meneyelesaikan PDI. Caranya, sama mengumpulkan semua kekuatan dengan perhitungan bahwa orang-orang cabang kalau digarap oleh militer pasti ikut saebelum Konggres. Karena di tolak konsep itu, saya pergi ke Batam----kemudian bulan April di panggil Faisal tanjung Pangab.

<u>Wawancara /A-2 tanggal 23 Desember 2016</u>

Pada saat Di Batam AWS[1] dipanggil Panggab Faisal Tanjung melalui staf pribadi yang bernama Zulkifli, seorang yang berpangkakt Kolonel AD, di minta untuk menghadap Pangab . Dalam percakapannya dengan Zulkifli.[2]

Zulkifli : Diminta Faisal Tanjung itu datang menghadap ?
AWS : Saya tidak tahu, siap itui Faisal Tanjung ?
Zulkifli : Masak tidak tahu, Faisal Tanjung , "Pangab"!
AWS : Kapan ?
Zulkifli : Segera !, Atau kita jemput.
AWS : Ok, saya datang.

Ketika ketemu dengan Jenderal Faisal Tanjung, dalam percakapannya,

Faisal Tanjung : Saya dengar Pak Alex ini ahli PDI?
AWS : Ya, tidaklah, tetapi kalau ada yang perlu tentang PDI, saya bisa bantu.
Faisal Tanjung : Ini sudah 3 Kepala Sospol diberhentikan Pak Harto, masalah PDI tidak pernah selesai.
AWS : Kenapa harus saya yang menyelesaikan ?

---

[1] Di Batam AWS mengusahakan Tambang Pasir di pualu Nusa Dua yang merupakan miik Benny Meordani

[2] Zulkifli tahu AWS melalui Sadran Marbun, karena AWS pernah bicara dengan Sadran Marbun tentang PDI. AWS tahu hal tersebut dari Achdari (Waka Bais)

Faisal tanjung : Mau tidak ! Jangan tanya kenapa-kenapa? Mau tidak , ini masalah sangat mendesak .

AWS : Apa yang dikejar

Feisal Tanjung : Pemilu ! Kalau masalah PDI tidak selesai Pemilu tidak jadi. Hal ini menjadi reputasi jelek bagi pemerintah . (PDI dibawah kepemimpinan Megawati masih dianggap defacto, batas pendaftaran peserta Pemilu 1 Juli 1996).

Faisal Tanjung : Lantas wewenang apa yang diperlukan ?

AWS : Yang penting SOSPOL mendukung (Kadit Sospol seluruh Indonesia yang pada waktu Konggres Medan mereka hadir)

Faisal tanjung : Ok, saya bisa perintahkan semua. Tetapi struktur di ABRI tidak bisa kita rubah .

AWS : Tidak apa-apa yang terpenting bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, kalau misalnya siapa yang hadirkan ini, Sospol harus siap untuk hadirkan . Misalnya, di suatu tempat cabang Megawati kuat, Suryadi kuat, maka perlu orang ketiga untuk menyelesaikan. (Unsur Sospol dan Kodim)

Pertanyaan : banyak aktor-aktor yang terlibat, AWS dari aktor nasiuonalis, dalam hal ini menerima tanggung jawab , harapan apa yang timbul apabila bisa menyelesaikan pekerjaan itu ?

AWS : Saya overconfidence, saya bisa selesaikan pekerjaan itu sebulan, malah justeru kurang dari sebulan, tepatnya 16 hari untuk menggalang kekuatan melakukan persiapan Konggres . Harapannya, saya bisa kuasai PDI. Setelah bertemu dengan dengan Faisal Tanjung, AWS datang ke kantor BAIS, dan bertemu dengan Syamsir Siregar (Ka Bais dan dan Direktur A BAIS Zacki Makarim untuk menjelaskan upaya kerja penggalangan PDI. Setelah keluar dari kantor BAIS, AWS kontak dengan Latief Pudjosakti, anak GSNI, Wakil DPRD Jatim. Dalam percakapaanya,

AWS : Pak Latief bisa saya ngomong ? Kapan bisa datang ke Jakarta ?

Latief F : kapan ?

AWS : Ya, kapan saja, tetapi segera !

Latief : “Ntar Sore” , saya terbang ke Jakarta, tetapi carikan Hotel, saya yang bayar.

AWS : Urusan Jawa Timur selesai, di Jawa Tengah AWS telepon Soemaryo Ketua DPD PDI Jateng, Di Jawa Barat karena AWS tidak tahu peta PDI Jabar, maka memintan bantuan Syamsiar PABAN BAIS yang mengerjakan itu semua. Karena Syamsiar pernah bertugas di sana sebagai Danramil Bandung, dan asli orang Sunda. Syamsiar tidak tahu mengapa saya harus ikut urusan PDI, tetpai dia berpikir saya ahli dalam masalah PDI. AWS membuat suatu rencana kerja, jadi apa-apa yang harus dikerjakan di Konggres itu untuk bisa dikendalikan . Misalnya kalau Suryadi punya strategi ini, kita akan melawannya dengan cara ini, seperti juga Mega, jadi semua di sudah diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Pertanyaan : Pada saat persiapan Konggres, apakah Suryadi di hubungi juga untuk mengikuti Konggres ?

AWS : Tidak, karena saya kenal baik benar dengan Suryadi, maka tiba-tiba telepon ke rumah . Dalam percakapan itu ;

Suryadi : Pak Alex, saya merasa penting sekali ngomong sama Pak Alex.

AWS : Urusan apa ? Urusan PDI ?

Suryadi : Tidak, saya sudah lama sekali tidak tahu masalah PDI ? (Suryadi sudah mendengar adanya Konggres)

AWS : Terus, apanya penting ?

Suryadi : Saya dengar persisi bahwa Sutardjo (Sutardjo Suryaguritno) jumpa Ka Bais, Ka Bais itu orang penting. Kapan saya bisa dipertemukan dengan Ka Bais ?

AWS : Oh, kalau perkara itu gampang, "Kapan kita bisa ketemu" ?

Suryadi : Nanti Sore !

Sorenya AWS bertemu Suryadi di rumah makan padang dekat Polda DKI Jakarta, Suryadi merasa kesal dengan dengan Sutardjo karena dianggap lawan. Dalam pertemuan itu,

Suryadi : Tidak ada orang yang lebih goblok dari Tarjo, dia itu lurah, saya angkat menjadi Ketua Cabang, sekarang saya di lawan.

Pada saat itu AWS sudah membawa Sutardjo ke Ka Bais. Pertemuan itu di Hotel Pelita Di jalan Sahardjo. Pembicaraan dengan Ka Bais Syamsir Siregar, Sutardjo, dan AWS;

Syamsir S : Mau tidak mendukung kami ? (maksudnya konggres PDI)

Syamsir S : Begini Pak Tardjo, ini PDI penting, tanpa PDI negeri ini bisa kacau .

Sutardjo S : Opo, iyo !

Syamsiar : Iya ! Sekarang kami akan ajak Konggres, setuju ngak dengan pikiran pemerintah ?

Tardjo : Ya setuju ! Kalau perlu tahu , siapa yang Bapak pilih jadi Ketua PDI ?

Syamsir S : Coba Bapak sarankan sama saya, agar bisa kita menangkan .

Sutardjo : Ya, yang paling senior dong ! (maksudnya Sutardjo sendiri).

Syamsir : Okelah , 3 hari kemudian kita ketemu lagi.

Kemudian pulang menuju Kalibata, Kantor Bais , Syamsir S menanyakan pada AWS,

Syamsir : Siapa rencana Ketua PDI ?

AWS : Saya tidak punya, tugas saya kan menenangkan dan memenangkan PDI ?

Syamsir : Memang benar Tardjo yang paling senior ?

AWS : Ya nggaklah ! Tetapi tidak apa-apa kalau kita angkat jadi ketua Umum PDI.

Tiga hari kemudian bertemu , Syamsir Siregar , Sudi Silalahi, Adityawarman, Waka Bais Achdari, Paagian Siregar bertempat di Langoon Hotel. (dekat Hilton). Syamsir membuka pertemuan, dan langsung menanyakan ,

Syamsir : Siapa sudah dapat Ketua ?

Sutardjo : Ya, saya tetap berpikir yang paling seniorlah.

Syamsir S: Siapa ?

Sutardjo : Ya, saya !

Panagian S : Umur Pak Tardjo berapa ? Nggak bisa, saya yang paling senior, kalau masalah umur saya, saya sudah 2 kali di DPR, sekian tahun di DPD, dan di cabang. Pokoknya yang paling ada sekarang yang senior saya .

Baru 2 kali pertemuan, Suryadi telepon , akhirya malamnya dipertemukan dengan Syamsir di tambah dengan syarwan Hamid.

Syarwan : Wah aku ini binggung juga melihat kau Lex ?

AWS : Kenapa ?

Syarwan: Ketua DPR bisa kau panggil !

AWS : Ah, biasa saja.

Syarwan : Kenapa tidak dia aja yang kita ajukan Ketua Umum PDI !

AWS : Janganlah ini pasti akan di lawan Megawati, pasti rebut sekali.

Syarwan : Kalau saya pikir hanya Suryadi yang kapabel baik fisik, logistic, mapun pikiran. Hanya Suryadi yang bisa melawan Mega, kalau yang lain, seperti Tardjo, itu bisa apa ?

AWS : Ya, Terserahlah (piker AWS: yang penting siapapun Ketua Umum PDI saya bisa berperan dengan tujuan saya bisa atur PDI).

Wawancara
Harsoko Sudiro (DPP PDI SURYADI)

Pertanyaaan : Kapan bergabung dengan PDI ?
Jawab : Bergabung sejak fusi tapi tidak aktif , tetatpi sering diminta menjadi jurkam PDI. Waktu fusi kekuatan PNI terbelah dua, yang pro fusi dan yang menolak fusi. PNI ASU, silahkan fusi, tapi jangan dikuasai oleh orang luar.
Pertanyaan : Keterlibatan Bapak di kongres PDI Medan 1996 , sebagai apa ?
Sebagai pengkritik Megawati, karena apa ? Waktu kampanye , HS bersama Megawati tidak mau kontak, tidak mau nyalami--- hubungan pribadi sangat penting. Waktu kampanye di Banjarnegara—Megawati , dan Sekjennya Nico Daryanto, semua calon DPR dikenalkan, tetapi HS tidak dikenalkan ke audience.
Pertanyaan : Setelah kongres Medan bagaiman keterlibatan Bapak ?
Jawab : Kongres Medan bersama tim dari Cilangkap bersama AWS , satu Hercules, ini berhadapan sama Megawati. Saya pengin tahu sejauhmana ini permainan—yang menyambut setelah sampai di Medan adalah Sudi Silalahi. Di VIP Room. Dalam hati kecilnya, biang semua ini adalah tentara.
Setelah kongres Medan HS adalah DPP PDI. Sebenarnya dikalangan PDI , Alex Widya Siregar (AWS) yang paling menonjol dikalangan tentara.
Pertanyaaan : Bagaimana nama Bapak bisa terlibat dalam 27 Juli ?
Jawab : Awalnya sebagai wartawan, kader partai saya ingin tahu, saya nongkrong di Jl. Diponegoro, pada hari yang ditentukan tetapi batal, saya jalan pagi dan ketemu dengan seorang kolonel dari BIA (nongkrong di warung kopi pinggir jalan). Di situ orang-orang timur banyak yang pro megawati--- kolonel itu juga tuidak tahu bahwa pengambil alihan itu di tunda.
Pada jam 1 malam, ditelpon oleh AWS, “dimana mas” ?, di jawab HS, saya baru pulang. Kemudian Kolonel Syamsia ambil oper, “Mas , segera ke sini (Kalibata Markas BIA) , Ok deh, saya mandi dulu, dan AWS sudah di sana. Di ruangan Kolonel Syamsiar, dan diberitahu sama Syamsiar , “kita nunggu di sini dulu sampai jam 4 “. Menjelang jam empat pagi, rombangan (HS, AWS, Syamsir) turun dari ruangan BIA. Mobil HS dtinggal, kemudian naik Jeep, HS, AWS, Syamsiar, polisi menuju ke Polsek, sampai di sana sudah banyak orang , rupanya angkatan muda Golkar--- ketika sedang berjalan ketemu Yoris—dan baertanya “Lho koq ada di sini? Yoris tersenyum tersu pergi.
HS tidak tahu siapa yang memulai, tetapi peristiwa sudah selesai di bawa naik ke jalan Diponegoro bahwa seolah sudah ada yang mengatur. Di polsek ketemu Buttu Hutapea, terus naik mobil ke jalan Surabaya (perempatan diponegoro) berjalan ke kantor DPP PDI.

Wawancara Syamsiar Desember 2016

Pertanyaan : Pada sat di BIA (sebagi aparat) melihat PDI saat itu ?

Jawab : Pada saat ada PDI Suryadi dan PDI Mega, pemerintah sangat mendukung PDI Suryadi, PDI Mega dianggap rawan pada waktu itu. Konggres Medan PDI Suryadi didukung penuh oleh pemerintah.

Pertanyaan : Megawa dianggap sebagai pihak yang berseberangan ?

Jawab : PDI Mega dianggap lawan pemerintah, makanya konggres Medan –dipaksakan Suryadi sebagai Ketua, Mega otomatis tersisih, kemudain Mega terus megadakan perlawanan yang dibantu oleh PRD—sosialis demokrat, kemudian terjadinya penyerangan paa 27 Juli 1996, saya cukup berperan dalam hal itu, maka saya menjadi tersangka, bersama Zaky, Sutyoso, Syamsiar Siregar, Marpaung.

Pertanyaaan: Pada saat itu, status tersangka , apakah masih dalam pemerintah Orde Baru?

Jawab : Pasca Orde baru, dan AWS pertama kali ditangkap, bocor dari AWS, semua di sidang ---1996 belum tercabut/atau di SP 3, jadi tidak stabil antara Suryadi-Mega saling bertentangan , PRD membantu –kemudian mereka ditangkapi?

Pertanyaan : PRD waktu itu kan diangap komunis ?

Jawab : Pda saat itu masih dianggap social demokrat, belum dianggap komunis belum mengarah ke komunis. Tapi strukturnya dibikin seperti PKI, SMID –

Pertanyaaan: Bagaimana dengan sumber pendanaan ?

Jawab : Sumber pendanaan tidak terungkap di sini, ada yang bilang dari Australia, Pramudya bilang bukan komunis,

Pertanyaan : Bagaimana dengan langkah pemerintah untuk mencegah perlawanan Mega ini meluas ?

Jawab : Ini ada tulisan dari Agum Gumelar yang ditujukan pada Panglima ABRI (dibacakan sesuai dengan isi surat)

Tanggapan dan Saran dalam menanggapi perkembangan Kongres PDI di Medan 1996

1. Dasar kebijakan ABRI
   Mendukung kebijakan pemerintah atas terlaksananya kongres PDI di Medan 1996.
2. Mengatisipasi dan situasi ke depan dengan format, kami sampaikan sebagai berikut:
   a. Keberhasilan kongres PDI Medan 1996, masih diliputu ketenggangan dikalangan internal PDI yang berwujud dlam aksi protes , demostrasi, unjuk rasa yang dilakukan masa pendukung Megawati, yang belakangan ini menolak kongres. Keadaan ini akan berlarut di internal PDI yang merupakan ciri negatif yang mewarnai sejarah perjalanan PDI.
   b. Walaupun hal ini adalah internal PDI, namun dinamikanya sebagai salah satu organisasi dalam sistem politik akan mempengaruhi masyarakat serta memperluas spekturuk permaslahannya yang pada gilirannya dikawatirkan dapat menimbulkan kompleksitas politik yang ditumbuhkan oleh nuansa –nuansa tertentu perkembangan lingkungan strategis yang berpotensi hambatan , tantangan, ancaman dan gangguan.
3. Saat penyelenggaran Pemilu yang telah semakin mendekat saat ini tiba tahap nama pencalonan DPR/MPR, diperkirakan peningkatan ketegangan antara kubu Mega dengan Suryadi masih berlangusng dan dapat menimbulkan meningkatnya

bentrokan fisik diantara pendukungnya. Dalam hal ini perlu diwaspadai apalagi dengan seruan Megawati di daerah-daeah untuk melaksanakan Konferda/Konfercab sesegera mungkun. Sehubungan dengan butir ke 2 diperkirakan 2 alternatif sikap Megawati.

Alternatif 1.

Megawati tetap menolak bermusyawarah dengan Suryadi dengan kemungkinan akibat yang timbul sebagai berikut.

A. Positip:

1. Kepemimpinan PDI menjadi dua dan DPP PDI Pecah.
2. Massa PDI terpecah dan pada kemungkinan Pemilu 1997 suara mereka akan menurun.
3. Para simpatisan PDI juga pecah sehingga sulit untuk memanfaatkan kekuatan sebagai oposan terhadap pemerintah.

B. Negatif .

1. Megawati tetap berada di PDI dan Panwaslapsus.
2. Kader-kader Megawati duduk dalam daftar calon.
3. Bila Konferda berhasil umur PDI pimpinan Suryadi tidak terdukung tersingkir.
4. Pendukung Megawati semakin kuat dan vokal di DPR/ MPR.
5. LSM dan NGO, termasuk PUDI akan gencar mengekspos kesalahan pemerintah.

Alternatif II

Positif.

1. Megawati akan bersatu dengan Suryadi, dan legowo menyerahkan kepeimpinan pada Suryadi.
2. Positifnya--- Suryadi akan menempatkan kader-kadernya yang tidak terlalu ekstrim dan vokal.
3. Kelompok-kelompok pro Megawati, NGO dan LSM dan oposan yang anti pemerintah akan kehilangan keberpihakan.

Negatif.

1. Karena Megawati Suryadi bersatu maka akan meningkat simpatisan.
2. Perolehan suara PDI dalam pemilu meningkat.
3. Golkar bisa menurun suaranya dalam Pemilu secara dratis.
4. ABRI dan pemerintah semakin diterpa berbagai aksi dan isu politik dan Suryadi yang sangat diuntungkan pemerintah dan ABRI akan semakin melonjak, walalupun sikapnya menjadi tidak sejajar dengan pemerintah, sehigga ABRI akan mengalami hal yang dikotomis dalam menghadapinya.

Berdasarkan hasil alternatif tersebut di atas;

1. Kita biarkan saja masalah PDI dan lingkungannya.
2. Megawati tidak perlu dilayani dan kemudian akan memudar dengan sendirinya.
3. Seyogyanya kedudukan unsur-unsur PDI Megawati di PDI dan Panwaslapus ditinjau kembali dan diganti dengan unsur-unsur dari hasil kongres Medan, perlu mengupayakan posisi Suryadi pada posisi dilematiss, agar yang bersangkutan tidak besar kepala.

Dalam rangka mengecilkan subyek masalah serta mengalihkan perhatian, sekiranya masalah PDI dibatasi eksposnya di media massa dan dikurangi, tanggapan atau komentar para pejabat pemerintah atau ABRI demi menghindari polemik yang berkelanjutan.

Wawancara dengan Kelompok 124

Pertanyaan : Apa yang menjadi motif anda bergabung dalam panggung demokrasi di Jl. Diponegoro (PDI)

Jawab : Berada di Posko Jakarta Barat , tapi kadang-kadang juga bantu di posko Indonesia Timur karena saya berada di Indonesia Timur. Tapi tetap bergabung di Jakarta Barat, say awal gabung di situ sebenarnya kedudukan saya satgas , tapi karena om saya adalah satgas jakarta Barat, dan dia adalah orang yang paling dekat dengan Ibu Megawati, jadi dia merekrut semuanya orang yang dekta dengan dia, atau orang orang maluku, Indonesia Timur.
Orientasi saya bahwa , karena harus gabung di situ, karena pada waktu itu perlu ada perubahan karena kalau tidak ada perubahan sama saja tidak ada kebebasan, kita melihat bahwa intiidasi dan keserakahan . Rakyat tidak mempunyai ruang untuk menyatakan aspirasi, mencari ruang keadilan. Hal itu menjadi dorongan untuk bergerak, karena pada waktu itu dari Maluku datang- saya dulu bukan PDI, saya SMA sudah anti partai, bahwa presiden pada zaman Orde Baru itu bukan presiden , tetapi sama aja dengan kerjaaan---karena pemilu hanya formalitas

Peserta Lain2: Sebelum peristiwa 27 Juli itu tidak ada lagi demokrasi di Indonesia, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia , datang dan bergabung di kantor DPP PDI sebagai tanggung jawab moral anak bangsa , bahwa tidak ada demokrasi di Indonesia.

Peserta Lain3: Saya melihat kondisi masyarakat banyak, khususnya dari Sulawesi, banyak intimidasi, pengkerdilan di daerah, tidak ada kebebasan pada waktu itu. Kami melihat dan datang ke Diponegoro, melihat salah satu figur dan figur perubahan adalah Megawati, makanya kami datang berbondong-bondong ke Diponegoro ada yang dari unsur kemasyarakatan, pemuda. Pemuda daerah yang merasa terpanggil untuk ada perubahan di republik ini dan saya sendiri di kirim dari DPC Jakarta Selatan, selalu sebagai satgas. Yang kita belain ini merupakan hasil pengurus partai yang resmi, kemudian banyak terjadinya Fosko-Fosko. Dari kepemudaan , pemuda daerah Indonesia Timur--- yang diperjuangkan dari mereka adalah persamaaan hak, hak berdemokrasi, agar sampai tidak terkekang berdemokrasi – yang ada yang bisa melakukan perubahan. Yang bisa melakukan perubahan, ada satu figure, yatu Megawati.

Peserta Lain4 : (syarul) Saya kader PDI , asal dari Banten. Waktu itu diperintahkan dari ketua DPC untuk menjaga kantor DPP yang ada di jalan Diponegoro. Kita selama itu mengikuti aturan yang ada di pemerintah , cuma 1 di saat saya menjaga di rumah sendiri saya sampai berminggu di situ bahwa yang saya terima dari orang-orang luar yang kami terima adalah bahasa yang di pakai menghujat, mefitnah . 21 tahun ini kami menunggu keadilan tapi saat ini belum bisa dapat saya minta.
Kebetulan pengurus partai, Johor Baru

Wawancara Dengan Amsar Dulmanan

Pertanyaaan : Bung Amsar ini berasal dari FKGMNU, tetapi terlibat dalam konflik PDI yang berujung pada persitiwa 27 Juli ?

Jawab : Perlawanan politik atas rezim yang terstigmatisasi banget, teridentifikasi sebagai otoriter birokrasi, dimana Soeharto saat itu sangat sentral dari semua kepentingan politik. Itu yang aku lihat bagaimana gerakan 27 Juli, mereka yang dibilang naga merah. Saya punya pengalaman dengan naga hijau sebagai mobilitas perlawanan sosial terhadap rezim Soeharto dari komunitas kaum santri dan nadliyin--- terklasifikasi naga hijau adalah mobilisasi oposisi politik dikalangan santri. Sementara naga merah dihambat dari ruang kesadaran politik atau oposisi terhadap rezim yang datang dari kelompaok nasionalis .

Pertanyaaan : Bagaimana keterlibatan di PDI dengan peristiwa 27 Juli, dan bagaimana keterlibatan dengan kawan-kawan pergerakan ? Fokus hanya di FKGMNU atau melakukan interaksi-interaksi dengan gerakan yang lain ?

Jawab : Kalau saya melihat itu merupakan arena yang harus diperbesar sebagai arena perluasan kesadaran atas rezim yang memang sudah melakukan represitas atas PDI-PDI itu yang harus karena PDI yang ada pada Megawati itu sudah menjadi gerakan politik oposisi terhadap negara, itu yang harus kita lihat di situ, amka saya masuk sebetulnya punya kerangka berpikir bahwa raung ini merupakan ruang atau arena politik kesadaran masyarakat, yang saya harus mengambil peran itu, walaupun secara pribadi, makanya saya mencoba masuk dari kasus Mei yang demosntrasi di Gambir tersu kasus sebelum 27 Juli. Saya mengambil peran itu termasuk di 27 Juli, kita terus memegang, sebelum itu kan saya mengisi beberapa mimbar demokrasi bersma-sama teman, simpul gerakan perlawanan pro demokrasi yang ada.

Yang harus dilihat bahw perlawanan Mega itu tidak bersiri sendiri, tapi merupakan jaringan kerja kultural politik dari pro demokrasi yang di lahirkan oleh Forum Demokrasi—dan progresifitas anak-anak NU yang emang dipinggirkan oleh Rezim Orde baru, baik secara intitusi Ke NU-an dan maupun secara kepartaian.—yang ada di PPP.

Jadi akumulasinya sudah merajut dari berbagai kepentingan , dan proses pembesaran atas perlawanan terhadap rezim berkuasa. Saya melihatnya itu jadi identifikasi aku , tidak ada lagi identifikasi lain. Ini merupakan penguatan terhadap pro demokrasi –perluasan ruang demokrasi untuk meruntuhkan rezim.

Komunikasi politiknya ada di situ, maka saya selalu megambil peran dalam penyebaran pamflet, penulisan artikel atau mimbar bebas atau diskusi-diskusi kecil, itu kita lakukan karena di situ, kita berperan , dan itu media yang bisa kita lakukan (pada saat itu)

Pas ada kebenaran ada satu moment—yang namanya penzoliman PDI Mega—yang dilakukan oleh PDI Suryadi atas kepentingan rezim, di situ kita hadir lalu, di situlah pro demokrasi menyatu, hingga muncul gerakan-gerakan pro demokrasi yang di kordinasi yang kita kenal dengan pembesaran PDInya Megawati.

Pertanyaan : Tapi di satu sisi setelah peristiwa 27 Juli wacana-wacana dominan yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru, tentang jumlah korban, hal yang pentin adalah persolan gerakan , PRD menjadi biang keladi dari persolan tersebut, sebagai aktivis yang terlibat langsung di situ, bagaiman pendapat Anda ?

Jawab : Kalau negara selalau bagaimana mempresure dinamisasi pembesaran dari sutau gerakan kepentingan perlawanan atas dirinya, itu jelas bahwa orang yang berkuasa akan mempertahankan kekuasaan atau status quo kekuasaan, apapun variabel ataupun faktor-faktor apa saja yang berkembang akan menggangu dan menghambat pola status quo dan otoriter kekuasaannya itu pasti akan dikecilkan.

Ada hal yang berbeda melihat PRD - PRD ini sebenarnya identifikasi kalau PRD harus dilihat dalam gerakan taktis diciptakan oleh siapa ?

Itu kan mengambil stimatisasi dari komunikasi rezim terhadap gerakan laten dari gerakan sosial yang ada , makanya pada saat peristiwa Mei – yang kemudian terjadi pembakaran Salemba.
Saya tahu banget PRD itu, saya jalan di depan, dalam beberapa langkah sudah menguasai opini sosial atas nama ruang politik yang dimainkan termasuk di dalam mimbar demokrasi , dari mengambil momen-momen itu dengan kemampuan bahasa Inggrisnya cukup bagus dibanding teman nasionalis kelas profan dan marhaenis itu akhirnya mereka mengambil isu komunikasi di dunia internaional . Seolah –olah ruang demokrasi di nU dan PDI (Nasionalis) itu di motori oleh PRD, dan itu merupakan perebutan simbol-simbol yang ada. Tetapi realitanya tidak seperti itu. Tetapi relaitanya tidak seperti itu. Tetapi dunia luar kan tidak memahami fakta dan realitas yang terjadi di dalam negeri.

Pertanyaaan : Kalau coba di frame bahw aaktivis2 lain termarginalisasi dalam wacana dominasi ?

Jawab : Itulah, ruang terbuka sebagai perebutan opini publik--- Nah – keslahan anak NU dan GMNI , gerakan dihadirkan oleh pro demokrasi dihadirkan ketika elemen-elemen gerkan diluar NU yang berkoleberasi memperbear perlawabnan tas prosses distribusi kekuatan dominasi otoriter/rejim yang terjadi, sehingga muncul gerkan Forum Komunikasi diberbagai kancah nasionalo termasuk opini baru menyatu dengan kelompok nasionalis melalui YPS, melalui Fordem dan kelompok kecil itu kita rajut. Nah, kita mulai memborbardir setiap gerkan di daaerah dan bersatu terhadap gerakan pro demokrasi tidak dari unsur yang lain, dari nasionalis, sosdem, kiri, kanan dan menyatu semua, tapi di motori oleh NU dan kaum Nasionalis--- PRD bukan variabel, tetapi dia memainkan kepentingan politik (humas). Sealoh-oleh merupakan identifikasi institusi yang besar, ketika dikejar-kejar mereka minta perlindungan ke NU.

Pertanyaan : Ada kemungkinan mereka bagian dari rezim ?

: Ya, memang mereka diciptakan, tetapi tidak bisa buktikan itu. Karena PRd itu dibentuk dari mulai SMID--- yang melahirkan KIP Jakarta, Saya terlibat di situ termasuk KIP—PRD – tidak lolos. Jadi PRD ini memnag institusi yang lahir dengan variabel X yang tidak berkembang. Pertanyaannya , siapa yang menciptakan itu, ini kan sebenarnya akan mengambil opini- opini yang dilakukan negara ketika garus mensimbolisasi, maka terjadi ketika gerkan 27 Juli gerakan itu ditunggangi oleh PRD, saya dalam penjara dari mana PRD--- wong itu anak-anak NU semua, termasuk Forkot, Famred, . Semua mentor itu anak-anak NU, dan itu adik-adik saya , Lufti Iskandar, Wahab, -- anak-naak gerakan NU dan nasionalis--- amak mega –Gus dur itulah representasi masuk Presiden dan Wakil presiden- NU- Nasionalis itu suatu kekuatan politik yang luar biasa --- jadi rezim pasca soeharto jangan bilang Suharto sudah selesai.

Wawancara
Bob Randilawe / Aktivis Mahasiswaa/UPKR Dan Usmar Ismail /aktivis FKSMJ

Pertanyaan

Jawab : Pertama sebagai aktivis dalam advokasi masyarakat di awali dengan aktif dilingkungan GMNI UTANG dan ikut di dalam pelatihan-pelatihan lingkungan di SKEPHI. Tahun 1989 ikut demonstrasi, aksi yang monumental, karena latar belakang sebagai aktivis mahasiswa itu maka muncul pemikiran kritis. Pemikiran pada suatu kesimpulan politik bahwa akar masalah dari bangsa adalah praktek politik rezim Orba , Pak Harto yang lebih mengkedepankan pembangunan ekonomi , yang kenyataanya lebih mengkenyangkan pihak swasta (konglomerasi),

bukan koperasi. Swasta ini kemudian menjadi berkembang dengan konglomerasinya, yang diakhir kekuasaan menjadi kekuatan yang memukul karena ada faktor/variabel-variabel, missalnya variabel Benny Moerdani . Puncaknya ketika pemikiran KADIN, menolak Aburizal Bakrie , kemudian ada dukungan dari Probosutedjo , maka Aburzal Bakrie yang menanmg. Kelompok ini di kenal dengan keompok Jimbaran. Kekuatan ini menurut saya apa yang disebut dengan kesenjangan sosial.

Dari proses perampokan itu secara sistemnya sudah dimulai, dan saya saya melihat bahwa ini hanya soal waktu, lalu muncul momentum. Waktu itu kita istilahkan sebagai "pembangkangan sipil" . Kita bersama aktivis kampus lain membentuk pers kampus mahasiswa bersama Usmar Ismail (aktivis FKSMJ). Resolusinya, memberikan pemikiran-pemikiran kritis ke kampus-kampus yang ada di Jakarta , bahkan kita membentuk jaringan antar kota . Nah ! dari pemikiran-pemikiran yang tambah mengkristal, lalu timbul sikap kritis masyarakat supaya melakukan pembangkakangan .

Keterlibatan di dalam 27 Juli 1996, merupakan proses yang panjang , "27 Juli " boleh dibilang merupakan muara dimana syarat-syarat sudah mencukupi untuk mengadakan perlawanan, dimana perlawanan ada simbol, yaitu Megawati , ada organisasi politik yang siap dengan melawan Suharto. Ini PDI pro Mega vs PDI Suryadi adalah representasi dari pemerintah Orba. Mega dengan 8 orang DPPnya menduduki dan mengendalikan kantor DPP di Jl. Diponegoro. Mega sebagai ketua PDI secaa de fakto.

Jadi, beberapa peristiwa politik itu membuat saya yakin bahwa ini syarat perlawanan sudah mencukupi , kita gabung dengan satu tujuan "macthvoorming" – untuk mengadakan konsolidasi.

Pertanyaan : Anda bukan termasuk kader PDI, tetapi anda mau terlibat dalam konflik di PDI, apa yang mendorong atau motivasi terlibat ?

Jawab : Kalau ditanya saya bukan PDI, tetapai mengapa mau terlibat di situ . Ada alasan sosiologis- karena waktu itu masyarakat memang sudah paa posisi untuk melakukan perlawanan tetapi salurannya mana ? Berkali-kali untuk mengubah persepsi bahwa partai itu jahat, di satu sisi kita berusaha untuk menepis anggapan itu , dan partai bisa menjadi alat perjuangan juga, kalau pemimpinya jujur, komitmen, pro rakyat . Syarat itu tercukupi di PDI. Walaupun tidak punya KTA PDI . Saya mengajak orang untuk pergi ke Jl. Diponegoro membangun perlawanan , karena syarat untuk melawan sebuah rezim itu dipunyai oleh PDI pada waktu itu.

Pertanyaaan : Simbol-simbol apa yang digunakan untuk dikomunikasikan agar gerakan perlawanan terhadap Orde Baru berkembang- simbol –simbol yang lain ?

Jawab : Yang pertama dalam konteks gerakan yang diperlukan adalah isu perlawanan, semua kelompok itu bahwa isu perlawanan terbagi dua, di satu sisi , anti Suharto, dua, dan di sisi lain anti ABRI (Militer). Dua isu ini menjadi menjadi bahan untuk melakukan agitasi melawan rezim Orba. Dalam pidoto "mimbar bebas" inilah isu perlawanan itu dirapikan, siapa yang melawan Suharto, siap yang melawan Orde baru,. Ayo gabung lebih dahulu, baru dirapikan – dan Megawati menyediakan fasilitas itu.

Saya pada waktu itu kordinator Posko Pemuda dan Mahasiswa . Jadi, penghubunglah, bagaimana agenda diskusi-diskusi , kita kompromikan dengan sikap DPP PDI Megawati, terus kita hasilkan aksi-aksi. Saya dulu memimpin aksi kain putihyang ditanda tangani sedpanjang 3 kilometer. Pada saat itu saya yang menjadi Kordinator lapangan (Korlap).

Lalu, aksi 1000 bunga , bawa aksi bunga itu untuk merangkul kelas menengah. Sepanjang Jl. Diponegoro itu kita bagi bunga-bunga dari UI sampai RS Corolus. Kenapa bunga ? Supaya memberi warna sejuk "flower revolution". Aksi ini bukan aksi kelas , tetapi aksi kemanusiaan karena pada waktu itu sudah masuk isu, bahwa kelompok "setan gundul ". Suharto sudah keluarkan isu tersebut. Hal itu untuk menghapus stigma tersebut - dengan melakukan aksi damai, dan kita juga pikirin untuk bisa bikin aksi-aksi yang bisa memwakili emua golongan . Dan memang memang pada saat itu ada kelompok-kelompok luar - yang berpandangan radikal--- istilahnya kita tabrakin-tabrakin saja ke polisi. Mengapa ? Ada alasannya, kelompok forkot, misalnya, karena dengan berani menabrakan badan ke polisi, maka akan naik pula popularitas gerkana, dan akan naik pula level kebernaian -- dan ini betul –betul untuk membentuk kematangan dalam gerakan.

Di samping faktor historis YPS, lingkaran dekat Bung Karno yang memotivasi untuk melakukan perlawanan.

Pertanyaan : Pada saat itu dikembangkan wacana dominasi bahwa PRD adalah aktor di balik peristiw a 27 Juli, bagaimana tanggapan Anda sebagai aktivis yang banyak terlibat dalam kegiatan tersebut ?

Jadi PRD ini , bukan partai, teman –teman yang menganut teori- dia bawa selalu isu-isu kesenjangan, yang pokoknya – kontradiksi – bedil – sepatu lars- mengambil simbol. Jangankan PRD , bencong , palcurpun kit rekrut. Tetapi harus ada yang ngurus - terlepas PRD bagian dari rezim --- saya tidak mau masuk ke dalam teori konspirasi--- belakangan terbukti tentang teori konspirasi ini berangkat dari buku ketika Beny kecewa terhadap Prabowo. Ketika Prabowo mau dipakai oleh Beny, ternyata Prabowo lebih Islam , Beny bikin Raker, Suharto takut itu, Beny kemudian menggalang kekuatan Prodem , Eros , Marsilam, Roch Basuki , Haryoto PS, basisnya katolik , memang basisnya Katolik sebagian . Tetapi di PDI beda, justeru kekuatan Katolik ada di Suryadi lewat sekjenya Nico Daryanto tetapi terjadi pertentangan CSIS--- banyak yang memelihara ke Gus Dur .

Pertanyaaan : Apakah dengan stigamtisasi PRD merupakan upaya untuk melakukan kanalisasi gerakan yang sedang tumbuh ?

Jawab Jadi Ada bebrapa Jenderal mengakui teori- teori konflik yang membangun stigmatisasi ---- dia mendorong gerakan untuk distigamtisasi. Peristiwa 27 Juli, PRD menjadi korban, PRD dikatakan sebagai motor 27 Juli, motor itu PRD komunis—supaya menjadi alasan untuk distigma komunis, dengan cap ini semua orang akan tiarap semua , malas di cap, kita bisa kecipratan air limbah , kita mau omong apa , sementara teman-teman melakukan penyebaran pamflet , agitasi massa, kawan miskin kota, kita harus akui juga kontribusi mereka pada peristiwa 27 Juli- pada tahun 98 baru tahu adanya faksi-faksi.

Usmar Ismail (Aktivis FKMSJ) - begitu ada PRD, waktu itu ada yang menawarkan suatu organ yang diberi nama GARIS- Gerakan rakyat Sosialis" ya modelnya akan di PRDkan juga--- mau diambil ngak gerakan ini --- saya berpikir ngak --- memang 27 juli --- PRD korban--- Cuma ada kekuatan nasionalis yang dirugikan --- basis gerakan itu dari kawan-kawan nasionalis --- maka di dorong PRD.
(Bob) ciri khas PRD --- setor massa – istilahnya "inteletual proletar/radikalisasi---- persitiwa 27 juli bangkitnya kaum nasionalis sukarnois, editor 95 menulis "bangkitnya kaum nasionalis", Eros dalam majalah detil "suara ku lebih bergema dalam kubur,

Wawancara dengan EKKY

Pertanyaan :

Jawab : Harapan masyarakat pada waktu itu menginginkan adanya perubahan , dan kebetulan , kebetulan nih persitiwanya mengenai PDI dimana momentum Megawati menjadi korban pada kasus Suryadi . Nah, peristiwa itu yang mendorong teman-teman yang menempatkan Megawati sebagai simbal perlawanan, dibanding dengan Sri Bintang Pamungkas ternyata gagal.

Pertanyaan : Mega sebagai magnet, apa yang menjadi penyebab sosok Megawati menjadi magnet perlawanan ?

Jawab : Gen politik mereka , jangan lupa, urat sejarah partai marhaen , ya PNI partai bapaknya – Megawati mewarisi kharisma seperi itu masih sangat kuat, bahwa teman-teman pada saat itu mendorong Mega itu dengan sadar makanya sampai beberapa kawan dulu membuta selebaran /stiker " Megawati For Presiden /striker kecil. PDI bisa besar karena Sukarno--- kita serahkan almamater sebagai perwujudan kita dlam mendorong perubahan.

Pertanyaan : Bagaimana interkasi –interaksi gerakan dengan teman-teman ?

Jawab : Pada saat itu sangat represif, kita untuk mengekpresikan politik dan lain-lain dan lain-lain. Itu kan harus .... peristiwa yang tidak diperkirakan muncuil, itu kan bagi kita bisa menjadi momen, kalau disuruh untuk melakukan mobilisasi massa seperti itu tidak sanggup, apalagi menyuruh orang menginap berminggu-minggu, pasti tidak sanggup, itu fakta, artinya itu timbul dari seseorang Mega karena ada Sukarno, kalau kita bandingkan dengan Sri Bintang tidak mampu/ materinya tidak jelas.

Peryanyaan : Pada peristiwa wacana dominan yang dikembangkan adalah PRD ?

Jawab : Adanya peranan media yang besar yang mengekspos hal tersebut. Kalau secara organisasi tidak mendapat tempat/ di luar panggung/ pada saat itu kelompok nasionalis yang dominan.

Pertanyaan: Apakah ada pengaturan dalam mimbar bebas ?

Jawab : Ada, salah satu yang mengatur panggung (Suparlan)—kita mengususlkan pada teman-teman (Foko Pemuda Dan Mahasiswa) Posko yang non partai adalah kami, yan g lain tidak ada, yang lain justeru dari daerah, seperti Jateng, Jatim, Kalimantan dan sebagainya, Indonesia bagian Timur.

Pertanyaan : Pada saat interaksi , apakah juga mengundang teman-teman daearah untuk berpartisiaspi terhadap mimbar bebas ?

Jawab : Pada saat panggung demokrasi rencana untuk mengundang Gus Dur, Iwan Fals , Mas Guntur membuat peti mati, tapi tidak di arahkan ke Jl Diponegoro. Tapi itu upaya-upaya teman-teman untuk memasukan dalam mimbar bebas itu, panggung demokrasi. Nah, sebelum niat itu terjadi keburu terjadi penyerangan kantor DPP PDI yang dikenal " dengan peristiwa 27 Juli", karena hari jumat mau mengadakan sholat jumat bersama tetapi tidak di perbolehkan.

Pertanyaan : Setelah peristiwa 27 Juli pada tiarap semua ?

Jawab : Untuk sementara ya, membangkitkan roh penawaran tanggal 28 Oktober , aksi paling cepat. Nah, setelah mulai tambah lagi, percikan-percikan kecil tidak heroik lagi. Peristiw a28 Oktober pasca 27 juli---sampai 28 Oktober gerakan dalam keadaa mati.

Pertanyaan : Apakah anda setuju, bahwa peristiwa 27 juli merupakan kebangkitan kaum nasionalis?

Jawab : Sebetulnya semangat nasionalisme kekuatan fundamental nasionalis muncul semua, baik yang terbuka maupun tertutup, dia tidak menyetor badan, tetapi mereka mengintruksikan massa, mengirimkan kader untuk membantu perjuangan. Pada malam hari ada orang tua datang, dan mengatakan jangan mengatakan pada siapa-siapa yang dik, "Saya ke sini Cuma mau cerita tentang semangat bagaimana heroismenya -- tahun 1945 dan lahirnya partai PNI.... Artinya mereka ingin perubahan.

Pertanyaan : Bagamana kelompok lain, mereka yang mendukung aski tetapi tidak mendapat temapt di Panggung Demokrasi.

Jawab : Mereka biasanya membuat aksi tersendiri di luar kantor DPP PDI, seperti Sukmawati yang menggelar orasi dekat Megaria.

Peristiwa Gambir itu menambah spirit untuk melakukan konsolidasi politik. Massa itu harus ada warming up—habis dipukul kemudian kan tidak mungkin duduk, diskusi di posko itu, tanpa ada gerakan politik. Ada kebiasaan teman-teman mahasiswa itu selalau membuat ruang-ruang kecil dengan memanfaatkan kevakuman. Berdirinya "pangung demokrasi" karena ada kesepakatan dari hasil diskusi, ya mengalir, mengobrol lalu timbul untuk membuat panggung demokrasi, juga dimaksudkan untuk bagian pendidikan politik para pendukung Megawati yang ada di sekitar kantor DPP PDI. makanya pada saat itu kami selalu membagi peran.

Pertnyaan : Pada waktu penyerbuan, sudah ada khabar tentang rancana itu ?

Jawab : Malamnya tidak tahu, tetapi terdengar gosip memang ada penyerbuan, sampai terdengar komitmen, kalau mati bareng-bareng. Kalau saya sendiri selamat dan pada saat itu saya tidak ditemapt, mengantar pulang salah satu pengurus PDI--- karena keluar itu membuat saya selamat, saya tidak menyangka akan secepat itu, bahwa ada rencana penyerangan oleh PDI Suryadi sudah terdengar sebelumnya. Begitu saya balik semua jalur sudaj ditutup, terkhir mau lewat di Jl. Surabaya itupun tidak tembus . Kalau masuk ke dalam kantor Dpp PDI pasti mati.

Sore hari sebelum penyerangan, di depan kantor DPP di Jl. Diponegaro terlihat pekerja yang memperbaiki saluran air (conblok). Tapi anehnya conblok, seperti di tata dijadikan untuk menyerang ke dalam , batu-batu itu yang dipakai untuk menyambit ke dalam ---- teman-teman di dalam tidak punya amunisi--- mereka menggunakan batu dari luar.

Pertanyaan : bagaimana harapan aadanya perubahan dengan melihat kondisi PDIP sekarang ?

Jawab : Jauh, harus lahir satu partai pelopor yang mendorong semnagat kepeloporan—adanya PDIP – harapan itu masih jauh karena sempat ada diskusi-diskusi kecil dan pendekatan tentang komposisi. Memang kelemahan kami ketika di tanya, kalian mau posisi dimana ?Waktu itu diminta untuk membantu pemuda dan mahasiswa di DPP. Saya ngak mau karena maasih marhaen tidak mau menjadi partisan partai politik.

Pertanyaan: Apakah ada keinginan untuk membuka sejlas-jelasnya kasus 27 juli ?

Jawab : Kalau pendektan hukum jelas agak sulit untuk diselesaikan, pendekatan politik lebih tepat, yaitu adanya keinginan ISLAH--- peristiwa masa depan lebih berat dari masa lalu, sejarah butuh ketrbukaan , bahwa ada peristiwa 27 memang suatu yang tidak terelakan. Pemikiran untuk fokus ke depan, kalau catatan seperti ini yang perlu kita selesaikan tapi kalau terus kita mengorek luka bangsa ini yang untuk menghadapi masa depan. Sayangnya, pemikiran ini tidak datang dari PDIP, bagaimana mereka membangun komunikasi politik lebih dulu, tetapi bukan berarti memberi jatah , atau fulus atau jabatan dalam kepengurusan partau atau apalah, tetapi teman-teman 27 Juli/124 sebagai korban dari suatu persitiwa hendaknya dibangun suatu komunikasi politik . Korban dipenjara--- itu yang harus dibangun--- orang-orng ini yang harus di ajak **ISLAH.** Partai harus terbuka, kondisi politik hari ini, maka langkah politik – ISLAH, misalnya ada beberpa nama yang tersebut terlibat, misalnya, kalau sekerang mereka kan menjalankan perintah panglima tertinggi untuk mengamankan juga reputasi panglima tertinggi maka seluruh jajaran ABRI pada saat itu aktor-aktornya untuk membuka kasus tersebut.

Apakah ini yang kita cari, bahwa peristiwa 27 Juli , ada upaya represif orde baru, maka PDI yang diminta Megawati untuk memimpin oleh masyarakat--- ini artinya juga membuka diri --- tanpa ada persitiwa 27 juli tida ada PDIP.

Pertanyaan : Bagimana dengan uang tali kasih ?

Hal itu sangat subyektif , banyak aktivis lain, uapaya dami dari kedua belah pihak, pelaku dengan pelaku, pelaku dengan korban . Tetapi kan bukan itu, komunikasi poltik yang harus dibangun--- kita bukan mau transaksi--- teman-teman dapatnya berapa sih ? misalnya menyebut angka 30 juta--- apa itu perjuangan selama ini---bagaimana yang mati.

Proses polittik bukan proses yang tunggal---98 kalau tidak tempat latihan yang namanya 27 juli yang tidak akan mengkristal--- berbeda elemn 98--- yang buat 98 itu Forkot, FKSMJ, Forum Jakarta, Famred, Forbes. Peristiwa 98 berawal dari 27 juli. @7 juli harus ditulis jujur agar bangsa ini tidak menjadi pesakitan untuk mengkorek-korek masa lalu, bahwa peristiwa itu terjadi agar tidak terulang kembali--- untuk lebih beradab --- harus merefleksikan peristiwa 27 juli.

Membentuk posko gotong royong

<u>Wawancara Karyono</u>

Pertanyaaan : Apa yang menjadi motif anda bergabung dalam PDI Megawati , padahal bukan aktivis PDI ?

Jawab : Pada saat itu posisi Megawati sudah memenangkan KLB di Surabaya , tetapi kemenangan Mega dianggap sebagai ancaman besar bagi rezim Soeharto pada waktu itu. Nah, dari sisi saya dan kawan-kawan ketika Megawati di anaiaya oleh rezim Orde Baru, sehingga terjadi peristiwa berdarah 27 juli 1996, dengan

pengambil alihan kator DPP PDI , seolah rezim Orde Baru mememantahkah hasil KLB.

Motivasi dengan teman-teman menjadikan itu sebagai momentum, di mana kami memandang Megawati sebagai simbol perlawanan Orde baru yang paling efektif untuk digunakan untuk menjatuhkan rezim Suharto pada saat itu. Jadi kita ikut mendorong agar Megawati ikut melakukan perlawanan terhadap rezim Orba pada waktu itu, tetapi Megawati menempuh jalur konstitusi –jalur hukum, dan kami melihat Megawati orang yang taat hukum. Nah itu sisi kelebihan mbak Mega pada waktu itu, apapu ketika dia di anaiaya secara politik, dia tetap menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan. Nah, pada saat itu, sebelumnya sudah melakukan perlawanan terhadap Orde Baru sebelum peristiwa 96, bahkan sebelum tahun 93, kita kan melakukan konsolidasi sebelumnya, saya waktu itu aktif di GMNI melihat tindakan represif yang dilakukan rezim Orde Baru. Pada saat itu konsolidasi bukan sebatas lintas antar mahasiswa tetapi juga lintas dengan organisasi kemasyarakat yang lain. Pada saat itu kita berada pada kelompok Cipayung plus, sampai pada 98. Tahun 96, merupakan titik awal pergerakan untuk menumbangkan Orde Baru yang merupakan momentum akumulasi kekecewaan masyarakat . Jadi motivasi kita pada saat bergabung dalam kasus Megawati adalah ini momentum, untuk membangun gerakan yang lebih besar, memperluas eskalasi perlawanan dari berbagai elemen serta meluas ke seluruh daerah .

Pertanyaaan : Dipersepsikan bahwa Megawati kurang pengalaman dalam politik, apakah ada pengaruh Sukarno ?

Kalau saya oribadi double, artinya ada beberapa alasan , di samping sebagai anak Sukarno, juga sebagai simbol perlawanan menurut saya sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi gerakan mahaiswa maupun masyarakat, LSM dan lain-lain dalam melawan rezim. Tetapi karena saya berangkat dari GMNI maka ada hubungan secara ideologis dengan Sukarno, terlepas pengalaman Megawati yang minim dalam pergerakan politik, tetapi pada saat itu yang kita perlukan adalah simbol perlawanan dan itu ada di Megawati pada saat itu. Kenapa harus Mega, inilah terkait dengan nama besar Bung Karno dibelakang Mega. Nah yang bisa menghadapi rezim Orba adalah nama besar, orang besar, Mega memiliki kharisma itu sebagai anak proklamator. Mega mempunyai magnet bagi arus besar pergerakan. Pergerakan kan banyak tapi masih parsial, masih sporadis, ada kelompok ini bergerak, ada kelompok B bergerak dan seterusnya. Perlawanan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai simbol kan banyak yang gagal, yang bergarak di kepung. Nah, perlu ada simbol sekaligus magnet perlawanan – perekat pergerakan, dengan menggunakan Megawati sebagai simbol untuk perlawanan terhadap Orde baru.

Jawab : Apa yang menjadi keyakinan bahwa Sukarno bisa menjadi magnet pergerakan yang notabene berada di belakang Megawati ?

Keyakinan pada saat itu pada sosok Sukarno, tidak hanya rakyat Indonesia, tapi juga pemimpin dunia, itu keyakinan ideologis saya, dan dari literatur yang ada Sukarno di akui kepemimpinanya. Rakyat Indonesia sebagian besar menggumi Bung Karno, dan kebiasaan masyarakat Indonesia, nama besar itu pasti akan berpengaruh paa anaknya.Karena di akui dalam internasional amka kiprah anaknya pun tidak terlepas dari dari sorotan dunia, peristiwa 27 juli tidak luput dari hal itu.

Pertanyaan : Bagaimana interaksi yang dilakukan dalam melakukan pergerakan ?

Jawab : Sebelum peristiwa 27 juli, sebenarnya pergerakan sudah mulai mengkristal dari berbagai kalangan melawan rezim Orba. Maka ketika muncul Megawati yang di anaiaya Orde Baru, maka saya berpikir tidak sulit untuk menggalang kekuatan-kekuatan lain keluar pada organisasi kami (GMNI) pada saat itu. Pada prinsipnya

sudah terjadi akumulasi kekecewaan, Cuma rezim orba dikenal sangat represif dan otoriter sehingga perlawanan-perlawanan teman-teman itu mudah dipatahkan. Jadi ketika muncul kasus Mega, kita langsung konsolidasi, kita mengajaknya bahwa ini bukan kasus PDI tetapi ini kita jadikan momentum untuk menaikan tensi gerakan dan melahirkan eskalasi dan memperluas gerakan dalam melawan rezim Orba. (membangun identitas –bahasa perlawanan)

: Pihak PDI Suryadi ksus 27 Juli adalah biasa , bagaimana pendapat Anda ?
Ya, bagi yang kontra PDI itu menggagap biasa, ya wajar, tetapi yang tidak bisa kita lupakan adalah adanya artikulasi kekecewaan terhadap rezim sudah mengkristal, ketemu momentumnya 27 juli itu, yang kemudian meledak dalam spektrum politik yang lebih luas. Itu yang tidak di sadari . Kalau di lihat dalam spektrum partai ya itu biasa. Misalnya, PPP tidak berkembang luas karena tidak adanya tokoh yang besar. Megawati diangap sebagai representasi bapaknya yang dalam sejarah menjadi korban Orde Baru, maka adanya kasus Megawati menjadi momentum untuk melakukan pergerakan perunahan yang lebih besar. Seadainya pada saat itu kasus PDI bukan Megawati maka tidak akan terjadi eskalasi perlawanan yang luas,

<u>Wawancara Peter Kasenda</u>

Pertanyaan : Dalam peristiwa 27 Juli muncul acana dominan yang muncul, misalnya banyaknya korban yang mati padahal laporan Komnas Ham hanya 5, dari sisi gerakan pada saat itu yang paling berperan adalah PRD bahwa peristiwa 27 Juli dalam persepsi kita saat ini tidak lepas dari PRD sebagai kambing hitam, padahal aktivis-aktivis yang lain terlibat. Sebagai

Jawab : Di asumsikan peran yang dimainkan dari kebanyakan teman-teman PRD, tapi yang menarik kalau kita lihat PRD hal ini dikaitkan dengan orasi yang di Diponegoro, kalau dilihat dari berdirinya PRD pada bulan yang sama dengan peristiwa itu, Cuma tanggalnya, mereka di LBH, tiba-tiba mereka ikut di orasi kemudian muncul peristiwa itu. Jadi peran di Fordem memang dominan, maka tuduhan kan . PRD di katakan komunis, padahal tuduhan itu tidak terbukti. Tapi yang kita lihat dari gerakan prodem itu surut. Tiba-tiba eskalasi gerakan yang sedang naik, tapi dengan adanya isu “komunis” maka aktivitas gerakan pada tiarap semua. Yang menarik adalah analisanya Samsul Hadi almarhum (Doktor politik UI), itu akhirnya Gus Dur bergandengan tangan dengan Tutut. Gus Dur kan bilang Tutut itu pemimpin masa depan. Beni tidak mengiginkan Tutut mengantikan Suharto. Saya ngobrol dengan teman-teman PRD, dan ini yang menarik pernyataan mereka bahwa PDI tidak akan fight, maka kita tunggangin aja.

Pertanyaan : Ada grand design PRD ini dipelihara tidak ?

Jawab : Masalah grand design ini kita kaitkan dengan Sofyan Wanandi, peristiwa Bom di tanah Abang itu dikaitkan dengan bahwa Sofyan Wanandi dengan PRD ada hubungan. Tetapi kita kan ngak tahu hubungan itu seperti apa ? Soalnya gini, sya pernah ngobrol sama Suryadi juga , dia tidak tahu operasi 27 Juli itu, yang tahu justeru Buttu Hutapea.

Wawancara dengan Pudjo Nugroho

Di kantor DPP PDI, kekuatan pendukung utama adalah kekuatan Sukarno, makin hari kekuatan ini makin membesar, sampai pada kemudian LSM dan ormas masuk setelah 2 minggu mimbar bebas berjalan. Dan hebatnya, begitu peristiwa Gambir. Mengadakan panggung demokrasi, di depan itu dipasang kotak amal. Itu dibuka setiap hari hasilnya puluhan juta, uang itu untuk membiayai kegiatan di panggung demokrasi. Di situ gotong royongnya, dari gerakan nurani, kemudian ada magnet di situ, berduyun-duyun kesitu yang tidak ada waktu masukin dana ke kotak, di belakang itu dibangun dapur umum, dapur umum masak dari mana? Ambil duit dari kotak itu. Ada yang butuh transport mengambil dari situ. Yang bisa kotak hanya satu orang, namanya Gusti, bendaharanya wakilnya Ewal, . lapisan pertama, orang sukarno, lapisan kedua Ormas dan LSM, lapisan ketiga, elite-elite yang punya kepentingan yang bermain.

Apa pengabdian yang diharapkan dari lapisan sukarno ini ?

Dalam mimbar bebas, tidak ada yang saling berebut untuk orasi atau pidato, dan tidak ada yang menyitir kata-kata Sukarno. Lapisan pertama yang berani pidato, lapisan kedua tidak ada yang berani masuk. PRD tidak ada yang berani orasi. Saya bisa saja kecolongan kalau orang PRD yang mengaku melakukan orasi disitu.Ya nebeng kelompok sukarno bisa dari kelompok kanan yang pro sukarno. Ada yang sadar dengan kondisi politik saat itu, dan hanya emosional itu membaur. Yang sadar ikut bermain, di dalam maupun di luar mimbar bebas. Yang sadar di samping punya kesadaran untuk mengadakan perlawanan terhadap Suharto, juga mempunyai garis ideology yang jelas, sedang mereka yang emosional, kesadaran hanya politik balas dendam pada rezim, mereka tidak suka politik yang dictator. Yang emosional ini yang tidak bisa dikendalikan. Sedang yang sadar, mempunyai kesadaran ideology- bahwa ini lah saatnya-momentum—*samenbundeling revolusionare krachten*.

Wawancara
Sandra /aktivis perempuan (27 Juli 2017)

Pertanyaan : Bagaimana aktivitas yand anda lakukan pada waktu mimbar bebas ?
Jawab : Ya kalau waktu itu kan gini, terus terang aja aktivitas banyak di dapur umum, terus aktivitas ada di Jakarta Pusat , saya mengikuti si david—ikut mimbar bebas. Saya perhatikan Sabam Sirait, Aberson, orng –orang PDI di Lampung, saya mengikuti dari mereka-mereka. Kalau ada asupan-asupan untuk bahan di dapur ya kita beli—bahan kebutuhan pokok, ya pokoknya kumpul di situ terus.
Sempat lho dicurigai jadi intel, sampai saya ngak boleh mengikuti apa-apa karena suami saya seorng polisi. Tapi, mereka baru menyadari kalau saya bukan intel---sampai saya di tangkap.
Waktu polisi tanya, “kenapa suka melihat spanduk-spanduk yang merah? Ya gimana ya, saya suka aja, sukanya apa ? ya suka saja saya lihat.
“Memang ngapain kumpul-kumpul yang dilarang itu ?” Yang melarang siapa pak, kumpul seperti itu ?
Lho, itu kan sudah dilarang?

Jawaban saya ada di undang-undang pasal 28 UUD, berseringkat dan berkumpul mengeluarkan pemdapat adalah hak warga negara – kan aspirasi ada di sini.
Tidak ada undang-undang di sini ! Anda PKI !
Lho yang PKI siapa di sini, Pancasila ngak ada, UU ngak ada, Bapak di sini biangnya PKI, bukan saya pak !
"Dasar Gerwani,! Wah habis ! ini sudah ngak beres.

Pertanyaan : Bagaimana anda waktu testimoni di luar negeri ?

Jawab : Sampai di Amsterdam kita disambut luar biasa, di sambut dengan bunga , mau masuk ke Porto, portugal (belim aa hubungan diplomatik) langsung di sambut Mr Barbedo, di suruh ganti nama, jangan naam sandra, ganti aja nama noni karena intelijen mengikuti---awalnya ngak bisa masuk--- sampai hilang satu koper (itu bahu , pidato megawati, soevenir) sudah di acak-acak oleh intel kita (Indonesia).
Seminggu di portugal baru ketemu itu kopor---saya sampai dibeliin sama Ramos Horta. Aktivis datang dari berbagai penjuru dunia.
Megawati itu ngak mikir , saya bawain surat-surat negara-negara Jepang /Amerika.
Megawati ditungguin saya datang dari luar negeri jam 1 Malam, saya menghadap Megawati, kita ngobrol berduaan di rumahnya (kog jadi begitu ya sekarang—koq jahat banget deh (sambil menangis).
Gue di tanah air mau buang air aja susah, di sini di luar negeri penyambutannya bagus. Tapi aku ngak bakalan menjual negara Indonesia, aku tetap anak Indonesia.

Pertanyaaan: Pada saat Mimbar bebas , siapa yang membantu logistik ?

Jawab : Wah banyak—China-China banyak, siapa saja, duit juga banyak, duit dibawa sama orang nya Suryadi, wah kurang ajar tu anak (Ewal). Gue pikir dia orang PDI, Wal sini lu kan bawa tas gede, lu masukin amplop ke tas, terus dimasukin ewal ke tas ransel.
Ewal bilang begini, "gue permisi dulu ya !' Ee. Ngak tahunya uang itu dibawa Ewal pergi, dan ternyata ketahuan bahwa dia intel. Gue curiga ketika membangunkan ewal yang lagi tidur ? Wal bangun ! Eamngnya diserang !. Saya pikir jawabanya begini.
Waktu di serang Ewal ada di dalam tetapi dia tenang aja.
Pas di kantor polisi ketemu Ewal, dia sedang ngrokok. Anjing lu !, Wal lu koq disini (ewal melengos). Kurang ajar ya lu .
Termasuk perempuan yang dari Ambon, ternyata perempuan itu intel yang nongkrong di Posko Jatim, parah !
Sem,ua yang datang di siti (Diponegaro) tidak masalah , hantu pun akan diterima kalau mau sama-sama berjuang.
Di kantor Polisi, sya di suruh telanjang bulat, disuruh mondar-mandir. Sandra jangan dimasukin sel dulu .

PRD

Pertanyaan : PRD, menjadi dalang kerusuhan, bagaimana tangapan Anda ?

Jawab : Ngak sih, PRD hanya mereka show doang, karena apa--- saya yang bebasin, dan saya juga saksinya, kalau dibilang hanya lemparan aja aja Bapaknya Budiman datang ke rumah saya di Pondok Gede, cerita begini-begitu, Cuma dia alirannya seperti Rusia begitu, saya di Belanda saya coba telpon orang-orang PRD--- ngak langsung diangkat--- jawabannya pakai mesin---dia dengar sendiri---semua rata-rata begitu, mereka itupermainnya seperti gaya-gaya PKI, ya hebat ! memang mereka punya gaya .

Pertanyaan : Pada saat mimbar bebas, bagaiman peranan mereka itu ?

Jawab : Ngak ada peranan, yang bicara-bicara di panggung mimbar bebas orang PDI semua. Budiman tidak pernah bicara di mimbar bebas—Cuma gerakan-gerakan mereka ada di luar . (Pudjo)—PRD itu banyak mengecilkna peranan perjuangan teman-teman PDI, PRD itu besar karena kasus 27 Juli, sengaja elemen yang dibesarkan oleh penguasa saat itu—nyatanya ikut pemilu juga ngak ada apa-apanya)

Orang pada saat itu ngeri dengar kayta PRD pokoknya ngeri banget ya ? Ngak ada POSKO /mereka diluar/ mereka seperti ekslusif sendiri, yang saya lihat ini gerkan PRD apa ya ? ini gerakan PRD. Ini anak-anak bau kencur di bawa ke Rusia--- memang dia mengekstrimkan dirinya sendiri .
(Pudjo—PRD adalah bentukan dari orang-orang PSI—kalau bukan sosdem siapa lagi kalau bukan syarir--- Hariman Siregar dan dipelihara militer.

Pertanyaan : Bagaimana hubungan dengan Megawati sampai tidak ada hubungan sama sekali ?
Jawab : Ya dulu akrab sekali, ngak tahu kenapa tiba-tiba berubah --- ini gara-gara di Gunuing kidul, akau ingat banget—anak nabgis ingin foto sama mega, tetapi anak itu mau foto sama aku, Mega bilang, itu mau foto sama kamu ! habis itu, saya ngak diajak ke daerah-daerah sama mega.
Pertanyaan : Mengapa kasus 27 juli tidak bisa selesai ?
Ini Komnas HAM , minta ketua umum dari PDIP- DPP, melaporkan ke Komnas HAM - kan ini masalah pelanggaran HAM yang Jokowi minta . Dan saya juga minta dengan Jokowi. Tapi ini menyangkut Partai, Kemenhunkam dulu Yasonal – bilang tidak ada pelanggaran , kan kurang ajar itu ! Apa dasarnya tidak ada pelanggaran HAM. Kita kan menanyakan kasus kita ? di Jawab sama Yasona) tidak ada pelanggaran . Itu kan rekayasa semua, saya mau tanya jamanya Mega, dia jadi presiden dia tidak adapat menyelesaikan , okelh mereka tidak bisa menyelesaikan tapi jangan memecah belah kita di Partai yang menjadikan korban teman-teman sudah [pada tua, masak ngak mau dewasa sih !
Pertanyaan : Misalnya gini, setelah apakah ngak ada suatu keinginan, misalnya dari DPP di akomodir, sudah kalian , cabang-abang .
Jawab : aku 25 tahun , 5 periode. Jaga partai doang.
Jaga partai kan gelurain duit ? Pokoknya kalau kita ngak sebarin duit ke partai , nomor itu, nomor ngak jadi. Nomonya nomor peci terus.
Pertanyaan : Pernah mencalonkan ?
Jawab : Ya sudah sering --- kalau ada TK kita masih no: 3---2009 no: 7—no.9, gila—memang itu diminta uang mahar 50 juta saya ngak mau, bagaimana mereka menilai perjuangan kita, kalau ngak mau bayar sekarang tahun depan tidak boleh ngikut .
Pertanyaan : Waktu diminta tahun 2009 ?
Jawab : ya sudah kalau ngak boleh ingikut lagi, yang angak apa-apa, akhirnya ngak dikasih kabar tentang pencalegan/ trsu ditarik sama Hanura .
Pertayaan : kalau dilihat dari sisi perjuangan dulu, sekaang tinggal panen ? Apalagi PDI partau berkuasa, tinggal petik saja ?
Boro-boro, bila perlu , megawati itu anak2 korban 27 juli tidak dikasih kesempatan pekerjaan, bagaimana megawati kasih pekerjaan kita minta tolong, pada saat itu kering banget dipanggil untuk persidangan koneksitas hasilnya diluar semua, ngak ada terjadi apa-apa--- kita minta tolong sama megawati, sebelum penyerbuan , 1 hari sebelum penyerangan , megawati diminta di kasih tahu bahwa kan ada penyerangan oleh salah satu jenderal. Jenderal siapa ? Hanya untuk minta untuk menjadi saksi juga, enak aja dia gebrak-gebrak meja --- Stop kalian masuk PDI tidak saya suruh, kalian dukung saya tidak saya suruh , kalian masuk penjara tidak saya suruh, kalian datang ke Diponegoro saya tidak saya suruh--- Mau omong apa ? itu pemimpin, jelas aja jidat Megawati dicolok sama si Resmol. Kita pendukung Sukarno, bukan membela anaknya koq, ajarannya yang kita ikutin bukan anaknya. Saya sudah , ini anak-anak

124 itu bedha lho, tapi sudah banyak yang mengambil jati dirinya maing-masing, ada yang masih harapkan apatkan recehan.

Tanggal 16 September 2007

Pertanyaan : Waktu di periksa kemudian dituduh PKI itu, reaksi mbak Sandra bagaimana ?

Jawab : Saya tenang aja, siapa yang PKI, dari unsur-unsur seperti itu mengapa mereka mengarahkan ke PKI, jadi saya bilang kenapa saya, di katai Gerwani ? Kenapa mbak melawan kami ? Kenapa kalian menolong teman-teman kalian ? Pertanyaaan, kenapa menolong teman-teman yang sudah terluka parah ? Itu kan ngak etis bertanya begitu. Kita ini manusia biasa, kalau lihat orang lain terluka aja pasti kita akan menolong hati kita ngak tega, apalagi itu teman-teman , tapi petugas itu bertanya pakai kenapa ya saya jawab, bahwa jawaban saya ada di butir 2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Oh, itu bukan jawaban yang benar di sini tidak ada pancasila, kata petugas. Itu di instansi Polda dan mengatakan tidak ada Pancasila. Wah, mulai geram saya . Ini kepolisian lho, ini Polda koq ngak ada Pancasila ? Yang PKI ini sebenarnya siapa ? Ganti lagi, mereka puter lagi dengan pemeriksa lain. Lain pertanyaan lain lagi. Di ganti dengan perwira pemeriksa. Kenapa saudara datang ke tempat yang rame-rame kan itu sudah dilarang, tempat perkumpulan yang sudah dilarang, tulisan-tulisan yang merah-merah itu isinya apa? Ya isinya ngak jauh “PDI Pasti Menang, “Mega Pasti Menang “ “Kembalikan DPP itu kembali ke Megawati “dan segala macam. Iya kenapa kamu kumpul-kumpul ke tempat yang dilarang ? Yang ngarang siapa Pak ? Itu mereka kan yang pidato mengeluarkan aspirasi mereka, trus saya bilang jawaban ada di UUD 45 pasal 28 , berserikat dan berkumpul dijamin undang-undang. Oh, disini tidak ada Undang-Undang. Woh lebih-lebih parah lagi, loh kenapa tidak ada. Bapak bilang Pancasila tidak ada, UUD ngak ada. Ini apa sih pak ! Ini kan kantor pak ! Ini korps, yang Gerwani, PKI itu siapa pak ? Berarti sarangnya ada di sini, saya bilang sama petugas pemeriksa. Bapak jangan main-main. Ngak ada itu UUD dan Pancasila itu, ngak ada undang-undang, kata petugas. Mereka berbicara seperti, saya makin yakin ini ngak benar. Ini menyudutkan Megawati benar. Saya bilang, Megawati bukan PKI. Ya jawaban-jawaban itu, yang menyudutkan Megawati PKI sudah saya saya klarifikasi, tidak mungkin anak seorang Sukarno menjadi PKI. Dia bukan PKI, sekali lagi saya bilang pada petugas pemeriksa. Jadi mereka pada diam, marah, asbak lah mulai berterbangan. Kalau sekarang begini, seolah-olah pembelaan kita tidak ada artinya.

Pertanyaaan: Pada waktu pemeriksaan apakah di damping pengacara ?

Jawab : Tidak ada pembela , tidak ada pengacara waktu di BAP .
Kalau saya sudah diperiksa dengan pertanyaan itu saya sudah siap, jangan samapi belok kiri, nbelok kanan, karena kalau kita tidak konsisten, jawaban kita akan dikembangkan lagi. dan trus saya mengambil sikap tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya keluarga. Sebab, kalau saya mengingat mereka semua, kacau semua jawaban saya. Pemeriksan itu benar-benar bertubi-tubi. Pemeriksaan itu terlalu banyak, seperti obat nyamuk, kan hanya itu-itu aja pertanyaannya. Ya, itu tujuannya supaya saya jadi PKI. Pemeriksaan dari siang sampai malam, nanti ada panggil lagi, ada berita baru, panggil lagi untuk diperiksa sampai dari malam sampai pagi sampai ngatuk2, saya jaga ngantuk, kalau ngantuk bisa rusuh, maka saya tidak mau ditawarin makan, kalau makan enak trus tidur. Kopi aja sama rokok saya mau.

Pertanyaan : Waktu disuruh telanjang itu bagaimana ?
Waktu ditelanjangi itu, ketika awal-awal diperiksa saya kan dibawa, mereka beranggapan saya bagian keluarga Megawati. Padahal saya hanya teman dekatnya, saya teman dekat dengan mas guruh. Saya tahu dihati mereka (petugas) bertolak belakang dengan hati mereka. Pada saat saya diperiksa. Saudari ikut membunuh ?

Ikut membuat kekerasan? Ikut membakar ? Saudara ikut melawan ? Tidak saya tidak ikut semua. Ini pemeriksaan di ruangan yang menghadap ke lapangan. Saya melihat lapangan yang pakai baju belang-belang, kaos belang2, itu yang mengeluarkan parang di dan diputar di kantor Diponegoro dan teriak bunuh PKI-PKI yang di dalam, saya langsung ingat orang itu, itu orang koq ada di Polda sini. Saya langsung Tanya pada komandan penyidik, itu yang belang-belang itu siapa ? Yang mana ? Tanya komandan penyidik. Itu, tu yang berkumpul dilapangan itu. Mereka lihat, dan bilang Oh itu anggota kami. Ya orang itu yang bawa parang membunuhi kami, putar –putar parang. Wah ini orang sudah tahu ni ! Bon-bon ! kata petugas penyidik. Saya ngak ngerti bon itu apa ? Memang ngak ngerti apa2 tadinya. Ternyata bon itu dimasukin sel. Wah kacau juga nih, saya dimasukin sel ! Nah waktu mau di sel itu, di suruh buka baju semua tanpa sehelai benangpun nempel. Di suruh mondar-mandir, jalan ke sana kemari, sebanyak 3 kali, tapi kan panjang ruangan itu. Di tonton polisi, polwan sambil menangis jalan. Kenapa saya harus ditelanjangi seperti ini ? Diam, buka baju semuanya , ? kata petugas dengan nada keras. Karena dalam kondisi tekanan, saya buka baju semuanya.

Pertanyaan : Bagaimana persaaan pada saat itu ?

Jawab : Yah, pada saat sudah merasa tidak ada harga diri lagi. Apalgi Polwan yang meminta membuka baju itu saya pelototin, sambil saya katakan ? “Perempuan, bagaimana harga diri kamu sebagai perempuan harus telanjang seperti ini. Akhirnya sudah 3 kali balik, pakai baju lagi . Saya mau di bawa sel kan. Waktu, di depan sel mau masuk, saya tonjok itu polwannya. E.. kenapa kamu nonjok saya? Teriak Polwan. Hei… kita selesaiakan urusan kita kalau sudah selesai, kita tanding ke luar ? kata Sandra. Kamu copot itu baju dinas kamu ? Kamu sadar ngak kalau kamu perempuan ?(Kalau ngak salah namanya Charlote Tahuju) , saya ingat banget itu. Waduh, kelakuan polisis, itu saya malu, sampai di sel saya menangis terus, membayangin telanjang bulat itu dan jalan mandar mandiri. Dengan adanya penyiksaan-penyiksaan itu, saya sampai keguguran dalam tahanan. Saya terima itu semua. Itu menjadi pengalaman saya.

Pertanyaan : Waktu pemeriksaaan yang begitu keras, menyesal ngak ?

Jawab : Pada saat itu , kami tidak ada penyesalan, kita dukung Megawati benar-benar , Megawati , tumpah darah hati ini untuk Megawati. Kita semua Mega, Mega, tidak keluarga kami, hati kami membela mega. Tapi kalau jadinya seperti ini. Ya menyesal sih ngak, cukup menjadi bagian dari pengalaman hidup, biar bisa bercerita pada anak saya, cucu saya. Kebetulan anak saya ngak suka pada politik. Pada saat itu, saya sbgai isteri polisis, menjadi bhayangkari. Jadi ngak miskin-miskin amat.

Pertanyaan : Mbak Sandra pada saat itu kan boleh dikatakan mapan ?

Jawab : Ya itu panggilan nurani sendiri, bukan cari uang. Memang itu suatu ketidakadilan, Megawati sudah menang, kenapa masih diobok-obok lagi dan suami saya mengijinkan. Kata suami, berjuanglah ma, saya sudah berjuang, sekarang tinggal mama. Saya berjuang, dan saya tidak tahu kalau ada penyerangan itu yang bunuh membunuh begitu. Untuk saat ini sudah ngak mungkin lagi saya jadi pion, dan sekarang ini sdh aman PDI. Saya ngak tahu ke depannya nanti.

Pertanyaan : Pada saat itu mbak sehari-hari di Mimbar Bebas ?

Jawab : Ya tiap hari, ngak pernah pulang, padahal saya punya suami, kebetulan suami saya mengijinkan.

Pertanyaan : Apa yang mbak rasakan adanya kegotong royongan itu ?

Jawab : Di situ kegotong royongannya, makanan, minuman , kopi itu sumbangan. Sumbangan yang kita masak beramai-ramai, trus kita berika pada para satgas, para pengujung disana, mau makan seadanya saja. Sayur asem tempe, sayur asem ikan asin, ya enak-enak aja, ya bukan mewah-mewah, namanya juga partai kecil, dari pedagang kaki lima, dari pemulung mau kumpul di situ, dari daerah-daerah kumpul bersatu. Jadi kita

sama-sama dalam perjuangan itu, dengan itu kita tidak melihat uang, misalnya mau ada pengerahan begitu ya, mereka sudah siap tanpa ada pembayaran, mereka iklhas batin jiwa raga untuk keluarga bung karno. Mereka siap siaga semua, mereka saling berangkulan untuk kerja sama, menggandeng tangan jangan sampai Megawati itu diambil lagi, terlepas dari Megawati, kemenangan itu tidak boleh hilang dari Megawati lagi. Itulah kita siap, nyawapun kita pertaruhkan. Yang tiba-tiba penyerangan di pagi hari itu. Itu sudah tidak ada eksekutif PDI nya, bos –bos PDI ngak ada, pada lari, pada tidur.

Pertanyaan : Pada saat mimbar bebas, mbak Sandra bertindak sebagai kordinator dapur umum itu berhubungan dangan siapa saja ?

Jawab : Saya berhubungan dengan mereka dari mahasiswa, satgas, yang besar-besarnya ada sabam siraitm aberson, sutardjo, sk trimurti, itu yang kita lihat. Sukowaluyo.

Pertanyaan : Pengalaman yang berkesan pada saat mimbar bebas ?

Jawab : Ya saya berkesannya gini, kalau mereka sdg berpidato mereka menggugah, membangkitkan rasa semangat di hati kita, ya kita terpaku mendengarnya, ya mereka mengkritik , "lho sudah menang koq diobok-obok, di Tarik lagi, ya sudah terima, dan mereka juga ngak--- mungkin pemerintah menggangapnya gerah, semakin banyak pendukung Megawati, ada deklarasi, karena mereka kan ke mimbar untuk deklrasi dukungan ke Megawati. Kita senang aja melihatnya. Ya rasa bersatu itu, seperti yang dipidatokan Megawati—dari pantarei, dari kecil terus membesar, banyak lagi orang-banyak lagi orang , mereka bersatu, dari kecil kotak ini mengalir terus. Kalau mengalir seperti ini, support juga hati ini. Mereka juga tidak takut, seperti di gambir, dipukul, ditembak, mereka bersama, sampai terjadinya peristiwa 27 Juli itu. Pada peristiwa Gambir saya ngak ikut, saya jaga dapur, saya ikut kampanye bunga-bunga itu, saya jadi bunga demokrasi. Sempat juga dituduh jadi intel, karena suami saya polisi. Saya di sini berjuang. Memang suasana saling mencurigai ada, padahala sya benar –benar berjuang .Ya wajar saling mencurigai, karena mereka ingin bersih dari intel, tetapi di dalam sendiri sudah banyak intel. Intel di mana-mana, mereka berpacaran dengan pendukung Surabaya. Kita sudah bisa mengenali mereka, karena juga saya isteri polisi. Yang tidak terdeteksi sebagai intel itu ya Ewal. Tapi yang membuat stress itu waktu penyerangan itu, tukang kacang pun jadi intel, tukang sekoteng intel, tukang baju intel, tukang rokok intel. Intel yang badanya tinggi2 lewat mondar mandir pada saat malam penyerangan, paginya kan penyerangan. Tadinya malam mau diserang, malam itu begitu mengerikan karena semua aparat, kita jadi bingung. Pada saat itu dibuat pita merah, untuk menandai orang kita, ternyata mereka juga pakai pita merah.

Pertanyaan : Aturan yang lain, untuk membedakan ?

Jawab : Siaga I , jam II kita harus masuk ke dalam, bukan di depan, Pada saat malam mau penyerangan, banyak petinggi –petinggi PDI datang. Tapi setelah jam 12, mereka hilang semua. Karena ada pemberitahuan gagal penyerangan, kita tidak tahu lagi kapan penyerangan. Kita-kita ini kan tunggu perintah saja, banyak satgas, tapi mereka sudah lelah karena malam itu sudah diganjang-ganjing, jadi ketika penyerangan itu pada pagi mereka sedang tidur.

Pertanyaan : Pada mimbar bebas apakah ada kontak dengan Megawati ?

Jawab : Boro-boro kontak, pada saat Megawati datang sudah ada penjagaan yang ketat dari para satgas, itu memagari Megawati. Itu sangat seru. Kita berpikir jgan sampai terjadi dengan Megawati, kalau diri kita ini apa.

Pertanyaan : Tapi kalau yg datang misalnya Sukowaluyo, misalnya ?

Biasa saja. Ingat dulu perjuangan, kalau ada megawati kita nangis, nangis seneng.

Pertanyaan : Harapan apa yang ingin di capai ?

Jawab : Akan ada perubahan , perubahan dalam kepemimpinan, karena waktu kan Suharto, jangan Suharto terus, bosen pengin dipimpin oleh anaknya Sukarno.

Pertanyaan : Pada saat penyerangan, semua pada di dalam proses penyerangan bagaimana ?

Jawab : Pada saat penyerangan, saat banyak korban, korban yang terluka, waktu itu sempat ada perintah dari luar , semua yang ada di dalam semua harap keluar ke halaman kantor tersebut. Saya berteriak saya tidak mau keluar, kecuali Megawati yang perintahkan. Semua harus keluar, tidak ada satupun yang di dalam, mereka minta di kosongkan, kami tidak mau, kami tetap bertahan. Ternyata benar kan, mereka hanya pengin tahu beberapa kekuatan yang ada di dalam. Jadi kita tertipu juga dengan aba-aba tersebut. Tapi kita tetap tidak keluar dari halaman itu, malah kita nyanyi Indonesia Raya. Di saat kita menyanyikan Indonesia Raya, saya melihat saya naik pager saya minta tolong sama polisi, “pak polisi jangan bunuh kami” “jangan serang kami” Itu muka polisi tidak ada yang tenang, malah melototin kita semua , saya sempat melihat ke jalan Surabaya, menoleh ke jl Surabaya terlihat 3 truk polisi sedang mengganti pakaian yang merah-merah semua, saya bingung ya koq polisi yang menggantikan baju-baju merah itu yang menyerang pertama. Kalau politik, bukan polisi seharusnya, tetapi sepatu larsnya tidak di buka, malah mereka yang menyerang, seperti sudah minum obat, dyar mereka menendang pakai kaki, hancur semua itu. Kemudian ada brigif yang loncat-loncat seneng setelah berhasil memmasuki halaman PDI. Begitu merak berhasil masuk saya lari ke dalam (itu sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Makanya setiap ada lagu Indonesia raya saya menangis, air mata ini mengalir sendiri karena ingat penyerangan. Mereka ngak lihat kiri kanan langsung menghajar apa yang ada didepannya. Waktu itu saya mau ngupet diruangan Megawati, badan saya kelihatan, waduh kalau saya mati harus ada teman-teman, tidak mau sendiri, saya lari ke dapur dekat ruang mushola , supaya teman-teman bisa tahu kalau terjadi apa-apa dengan saya. Akhirnya, saya ngak bisa menuju mushola, tapi kemudian di suruh duduk seperti ayam pesakitan, semua duduk semua, semua teman-teman saya dalam keadaan terluka parah, dalam keadaan gelap, lampu mati. Penyerangan pertama oleh preman2 tapi gagal, kemudian oleh Polisi dan tentara yang memakai seragam PDI. Itu banjir darah benar-benar, tetapi tidak ada penembakan aparat. Hanya lempar-lemparan saja sama penusukan.

Pertanyaan : Ada yang mati ?

Jawab : Pada saat itu, yang dekat saya ada tiga orang yang saya pangku yang dalam keadaan terluka parah kelihatan sudah mati. Jadi 3 orang itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa dipangkuan saya. Saat itu sudah pada ngak bernyawa, saya tidak kenal, karena merek a dari luar daerah. Kalau kebayang, mah kebayang, pada saat di tahanan, saat terbangun terlihat wajah-wajah mereka. Mau nyebutin, siapa sih kamu ? Yang pingsan, mereka dibawa ke truck semua, kita ngak tahu, tapi ada yang saya tolong itu selamat, dedi, Sukarno. Ada yang terluka parah , saya kenal namanya fadli, saya ingat sekali, dr. Djarot meminta saya merapatkan kulit kepala dalam keadaan darah mengucur dan keadaan luka para h itu banyak intel di dalam yang duduk merokok santai , yang melototin orang-orang. Mereka (intel) juga membantu menyembuhkan orang yang terluka. Itu keadaan panic. Saya ngak tahu yang luka ataupun yang mati ini dibawa kemana? Banyak yang dari rumah sakit dicomot, tetapi banyak yang ngak berani berterus terang keluarganya. Mereka takut kepemimpinan Suharto, kalau lapor akan membahayakan.

Pertanyaan : bagaimana pasca penahanan atau vonis sudah ditetapkan ?

Jawab : Vonis itu rekayasa, waktu hari ini di vonis ya harus keluar hari ini. Tepat pada waktunya 4 bulan 10 hari. Sebenarnya, jaksa menahan kita ketar-ketir, dari pasal yang banyak bermacam2lah, pembunuhan, pengerusakan, penganiayaan, berapa pasal yang kita dapat, dari lima pasal yang dijatuhkan hanya satu pasal 238—tidak

mengindahkan UUD 45, jadi pagi di vonis, siang sudah keluar, semua pulang. Sore disambut dengan meriah, jadi lepas semuanya. Tapi semua itu jadinya saya jadi sorotan terus, saya menggugat karena dalam sel tersebut mendapatkan pelecehan seksual seorang oknum kadit serse datang sengaja bersama ajudanya, ke kamar sel saya untuk mengajak bersetubuh, "Tidak usah begini (sambil menunjukan salam metal, tapi begini (tanda untuk bersetubuh). Saya bilang E copot ini kamu (seragam) , kalau mau mengajak bersetubuh, buang hajatmu, larilah sana ke tempat mesum" Jangan saya, tunggu ya nanti setelah keluar dari penjara, saya gugat kamu" (Kolonel Paimin AB, Kadit Serse). Jadi kita menggugat, dan kebetulan saya dipanggil ke Belanda, jadi pada saat sidang-sidang ada di Belanda. Tapi pinter, saksi-saksi yang yang dihadirkan tidak tahu apa-apa, kenapa tidak ajudanya yang dipanggil, tapi polisi-polisi yang jadi saksi yang ada dalam sel. Mereka ngaku tidak tahu apa2 tapi atasan menyuruh jadi saksi . Saksinya sang ajudan ini kemana ? mereka ngak berani tampilkan dipersidangan, sampai ajudanya melihat komandanya, wah ini cari penyakit.

Pertanyaan : Pengalaman lain ?

Jawab : Ya waktu pertama dari Polda di pindah ke Pondok Bambu. Ini pengalaman yang menyeramkan, karena Podak Bambu sudah rutan, jadi semua tahanan, bergabung dengan orang-orang yang begitu banyak yang kita belum mengerti dan banyak kriminalnya semua, nanti kita mau diapain kalau begini, begitu, oh nanti kami akan diajak rebut, segala macama, dipalak-palak segala, samapai kita mau dipidahin ke Pondok Bambu uang-uang kita jahit dicelana training, trus kita sama-sama berempat perempuan berlagak seperti orang pacaran, karena dlam tahanan itu banyak yang jadi lesbi , itu berkesan banget. Saya membawahin 20 orang perempuan laki, semua bertopangnya ke saya, jadi saya harus siap, tidak boleh nangis, apapun yang terjadi, else, Martha hutagalung, semua berlindung sama saya, saya melihat yang bertato dari leher sampai ujung kaki, ini yang membuat hati jadi ciut. Ma itu, ma itu, sambil tunjuk tahanan wanita lain. "Tenang , kalian harus kelihatan berpasang-pasangsan, karena kalau lesbi harus digitukan. Ya akhirnya ya alhamdulilah tidak terjadi apa 2. Ketika kami di antar oleh kepala rutan ke blok menuju kamar tahanan. Wah ini kita mau diapain, tapi saya piker hujan batu, hujan golok kita bisa atasi, kenapa kita ngak bisa atasi orang-orang di sini. Ya kita pasrah mau diapain, satu langkah menuju blok mereka diam, dua langkah mereka teriak "hidup PDI" . Kita tidak digabung dengan mereka. Tahanan politik terpisah dengan mereka, tapi yang namanya "jegger"" brengos " pasti. Sore jam 4 sudah ada pemalak itu, lesbi, modelnya kaya laki-laki semua, dia langsung ke sel kita "punya rokok" – tidak ada, "punya gula" –tidak ada, "punya rokok"--- tidak ada, punya teh--- tidak ada. "Punya apa lu di penjara"—tidak punya apa2. Kita disini berempat baru masuk—"Gembel" tapi saya liatin dia. Kan sel kita ada jemuran ada pakaian laki-laki, baju kaos laki-laki. Ini ngak bener, ini kan tahanan perempuan. Hari pertama, saya diam, hari kedua, saya diam, hari ketiga saya harus mengambil sikap. Itu pada malam hari, saya lihat mereka berantem pada gigitan putting, jambak-jambakan. Ini tahanan kan seperti kandang ayam, tidak ada sekat-sekat. Saling berhadap-hadapan, mereka berantem kita bisa lihat, gara –gara meributin sebatang korek mereka main tanjok-tonjokan cakar-cakar-cakaran . Yang namanya, yang jadi pemimpin blok "brengos" di situ, saya harus lawan saya, karena di sini tidak boleh ada pemerasan, karena semua yang ada di dalam itu semua orang bermasalah. Jadi saya tidak bisa tidur, saya berempat, tiga orang sudah tidur, saya tidur muka saya tutupin pakai celana panjang atau kaos karena kalau saya menangis mereka tidak tahu, karena kalau menangis mereka tahu ciut juga, karena yang dituakan saya . Mereka berlindung sama saya , tapi bagaimana caranya saya kelihatan tenang-tenang walaupun hati saya sendiri tidak tenang, saya menangis , saya menghujat –hujat "kurang ajar kamu Suharto" kurang ajar kamu suryadi, kurang aja

kamu Fatimah achmad". Gara-gara kalian saya masuk kesini, tapi saya tidak menyerah. Sambil menngis itu saya tutupin terus muka saya. Mak nangis ya" ngak kata saya. Waktu itu saya berpikir, pakai apa melawan mereka ! Mereka sudah cukup lama di dalam pemjara, tetapi saya harus lawan, dan tidak ada itu lesbi-lesbian, palak-memalak tidak ada. Ini yang membuat saya makin kenceng untuk melawan, saya tidak bilang sama teman-teman saya bahwa saya akan hajar ini orang. Pagi-pagi, barangkali saya salah anggapan "saya pikir dia sendirian kepala blok, sya pikir yang lesbi Cuma dia seorang, ternyata banyak, beberapa pasang. Jadi saya jam 8, pintu sel di buka (lonceng sudah berbunyi) , pintu sel di buka, saya langsung keluar, saya berdiri di depan sel saya , dan saya bicara "hai sini panggil yang namanya brengos di sini ". Panggil kepala blok disini, mereka ketakutan. " Ngak ada" --- Lalu siapa, itu panggil orang yang namanya Boy, . "Papa boy dipangil orang PDI" saya masih berdiri saja depan sel, Mereka para lesbi tadi pada "suit" suit", langsung ada 8 orang datang dari ujung ke ujung bergerombol menuju sel saya. Papa boy ini dikawal oleh mereka (lesbi semua) seperti orang mau tarung dipanggung di jalan , koq ini banyak . Melihat begitu banyak, buyar pikiran saya , saya mau ngapain ini, pikiran tonjok-tonjokan ngak apa ya , saya harus ngomong apa, teman-teman saya bertiga berada di dalam sel. " Mak mau ngapain" – Sudah kalian di dalam saja" . Dia datang, apa yang saya lakukan mereka rame-rame, sudah saling berhadapan . (Seolah bukan diri saya) . "Mau apa panggil saya. Mulut ini reflek : Iya saya mau lawan kamu" Saya Tarik kerah bajunya, "hai kamu tahu, preman kelas kakap Suharto saya lawan, apalgi kamu". Dia ketakutan, terus tiba-tiba mereka bertekuk lutut. Saya tidak ngapa-ngapain. Tidak siapa yang malakin saya, Saya peringatkan sekarang ya tidak palak memalak, tidak ada suruh menyuruh di sini. Karena orang yang ada di rutan ini adalah orang yang bermasalah, tidak ada lagi saat ini pemerasan. Semua di sini kepala. Langsung ke 8 orang memanggul saya"hidup mama Sandra" . saya pikir kenapa saya harus kalah dengan mereka yang maling jemuran , nyopet penipuan, kasus teri seperti itu. Sekarang kita brjuang untuk masyarakat semuanya, saya ngak mau di injek-injek kaya gini. Itu semua, megawati ngak kurang kasih makanan ke rutan kita bagiin ke semua sel, sampai pada sel yang laki-laki. Akhirnya saya mengepalai seluruh blok di rutan laki dan perempuan. Mereka pada takut, kalau saya bilang diam, mereka pada diam semua.

3 kali di tahan membela Mega, 27 juli, Nasakom 6 bulan , pelecehan terhadap aparat 8 bulan. 97 akhir. Saya bilang Paimin AB tidak sekolah, ya pada zaman itu yang benar di salahin yang salah dibenerin.

Sehari sebelum penyerangan, saya bawa mobil ke DPP PDI, suami saya menjemput saya, karena dia anggota dia tidak bilang mau diserang. Dia bilang, "Mama pulang yok" ngak ah, saya mau di sini aja. Kamu ngak takut samapi ada kejadian rebut-ribut. "kalau ada penyerangan ambil kantor". Masak ambil kantor sampai serang segala, kamu ngak takut tumpah darah ? ngak lah ! Hanya dia bicara begitu aja, saya mau berjuang pa ! Bener kamu mau berjuang ? nangis air matanya keluar . Saya ijinkan ma, kalau kamu benar-benar mau berjuang, hati-hati ya ? nangis dia. "pa bolehkan saya disini, silahkan kamu mau berjuang. Itu jumat sore. Pa bawa mobilnya aja, di bawa mobil itu sama suami saya.

Pada saat saya mau di hajar pakai parang, ada yang teriak "jangan itu isteri komandan" oh itu dia ini anak buah laki gue. Karena saya tangkis dulu dengan tiang bendera, nah yang kedua kalinya ada teriakan seperti itu. Waktu ditangkap itu saya ngak mau cerita kalau saya bayangkhari. Pada pemeriksaan di polda saya bilang lulusan SD.